PEMERINTAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT

RPJMD
PROVINSI NTB
TAHUN 2025-2029

INDONESIA EMAS 2045

NTB EMAS 2045

VISI :
PROVINSI KEPULAUAN YANG MAJU, KUAT AMAN BERKELANJUTAN DAN SEJAHTERA

2045
NTB EMAS

Bangkit Bersama

menuju

NTB Provinsi Kepulauan

yang Makmur Mendunia

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang :

a. Sesuai amanat Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

b. bahwa penyusunan RPJMD dilakukan untuk menjamin kesinambungan pembangunan daerah, terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang menyentuh langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat;

c. bahwa sesuai amanat ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);

7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 207).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 20 (dua puluh) tahun sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk periode 5 (lima) tahun sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang perencanaan pembangunan daerah yang meliputi perencanaan jangka panjang, jangka menengah, perencanaan tahunan daerah serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 2

(1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

(3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
a. dasar hukum bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra;
b. dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan memperhatikan tugas dan fungsi serta kewenangan dalam mencapai sasaran pembangunan Daerah yang termuat di dalam RPJMD;
c. dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD;
d. pedoman dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD; dan
e. pedoman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan Daerah.

(4) RPJMD wajib ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan pemerintah dengan melibatkan pelaku pembangunan nonpemerintah.

BAB II
DOKUMEN RPJMD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2025-2029

Pasal 3

(1) Dokumen RPJMD sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika paling sedikit memuat:
a. pendahuluan;
b. gambaran umum daerah;
c. visi, misi dan program prioritas pembangunan daerah;
d. program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
e. penutup.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD.

(4) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur.

Pasal 5

(1) Target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat dalam RPJMD bersifat indikatif.

(2) Perubahan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terjadi pada setiap tahun pelaksanaan RPJMD disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD dalam sidang paripurna untuk mendapatkan keputusan.

(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam RKPD.

Pasal 6

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan perencanaan pembangunan daerah, Gubernur pada tahun terakhir masa jabatannya diwajibkan menyusun RKPD untuk Tahun pertama periode Gubernur berikutnya.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun pertama oleh Gubernur terpilih.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 26 September 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

LALU MUHAMAD IQBAL

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 26 September 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

LALU M. FAOZAL

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : (7-136/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT SEKRETARIAT DAERAH

Dr. HUBAIDI, SH., MH.
NIP. 19790507 200501 1 012

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Provinsi Nusa Tenggara Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809). Kedudukan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai sebuah daerah otonom selama ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Desain pengaturan Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Undang-Undang tersebut masih menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS) 1950 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah sebagai acuan, yang pada dasarnya tidak relevan lagi dengan dinamika dan perubahan hukum masyarakat.

Berdasarkan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara berjangka mulai untuk jangka panjang 20 (dua puluh) tahun, jangka menengah 5 (lima) tahun, dan jangka waktu tahunan. Tahapan pembangunan jangka panjang Daerah Nusa Tenggara Barat terdiri dari 4 (empat) tahapan pembangunan jangka menengah Daerah yaitu tahap I Fondasi (2025-2029), tahap II Akselerasi (2030-2034), tahap III Pemantapan (2035-2039), dan tahap IV Perwujudan (2040-2045).

Dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan jangka panjang Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2045, maka dalam RPJPD telah ditetapkan arah kebijakan pembangunan jangka menengah setiap tahapan. RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 tahap pertama yang diarahkan pada penguatan fondasi transformasi menjadi lebih kokoh dengan mendayagunakan modal pembangunan yang telah dimiliki dan meningkatkan capaian kinerja yang belum optimal sehingga dapat mendukung proses akselerasi pada tahapan berikutnya.

Karena lampiran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang tidak dipisahkan dari Peraturan Daerah ini, maka batang tubuh dari Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2029 cukup terdiri dari 7 (tujuh)

Pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian, muatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, hubungan konsultasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINISI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 213

Sembalun

Sembalun adalah nama sebuah kecamatan di Lombok Timur, jaraknya sekitar 2,5 jam dari kota Mataram. Memiliki luas wilayah 217,08 Km2, terdiri dari 6 desa, salah satunya adalah desa Sembalun yang terletak di kaki gunung Rinjani ini menyimpan sejuta pesona yang tidak terelakkan oleh wisatawan yang berkunjung, hingga sebutan surga kecil sering disematkan pada desa ini.

Kab. Lombok Timur, Provinsi NTB
8°21'40.8"S 116°31'26.2"E

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GRAFIK ix
DAFTAR GAMBAR xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 2
1.3 Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya 6
1.4 Maksud Dan Tujuan 8
1.5 Sistematika Penulisan 9
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH 26
2.1 Aspek Geografi dan Demografi 26
2.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah 26
2.1.2 Potensi Sumber Daya Alam 28
2.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup 54
2.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan 57
2.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas 63
2.1.6 Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim 65
2.1.7 Demografi 69
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 76
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi 76
2.2.2 Kesehatan Untuk Semua 89
2.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata 94
2.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif 101
2.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju 103
2.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif 105
2.3 Aspek Daya Saing Daerah 110
2.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia 110
2.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi 111

2.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru 118
2.3.4 Transformasi Digital 120
2.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global 123
2.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi 124
2.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro 132
2.4 Aspek Pelayanan Umum 134
2.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif 134
2.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial 138
2.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan 139
2.4.4 Kinerja setiap urusan pemerintahan daerah 141
2.5 Gambaran Keuangan Daerah 253
2.5.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu 253
2.5.2 Neraca Daerah 281
2.5.3 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 286
2.5.4 Kerangka Pendanaan 292
2.5.5 Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya 306
2.6 Permasalahan Dan Isu Strategis Daerah 310
2.6.1 Permasalahan Pembangunan Daerah 310
2.6.2 Isu Strategis 320
BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 338
3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah 344
3.1.1. Visi dan Misi 344
3.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah 351
3.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah 381
3.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah 381
3.2.2. Sepuluh Program Unggulan (PU) sebagai Prioritas Daerah 500
3.2.3. Proyek Strategis Daerah 572
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 558
4.1 Program Perangkat Daerah 558
4.2 Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah 652
4.2.1 Indikator Sasaran Pembangunan Kewilayahan Provinsi NTB 652

4.2.2 Indikator Kinerja Utama 653
4.2.3 Indikator Kinerja Daerah 654
BAB V PENUTUP 686
5.1 Kaidah Pelaksanaan 686
5.1.1 Sinergitas Perencanaan Nasional, Provinsi, dan Kab/Kota 686
5.1.2 Sinergitas Pendanaan Pembangunan Daerah 688
5.2 Kerangka Pengendalian 689
5.2.1 Pengendalian Pelaksanaan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 689
5.2.2 Manajemen Risiko Pembangunan Nasional dan Daerah 691
5.2.3 Tata Kelola Pembangunan Daerah 693
5.3 Kesimpulan 693

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Menurut Kab/Kota se-NTB Tahun 2024 28
Tabel 2. 2 Daerah irigasi Provinsi NTB Tahun 2024..... 32
Tabel 2. 3 Populasi Ternak Tahun 2020-2024 40
Tabel 2. 4 Kawasan Konservasi Perairan Tahun 2024..... 49
Tabel 2. 5 Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa 51
Tabel 2. 6 Sumber Daya dan Cadangan Mineral Logam Tahun 2023 52
Tabel 2. 7 Sumber Daya dan Cadangan Mineral Bukan Logam Tahun 2023 52
Tabel 2. 8 Neraca Bahan makanan di Provinsi NTB Tahun 2020-2024 59
Tabel 2. 9 Konsumsi Listrik Per Kapita Provinsi NTB Tahun 2024..... 60
Tabel 2. 10 Jumlah Sungai Dirinci Menurut Wilayah Sungai di NTB..... 61
Tabel 2. 11 Potensi Ketersediaan, Kebutuhan dan Proyeksi Kebutuhan Air di NTB 63
Tabel 2. 12 Penurunan Intensitas Emisi GRK Provinsi NTB..... 65
Tabel 2. 13 Jenis dan Jumlah Kejadian Bencana Tahun 2020-2024 67
Tabel 2. 14 Capaian 7 Prioritas IKD Kabupaten Kota Se NTB Tahun 2024..... 68
Tabel 2. 15 Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) Menurut Kabupaten-Kota se-NTB Tahun 2020-2024..... 72
Tabel 2. 16 Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2020-2024 74
Tabel 2. 17 PDRB ADHK Kab/Kota se-NTB Tahun 2019 - 2024 (Rp.Trilyun)..... 80
Tabel 2. 18 PDRB ADHB Kab/Kota se-NTB Tahun 2019 - 2024 (Rp.Trilyun)..... 81
Tabel 2. 19 Angka Literasi dan Numerasi Provinsi NTB Tahun 2020-2024 96
Tabel 2. 20 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi NTB Tahun 2024 98
Tabel 2. 21 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi NTB Tahun 2020-2024..... 99
Tabel 2. 22 Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) Menurut Dimensi Provinsi NTB Tahun 2024 99
Tabel 2. 23 Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) NTB Tahun 20220 - 2024 99
Tabel 2. 24 Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan Provinsi NTB Tahun 2017-2024 107
Tabel 2. 25 Rasio PDRB Industri Pengolahan (ADHB) Tahun 2020-2024.....112
Tabel 2. 26 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum (ADHB) Tahun 2020-2024.....112
Tabel 2. 27 Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif Tahun 2013-2021 116
Tabel 2. 28 Kondisi Ekonomi Kreatif Provinsi NTB Tahun 2023 116
Tabel 2. 29 Indeks Ekonomi Hijau 119
Tabel 2. 30 Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer Tahun 2020-2024 120
Tabel 2. 31 PDRB Atas Dasar Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (miliar rupiah) Tahun 2020-2024 124
Tabel 2. 32 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur 125
Tabel 2. 33 Rasio Pajak Terhadap PDRB 133
Tabel 2. 34 Indeks Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 139
Tabel 2. 35 Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi NTB.....139
Tabel 2. 36 Perbandingan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Wilayah Bali-Nusa Tenggara Tahun 2022-2024 140
Tabel 2. 37 Progres Ketersediaan Satuan Pendidikan Tahun 2020 - 2024 141

Tabel 2. 38 Rasio Guru per Jenjang Terhadap Peserta Didik Tahun 2020 - 2024.....142
Tabel 2. 39 Angka Partisipasi Kasar (APK) di Provinsi NTB Tahun 2020-2024.....143
Tabel 2. 40 Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi NTB Tahun 2020 -2024.....143
Tabel 2. 41 Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Provinsi NTB Thn 2019-2024 144
Tabel 2. 42 Angka Melanjutkan dari Lulusan SMA ke Perguruan Tinggi 144
Tabel 2. 43 Angka Putus Sekolah (DO) SMA dan SMK Provinsi NTB dari Tahun 2017/2018 - 2023/2024 145
Tabel 2. 44 Rata-rata Lama Sekolah Provinsi NTB Tahun 2019-2024.....146
Tabel 2. 45 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan 147
Tabel 2. 46 Usia Harapan Hidup Per Kab/Kota Tahun 2020-2024.....148
Tabel 2. 47 Jumlah Kasus Kematian Bayi (AKB) di Provinsi NTB Thn 2020-2024.....149
Tabel 2. 48 Proporsi Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Provinsi NTB Tahun 2020-2024 150
Tabel 2. 49 Jumlah Kasus Kematian Ibu (AKI) di Provinsi NTB Tahun 2020-2024.....150
Tabel 2. 50 Proporsi Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup di Provinsi NTB Tahun 2020-2024 151
Tabel 2. 51 Capaian Indikator Pendukung Kematian Bayi dan Kematian Ibu di Provinsi NTB Tahun 2020 – 2024 (dalam %) 151
Tabel 2. 52 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Tahun 2020-2024.....152
Tabel 2. 53 Capaian Cakupan Desa ODF Tahun 2019-2024 153
Tabel 2. 54 Capaian Kinerja Infrastruktur Provinsi NTB Tahun 2020 - 2024 153
Tabel 2. 55 Backlog Kepenghunian dan Kepemilikan Di Provinsi NTB.....155
Tabel 2. 56 Jumlah Rumah Tangga Yang Menempati Rumah Tidak Layak Huni di NTB Tahun 2020-2024 156
Tabel 2. 57 Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Provinsi NTB.....158
Tabel 2. 58 Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Yang Tertangani Sampai Dengan Tahun 2024 Di Provinsi NTB.....159
Tabel 2. 59 Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024 159
Tabel 2. 60 Data Pelanggaran Atas Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur di Provinsi NTB Tahun 2020-2024 161
Tabel 2. 61 Jumlah Bencana yang Terjadi di Provinsi NTB Tahun 2020-2024 162
Tabel 2. 62 Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) menurut Kab/Kota di Provinsi NTB Tahun 2024 164
Tabel 2. 63 Pemerlu Pelayanan Sosial (PPKS) di Provinsi NTB Tahun 2024 164
Tabel 2. 64 Jumlah Tenaga Kerja, TPAK dan TPT di Provinsi NTB Tahun 2019 - 2024.....166
Tabel 2. 65 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2020 –Agustus 2024 167
Tabel 2. 66 Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja menurut Sektor Ekonomi/Lapangan Usaha Tahun 2020 – 2024 (Persen) 168
Tabel 2. 67 Distribusi Penduduk Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan, Tahun 2020-2024 169
Tabel 2. 68 Rekapitulasi konflik Pertanahan yang difasilitasi Biro Pemerintahan Tahun 2024 170

Tabel 2. 69 Rekapitulasi Tanah Terindikasi Terlantar Berdasarkan Hak Guna Usaha (HGU) s.d Tahun 2023 170
Tabel 2. 70 Perkembangan kasus kekerasan terhadap anak menurut Kab/Kota Tahun 2020-2024 175
Tabel 2. 71 Perkembangan kasus kekerasan terhadap perempuan menurut Kab/Kota Tahun 2020-2024 176
Tabel 2. 72 Kasus Perkawinan Anak Berdasarkan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Tinggi Agama Provinsi NTB Menurut Kab/Kota 177
Tabel 2. 73 Perkembangan Kualitas Konsumsi Pangan Penduduk NTB 179
Tabel 2. 74 Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi NTB Tahun 2020-2024 181
Tabel 2. 75 Rekapitulasi Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Kab/Kota Se-NTB Sampai Dengan Desember 2024 183
Tabel 2. 76 Rincian Status Desa tahun 2020 – 2024 184
Tabel 2. 77 Rekapitulasi Jumlah Lembaga Adat di Provinsi NTB Tahun 2019-2024 185
Tabel 2. 78 Posyantek yang telah terbentuk di Provinsi NTB 186
Tabel 2. 79 Rekapitulasi Perkembangan BUMDes Aktif di NTB 2020-2024 188
Tabel 2. 80 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk NTB Tahun 2020-2024 188
Tabel 2. 81 Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan Provinsi NTB 192
Tabel 2. 82 Jumlah Armada Antar Kota dalam Provinsi Tahun 2020-2024 193
Tabel 2. 83 Rasio Fatalitas Provinsi NTB Tahun 2020 – 2024 194
Tabel 2. 84 Kondisi Koperasi di Provinsi NTB Tahun 2020-2024 196
Tabel 2. 85 Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Penanaman Modal pada DPMPTSP Provinsi NTB Tahun 2020 – 2024 197
Tabel 2. 86 Perkembangan Investasi PMDN dan PMA di Provinsi NTB Tahun 2020 - 2024 198
Tabel 2. 87 Realisasi Investasi PMDN Menurut Kab/Kota Tahun 2020 – 2024 199
Tabel 2. 88 Realisasi Investasi PMA Menurut Kab/Kota Periode Tahun 2020-2024 200
Tabel 2. 89 Realisasi Investasi PMDN Menurut Sektor Periode Tahun 2020–2024 201
Tabel 2. 90 Realisasi Investasi PMA Menurut Sektor Periode Tahun 2020–2024 202
Tabel 2. 91 Jumlah Bidang Perizinan (Izin dan Non Izin) yang Diterbitkan 204
Tabel 2. 92 Prestasi Olahraga Atlet Provinsi NTB Tahun 2020 – 2024 206
Tabel 2. 93 Jumlah Prasarana Olahraga di NTB Tahun 2024 210
Tabel 2. 94 Perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Tahun 2020 – 2024 216
Tabel 2. 95 Pengunjung Museum Negeri Provinsi NTB Tahun 2020-2024 217
Tabel 2. 96 Jumlah Pengunjung ke Perpustakaan dan Anggota Perpustakaan Tahun 2020 – 2024 217
Tabel 2. 97 Jumlah Perpustakaan Komunitas Di NTB Tahun 2020-2024 218
Tabel 2. 98 Upaya Pengelolaan Arsip Tahun 2020 – 2024 218
Tabel 2. 99 Capaian Kinerja urusan kelautan dan perikanan Provinsi NTB 219
Tabel 2. 100 Jumlah Tamu Menginap dan Rata-rata Lama Menginap Pada Hotel Bintang Tahun 2020-2024 221
Tabel 2. 101 Produksi Tanaman Pangan Tahun 2020-2024 224
Tabel 2. 102 Produksi Tanaman Hortikultura Tahun 2020-2024 225

Tabel 2. 103 Produksi Komoditi Tanaman Perkebunan Tahun 2020 -2024 226
Tabel 2. 104 Data dan Informasi Wilayah Usaha Perizinan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Pada Balai KPH (L/P) 227
Tabel 2. 105 Data dan Informasi Wilayah Usaha Perizinan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Pada Balai KPH (L/P) 227
Tabel 2. 106 Rincian Luas Areal Kegiatan RHL Tahun 2020-2024 di Provinsi NTB 228
Tabel 2. 107 Sebaran Desa Berlistrik di Provinsi NTB Tahun 2024 230
Tabel 2. 108 Pemasangan Listrik Murah dan Hemat Tahun 2020-2024.....231
Tabel 2. 109 Volume dan Nilai Ekspor Menurut Jenis Komoditi di Provinsi NTB Tahun 2021-2024.....233
Tabel 2. 110 PDRB ADHK sektor Industri Pengolahan Provinsi NTB Tahun 2020 – 2024 234
Tabel 2. 111 Pertumbuhan Industri Provinsi NTB tahun 2020 – 2024.....234
Tabel 2. 112 Perkembangan Transmigran Keluar Provinsi NTB dan Tujuan Daerah Tahun 2019 – 2024.....235
Tabel 2. 113 Capaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Pemerintah Provinsi NTB pada tahun 2023 dan 2024 236
Tabel 2. 114 Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2024 237
Tabel 2. 115 Opini BPK RI Tahun 2020-2024.....239
Tabel 2. 116 Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD Tahun 2020-2024 239
Tabel 2. 117 Rentang dan Kategori Indeks Kapasitas Fiskal Daerah 241
Tabel 2. 118 Capaian Indeks Profesionalisme ASN Tahun 2020-2024 242
Tabel 2. 119 Persentase capaian pemanfaatan hasil kelitbangan (lokus NTB) Tahun 2020-2024.....245
Tabel 2. 120 Capaian Indek Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Tahun 2021-2024 246
Tabel 2. 121 Capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Provinsi Tahun 2021-2024 246
Tabel 2. 122 Jumlah Produk hukum yang dihasilkan Tahun 2020 – 2024.....247
Tabel 2. 123 Jumlah Perda/Perbup/Perwal yang Difasilitasi dan Dievaluasi Pada Tahun 2023-2024.....248
Tabel 2. 124 Penyelesaian Sengketa Hukum (Perkara) Provinsi NTB Tahun 2024 248
Tabel 2. 125 Penyelesaian Sengketa Hukum (Perkara) Non Litigasi Provinsi NTB 251
Tabel 2. 126 Capaian Indikator Inspektorat Provinsi NTB Tahun 2024 252
Tabel 2. 127 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi NTB Tahun 2020-2024.....256
Tabel 2. 128 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Provinsi NTB Tahun 2020-2024 276
Tabel 2. 129 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi NTB Tahun 2020-2024 280
Tabel 2. 130 Neraca Daerah Provinsi NTB Tahun 2020-2024 281
Tabel 2. 131 Proyeksi Kerangka Pendanaan Daerah Provinsi NTB 295
Tabel 2. 132 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi NTB Tahun 2026 - 2030 303

Tabel 2. 133 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi NTB 304
Tabel 2. 134 Rumusan Isu Strategis Daerah RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029.....334
Tabel 3. 1 Lima Sasaran Visi NTB Emas 2045 339
Tabel 3. 2 Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi NTB 2025-2029 372
Tabel 3. 3 Rumusan Arah Kebijakan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 390
Tabel 3. 4 Sasaran dan Indikator Pembangunan Kewilayahan Kab/Kota.....415
Tabel 3. 5 Indikasi Intervensi Pusat Terhadap arah kewilayanan Kota Mataram dalam RPJMN Tahun 2025-2029 420
Tabel 3. 6 Indikasi Intervensi Pusat Terhadap arah kewilayanan Lombok Barat 422
Tabel 3. 7 Indikasi Intervensi Pusat Terhadap arah kewilayanan Lombok Tengah.....425
Tabel 3. 8 Indikasi Intervensi Pusat Terhadap arah kewilayanan Lombok Utara 427
Tabel 3. 9 Indikasi Intervensi Pusat Terhadap arah kewilayanan Lombok Timur.....430
Tabel 3. 10 Indikasi Intervensi Pusat Terhadap arah kewilayanan Kabupaten Bima.....437
Tabel 3. 11 Indikasi Intervensi Pusat Terhadap arah kewilayanan Kabupaten Dompu 441
Tabel 3. 12 Indikasi Intervensi Pusat Terhadap arah kewilayanan Kabupaten Sumbawa dalam RPJMN Tahun 2025-2029 444
Tabel 3. 13 Indikasi Intervensi Pusat Terhadap arah kewilayanan Kabupaten Sumbawa Barat dalam RPJMN Tahun 2025-2029 449
Tabel 3. 14 Dukungan Provinsi NTB untuk Indikasi Lokasi Prioritas RPJMN Tahun 2025-2029 469
Tabel 3. 15 Proyek Strategis Nasional.....481
Tabel 3. 16 Kegiatan Prioritas Utama Program Unggulan 501
Tabel 3. 17 Program Prioritas RPJMD Provinsi NTB 2025-2029.....506
Tabel 4. 1 Dukungan 11 KPU untuk Provinsi NTB 558
Tabel 4. 2 Program dan Indikator Kinerja Per Urusan Tahun 2025-2030.....592
Tabel 4. 3 Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi NTB Tahun 2025-2029 652
Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama Provinsi NTB 653
Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Kunci 655

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1 Nilai Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku NTB Tahun 2020-2024 30
Grafik 2. 2 Produksi Tanaman Pangan Tahun 2020-2024 33
Grafik 2. 3 Luas Panen Tanaman Pangan Tahun 2020-2024 34
Grafik 2. 4 Perkembangan Kontribusi Nilai dan Persentase Terhadap PDRB ADHB Komoditi Tanaman Pangan NTB Tahun 2020-2024 34
Grafik 2. 5 Produksi Tanaman Hortikultura Tahun 2020-2024..... 35
Grafik 2. 6 Luas Panen/Tanaman Menghasilkan Tanaman Hortikultura..... 36
Grafik 2. 7 Perkembangan Kontribusi Nilai dan Persentase Terhadap PDRB ADHB Komoditi Tanaman Hortikultura NTB Tahun 2020-2024 36
Grafik 2. 8 Luas Panen/Tanaman Menghasilkan Tanaman Perkebunan Tahun 2020-2024 37
Grafik 2. 9 Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2020-2024..... 38
Grafik 2. 10 Perkembangan Kontribusi Nilai dan Persentase Terhadap PDRB ADHB Komoditi Tanaman Perkebunan NTB Tahun 2020-2024 39
Grafik 2. 11 Perkembangan Kontribusi Nilai dan Persentase Terhadap PDRB ADHB Komoditi Peternakan NTB Tahun 2020-2024..... 41
Grafik 2. 12 Luas Kawasan Non Hutan di Provinsi NTB Tahun 2024..... 42
Grafik 2. 13 Luas Kawasan Hutan di Provinsi NTB Tahun 2024..... 43
Grafik 2. 14 Perkembangan Capaian Produksi Perikanan Tahun 2020- 2024 44
Grafik 2. 15 Perkembangan Produksi Perikanan berdasarkan komoditas Unggulan Tahun 2020-2024 45
Grafik 2. 16 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Sub Sektor Perikanan Tahun 2020 – 2024..... 45
Grafik 2. 17 Perkembangan Nilai Tukar Pertanian Sub-Sektor Perikanan..... 46
Grafik 2. 18 Perkembangan Produksi Garam Provinsi NTB Tahun 2020-2024..... 49
Grafik 2. 19 Bauran Energi Daerah Provinsi NTB 53
Grafik 2. 20 Capaian Indeks Ketahanan Pangan NTB Tahun 2020-2024 57
Grafik 2. 21 Perkembangan PoU (Prevalensi of Undernourishment) atau prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan dibawah kebutuhan minimum energi Provinsi NTB Tahun 2020-2024 59
Grafik 2. 22 Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum Tahun 2020-2024..... 61
Grafik 2. 23 Perkembangan IKLH Provinsi NTB Tahun 2019-2024..... 63
Grafik 2. 24 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman 64
Grafik 2. 25 Indeks Risiko Bencana Provinsi NTB Tahun 2018-2024 66
Grafik 2. 26 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk NTB..... 69
Grafik 2. 27 Jumlah Penduduk NTB Menurut Jenis Kelamin 2020-2024..... 70
Grafik 2. 28 Kepadatan Penduduk NTB (Km2) Tahun 2020-2024..... 71
Grafik 2. 29 Angka Kelahiran Total/ Total Fertility Rate (TFR)..... 72
Grafik 2. 30 Angka Kelahiran menurut Kelompok Umur Ibu (Age Spesific Fertility Rate/ASFR) 15-19 Tahun dan Provinsi NTB 73

Grafik 2. 31 Struktur Umur Penduduk NTB Tahun 2024 75
Grafik 2. 32 Persentase Penduduk Lansia, 1970-2020 75
Grafik 2. 33 Tren Migrasi Seumur hidup SP1971-LongForm SP2020 76
Grafik 2. 34 Pertumbuhan ekonomi NTB selama periode tahun 2019-2024 77
Grafik 2. 35 Pertumbuhan Ekonomi Regional Bali-Nusra 2019-2023 77
Grafik 2. 36 Angka Kemiskinan Provinsi NTB 2019-2024 78
Grafik 2. 37 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kab/Kota Tahun 2020-2024 (Persen) 79
Grafik 2. 38 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kab/Kota Tahun 2020-2024 (Ribu Jiwa) 80
Grafik 2. 39 PDRB Per Kapita 82
Grafik 2. 40 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di NTB Tahun 2020-2024 83
Grafik 2. 41 TPT Menurut Tingkat Pendidikan Provinsi NTB Tahun 2020-2024 83
Grafik 2. 42 Tingkat Pengangguran Terbuka NTB Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020-2024 ... 84
Grafik 2. 43 TPT Berdasarkan Kab/Kota Provinsi NTB 2020-2024 84
Grafik 2. 44 Perkembangan Gini Ratio NTB 2019-2024 85
Grafik 2. 45 Gini Rasio Provinsi NTB Menurut Kab/Kota Tahun 2020-2024 Pulau Lombok 86
Grafik 2. 46 Gini Rasio Provinsi NTB Menurut Kab/Kota Tahun 2020-2024 Pulau Sumbawa .. 87
Grafik 2. 47 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi NTB Tahun 2020-2024 88
Grafik 2. 48 Angka Harapan Hidup Per Kab/Kota Tahun 2020-2024 89
Grafik 2. 49 Perbandingan AHH Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2020-2024 90
Grafik 2. 50 Angka Kematian Bayi di Provinsi NTB 90
Grafik 2. 51 Jumlah Kasus Kematian Bayi (AKB) di Provinsi NTB Thn 2020-2024 91
Grafik 2. 52 Jumlah Kematian Ibu di Provinsi NTB Tahun 2019 - 2024 91
Grafik 2. 53 Capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) di Provinsi NTB 2019-2024 92
Grafik 2. 54 Prevalensi Stunting Provinsi NTB Tahun 2019-2024 (Data E-PPGBM) 93
Grafik 2. 55 Prevalensi Stunting Provinsi NTB Tahun 2019-2024 (Data Survei) 93
Grafik 2. 56 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi NTB Tahun 2020-2024 94
Grafik 2. 57 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Jenis Kelamin Provinsi NTB 95
Grafik 2. 58 Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi NTB Tahun 2020-2024 95
Grafik 2. 59 Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Jenis Kelamin Provinsi NTB 96
Grafik 2. 60 Indeks Literasi Digital Tahun 2020-2023 100
Grafik 2. 61 Indeks Masyarakat Digital Indonesia Provinsi NTB Tahun 2022-2024 101
Grafik 2. 62 Cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja Pulau Lombok 101
Grafik 2. 63 Cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja Pulau Sumbawa 102
Grafik 2. 64 Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk NTB Tahun 2020-2024 102
Grafik 2. 65 Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Provinsi NTB Tahun 2021-2023 103
Grafik 2. 66 Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi NTB Tahun 2019 – 2023 104
Grafik 2. 67 Indeks Perlindungan Anak (IPA) Provinsi NTB Tahun 2019-2023 105
Grafik 2. 68 Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Provinsi NTB Tahun 2019-2023 106
Grafik 2. 69 Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi NTB Tahun 2020-2023 106
Grafik 2. 70 Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi NTB Tahun 2020-2023 108

Grafik 2. 71 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi NTB Tahun 2020-2024.....109
Grafik 2. 72 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi NTB Tahun 2020-2024.....109
Grafik 2. 73 Tingkat Ketergantungan Berdasarkan Kelompok Umur di Provinsi NTB 110
Grafik 2. 74 Tingkat Ketergantungan (Dependency Ratio) NTB Tahun 2017-2024 111
Grafik 2. 75 TPAK Berdasarkan Kab/Kota Provinsi NTB 2019 – 2024 114
Grafik 2. 76 Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin dan Tempat Tinggal Provinsi NTB 2020 – 2024 114
Grafik 2. 77 Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Kelompok Umur Provinsi NTB Tahun 2019 – 2024 115
Grafik 2. 78 Indeks Inovasi Daerah (IID) Provinisi NTB.....117
Grafik 2. 79 Nilai Indeks Transformasi Digital Nasional untuk Provinsi NTB 120
Grafik 2. 80 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi 122
Grafik 2. 81 Tingkat Kemantapan Jalan Nasional di Provinsi NTB Tahun 2020-2024.....126
Grafik 2. 82 Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi NTB Tahun 2020-2024 127
Grafik 2. 83 Panjang Jalan Kabupaten Kota di Provinsi NTB Tahun 2024 127
Grafik 2. 84 Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi Tahun 2024.....128
Grafik 2. 85 Realisasi Cakupan Air Minum Tahun 2018-2024.....129
Grafik 2. 86 Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi NTB Tahun 2017-2024 131
Grafik 2. 87 Perkembangan Inflasi Nasional dan Provinsi NTB Tahun 2011 - 2024.....132
Grafik 2. 88 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi NTB Tahun 2020 - 2024 135
Grafik 2. 89 Perkembangan Indeks Reformasi Hukum Provinsi NTB Tahun 2023-2024 136
Grafik 2. 90 Perkembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi NTB Tahun 2020-2024 137
Grafik 2. 91 Perkembangan Indeks Pelayanan Publik Provinsi NTB Tahun 2020-2024 138
Grafik 2. 92 Perbandingan Pilar IDSD Provinsi NTB Tahun 2022-2024 141
Grafik 2. 93 Perbandingan UHH Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2020-2024.....148
Grafik 2. 94 Prevalensi Stunting Kab./Kota se-NTB Tahun 2019-2024.....152
Grafik 2. 95 Perkembangan Indeks Demokrasi Provinsi NTB Tahun 2020-2024.....163
Grafik 2. 96 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi NTB Tahun 2019-2024.....166
Grafik 2. 97 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin di Provinsi NTB Tahun 2020-2024 166
Grafik 2. 98 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Provinsi NTB 179
Grafik 2. 99 Perkembangan Konsumsi Beras Penduduk NTB Periode.....180
Grafik 2. 100 Neraca Pengelolaan Persampahan Tahun 2020-2024.....182
Grafik 2. 101 Angka Kelahiran Total / Total Fertility Rate 189
Grafik 2. 102 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin dan menggunakan KB di Provinsi NTB 2019-2024 191
Grafik 2. 103 Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen) 193
Grafik 2. 104 Perbandingan Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet di Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2020-2024.....195
Grafik 2. 105 Persentase Izin yang Diterbitkan Tahun 2024 Berdasarkan Sektor 205

Grafik 2. 106 Indeks Pembangunan Statistik Provinsi NTB Tahun 2023-2024 214
Grafik 2. 107 Skor Indeks Keamanan Informasi Provinsi NTB Tahun 2022-2024 215
Grafik 2. 108 Perkembangan Ekspor hasil perikanan Provinsi NTB Tahun 2020-2024 221
Grafik 2. 109 Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum (ADHB) 222
Grafik 2. 110 Nilai Ekspor Provinsi NTB Tahun 2020-2024 (USD) 232
Grafik 2. 111 Capaian Kontribusi PAD terhadap APBD Tahun 2020-2024 240
Grafik 2. 112 Perkembangan Indeks Kapasitas Fiskal Provinsi NTB Tahun 2020-2024 240
Grafik 2. 113 Rata-rata Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Provinsi NTB Tahun 2020-2024 258
Grafik 2. 114 Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Provinsi NTB 259
Grafik 2. 115 Realisasi PAD Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi NTB Tahun 2020-2024 .260
Grafik 2. 116 Proporsi Realisasi Komponen PAD Terhadap Total PAD Provinsi NTB 260
Grafik 2. 117 Rata-rata Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Provinsi NTB Tahun 2020-2024 261
Grafik 2. 118 Realisasi Komponen Pajak Daerah Provinsi NTB Tahun 2020-2024 262
Grafik 2. 119 Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi NTB Tahun 2020-2024 263
Grafik 2. 120 Jumlah Kendaraan Baru Roda 2 dan Roda 4 di Tahun 2020-2024 263
Grafik 2. 121 Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi NTB 264
Grafik 2. 122 Realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Provinsi NTB 265
Grafik 2. 123 Realisasi Pajak Air Permukaan di Provinsi NTB 266
Grafik 2. 124 Realisasi Penggunaan Air Permukaan di Provinsi NTB Tahun 2020-2024 266
Grafik 2. 125 Realisasi Pajak Rokok di Provinsi NTB 267
Grafik 2. 126 Realisasi Komponen Retribusi Daerah Provinsi NTB Tahun 2020-2024 268
Grafik 2. 127 Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Provinsi NTB Tahun 2020-2024 269
Grafik 2. 128 Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Provinsi NTB Tahun 2020-2024 271
Grafik 2. 129 Perkembangan Realisasi Pendapatan Transfer dan Dana Perimbangan Tahun 2020-2024 272
Grafik 2. 130 Perkembangan Realisasi Dana Perimbangan dan Komponennya Tahun 2020-2024 272
Grafik 2. 131 Perkembangan Realisasi Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya Tahun 2020-2024 273
Grafik 2. 132 Perkembangan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Provinsi NTB Tahun 2020-2024 274
Grafik 2. 133 Rata-Rata Kontribusi Komponen Belanja Terhadap Belanja Daerah Provinsi NTB Tahun 2020-2024 277
Grafik 2. 134 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Provinsi NTB Tahun 2020-2024 277
Grafik 2. 135 Rasio Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Provinsi NTB Tahun 2020-2024 278
Grafik 2. 136 Perkembangan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD)/Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD) Provinsi NTB Tahun 2020-2024 279
Grafik 2. 137 Perkembangan Aset Daerah Provinsi NTB Tahun 2020-2024 284

Grafik 2. 138 Rata-Rata Proporsi Komponen Aset Daerah Provinsi NTB Tahun 2020-2024 ...285
Grafik 2. 139 Perkembangan Kewajiban Daerah Provinsi NTB Tahun 2020-2024 285
Grafik 2. 140 Perkembangan Ekuitas Dana Provinsi NTB Tahun 2020-2024 286
Grafik 2. 141 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi NTB Tahun 2020-2024 290
Grafik 2. 142 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Provinsi NTB Tahun 2020–2024 (Miliar Rupiah) 291
Grafik 2. 143 Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi NTB Tahun 2020-2024 291

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya 7
Gambar 2.1 Peta Wilayah Perencanaan Provinsi NTB 27
Gambar 2. 2 Potensi Luas Kawasan Pertanian di NTB 31
Gambar 2. 3 Sebaran Bendungan di NTB Tahun 2025 32
Gambar 2. 4 Luas Kawasan Perikanan di NTB 47
Gambar 2. 5 Pelabuhan Perikanan di Wilayah NTB Tahun 2024 48
Gambar 2. 7 Sebaran Penduduk NTB Menurut Kab/Kota, Hasil LongForm Sensus Penduduk 2020 70
Gambar 2.8 Provinsi NTB Menurut Kab/Kota dan Status Pembangunan Manusia Tahun 2024 88
Gambar 2.9 Capaian IMM dan Komponennya Tahun 2023 berdasarkan provinsi 89
Gambar 2.10 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Berdasarkan Provinsi Tahun 2024 130
Gambar 2. 11 Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi 178
Gambar 3. 1 Visi NTB Emas 2045 338
Gambar 3. 2 Fokus Arah Kebijakan RPJPD Provinsi NTB Tahun 2025-2045 Tahap Pertama 344
Gambar 3. 3 Makna Visi RPJMD NTB 2025-2029 346
Gambar 3. 4 Visi dan Misi RPJMD NTB Tahun 2025-2029 347
Gambar 3. 5 Sapta Cita sebagai Prioritas Pembangunan Daerah 348
Gambar 3. 6 Ringkasan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 350
Gambar 3. 7 Indikator Sasaran Pembangunan Nasional dan Daerah 352
Gambar 3. 8 Sasaran Pembangunan daerah Provinsi NTB Tahun 2025-2029 353
Gambar 3. 9 Kerangka Pikir RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 381
Gambar 3. 10 Strategi Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi NTB 382
Gambar 3. 11 Tahapan Pelaksanaan RPJMD NTB Tahun 2025-2029 410
Gambar 3. 12 Lokasi Prioritas Pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029 di Provinsi NTB .416
Gambar 3. 13 Peta Pulau Lombok 418
Gambar 3. 14 Peta Pulau Sumbawa 436
Gambar 3. 15 Peta Sebaran Kelapa di Provinsi NTB 482
Gambar 3. 16 Peta Sebaran Rumput Laut di Provinsi NTB 483
Gambar 3. 17 Peta Tembaga di Provinsi NTB 484
Gambar 3. 18 Peta Kawasan Strategis Provinsi (KSP) 486
Gambar 3. 19 Peta Pola Ruang Wilayah Provinsi NTB 487
Gambar 3. 20 Peta Pola Ruang Wilayah Provinsi NTB Kawasan yang memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya 488
Gambar 3. 21 Peta Pola Ruang Wilayah Provinsi NTB Kawasan Hutan Produksi 489
Gambar 3. 22 Peta Pola Ruang Wilayah Provinsi NTB Kawasan Konservasi 490

Gambar 3. 23 Peta Pola Ruang Wilayah Provinsi NTB Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut.....491
Gambar 3. 24 Peta Pola Ruang Wilayah Provinsi NTB Kawasan Ekosistem Mangrove 492
Gambar 3. 25 Peta Pola Ruang Wilayah Provinsi NTB Kawasan Pertanian.....493
Gambar 3. 26 Peta Pola Ruang Wilayah Provinsi NTB Kawasan Perikanan 494
Gambar 3. 27 Peta Pola Ruang Wilayah Provinsi NTB Kawasan Pergaraman 495
Gambar 3. 28 Peta Pola Ruang Wilayah Provinsi NTB Kawasan Pertambangan dan Energi 496
Gambar 3. 29 Peta Pola Ruang Wilayah Provinsi NTB Kawasan Peruntukan Industri.....497
Gambar 3. 30 Peta Pola Ruang Wilayah Provinsi NTB Kawasan Pariwisata.....498
Gambar 3. 31 Peta Pola Ruang Wilayah Provinsi NTB Kawasan Permukiman 499
Gambar 3. 32 Sembilan Puluh Lima (95) Kegiatan Strategis Dengan 10 Program Unggulan 500
Gambar 3. 33 Sepuluh Program Unggulan Provinsi NTB 501
Gambar 5. 1 Kaidah Pelaksanaan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 686
Gambar 5. 2 Sinergi Sumber Pendanaan Pembangunan Daerah 689
Gambar 5. 3 Keterkaitan pengendalian perencanaan dan pengendalian pelaksanaan dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD 690
Gambar 5. 4 Sembilan Prinsip Manajemen Risiko Pembangunan Nasional.....692

Air Terjun Tiu Kelep

Air Terjun yang dalam bahasa sasak berarti “terbang” atau menggambarkan kondisi buih-buih airnya yang beterbangan ditiup angin ini terletak di Desa Senaru, Bayan, Lombok Utara, air terjun Tiu Kelep menawarkan keindahan yang menyejukkan. Dengan tinggi sekitar 42 meter dan air yang tidak terlalu dalam, air terjun ini menjadi salah satu destinasi pariwisata populer di pulau lombok

Kab. Lombok Utara, Provinsi NTB
8°18'45.2"S 116°24'16.7"E

BAB I
PENDAHULUAN

Gunung Rinjani

Gunung Rinjani adalah gunung berapi stratovolkano aktif yang terletak secara administratif mencakup wilayah tiga kabupaten: Lombok Utara, Lombok Timur, dan Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, di Pulau Lombok, Indonesia. Ketinggiannya mencapai 3.726 meter, menjadikannya gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia dan titik tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kab. Lombok Timur, Provinsi NTB
8°24'52"S 116°27'35"E /
8.414414°S 116.459767°E

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional dalam dua puluh tahun ke depan dari tahun 2025-2045 telah dirumuskan dan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 59 Tahun 2024, bahwa RPJPN Tahun 2025-2045 merupakan pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan pemerintah dan pelaku pembangunan nonpemerintah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. RPJPN bersifat imperatif, dimana Visi Indonesia Emas 2045 dicerminkan ke dalam lima sasaran visi yang memberikan unsur imperatif pencapaian pembangunan. Kelima sasaran utama tersebut adalah pendapatan per kapita setara negara maju, kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, daya saing sumber daya manusia meningkat, dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *net zero emission*. Sesuai prinsip imperatif tersebut maka pembangunan daerah yang merupakan bagian dari pembangunan nasional juga harus mengacu pada RPJPD yang telah diselaraskan dengan RPJPN. RPJPD Provinsi NTB Tahun 2025-2045 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 9 Tahun 2024. Peraturan Daerah ini selanjutnya menjadi landasan dan pedoman dalam penyusunan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029. Pembangunan Daerah NTB dalam lima tahun kedepan merupakan fase pertama dari implementasi RPJPD Provinsi NTB tahun 2025-2045 dengan tema penguatan fondasi transformasi.

Dokumen RPJMD yang memuat berbagai arah kebijakan dan strategi pembangunan jangka menengah juga diintegrasikan dengan Visi Misi Kepala Daerah yang tepilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) secara serentak pada tanggal 27 November 2024. Gubernur NTB (Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, S.IP., M.Si) dan Wakil Gubernur NTB (Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE., M.I.P) telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 di Jakarta oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan terhitung sejak pelantikan tersebut paling lambat enam bulan RPJMD sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pembangunan daerah sudah ditetapkan. Dalam kaitan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra-PD Tahun 2025-2029, maka Pemerintah Provinsi NTB terhitung sejak tanggal 26 Februari Tahun 2025 telah memulai proses dan tahapan penyusunan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029.

RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 telah dipersiapkan penyusunannya dengan menyiapkan dokumen rancangan teknokratik RPJMD oleh Bappeda Provinsi NTB sejak Tahun 2024. Berdasarkan evaluasi RPJPD Provinsi NTB Tahun 2005-2025 diketahui bahwa Provinsi NTB masih dihadapkan pada lima isu utama (5P) yakni Produktivitas dan pengembangan wilayah kepulauan masih rendah *(Productivity)*; Kualitas sumber daya manusia masih

rendah *(People)*; Kondisi lingkungan sosial budaya dan ekologi belum aman berkelanjutan mendukung tansformasi daerah *(Planet)*; Kualitas tata kelola pemerintahan belum optimal *(Power)*; Taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat masih rendah *(Prosperity)*. Dalam kaitan ini maka dalam jangka menengah yakni lima tahun ke depan dokumen RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 diarahkan juga untuk mengatasi lima isu utama tersebut sehingga dapat mewujudkan Visi NTB EMAS 2045 Menuju Indonesia Emas 2045.

Visi Indonesia Emas mempunyai 5 Sasaran Visi, 8 Misi dan 45 Indikator Utama Pembangunan (IUP) yang telah dijabarakan dalam Visi NTB EMAS 2045 dengan 5 Sasaran Visi, 8 Misi, 17 Sasaran Pokok dan 45 Indikator Utama Pembangunan. Untuk mencapai lima sasaran visi dengan melaksanakan delapan misi tersebut, Kepala Daerah sesuai dengah Visi dan Misinya telah menyiapkan suatu strategi dan arah kebijakan jangka menengah yang mengarah pada pencapain indikator sasaran visi dan 45 indikator utama pembangunan daerah.

Strategi dan arah kebijakan yang telah digariskan untuk menyiapkan fondasi transformasi daerah dalam lima tahun ke depan adalah pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan dan mewujudkan NTB sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia. Artinya semua penduduk atau warga NTB harus hidup berkecukupan, memiliki sumber pangan yang swasembada bahkan *surplus* (berlebihan) dan daerah berkembang menjadi destinasi pariwisata yang berstandar global sehingga diminati dan didatangi oleh wisatawan mancanegara untuk menikmati pariwisata yang berkualitas. Dalam dokumen RPJMD ini juga dimuat berbagai program prioritas daerah yang akan dilaksanakan sesuai nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Harapannya Dokumen RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 ini dapat menghantarkan NTB melaksanakan transformasi dalam bidang transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tatakelola.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTB Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi NTB (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4I, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubemur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 845);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
27. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

29. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
30. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
31. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
32. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

41. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
42. Perda Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2015 Nomor 8 NOREG Peraturan Daerah Provinsi NTB: (8/2105); Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTB Nomor 119);
43. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2019 Nomor 4 Noreg Peraturan Daerah Provinsi NTB: 4-120/2019. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTB Nomor 148);
44. Perda Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2021 Nomor 5 NOREG Peraturan Daerah Provinsi NTB: (5-93/2021); Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTB Nomor 174);
45. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2024 Nomor 5 NOREG Peraturan Daerah Provinsi NTB : (4-121/2024); Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2010 Nomor 205);
46. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi NTB Tahun 20025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2024 Nomor 9 NOREG Peraturan Daerah Provinsi NTB : (8-283/2024)), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2024 Nomor 207).

1.3 Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, kebijakan perencanaan pembangunan daerah berpedoman dan mengacu pada kebijakan perencanaan pembangunan di tingkat pemerintah pusat. Dalam penyusunan RPJMD Provinsi NTB, dokumen yang menjadi acuan adalah RPJPN, RPJMN, RPJPD, RTRW Provinsi, dan menganalisis dokumen KLHS RPJMD, Rancangan Teknokratik RPJMD, hasil evaluasi capaian pembangunan 5 tahun terakhir dan dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya.

Arahan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam dokumen RPJPN 2025-2045 untuk perencanaan pembangunan di Provinsi NTB masuk dalam kelompok wilayah pembangunan Bali-Nusa Tenggara. Tujuan pembangunan wilayah Bali-Nusa Tenggara adalah sebagai Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara Bertaraf Internasional. Secara spesifik, untuk wilayah Provinsi NTB, kebijakan nasional adalah NTB sebagai Pusat Pariwisata Petualangan dan Lumbung Pangan. Sehingga dalam penyusunan dokumen RPJMD memiliki hubungan yang erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat nasional maupun daerah. RPJMD tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari keseluruhan sistem perencanaan pembangunan nasional yang melibatkan dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara RPJMD dengan berbagai

dokumen perencanaan lainnya sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut.

Gambar 1. 1 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya

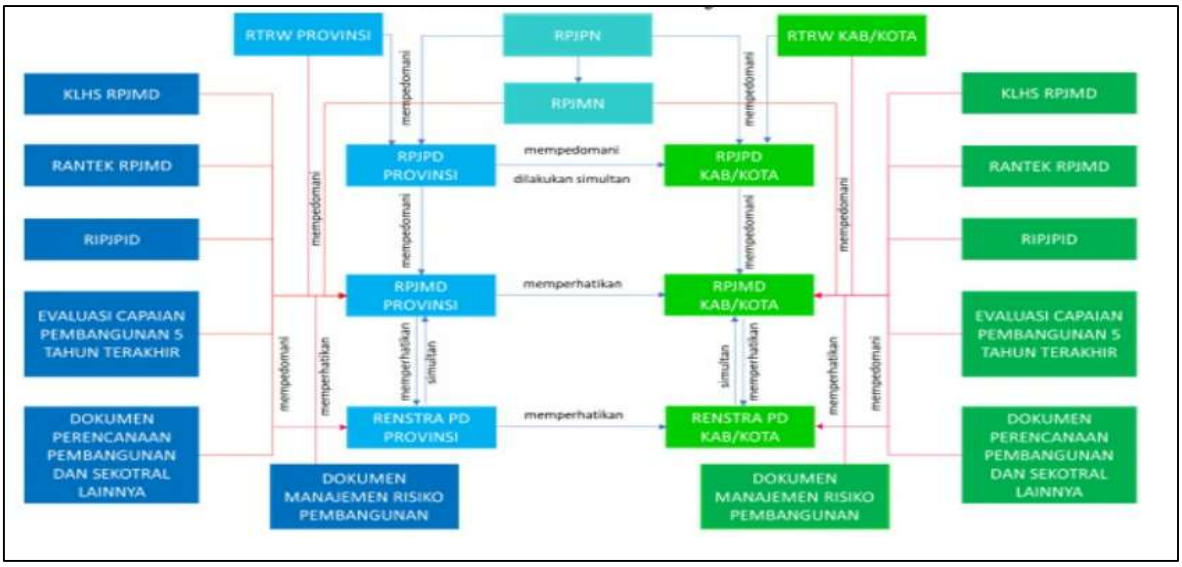

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) merupakan dokumen pembangunan jangka panjang selama 20 tahun yang menjadi pedoman bagi seluruh daerah. RPJPN diturunkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang disusun setiap lima tahun. RPJMN berfungsi sebagai acuan bagi penyusunan RPJMD di tingkat provinsi maupun Kab/Kota.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi disusun dengan berpedoman pada RPJPN. Selanjutnya, RPJPD Provinsi menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi yang berlaku untuk periode lima tahun. Penyusunan RPJMD Provinsi dilakukan dengan memperhatikan RPJMN, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, serta dilengkapi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rancangan Teknokratik (Rantek RPJMD), evaluasi capaian pembangunan lima tahun sebelumnya, serta berbagai dokumen perencanaan sektoral dan manajemen risiko pembangunan. Dari RPJMD Provinsi kemudian diturunkan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Provinsi sebagai pedoman bagi masing-masing perangkat daerah.

Selanjutnya penyusunan RPJMD Kab/Kota juga memperhatikan RPJMD Provinsi, KLHS, Rantek RPJMD, Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJ-PID), evaluasi capaian pembangunan lima tahun terakhir, dokumen perencanaan sektoral lainnya, serta dokumen manajemen risiko pembangunan. Dari RPJMD Kab/Kota kemudian diturunkan Renstra-PD Kab/Kota. Keseluruhan dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut memiliki keterkaitan yang erat, baik secara hierarkis maupun fungsional. RPJPN menjadi pedoman utama, sementara RPJMD Provinsi serta Kab/Kota disusun secara simultan agar selaras dengan RPJMN. Dengan demikian, terdapat

kesinambungan dan konsistensi antara kebijakan pembangunan pusat dengan kebijakan pembangunan daerah.

Hubungan RPJMD Provinsi NTB dan RPJMD provinsi-provinsi tetangga juga menjadi perhatian untuk dapat dilakukan sinkronisasi dengan kebijakan pembangunan regional yang lebih luas, seperti kebijakan pembangunan kawasan Nusa Tenggara yang meliputi Bali, NTB, dan NTT. Sinkronisasi ini bertujuan agar program dan proyek pembangunan tidak saling tumpang tindih atau kontradiktif, tetapi justru saling melengkapi untuk menciptakan sinergi dan kolaborasi antar-provinsi. Disamping itu penyusunan dokumen RPJMD Provinsi NTB juga memperhatikan dokumen teknis sektoral yang lain sebagai upaya perumusan kebijakan sektoral dalam jangka waktu 5 tahun seperti Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPB) Provinsi NTB Tahun 2024-2028.

1.4 Maksud Dan Tujuan

Dokumen RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman perencanaan strategis yang menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi NTB dalam perencanaan pembangunan daerah jangka menengah Tahun 2025-2029. RPJMD ini merupakan penjabaran Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Terpilih yaitu Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal dan Hj. Indah Dhamayanti Putri. Dokumen RPJMD ini menjadi acuan dalam pengambilan keputusan kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang selaras dengan prioritas nasional dalam RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029 serta berkontribusi dalam kerangka pembangunan jangka menengah yang dituangkan dalam RPJPD Provinsi NTB Tahun 2025-2045 yang menjadi kebutuhan masyarakat dan daerah NTB.

Tujuan penyusunan dokumen RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Menyelaraskan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional dan global dalam meningkatkan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat.
2. Menetapkan dan menerjemahkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB ke dalam kebijakan, program prioritas, kegiatan prioritas dan proyek prioritas serta indikator kinerja capaian pembangunan daerah secara berkala.
3. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) serta acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
4. Menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan sektoral lainnya dalam mewujudkan daerah lebih sistematis, holistik, efektif, dan efisien.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk penguatan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yang mensejahterakan masyarakat.
6. Menyediakan pedoman atau arahan untuk penyusunan RPJMD Kab/Kota se-Provinsi NTB.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 mengacu kepada Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan hubungan dokumen RPJMD dengan dokumen rencana daerah lainnya serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum, gambaran keuangan daerah, permasalahan dan isu strategis daerah.

BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pada bab ini dijelaskan terkait visi dan misi yang merupakan kondisi daerah yang ingin diwujudkan oleh Kepala Daerah hingga tahun 2029 serta tujuan dan sasaran Pembangunan daerah yang akan dicapai pada akhir RPJMD dengan strategi, arah kebijakan dan program prioritas Pembangunan baik Nasional maupun daerah sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi NTB dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang menggambarkan pencapaian pembangunan sebagai upaya perwujudan visi dan misi daerah.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini berisi tentang program perangkat daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang di ukur melalui pencapaian indikator kinerja utama (IKU), indikator kinerja daerah (IKD) dan indikator kinerja kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Bagian ini menyampaikan secara singkat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, proses pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dalam Dokumen RPJMD sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah.

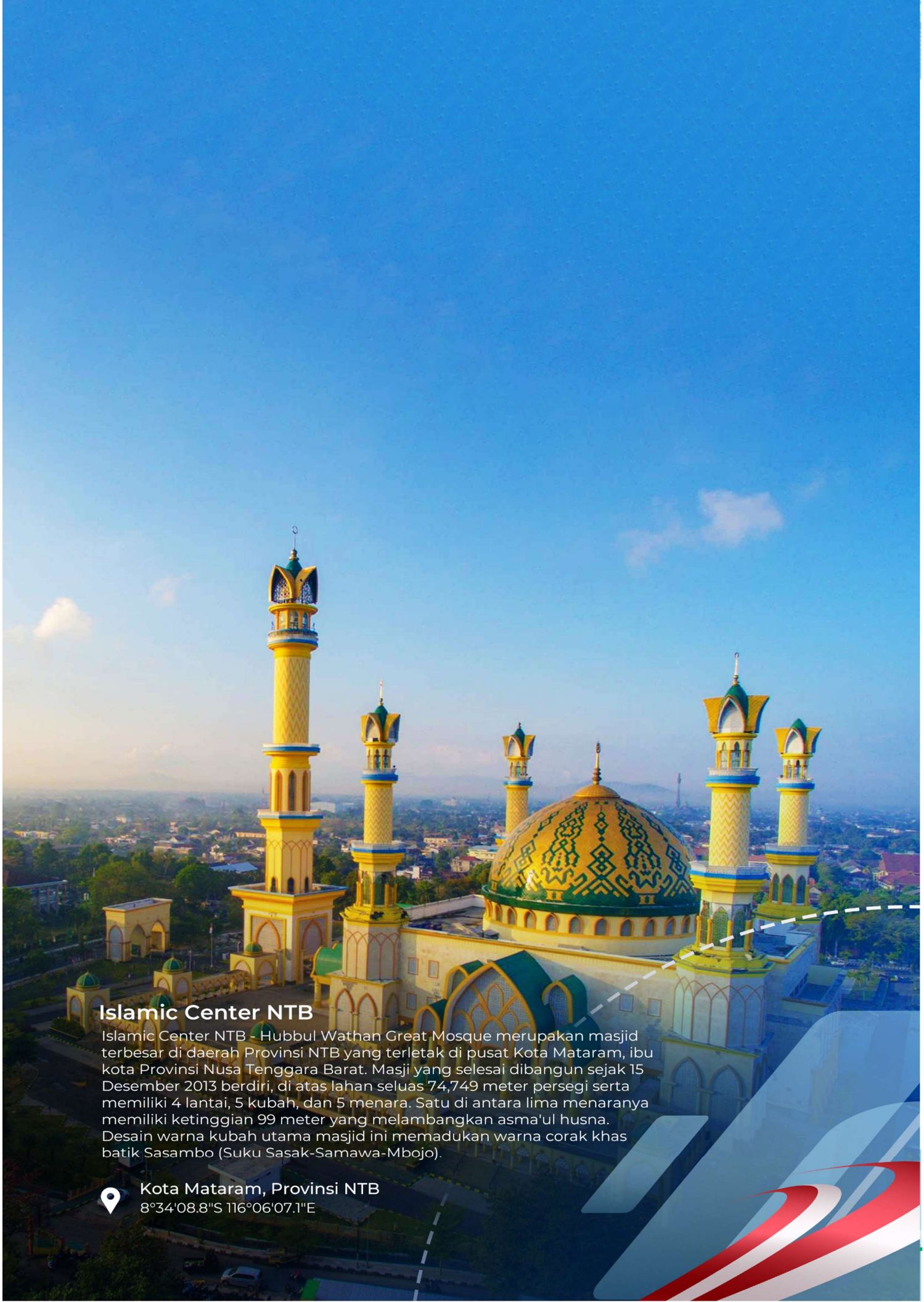

Islamic Center NTB

Islamic Center NTB - Hubbul Wathan Great Mosque merupakan masjid terbesar di daerah Provinsi NTB yang terletak di pusat Kota Mataram, ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat. Masji yang selesai dibangun sejak 15 Desember 2013 berdiri, di atas lahan seluas 74,749 meter persegi serta memiliki 4 lantai, 5 kubah, dan 5 menara. Satu di antara lima menaranya memiliki ketinggian 99 meter yang melambangkan asma'ul husna. Desain warna kubah utama masjid ini memadukan warna corak khas batik Sasambo (Suku Sasak-Samawa-Mbojo).

Kota Mataram, Provinsi NTB
8°34'08.8"S 116°06'07.1"E

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

Uma Lengge

merupakan bangunan tradisional suku Mbojo yang berada di Kecamatan Wawo Kabupaten Bima. bangunan tersebut berbentuk kerucut. Pada zaman dahulu, Uma Lengge digunakan sebagai tempat tinggal oleh masyarakat Wawo dan sebagian digunakan juga sebagai lumbung.

Kab. Bima, Provinsi NTB
8°31'28.1"S 118°50'47.1"E

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Dalam Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum kondisi daerah, gambaran keuangan daerah, permasalahan dan isu strategis daerah. Gambaran umum kondisi daerah menjabarkan kondisi Provinsi NTB dalam pendekatan 4 (empat) aspek yaitu Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing Daerah, dan Aspek Pelayanan Umum dengan menggunakan data capaian pembangunan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020-2024. Fokus pada capaian yang berkaitan dengan Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan didukung oleh data lain yang sesuai kebutuhan analisis capaian evaluasi pembangunan daerah jangka menengah.

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi NTB, bahwa Provinsi NTB dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif sesuai amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan Provinsi NTB diselenggarakan secara berkelanjutan dalam satu kesatuan wilayah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan daerah di Provinsi NTB. Provinsi NTB adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan 8 (delapan) Kabupaten dan 2 (dua) Kota. Secara geografis, Provinsi NTB berada di antara $8^{0}10'–9^{0}5'$ Lintang Selatan dan $115^{0}46'–119^{0}5'$ Bujur Timur. Provinsi NTB merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki karakteristik geografis kepulauan. Wilayah NTB terdiri dari dua pulau utama yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa serta 401 pulau kecil yang tersebar di sekitarnya. Setiap pulau memiliki karakteristik geografis yang khas yang mempengaruhi kondisi alam, iklim, sumber daya serta aktivitas ekonomi masyarakatnya.

Pulau Lombok berada di sebelah barat dan memiliki topografi yang beragam mulai dari dataran rendah hingga pegunungan tinggi. Wilayah utara didominasi oleh kawasan pegunungan dan hutan hujan tropis. Wilayah tengah banyak dimanfaatkan untuk pertanian khsusunya padi, tembakau, dan hortikultura. Sedangkan wilayah selatan dan barat agak kering dengan garis pantai yang indah dengan kawasan wisata unggulan. Pulau Lombok umumnya memiliki curah hujan yang cukup tinggi.

Pulau Sumbawa berada di wilayah timur NTB dan jauh lebih besar dibandingkan Pulau Lombok. Pulau ini memiliki kondisi geografis yang lebih beragam serta iklim yang lebih kering dibandingkan Lombok. Wilayah barat didominasi oleh perbukitan dan kawasan hutan serta terdapat beberapa daerah pertanian dan perkebunan. Wilayah tengah terdiri dari dataran rendah yang digunakan untuk pertanian lahan kering, peternakan dan tambang. Sedangkan wilayah timur memiliki pantai yang indah dan kaya akan potensi perikanan seperti di Teluk Saleh dan Pelabuhan Sape.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB Tahun 2024-2044 menyebutkan bahwa luas wilayah

perencanaan NTB kurang lebih 4.758.132 hektare. Wilayah perencanaan ini terbagi menjadi dua yakni wilayah darat dengan luas kurang lebih 1.966.639 hektare (41 persen); dan wilayah laut dengan luas kurang lebih 2.791.492 hektare (59 persen). Adapun panjang garis pantai mencapai kurang lebih 2.999,54 Km^2.

Gambar 2.1 Peta Wilayah Perencanaan Provinsi NTB

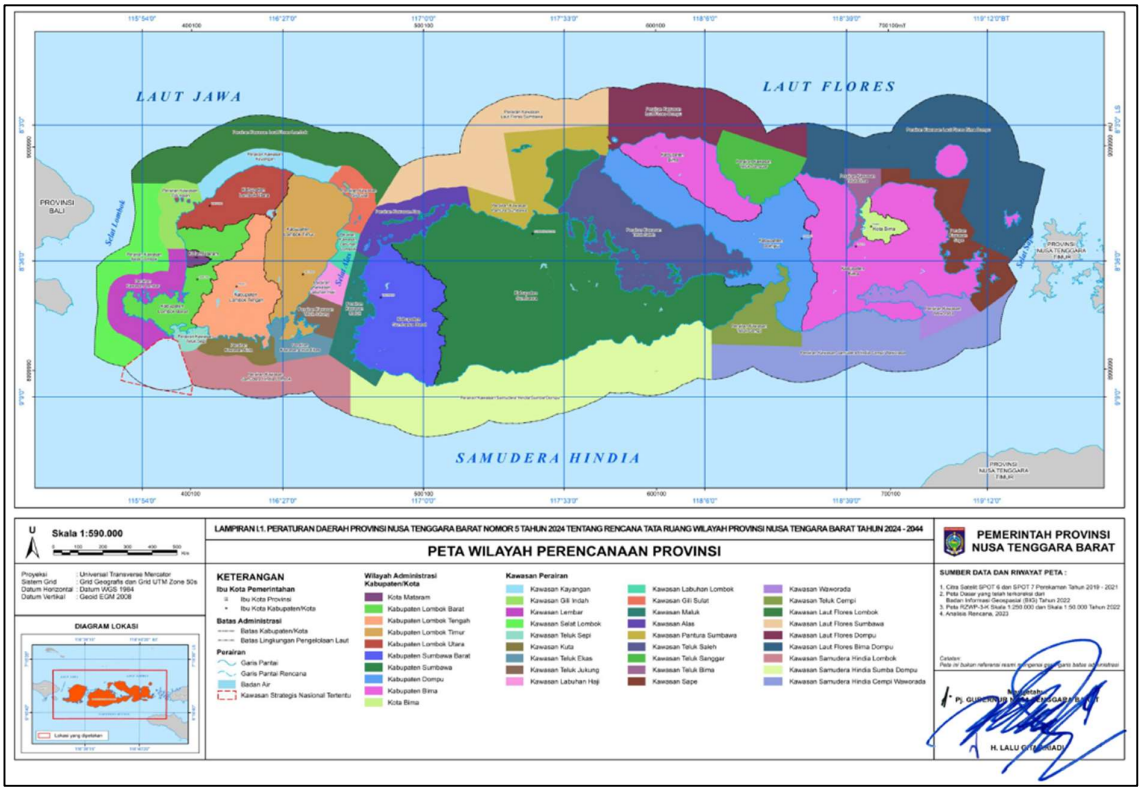

Sumber : RTRW Provinsi NTB Tahun 2024-2044, (Perda 5/2024)

Dengan luas wilayah yang didominasi oleh perairan, NTB memiliki peluang besar dalam pengembangan Ekonomi Agro-Maritim seperti perikanan tangkap, budidaya laut serta industri garam dan perkapalan; Ekowisata Bahari dan Pesisir dengan destinasi unggulan seperti Gili Trawangan, Pantai Kuta Mandalika dan perairan Pulau Moyo; dan Keamanan dan Pengelolaan Sumber Daya Laut, mengingat besarnya luas laut yang memerlukan perlindungan dari eksploitasi berlebihan dan aktivitas ilegal.

Sementara itu, luas wilayah darat yang mencapai 41 persen tetap menjadi faktor penting dalam pengembangan sektor pertanian, perkebunan, peternakan serta pembangunan infrastruktur yang menunjang pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk batas-batas wilayah Provinsi NTB adalah: Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores dan Laut Jawa; Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia; Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Bali; dan Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi NTT.

Posisi strategis NTB ini memberikan berbagai keuntungan seperti berada di jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Asia, Australia dan kawasan Pasifik. Laut di sekitar NTB menjadi bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang digunakan sebagai jalur pelayaran kapal-kapal internasional sehingga dapat menjadi peluang NTB untuk memperkuat perdagangan ekspor dengan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik termasuk Australia dan Asia Timur. Keuntungan lainnya adalah NTB memiliki posisi yang strategis dalam konteks geopolitik seperti keamanan maritim yang lebih kuat dan potensi pengembangan pangkalan logistik maritim yang dapat mendukung perdagangan serta keamanan perairan Indonesia bagian tengah.

Secara administratif, NTB terdiri dari 10 Kab/Kota yang tersebar di dua pulau utama yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Kabupaten Sumbawa merupakan daerah dengan wilayah terluas yang mencapai 6.655,92 Km^2 (33,83 persen), sedangkan yang terkecil adalah Kota Mataram dengan luas mencapai 60,42 Km^2 (0,31 persen). Sedangkan apabila dilihat dari jumlah struktur administratif, jumlah Kecamatan di NTB sebanyak 117 dan Desa/Kelurahan sebanyak 1.166. Gambaran perbandingan luas wilayah menurut Kab/Kota di NTB dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Menurut Kab/Kota se-NTB Tahun 2024

KAB/KOTA	LUAS (Km^2)	%	KECAMATAN	DESA / KELURAHAN
Kota Mataram	60.42	0.31	6	50
Kab. Lombok Barat	923.06	4.69	10	122
Kab. Lombok Utara	811.19	4.12	5	43
Kab. Lombok Tengah	1,169.52	5.94	12	154
Kab. Lombok Timur	1,606.47	8.16	21	254
Pulau Lombok	4,570.66	23.23	54	623
Kab. Sumbawa Barat	1,743.58	8.86	8	65
Kab. Sumbawa	6,655.92	33.83	24	165
Kab. Dompu	2,281.75	11.60	8	81
Kab. Bima	4,216.09	21.43	18	191
Kota Bima	207.89	1.06	5	41
Pulau Sumbawa	15,105.23	76.77	63	543
Luas NTB	19,675.89	100.00	117	1.166

Sumber: LKPJ Tahun 2024 Provinsi NTB, 2025

2.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam Provinsi NTB yang menjadi keunggulan komparatif daerah untuk potensi ekonomi yang memajukan daerah dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Provinsi NTB memiliki topografi yang beragam, mencakup dataran rendah, perbukitan, pegunungan dan wilayah pesisir. Kondisi topografi di Pulau Lombok berkisar antara 0-3.726 mdpl dan 0-2.755 mdpl untuk Pulau Sumbawa. Bagian utara

Pulau Lombok didominasi oleh pegunungan dengan puncak tertinggi Gunung Rinjani (3.726 mdpl), dengan wilayah dataran tinggi sekitarnya seperti Sembalun dan Bayan yang subur dan sering dimanfaatkan untuk pertanian hortikultura. Sedangkan dataran rendahnya tersebar di bagian tengah dan selatan, kemudian wilayah pesisirnya tersebar di seluruh wilayah dengan berbagai macam pantai yang memiliki potensi pariwisata dan perikanan.

Kondisi topografi di Pulau Sumbawa dengan wilayah pengunungan berada di Gunung Tambora Kabupaten Dompu dan sebagian wilayah di Kabupaten Sumbawa dan Bima. Hampir sebagian besar wilayah di Pulau Sumbawa terdiri dari perbukitan dan dataran tinggi yang cocok untuk peternakan dan perkebunan. Dataran rendahnya tersebar di wilayah pesisir dan lembah sungai yang dimanfaatkan untuk pertanian padi dan jagung serta perikanan/garam seperti di Teluk Saleh (Samota) dan Teluk Bima. Kemiringan tanah di wilayah Provinsi NTB didominasi oleh kemiringan tanah antara 15 persen s.d 40 persen seluas 704.619 Ha (34,96 persen), sedangkan klasifikasi kemiringan tanah hingga 2 persen seluas 338.552 Ha (16,80 persen). Di Pulau Lombok klasifikasi kemiringan antara 2 persen s.d 15 persen seluas 198.616 Ha (9,85 persen) sedangkan klasifikasi kemiringan tanah lebih dari 40 persen seluas 20.175 Ha (1,01 persen). Adapun di Pulau Sumbawa klasifikasi kemiringan tanah antara 15 persen s.d 40 persen seluas 573.903 Ha (28,48 persen) dan kemiringan tanah hingga 2 persen seluas 214.194 Ha (10,63 persen).

Letaknya yang strategis di wilayah kepulauan Indonesia menjadikan NTB kaya akan potensi pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, pariwisata serta sumber daya mineral yang saling melengkapi dan dapat dikembangkan secara berkelanjutan.

2.1.2.1 Pertanian

Potensi sumber daya alam di sektor pertanian, Provinsi NTB memiliki kondisi alam yang cukup mendukung untuk menjadi daerah pertanian karena kombinasi faktor geografis, iklim dan sumber daya alamnya. Sebagian besar tanah di NTB baik di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa bersifat vulkanik dan kaya akan mineral akibat aktivitas gunung berapi. Tanah ini sangat subur dan mendukung pertumbuhan berbagai jenis tanaman. Di satu sisi, iklim tropis dengan dua musim utama yaitu musim hujan dan musim kemarau. Perubahan pola curah hujan dapat memengaruhi hasil pertanian dan produktivitas sektor perikanan, selain itu juga berpotensi ancaman yang dapat menyebabkan bencana banjir dan kekeringan di beberapa daerah.

Kawasan pertanian di NTB seluas 772.669 Ha yang mencakup sawah irigasi dan ladang kering yang dapat dioptimalkan. Sebagian besar lahan sawah produktif telah digunakan untuk komoditas utama seperti padi, jagung dan tembakau. Luas lahan sawah sekitar 224 ribu hektar yang sebagian besar telah memiliki sistem irigasi teknis. Luas lahan kering mencapai sekitar 498 ribu hektar yang digunakan untuk berbagai komoditas seperti jagung, kedelai dan hortikultura. Namun pemanfaatan lahan pertanian tersebut belum maksimal.

Selama tahun 2020-2024, nilai sektor pertanian terhadap Pendapatan Domestik Reginal Bruto (PDRB) di NTB menunjukkan peningkatan dari Rp. 30,98 trilyun menjadi Rp. 39,10 trilyun. Namun, secara kontribusi mengalami penurunan dari 23,18% menjadi 21,45%. Sektor pertanian menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap PDRB NTB dalam periode Tahun 2020 hingga Tahun 2024. Meskipun terdapat fluktuasi dalam pertumbuhannya, sektor ini tetap menjadi salah satu pilar utama perekonomian daerah.

Sektor pertanian memegang peranan central dalam struktur perekonomian daerah. Dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024, kontribusi sektor ini terhadap PDRB menunjukkan konsistensi dan dinamika yang mencerminkan kekuatan serta tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam dan ketahanan pangan daerah.

Grafik 2. 1 Nilai Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku NTB Tahun 2020-2024

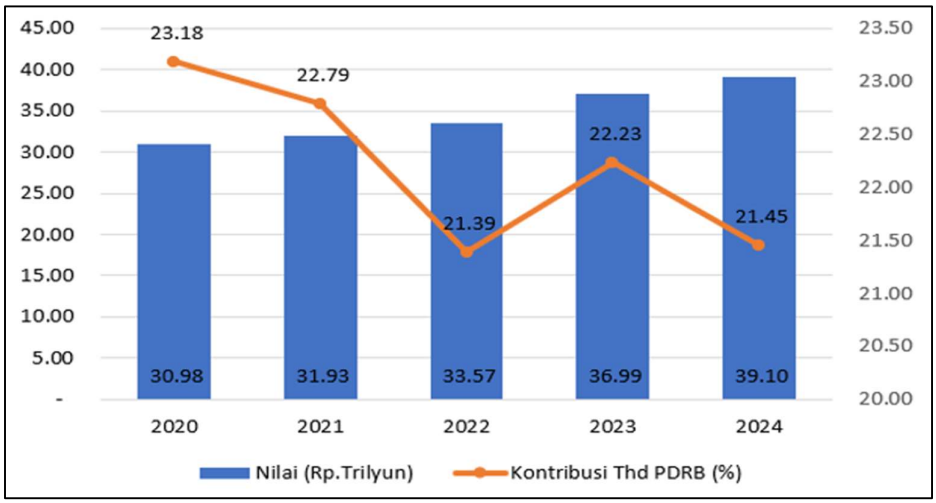

Sumber: BPS NTB, 2025 (data diolah)

Dalam rentang waktu Tahun 2020 hingga Tahun 2024, lima subsektor utama menyusun kerangka sektor pertanian NTB, yaitu: tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan, dan peternakan. Masing-masing subsektor memberikan kontribusi berbeda namun saling melengkapi, menggambarkan karakteristik agraris dan maritim yang khas dari Provinsi NTB.

Komoditas pertanian yang menjadi unggulan utama di NTB adalah tanaman pangan bahan makanan seperti padi dan jagung. Komoditas perkebunan seperti tembakau, kopi, kakau, jambu mete dan kelapa menjadi salah satu komoditas ekspor NTB. Komoditas peternakan dan perikanan juga memberikan andil dalam produktivitas sektor pertanian. Secara umum perkembangan produksi komoditas unggulan sebagian mengalami peningkatan produksi, dengan catatan beberapa komoditas juga mengalami penurunan.

Dengan potensi luas lahan yang beragam, mulai dari lahan basah untuk pertanian hingga lahan kering yang cocok untuk peternakan, serta perairan yang kaya untuk

perikanan tangkap dan budidaya, sektor ini dapat menjadi motor penggerak utama perekonomian NTB. Peningkatan produksi terbesar adalah pada komoditas jagung dan padi; untuk komoditas tanaman horikultura mengalami penurunan; komoditas tanaman perkebunan relatif stabil. Optimalisasi potensi lahan yang tersedia akan menjadi kunci dalam mencapai peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di NTB.

Berdasarkan RTRW Provinsi NTB Tahun 2024-2044 telah ditetapkan kawasan budidaya yang meliputi kawasan pertanian seluas 772.669 Ha, kawasan hutan produksi 442.773 Ha, kawasan perikanan 2.388.501 Ha dan kawasan pergaraman 3.734 Ha. Namun sebagian besar lahan-lahan pertanian di Provinsi NTB yaitu mencapai 80 persen merupakan lahan kering.

Gambar 2. 2 Potensi Luas Kawasan Pertanian di NTB

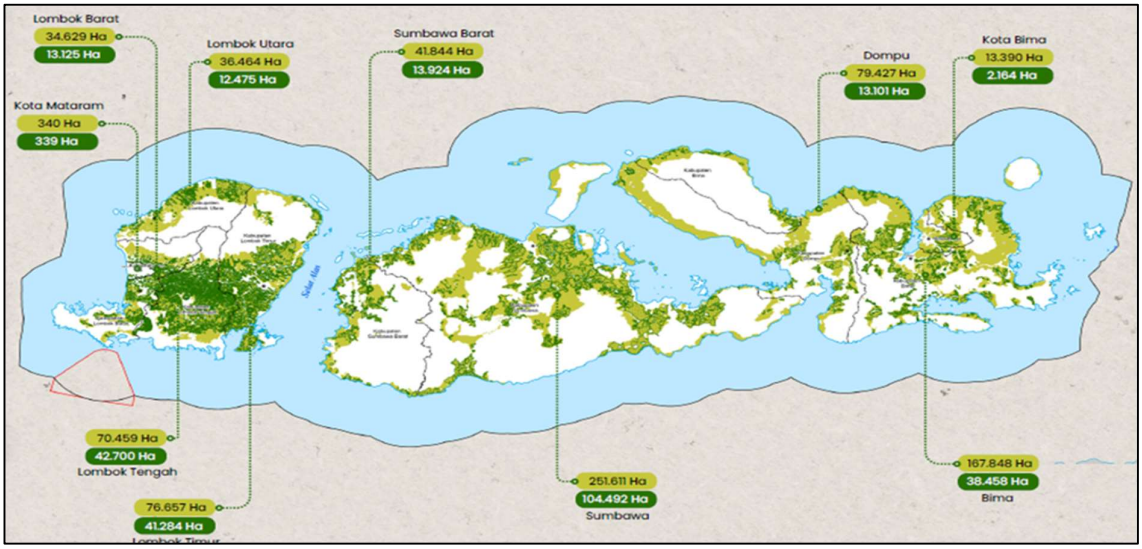

Sumber: RTRW Provinsi NTB Tahun 2024-2044, (Perda 5/2024)

Sektor pertanian di NTB sangat bergantung pada infrastruktur yang memadai agar produksi hasil pertanian dapat meningkat dan berkelanjutan. Salah satu infrastruktur pendukung utama dalam pertanian yang sangat penting adalah bendungan dan jaringan irigasi. Jumlah bendungan yang telah terbangun di NTB sebanyak 77 buah yang tersebar di seluruh Kabupaten di NTB. Kabupaten Sumbawa menjadi daerah yang memiliki jumlah bendungan terbanyak yaitu 20 buah, diikuti Kabupaten Lombok Timur sebanyak 13 buah. Gambaran sebaran bendungan yang ada di NTB dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2. 3 Sebaran Bendungan di NTB Tahun 2025

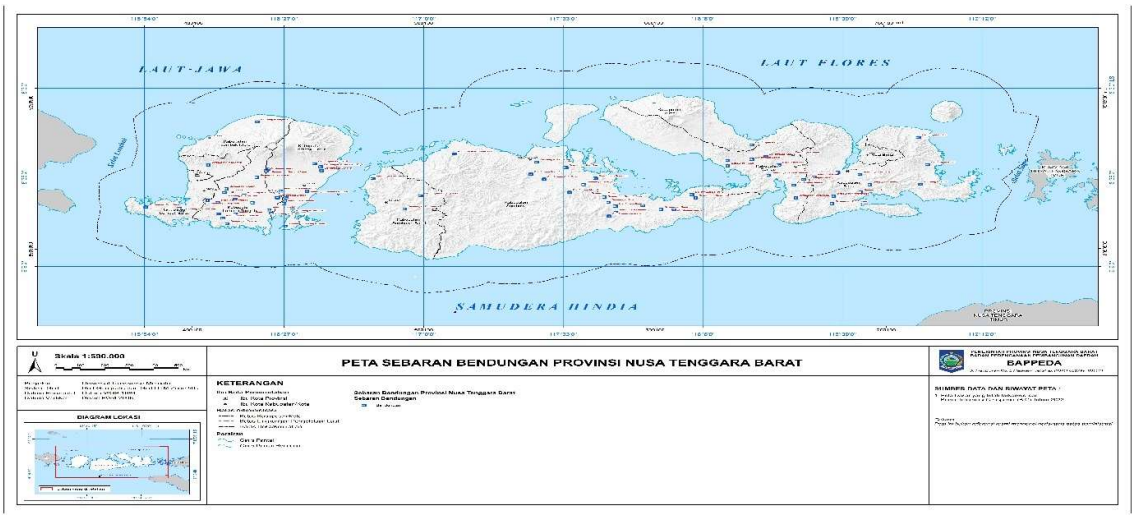

Sumber: BBWS Kementerian PUPR NTB, 2025

Daerah Irigasi kewenangan provinsi berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 /PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi berjumlah 35 DI dengan luas areal 58.105 ha dengan panjang saluran primer 358.181 meter (1,06 % kondisi baik, 40.63% rusak ringan, 40.74% rusak sedang, dan 14.27% rusak berat) dan saluran skunder 722.068 meter (1.19% dalam kondisi baik, 30.81% rusak ringan, 41.66% rusak sedang, dan 20.77% rusak berat).

Tabel 2. 2 Daerah irigasi Provinsi NTB Tahun 2024

No.	Nomeklatur/ Nama D.I.	Luas Areal (Ha) Berdasarkan Permen 14/2015	Sumber Air	Saluran			
				Tipe Saluran (Terbuka/Tertutup/Campuran)	Primer (m)	Sekunder (m)	Tersier (m)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	D.I. GEBONG	2161	Sungai	Terbuka	11.331	27.602	-
2	D.I. SESAOT	1678	Sungai	Terbuka	10.231	23.231	1.829
3	D.I. BISOK BOKAH	1255	Sungai	Terbuka	2.801	10.096	13.611
4	D.I. GDE BONGOH	2644	Sungai	Terbuka	23.564	68.267	39.018
5	D.I. PARUNG	1270	Sungai	Terbuka	9.085	16.600	40.280
6	D.I. RENGGUNG	1717	Sungai	Terbuka	7.221	6.606	47.436
7	D.I. BELANTING	1300	Sungai	Terbuka	2.791	17.163	14.629
8	D.I. KALI DESA KOMPLEKS	1022	Mata Air	Terbuka	19.057	32.470	26.187
9	D.I. MARONGGE KOMPLEKS	1246	Sungai	Terbuka	40.098	64.516	41.773
10	D.I. SAKRA	1859	Sungai	Terbuka	32.750	13.398	57.053
11	D.I. SAMBELIA	1666	Sungai	Terbuka	687	23.389	6.780
12	D.I. TOJANG KOMPLEKS	1014	Sungai,Mata Air	Terbuka	6.827	26.024	7.530
13	D.I. BERINGIN SILA	2400	Sungai	Terbuka	9.662	29.920	2.494
14	D.I. BUER KOMPLEK	1639	Sungai	Terbuka	9.698	15.592	437
15	D.I. EMBUNG GAPIT	1300	Sungai	Terbuka	4.450	13.328	925
16	D.I. MARENTE KOMPLEKS	1058	Sungai	Terbuka	12.483	29.696	3.104
17	D.I. MARONGE/TIU KULIT	1877	Sungai	Terbuka	2.186	30.449	306
18	D.I. PELARA	2743	Sungai	Campuran	15.268	22.821	739
19	D.I. PUNGKIT	1340	Sungai	Campuran	4.783	13.004	3.235
20	D.I. SEMANGI	1232	Sungai	Terbuka	2.387	12.538	591
21	D.I. DAHA I, II	1273	Sungai	Terbuka	2.455	18.809	5.907
22	D.I. KADINDI	1200	Sungai	Terbuka	2.981	25.048	5.173
23	D.I. LATONDA PEKAT	1217	Sungai	Terbuka	2.208	9.070	1.946
24	D.I. NANGAKARA	1140	Sungai	Terbuka	2.834	22.434	7.007
25	D.I. MADA PANGGA II	2000	Sungai	Campuran	5.041	5.174	6.889
26	D.I. NCANGAKAI NCOHA	1672	Sungai	Terbuka	3.812	16.192	1.738
27	D.I. SUMI SAPE	2650	Sungai	Terbuka	8.065	33.395	11.426
28	D.I. ELANG DESA	1300	Sungai	Terbuka	12.628	4.570	7.247
29	D.I. KALIMANTONG I	1550	Sungai	Terbuka	6.915	24.078	4.493
30	D.I. KALIMANTONG II	2500	Sungai	Terbuka	48.887	12.587	493
31	D.I. PLAMPO'O	1060	Sungai	Terbuka	2.480	3.904	18
32	D.I. BAGIK KEMBAR	1305	Sungai	Terbuka	550	4.050	385
33	D.I. SANTONG	1807	Sungai	Terbuka	3.441	9.504	103
34	D.I. RUTUS	2783	Sungai	Terbuka	25.185	19.540	37.028
35	D.I. PELAPAK	2227	Sungai	Terbuka	3.339	17.002	10.527
Total		58.105			358.181	722.068	408.336

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 /PRT/M/2015

Bendungan dan jaringan irigasi memiliki pengaruh yang sangat besar dan positif terhadap produktivitas khususnya di sektor pertanian. Keduanya saling melengkapi untuk menciptkan kondisi yang optimal bagi pertumbuhan tanaman dan peningkatan hasil panen.

A. Tanaman Pangan

Tanaman pangan merupakan tanaman budidaya (*crops*) yang menghasilkan bahan pangan untuk konsumsi manusia. Batasan tanaman pangan semula adalah kelompok tanaman sumber karbohidrat dan protein. Komoditi strategis tanaman pangan yaitu padi, jagung dan kedelai memiliki peranan pokok dalam memenuhi kebutuhan pangan, pakan dan industri dalam negeri setiap tahunnya.

Selama kurun waktu 2020 sampai dengan 2024, jagung merupakan komoditi tanaman pangan dengan produksi terbesar dengan rata-rata produksi 2,73 juta ton per tahun yang terdiri dari jagung dengan kadar air jagung sebesar 14%, yang merupakan standar kadar air jagung kering siap simpan atau jual dan jagung dengan kadar air jagung sebesar 28% masih dalam kondisi basah/lembap, biasanya hasil panen langsung, dan perlu dikeringkan untuk mencegah pembusukan atau kerusakan. Selanjutnya diikuti komoditi padi dengan rata-rata jumlah produksi sebesar 1,44 juta ton. Sedangkan komoditi kedelai hanya menyumbangkan rata-rata produksi sebesar 18,06 ribu ton per tahun.

Grafik 2. 2 Produksi Tanaman Pangan Tahun 2020-2024

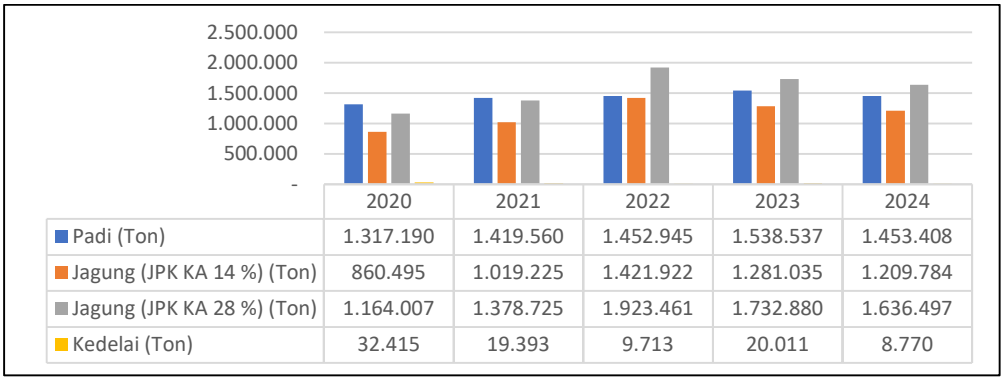

	2020	2021	2022	2023	2024
Padi (Ton)	1.317.190	1.419.560	1.452.945	1.538.537	1.453.408
Jagung (JPK KA 14 %) (Ton)	860.495	1.019.225	1.421.922	1.281.035	1.209.784
Jagung (JPK KA 28 %) (Ton)	1.164.007	1.378.725	1.923.461	1.732.880	1.636.497
Kedelai (Ton)	32.415	19.393	9.713	20.011	8.770

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, 2025

Dalam beberapa tahun terakhir, luas panen tanaman pangan di NTB menunjukkan fluktuasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pola curah hujan, kondisi irigasi, ketersediaan benih unggul, serangan hama dan penyakit tanaman, serta dinamika pasar. Namun demikian, secara umum NTB mampu mempertahankan kinerja yang positif, terutama pada komoditas utama seperti jagung dan padi.

Luas panen tanaman pangan di NTB tercatat mencapai 463.334 hektar pada tahun 2024, dengan komoditas padi memberikan sumbangsih terbesar dalam total luasan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan program-program strategis seperti

penguatan kelembagaan petani, pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi, serta peningkatan akses petani terhadap sarana produksi.

Ke depan, optimalisasi potensi lahan kering di Pulau Sumbawa dan penguatan irigasi teknis di Pulau Lombok menjadi kunci untuk menjaga dan meningkatkan luas panen tanaman pangan secara berkelanjutan. Dengan dukungan kolaboratif antara pemerintah, pelaku usaha, dan petani, Provinsi NTB diharapkan dapat terus menjadi motor penggerak ketahanan pangan, tidak hanya di tingkat regional tetapi juga nasional.

Grafik 2. 3 Luas Panen Tanaman Pangan Tahun 2020-2024

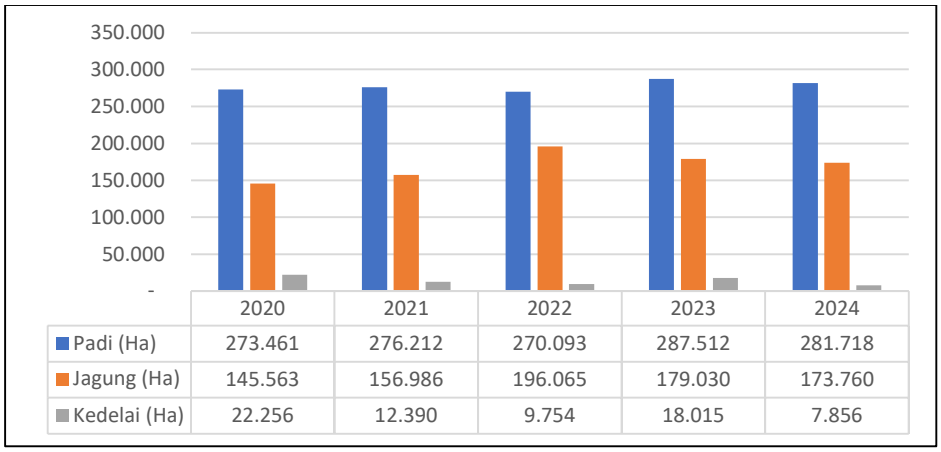

	2020	2021	2022	2023	2024
Padi (Ha)	273.461	276.212	270.093	287.512	281.718
Jagung (Ha)	145.563	156.986	196.065	179.030	173.760
Kedelai (Ha)	22.256	12.390	9.754	18.015	7.856

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, 2025

Secara umum sub sektor tanaman pangan memberikan kontribusi dengan nilai rata-rata sebesar 14,68 trilyun rupiah atau 9,43 persen terhadap total PDRB Provinsi NTB. Dari sisi nilai, sub sektor ini menunjukkan pertumbuhan yang positif akan tetapi dari sisi persentase kontribusi terhadap PDRB mengalami fluktuasi. Berikut disajikan perkembangan kontribusi nilai dan persentase sub sektor komoditi tanaman pangan terhadap PDRB NTB.

Grafik 2. 4 Perkembangan Kontribusi Nilai dan Persentase Terhadap PDRB ADHB Komoditi Tanaman Pangan NTB Tahun 2020-2024

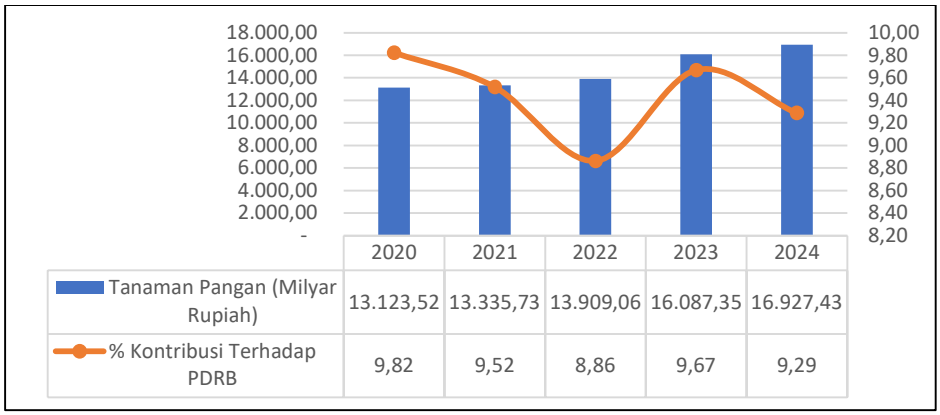

	2020	2021	2022	2023	2024
Tanaman Pangan (Milyar Rupiah)	13.123,52	13.335,73	13.909,06	16.087,35	16.927,43
% Kontribusi Terhadap PDRB	9,82	9,52	8,86	9,67	9,29

Sumber : BPS NTB, 2025 (data diolah)

B. Tanaman Hortikultura

Tanaman hortikultura merupakan tanaman yang menghasilkan buah-buahan, sayuran, bahan obat nabati, florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika. Hortikultura memiliki dua peranan penting bagi Provinsi NTB, yakni (1) sebagai sumber pemenuhan gizi penduduk baik karbohidrat, vitamin, maupun mineral; serta (2) sebagai salah satu sub sektor yang dapat menghasilkan nilai tambah sehingga akhirnya akan memutar roda perekonomian.

Pengembangan hortikultura dilakukan sebagai upaya pelestarian lingkungan, menarik investasi skala kecil dan menengah, pengendalian inflasi dan stabilitas harga komoditas strategis (cabai merah dan bawang merah), pelestarian pengembangan identitas nasional (anggrek, jamu, dll), peningkatan ketahanan pangan melalui penyediaan karbohidrat alternatif (pisang, kentang, dll), serta sebagai penunjang pengembangan sektor wisata (agro wisata). Di antara seluruh tanaman hortikultura, terdapat 3 komoditas yang menjadi unggulan dan diharapkan dapat terus berkembang, yaitu: cabai merah, bawah merah, dan manggis.

Selama kurun waktu 2020 sampai dengan 2024, bawang merah merupakan komoditi tanaman hortikultura dengan produksi terbesar dengan rata-rata produksi 197 tibu ton per tahun, diikuti komoditi cabe dengan rata-rata jumlah produksi sebesar 92,7 ribu ton. Sedangkan komoditi manggis hanya menyumbangkan rata-rata produksi sebesar 18,3 ribu ton per tahun. Adapun perkembangan produksi komoditi tanaman hortikultura tersaji pada grafik berikut ini.

Grafik 2. 5 Produksi Tanaman Hortikultura Tahun 2020-2024

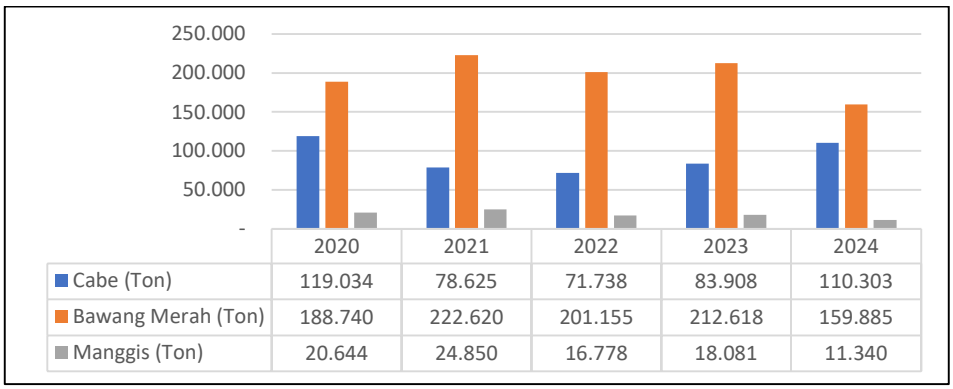

	2020	2021	2022	2023	2024
Cabe (Ton)	119.034	78.625	71.738	83.908	110.303
Bawang Merah (Ton)	188.740	222.620	201.155	212.618	159.885
Manggis (Ton)	20.644	24.850	16.778	18.081	11.340

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, 2025

Secara umum, luas tanam dan luas panen komoditas hortikultura di NTB menunjukkan tren yang positif, terutama untuk komoditas unggulan seperti cabai, bawang merah dan manggis. Kawasan dataran rendah banyak dimanfaatkan untuk budidaya semangka dan melon, sedangkan wilayah dataran tinggi menjadi pusat pengembangan sayuran seperti kol, wortel, dan kentang. Pada tahun 2024, total luasan

tanaman hortikultura di NTB tercatat mencapai 159,3 ribu hektar dengan dominasi pada komoditas sayuran dan buah-buahan.

Grafik 2. 6 Luas Panen/Tanaman Menghasilkan Tanaman Hortikultura Tahun 2020-2024

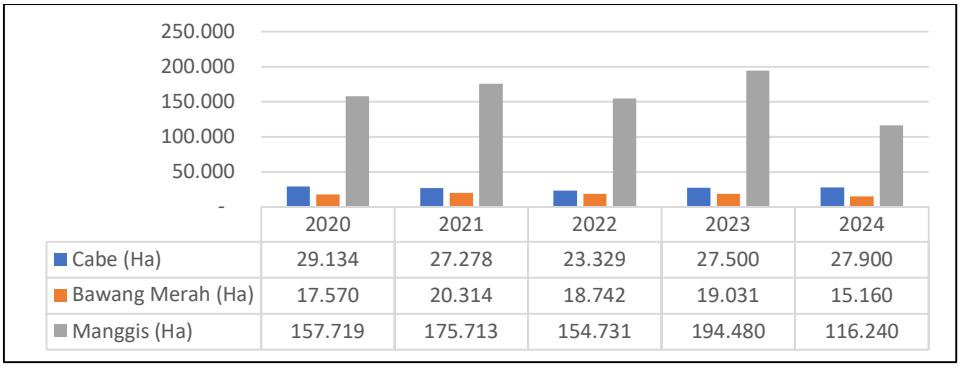

	2020	2021	2022	2023	2024
Cabe (Ha)	29.134	27.278	23.329	27.500	27.900
Bawang Merah (Ha)	17.570	20.314	18.742	19.031	15.160
Manggis (Ha)	157.719	175.713	154.731	194.480	116.240

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, 2025

Pemerintah Provinsi NTB terus berupaya memperluas areal tanam hortikultura melalui pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan, peningkatan akses terhadap sarana produksi, dan pemanfaatan teknologi pertanian modern. Selain itu, program pengembangan hortikultura ramah lingkungan juga menjadi prioritas untuk menjamin keberlanjutan usaha tani hortikultura di tengah tantangan perubahan iklim. Dengan potensi agroekologi yang beragam dan pasar yang terus berkembang, pengelolaan luasan tanaman hortikultura di NTB diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani, tetapi juga memperkuat posisi NTB sebagai salah satu daerah penghasil hortikultura utama di kawasan timur Indonesia.

Grafik 2. 7 Perkembangan Kontribusi Nilai dan Persentase Terhadap PDRB ADHB Komoditi Tanaman Hortikultura NTB Tahun 2020-2024

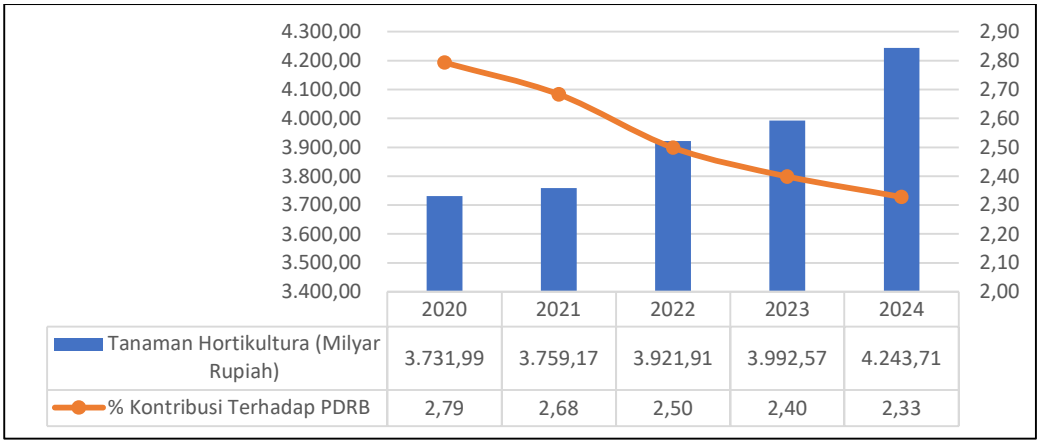

	2020	2021	2022	2023	2024
Tanaman Hortikultura (Milyar Rupiah)	3.731,99	3.759,17	3.921,91	3.992,57	4.243,71
% Kontribusi Terhadap PDRB	2,79	2,68	2,50	2,40	2,33

Sumber : BPS NTB, 2025 (data diolah)

Secara umum sub sektor tanaman hortikultura memberikan kontribusi dengan nilai rata-rata sebesar 3,93 trilyun rupiah atau 2,54 persen terhadap total PDRB Provinsi NTB. Dari sisi nilai, sub sektor ini menunjukkan pertumbuhan yang positif akan tetapi dari sisi persentase kontribusi terhadap PDRB mengalami kontraksi.

C. Tanaman Perkebunan

Jenis tanaman perkebunan yang ada di Provinsi NTB adalah kelapa, kopi, kakao, mete, vanili, dan tembakau dengan luas lahan 127,288 hektar pada tahun 2024. Dari seluruh jenis ini, terdapat 3 tanaman yang menjadi unggulan, yaitu kopi, kelapa dan tembakau. Provinsi NTB merupakan salah satu dari tiga wilayah di Indonesia yang menjadi Provinsi terbesar memproduksi tembakau, selain Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah.

Grafik 2. 8 Luas Panen/Tanaman Menghasilkan Tanaman Perkebunan Tahun 2020-2024

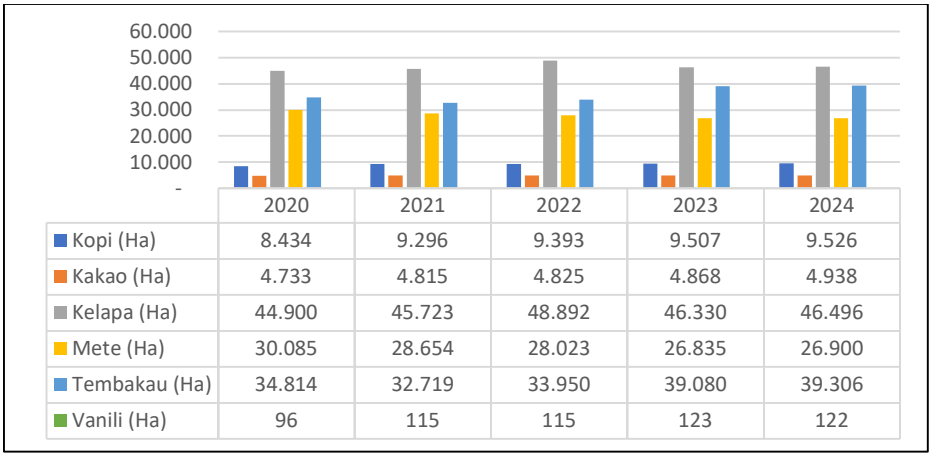

	2020	2021	2022	2023	2024
Kopi (Ha)	8.434	9.296	9.393	9.507	9.526
Kakao (Ha)	4.733	4.815	4.825	4.868	4.938
Kelapa (Ha)	44.900	45.723	48.892	46.330	46.496
Mete (Ha)	30.085	28.654	28.023	26.835	26.900
Tembakau (Ha)	34.814	32.719	33.950	39.080	39.306
Vanili (Ha)	96	115	115	123	122

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, 2025

Berdasarkan data perkembangan luas panen tanaman menghasilkan tanaman perkebunan di Provinsi NTB periode 2020–2024, secara keseluruhan menunjukkan dinamika yang bervariasi antar komoditas dengan total luas mencapai 127.288 hektar pada tahun 2024. Komoditas kelapa masih mendominasi dengan kontribusi terbesar dan relatif stabil pada kisaran 44-46 ribu hektar, diikuti oleh tembakau yang cenderung meningkat signifikan dari 34.814 hektar pada tahun 2020 menjadi 39.306 hektar pada tahun 2024. Komoditas kopi menunjukkan tren pertumbuhan positif dari 8.434 hektar pada tahun 2020 menjadi 9.526 hektar pada tahun 2024, sedangkan kakao juga mengalami peningkatan meskipun dalam skala terbatas. Di sisi lain, luas tanaman mete mengalami penurunan cukup tajam dari 30.085 hektar pada tahun 2020 menjadi 26.900 hektar pada tahun 2024, yang mengindikasikan adanya penurunan daya tarik atau tantangan dalam pengembangan komoditas tersebut. Sementara itu, vanili meskipun dalam skala kecil, menunjukkan perkembangan yang relatif stabil dengan sedikit peningkatan luas. Kondisi ini mencerminkan bahwa sektor perkebunan NTB masih

memiliki potensi besar sebagai penopang ekonomi daerah, terutama pada komoditas kelapa, kopi, dan tembakau, namun perlu upaya revitalisasi pada komoditas yang mengalami penurunan serta peningkatan produktivitas agar mampu memberikan kontribusi optimal terhadap pembangunan daerah.

Selanjutnya untuk tembakau, terdapat dua jenis tembakau di Provinsi NTB, yaitu tembakau rajangan dan tembkau Virginia. Masa depan tembakau di Provinsi NTB semakin cerah dengan dibangunnya Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (APHT) Paok Motong di Kabupaten Lombok Timur yang telah mulai beroperasi pada awal tahun 2024 dan Sentra Industri Hasil Tembakau yang berlokasi di Desa Semayang dan Desa Barabali Kabupaten Lombok Tengah. Untuk komoditas kopi yang dihasilkan di NTB merupakan jenis arabika dan robusta yang saat ini semakin dikenal pada level nasional bahkan internasional.

Grafik 2. 9 Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2020-2024

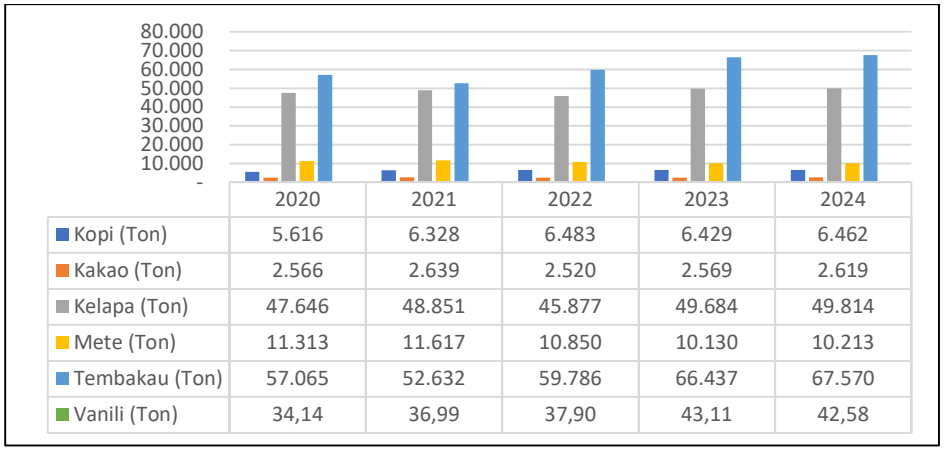

	2020	2021	2022	2023	2024
Kopi (Ton)	5.616	6.328	6.483	6.429	6.462
Kakao (Ton)	2.566	2.639	2.520	2.569	2.619
Kelapa (Ton)	47.646	48.851	45.877	49.684	49.814
Mete (Ton)	11.313	11.617	10.850	10.130	10.213
Tembakau (Ton)	57.065	52.632	59.786	66.437	67.570
Vanili (Ton)	34,14	36,99	37,90	43,11	42,58

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, 2025

Berdasarkan perkembangan produksi tanaman perkebunan di Provinsi NTB pada periode 2020–2024, terlihat adanya pergerakan yang cukup dinamis pada beberapa komoditas strategis daerah. Produksi kopi menunjukkan tren peningkatan dari 5.616 ton pada tahun 2020 menjadi 6.462 ton pada tahun 2024, meskipun sempat mengalami fluktuasi di tengah periode. Kakao relatif stabil dengan kenaikan tipis dari 2.566 ton menjadi 2.619 ton, yang mengindikasikan keterbatasan peningkatan produktivitas. Komoditas kelapa sebagai salah satu penghasil utama memperlihatkan fluktuasi, namun tetap dalam skala besar, yakni 47.646 ton pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 49.814 ton pada tahun 2024. Produksi mete mengalami tren menurun setelah sempat mencapai 11.617 ton pada tahun 2021, menjadi 10.213 ton pada tahun 2024, sehingga membutuhkan perhatian khusus dalam pengembangan dan revitalisasi.

Sementara itu, tembakau sebagai komoditas unggulan mengalami pertumbuhan signifikan, dari 57.065 ton pada tahun 2020 menjadi 67.570 ton pada tahun 2024, yang

menunjukkan prospek penguatan daya saing dan kontribusi terhadap perekonomian daerah. Vanili meskipun memiliki skala produksi relatif kecil, menunjukkan peningkatan cukup konsisten dari 34,14 ton pada tahun 2020 menjadi 42,58 ton pada tahun 2024. Secara keseluruhan, data ini memperlihatkan bahwa sektor perkebunan NTB masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan, dengan fokus pada peningkatan produktivitas komoditas unggulan seperti kopi, kelapa, dan tembakau, serta strategi penguatan hilirisasi dan diversifikasi produk untuk meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat perkebunan.

Secara umum sub sektor tanaman perkebunan memberikan kontribusi dengan nilai rata-rata sebesar Rp. 2,11 trilyun atau 1,36 persen terhadap total PDRB Provinsi NTB. Dari sisi nilai, sub sektor ini menunjukkan pertumbuhan yang positif akan tetapi dari sisi persentase kontribusi terhadap PDRB mengalami kontraksi dari tahun 2020 hingga 2023, namun pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 1,35%. Berikut disajikan perkembangan kontribusi nilai dan persentase sub sektor komoditi tanaman pangan terhadap PDRB NTB.

Grafik 2. 10 Perkembangan Kontribusi Nilai dan Persentase Terhadap PDRB ADHB Komoditi Tanaman Perkebunan NTB Tahun 2020-2024

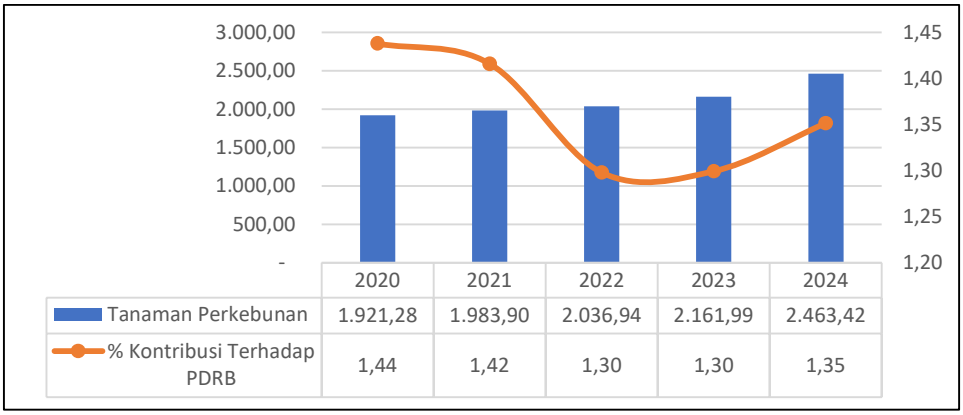

	2020	2021	2022	2023	2024
Tanaman Perkebunan	1.921,28	1.983,90	2.036,94	2.161,99	2.463,42
% Kontribusi Terhadap PDRB	1,44	1,42	1,30	1,30	1,35

Sumber : BPS NTB, 2025 (data diolah)

D. Peternakan

Sebagai mana diketahui bahwa NTB secara nasional berperan strategis sebagai daerah sumber bibit dan ternak potong nasional. Kontribusi NTB dalam penyediaan sapi bibit untuk pemenuhan kebutuhan provinsi lain. Secara historis NTB merupakan daerah pengekspor sapi dan kerbau ke Hongkong dan Singapura, hanya saja sejak tahun 1978 kegiatan eksport tersebut terhenti karena adanya kebijakan nasional untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

Sumber daya alam di NTB sangat mendukung untuk pengembangan peternakan khususnya ternak sapi. Usaha ternak sapi memiliki peluang pasar dan cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun baik untuk pemasaran lokal maupun pemasaran luar NTB.

Pada dasarnya bila dilihat potensi sektor peternakan, maka membangun peternakan hendaknya secara menyeluruh dan harus dilandasi dengan pemikiran untuk membangun masyarakt yang maju karena masyarakat yang maju merupakan cerminan adanya kecerdasan di dalamnya dan salah satu faktor penting untuk meningkatkan kecerdasan adalah produk peternakan. Dengan demikian, produk peternakan merupakan produk yang akan dibutuhkan secara abadi dan tingkat kebutuhannya akan selalu meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk.

Selama tahun 2020 sampai dengan 2024 rata-rata pertumbuhan populasi ternak ruminansia sapi potong tumbuh sebesar 0,5 persen per tahun dimana populasi ternak ayam ras petelur merupakan komoditi peternakan terbanyak dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 21,42 persen pertahun di ikuti dengan ayam ras petelur dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 18,20 persen pertahun.

Secara keseluruhan, bahwa sektor peternakan NTB masih menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas populasi ternak, terutama ternak kecil dan unggas lokal, namun memiliki potensi besar pada subsektor unggas modern (ayam ras pedaging dan petelur) serta ternak besar khususnya sapi yang merupakan komoditas strategis daerah. Oleh karena itu, arah kebijakan ke depan perlu difokuskan pada peningkatan produktivitas dan daya saing sapi, penguatan rantai pasok unggas, serta upaya revitalisasi populasi ternak kecil dan tradisional untuk menjaga keberlanjutan ketahanan pangan dan perekonomian daerah.

Tabel 2. 3 Populasi Ternak Tahun 2020-2024

No.	Jenis Ternak	Populasi					Rata-rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Sapi	1.285.746	1.320.551	1.219.784	1.288.610	1.305.294	0,50
2	Kerbau	115.151	120.110	102.385	105.660	94.456	(4,46)
3	Kuda	43.705	41.715	36.871	34.078	32.986	(6,74)
4	Kambing	709.768	711.450	652.276	512.525	481.204	(8,90)
5	Domba	23.058	22.161	19.784	15.030	7.495	(22,19)
6	Babi	69.518	64.777	58.803	50.328	53.409	(6,08)
7	Ayam Buras	7.697.844	9.201.252	9.206.819	8.223.707	4.695.534	(8,50)
8	Ayam Ras Pedaging	15.787.388	34.124.270	31.713.828	39.045.381	15.855.597	18,20
9	Ayam Ras Petelur	1.438.497	3.444.223	3.131.512	2.780.498	1.850.146	21,42
10	Itik	737.703	777.467	727.130	524.339	460.115	(10,31)
Jumlah		**27.908.378**	**49.827.976**	**46.869.192**	**52.580.156**	**24.836.236**	**8,01**

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, 2025

Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB NTB selama tahun 2020 sampai dengan 2024 dari segi nilai menunjukkan trend peningkatan. Pada tahun 2020, nilai sub sektor peternakan sebesar Rp. 5,2 trilyun, kemudian hingga tahun 2024 mengalami

peningkatan menjadi Rp. 6,8 trilyun. Namun persentase terhadap PDRB berfluktuasi antara 3,66–3,92 persen dan titik terendah pada tahun 2022 sebesar 3,66 persen. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun nilai peternakan terus tumbuh, kontribusinya relatif stagnan karena pertumbuhan sektor lain lebih cepat. Ke depan, subsektor ini perlu diarahkan pada peningkatan daya saing dan hilirisasi agar kontribusinya terhadap perekonomian daerah semakin optimal. Sebagaimana tergambar pada grafik dibawah ini.

Grafik 2. 11 Perkembangan Kontribusi Nilai dan Persentase Terhadap PDRB ADHB Komoditi Peternakan NTB Tahun 2020-2024

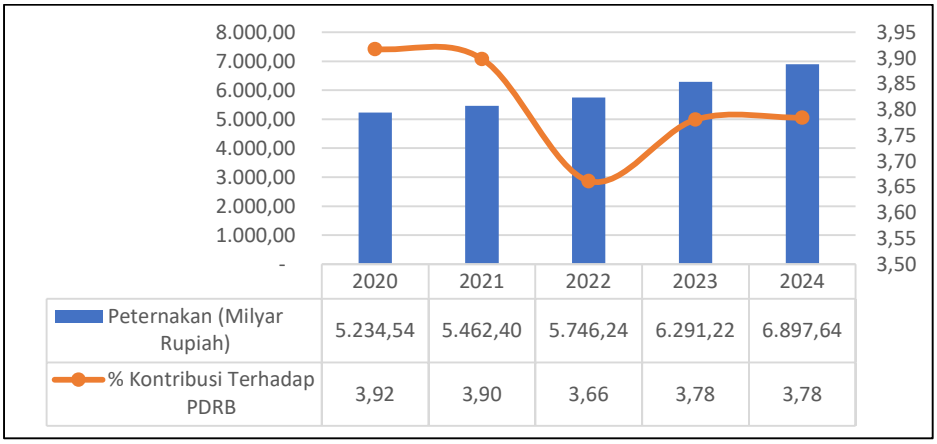

	2020	2021	2022	2023	2024
Peternakan (Milyar Rupiah)	5.234,54	5.462,40	5.746,24	6.291,22	6.897,64
% Kontribusi Terhadap PDRB	3,92	3,90	3,66	3,78	3,78

Sumber : BPS NTB, 2025 (data diolah)

2.1.2.2 Kehutanan

Berdasarkan data luas kawasan non hutan di Provinsi NTB, pemanfaatan lahan didominasi oleh kawasan pertanian lahan kering yang mencapai 115.375,53 hektar, diikuti oleh savana/padang rumput seluas 76.777,18 hektar dan semak belukar seluas 55.011,77 hektar. Selain itu, terdapat pula lahan pertanian lahan kering campur semak dengan luas 39.469,53 hektar yang menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas pertanian masyarakat. Sementara itu, kawasan sawah tercatat hanya seluas 2.488,54 hektar, menunjukkan keterbatasan lahan basah untuk produksi pangan, sehingga berpotensi menimbulkan tantangan dalam peningkatan ketahanan pangan jika tidak diimbangi dengan intensifikasi dan efisiensi pemanfaatan lahan. Lahan terbuka (6.595,55 hektar), tubuh air (3.245,85 hektar), serta tambak (1.130,31 hektar) memiliki peran spesifik, baik dalam ekosistem maupun dalam mendukung sektor perikanan dan lingkungan. Adapun kawasan permukiman/lahan terbangun (429,84 hektar) dan pertambangan (2.230,35 hektar) relatif kecil dibandingkan penggunaan lahan untuk sektor primer.

Struktur kawasan non hutan di NTB menunjukkan ketergantungan yang besar terhadap lahan kering, savana, dan semak belukar sebagai basis ekonomi masyarakat, terutama di sektor pertanian dan peternakan. Namun, keterbatasan lahan sawah serta luas kawasan permukiman yang relatif kecil mengindikasikan perlunya perencanaan tata

ruang yang lebih optimal untuk mendukung kebutuhan pangan, pemukiman, dan industri. Dalam pengelolaan kawasan non hutan perlu diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian secara berkelanjutan, pengembangan tambak dan perikanan darat, serta pengendalian alih fungsi lahan agar tetap sejalan dengan upaya menjaga keseimbangan ekologi dan ketahanan pangan daerah.

Grafik 2. 12 Luas Kawasan Non Hutan di Provinsi NTB Tahun 2024

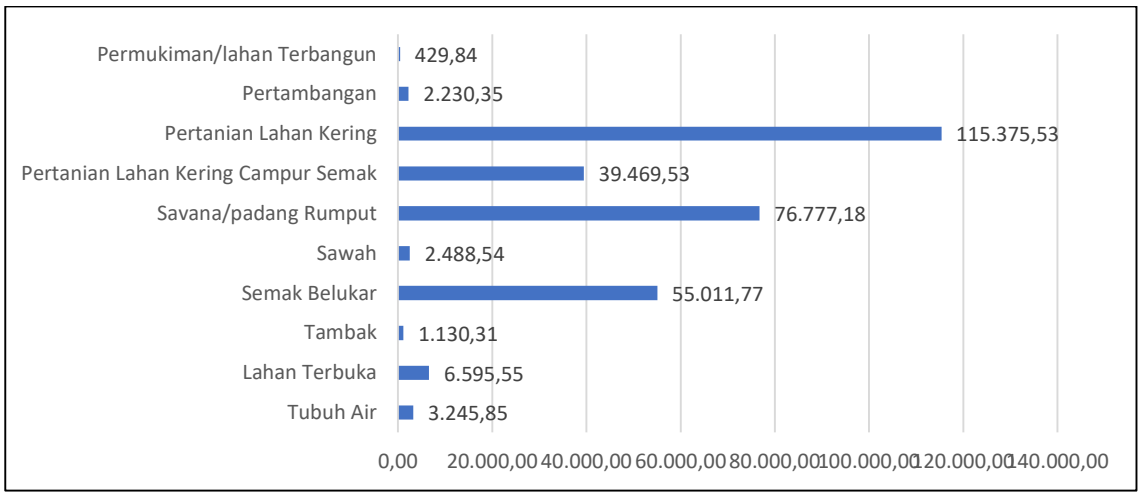

Sumber: Dinas LHK Provinsi NTB, 2023

Berdasarkan data luas kawasan hutan di Provinsi NTB, ekosistem hutan didominasi oleh hutan lahan kering sekunder/bekas tebangan dengan luas mencapai 441.199,21 hektar, diikuti oleh hutan lahan kering primer seluas 300.622,23 hektar. Kedua kategori ini menunjukkan bahwa sebagian besar kawasan hutan di NTB masih berupa hutan kering yang menjadi penyangga utama keseimbangan lingkungan dan sumber daya ekonomi masyarakat, meskipun tekanan aktivitas manusia menyebabkan tingginya proporsi hutan sekunder. Sementara itu, hutan tanaman tercatat seluas 6.279,56 hektar, hutan mangrove sekunder/bekas tebangan seluas 4.604,40 hektar, dan hutan mangrove primer hanya 1.452,07 hektar. Luas mangrove yang relatif kecil mengindikasikan perlunya perhatian khusus dalam upaya rehabilitasi dan konservasi ekosistem pesisir, mengingat perannya yang penting sebagai pelindung alami wilayah pesisir, habitat biota laut, serta penopang mata pencaharian masyarakat pesisir.

Struktur kawasan hutan NTB masih sangat bergantung pada ekosistem hutan lahan kering, baik primer maupun sekunder, dengan luas mangrove dan hutan tanaman yang relatif terbatas. Kondisi ini mencerminkan tantangan dalam menjaga keberlanjutan fungsi hutan, terutama mengingat tingginya tekanan terhadap hutan sekunder dan keterbatasan ekosistem mangrove. Oleh karena itu, dalam RPJMD ke depan diperlukan kebijakan yang berfokus pada perlindungan hutan primer, percepatan rehabilitasi hutan sekunder, serta penguatan program rehabilitasi mangrove dan pengembangan hutan tanaman berkelanjutan. Upaya ini penting untuk memperkuat ketahanan ekologis,

mitigasi perubahan iklim, dan mendukung kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Grafik 2. 13 Luas Kawasan Hutan di Provinsi NTB Tahun 2024

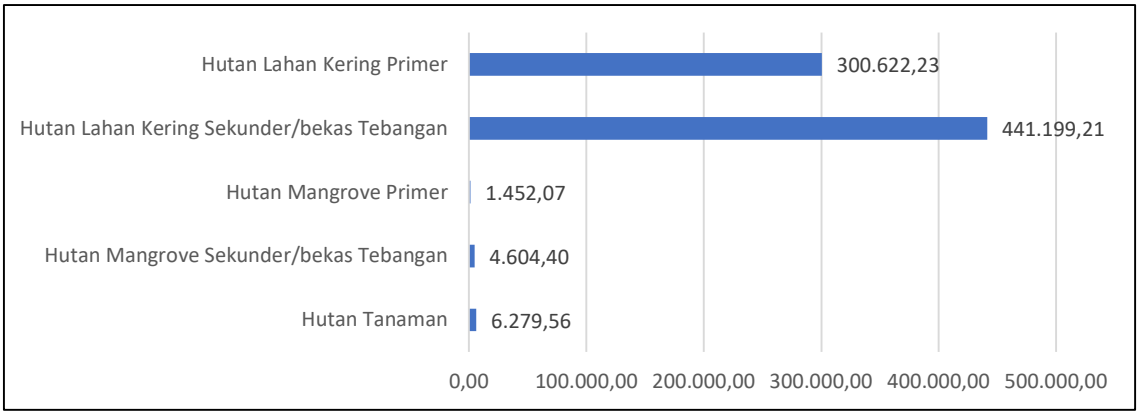

Sumber: Dinas LHK Provinsi NTB, 2023

Sektor kehutanan juga dapat menjadi sumber pendapatan melalui Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan ekowisata. Namun, tantangan seperti deforestasi, degradasi hutan, dan kebakaran hutan menjadi ancaman yang perlu dihadapi. Untuk itu diperlukan rehabilitasi hutan yang terdegradasi melalui reboisasi dan penghijauan, serta penguatan pengawasan terhadap pelaku perusakan hutan, sangat penting untuk menjaga kelestarian hutan di NTB.

2.1.2.3 Perikanan dan Kelautan

Sektor perikanan dan kelautan merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi daerah, khususnya bagi wilayah kepulauan dan pesisir seperti NTB. Potensi sumber daya kelautan yang melimpah, baik perikanan tangkap maupun budidaya, memberikan peluang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja, serta mendukung ketahanan pangan dan gizi.

Pemerintah Provinsi NTB telah menetapkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan sebagai bagian dari strategi ekonomi biru yang berkelanjutan. Program prioritas diarahkan pada peningkatan produktivitas nelayan dan pembudidaya ikan melalui penyediaan sarana prasarana perikanan, peningkatan kualitas SDM kelautan, modernisasi armada tangkap, serta penguatan tata kelola kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dari sisi volume, produksi perikanan NTB terus tumbuh dari 1,13 juta ton pada tahun 2020 menjadi 1,21 juta ton pada 2024. Lebih dari 79% produksi berasal dari perikanan budidaya, dengan komoditas unggulan seperti rumput laut, udang, dan ikan lainnya. Wilayah produksi utama meliputi Sumbawa, Bima, Lombok Timur, Sumbawa Barat, dan Dompu. Untuk perikanan tangkap, peningkatan hasil ditunjang oleh sumber daya tuna, tongkol, cakalang, dan gurita dari Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 713 dan 573.

Capaian ini menempatkan NTB sebagai produsen udang terbesar nasional dan produsen rumput laut kelima setelah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggah, NTT, dan Kalimantan Utara.

Grafik 2. 14 Perkembangan Capaian Produksi Perikanan Tahun 2020- 2024

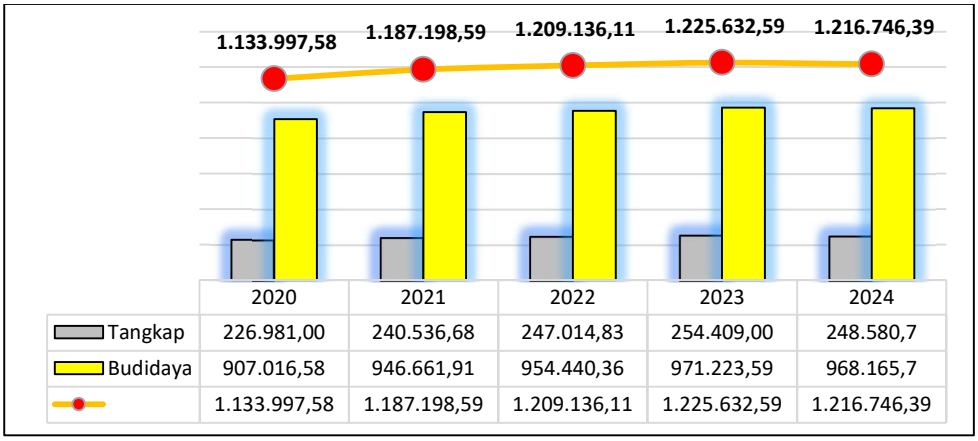

	2020	2021	2022	2023	2024
Tangkap	226.981,00	240.536,68	247.014,83	254.409,00	248.580,7
Budidaya	907.016,58	946.661,91	954.440,36	971.223,59	968.165,7
	1.133.997,58	1.187.198,59	1.209.136,11	1.225.632,59	1.216.746,39

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, 2024

Dalam subsektor perikanan tangkap, komoditas unggulan yang mendominasi produksi antara lain adalah tuna, cakalang, dan tongkol. Perairan Samudera Hindia di selatan NTB dan Selat Lombok di bagian barat menjadi habitat utama ikan-ikan pelagis besar dan kecil ini. Produksi perikanan tangkap terus menunjukkan tren peningkatan seiring dengan upaya peningkatan kapasitas armada, penyediaan sarana penangkapan yang modern, serta perbaikan tata kelola pelabuhan perikanan.

Sementara itu, subsektor perikanan budidaya memberikan kontribusi signifikan melalui komoditas unggulan seperti rumput laut, udang, lobster, dan kerapu. Budidaya rumput laut menjadi salah satu kegiatan ekonomi utama masyarakat pesisir di wilayah seperti Bima, Dompu, dan Lombok Timur. Produksi rumput laut NTB tidak hanya untuk kebutuhan domestik, tetapi juga telah menembus pasar ekspor, terutama ke negara-negara Asia dan Eropa.

Grafik 2. 15 Perkembangan Produksi Perikanan berdasarkan komoditas Unggulan Tahun 2020-2024

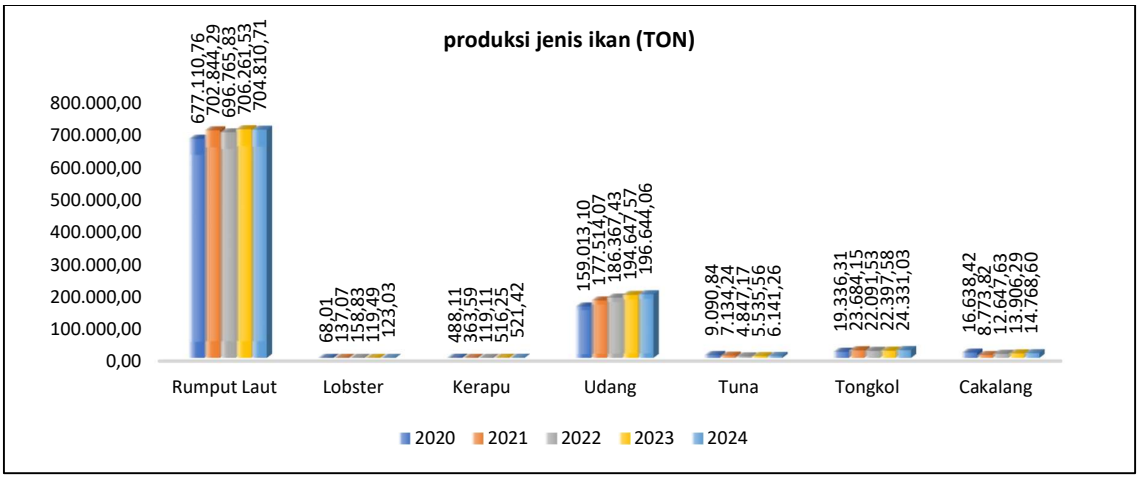

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, 2024

Sektor kelautan dan perikanan di Provinsi NTB mencatat *trend* pertumbuhan yang positif dan konsisten selama lima tahun terakhir. Berdasarkan rilis data BPS 2024, PDRB subsektor perikanan mengalami akselerasi dari 1,72% pada tahun 2020 menjadi 4,38% pada tahun 2024. Pertumbuhan ini mencerminkan peningkatan signifikan dalam aktivitas perikanan, baik budidaya maupun tangkap, yang sempat terdampak pandemi namun mampu bangkit secara bertahap, didorong oleh pemulihan rantai pasok, perbaikan harga komoditas, dan perluasan kawasan budidaya serta infrastruktur pelabuhan.

Grafik 2. 16 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Sub Sektor Perikanan Tahun 2020 – 2024

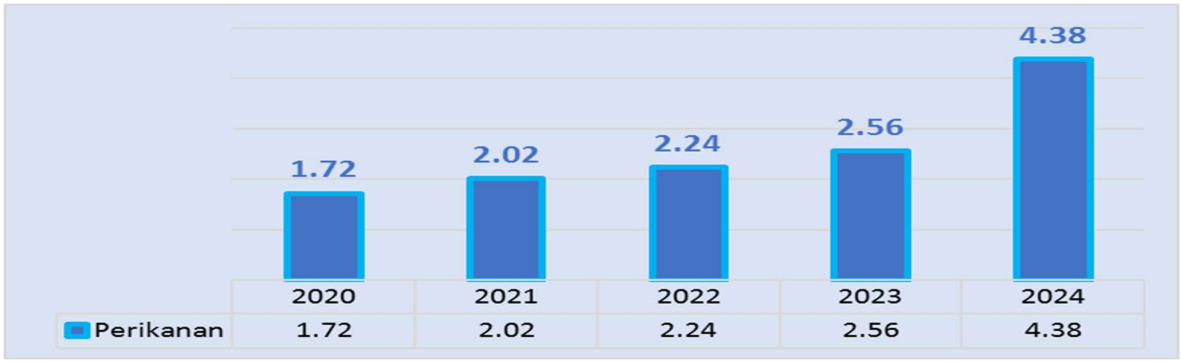

Sumber: BPS Provinsi NTB (Berita Resmi Statistik), 2024

Produksi perikanan NTB terus tumbuh dan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat pesisir, penyediaan lapangan kerja, serta ketahanan pangan daerah. Komoditas unggulan yang dihasilkan tidak hanya memiliki nilai ekonomi tinggi, tetapi juga berperan strategis dalam mendorong ekspor dan memperkuat posisi NTB

sebagai salah satu sentra produksi perikanan di kawasan timur Indonesia. Nilai Tukar Perikanan (NTP) selama periode 2020-2024 juga menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan pelaku usaha perikanan relatif terjaga. Meskipun NTP sempat mencapai 115,58 pada tahun 2022, angka ini menurun menjadi 105,59 pada tahun 2024. Perikanan budidaya konsisten mencatat NTP lebih tinggi dibanding tangkap, berkat kestabilan produksi dan harga rumput laut serta udang. Penurunan NTP dalam dua tahun terakhir menjadi indikasi perlunya peningkatan efisiensi usaha dan penguatan kelembagaan ekonomi nelayan melalui intervensi kebijakan berbasis perlindungan input produksi dan akses pasar.

Grafik 2. 17 Perkembangan Nilai Tukar Pertanian Sub-Sektor Perikanan
Tahun 2020-2024

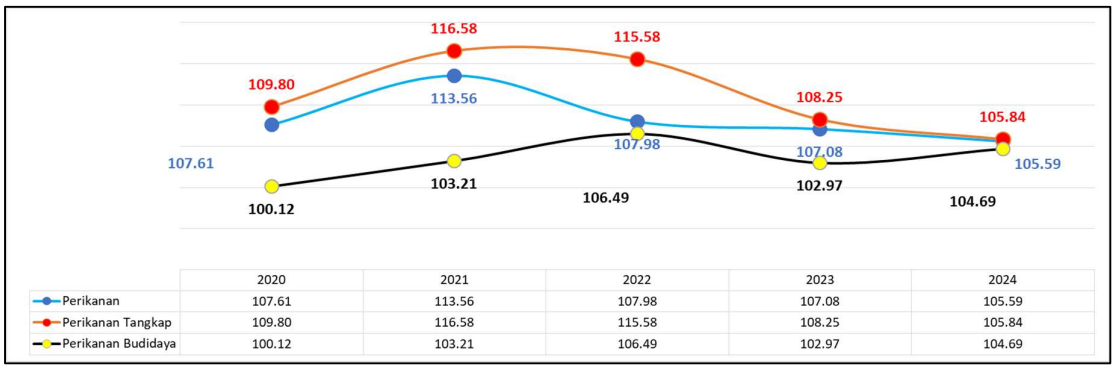

	2020	2021	2022	2023	2024
Perikanan	107.61	113.56	107.98	107.08	105.59
Perikanan Tangkap	109.80	116.58	115.58	108.25	105.84
Perikanan Budidaya	100.12	103.21	106.49	102.97	104.69

BPS Provinsi NTB (Berita Resmi Statistik), 2024

Terdapat juga sektor perikanan yang ditunjukkan oleh luas tambak sebesar 14.581,60 Ha (1,10%). Keberadaan tambak ini menjadi gambaran kegiatan budidaya perikanan yang memberikan kontribusi terhadap ekonomi masyarakat pesisir. Ekosistem mangrove juga memiliki peranan penting, dengan luas hutan mangrove sekunder mencapai 9.102,34 Ha dan mangrove primer seluas 1.723,57 Ha. Mangrove berfungsi untuk melindungi pesisir dari abrasi, intrusi air laut, dan sebagai habitat bagi berbagai spesies. Namun, kerusakan mangrove akibat alih fungsi lahan dan pencemaran menjadi tantangan yang harus diatasi. Untuk itu diperlukan pengelolaan tambak yang berkelanjutan dan rehabilitasi ekosistem mangrove sangat diperlukan untuk menjaga keberlanjutan sektor perikanan dan kelautan.

Gambar 2. 4 Luas Kawasan Perikanan di NTB

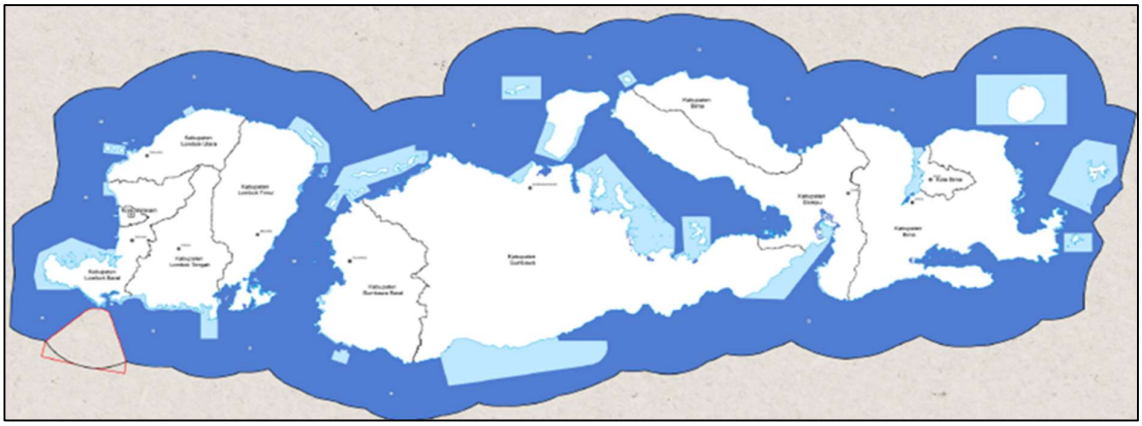

Sumber: RTRW Provinsi NTB Tahun 2024-2044

Provinsi NTB memiliki garis pantai sepanjang 2.999,54 km dan wilayah laut yang luas, menjadikannya salah satu provinsi dengan potensi perikanan yang sangat besar di Indonesia. Sesuai dengan RTRW Provinsi NTB tahun 2024-2044, kawasan perikanan tercatat seluas 2.388.501 Ha dan kawasan pergaraman 3.734 Ha. Kawasan perikanan ini memiliki ekosistem perairan yang beragam seperti laut, pesisir, tambak dan perairan umum (danau dan sungai) yang mendukung pengembangan perikanan tangkap dan budidaya. Potensi sumber daya perikanan tangkap di perairan NTB diperkirakan mencapai 290.000 ton per tahun namun tingkat pemanfaatannya baru mencapai 83% dengan rata-rata 241 ribu ton selama 2019-2024. Kinerja produksi perikanan menunjukkan peningkatan 2,7% tiap tahunnya. Sedangkan untuk potensi perikanan budidaya diperkirakan dapat mencapai produksi sebesar 1,5 juta ton dan yang termanfaatkan baru rata-rata (2019-2024) sebesar 983 ribu ton atau 65%. Tidak seperti perikanan tangkap yang produksinya terus meningkat, jumlah produksi perikanan budidaya menunjukkan penurunan dari 1,1 juta ton di tahun 2019 menjadi 980 ribu ton di tahun 2024.

Selanjutnya di sektor perikanan juga bergantung pada keberadaan infrastruktur yang mendukung, seperti pelabuhan perikanan, pasar ikan, fasilitas pendinginan dan pengolahan ikan serta jalur distribusi yang memadai. Di NTB, beberapa pelabuhan perikanan utama telah dikembangkan, Selain itu, keberadaan *cold storage* dan unit pengolahan ikan sangat penting dalam menjaga kualitas hasil perikanan agar tetap segar dan bernilai jual tinggi. Infrastruktur jalan dan transportasi yang baik juga mendukung distribusi hasil perikanan ke pasar lokal maupun nasional. Data pelabuhan perikanan di wilayah NTB dan pada tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2. 5 Pelabuhan Perikanan di Wilayah NTB Tahun 2024

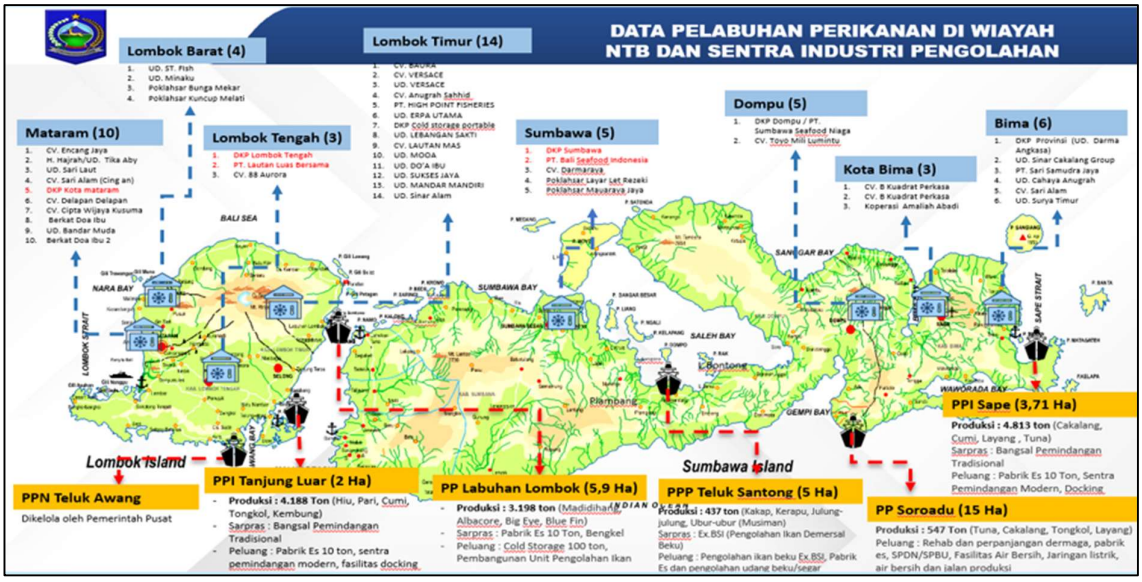

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, 2025

Selain perikanan, NTB juga dikenal sebagai sentra produksi garam rakyat. Jika emas disimbolkan dengan rumus kimia Au (Aurum), maka "emas putih" atau garam disimbolkan dengan NaCl (Natrium Klorida). Tentunya istilah emas putih ini bukan menunjukkan kandungan emas dalam arti sebenarnya sebagai salah satu logam paling berharga di muka bumi, namun hanya perumpamaan pada masa abad pertengahan tentang berharganya nilai garam. Bahkan di beberapa Negara, garam pernah dijadikan sebagai mata uang dikarenakan nilai jual yang tinggi. Terdapat ± 578 kelompok usaha garam di Provinsi NTB yang beranggotakan ± 5.263 orang. Kelompok usaha ini tersebar di 6 Kab/Kota, yaitu: Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Barat. Lahan potensi untuk pengembangan usaha garam di Provinsi NTB seluas ± 9.782 hektar, dengan lahan termanfaatkan hanya sebesar 24,62% atau seluas ± 2.410,21 hektar. Kondisi yang dapat dikatakan masih jauh dari maksimal, namun ternyata menghasilkan garam dengan jumlah terbesar ke-4 di Indonesia, setelah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Hal ini menjadi gambaran besarnya peluang sekaligus tantangan bagi garam NTB untuk dapat berkiprah di kancah nasional, baik dari aspek kuantitas maupun kualitasnya.

Produksi garam mengalami fluktuasi dengan capaian 86.429 ton (46,72%) dari target pada 2022, melonjak menjadi 205.535 ton (102,77%) pada 2023, dan turun kembali menjadi 143.796 ton (84,58%) pada 2024. Produksi terkonsentrasi di enam wilayah utama, yaitu Bima, Lombok Timur, Sumbawa, Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Kota Bima. Tantangan utama mencakup ketergantungan pada iklim, rendahnya adopsi

teknologi, dan keterbatasan infrastruktur. Ke depan, peningkatan efisiensi, hilirisasi, dan penguatan kelembagaan petambak menjadi kunci pembangunan subsektor ini.

Grafik 2. 18 Perkembangan Produksi Garam Provinsi NTB Tahun 2020-2024

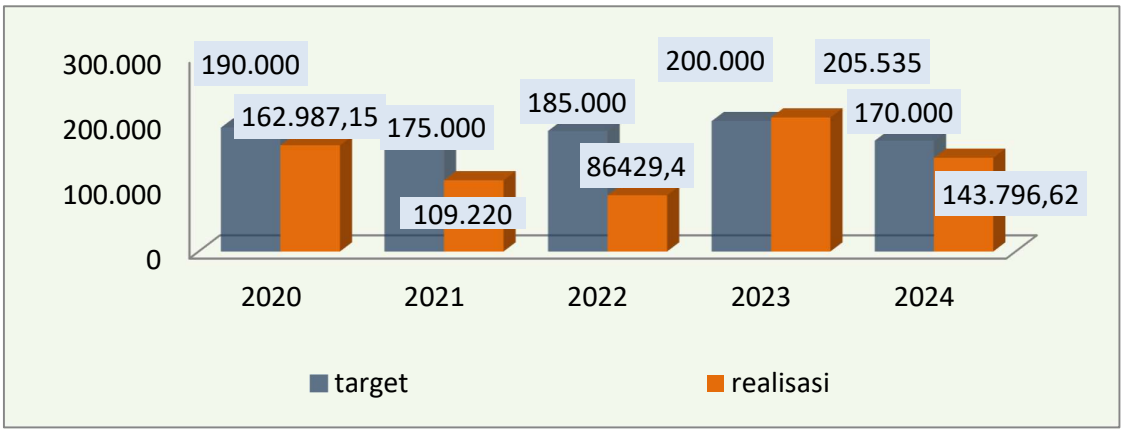

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, 2024

Sebagai bagian dari strategi keberlanjutan, NTB telah menetapkan 9 dari 14 kawasan konservasi perairan seluas lebih dari 182 ribu hektare yang telah diintegrasikan dalam RTRW. Kawasan ini dikelola oleh BLUD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDKP) dengan pendekatan pelayanan publik, seperti wisata tirta, eduwisata, dan penelitian. Salah satu inisiatif unggulan adalah pengembangan kawasan konservasi baru di Teluk Saleh untuk perlindungan Hiu Paus (*Rhincodon typus*), yang menjadi magnet wisata bahari kelas dunia. Hal ini sejalan dengan visi Gubernur NTB dalam mewujudkan provinsi yang makmur dan mendunia melalui keberlanjutan ekosistem pesisir.

Tabel 2. 4 Kawasan Konservasi Perairan Tahun 2024

No.	Kawasan	Kab/Kota	Luas (Ha)	Keterangan
1	TWP Gili Tangkong, Nanggu dan Sudak	Lombok Barat	21.132,52	Keputusan Menteri No. 93/Kepmen-KP/2018
2	TWP Gili Sulat dan Gili Lawang	Lombok Timur	10.000,00	No. 92/Kepmen-KP/2018
3	TWP Pulau Liang dan Ngali	Sumbawa	33.461,00	No. 20/Kepmen-KP/2020
4	TWP Gili Banta	Bima	40.500,00	No. 21/Kepmen-KP/2020
5	SAP Teluk Cempi	Dompu	22.387,31	No. 22/kepmen-KP/2020
6	Taman Gili Balu	Sumbawa Barat	5.847,67	No. 74 Tahun 2021
7	TPK Pulau Kramat, Bedil dan Temudong	Sumbawa	1.955,55	No. 104/Kepmen-KP/2023
8	TP Penyu Tata Sepang-Lunyuk	Sumbawa dan Sumbawa Barat	72.415,29	Proses Pengajuan Penetapan Kawasan
9	SAP Pulau Lipan dan Pulau Rakit	Sumbawa	26.670,80	No. 105/Kepmen-KP/2023
10	TWP Teluk Bumbang	Lombok Tengah	6.310,00	Proses Revisi
11	KKP3K Pulau Panjang	Sumbawa	22.185,14	No. 102/Kepmen-KP/2023

No.	Kawasan	Kab/Kota	Luas (Ha)	Keterangan
12	KKP Pulau Medang	Sumbawa	11.339,56	Dicadangkan
13	KKP3K Pulau Kelapa	Bima	6.947,28	Dicadangkan
14	KKP3K Pulau Sangiang	Bima	48.610,01	Dicadangkan
	TOTAL		**328.558,33**	

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, 2024

2.1.2.4 Pariwisata

Provinsi NTB merupakan daerah yang memiliki keanekaragaman objek wisata yang beragam dengan jumlah yang relatif banyak. Provinsi NTB terdiri dari 2 pulau Besar yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, dan dikeliling 401 pulau kecil dengan 32 pulau diantaranya berpenghuni dan Sebagian menjadi obyek pariwisata.

Dalam konteks geografi pariwisata, Provinsi NTB berada pada posisi yang strategis atau berada pada segitiga emas daerah tujuan wisata (DTW) utama Indonesia yaitu Pulau Bali di sebelah barat sebagai tujuan wisata internasional, Taman Wisata Pulau Komodo di sebalah timur dan Tanah Toraja di sebelah utara. Wilayah NTB terdiri dari 40,87% daratan dan 59,13% perairan dengan potensi pariwisata dikelompokan menjadi: wisata alam, wisata ekonomi kreatif, wisata bahari, wisata budaya dan wisata buatan. Provinsi NTB juga memiliki 457 desa wisata, 11 Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) yang terdiri dari 4 KSPD Pulau Lombok dan 7 KSPD Pulau Sumbawa sesuai Lampiran II Peraturan daerah Provinsi NTB Nomor: 7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2013-2028. Selain itu, keseriusan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan di Provinsi NTB oleh Pemerintah Pusat diwujudkan dalam penetapan Kawasan KEK Mandalika sebagai salah satu dari lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas yakni Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika dan Likupang.

Mengacu pada Peraturan daerah Provinsi NTB Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2013-2028 Provinsi NTB menetapkan 12 Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) yang terdiri dari 4 KSPD Pulau Lombok dan 8 KSPD Pulau Sumbawa.

a. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Pulau Lombok yang meliputi pengembangan:
   1. KSPD Mataram dan sekitarnya meliputi kawasan wisata KotaMataram, Islamic Center, Loang Baloq, Taman Mayura,Sekarbela, Taman Narmada, Suranadi dan Lingsar sebagaikawasan wisata budaya, religi, kuliner, belanja dan MICE;
   2. KSPD Senggigi-Tiga Gili dan sekitarnya meliputi kawasan wisata Batulayar, Batu Bolong, Senggigi, Tiga Gili, Sindang Gila, Senaru, Dusun Tradisional Segenter sebagai kawasan wisata pantai, bawah laut, olah raga berbasis bahari, budaya, religi dan kuliner
   3. KSPD Kuta Mandalika dan sekitarnya meliputi kawasan wisata Gili Gede, Gili Nanggu, Bangko-Bangko, Selong Belanak, Sade, Kute, Gili Indah sebagai kawasan wisata pantai, bawah laut, olah raga berbasis bahari, dan budaya;

4. KSPD Rasimas-Sembalun dan sekitarnya meliputi kawasan wisata Benang Stokel, Gili Sulat, Sembalun, Gunung Rinjani, Otak Kokoq sebagai kawasan wisata agro, pegunungan dan kuliner;

b. Destinasi Pariwisata Daerah DPD Pulau Sumbawa yang meliputi pengembangan:
   1. KSPD Alas Utan dan sekitarnya meliputi kawasan wisata Agrotamasa, Pulau Bedil, Pulau Bungin, sebagai kawasan wisata pantai, agro, budaya, dan kuliner;
   2. KSPD Poto Tano - Maluk dan sekitarnya meliputi kawasan wisata Poto Tano dan Maluk sebagai kawasan wisata pantai, olah raga berbasis bahari, budaya, dan kuliner;
   3. KSPD Batu Hijau- Dodo Rinti dan sekitarnya meliputi kawasan wisata Batu Hijau dan Dodo Rinti sebagai kawasan wisata pegunungan, tambang, budaya, dan kuliner;
   4. KSPD SAMOTA (Teluk Saleh-Moyo-Tambora) dan sekitarnya meliputi kawasan wisata Ai bari, Moyo, Batu Bulan, dan Tambora sebagai kawasan wisata alam dan Teluk Saleh sebagai kawasan wisata pantai, bawah laut, olah raga berbasis bahari, budaya, dan kuliner;
   5. KSPD Hu'u dan sekitarnya sebagai kawasan wisata pantai, bawah laut, olah raga berbasis bahari, dan kuliner;
   6. KSPD Teluk Bima dan sekitarnya meliputi kawasan wisata Pantai Lawata, Amahami, Kalaki, Pulau Kambing, Wadu Pa'a, Benteng Asakota sebagai kawasan wisata pantai, bawah laut, olah raga berbasis bahari, sejarah, budaya, dan kuliner;
   7. KSPD Teluk Waworada - Wane dan sekitarnya meliputi kawasan wisata teluk Waworada, Pantai Baba, Pantai Sera Nae, Rontu, Wane, Woro dan Pantai Marada sebagai kawasan wisata pantai, bahari, dan minat khusus; dan
   8. KSPD Sape-Pulau Sangiang dan sekitarnya meliputi kawasan wisata Sangiang Pulau, Pulau Ular, Gili Banta, Pulau Kelapa, Bajo Pulau, Pantai Papa sebagai wisata bahari, minat khusus, bawah laut, wisata alam dan kuliner serta Uma Lengge Maria dan Sambori sebagai kawasan wisata budaya.

Tabel 2. 5 Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa

NO	KSPD	TIPOLOGI						JUMLAH
		ALAM	BUDAYA	RELIGI	PETUALANGAN	BUATAN	GEOLOGI	
1	KSPD Pulau Lombok	97	16	8	17	7	-	145
2	KSPD Pulau Sumbawa	79	15	4	21	-	1	120
Total		**176**	**31**	**12**	**38**	**7**	**1**	**265**

Sumber: Dinas Pariwisata NTB, diolah 2025

2.1.2.5 Pertambangan, Energi dan Mineral

Berdasarkan kondisi geologi, Provinsi NTB memiliki kondisi geologi yang kompleks dan menarik, terbentuk akibat aktivitas tektonik, vulkanisme serta proses sedimentasi selama jutaan tahun. Wilayah NTB termasuk dalam busur Sunda-Banda yang aktif secara geologi menjadikannya daerah dengan banyak gunung api serta struktur batuan yang beragam. Secara geologis wilayah NTB merupakan bagian dari busur vulkanik aktif yang terbentuk akibat subduksi Lempeng Indo-Australia di bawah Lempeng Eurasia menjadikannya daerah dengan aktivitas gempa bumi yang tinggi. Aktivitas tektonik ini juga berkontribusi terhadap pembentukan gunung api dan munculnya sumber daya geologi di wilayah NTB.

Peristiwa ini juga membentuk NTB menjadi wilayah yang kaya akan sumber daya mineral, tanah subur serta keanekaragaman lanskap. Sebagian besar jenis batuan di NTB merupakan batuan vulkanik terutama di Pulau Lombok dan sebagian di Pulau Sumbawa. Batuan ini berperan dalam membentuk tanah subur yang cocok untuk pertanian dan perkebunan. Sumber daya daya mineral lain yang cukup besar adalah emas dan tembaga yang tersebar di beberapa wilayah seperti Tambang Batu Hijau Kabupaten Sumbawa Barat, Tambang Onto Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu. Selanjutnya mineral ini juga tercatat terdapat di wilayah perbukitan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat berdasarkan kegiatan ekplorasi yang dilakukan. Batugamping dan pasir besi merupakan sumber daya mineral lainnya yang juga ditemukan dengan jumlah yang tidak terlalu besar.

Tabel 2. 6 Sumber Daya dan Cadangan Mineral Logam Tahun 2023

NO	MINERAL	Sumber Daya (Ton)		Cadangan (Ton)	
		Bijih	Logam	Bijih	Logam
1	Tembaga	5.067.750.000	26.993.325	782.000.000	3.137.500
2	Emas	5.854.865.454	1.998	800.794.683	247
3	Besi Primer	1.888.160	9.554	658.250	-
4	Mangan	4.727.386	92.316	4.970.655	109.105

Sumber : Kementerian ESDM, 2024

Tabel 2. 7 Sumber Daya dan Cadangan Mineral Bukan Logam Tahun 2023

NO	MINERAL	Jumlah Lokasi	Hipotetik (Ton)	Sumber Daya (Ton)			Cadangan (Ton)	
				Tereka	Tertunjuk	Terukur	Terkira	Terbukti
1	Batu Gamping	27	1.116.263.000	21.826.000	58.050.000	-	-	-
2	Belerang	1	300	-	-	-	-	-
3	Felspar	1	-	-	24.675.300	-	-	-
4	Pasir Kuarsa	1	83.000	-	-	-	-	-

Sumber : Kementerian ESDM, 2024

Provinsi NTB memiliki potensi energi terbarukan yang dapat dikembangkan sebagai sumber energi listrik diantaranya panas bumi terdapat di tiga lokasi yaitu Sembalun, Lombok Timur, Maronge, Sumbawa dan Hu'u, Dompu. Energi air atau pembangkit listrik tenaga hidro/air direncanakan juga akan dikembangkan PLTS, PLT Biomassa dan PLT Hibrida (PLTD+PLTS) hingga melayani daerah terpencil dengan harapan dapat menurunkan Biaya Pokok Pembangkitan (BPP). Terdapat potensi energi arus laut di Selat Lombok, Selat Alas dan Pulau Sape, Samudera Hindia. *Ocean Thermal Energy Conversion* (OTEC) di Lombok Utara dan potensi energi gelombang laut di Lombok dan Sumbawa yang bisa dikembangkan dengan potensi berkisar 10-50 MW namun perlu kajian lebih lanjut. Untuk itu ke depan potensi tersebut diharapkan dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi energi terbarukan yang sudah diaplikasikan melalui usaha skala besar diantaranya potensi energi matahari yang digunakan sebagai tenaga listrik. Sampai dengan akhir tahun 2023 pemanfaatan energi terbarukan yang sudah dimanfaatkan oleh PLN sebagai sumber pembangkit listrik di Pulau Lombok sebesar 41,82 MW, naik 4,06% dari 40,19 MW di tahun 2022. Provinsi NTB siap terhadap kebijakan Pemerintah Pusat kedepan yang berencana mengurangi ketergantungan pada pembangkit batubara sebagai bagian dari Program Net Zero Emision yang ditargetkan pada tahun 2060.

Grafik 2. 19 Bauran Energi Daerah Provinsi NTB

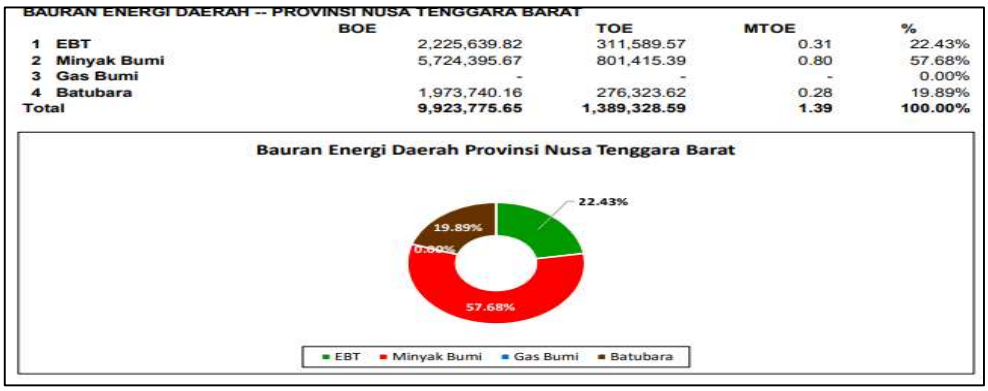

Sumber: Laporan Tahunan Dinas ESDM NTB, diolah 2024
Keterangan: BOE: Barrel Oil Equivalent, TOE: Tons Oil Equivalent, MTOE: Millions Ton Oil Equivalent.

2.1.2.6 Kawasan Geopark Rinjani dan Tambora

Geopark adalah wilayah terpadu yang terdepan dalam perlindungan dan penggunaan warisan geologi, biodiversity dan culture diversity dengan cara yang berkelanjutan, dan mempromosikan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggal di dalamnya. Provinsi NTB memiliki 2 (dua) geopark yaitu Geopark Rinjani yang masuk dalam berstatus Unesco global geopark dan Geopark Nasional Tambora yang berstatus Geopark Nasional. Kawasan Geopark Rinjani Geopark Rinjani Lombok diinisiasi ke dalam program Geopark sejak 2008, dalam perkembangannya diakui sebagai Geopark Nasional pada 7 Oktober 2013, dan pada tahun 2018 ditetapkan menjadi Unesco Global Geopark (UGG). Potensi yang dimiliki Rinjani Lombok Unesco Global Geopark dari yang sudah

diidentifikasi terdiri dari 22 situs Geologi (Geo heritage), 8 Situs Biologi (Bio heritage), dan 17 situs budaya (Culture Heritage). Persebarannya meliputi wilayah Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, dan Kota Mataram. Dukungan pengembangan Geopark Rinjani Lombok juga telah mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah yang selanjutnya akan di tindaklanjuti dengan kerjasama dan sinkronisasi program guna mendukung Geopark Rinjani sebagai Geopark Dunia. Salah satu pesona unggulan Geopark Rinjani adalah Danau Segara Anak yang berada pada ketinggian 2.010 meter dari permukaan laut, Kaldera Samalas memiliki ukuran sekitar 6 km x 8,5 km dan tinggi 800 meter yang dihasilkan dari letusan gunung berapi Samalas pada 1257. Dengan Adanya Rinjani Lombok Unesco Global Geopark diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari aspek kepariwisataan yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya Geopark Tambora ditetapkan sebagai salah satu geopark nasional pada tahun 2017 lalu. Delineasi Kawasan Geopark Nasional Tambora mencakup dua kabupaten dan empat kecamatan yakni Kabupaten Bima dan Dompu yang terdiri dari Kecamatan Sanggar, Tambora, Kempo, dan Pekat. Bertemakan gunung api, Geopark Tambora tentunya memiliki nilai jual yang sangat tinggi dari segi geologinya. Letusan Gunung Api Tambora pada Tahun 1815 disebut sebagai letusan terdahsyat gunung api pada saat itu, sebab berdampak secara global. Selain letusan maha dahsyat Gunung Tambora, nilai geologi yang tinggi juga terdapat di Kawasan Pulau dan Danau Satonda yang merupakan pulau gunungapi dengan bentuk morfologi yang unik terdiri dari dua kawah yang memiliki ukuran dan kedalaman yang berbeda. Danau Satonda ini merupakan danau berair asin yang asal muasalnya diperkirakan dari air laut yang masuk kedalam danau akibat dari tsunami pada saat terjadinya letusan Gunung Tambora Tahun 1815. Nilai geologi yang tinggi juga terdapat di kawasan Doro Bente sebagai kerucut terak yang lokasinya berada di sekitar Gunung Tambora dengan usia terbentuknya antara 15.000 s.d 4000 tahun lalu. Doro bente memiliki keunikan tersendiri dengan bentuk yang menyerupai cawan berfungsi sebagai benteng alam.

2.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Hasil analisa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 menggambarkan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Daya dukung lingkungan hidup mengacu pada kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan ekosistem secara berkelanjutan. Berdasarkan kajian dalam dokumen KLHS RPJMD Provinsi NTB, daya dukung di provinsi ini, khususnya untuk sumber daya air, mengalami tekanan yang signifikan. Sebagian besar wilayah di NTB, yakni sekitar 920.672 ha, sudah melebihi kapasitas daya dukung air yang dapat disediakan oleh lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan air di wilayah tersebut telah mencapai tingkat konsumsi yang melampaui kapasitas alami lingkungan untuk menyediakannya. Sebaliknya, sekitar 1.090.877 ha wilayah lainnya masih memiliki kapasitas daya dukung yang lebih baik, tetapi ini hanya mencakup 46% dari total luas wilayah Provinsi NTB. Kekurangan daya dukung air ini dapat berdampak langsung pada sektor pertanian, kehidupan domestik,

serta ketahanan pangan, yang sangat bergantung pada ketersediaan air yang cukup. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya air yang efisien dan berkelanjutan menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekologis dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di NTB.

Daya tampung lingkungan hidup mengacu pada kapasitas lingkungan untuk menyerap zat atau komponen lain yang dimasukkan ke dalamnya tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Di Provinsi NTB, daya tampung lingkungan hidup juga menghadapi masalah yang tidak kalah berat, terutama terkait dengan kualitas air dan udara, serta pengelolaan lahan. Sebagai contoh, terkait dengan jasa ekosistem penyediaan air, sekitar 55,46% wilayah di NTB memiliki kondisi penyediaan air yang rendah hingga sedang. Sementara itu, 41,47% wilayah lainnya memiliki kualitas penyediaan air yang lebih rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar wilayah NTB masih kesulitan dalam menyediakan air bersih yang cukup untuk kebutuhan masyarakat dan sektor ekonomi. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kapasitas daya tampung lingkungan, seperti dengan memperbaiki kualitas air, mengurangi pencemaran, dan melakukan restorasi ekosistem yang sudah rusak. Di sisi lain, daya tampung lahan di NTB juga terancam oleh konversi lahan menjadi area pemukiman dan pertanian yang tidak ramah lingkungan. Pengelolaan lahan yang lebih baik, seperti melalui program reboisasi dan pengendalian alih fungsi lahan, sangat diperlukan untuk memastikan bahwa lingkungan dapat menyerap komponen-komponen yang ada tanpa merusak ekosistem secara keseluruhan.

Isu lingkungan strategis di Provinsi NTB terkait daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup mencakup beberapa tantangan utama, yaitu ketersediaan air yang terlampaui, lahan kritis, dan degradasi ekosistem. Ketersediaan air di beberapa wilayah sudah melebihi kapasitas alamiah, yang berisiko menimbulkan krisis air bagi sektor pertanian dan kehidupan masyarakat. Lahan kritis yang tidak lagi subur untuk pertanian membutuhkan rehabilitasi untuk mengembalikan fungsinya. Selain itu, degradasi ekosistem, seperti penebangan hutan mangrove, meningkatkan kerentanan terhadap bencana alam seperti banjir dan tsunami. Untuk mengatasi ini, dokumen KLHS RPJMD Provinsi NTB merekomendasikan rehabilitasi lahan kritis, pengelolaan air yang lebih efisien, restorasi ekosistem, dan pengelolaan lahan yang lebih ketat untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Perkembangan wilayah Provinsi NTB memperhatikan interaksi antara aspek keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup dan keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat, maka ada 4 (empat) kemungkinan skenario yang akan terjadi. Dengan pertumbuhan dan perkembangan wilayah yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun terakhir menunujukkan tingkat kesejahteraan mayarakat di Provinsi NTB relatif meningkat, namun kondisi lingkungan hidup dalam ekoregion terus mengalami degradasi. Beberapa kondisi di Provinsi NTB yang mengindikasikan telah terjadi ***over-exploitation*** dan menempatkan Provinsi NTB pada Kuadran III Keberlanjutan Lingkungan Hidup adalah:

1. **Penurunan angka kemiskinan.** Selama kurun waktu tahun 2018 - 2022, penurunan angka kemiskinan nasional berbanding lurus dengan penurunan kemiskinan di Provinsi NTB, dari 14,63% dengan jumlah penduduk miskin 735,62 jiwa pada tahun 2018 menjadi 13,88% dengan jumlah penduduk miskin sebesar 705.680 jiwa pada tahun 2022.
2. **Peningkatan** nilai PDRB. Pertambahan nilai PDRB sektor industri di tahun 2019 sebesar 174 milyar, namun di tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -107,30 milyar dibandingkan tahun 2019.
3. **Peningkatan Gini Ratio.** Pada September 2022, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Provinsi NTB yang diukur oleh Gini Ratio sebesar 0,374%.
4. **Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**. Capaian IPM Provinsi NTB dalam 10 tahun terakhir terus mengalami kemajuan. Pada tahun 2022, IPM Provinsi NTB mencapai 69,46, meningkat 1,18%.
5. **Penurunan kualitas Lingkungan Hidup.** Penurunan kualitas lingkungan di Provinsi NTB tergambar melalui kondisi nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), yaitu indeks kualitas air (IKA), indeks kualitas udara (IKU), dan indeks kualitas tutupan lahan (IKTL). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi NTB sebesar 56,53 (kurang baik) dengan perincian:
    - Nilai indeks kualitas air (IKA) yang cenderung meningkat dan berada pada kategori relatif “Baik” dalam tiga tahun terakhir. Penurunan kualitas air disebabkan oleh aktivitas manusia yang memanfaatkan air sungai untuk usaha pertanian, peternakan/perikanan, industri, dan keperluan rumah tangga. Air sungai menjadi tidak layak lagi untuk memenuhi kebutuhan manusia dan mendukung ekosistem. Selain itu, tingginya nilai E-coli disebabkan karena kebiasaan masyarakat yang memanfaatkan badan sungai sebagai lokasi buang air besar (BAB) dan tempat pembuangan limbah padat/sampah maupun limbah cair.
    - Nilai indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) berdasarkan tutupan lahan. Berdasarkan data luas lahan kritis2 Provinsi NTB tahun 2016 mencapai 578.645,97 Ha atau sekitar 29% dari luas wilayahnya. Kabupaten Lombok Utara memiliki persentase luas lahan kritis terbesar jika dibandingkan dengan luas wilayahnya yaitu sebesar 54,74%. Lahan kritis di dalam kawasan hutan yang paling luas terdapat di Kabupaten Bima, yaitu 57.554,79 Ha. Sedangkan lahan kritis di luar kawasan hutan yang paling luas berada di Kabupaten Sumbawa, yaitu 110.814,28 Ha. Jika akumulasi luas lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan, maka Kabupaten Bima memiliki luas lahan kritis terluas sebesar 161.120,5 Ha. Faktor penyebab meningkatnya lahan kritis adalah perambahan hutan, penebangan liar (illegal logging), prinsip pembangunan berkelanjutan seperti pemanfaatan sumber daya hutan yang tidak berazaskan kelestarian, penataan zonasi kawasan belum berjalan, pola pengelolaan lahan tidak konservatif dan pengalihan status lahan untuk berbagai kepentingan.
6. **Pengelolaan sampah yang belum optimal.** Berdasarkan data tahun 2022, sampah yang dapat di tangani oleh pemerintah daerah pada TPA Kebon Kongok hanya sebesar 12,78% sedangkan sisanya 87,22% yang tidak mampu terangkut sarana

prasarana yang tersedia, tertumpuk di sekitar permukiman, di lahan-lahan kosong, di pinggir-pinggir jalan bahkan di sekitar daerah aliran sungai yang akhirnya terbawa air sungai menuju ke laut.

7. **Peningkatan suhu udara**. Tren peningkatan suhu udara 0,50C pada tahun 2030, Curah hujan pada musim kemarau diproyeksikan semakin berkurang sekitar 20% dari kondisi saat ini. Peningkatan nilai suhu rata-rata tahunan sebesar 0.9 - 1.1°C di wilayah NTB, Kenaikan suhu udara minimum rata-rata tahun 2001 - 2010 sebesar 0.7°C, tertinggi 1.4°C di tahun 2010. Proyeksi peningkatan nilai suhu minimum tahunan di tahun 2020-2049 sebesar 2.3 - 2.7°C di wilayah NTB.

Perencanaan pembangunan dan kegiatan manusia yang tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang dapat meningkatkan kerentanan dan risiko bencana. Pemanfaatan daerah resapan dan tangkapan air dapat mengakibatkan ketika musim hujan air terhambat meresap ke dalam tanah dan membentuk genangan sehingga akhirnya terjadi banjir. Pembuangan sampah di sepanjang daerah aliran sungai atau cemaran dari limbah pabrik dapat menyebabkan terjadinya pendangkalan, rusaknya ekosistem sungai, menurunkan kualitas air tanah dan memicu risiko banjir.

Penambangan ilegal juga dapat menimbulkan risiko abrasi pantai, tanah longsor, dan banjir, baik di lokasi penambangan maupun di daerah sekitarnya dan mengganggu kondisi ekosistem. Alih fungsi lahan terbuka hijau menjadi peruntukan lain seperti pemukiman atau bangunan infrastruktur berpotensi mengurangi peresapan air ke dalam tanah dan mengurangi cadangan air dalam tanah juga dapat berpotensi menurunkan daya dukung lingkungan sehingga menimbulkan kerentanan ekologis

2.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia dan pembangunan berkelanjutan, kondisi energi, air, dan pangan menjadi kesatuan yang krusial dan saling berkaitan. Ukuran yang menjadi indikator yang menggambarkan suatu daerah yang berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan adalah Indeks Ketahanan Pangan, Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan, Konsumsi Listrik Per Kapita, Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum, dan indikator terkait lainnya.

Grafik 2. 20 Capaian Indeks Ketahanan Pangan NTB Tahun 2020-2024

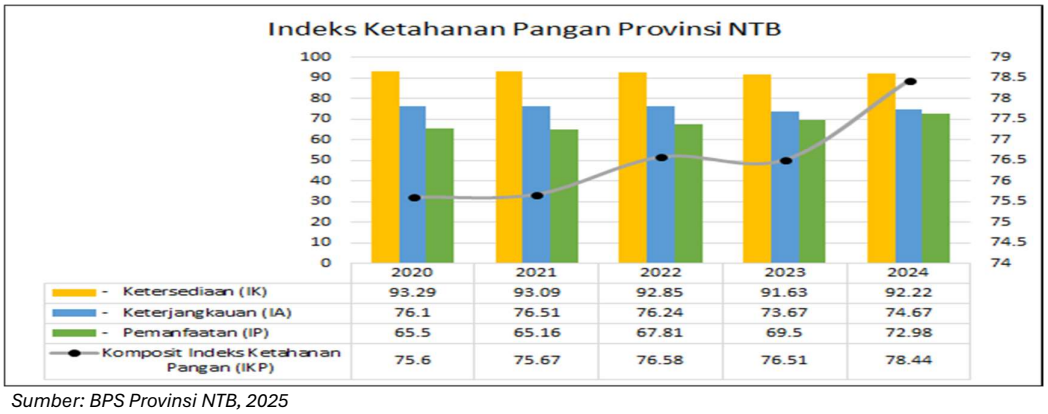

	2020	2021	2022	2023	2024
- Ketersediaan (IK)	93.29	93.09	92.85	91.63	92.22
- Keterjangkauan (IA)	76.1	76.51	76.24	73.67	74.67
- Pemanfaatan (IP)	65.5	65.16	67.81	69.5	72.98
Komposit Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	75.6	75.67	76.58	76.51	78.44

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2025

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan nilai komposit dari indikator yang digunakan untuk memotret status ketahanan pangan di suatu wilayah. IKP dihitung berdasarkan 9 indikator yang mewakili tiga aspek ketahanan pangan yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan

IKP bertujuan untuk mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi serta memberikan gambaran peringkat (rangking) pencapaian ketahanan pangan suatu daerah/wilayah, menjadi indikator keberhasilan daerah dalam peningkatan/penguatan ketahanan pangan.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2024, nilai Indeks Ketahanan Pangan Provinsi NTB Tahun 2024 sebesar 78,44 atau berada pada prioritas 5. Capaian Indeks ini menunjukkan bahwa kondisi ketahanan pangan di Provinsi NTB pada Tahun 2024 adalah tahan aman. Capaian Indeks Ketahanan Pangan Provinsi NTB Tahun 2024 ini lebih tinggi 2,52 Point dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 sebesar 76,51. Jika dibandingkan dengan target RPD Provinsi NTB Tahun 2024 sebesar 77,67 Point maka Capaian IKP Tahun 2024 mencapai 100,99 persen.

Peningkatan IKP Provinsi NTB menunjukkan kemampuan daerah dalam memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan yang semakin baik. Namun, capaian IKP tidak dapat berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan indikator lain yang merefleksikan kondisi konsumsi masyarakat, salah satunya adalah Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU).

Perkembangan Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU) di Provinsi NTB dalam kurun waktu tahun 2020–2024 menunjukkan fluktuasi yang perlu mendapatkan perhatian serius. Pada tahun 2020, angka PoU NTB tercatat sebesar 2,97 persen, yang kemudian menurun signifikan pada tahun 2021 menjadi 1,78 persen. Penurunan ini menggambarkan adanya perbaikan akses masyarakat terhadap pangan meskipun berada dalam situasi pandemi COVID-19, yang antara lain ditopang oleh berbagai program jaring pengaman sosial serta intervensi di bidang ketahanan pangan.

Namun, pada tahun 2022 angka PoU kembali meningkat menjadi 2,24 persen, yang mengindikasikan masih adanya kerentanan terhadap ketersediaan dan keterjangkauan pangan di tengah pemulihan ekonomi pasca pandemi. Pada tahun 2023, prevalensi PoU sedikit membaik menjadi 2,17 persen, yang menunjukkan adanya upaya stabilisasi, meskipun belum sepenuhnya mampu menekan angka ketidakcukupan konsumsi pangan. Selanjutnya, pada tahun 2024, PoU kembali naik menjadi 2,74 persen, mendekati kondisi awal tahun 2020. Kenaikan ini menunjukkan bahwa tantangan ketahanan pangan di NTB masih cukup besar, baik akibat tekanan inflasi bahan pangan, keterbatasan distribusi, maupun dampak bencana alam yang kerap terjadi di wilayah ini.

Fluktuasi angka PoU tersebut memperlihatkan bahwa ketahanan pangan masyarakat NTB masih menghadapi kerentanan yang bersifat struktural maupun situasional. Kondisi ini menuntut adanya kebijakan yang lebih terintegrasi dalam

penyediaan, distribusi, dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA), sekaligus penguatan perlindungan sosial bagi kelompok rentan.

Grafik 2. 21 Perkembangan PoU (Prevalensi of Undernourishment) atau prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan dibawah kebutuhan minimum energi Provinsi NTB Tahun 2020-2024

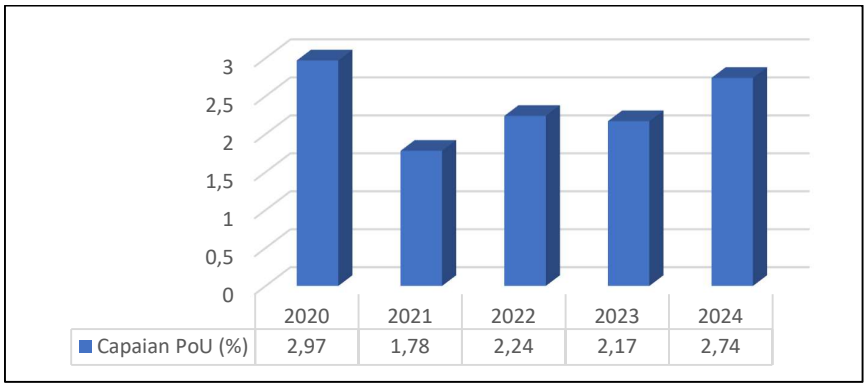

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, 2024

Selanjutnya, ketersediaan energi dan protein per kapita di Provinsi NTB pada periode 2020–2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Ketersediaan energi per kapita per hari sempat melonjak dari 4.779,47 kkal pada 2021 menjadi 6.206,69 kkal pada 2023, namun turun kembali ke 5.344,97 kkal pada 2024, dengan laju pertumbuhan rata-rata –1,8% per tahun. Meskipun terjadi penurunan, tingkat ketersediaan energi tetap jauh di atas standar kebutuhan minimal 2.400 kkal per kapita per hari, yakni berada pada kisaran 199,14–258,61%. Sementara itu, ketersediaan protein menunjukkan tren yang lebih stabil dengan pertumbuhan positif 3,2% per tahun, mencapai 147,94 gram per kapita per hari pada 2024, atau sekitar 234,83% dari standar kebutuhan 63 gram.

Tabel 2. 8 Neraca Bahan makanan di Provinsi NTB Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun					Rata-rata	Laju Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024		
1	Ketersediaan energi (kkal/kapita/hari)	108.4 4	4779.47	5,104.8 1	6,206.6 9	5,344.9 7	5,508.8 8	-1.8
	Tingkat Ketersediaan Energi (% dari 2.400 kkal/kap/hari)	254.5 2	199.14	212.70	258.61	222.71	229.54	-1.8
2	Ketersediaan protein (gr/kapita/hari)	140.7 6	175.74	127.09	149.73	146.38	147.94	3.2
	Tingkat ketersediaan protein (% dari 63 gr/kapita/hari)	223.4 3	278.95	201.73	237.67	232.35	234.83	3.2

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, 2025

Di sisi lain untuk sistem ketenagalistrikan di Provinsi NTB terdiri dari sistem Lombok 150 kV dan Tambora (Sumbawa-Bima) sistem 70 kV dan 150 kV, serta beberapa sistem kecil terisolasi. Sumbawa dan Bima dulunya menggunakan jaringan terpisah, namun sejak tahun 2021 digabungkan menjadi sistem Tambora. Sistem ketenagalistrikan yang besar disuplai dayanya melalui berbagai sumber, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG), Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM/PLTMH). Sedangkan sistem skala menengah dan kecil sebagian besar disuplai oleh PLTD atau PV-PLTD Hybrid, sebagian kecil juga menggunakan PLTMH untuk memenuhi kebutuhan listriknya.

Sedangkan sistem kecil yang terisolasi terdapat pada pulau-pulau kecil berpenghuni yang tersebar di seluruh wilayah. Pulau-pulau kecil ini mempunyai pembangkit listrik sendiri dan terhubung ke beban melalui jaringan 20 kV atau langsung ke jaringan 220 V (tegangan rendah). Sistem grid di tiga pulau Gili Terawangan, Gili Meno, dan Gili Air, terhubung dengan kabel bawah laut 20 kV ke sistem daratan Lombok dan telah beroperasi sejak 2012.

Pembangkitan listrik didominasi oleh penggunaan bahan bakar solar, baik HSD maupun MFO, meskipun jumlahnya mengalami penurunan melalui penggunaan biodiesel B35. Demikian pula batubara secara bertahap mulai digantikan oleh biomassa melalui pembakaran bersama (*co-firing*). Selain itu, sejumlah kecil listrik juga dihasilkan dari energi surya dan tenaga air.

Tabel 2. 9 Konsumsi Listrik Per Kapita Provinsi NTB Tahun 2024

No.	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Konsumsi Listrik PLN (kWh)	Konsumsi Listrik Captive Power (kWh)	Total konsumsi listrik (kWh)	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh/Kapita)
1	2024	5,616,000	2,853,130,020	1,374,270,127	4,227,400,147	748.742

Sumber: PLN, 2025

Dalam menjamin keberlangsungan hidup masyarakat NTB dan pembangunan berkelanjutan khususnya dalam menyediakan Akses terhadap air minum layak dan aman yang merupakan kebutuhan dasar setiap rumah tangga, menghadapi berbagai tantangan dalam penyediaan akses air minum bagi penduduk NTB. Faktor geografis, perubahan iklim, serta infrastruktur yang belum merata menjadi kendala utama dalam penyediaan air minum yang bersih dan layak konsumsi.

Dari tahun ke tahun, terlihat bahwa realisasi cakupan air minum secara konsisten meningkat, meskipun masih terdapat perbedaan antara target yang ditetapkan dan realisasi yang dicapai. Misalnya, pada tahun 2024, target cakupan air minum ditetapkan sebesar 81,34%, sementara realisasi mencapai 84,41%. Capaian tersebut merupakan agregat dari capaian akses air minum Kab/Kota dan layanan di kawasan strategis provinsi. Sedangkan akses air minum lintas Kab/Kota yang merupakan standar pelayan minimum bidang urusan air minum provinsi masih dalam proses perencanaan berupa dokumen pra studi pembangunan SPAM Regional Lombok Tahun 2024. Hal ini

menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan akses layanan air minum telah masih perlu ditingkatkan pelayanannya.

Peningkatan yang signifikan dalam realisasi cakupan air minum dapat didistribusikan dalam berbagai upaya, antara lain melalui peningkatan dan optimalisasi infrastruktur, pembinaan kelembagaan, penyuluhan kepada masyarakat, dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga non-pemerintah. Hal tersebut ini berfokus pada pencapaian target penyediaan akses layanan air minum/bersih layak dan aman, terutama di daerah-daerah yang sebelumnya belum terlayani.

Akses rumah tangga terhadap konsumsi air minum di NTB menunjukkan perbaikan yang konsisten dari tahun ke tahun, meskipun masih terdapat sekitar 15 persen rumah tangga yang belum terlayani dengan baik pada tahun 2024. Kondisi ini mengindikasikan perlunya strategi lanjutan dalam RPJMD ke depan, dengan fokus pada pemerataan akses, peningkatan kualitas jaringan distribusi, serta penguatan kelembagaan pengelolaan air minum, sehingga target universal access dapat tercapai secara berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah NTB.

Grafik 2. 22 Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum Tahun 2020-2024

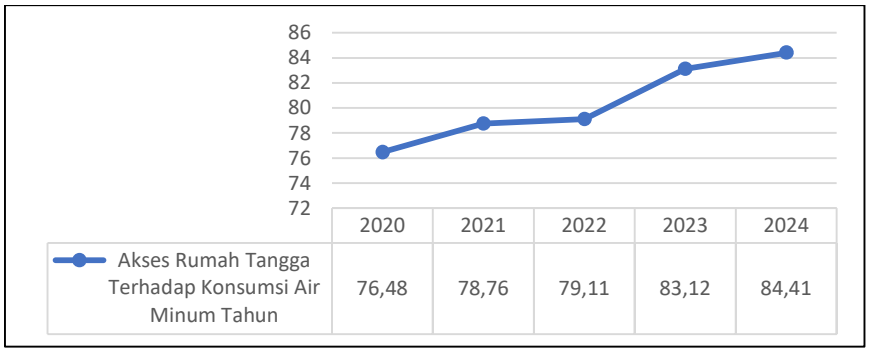

Sumber : Dinas PUPR Provinsi NTB, 2024

Kondisi hidrologi di NTB mencerminkan tantangan dan potensi yang dipengaruhi oleh faktor geografis, iklim, serta pengelolaan sumber daya air. Provinsi NTB memiliki dua Wilayah Sungai (WS) strategis nasional yaitu WS Lombok dan WS Sumbawa berdasarkan Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai di Provinsi NTB. Wilayah Sungai Lombok mencakup 197 Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan luas total 4.738 Km2 dan WS Sumbawa memiliki 555 DAS dengan luas 15.095 Km2.

Tabel 2. 10 Jumlah Sungai Dirinci Menurut Wilayah Sungai di NTB

Kategori Wilayah Sungai	Wilayah Sungai	
	WS Lombok	WS Sumbawa
Sungai Kecil (Luas Daerah Aliran Sungai)		
≤ 10 km^2	127	289

Kategori Wilayah Sungai	Wilayah Sungai	
	WS Lombok	WS Sumbawa
10 km^2 - ≤ 50 km^2	48	212
50 km^2 - ≤ 100 km^2	12	29
100 km^2 - ≤ 500 km^2	9	22
Sungai Besar (Luas Daerah Aliran Sungai)		
> 500 km^2	1	3

Sumber: Data dan Informasi Pengelolaan Sumber Daya Air di Wilayah Sungai Lombok dan Wilayah Sungai Sumbawa Tahun 2023 BWS NT1

Sistem hidrologi di Pulau Lombok dipengaruhi oleh keberadaan Gunung Rinjani. Aliran sungai cenderung radial, mengalir dari pusat gunung menuju ke arah pantai. Untuk Pulau Lombok, beberapa sungai besar lainnya di Lombok termasuk Sungai Meninting dan Sungai Jangkok. Ketersediaan air permukaan di WS Lombok adalah sebesar 2.819,94 Juta m^3/tahun dengan memperhitungkan untuk kebutuhan air baku, air industri, irigasi, perikanan dan peternakan. Kebutuhan air saat ini sebesar 2.060,71 Juta m^3/tahun di tahun 2015 dan diperkirakan akan meningkat menjadi 2.553,47 Juta m^3/tahun pada tahun 2034.

Selanjutnya, untuk Pulau Sumbawa, yang memiliki topografi lebih bervariasi dengan pegunungan dan dataran rendah dimana sungai umumnya lebih pendek dan memiliki debit yang fluktuatif terutama saat musim hujan. Potensi ketersediaan air WS Sumbawa di tahun 2015 sebesar 153,59 m^3/detik dengan kebutuhan air total sebesar 49,53 m^3/detik dan diperkirakan akan meningkat menjadi 70,95 m^3/detik di tahun 2035.

Meningkatnya kebutuhan air memberikan tantangan tersendiri, jika tren pertumbuhan populasi, pertanian dan industri terus meningkat tanpa strategi konservasi yang efektif, WS Lombok dan WS Sumbawa berisiko mengalami defisit air dalam jangka panjang. Tantangan dalam menjaga ketersediaan air di NTB dihadapkan pada perubahan iklim dan degradasi lingkungan seperti deforestasi dan alih fungsi lahan. Hal ini menyebabkan meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana hidrologi, termasuk banjir dan tanah longsor saat musim hujan, sementara kekeringan mengancam di musim kemarau. Secara keseluruhan, kondisi hidrologi NTB menunjukkan potensi sumber daya air yang besar dan saat ini mencukupi tetapi juga rentan terhadap variabilitas iklim dan tekanan antropogenik. Upaya pengelolaan sumber daya air secara terpadu seperti rehabilitasi jaringan irigasi dan modernisasi sistem hidrologi menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan air dan kebutuhan masyarakat sekaligus meminimalkan risiko bencana.

Tabel 2. 11 Potensi Ketersediaan, Kebutuhan dan Proyeksi Kebutuhan Air di NTB

Wilayah Sungai	Potensi Ketersedian Air (m^3/dt)	Kebutuhan Air 2015 (m^3/dt)	Proyeksi Kebutuhan Air di Tahun 2034/2035 (m^3/dt)
Lombok	89,42	65,34	80,97
Sumbawa	153,59	49,53	70,95

Sumber: Bappeda NTB (Data diolah), 2025

2.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

Kondisi lingkungan hidup berkualitas sangat diperlukan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini dilaksanakan dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Gambaran kondisi lingkungan hidup berkualitas dapat dilihat pada indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman, Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah, Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan penuh Pengumpulan Sampah, dan indikator terkait lainnya.

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diturunkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), IKLH merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut. Kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi NTB digambarkan oleh nilai Indeks Kualitas Lingkungan. Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi NTB Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

Grafik 2. 23 Perkembangan IKLH Provinsi NTB Tahun 2019-2024

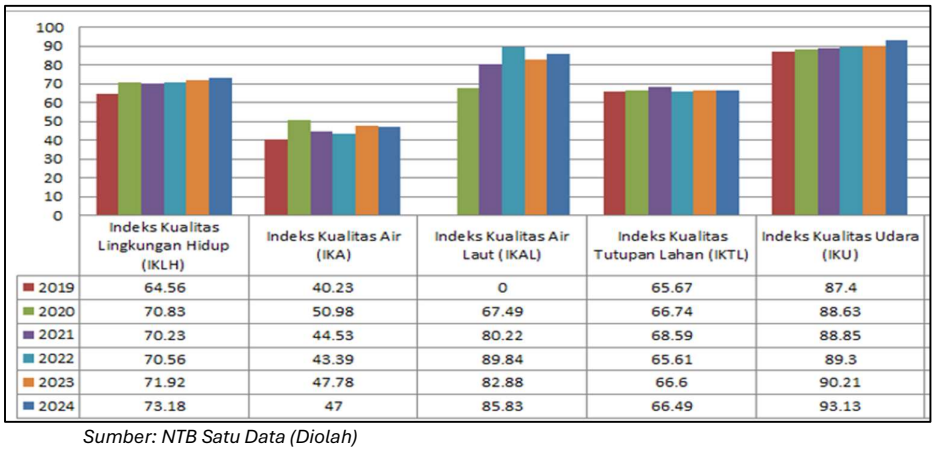

	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks Kualitas Udara (IKU)
2019	64.56	40.23	0	65.67	87.4
2020	70.83	50.98	67.49	66.74	88.63
2021	70.23	44.53	80.22	68.59	88.85
2022	70.56	43.39	89.84	65.61	89.3
2023	71.92	47.78	82.88	66.6	90.21
2024	73.18	47	85.83	66.49	93.13

Sumber: NTB Satu Data (Diolah)

Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman di NTB (NTB) terkait erat dengan sektor-sektor lain dan saling berhubungan, seperti perumahan, kemiskinan, dan ketimpangan sosial-ekonomi. Akses sanitasi yang layak merupakan indikator kemajuan suatu wilayah dalam meningkatkan kualitas hidup warganya. Salah satu hubungan yang paling jelas adalah antara akses sanitasi dan sektor perumahan. Di NTB, banyak rumah tangga, terutama di wilayah pedesaan dan kepulauan, yang tinggal di perumahan yang belum memenuhi standar sanitasi yang memadai. Sering kali, perumahan yang tidak layak huni menjadi penyebab utama rendahnya akses sanitasi. Rumah-rumah yang dibangun secara seadanya tanpa perencanaan yang memperhatikan sanitasi yang baik, sering kali menghambat upaya untuk memberikan akses sanitasi yang aman bagi penghuninya. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan perumahan yang tidak hanya memperhatikan ketersediaan rumah tetapi juga fasilitas sanitasi menjadi krusial. Peningkatan kualitas rumah dan lingkungan sekitar, misalnya melalui pembangunan rumah layak huni, hal ini dapat menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di NTB.

Peningkatan akses sanitasi aman di Provinsi NTB menunjukkan kemajuan yang signifikan antara tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman tercatat sebesar 4,91%, yang kemudian mengalami penurunan sebesar 0,51% pada tahun 2021, menjadi 4,4%. Penurunan ini dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti dampak pandemi COVID-19 yang menghambat beberapa program pembangunan. Namun, setelah tahun 2021, terjadi peningkatan yang stabil.

Dari tahun 2022 hingga 2024, akses sanitasi aman meningkat sebesar 0,74%, dari 6,1% pada tahun 2022 menjadi 6,84% pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan kebijakan dan program pemerintah dalam meningkatkan kualitas sanitasi di NTB, meskipun masih ada tantangan dalam pemerataan akses di daerah terpencil. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan kenaikan 1,93% dalam akses sanitasi aman selama periode lima tahun tersebut, menandakan perbaikan yang signifikan meski ketimpangan akses di daerah tertentu masih perlu perhatian lebih.

Grafik 2. 24 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

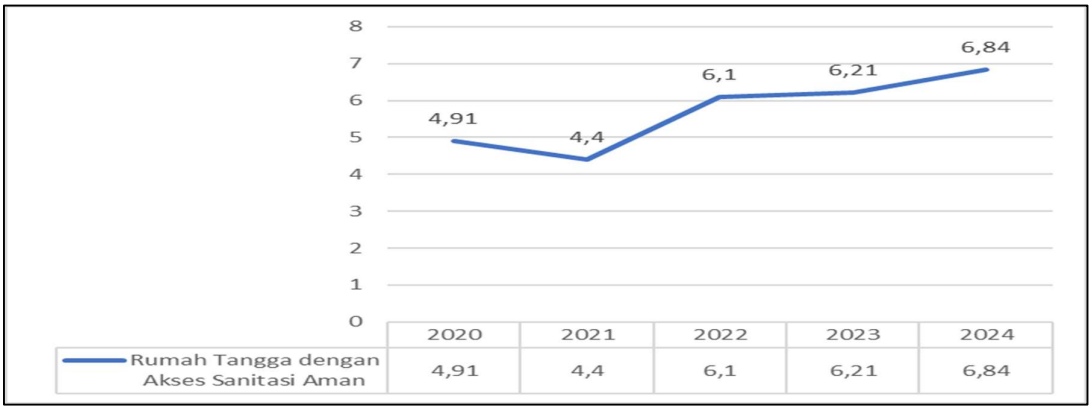

Sumber: BPS NTB, 2025

Berdasarkan data tahun 2024, timbulan sampah di seluruh kabupaten kota se – NTB yang terolah di fasilitas pengelahan sampah sebesar 64,25% atau 1.740 ton per hari dari total timbulan sampah 2.700 ton per hari atau 985.500 ton per tahun termasuk yang ditangani oleh TPAR kebon Kongok sebesar 350 ton per hari
Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah sebesar 45 % terutama di kota kota.

2.1.6 Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Provinsi NTB menghadapi berbagai potensi bencana alam yang signifikan. Pertama, NTB terletak di cincin api pasifik yang menjadikannya rawan gempa bumi. Contoh nyata adalah kejadian gempa Lombok pada tahun 2018 yang silam telah menyebabkan kerusakan luas. Kedua, NTB memiliki beberapa gunung berapi aktif seperti Gunung Rinjani di Lombok dan Gunung Tambora di Sumbawa, dengan risiko erupsi yang dapat merusak dan mempengaruhi kehidupan. Disamping itu Provinsi NTB juga berpotensi mengalami tsunami akibat gempa bumi bawah laut. Sebagai contoh, letusan Gunung Tambora pada tanggal 10 April 1815 telah menyebabkan tsunami dimana air laut tiba-tiba naik setinggi 0,5-3,5 m. Ketiga, banjir sering terjadi terutama selama musim penghujan, berdampak pada infrastruktur dan kesehatan masyarakat. Keempat, tanah longsor menjadi ancaman di daerah berbukit dan pegunungan, dipicu oleh hujan lebat dan aktivitas manusia serta aktivitas geologi seperti gempa bumi. Kelima, kekeringan juga merupakan risiko utama yang mempengaruhi sektor pertanian dan ketersediaan air. Terakhir, pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia sejak awal tahun 2020 dan masih berpotensi besar terus berlangsung dalam waktu yang tidak dapat diperkirakan.

Provinsi NTB telah menyusun dokuen kebencanaan seperti dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) Tahun 2022-2026, dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Tahun 2024-2028 serta dokumen Rencana Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) Tahun 2024-2045. Dampak perubahan iklim dari sisi kenaikan suhu udara dan kenaikan permukaan air laut menjadi tantangan pembangunan daerah. Potensi kebencanaan dan kerugian ekonomi menjadi bagian dari upaya mengurangi risiko bencana akibat perubahan iklim. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim menggambarkan kemampuan masyarakat, infrastruktur, dan ekosistem untuk bertahan dan bangkit kembali setelah terdampak bencana dan perubahan iklim. Kondisi ini dapat dilihat pada Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), Indeks Risiko Bencana (IRB), Indeks Ketahanan Daerah (IKD), dan indikator terkait lainnya.

Tabel 2. 12 Penurunan Intensitas Emisi GRK Provinsi NTB
Tahun 2020- 2024

No	Tahun	Emisi tahun t (ton CO2 eq)	PDRB ADHK (milliar rupiah)	Intensitas Emisi	Penurunan Intensitas Emisi
1	2020	380.695,81	93.269,13	4,08	85%
2	2021	498.545,31	95.437,86	5,22	81%
3	2022	192.608,09	102.074,07	1,89	93%

No	Tahun	Emisi tahun t (ton CO2 eq)	PDRB ADHK (milliar rupiah)	Intensitas Emisi	Penurunan Intensitas Emisi
4	2023	93.413,47	108.523,89	0,86	97%
5	2024	446.151,00	109.415,00	4,08	85%

Sumber: Aksara Bappenas 2025 (diolah Bappeda)

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan lepasnya gas rumah kaca ke atmosfer pada suatu area dalam jangka waktu tertentu. Emisi GRK ini menggambarkan banyaknya pelepasan gas yang terkandung dalam atmosfer, secara alami dan antropogenik yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Radiasi inframerah ini berasal dari kegiatan yang dilaksanakan pada sektor prioritas pembangunan daerah. Sektor ini mencakup kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri, limbah dan ekosistem pesisir dan laut (karbon biru). Jumlah potensi penurunan emisi GRK merupakan besarnya potensi penurunan pelepasan gas yang terkandung dalam atmosfer, yang dihitung dari emisi baseline dikurangi dengan emisi proyek. Persentase perubahan emisi GRK menggambarkan besarnya perubahan tingkat emisi GRK pada titik tahun tertentu dibandingkan dengan angka dasar emisi di tahun yang sama. Rasio potensi penurunan intensitas emisi GRK menjadi angka perbandingan antara total emisi GRK di tahun berjalan dengan PDB/PDRB di tahun berjalan. Nilai penurunan Intensitas emisi GRK bertujuan untuk mengurangi dampak perubahan iklim melalui berbagai upaya untuk pengurangan emisi GRK.

Nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) Provinsi NTB menunjukkan tren penurunan dari tahun 2015 hingga 2024. IRB berada di angka 172,24 tahun 2015 dan terus mengalami penurunan signifikan hingga mencapai 115,37 pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 Angka IRB NTB mencapai 113,64. Penurunan ini mencerminkan berbagai upaya mitigasi dan adaptasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan dalam mengurangi risiko bencana. Gambaran Indeks Risiko Bencana (IRB) Provinsi NTB Tahun 2018-2024 adalah sebagai berikut:

Grafik 2. 25 Indeks Risiko Bencana Provinsi NTB Tahun 2018-2024

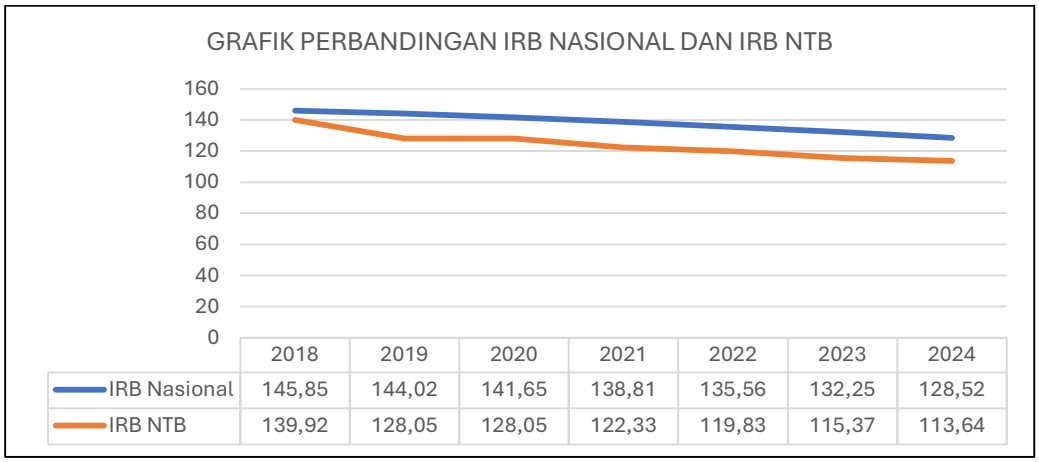

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
IRB Nasional	145,85	144,02	141,65	138,81	135,56	132,25	128,52
IRB NTB	139,92	128,05	128,05	122,33	119,83	115,37	113,64

Sumber: BNPB, 2025

Tren penurunan IRB ini memiliki korelasi yang erat dengan berbagai sektor pembangunan di NTB. Dari sisi infrastruktur dan tata ruang, peningkatan ketahanan bangunan terhadap gempa dan optimalisasi penggunaan lahan berkontribusi dalam menekan risiko bencana. Dalam sektor sosial dan ekonomi, peningkatan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana, pembangunan ekonomi berbasis keberlanjutan, serta peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan membantu mengurangi dampak bencana terhadap kelompok rentan. Sektor lingkungan hidup juga memiliki peran penting, terutama dalam upaya konservasi hutan, pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), dan adaptasi perubahan iklim yang berdampak pada pengurangan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Selain itu, dalam sektor pariwisata, pengelolaan destinasi wisata berbasis risiko turut menjadi pertimbangan penting untuk memastikan keberlanjutan sektor ini dalam menghadapi bencana. Gambaran jenis dan jumlah kejadian bencana di Provinsi NTB tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 13 Jenis dan Jumlah Kejadian Bencana Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Banjir	43	75	32	52	50
2	Banjir Bandang		14	14	11	12
3	Cuaca Ekstrim	32	17	30	27	62
4	Gelombang Pasang/Abrasi	2	10	7	-	6
5	Gempa Bumi	-	-	-	-	4
6	Kebakaran Hutan dan Lahan	3	-	-	3	7
7	Kekeringan	9	9	10	9	10
8	Tanah Longsor	13	25	10	22	22
9	Tsunami	-	-	-	-	-
10	Epidemi/Wabah Penyakit	-	-	-	-	-
11	Pandemi Covid-19	1	-	-	-	-
12	Likuifaksi	-	-	-	-	-
13	Letusan Gunung Api	-	-	-	-	-
Total Kejadian Bencana		**103**	**150**	**103**	**124**	**173**

Sumber : Pusdalops-PB BPBD Prov NTB

Tren penurunan IRB sejalan dengan meningkatnya kapasitas daerah Provinsi NTB dalam penanggulangan bencana yang diukur melalui Indeks Ketahanan Daerah (IKD). IKD dihitung berdasarkan 7 prioritas, yakni: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana. IKD Provinsi NTB menunjukkan tren positif dan merupakan agregat dari Indeks Ketahanan Daerah

Kab/Kota se NTB. Sebaran capaian IKD Kab/Kota tahun 2024 dapat dilihat seperti Gambar di bawah ini :

Tabel 2. 14 Capaian 7 Prioritas IKD Kabupaten Kota Se NTB Tahun 2024

No	Kab/Kota	Capaian Prioritas IKD						
		Perkuatan Kebijakan & Kelembagaan	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Perkuatan Kesiapsiagaan & Penanganan Darurat Bencana	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana
1	Kota Mataram	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
2	Lombok Barat	0,97	0,80	0,83	1,00	0,80	0,64	0,83
3	Lombok Utara	0,97	1,00	0,76	0,65	0,66	0,65	0,85
4	Lombok Tengah	0,71	0,67	0,46	0,60	0,50	0,45	0,40
5	Lombok Timur	0,77	0,20	0,64	0,63	0,56	0,61	0,60
6	Sumbawa Barat	0,77	0,53	0,63	0,48	0,43	0,48	0,60
7	Sumbawa	0,64	1,00	0,58	0,49	0,52	0,27	0,38
8	Dompu	0,69	0,60	0,58	0,50	0,45	0,39	0,50
9	Bima	0,73	0,20	0,57	0,50	0,52	0,41	0,45
10	Kota Bima	0,78	0,80	0,66	0,55	0,65	0,52	0,60
NTB		**0,78**	**0,64**	**0,63**	**0,60**	**0,57**	**0,49**	**0,58**

Sumber : BNPB ; 2025

Pembangunan yang massif dengan pertumbuhan pusat–pusat ekonomi baru sangat mempengaruhi pembukaan lahan baru dan alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman dan fasilitas pendukung lainnya. Hal ini menyebabkan meningkatnya potensi terjadinya bencana, diantaranya banjir, banjir bandang, longsor dan kebakaran hutan serta lahan. Diperlukan berbagai upaya untuk memitigasi risiko yang berpotensi terjadi, baik melalui mitigasi struktural maupun nonstruktural untuk menjawab tantangan ke depan akibat alih fungsi lahan maupun fenomena perubahan iklim. Penyebarluasan informasi mengenai kebencanaan, maupun peringatan dini saat akan terjadi bencana memainkan peran yang sangat penting saat ini untuk mengurangi dampak baik korban jiwa maupun kerugian sosial ekonomi lainnya.

Selain itu, adanya fenomena perubahan iklim secara global juga berpengaruh terhadap kondisi sumber daya alam bahkan menimbulkan dampak bagi kehidupan manusia. Fenomena pemanasan global di mana terjadi peningkatan gas rumah kaca pada lapisan atmosfer berlangsung untuk jangka waktu tertentu

Perubahan iklim di NTB memiliki dampak multidimensi, mulai dari krisis air, ancaman ketahanan pangan, hingga kerusakan ekosistem dan ekonomi. Wilayah ini sangat rentan karena ketergantungan pada sumber daya alam dan kondisi geografis yang gersang. Upaya adaptasi dan mitigasi yang terkoordinasi, didukung oleh teknologi, kebijakan, dan partisipasi masyarakat, sangat penting untuk meminimalkan dampak dan membangun ketahanan wilayah. Pemerintah daerah, bersama pemangku kepentingan, perlu memprioritaskan pengelolaan sumber daya air, ketahanan pangan, dan perlindungan ekosistem untuk menjaga keberlanjutan NTB di tengah ancaman perubahan iklim.

Risiko bencana yang terjadi di Provinsi NTB juga disebabkan oleh adanya perubahan curah hujan yang tinggi, kenaikan muka air laut dan cuaca ekstrem. Dampak dari perubahan iklim sangat dirasakan oleh wilayah selatan Pulau Lombok dan Pulau

Sumbawa serta wilayah Barat Pulau Lombok yang terdampak rob. Dampak lain adanya perubahan iklim yang terjadi di Provinsi NTB meliputi: a. Terjadinya kenaikan permukaan air laut; b Ekosistem laut, pesisir dan pantai memburuk; c. Peningkatan intensitas cuaca ekstrem; d. Pemanasan global.

2.1.7 Demografi

2.1.7.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Provinsi NTB mengalami dinamika pertumbuhan penduduk yang beragam dari tahun 2010 hingga 2024. Laju pertumbuhan penduduk di NTB menunjukkan pola yang berbeda dengan tren nasional. Laju pertumbuhan penduduk di NTB mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat dari 1,17% pada tahun 2010 hingga mencapai puncaknya sebesar 1,76% pada tahun 2021, sementara itu laju pertumbuhan nasional cenderung lebih stabil dengan sedikit penurunan dari 1,49% di tahun 2010 menjadi 1,11% pada 2024. Lonjakan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tren nasional pada tahun 2020-2021 salah satunya dipengaruhi oleh faktor migrasi dan dinamika sosial ekonomi. Gambaran dari jumlah dan laju pertumbuhan penduduk NTB adalah sebagai berikut:

Grafik 2. 26 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk NTB

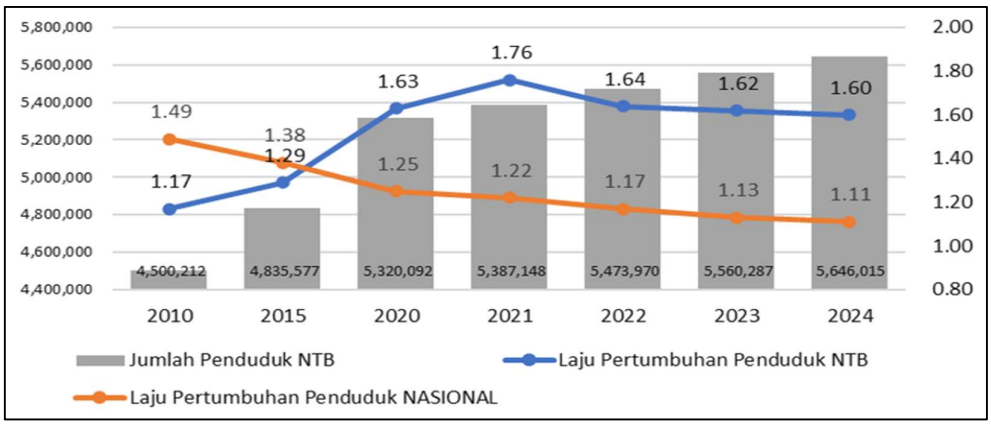

Sumber : BPS NTB, Proyeksi penduduk hasil SP2020 (mulai tahun 2020)

Jumlah penduduk NTB terus meningkat setiap tahun, dimana jumlah penduduk laki-laki dan perempuan tidak berbeda signifikan. Jumlah penduduk laki-laki di tahun 2024 lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Untuk itu pembangunan NTB harus mengarusutamakan gender, tanpa memandang jenis kelamin. Kesetaraan gender dalam akses, pertisipasi, kontroil dan manfaat pembangunan bagi penduduk laki-laki dan perempuan menjadi salah satu tujuan pembangunan lima tahun kedepan.

Grafik 2. 27 Jumlah Penduduk NTB Menurut Jenis Kelamin 2020-2024

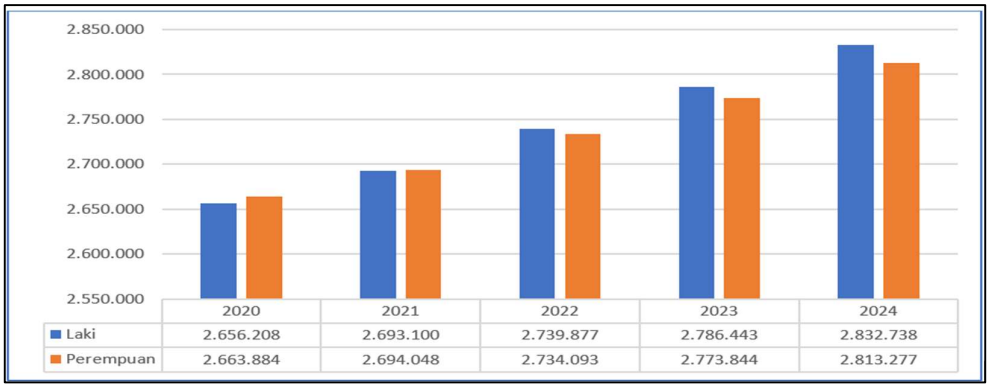

	2020	2021	2022	2023	2024
Laki	2.656.208	2.693.100	2.739.877	2.786.443	2.832.738
Perempuan	2.663.884	2.694.048	2.734.093	2.773.844	2.813.277

Sumber: BPS NTB, 2024

Persebaran penduduk Provinsi NTB berdasarkan hasil LongForm Sensus Penduduk Tahun 2020 menunjukkan ketimpangan antar Kab/Kota. Sebaran penduduk tertinggi ada di Kabupaten Lombok Timur sebanyak 24,91 persen, Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 19,45 persen dan Kabupaten Lombok Barat sebanyak 13,56 persen. Provinsi NTB terdiri dari dua pulau yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, melihat dari sebaran penduduk diatas, sebaran penduduk terbanyak ada di Pulau Lombok. Persebaran penduduk yang belum merata antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dipengaruhi oleh ketersediaan dan akses layanan dasar dan perekonomian yang masih belum merata antara Pulau Lombok dan Sumbawa.

Gambar 2. 6 Sebaran Penduduk NTB Menurut Kab/Kota, Hasil LongForm Sensus Penduduk 2020

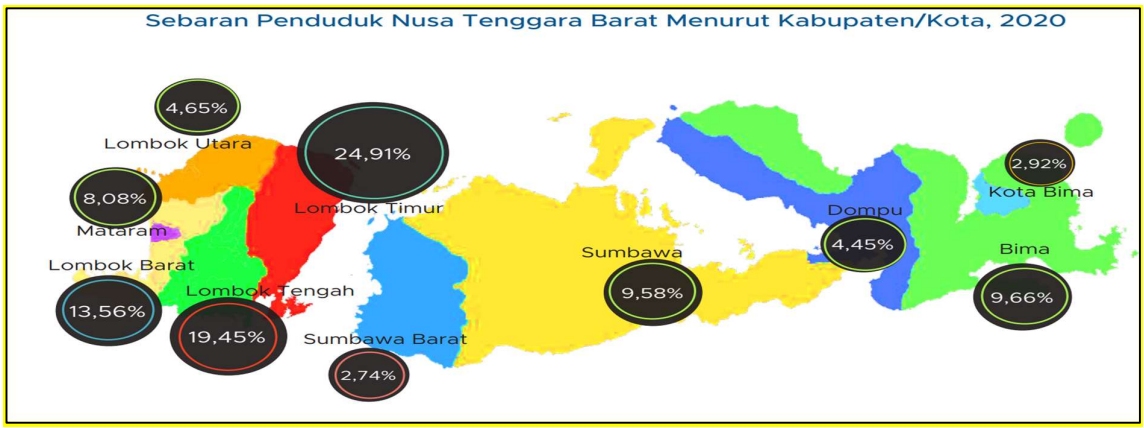

Sumber: BPS NTB, Hasil LongForm 2020

Dilihat dari sebaran penduduk di tahun 2024, jumlah penduduk di Pulau Lombok sebanyak 3.995.877 jiwa (70,77 persen) dan Pulau Sumbawa 1.650.138 jiwa (29,22 persen). Sedangkan dilihat dari sisi luas wilayah, Pulau Sumbawa memiliki luas wilayah 15.105 km2 dan Pulau Lombok 4.571 km2. Luas wilayah Pulau Sumbawa yang hampir 3,3 kali lipat dari luas wilayah Pulau Lombok mempengaruhi tingkat kepadatan

penduduknya. Pulau Lombok memiliki kepadatan 874 jiwa/km2 sedangkan Pulau Sumbawa hanya 109 jiwa/km2.

Kepadatan penduduk Provinsi NTB tahun 2020-2024 cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Kepadatan penduduk berpengaruh pada daya tampung dan daya dukung lingkungan. Kota Mataram dan Kota Bima adalah wilayah dengan luas yang paling kecil dibandingkan kabupaten lainnya. Namun jika melihat dari kepadatan penduduk Kota Mataram menjadi yang terpadat di NTB yaitu 7.365 jiwa/km^2 dengan luas wilayah 60,42 km^2, sementara Kota Bima memiliki kepadatan 787 jiwa/km^2 dengan luas wilayah 207,89 km^2 pada tahun 2024. Luasan area perkotaan tersebut (Kota Mataram dan Kota Bima) tidak sebanding dengan kepadatan penduduk, dimana daerah perkotaan masih menjadi magnet bagi penduduk NTB untuk bertempat tinggal dan mencari penghidupan.

Grafik 2. 28 Kepadatan Penduduk NTB (Km2) Tahun 2020-2024

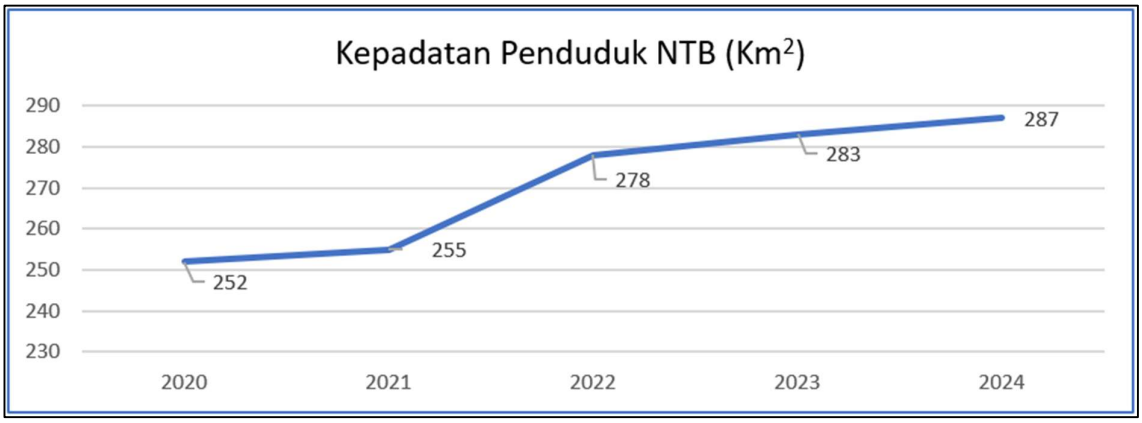

Sumber: BPS, Hasil Sensus Penduduk 2020

Rasio jenis kelamin (sex ratio) merupakan perbandingan jumlah penduduk laki-laki terhadap perempuan dalam suatu wilayah. Perkembangan rasio jenis kelamin (sex ratio) di Provinsi NTB dari tahun 2020 hingga 2024 cenderung mengalami peningkatan dari 99,71 menjadi 100,70. Hal ini berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Pada tahun 2024, Kabupaten Lombok Utara menjadi daerah dengan sex ratio tertinggi yaitu 100,70 sedangkan yang terendah berada di Kota Bima yaitu 98,50 yang berarti jumlah penduduk perempuannya lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki. Pemerintah daerah harus melakukan afirmative policy untuk mewujudkan kesetaraan gender melalui strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Jumlah penduduk perempuan yang lebih dominan di Kota Mataram, Kabupaten Sumbawa, dan Kota Bima perlu menerapkan pembangunan berbasis gender, agar penduduk perempuan mendapatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang sama dengan penduduk laki-laki. Gambaran Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) Menurut Kabupaten-Kota se-NTB Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 15 Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) Menurut Kabupaten-Kota se-NTB Tahun 2020-2024

KABUPATEN/ KOTA	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Mataram	99.02	99.34	99.66	99.15	99.10
Kab. Lombok Barat	100.48	100.64	100.75	100.86	101.00
Kab. Lombok Utara	100.76	101.09	101.43	100.74	100.70
Kab. Lombok Tengah	98.82	99.50	100.14	100.77	101.40
Kab. Lombok Timur	99.07	99.64	100.20	100.75	101.30
Kab. Sumbawa Barat	102.19	101.95	101.70	101.45	101.20
Kab. Sumbawa	99.61	99.40	99.15	98.89	98.60
Kab. Dompu	101.16	101.17	101.16	101.13	101.10
Kab. Bima	101.29	101.02	100.99	100.96	100.90
Kota Bima	98.56	98.57	98.55	98.53	98.50
Sex Ratio NTB	99.71	99.96	100.21	100.45	100.70
SR > 100 = jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan					
SR < 100 = jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki					

Sumber: BPS NTB, 2025

Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk dan laju pertumbuhan penduduk adalah Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR). Fertilitas Provinsi NTB menurun dalam lima dekade terakhir. Sensus Penduduk 1971 mencatat angka TFR sebesar 6,66 yang berarti seorang perempuan melahirkan sekitar 6-7 anak selama masa reproduksinya. Sementara Long Form SP2020 mencatat TFR sebesar 2,43, yang berarti hanya sekitar 2-3 anak yang dilahirkan perempuan selama masa reproduksinya. Penurunan fertilitas mengakibatkan proporsi anak-anak dalam populasi ikut menurun. Kondisi ini dapat mengakibatkan rasio ketergantungan menjadi lebih rendah dan menciptakan bonus demografi. Berdasarkan hasil Long Form SP2020, tercatat TFR NTB sebesar 2,43. Angka ini diharapkan terus menurun sehingga mencapai tingkat Replacement Level.

Grafik 2. 29 Angka Kelahiran Total/ Total Fertility Rate (TFR)

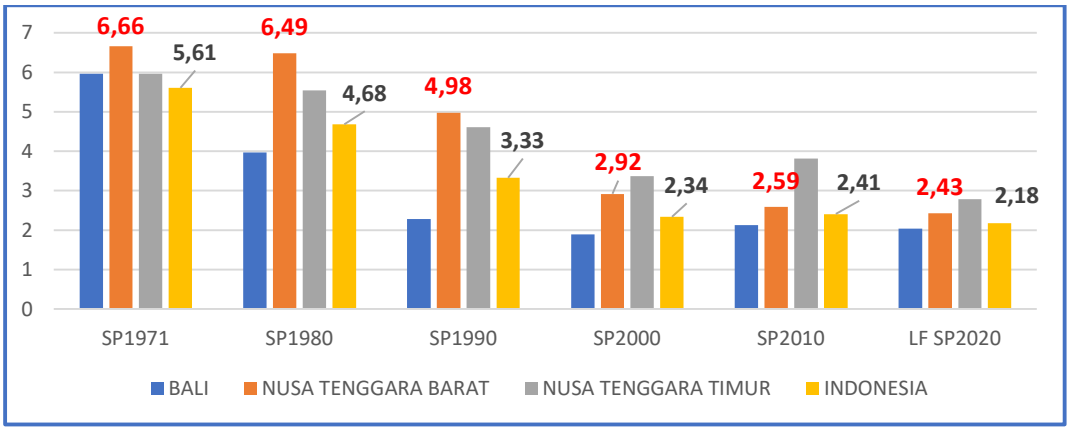

Sumber: BPS NTB, Long Form SP2020

Selanjutnya Data Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur Ibu (Age Specific Fertility Rate/ASFR) 15–19 tahun menunjukkan tren penurunan yang konsisten baik di tingkat nasional maupun daerah, meskipun kecepatan penurunan bervariasi. Di Provinsi NTB (NTB), angka kelahiran remaja turun signifikan dari 155 per 1.000 perempuan pada SP 1971 menjadi 46,91 per 1.000 perempuan pada SP 2020. Meskipun demikian, angka tersebut masih jauh di atas rata-rata nasional yang telah menurun dari 155 menjadi 26,64 pada periode yang sama. Dibandingkan provinsi lain di kawasan Bali–Nusa Tenggara, NTB masih mencatat tingkat kelahiran remaja tertinggi; misalnya, Bali hanya 19,76 dan Nusa Tenggara Timur 27,93 pada SP 2020.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi kemajuan signifikan dalam pengendalian kelahiran remaja, tantangan pernikahan dini, akses terhadap pendidikan reproduksi, dan layanan kesehatan remaja di NTB masih perlu mendapat perhatian khusus. Hal ini menegaskan pentingnya penguatan program pembangunan kependudukan, peningkatan kualitas edukasi kesehatan reproduksi, pemberdayaan perempuan, serta kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka kelahiran remaja agar sejalan dengan target nasional dan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Provinsi NTB.

Grafik 2. 30 Angka Kelahiran menurut Kelompok Umur Ibu (Age Spesific Fertility Rate/ASFR) 15-19 Tahun dan Provinsi NTB

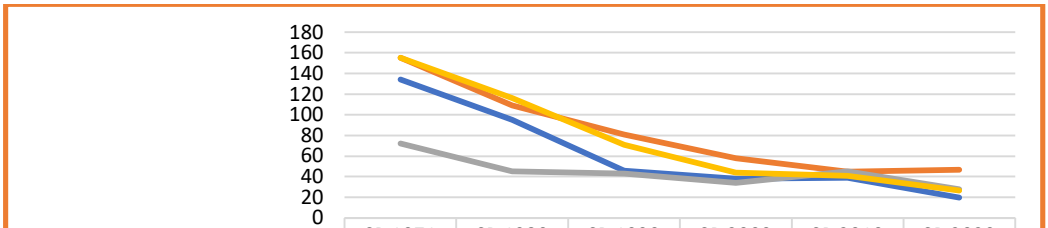

	SP 1971	SP 1980	SP 1990	SP 2000	SP 2010	SP 2020
BALI	134	95	46	38	39	19,76
NUSA TENGGARA BARAT	155	109	81	58	45	46,91
NUSA TENGGARA TIMUR	72	45	43	34	45	27,93
INDONESIA	155	116	71	44	41	26,64

Sumber: BPS NTB, Long Form SP2020, 2022

Komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur usia produktif/non-produktif di NTB selama 2020-2024 menunjukkan secara jumlah penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) mendominasi yakni rata-rata 3,6 juta jiwa atau 67,23 persen sedangkan dari usia non-produktif kelompok anak (0-14 tahun) rata-rata sebanyak 1,4 juta jiwa atau 27,35 persen, dan dari usia non-produktif kelompok lanjut usia (65 tahun ke atas) rata-rata sebanyak 297,7 ribu jiwa atau 5,43 persen. Besarnya jumlah usia penduduk produktif di NTB ini menjadi potensi besar dalam perekonomian dan ketenagakerjaan. Jika dikelola dengan baik melalui program pendidikan, pelatihan, dan kesempatan kerja yang luas, kelompok ini dapat menjadi penggerak utama pembangunan daerah. Namun jika tidak

diimbangi dengan kebijakan yang tepat, tingginya jumlah usia produktif dapat menimbulkan masalah seperti pengangguran dan ketimpangan sosial.

Di sisi lain, proporsi penduduk usia non-produktif kelompok anak (0-14 Tahun) dan lanjut usia (65 tahun ke atas) memerlukan investasi besar dalam sektor pendidikan dan kesehatan anak / lanjut usia. Jumlah anak menandakan adanya potensi bonus demografi di masa depan jika mereka mendapatkan pendidikan dan keterampilan yang memadai. Jumlah lanjut usia mengindikasikan perlunya kebijakan khusus terkait kesejahteraan sosial, kesehatan dan program pensiun. Rincian jumlah dan persentase komposisi penduduk menurut kelompok umur selama 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 16 Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2020-2024

Kelompok Umur	2020		2021		2022		2023		2024	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
0–4	506.1	9.51	501.1	9.30	505.2	9.23	508.2	9.14	512.0	9.07
5–9	515.9	9.70	520.0	9.65	519.3	9.49	515.2	9.27	509.1	9.02
10–14	450.0	8.46	460.1	8.54	473.9	8.66	489.6	8.80	503.6	8.92
15–19	439.2	8.26	436.0	8.09	435.6	7.96	436.5	7.85	440.2	7.80
20-24	448.4	8.43	446.0	8.28	444.8	8.13	442.7	7.96	440.6	7.80
25-29	442.6	8.32	444.6	8.25	447.9	8.18	451.3	8.12	453.8	8.04
30-34	440.2	8.27	442.8	8.22	444.4	8.12	446.2	8.03	448.2	7.94
35-39	415.3	7.81	422.1	7.84	427.8	7.81	434.7	7.82	440.9	7.81
40-44	386.0	7.26	393.1	7.30	399.2	7.29	405.7	7.30	412.2	7.30
45-49	338.0	6.35	348.1	6.46	357.9	6.54	367.8	6.61	377.1	6.68
50-54	277.8	5.22	287.7	5.34	298.4	5.45	309.9	5.57	321.4	5.69
55-59	223.7	4.21	231.7	4.30	240.1	4.39	248.7	4.47	257.8	4.57
60-64	167.4	3.15	174.5	3.24	183.0	3.34	191.9	3.45	200.7	3.55
65+	269.4	5.06	282.2	5.24	296.5	5.42	311.9	5.61	328.3	5.81
Jumlah	5,320.1	100.00	5,387.1	100.00	5,474.0	100.00	5,560.3	100.00	5,646.0	100.00

Sumber: BPS NTB, 2025

Piramida penduduk adalah gambaran komposisi usia dan jenis kelamin suatu populasi penduduk. Piramida penduduk NTB tahun 2024 termasuk piramida ekspansif (muda) yang memiliki tingkat kelahiran yang tidak terlalu rendah dan anka kematian yang rendah atau sedang. Dari piramida ini tergambar bahwa penduduk NTB didominasi oleh penduduk usia produktif. Dominansi usia produktif menjadi jendela peluang (window opportunity) bagi Pemerintah Provinsi NTB untuk membawa NTB keluar dari kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, apabila penduduk usia produktif tersebut dipersiapkan dengan baik dari sisi kualitasnya baik itu, pendidikan, kesehatan, skill/keterampilan. Dengan penduduk usia produktif yang berpendidikan tinggi, sehat dan berketrampilan tinggi dapat merebut pasar kerja dalam dan luar negeri dan memperoleh tingkat upah yang tinggi.

Grafik 2. 31 Struktur Umur Penduduk NTB Tahun 2024

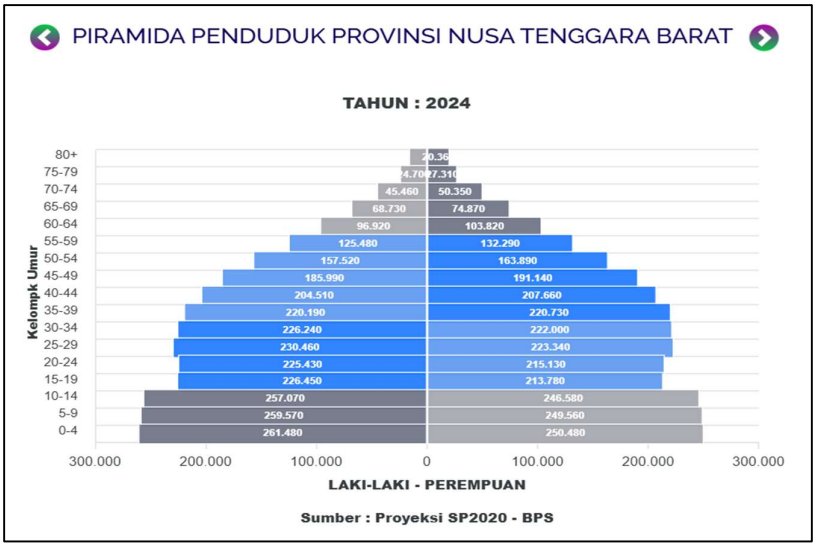

Sumber : BPS NTB, 2025 (Data Proyeksi Penduduk Hasil SP2020 (Kondisi Juni/Pertengahan Tahun)

Salah satu dampak yang terlihat dari keberhasilan dalam pembangunan khususnya di bidang kesehatan yakni adanya peningkatan angka harapan hidup yang juga berdampak pada bertambahnya jumlah penduduk lanjut usia. Lansia adalah penduduk yang telah mencapai usia 60 tahun keatas sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia.

Grafik 2. 32 Persentase Penduduk Lansia, 1970-2020

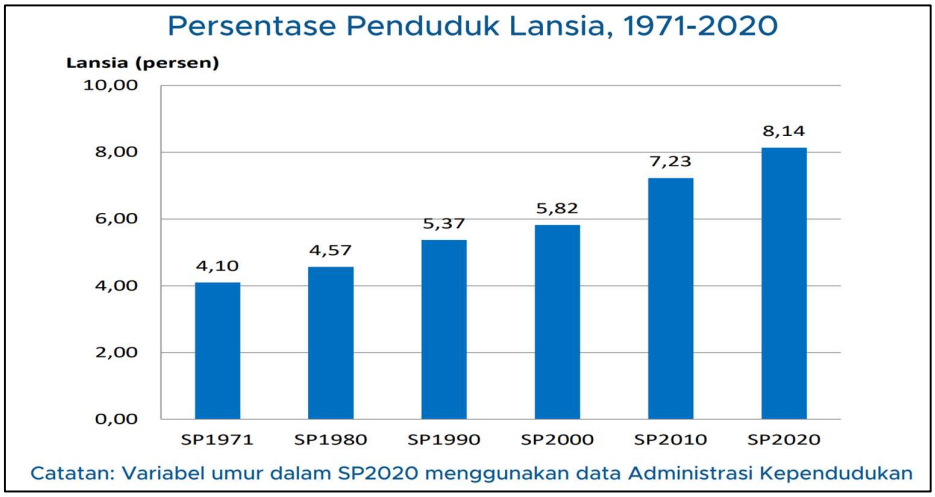

Sumber: BPS NTB, Long Form SP2020, 2022

Hasil SP 1971 sampai SP 2020, persentase Penduduk Lansia semakin meningkat signifikan. Hal ini menunjukkan Provinsi NTB berpotensi untuk mencapai bonus demografi kedua (ageing population). Peningkatan jumlah penduduk lansia dapat memberikan manfaat dalam pembangunan, namun sebaliknya peningkatan tersebut

juga menjadi tantangan tersendiri jika jumlah penduduk lansia yang besar mengalami penurunan status kesehatan dengan tingkat disabilitas yang tinggi. Penduduk lansia yang meningkat signifikan harus disiapkan sejak dini, dan pemerintah harus memberikan perhatian khusus untuk meningkatkan kualitas penduduk lansia.

Pembangunan yang inklusif tidak hanya menciptakan kesetaraan gender namun juga memperhatikan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi disabilitas. Berdasarkan hasil LongForm Sensus Penduduk 2020, prevalensi disabilitas umur 5 tahun keatas di perkotaan sebesar 1,77 persen dan di pedesaan 1,79 persen. Sementara untuk prevalensi disabilitas umur 5 tahun keatas pada laki-laki sebesar 1,65 persen dan perempuan sebesar 1,91 persen. Jika melihat kelompok umur, penduduk usia 60 tahun keatas sebesar 9,67 persen, kelompok umur 5-17 tahun sebesar 0,57 persen dan kelompok umur 16-30 tahun sebesar 0,67 persen.

Faktor lain yang mempengaruhi dinamika penduduk adalah migrasi. Migrasi merupakan kegiatan perpindahan penduduk antar wilayah dalam jangka waktu tertentu, dengan melibatkan perubahan tempat tinggal. Penduduk yang wilayah tempat tinggalnya pada saat pelaksanaan sensus/survei berbeda dengan wilayah tempat lahir merupakan migran seumur hidup. Besaran migran seumur hidup dalam suatu populasi dikenal sebagai angka migrasi seumur hidup. Hasil Long Form SP2020 menunjukkan bahwa angka migrasi seumur hidup NTB cenderung fluktuatif dalam lima dekade terakhir. Angka migrasi seumur hidup hasil Long Form SP2020 mencapai 2,27 persen, mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan hasil SP2010. Dengan kata lain, setidaknya 2 - 3 dari 100 penduduk NTB lahir di provinsi lain.

Grafik 2. 33 Tren Migrasi Seumur hidup SP1971-LongForm SP2020

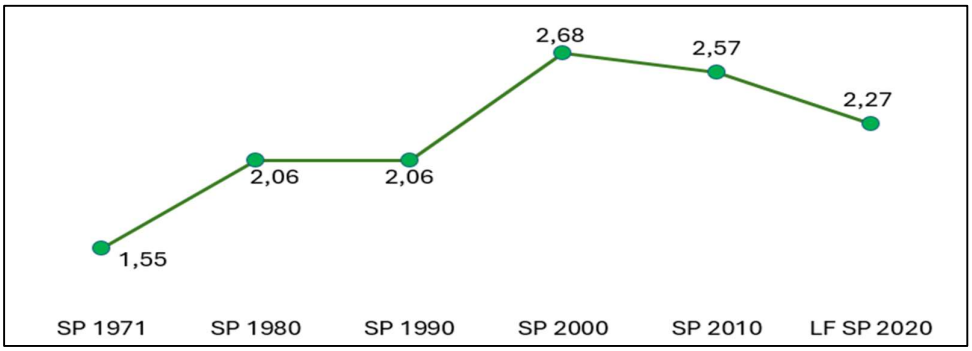

Sumber : BPS NTB, 2024 (Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 Provinsi NTB)

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Selama periode 2019-2024, perekonomian NTB sangat bergantung pada kinerja sektor pertambangan. Ketika sektor ini tumbuh tinggi, ekonomi NTB melonjak, seperti yang terjadi di tahun 2022. Namun, ketergantungan tersebut juga menciptakan volatilitas yang tinggi. Sementara itu, sektor non-tambang di NTB menunjukkan kinerja yang lebih stabil, meskipun tidak setinggi pertumbuhan berbasis tambang.

Grafik 2. 34 Pertumbuhan ekonomi NTB selama periode tahun 2019-2024

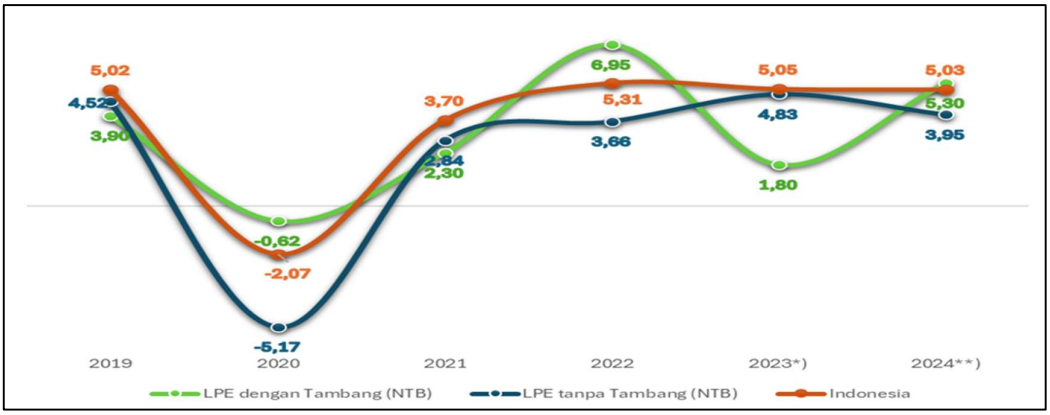

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Sektor pertambangan seringkali sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti harga komoditas global, permintaan internasional, atau kebijakan perdagangan. Jika harga produksi naik (seperti di 2022), pertumbuhan ekonomi NTB melonjak cepat. Sebaliknya, jika turun atau ada gejolak pasar, pertumbuhan bisa anjlok drastis. Perekonomian NTB menjadi sulit diprediksi karena sangat bergantung pada satu sektor yang rentan perubahan. Ke depan, penting bagi NTB untuk terus mendorong diversifikasi ekonomi agar tidak terlalu bergantung pada sektor tambang, sehingga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dapat tercapai.

Grafik 2. 35 Pertumbuhan Ekonomi Regional Bali-Nusra 2019-2023

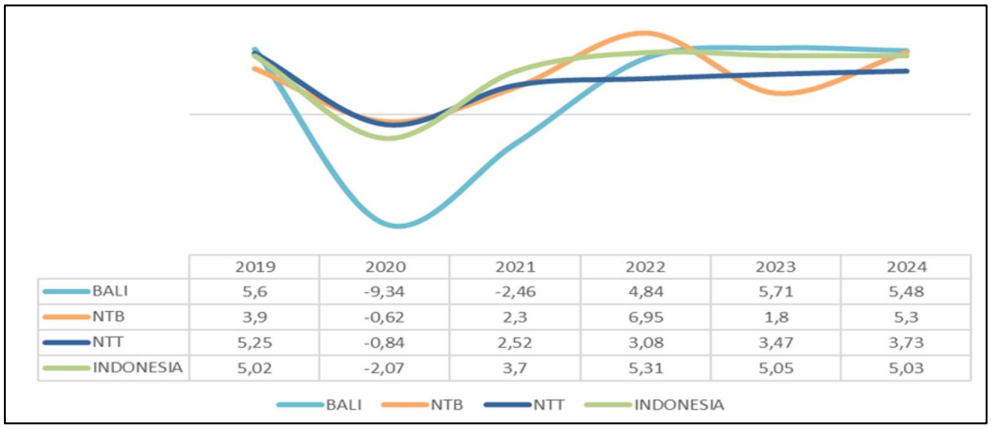

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
BALI	5,6	-9,34	-2,46	4,84	5,71	5,48
NTB	3,9	-0,62	2,3	6,95	1,8	5,3
NTT	5,25	-0,84	2,52	3,08	3,47	3,73
INDONESIA	5,02	-2,07	3,7	5,31	5,05	5,03

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

NTB menunjukkan pertumbuhan paling fluktuatif dengan kisaran -0,62% hingga 6,95%, mencerminkan ketergantungan pada sektor tambang. Meski relatif tahan selama pandemi (-0,62% di 2020), pertumbuhan 2023 yang hanya 1,8% mengindikasikan pemulihan yang belum solid. NTT tumbuh stabil namun rendah (2,52%-5,25%), dengan ketahanan sektor pertanian saat pandemi (-0,84% di 2020) tetapi stagnasi pasca krisis (3,73% di 2024). Bali mengalami kontraksi terdalam (-9,34% di 2020) namun

pemulihannya paling cepat, mencapai 5,71% di 2023 berkat rebound pariwisata. Ketiga wilayah menghadapi tantangan berbeda, NTB perlu diversifikasi ekonomi untuk mengurangi volatilitas, NTT membutuhkan akselerasi pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas, dan Bali harus memperkuat ketahanan sektor pariwisata. Perbedaan struktur ekonomi ini menegaskan pentingnya kebijakan berbasis karakteristik lokal untuk mendorong pemulihan berkelanjutan pasca pandemi.

Persentase kemiskinan Provinsi NTB tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang fluktuatif. Perkembangan angka kemiskinan yang masih naik-turun ini mencerminkan ketidakpastian ekonomi dan perlunya penguatan program perlindungan sosial serta ketepatan dalam mengintervensi masyarakat miskin. Pemulihan ekonomi semakin membaik pada 2023-2024, berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan yang signifikan pada tahun 2024. Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem mengamatkan 3 strategi yang digunakan dalam penghapusan kemiskinan ekstrem yaitu pengurangan beban pengeluaran, meningkatan pendapatan masyarakat dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.4.2/9839/Bangda tanggal 12 September 2023 perihal program, kegiatan, sub kegiatan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memprioritaskan kegiatan yang mensasar langsung masyarakat miksin dan berorientasi kepada peningkatan pendapatan agar tergadruasi dari kemiskinan menjadi rujukan dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sehingga persentase angka kemiksinan mengalami penurunan yang signifikan dari 13,85% pada bulan maret tahun 2023 menjadi 11,91% pada bulan september 2024. Meskipun capaian persentase penurunan kemiskinan cukup signifikan namun jumlah penduduk miskin masih tinggi secara absolut yaitu sebesar 658.600 jiwa, kondisi ini menggambarkan bahwa pertumbuhan populasi NTB yang sejalan dengan perbaikan taraf hidup

Grafik 2. 36 Angka Kemiskinan Provinsi NTB 2019-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Selama periode 2020-2024, seluruh Kab/Kota di NTB mencatat penurunan angka kemiskinan. Lombok Utara yang sempat menjadi wilayah termiskin (26,99% pada 2020) berhasil menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 23,96% di 2024, diikuti oleh wilayah lain seperti Dompu (turun 0,78 poin) dan Bima (turun 0,57 poin). Meski sempat terdampak pandemi yang menyebabkan kenaikan kemiskinan di beberapa wilayah pada 2021, pemulihan ekonomi berhasil dilakukan dengan penurunan konsisten hingga 2024. Kota Mataram konsisten menjadi wilayah dengan kemiskinan terendah (8,00%), menunjukkan efektivitas program perkotaan dalam penanganan kemiskinan.

Kesenjangan antar daerah salah satunya dilihat dari angka kemiskinan. Upaya penanggulangan kemiskinan masih menjadi tantangan serius bagi Pemerintah Provinsi NTB. Angka kemiskinan Kabupaten Lombok Utara masih 23,96 persen, sementara angka kemiskinan Kota mataram sudah mencapai 8 persen dan Kota Bima 8,12 persen. Gap angka kemiskinan yang cukup besar ini menunjukkan bahwa masih ada disparitas pembangunan antar kabupaten dan kota. Untu itu diperlukan kebijakan dan strategi pembangunan yang lebih merata.

Grafik 2. 37 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kab/Kota Tahun 2020-2024 (Persen)

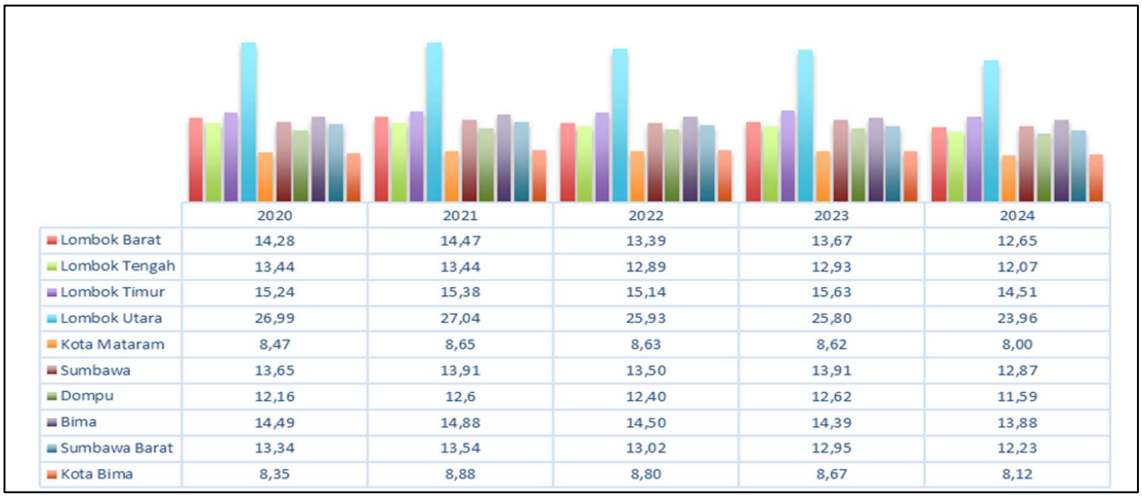

	2020	2021	2022	2023	2024
Lombok Barat	14,28	14,47	13,39	13,67	12,65
Lombok Tengah	13,44	13,44	12,89	12,93	12,07
Lombok Timur	15,24	15,38	15,14	15,63	14,51
Lombok Utara	26,99	27,04	25,93	25,80	23,96
Kota Mataram	8,47	8,65	8,63	8,62	8,00
Sumbawa	13,65	13,91	13,50	13,91	12,87
Dompu	12,16	12,6	12,40	12,62	11,59
Bima	14,49	14,88	14,50	14,39	13,88
Sumbawa Barat	13,34	13,54	13,02	12,95	12,23
Kota Bima	8,35	8,88	8,80	8,67	8,12

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Kesenjangan pembangunan antar wilayah di NTB masih terlihat mencolok. Pada 2024, selisih antara Lombok Timur (185,03) dengan Kota Bima (15,81) mencapai lebih dari 11 kali lipat. Beberapa wilayah seperti Lombok Tengah (122,32) dan Sumbawa (63,00) menunjukkan stabilitas yang baik, sementara Dompu (32,06) dan Lombok Utara (56,43) perlu percepatan pembangunan. Lombok Timur menjadi Kabupaten dengan jumlah penduduk tertinggi, hal ini terkait dengan jumlah penduduk di Lombok Timur yang mencapai 25 persen penduduk NTB.

Grafik 2. 38 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kab/Kota Tahun 2020-2024 (Ribu Jiwa)

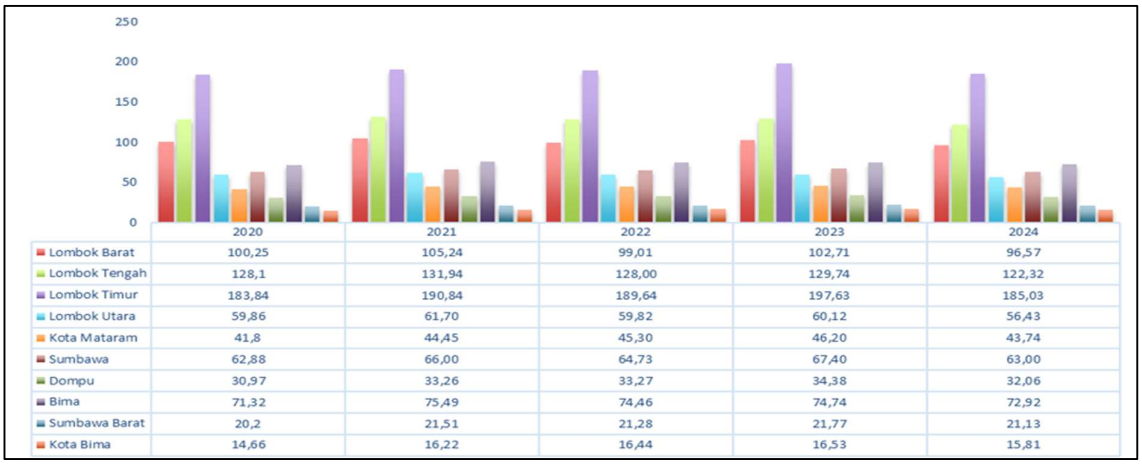

	2020	2021	2022	2023	2024
Lombok Barat	100,25	105,24	99,01	102,71	96,57
Lombok Tengah	128,1	131,94	128,00	129,74	122,32
Lombok Timur	183,84	190,84	189,64	197,63	185,03
Lombok Utara	59,86	61,70	59,82	60,12	56,43
Kota Mataram	41,8	44,45	45,30	46,20	43,74
Sumbawa	62,88	66,00	64,73	67,40	63,00
Dompu	30,97	33,26	33,27	34,38	32,06
Bima	71,32	75,49	74,46	74,74	72,92
Sumbawa Barat	20,2	21,51	21,28	21,77	21,13
Kota Bima	14,66	16,22	16,44	16,53	15,81

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), Perekonomian NTB secara keseluruhan menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dari Rp133,2 triliun pada 2019 menjadi Rp182,4 triliun pada 2024, dengan peningkatan signifikan terutama pada tahun 2022-2024. Namun, pertumbuhan ini tidak merata di seluruh wilayah. Lombok Timur konsisten menjadi kontributor terbesar dengan PDRB mencapai Rp26,2 triliun pada 2024, diikuti oleh Lombok Tengah (Rp22,6 triliun) dan Kota Mataram (Rp24,2 triliun). Sementara itu, daerah seperti Lombok Utara dan Kota Bima tetap menjadi wilayah dengan PDRB terendah, meskipun mengalami pertumbuhan.

Tabel 2. 17 PDRB ADHK Kab/Kota se-NTB Tahun 2019 - 2024 (Rp.Trilyun)

No.	Kabupaten/Kota	Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Rp. Milyar					
		2019	2020	2021	2022	2023*	2024**
1	Lombok Barat	10.894,63	10.128,29	10.472,21	10.834,22	11.379,48	11.723,12
2	Lombok Tengah	12.398,53	11.571,00	12.037,48	12.464,40	13.183,34	13.624,03
3	Lombok Timur	14.424,06	13.973,99	14.410,21	14.867,66	15.508,94	16.160,30
4	Sumbawa	10.470,74	10.032,95	10.220,82	10.548,58	10.929,06	11.269,83
5	Dompu	5.059,30	4.896,51	4.979,08	5.125,83	5.288,43	5.479,92
6	Bima	8.234,04	7.943,64	8.085,69	8.314,35	8.640,92	8.884,21
7	Sumbawa Barat	12.789,11	16.470,71	16.415,89	20.379,44	18.265,35	20.458,11
8	Lombok Utara	3.477,14	3.217,76	3.262,15	3.376,02	3.548,23	3.699,96
9	Kota Mataram	13.811,87	13.049,74	13.475,87	13.951,85	14.581,39	15.182,76
10	Kota Bima	3.029,06	2.879,79	2.938,98	3.018,40	3.174,09	3.302,30
11	NTB	94.588,48	94.164,39	96.298,38	102.880,75	104.499,23	109.784,54

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Tabel 2. 18 PDRB ADHB Kab/Kota se-NTB Tahun 2019 - 2024 (Rp.Trilyun)

No.	Kabupaten/Kota	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Rp. Milyar					
		2019	2020	2021	2022	2023*	2024**
1	Lombok Barat	15.452,08	14.567,65	15.407,26	16.561,85	18.121,01	19.159,98
2	Lombok Tengah	17.847,27	16.666,63	17.686,60	19.243,33	21.250,62	22.604,87
3	Lombok Timur	20.312,16	20.019,05	21.053,65	22.599,76	24.577,74	26.292,68
4	Sumbawa	14.803,29	14.446,24	15.021,40	16.107,72	17.510,43	18.517,44
5	Dompu	7.164,66	7.064,50	7.339,20	7.826,00	8.510,66	9.064,03
6	Bima	11.630,91	11.406,36	11.856,10	12.734,25	13.946,66	14.756,77
7	Sumbawa Barat	17.431,94	22.764,20	23.758,07	31.512,49	29.641,67	36.564,87
8	Lombok Utara	4.862,64	4.549,10	4.706,60	5.050,98	5.558,79	5.982,72
9	Kota Mataram	19.477,38	18.669,62	19.691,62	21.182,26	22.780,96	24.200,34
10	Kota Bima	4.267,45	4.133,01	4.300,51	4.574,61	4.986,32	5.313,65
11	NTB	133.249,78	134.286,36	140.821,01	157.393,25	166.884,86	182.457,35

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Daerah paling mencolok adalah Sumbawa Barat yang mengalami lonjakan luar biasa dari Rp17,4 triliun (2019) menjadi Rp36,5 triliun (2024), dengan pertumbuhan sangat pesat di tahun 2022 (Rp31,5 triliun). Hal ini diduga kuat terkait dengan aktivitas pertambangan yang intensif di wilayah tersebut. Sebaliknya, Dompu dan Kota Bima menunjukkan pertumbuhan yang lebih lambat, mengindikasikan adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah. Data ini menggarisbawahi perlunya strategi pembangunan yang lebih inklusif untuk mengurangi kesenjangan sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi regional.

PDRB NTB Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010 mengalami peningkatan signifikan dari 94.588,48 miliar rupiah pada tahun 2019 menjadi 109.784,54 miliar rupiah pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil di seluruh wilayah NTB. Beberapa Kab/Kota yang mengalami pertumbuhan signifikan antara lain Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kota Mataram. Meski sebagian besar daerah menunjukkan tren positif, beberapa daerah mengalami pertumbuhan yang lebih lambat, seperti Kabupaten Dompu, yang hanya meningkat dari 5.059,30 miliar rupiah pada 2019 menjadi 5.479,92 miliar rupiah pada 2024.

Secara keseluruhan, data ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi NTB yang terus meningkat, dengan beberapa Kab/Kota mengalami percepatan lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya. Pertumbuhan ini dapat dikaitkan dengan berbagai faktor seperti investasi, pembangunan infrastruktur, dan perkembangan sektor-sektor unggulan di masing-masing wilayah.

Grafik 2. 39 PDRB Per Kapita

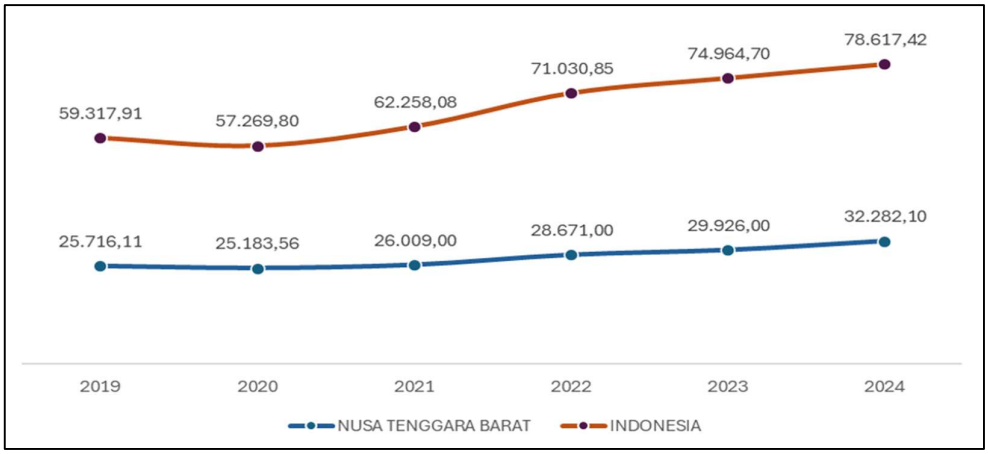

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Setelah penurunan akibat pandemi pada 2020, NTB menunjukkan pemulihan pendapatan per kapita secara bertahap dari tahun 2021 hingga proyeksi 2024. Meskipun ada peningkatan, pendapatan per kapita NTB masih jauh di bawah rata-rata nasional. Pada 2024, NTB mencapai Rp 32,28 juta per kapita, sementara Indonesia mencapai Rp 78,61 juta. Ini mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan rata-rata masyarakat NTB masih jauh tertinggal dibandingkan rata-rata nasional.

Pertumbuhan pendapatan per kapita NTB tidak melonjak setara dengan pertumbuhan ekonomi (LPE) yang sempat tinggi di 2022, terutama yang didorong oleh sektor pertambangan. Hal ini bisa berarti bahwa kontribusi sektor tambang lebih banyak memberikan keuntungan pada sektor korporasi daripada meningkatkan pendapatan masyarakat secara langsung. Untuk mengejar ketertinggalan pendapatan per kapita, NTB perlu meningkatkan sektor-sektor ekonomi non-tambang seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri kreatif. Hal ini penting agar pertumbuhan ekonomi lebih merata dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan ekonomi dipengaruhi oleh status ketenagakerjaan. Pertumbuhan ekonomi NTB yang terus membaik berpengaruh pada menurunnya pengangguran di NTB yang diukur dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi NTB tahun 2020-2024 turun secara signifikan. TPT Agustus 2024 sebesar 2,73 persen, turun 0,07 persen dibandingkan dengan Agustus 2023, angka ini masih jauh dibawah TPT nasional sebesar 4,91 persen. Capaian ini menjadikan Provinsi NTB sebagai daerah dengan tingkat pengangguran terbuka terendah keempat di Indonesia.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) salah satu indikator untuk mengukur partisipasi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. TPAK yang tinggi menunjukkan banyak orang terlibat dalam kegiayan ekonomi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. TPAK laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, hal ini dipengaruhi oleh akses perempjuan terhadap pendidikan, pemberdayaan dan lapangan kerja.

Grafik 2. 40 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di NTB Tahun 2020-2024

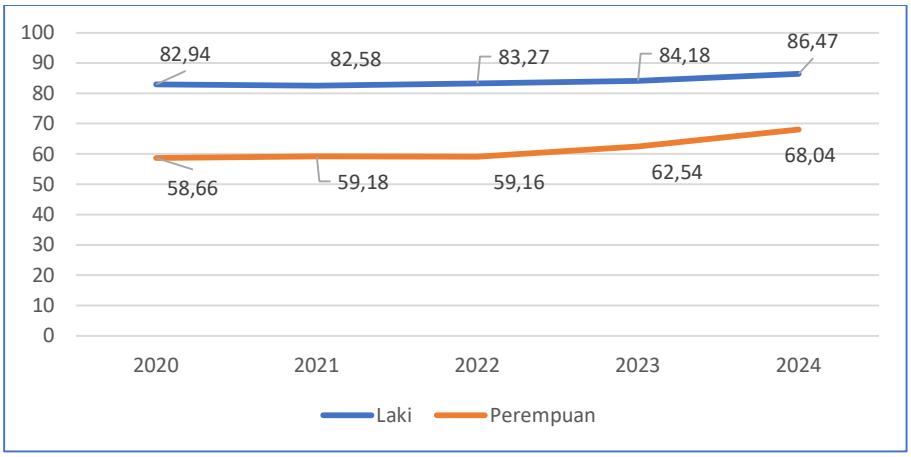

Sumber : BPS NTB, 2024

Berdasarkan jenis kelamin, TPT laki-laki cenderung menurun, sementara TPT perempuan cenderung meningkat. Tingginya TPT perempuan salah satunya disebabkan oleh masih adanya diskriminasi gender sehingga akses terhadap pendidikan, pemberdayaan dan lapangan kerja terbatas.

Grafik 2. 41 TPT Menurut Tingkat Pendidikan Provinsi NTB Tahun 2020-2024

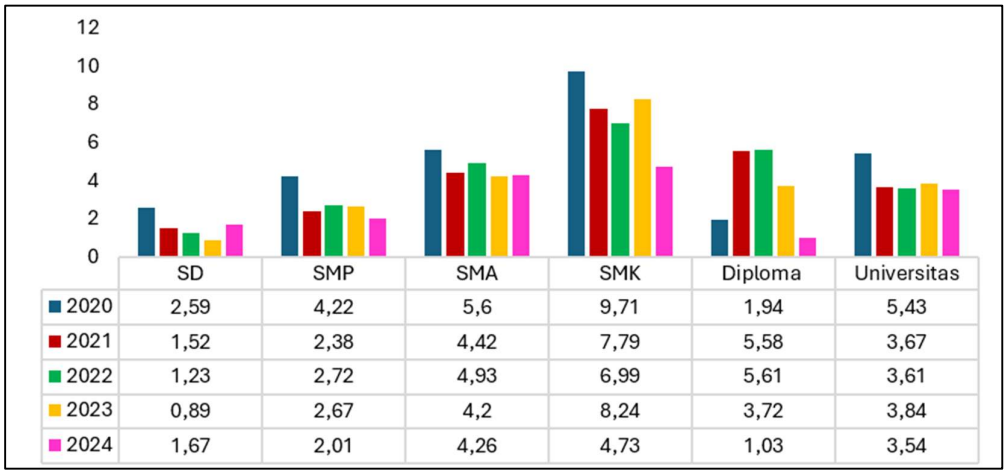

	SD	SMP	SMA	SMK	Diploma	Universitas
2020	2,59	4,22	5,6	9,71	1,94	5,43
2021	1,52	2,38	4,42	7,79	5,58	3,67
2022	1,23	2,72	4,93	6,99	5,61	3,61
2023	0,89	2,67	4,2	8,24	3,72	3,84
2024	1,67	2,01	4,26	4,73	1,03	3,54

Sumber : BPS NTB, 2025

Tingkat Pengangguran Terbuka didominasi oleh lulusan SMK sebesar 4,73 persen dan lulusan SMA sebesar 4,26 persen. Meskipun demikian jika dibandingkan dengan tahun 2022 (6,99 persen) dan 2023 (8,24 persen), TPT lulusan SMK sudah mengalami penurunan signifikan. Untuk itu perlu kebijakan revitalisasi pendidikan vokasi dan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri agar lulusan SMK dapat terserap sesuai dengan ketrampilan yang dimiliki.

Grafik 2. 42 Tingkat Pengangguran Terbuka NTB Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020-2024

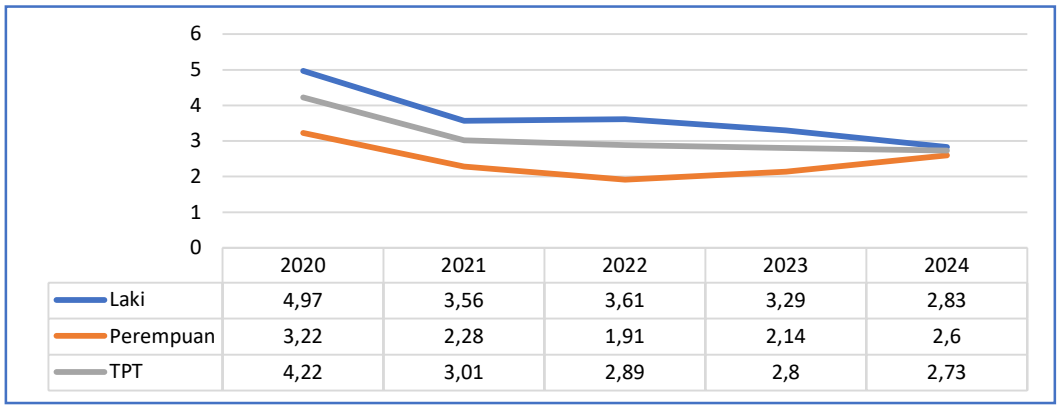

	2020	2021	2022	2023	2024
Laki	4,97	3,56	3,61	3,29	2,83
Perempuan	3,22	2,28	1,91	2,14	2,6
TPT	4,22	3,01	2,89	2,8	2,73

Sumber : BPS NTB, 2024

TPT di Kab/Kota, tahun 2024 menunjukkan bahwa Kota Mataram dan Kota Bima menjadi daerah dengan TPT tertinggi, sedangkan Kabupaten Lombok Utara menjadi daerah dengan TPT terendah. Tingginya TPT di Kota Mataram dikarenakan faktor urbanisasi dan migrasi penduduk yang berakibat jumlah pencari kerja meningkat lebih cepat dibandingkan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Selain itu, persaingan kerja di kota yang lebih ketat karena membutuhkan pekerjaan yang memiliki keterampilan khusus dan pendidikan tinggi menyebabkan pendatang dari desa tidak bisa bisa terserap akibat tidak memiliki keterampilan dan Pendidikan dan mumpuni.

Grafik 2. 43 TPT Berdasarkan Kab/Kota Provinsi NTB 2020-2024

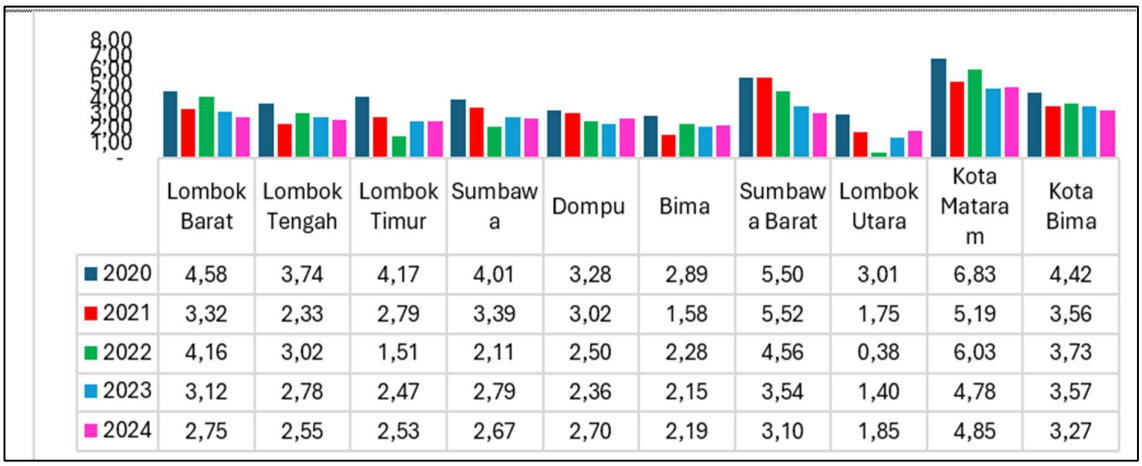

	Lombok Barat	Lombok Tengah	Lombok Timur	Sumbawa	Dompu	Bima	Sumbawa Barat	Lombok Utara	Kota Mataram	Kota Bima
2020	4,58	3,74	4,17	4,01	3,28	2,89	5,50	3,01	6,83	4,42
2021	3,32	2,33	2,79	3,39	3,02	1,58	5,52	1,75	5,19	3,56
2022	4,16	3,02	1,51	2,11	2,50	2,28	4,56	0,38	6,03	3,73
2023	3,12	2,78	2,47	2,79	2,36	2,15	3,54	1,40	4,78	3,57
2024	2,75	2,55	2,53	2,67	2,70	2,19	3,10	1,85	4,85	3,27

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor produksi selain sumber daya alam, modal, dan kewirausahaan untuk menghasilkan suatu output. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia yang ada, maka semakin meningkat pula efisiensi dan produktivitas suatu negara. Teori human capital berpendapat bahwa pendidikan sebagai investasi sumber daya manusia yang memberi banyak manfaat antara lain: diperolehnya

kondisi kerja yang lebih baik, efisiensi produksi, peningkatan kesejahteraan, dan tambahan pendapatan seseorang, apabila mampu menyelesaikan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan lulusan pendidikan di bawahnya.

Informasi mengenai tingkat pencapaian pendidikan saat ini adalah indikator terbaik yang tersedia untuk melihat tingkat keahlian tenaga kerja. Tingkat keahlian tenaga kerja merupakan faktor penentu kemampuan suatu negara untuk bersaing dengan sukses di pasar dunia dan membuat efisiensi penggunaan kemajuan teknologi yang cepat. Dalam lima tahun terakhir angkatan kerja berusia 15 tahun keatas di NTB diisi oleh angkatan kerja dengan pendidikan tertinggi perguruan tinggi (universitas). Ini menunjukkan bahwa kualitas angkatan kerja di NTB positif dalam beberapa tahun terakhir, ditandai juga dengan peningkatan jumlah angkatan kerja, penurunan tingkat pengangguran terbuka, dan meningkatnya persensate penduduk yang bekerja di sektor formal.

Berdasarkan data perkembangan Gini Rasio di Provinsi NTB dari Maret 2019 hingga September 2024, terlihat adanya fluktuasi yang signifikan dalam tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat. Pada awal periode, yaitu Maret 2019, tingkat ketimpangan di NTB tercatat sebesar 0,379, sedikit di bawah rata-rata nasional sebesar 0,380. Namun, terjadi peningkatan ketimpangan yang cukup tajam pada September 2020, mencapai 0,386. Lonjakan ini kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan ketimpangan akses ekonomi dan pekerjaan di masyarakat NTB, terutama bagi sektor informal dan pariwisata yang menjadi penopang ekonomi daerah.

Memasuki tahun 2021 hingga 2022, terjadi tren penurunan Gini Rasio di NTB, mencerminkan adanya perbaikan distribusi pendapatan. Penurunan paling signifikan terjadi pada Maret 2024 dengan angka terendah sebesar 0,361. Sementara itu, tingkat ketimpangan nasional relatif stabil dengan sedikit kenaikan dan penurunan, dengan puncaknya di angka 0,388 pada Maret 2023, dan kemudian menurun menjadi 0,381 di September 2024. Menariknya, dalam dua tahun terakhir (2023-2024), ketimpangan di NTB tercatat lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional.

Grafik 2. 44 Perkembangan Gini Ratio NTB 2019-2024

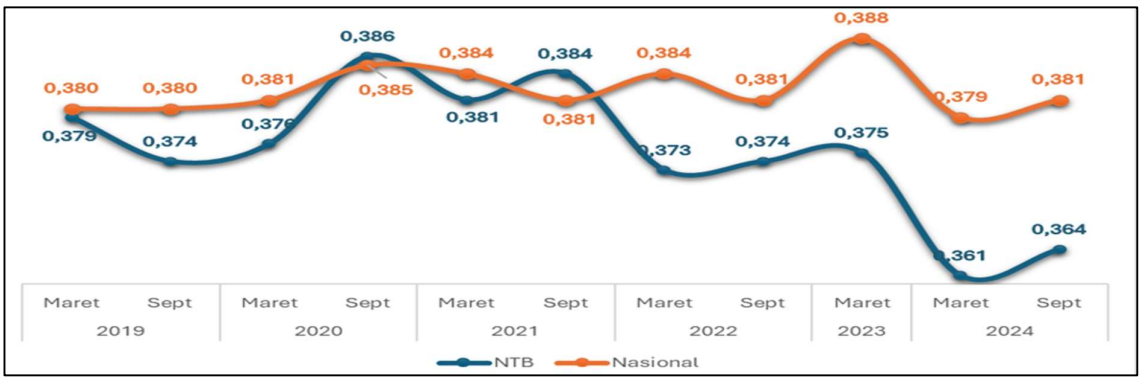

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Tren penurunan ketimpangan di NTB menunjukkan adanya indikasi positif bahwa distribusi pendapatan masyarakat mulai membaik, ini merupakan hasil dari berbagai

intervensi pemerintah daerah, seperti program pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan sektor UMKM, serta peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.

Pulau Lombok mencatat tren ketimpangan pendapatan yang beragam selama lima tahun terakhir. Kota Mataram konsisten menjadi wilayah dengan kesenjangan tertinggi (Gini Ratio 0,355-0,445), terutama pada 2022 yang mencapai puncaknya. Sebaliknya, Lombok Utara dan Lombok Timur menunjukkan kemajuan signifikan dengan penurunan ketimpangan yang stabil, dimana Lombok Utara berhasil mencapai Gini Ratio terendah (0,278) pada 2024. Pola ini mengindikasikan bahwa tantangan utama terletak pada pembangunan inklusif di wilayah perkotaan, sementara model pedesaan menunjukkan keberhasilan dalam pemerataan pendapatan.

Grafik 2. 45 Gini Rasio Provinsi NTB Menurut Kab/Kota Tahun 2020-2024 Pulau Lombok

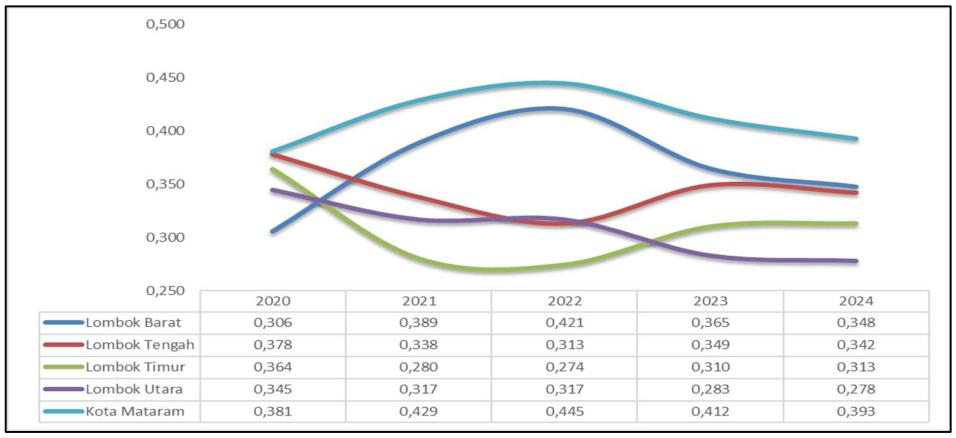

	2020	2021	2022	2023	2024
Lombok Barat	0,306	0,389	0,421	0,365	0,348
Lombok Tengah	0,378	0,338	0,313	0,349	0,342
Lombok Timur	0,364	0,280	0,274	0,310	0,313
Lombok Utara	0,345	0,317	0,317	0,283	0,278
Kota Mataram	0,381	0,429	0,445	0,412	0,393

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Perkembangan Gini Rasio di Pulau Sumbawa selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika ketimpangan pendapatan yang bervariasi antar Kab/Kota. Secara umum, seluruh wilayah mengalami peningkatan ketimpangan hingga sekitar tahun 2022–2023, sebelum bergerak menurun pada tahun 2024. Kabupaten Sumbawa memperlihatkan kenaikan yang cukup signifikan dari 0,349 pada tahun 2020 hingga mencapai puncak 0,441 pada tahun 2023, kemudian turun menjadi 0,379 pada tahun 2024. Kabupaten Dompu menunjukkan kinerja paling baik dengan tren penurunan yang konsisten, dari 0,355 pada tahun 2020 menjadi hanya 0,292 pada tahun 2024, menandakan perbaikan distribusi pendapatan yang relatif stabil. Kabupaten Bima bergerak fluktuatif di kisaran 0,35–0,38, sementara Kabupaten Sumbawa Barat mengalami lonjakan tajam dari 0,299 pada tahun 2020 ke 0,397 pada 2021 dan kemudian bertahan di sekitar 0,37–0,38 hingga 2024. Kota Bima tercatat sebagai wilayah dengan ketimpangan relatif paling tinggi, sempat mencapai 0,429 pada 2022, meskipun menurun menjadi 0,378 pada 2024.

Grafik 2. 46 Gini Rasio Provinsi NTB Menurut Kab/Kota Tahun 2020-2024 Pulau Sumbawa

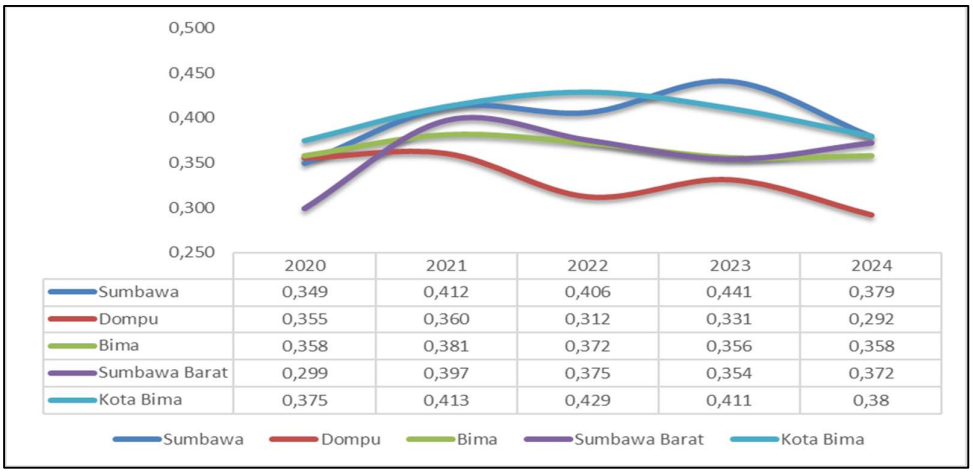

	2020	2021	2022	2023	2024
Sumbawa	0,349	0,412	0,406	0,441	0,379
Dompu	0,355	0,360	0,312	0,331	0,292
Bima	0,358	0,381	0,372	0,356	0,358
Sumbawa Barat	0,299	0,397	0,375	0,354	0,372
Kota Bima	0,375	0,413	0,429	0,411	0,38

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Secara umum ini menunjukkan bahwa Pulau Sumbawa mengalami fase peningkatan ketimpangan pendapatan terkait dengan pemulihan ekonomi pascapandemi yang belum merata, sebelum memasuki periode perbaikan pada tahun terakhir pengamatan. Rentang Gini Rasio antarwilayah pada 2024 berkisar antara 0,292 hingga 0,379, mencerminkan adanya perbedaan distribusi pendapatan yang masih cukup nyata. Temuan ini menegaskan pentingnya kebijakan pembangunan yang lebih inklusif, terutama di Kabupaten Sumbawa dan Kota Bima yang masih memiliki tingkat ketimpangan relatif tinggi, sekaligus menyoroti keberhasilan Kabupaten Dompu sebagai contoh praktik pemerataan ekonomi yang dapat dijadikan rujukan untuk memperkuat upaya pengurangan ketimpangan di seluruh Pulau Sumbawa.

Selanjutnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB menunjukkan trend meningkat dalam kurun waktu lima tahun terakhir,. Walaupun masih dibawah angka nasional, NTB menempati urutan ke 28 dari 38 provinsi di Indonesia. Peningkatan IPM NTB tahun 2024 terjadi pada semua dimensi, terutama standar hidup layak dan pengetahuan. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 72,25 tahun, meningkat 0,23 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,97 menjadi 13,98 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,13 tahun, dari 7,74 tahun menjadi 7,87 tahun pada tahun 2024. Gambaran kondisi pembangunan manusia dapat dilihat dari IPM Provinsi NTB Tahun 2020-2024.

Grafik 2. 47 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi NTB Tahun 2020-2024

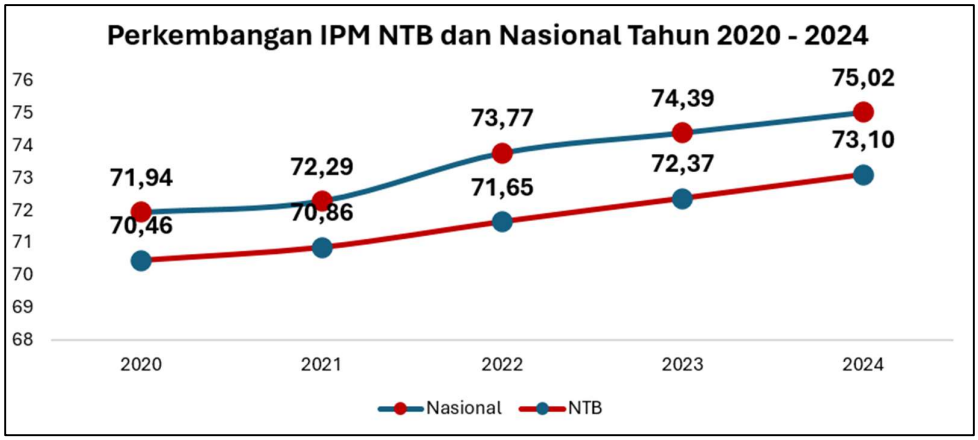

Sumber: BPS (Berdasarkan Hasil SP2020,diolah)

Sejalan dengan meningkatnya trend pertumbuhan IPM NTB, secara umum seluruh Kab/Kota juga mengalami peningkatan capaian IPM. Wilayah yang mengalami peningkatan IPM terbesar pada tahun 2024 adalah Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Dompu yaitu berturut-turut mencapai 1,17 persen dan 1,14 persen. Sedangkan wilayah yang mengalami peningkatan IPM yang terendah pada tahun 2024 yaitu Kota Mataram, yaitu sebesar 0,60 persen.

Gambar 2.7 Provinsi NTB Menurut Kab/Kota dan Status Pembangunan Manusia Tahun 2024

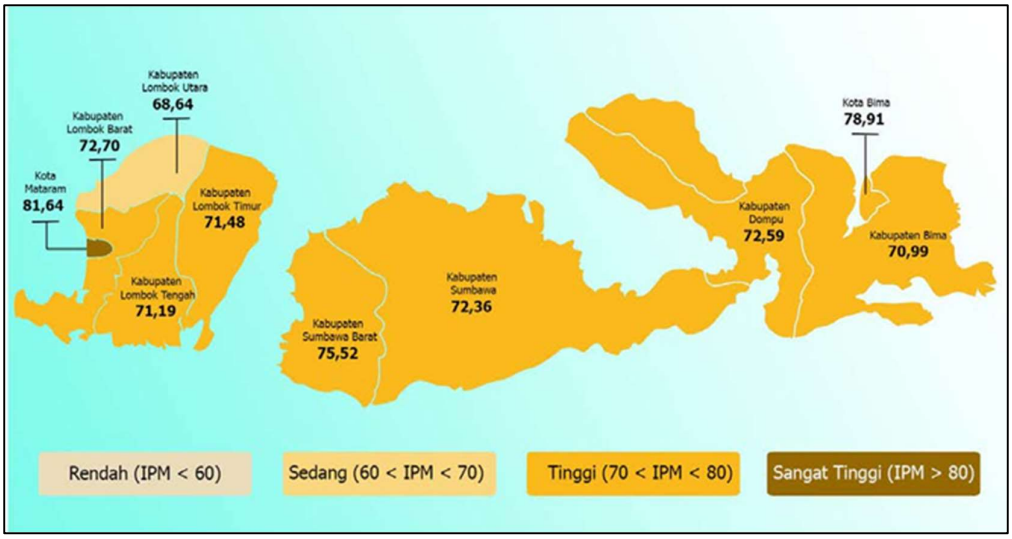

Sumber: BPS NTB, Berita Resmi Statistik No. 69/11/52/Th.XXVIII, 15 November 2024

Gambar 2.8 Capaian IMM dan Komponennya Tahun 2023 berdasarkan provinsi

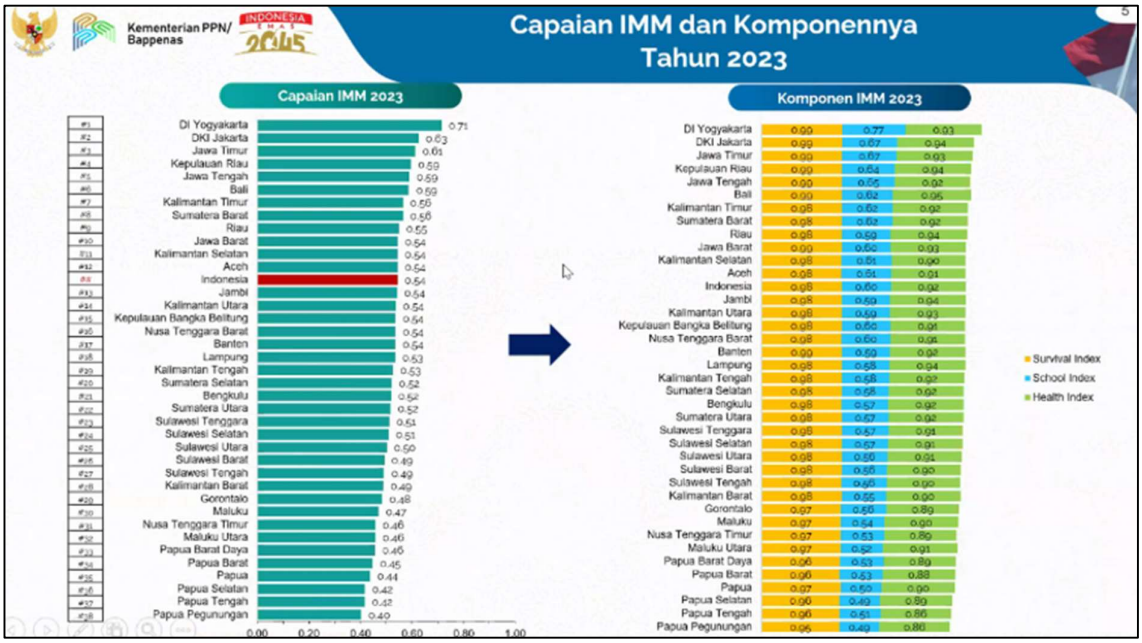

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (Data Tahun 2024 Belum Tersedia)

2.2.2 Kesehatan Untuk Semua

Kesehatan untuk semua menggambarkan kondisi kesehatan yang mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus kehidupan di seluruh wilayah dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Gambaran kondisi kesehatan untuk semua ini dilihat pada indikator Usia Harapan Hidup, Indeks Keluarga Sehat, Prevalensi Stunting, dan indikator terkait lainnya.

Grafik 2. 48 Angka Harapan Hidup Per Kab/Kota Tahun 2020-2024

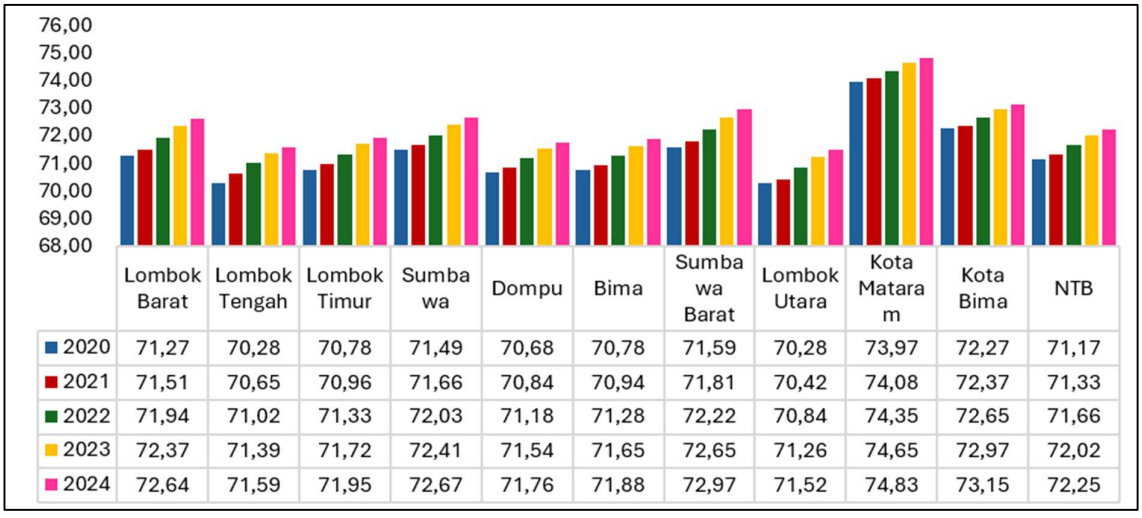

	Lombok Barat	Lombok Tengah	Lombok Timur	Sumbawa	Dompu	Bima	Sumbawa Barat	Lombok Utara	Kota Mataram	Kota Bima	NTB
2020	71,27	70,28	70,78	71,49	70,68	70,78	71,59	70,28	73,97	72,27	71,17
2021	71,51	70,65	70,96	71,66	70,84	70,94	71,81	70,42	74,08	72,37	71,33
2022	71,94	71,02	71,33	72,03	71,18	71,28	72,22	70,84	74,35	72,65	71,66
2023	72,37	71,39	71,72	72,41	71,54	71,65	72,65	71,26	74,65	72,97	72,02
2024	72,64	71,59	71,95	72,67	71,76	71,88	72,97	71,52	74,83	73,15	72,25

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Angka Harapan Hidup (AHH) NTB selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan, akan tetapi masih di bawah angka nasional. Hal ini terutama disebabkan oleh kondisi kesehatan yang masih rendah dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup sehat yang membuat masyarakat rentan terkena penyakit menular dan tidak menular.

Grafik 2. 49 Perbandingan AHH Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2020-2024

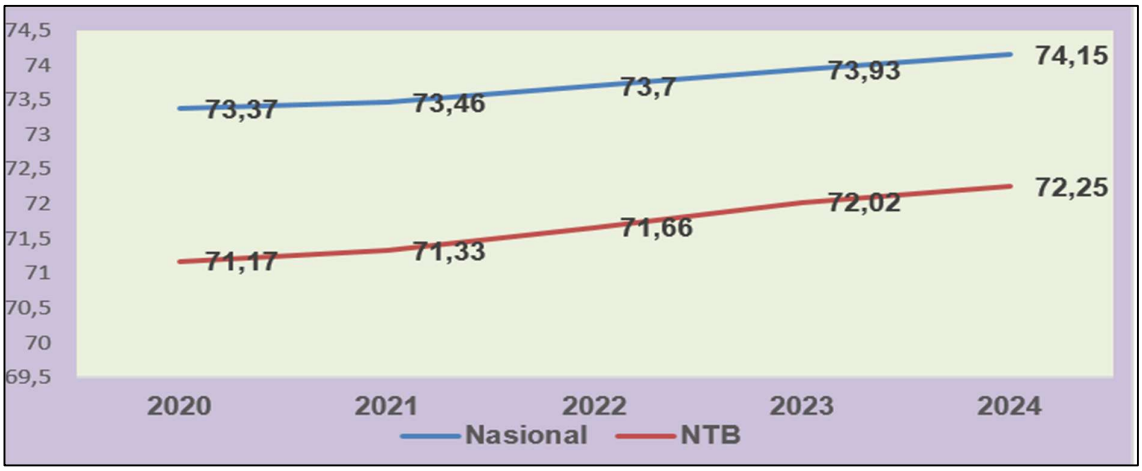

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Grafik 2. 50 Angka Kematian Bayi di Provinsi NTB

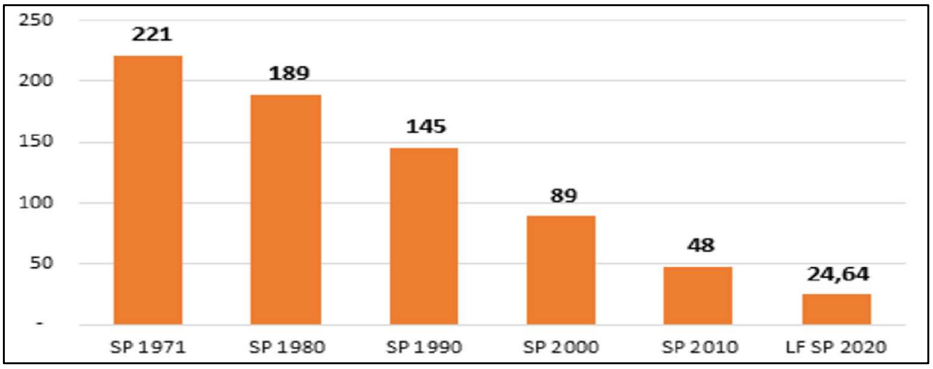

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. NTB, 2024

Angka kematian bayi (Infant Mortality Rate/IMR) adalah banyaknya kematian bayi usia di bawah 1 tahun (0–11 bulan) per 1.000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Dalam rentang 50 tahun (periode 1971-2022), penurunan angka kematian bayi di NTB hampir 90 persen. Angka kematian bayi di NTB menurun signifikan dari 48 per 1000 kelahiran hidup pada Sensus Penduduk 2010 menjadi 24,64 per 1000 kelahiran hidup pada Long Form SP 2020. Peningkatan persentase bayi yang mendapat imunisasi lengkap serta peningkatan rata-rata lama pemberian ASI membuat bayi semakin mampu

bertahan hidup. Sedangkan jumlah kematian bayi di Provinsi NTB juga cenderung menurun setiap tahunnya, sebagaimana terlihat dalam grafik berikut:

Grafik 2. 51 Jumlah Kasus Kematian Bayi (AKB) di Provinsi NTB Thn 2020-2024

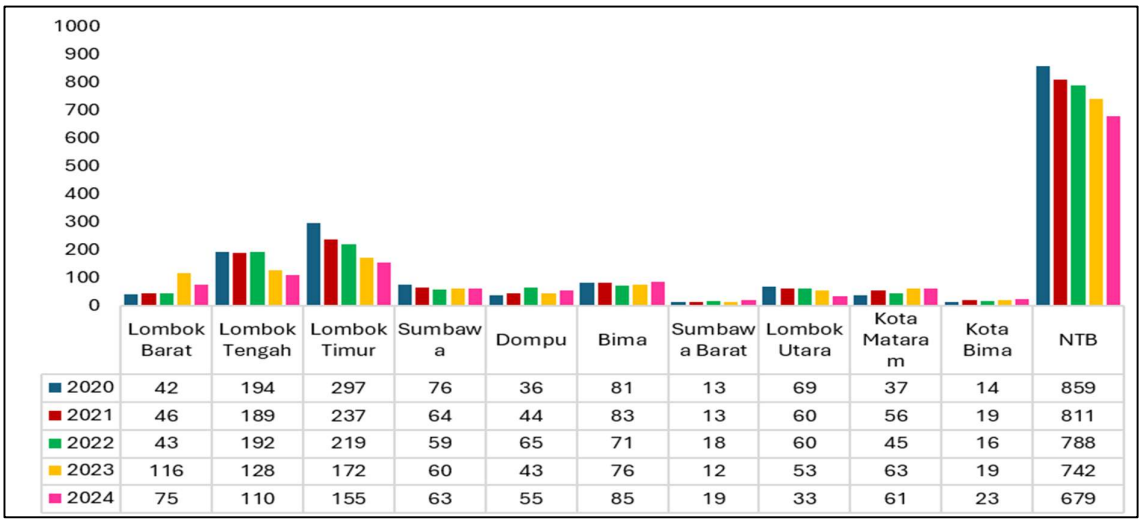

	Lombok Barat	Lombok Tengah	Lombok Timur	Sumbawa	Dompu	Bima	Sumbawa Barat	Lombok Utara	Kota Mataram	Kota Bima	NTB
2020	42	194	297	76	36	81	13	69	37	14	859
2021	46	189	237	64	44	83	13	60	56	19	811
2022	43	192	219	59	65	71	18	60	45	16	788
2023	116	128	172	60	43	76	12	53	63	19	742
2024	75	110	155	63	55	85	19	33	61	23	679

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. NTB, 2024

Jumlah kematian ibu adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh, dan lain lain.

Data jumlah kematian ibu melalui pelaporan Dinas Kesehatan secara berjenjang menunjukkan angka yang fluktuatif dan cenderung menurun. Tahun 2019 sebanyak 97 kasus menjadi 82 kasus pada tahun 2024. Penyebab kematian ibu terbanyak adalah perdarahaan. Gambaran jumlah kematian ibu dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2. 52 Jumlah Kematian Ibu di Provinsi NTB Tahun 2019 - 2024

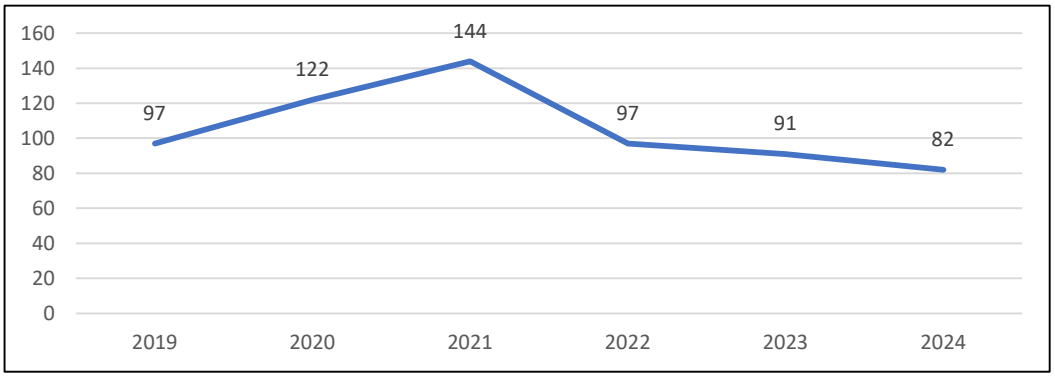

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. NTB, 2024

Indeks Keluarga Sehat (IKS) NTB selama lima tahun terakhir menunjukkan trend meningkat. Tahun 2023 IKS NTB mencapai 0,175 %, artinya sebanyak 227.938 dari 1.299.162 keluarga di NTB termasuk dalam kategori keluarga sehat. Nilai IKS ini masih berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang menetapkan bahwa sebuah keluarga dianggap sehat jika memiliki nilai IKS lebih dari 0,80. Indikator keluarga sehat yang perlu mendapat perhatian adalah indicator terkait penyakit menular dan tidak menular karena capainnya masih dibawah 50%. Indikator persalinan oleh tenaga Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang tahun 2023 capaiannya baru 70%, dan capaian Universal Child Immunization (UCI) NTB tahun 2023 hanya mencapai 67,7 %. UCI adalah inidkator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan imunisasi.

Grafik 2. 53 Capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) di Provinsi NTB 2019-2024

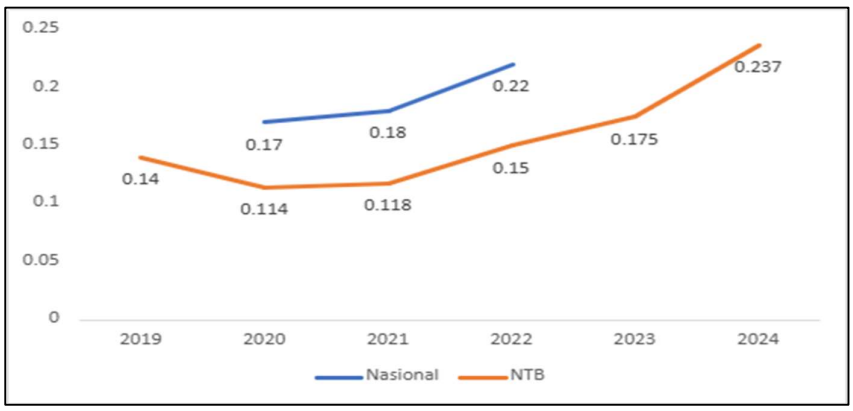

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. NTB, 2025

Stunting merupakan perawakan pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang/tinggi badan menurut usia yang kurang dari -2 Standar Deviasi (SD) pada kurva pertumbuhan WHO, disebabkan kekurangan gizi kronik yang berhubungan dengan status sosio ekonomi rendah, asupan nutrisi dan kesehatan ibu yang buruk, riwayat sakit berulang dan praktik pemberian makan pada bayi dan anak yang tidak tepat. Stunting akan memengaruhi perkembangan otak jangka panjang yang selanjutnya berdampak pada kemampuan kognitif dan prestasi sekolah. Selain itu, gangguan pertumbuhan linear akan memengaruhi daya tahan tubuh dan kapasitas kerja. Efek jangka panjang juga berhubungan dengan penurunan kemampuan oksidasi lemak sehingga menyebabkan risiko mengalami obesitas dan penyakit-penyakit degeneratif.

Grafik 2. 54 Prevalensi Stunting Provinsi NTB Tahun 2019-2024 (Data E-PPGBM)

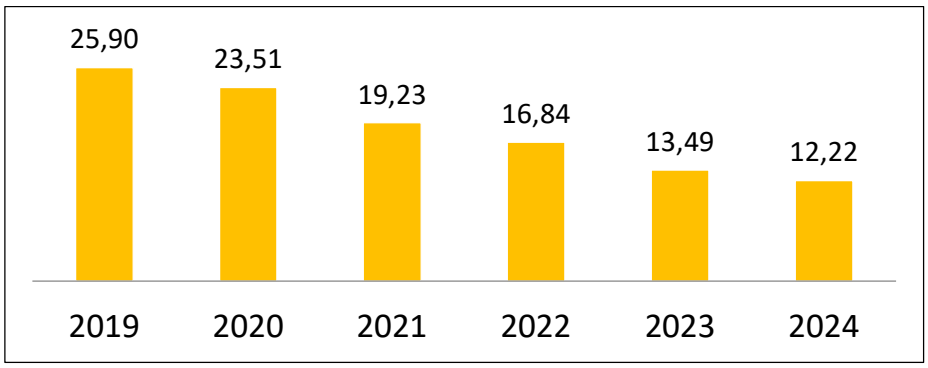

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. NTB, 2024

Berdasarkan pelaporan stunting melalui aplikasi elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), menunjukkan bahwa prevalensi stunting di NTB dalam lima tahun terakhir menunjukkan trend menurun. Disisi lain data hasil survey menunjukkan penurunan prevalensi stunting dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar 8,1% namun meningkat sebesar 5,2% atau dari angka 24,60% menjadi 29,80%, sebagaimana tergambar pada grafik berikut.

Grafik 2. 55 Prevalensi Stunting Provinsi NTB Tahun 2019-2024 (Data Survei)

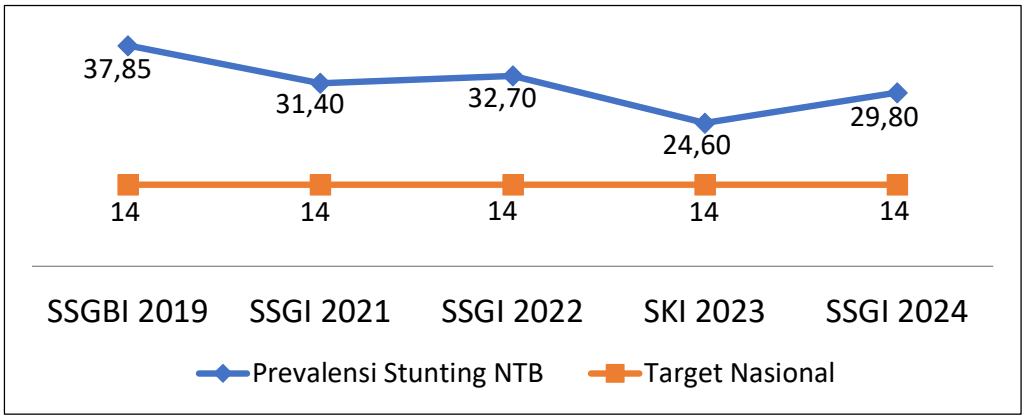

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2024 (dioalah)

Determinan stunting di provinsi NTB yaitu pernikahan usia dini, adanya anggota keluarga yang merokok, pola asuh keluarga balita/pemberian makan bayi balita yang tidak tepat, konsumsi gizi seimbang dan tablet tambah darah Ibu hamil serta remaja putri masih rendah. Penanganan masalah pendek dan sangat pendek (stunting) harus menjadi perhatian kita bersama, strategi penanganan untuk anak-anak pendek dan sangat pendek tersebut adalah dengan memperbaiki jumlah dan bioavabilitas mikronutrien dalam diet dengan cara meningkatkan konsumsi makanan bersumber hewani dan bukannya meningkatkan asupan energi. Selain itu perlu adanya intervensi untuk menurunkan angka kemiskinan karena akan sangat berpengaruh terhadap pola konsumsi masyarakat, disamping juga meningkatkan sosialisasi untuk memperbaiki

pola asuh terutama dalam pemberian makanan pada anak dan gizi anak selama dalam kandungan. Status gizi seorang anak berkaitan erat dengan pertumbuhan dan perkembangannya.

2.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan berkualitas yang merata menggambarkan kondisi pendidikan masyarakat yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup manusia dan mewujudkan kehidupan masyarakat dan bangsa yang bermartabat. Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, Angka Kemampuan Literasi dan Numerasi, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, Indeks Literasi Digital, dan indikator terkait lainnya menjadi indikator gambaran pendidikan berkualitas yang merata di Provinsi NTB.

Grafik 2. 56 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi NTB Tahun 2020-2024

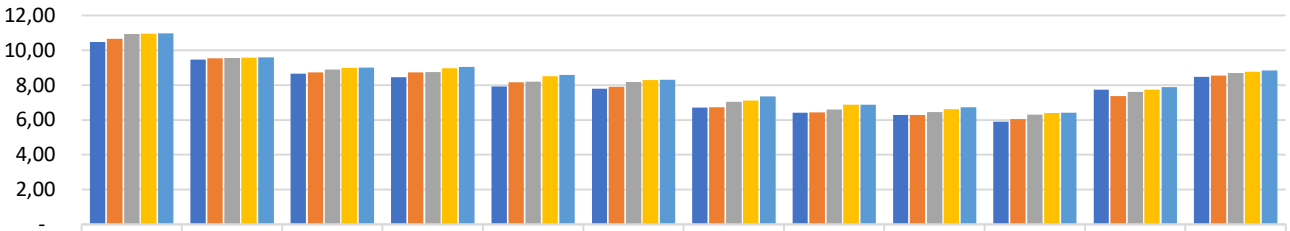

	Kota Bima	Kota Mataram	Sumbawa Barat	Dompu	Sumbawa	Bima	Lombok Timur	Lombok Barat	Lombok Tengah	Lombok Utara	NTB	Indonesia
2020	10,49	9,46	8,66	8,44	7,92	7,78	6,70	6,41	6,28	5,91	7,73	8,48
2021	10,65	9,54	8,72	8,72	8,15	7,91	6,71	6,42	6,29	6,04	7,38	8,54
2022	10,94	9,55	8,90	8,73	8,21	8,17	7,04	6,60	6,44	6,30	7,61	8,69
2023	10,95	9,56	8,98	8,97	8,52	8,29	7,12	6,87	6,61	6,39	7,74	8,77
2024	10,96	9,58	8,99	9,04	8,59	8,30	7,36	6,88	6,73	6,40	7,87	8,85

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk berumur 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir Rata-rata Lama Sekolah NTB mengalami peningkatan akan tetapi masih berada di bawah angka nasional. Tahun 2024 secara nasional NTB menempati urutan lima terendah yaitu 7,87 persen atau setara dengan kelas dua SMP. Sedangkan tiga kabupaten kota dengan RLS terendah adalah Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah dan Kab. Utara, adapun untuk RLS tertinggi adalah Kota Bima, Kota Mataram dan Kab. Sumbawa Barat.

Faktor ekonomi adalah salah satu penyebab RLS NTB masih rendah, keluarga dengan tingkat kesejahteraan rendah akan mengesampingkan pendidikan anaknya agar bisa membantu orang tuanya bekerja sehingga anak tersebut harus putus sekolah. Pendidikan yang rendah akan mempengaruhi kualitas SDM yang berpengaruh pada nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan angka pengangguran daerah.

Strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan HLS dan RLS Provinsi NTB di antaranya: menerapkan pendidikan inklusif, menerapkan kurikulum yang relevan dengan

kebutuhan pasar kerja dan kehidupan sehari-hari, memberikan bantuan keuangan kepada siswa yang membutuhkan, dan memberikan dukungan sosial dan psikologis melalui bimbingan konseling dan mentorship.

Grafik 2. 57 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Jenis Kelamin Provinsi NTB Tahun 2020-2024

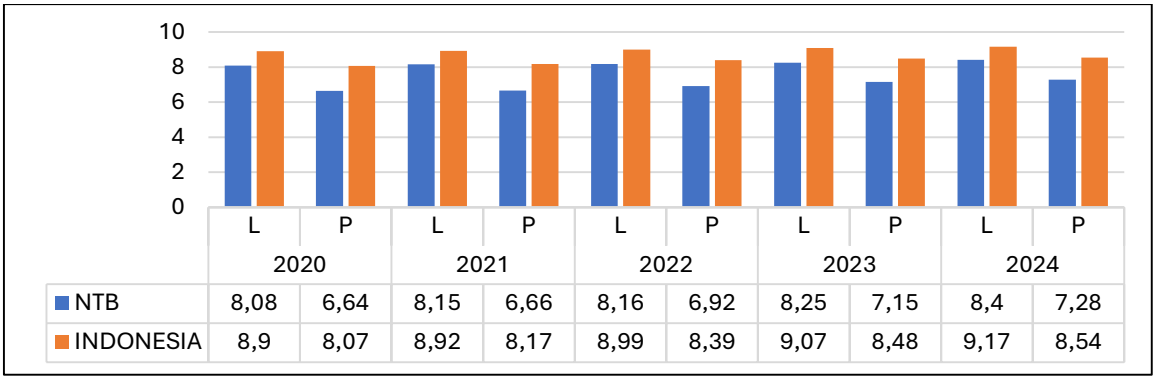

	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
	2020		2021		2022		2023		2024	
NTB	8,08	6,64	8,15	6,66	8,16	6,92	8,25	7,15	8,4	7,28
INDONESIA	8,9	8,07	8,92	8,17	8,99	8,39	9,07	8,48	9,17	8,54

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Rata-rata Lama Sekolah, laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan, di mana RLS laki-laki cenderung lebih tinggi dibandingkan RLS perempuan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa laki-laki secara rata-rata menghabiskan waktu lebih lama dalam menempuh pendidikan formal dibandingkan perempuan, Secara Umum dari tahun 2020-2024 RLS laki-laki cenderung lebih tinggi dari pada RLS Perempuan Perbedaan ini menunjukkan bahwa perempuan mungkin menghadapi tantangan atau kendala yang membuat mereka tidak dapat melanjutkan pendidikan formal selama laki-laki. Kesetaraan gender dalam pendidikan, termasuk RLS, penting untuk memastikan bahwa semua individu, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi diri dan berkontribusi pada pembangunan.

Grafik 2. 58 Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi NTB Tahun 2020-2024

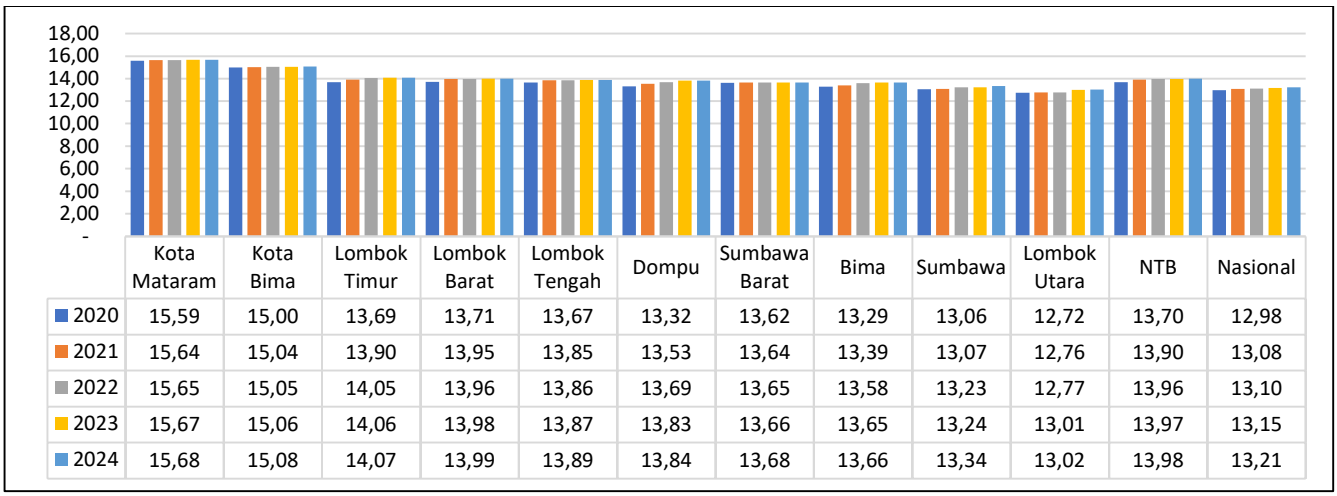

	Kota Mataram	Kota Bima	Lombok Timur	Lombok Barat	Lombok Tengah	Dompu	Sumbawa Barat	Bima	Sumbawa	Lombok Utara	NTB	Nasional
2020	15,59	15,00	13,69	13,71	13,67	13,32	13,62	13,29	13,06	12,72	13,70	12,98
2021	15,64	15,04	13,90	13,95	13,85	13,53	13,64	13,39	13,07	12,76	13,90	13,08
2022	15,65	15,05	14,05	13,96	13,86	13,69	13,65	13,58	13,23	12,77	13,96	13,10
2023	15,67	15,06	14,06	13,98	13,87	13,83	13,66	13,65	13,24	13,01	13,97	13,15
2024	15,68	15,08	14,07	13,99	13,89	13,84	13,68	13,66	13,34	13,02	13,98	13,21

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir HLS NTB menunjukkan peningkatan. Angka ini melebihi angka nasional. Tahun 2024 NTB menempati urutan kelima tertinggi dari 38 provinsi di Indonesia yaitu 13,98 persen yang artinya anak yang berumur tujuh tahun memiliki peluang menamatkan pendidikan sampai pada tingkat Diploma 1. Kabupaten kota dengan HLS tertinggi adalah Kota Mataram, Kota Bima dan Kab. Lombok Timur sedangkan tiga terendah adalah Kab. Lombok Utara, Kab. Sumbawa dan Kab. Bima.

Tingginya HLS ini merupakan capaian program pemerintah daerah seperti peningkatan akses pendidikan, program beasiswa dan bantuan Pendidikan, program Pendidikan inklusif, perbaikan infrastruktur, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan.

Grafik 2. 59 Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Jenis Kelamin Provinsi NTB Tahun 2020-2024

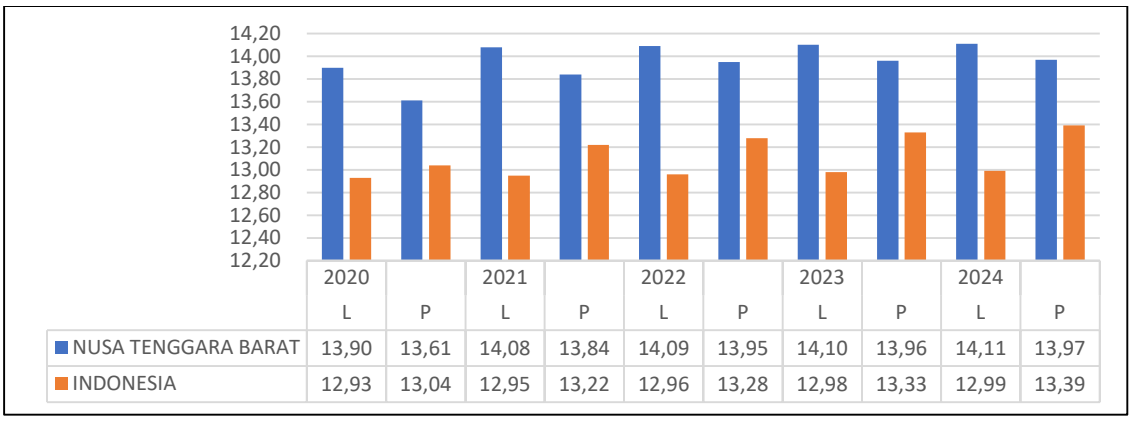

	2020		2021		2022		2023		2024	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
NUSA TENGGARA BARAT	13,90	13,61	14,08	13,84	14,09	13,95	14,10	13,96	14,11	13,97
INDONESIA	12,93	13,04	12,95	13,22	12,96	13,28	12,98	13,33	12,99	13,39

Sumber: BPS, 2024

Dalam konteks laki-laki dan perempuan, data HLS dapat menunjukkan perbedaan harapan lama sekolah antara kedua jenis kelamin tersebut. Jika HLS laki-laki lebih tinggi, ini menunjukkan bahwa laki-laki diperkirakan akan bersekolah lebih lama daripada perempuan, dan begitu pula sebaliknya HLS laki-laki dan perempuan seringkali dibandingkan untuk melihat perbedaan dalam harapan pendidikan antara kedua jenis kelamin. HLS bisa berbeda-beda tergantung pada wilayah dan tahun pengamatan, pada grafik di atas HLS Laki-laki Provinsi NTB cenderung lebih tinggi dari HLS Perempuan namun di tingkat nasional sebaliknya HLS Perempuan lebih tinggi dari HLS Laki-laki, perbedaan HLS antara laki-laki dan perempuan dapat membantu mengidentifikasi kesenjangan dalam akses pendidikan dan merancang intervensi yang tepat.

Tabel 2. 19 Angka Literasi dan Numerasi Provinsi NTB Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Realisasi							
		2021		2022		2023		2024	
		NAS	NTB	NAS	NTB	NAS	NTB	NAS	NTB
1	Rerata Kompetensi Literasi SMA	62,78	56,99	62,95	55,31	68,38	61,98	71,99	64,78
2	Rerata Kompetensi Literasi SMK	60,11	53,68	59,06	51,13	64,4	56,97	67,3	58,58

No.	Indikator	Realisasi							
		2021		2022		2023		2024	
		NAS	NTB	NAS	NTB	NAS	NTB	NAS	NTB
3	Rerata Kompetensi Literasi SDLB	55,88	51,85	58,21	46,02	61,39	49,69	65,59	54,18
4	Rerata Kompetensi Literasi SMPLB	60,97	57,95	60,81	55,56	62,74	53,60	71,31	61,53
5	Rerata Kompetensi Literasi SMLB	59,11	53,19	55,40	50,62	59,6	53,08	68,33	61,92
6	Rerata kompetensi Numerasi SMA	50,67	47,64	53,20	48,43	58,18	53,48	60,54	55,43
7	Rerata Kompetensi Numerasi SMK	49,45	47,04	50,60	46,09	55,1	50,44	56,91	51,58
8	Rerata Kompetensi Numerasi SDLB	45,85	41,49	48,54	38,26	54,4	42,02	62,17	50,79
9	Rerata Kompetensi Numerasi SMPLB	55,38	53,49	56,04	50,78	61,03	54,93	66,75	59,40
10	Rerata Kompetensi Numerasi SMLB	49,86	48,69	51,37	45,31	55,44	49,31	63,34	59,22

Sumber data : Kemendikdasmen RI 2025 (diolah)

Angka literasi dan numerasi adalah dua indikator kunci yang menggambarkan kemampuan dasar seseorang dalam membaca, menulis, dan berhitung. Keduanya tidak hanya menjadi tolok ukur kualitas pendidikan, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Literasi dan numerasi adalah keterampilan dasar yang diperlukan untuk memahami informasi, memecahkan masalah, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Literasi merujuk pada kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis dengan baik, serta memahami dan menggunakan informasi tertulis dalam kehidupan sehari-hari. Literasi yang tinggi memungkinkan individu untuk mengakses pengetahuan, mengembangkan pemikiran kritis, dan berkomunikasi secara efektif. Sementara itu, numerasi.adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan konsep matematika dasar dalam konteks kehidupan nyata, seperti menghitung, mengukur, dan menganalisis data. Numerasi yang baik membantu seseorang dalam membuat keputusan yang tepat, mengelola keuangan, dan menghadapi tantangan di dunia kerja.

Angka literasi dan numerasi yang tinggi menunjukkan bahwa suatu masyarakat memiliki dasar pendidikan yang kuat, yang menjadi modal penting untuk mencapai kemajuan di berbagai bidang. Namun, di banyak negara, terutama di daerah terpencil atau kelompok masyarakat marginal, angka literasi dan numerasi masih rendah. Hal ini dapat menjadi penghambat pembangunan, karena individu dengan keterampilan literasi dan numerasi yang terbatas cenderung sulit bersaing di pasar kerja, mengakses layanan kesehatan, atau berpartisipasi dalam proses demokrasi. Angka literasi sekolah SMA/SMK di NTB menunjukkan peningkatan dimana Angka literasi sekolah SMA tahun 2024 mencapai 64,78, masih dibawah nasional dan Angka literasi sekolah SMK tahun 2024 mencapai 58,58 masih dibawah nasional menunjukkan bahwa walaupun masih dibawah nasional namun siswa mampu memahami teks, baik teks sederhana maupun kompleks, termasuk teks sastra, ilmiah, atau informasi dan mampu menganalisis informasi, mengevaluasi data yang disajikan dalam teks, serta mampu berpikir kritis. Dengan demikian, kompetensi literasi SMA tidak hanya mencerminkan kemampuan membaca siswa, tetapi juga menjadi indikator penting untuk menilai kualitas pendidikan dan kesiapan siswa menghadapi tantangan masa depan.

Dengan demikian Literasi dan numerasi adalah kunci untuk membuka pintu menuju masa depan yang lebih cerah. Mereka adalah dasar bagi terciptanya masyarakat yang cerdas, inovatif, dan berdaya saing tinggi. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan angka literasi dan numerasi harus menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan di NTB demi mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, berkelanjutan, dan mendunia.

Tabel 2. 20 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi NTB Tahun 2024

Provinsi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM1)	Ketercukupan Koleksi Perpustakaan (UPLM2)	Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM3)	Tingkat Kunjungan Masyarakat per hari (UPLM4)	Perpustakaan yang dibina Sesuai SNP (UPLM5)	Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi Perpustakaan (UPLM6)	Jumlah Anggota Perpustakaan (UPLM7)
NTB	60,42	0,3673	0,2031	0,6924	0,1668	1,0000	0,7998	1,0000
Indonesia	73,52	0,4531	0,3793	0,7811	0,5327	1,0000	1,0000	1,0000

Sumber: BPS, 2024

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/ kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Terdapat 7 unsur pembangunan literasi masyarakat, yaitu: Pemerataan layanan perpustakaan, Ketercukupan koleksi, Ketercukupan tenaga perpustakaan, Tingkat kunjungan masyarakat per hari, Jumlah perpustakaan ber-SNP, Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/ promosi dan Anggota perpustakaan.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Provinsi NTB tahun 2024 tercatat sebesar 60,42 lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 73,52. Diantara penyebab dari rendahnya dari rata-rata nasional tidak didukung oleh tingginya Jumlah Anggota Perpustakaa (1,0000) dan Perpustakaan yang dibina sesuai SNP (1,0000), yang jauh lebih rendah dari angka nasional. Selain itu, indikator perpustakaan yang dibina sesuai standar nasional, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi perpustakaan, dan jumlah anggota perpustakaan mencapai nilai maksimal (1,0000), menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam membangun budaya literasi. Namun demikian masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian, seperti Tingkat Kunjungan Masyarakat per hari (0,1668) dan ketercukupan koleksi perpustakaan (0,2031), Ketercukupan Koleksi Perpustakaan (0,2031) dan pemerataan layanan perpustakaan (0,3668) yang lebih rendah dibandingkan angka nasional. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan aksesibilitas layanan perpustakaan serta penguatan sumber daya manusia guna memastikan pemerataan literasi di seluruh wilayah NTB.

Tabel 2. 21 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi NTB Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	13,89	17,66	67,42	66,32	60,42

Sumber : Perpustakaan Nasional, 2025

Capaian indeks pembangunan literasi NTB tahun 2024 apabila dikonversi ke dalam skala 0-100 maka nilai IPLM NTB sebesar 60,42, masuk kedalam kategori sedang dan urutan ke-33 dengan IPLM tertinggi Nasional. Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan adanya kemajuan positif walaupun adanya penurunan dalam pengembangan literasi, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan literasi di tingkat lokal.

Tabel 2. 22 Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) Menurut Dimensi Provinsi NTB Tahun 2024

Provinsi	Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)	Frekuensi Membaca (FM)	Durasi Membaca (DM)	Jumlah Bahan Bacaan (JB)	Frekuensi Akses Internet (FAI)	Durasi Akses Internet (DAI)
NTB	65,67	70,12	59,80	65,76	73,66	65,62
Nasional	72,44	77,76	65,36	73,71	79,47	68,41

Sumber : Perpustakaan Nasional, 2025

Capaian Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) NTB tahun 2024 apabila dikonversi ke dalam skala 0-100, maka nilai TGM NTB sebesar 65,67 masuk kedalam kategori sedang dan urutan ke-18 dengan IPLM tertinggi Nasional. Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan adanya kemajuan positif dengan adanya kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2023 yang tertinggi pada Frekuensi Akses Internet (FAI) walaupun masih di bawah nasional yaitu 79,47.

Tabel 2. 23 Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) NTB Tahun 20220 - 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)	NA	59,52	56,42	65,58	65,67
Indonesia	55,74	59,52	63,90	66,77	72,44

Sumber : Perpustakaan Nasional, 2025

Indeks Literasi Digital di Provinsi NTB (NTB) menunjukkan perkembangan yang signifikan meskipun masih ada fluktuasi. Pada tahun 2020, skor literasi digital NTB tercatat 3,42, sejalan dengan temuan nasional yang menunjukkan literasi digital

Indonesia masih berada pada level "sedang". Peningkatan terlihat pada tahun 2021 dengan skor 3,45, berkat program-program literasi digital dari pemerintah yang mulai berdampak. Pada tahun 2022, NTB mengalami kenaikan lagi menjadi 3,48, mencerminkan keberhasilan inisiatif literasi digital yang lebih merata, meskipun tantangan infrastruktur internet masih ada di beberapa daerah. Namun, pada tahun 2023, skor sedikit menurun menjadi 3,44, mungkin disebabkan oleh kendala jaringan yang masih sering dialami masyarakat NTB.

Survei Nasional Literasi Digital 2020 juga mengungkapkan bahwa akses internet dan kemampuan mengenali hoaks menjadi faktor penting dalam literasi digital. Di NTB, penggunaan media sosial seperti WhatsApp dan Facebook sangat tinggi, namun masyarakat masih cenderung kurang berhati-hati dalam menyebarkan informasi, yang menciptakan tantangan dalam peningkatan literasi digital. Sejak Tahun 2021, Indeks Literasi Digital menggunakan empat pilar yang disesuaikan dengan Kerangka Nasional Literasi Digital, yaitu Pilar Digital Skill, Pilar Digital Ethics, Pilar Digital Safety, dan Pilar Digital Culture.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat sedikit penurunan di tahun 2023, literasi digital di NTB menunjukkan tren positif, namun tetap memerlukan perhatian lebih dalam hal peningkatan infrastruktur dan pemahaman digital yang lebih mendalam di kalangan masyarakat, terutama di daerah pedesaan.

Grafik 2. 60 Indeks Literasi Digital Tahun 2020-2023

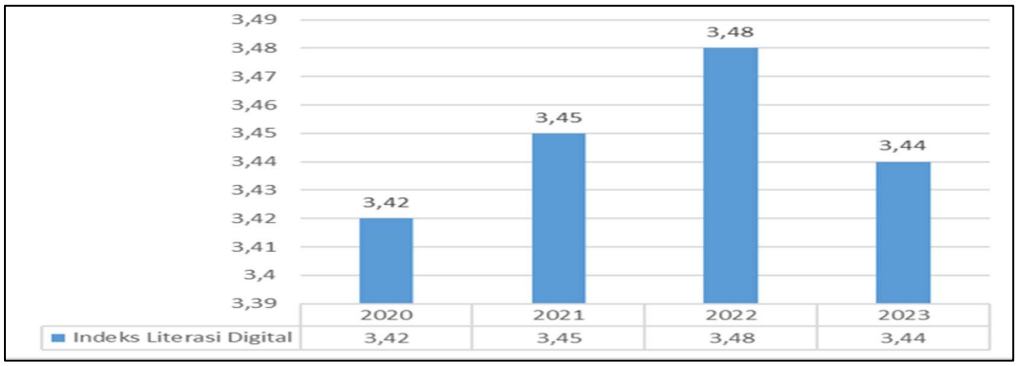

Sumber : Status Literasi Digital Indonesia

Pada tahun 2024, Indeks Literasi Digital diganti menjadi Indeks Masyarakat Digital Indonesia. Pada Tahun 2022 melalui Badan Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kementerian Komdigi memperkenalkan satu indikator baru yg lebih komprehensif yakni Indeks Masyarakat Digital Indinesia (IMDI) yang dirancang untuk dapat memberikan gambaran menyeluruh terkait kondisi masyarakat digital di Indonesia hingga di tingkat Kab/Kota. IMDI sendiri mengadopsi G20 *toolkit for measuring digital skill and digital literacy* yang dirumuskan pada saat Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022, pengukuran IMDI sudah mencakup literasi digital dan aspek-aspek lain seperti infrastruktur digital dan penyerapan teknologi digital di berbagai kota dan kabupaten yang ada di Indonesia. Pengukuran IMDI telah dilaksanakan sejak tahun 2022, dan dilaksanakan setiap tahun.

Grafik 2. 61 Indeks Masyarakat Digital Indonesia Provinsi NTB Tahun 2022-2024

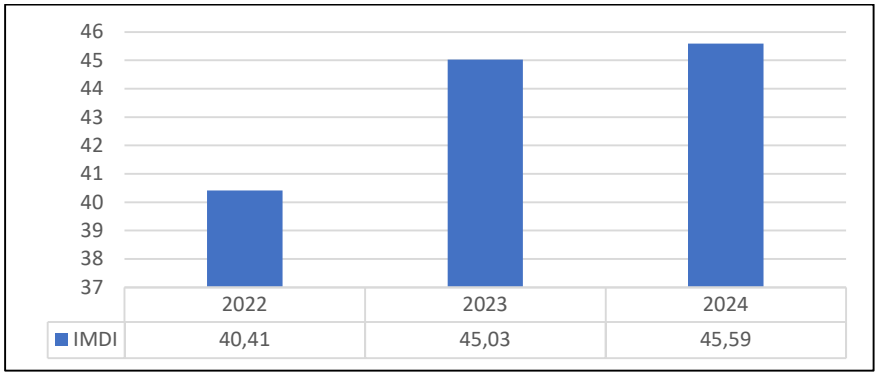

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

2.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Kondisi perlindungan sosial yang adaptif menjadi kunci untuk membangun masyarakat yang lebih tangguh dan inklusif. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Perlindungan Sosial yang Adaptif (PSA) bertujuan untuk menjamin ketersediaan perlindungan sosial akibat dampak kebencanaan dan perubahan iklim. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan indikator terkait lainnya untuk menggambarkan perlindungan sosial yang adaptif yang lebih baik.

Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Provinsi NTB Tahun 2023 menggambarkan jumlah total pekerja formal di Provinsi NTB mencapai 766,637 jiwa dan jumlah pekerja informal mencapai 1,097,813 jiwa. Jumlah Peserta Aktif BPJS Tenaga Kerja untuk pekerja formal hanya mencapai 502,750 jiwa, dan untuk pekerja informal hanya mencapai 200,270 Jiwa. Hal ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan jumlah pekerja formal dan informal yang menjadi peserta aktif BPJS tenaga kerja, sebesar 263,887 jiwa untuk pekerja formal dan 897,543 jiwa untuk pekerja informal. Gambaran cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa adalah sebagai berikut:

Grafik 2. 62 Cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja Pulau Lombok

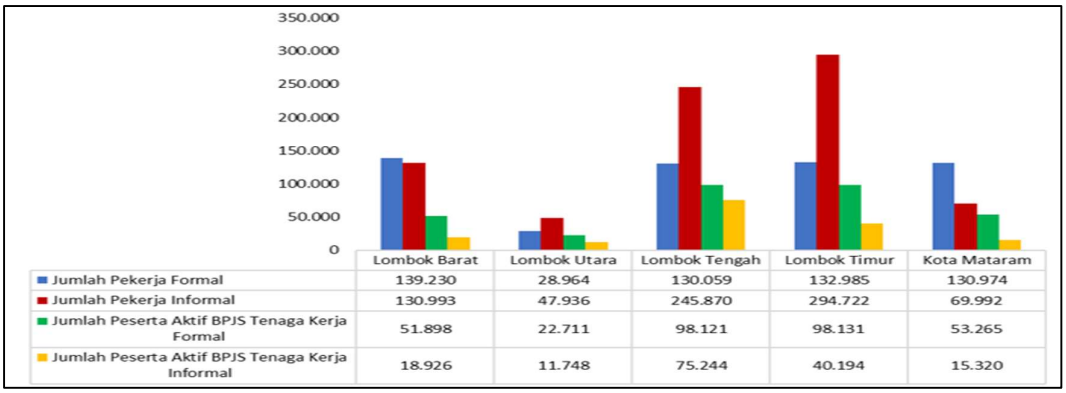

	Lombok Barat	Lombok Utara	Lombok Tengah	Lombok Timur	Kota Mataram
Jumlah Pekerja Formal	139.230	28.964	130.059	132.985	130.974
Jumlah Pekerja Informal	130.993	47.936	245.870	294.722	69.992
Jumlah Peserta Aktif BPJS Tenaga Kerja Formal	51.898	22.711	98.121	98.131	53.265
Jumlah Peserta Aktif BPJS Tenaga Kerja Informal	18.926	11.748	75.244	40.194	15.320

Sumber: BPJS Provinsi NTB, 2024

Grafik 2. 63 Cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja Pulau Sumbawa

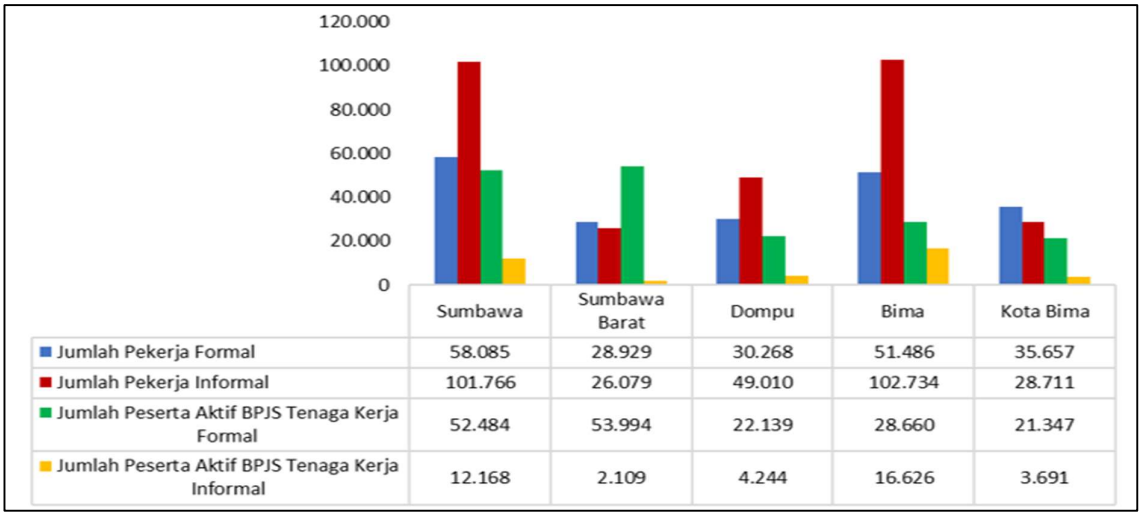

	Sumbawa	Sumbawa Barat	Dompu	Bima	Kota Bima
Jumlah Pekerja Formal	58.085	28.929	30.268	51.486	35.657
Jumlah Pekerja Informal	101.766	26.079	49.010	102.734	28.711
Jumlah Peserta Aktif BPJS Tenaga Kerja Formal	52.484	53.994	22.139	28.660	21.347
Jumlah Peserta Aktif BPJS Tenaga Kerja Informal	12.168	2.109	4.244	16.626	3.691

Sumber: BPJS Provinsi NTB, 2024

Provinsi NTB menunjukkan komitmen yang kuat dalam memperluas cakupan kepesertaan JKN. Melalui kerja sama antara pemerintah provinsi, Kab/Kota, dan BPJS Kesehatan, cakupan JKN terus meningkat setiap tahunnya. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk penduduk NTB dari tahun 2020 hingga 2024, mengalami peningkatan bertahap dari 79,40% pada 2020 menjadi 99,84% pada 2024. Pada tahun awal, 2020 dan 2021, cakupan masing-masing mencapai 79,40% dan 84,70%, menunjukkan upaya awal untuk memperluas akses kesehatan. Namun, tahun 2022 mengalami sedikit penurunan menjadi 82,90%. Pada 2024, cakupan meningkat menjadi 99,84%, menandakan bahwa hampir seluruh penduduk NTB telah tercakup dalam JKN, dengan peningkatan 0,1% dari tahun sebelumnya. Lonjakan besar antara 2022 dan 2023 menunjukkan keberhasilan strategi kesehatan. Meski demikian, tantangan kecil seperti keberlanjutan pendanaan atau akses di wilayah terpencil mungkin masih perlu diperhatikan untuk menjaga stabilitas program ini ke depannya.

Grafik 2. 64 Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk NTB Tahun 2020-2024

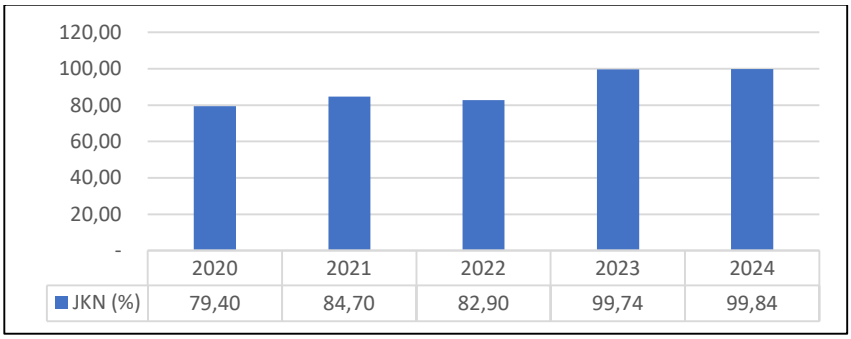

	2020	2021	2022	2023	2024
JKN (%)	79,40	84,70	82,90	99,74	99,84

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2024

2.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Kondisi daerah yang memiliki keberagaman dalam kepercayaan dengan beragama maslahat dan berkebudayaan maju menjadi modal sosial dalam pembangunan daerah. Penguatan peran agama menjadi krusial sebagai landasan spiritual, etika, moral, dan modal dasar pembangunan. Sejalan dengan peran agama, peran kebudayaan adalah memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa melalui pemajuan dan pelestarian kebudayaan daerah. Indeks Kerukunan Umat Beragama, Indeks Pembangunan Kebudayaan, dan indikator terkait lainnya memberikan gambaran kondisi eksitinng beragama maslahat dan berkebudayaan maju.

Indeks Kerukunan Umat Beragama merupakan suatu keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar. Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) di Provinsi NTB (NTB) mengalami peningkatan dalam empat tahun terakhir dan masuk dalam katagori TINGGI, walaupun masih berada di bawah angka nasional. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam mempertahankan dan meningkatkan kerukunan umat beragama di NTB. Upaya seperti deklarasi kerukunan dan peningkatan toleransi terus digalakkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

Grafik 2. 65 Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Provinsi NTB Tahun 2021-2023

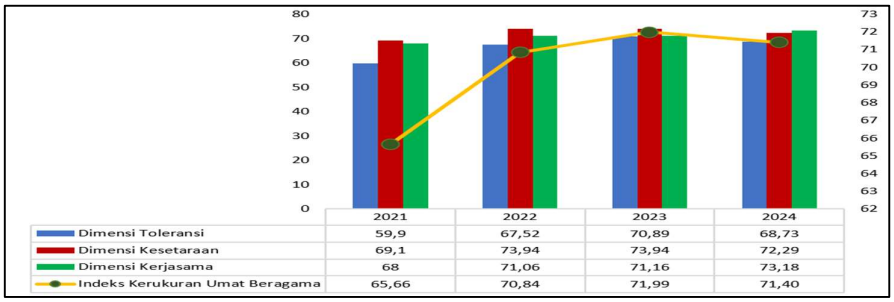

	2021	2022	2023	2024
Dimensi Toleransi	59,9	67,52	70,89	68,73
Dimensi Kesetaraan	69,1	73,94	73,94	72,29
Dimensi Kerjasama	68	71,06	71,16	73,18
Indeks Kerukuran Umat Beragama	65,66	70,84	71,99	71,40

Sumber: Website Litbang dan Diklat Kemenag RI,2024

Secara keseluruhan, kebudayaan adalah aspek fundamental dari kehidupan manusia yang mempengaruhi identitas, perilaku, dan cara pandang masyarakat. Memahami dan menghargai keragaman budaya adalah kunci untuk menciptakan harmoni sosial dan kemajuan bersama. Sehingga kebudayaan menjadi investasi dalam pembangunan masa depan dan peradaban bangsa, yang diharapkan dapat memperkukuh jati diri dan karakter bangsa, mempererat persatuan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kinerja pembangunan kebudayaan di berbagai wilayah Indonesia. IPK mencakup beberapa dimensi, termasuk ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, warisan budaya, dan gender.

Grafik 2. 66 Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi NTB Tahun 2019 – 2023

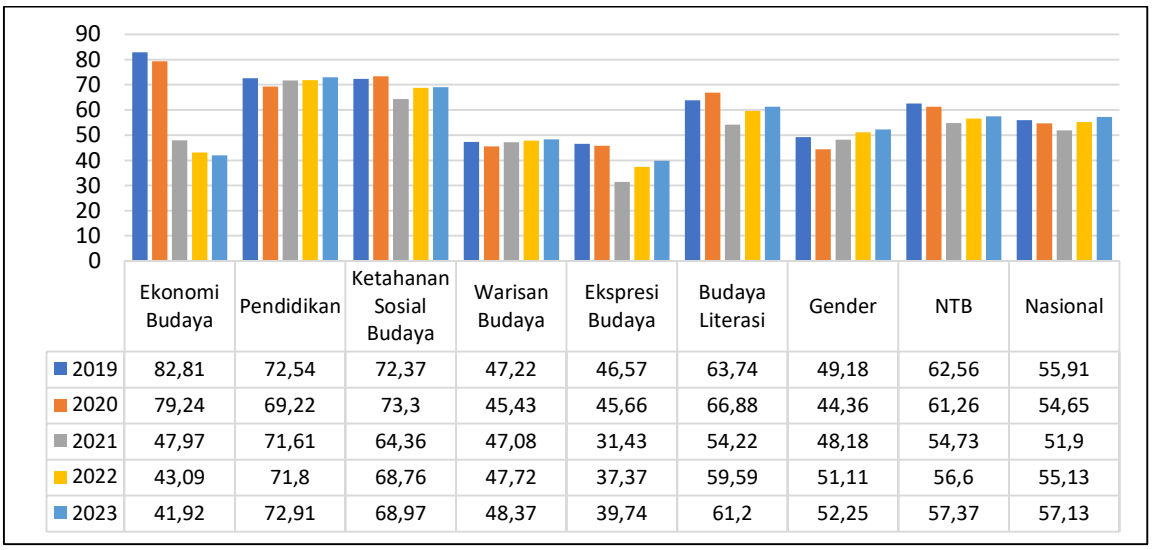

	Ekonomi Budaya	Pendidikan	Ketahanan Sosial Budaya	Warisan Budaya	Ekspresi Budaya	Budaya Literasi	Gender	NTB	Nasional
2019	82,81	72,54	72,37	47,22	46,57	63,74	49,18	62,56	55,91
2020	79,24	69,22	73,3	45,43	45,66	66,88	44,36	61,26	54,65
2021	47,97	71,61	64,36	47,08	31,43	54,22	48,18	54,73	51,9
2022	43,09	71,8	68,76	47,72	37,37	59,59	51,11	56,6	55,13
2023	41,92	72,91	68,97	48,37	39,74	61,2	52,25	57,37	57,13

Sumber: https://ipk.kemendikbud.go.id, 2025 (diolah, data Tahun 2024 belum tersedia)

Secara umum capaian IPK di Tingkat nasional maupun di NTB mengalami fluktuasi, dengan penurunan signifikan pada tahun 2021 sebelum kembali meningkat pada tahun berikutnya. Di NTB, IPK mencapai 62,56 pada tahun 2019, menurun menjadi 61,26 pada 2020, dan turun tajam ke 54,73 pada 2021 terjadi pada dimensi Ekpresi Budaya. Namun, sejak 2022, indeks menunjukkan pemulihan dengan kenaikan menjadi 56,60 dan mencapai 57,37 pada 2023. Tren serupa terjadi secara nasional, di mana IPK turun dari 55,91 pada 2019 menjadi 51,90 pada 2021, kemudian meningkat kembali hingga mencapai 57,13 pada 2023. Penurunan IPK pada 2021 kemungkinan disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang membatasi Ekspresi Budaya (aktivitas budaya), sementara tren pemulihan pada 2022 dan 2023 mencerminkan upaya penguatan kembali sektor kebudayaan. NTB secara konsisten memiliki IPK lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan di wilayah ini berkembang lebih baik. Hal ini mengindikasikan efektivitas kebijakan dan program kebudayaan di NTB dalam mendukung pemulihan dan pertumbuhan sektor budaya pascapandemi terutama pada dimensi pendidikan, ketahanan sosial budaya dan budaya literasi.

Dari ketujuh dimensi pembentuk IPK, dimensi yang membutuhkan perhatian lebih adalah dimensi ekonomi sosial. Hal ini terkait kontribusi industri budaya (seni, musik, film, kriya, kuliner tradisional, dll.) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah dan nilai tambah dari sektor ekonomi kreatif berbasis budaya yang capaiannya masih dibawah 50 persen.

Pemerintah Provinsi NTB terus berupaya meningkatkan IPK melalui berbagai program dan kebijakan yang mendukung pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal. Langkah-langkah strategis meliputi peningkatan akses pendidikan budaya, pemberdayaan komunitas seni, pelestarian warisan budaya, dan penguatan peran perempuan dalam sektor kebudayaan.

2.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif

Pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas merupakan landasan dalam membangun motor penggerak pembangunan daerah. Gambaran kondisi tentang kondisi peningkatan ketangguhan individu, keluarga, dan masyarakat. Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif dapat dilihat pada indikator Indeks Perlindungan Anak, Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga, Indeks Ketimpangan Gender, Indeks Pembangunan Pemuda, dan indikator terkait lainnya.

Indeks Perlindungan Anak (IPA) digunakan untuk mengukur capaian pembangunan dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Selama lima tahun terakhir Indeks Perlindungan Anak (IPA) NTB menunjukkan angka yang fluktuatif. Tahun 2023 NTB masuk dalam 10 Provinsi dengan capaian IPA terendah. Kab/kota dengan capaian IPA tertinggi adalah Kota Mataram, Kota Bima, dan Kab. Sumbawa Barat sedangkan capaian terendah pada Kab. Dompu, Kab. Lombok Tengah dan Kab. Lombok Utara. Dari kelima komponen pembentuk IPA, yang harus menjadi perhatian adalah komponen Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya karena capaiannya masih dibawah 50%. Komponen ini mencerminkan sejauh mana anak-anak mendapatkan akses terhadap pendidikan berkualitas, dapat memanfaatkan waktu luang dengan baik, serta terlibat dalam kegiatan budaya yang positif.

Grafik 2. 67 Indeks Perlindungan Anak (IPA) Provinsi NTB Tahun 2019-2023

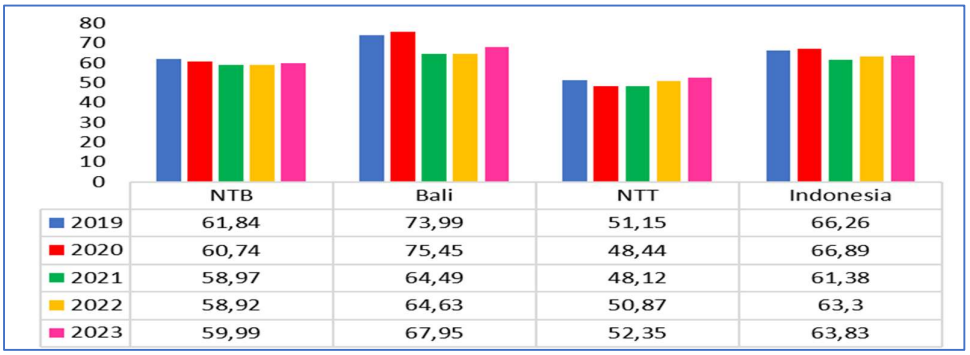

	NTB	Bali	NTT	Indonesia
2019	61,84	73,99	51,15	66,26
2020	60,74	75,45	48,44	66,89
2021	58,97	64,49	48,12	61,38
2022	58,92	64,63	50,87	63,3
2023	59,99	67,95	52,35	63,83

Sumber: Website KemenPPPA (Buku Indeks Perlindungan Anak), 2025 (Data Tahun 2024 Belum Tersedia)

Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) digunakan untuk mengukur capaian pembangunan dalam upaya pemenuhan hak anak. Selama lima tahun terakhir nilai IPHA NTB menunjukkan angka yang fluktuatif. Tahun 2023 NTB berada pada urutan sebelas provinsi dengan IPHA terendah. Indikator pembentuk IPHA sama dengan indicator pembentuk IPA perbedaannya hanya pada saat melakukan pembobotan dalam penghitungannya, sehingga dapat diasumsikan bahwa analisis klaster untuk IPHA dapat tergambarkan dalam analisis klaster IPA. Kab/Kota dengan capaian IPHA tertinggi adalah Kota Mataram, Kota Bima, dan Kabupaten Sumbawa Barat sedangkan capaian terendah pada Kabupaten Dompu, Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Utara.

Grafik 2. 68 Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Provinsi NTB Tahun 2019-2023

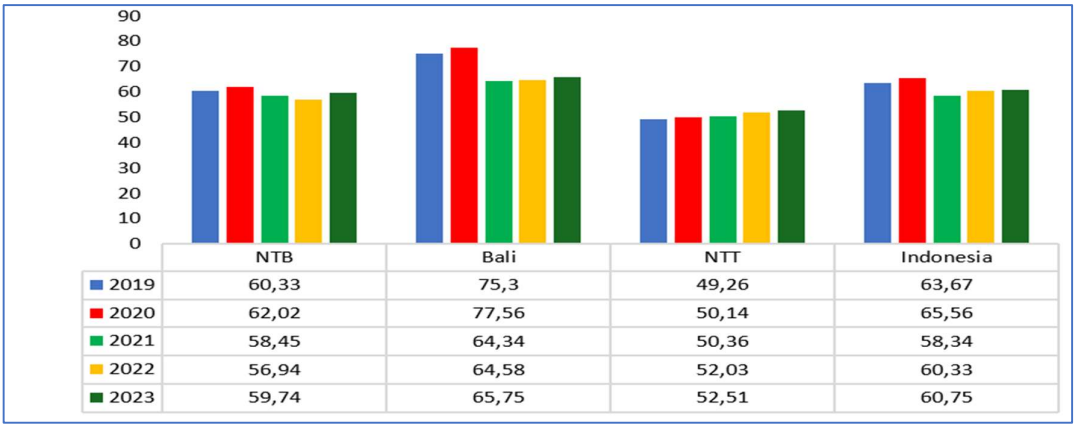

	NTB	Bali	NTT	Indonesia
2019	60,33	75,3	49,26	63,67
2020	62,02	77,56	50,14	65,56
2021	58,45	64,34	50,36	58,34
2022	56,94	64,58	52,03	60,33
2023	59,74	65,75	52,51	60,75

Sumber: Website KemenPPPA (Buku Indeks Perlindungan Anak),2025 (Data Tahun 2024 Belum Tersedia)

Indeks Kualitas Keluarga (IKK) NTB menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 hingga 2022. Pada tahun 2023, IKK NTB turun 2,02% dari tahun 2022. Indikator Kualitas Keluarga yang perlu menjadi perhatian adalah komponen kualitas ketahanan fisik, hal ini terkait kondisi kesehatan keluarga, pemenuhan kebutuhan dasar (makanan yang bergizi) dan akses terhadap pelayanan kesehatan. Kemudian komponen kualitas ketahanan social budaya, terkait dengan praktek perkawinan anak dalam keluarga dan penerapan budaya baik dalam keluarga.

Grafik 2. 69 Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi NTB Tahun 2020-2023

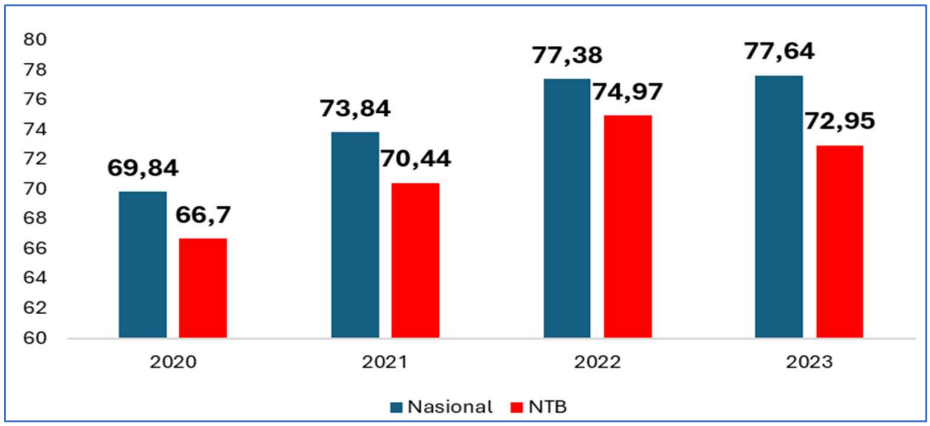

Sumber: Website KemenPPPA (Buku Indeks Kualitas Keluarga),2025, (Data Tahun 2024 Belum Tersedia)

Gambaran Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan Provinsi NTB Tahun 2017-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 24 Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan Provinsi NTB Tahun 2017-2024

No	Kab/Kota	Tahun							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Lombok Barat	20,1	19,8	19,89	20,54	20,14	20,05	19,92	19,90
2	Lombok Tengah	19,67	19,39	19,18	19,32	19,61	19,38	19,08	19,27
3	Lombok Timur	19,48	19,49	19,66	19,7	19,49	19,52	19,5	19,66
4	Sumbawa	21,16	21,54	21,38	21,5	21,49	21,63	21,92	21,94
5	Dompu	20,72	21,13	21,34	21	21,3	21,55	21,33	21,44
6	Bima	20,97	21,5	21,11	21,24	21,57	21,36	21,63	21,38
7	Sumbawa Barat	21,97	21,28	21,76	21,44	22,36	22,25	22,46	22,29
8	Lombok Utara	20,08	20,26	28,2	20,22	19,97	19,81	19,59	19,74
9	Mataram	20,97	21,09	21,17	21,15	21,25	21,27	20,72	21,11
10	Kota Bima	21,07	21,41	21,87	22,03	22,51	22,64	22,49	22,10
	NTB	20,32	20,15	20,27	20,35	20,39	20,37	20,25	20,35

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2025

Menghadapi bonus demografi yang diperkirakan terjadi antara tahun 2030 hingga 2040, dimana penduduk Provinsi NTB didominasi oleh usia produktif (15-64 tahun), memberikan tantangan sekaligus peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemuda memiliki peran yang sangat strategis dalam mencapai visi dan misi pembangunan daerah lima tahun kedepan. Pembangunan kaulitas pemuda memiliki arti penting bagi keberlangsungan bangsa karena pemuda merupakan penerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa dan menjadi salah satu penentu optimalisasi bonus demografi. Salah satu indikator untuk mengukur kualitas pemuda adalah Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).

Untuk terus meningkatkan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), Pemerintah NTB telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2024-2026. Peraturan ini berfungsi sebagai landasan dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan kepemudaan bagi pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, serta pemangku kepentingan lainnya. Selama lima tahun terkahir IPP NTB menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2023, NTB berhasil meraih peringkat ke-4 secara nasional pada domain partisipasi dan kepemimpinan pemuda. Ini menunjukkan komitmen dan upaya nyata dalam memajukan kepemudaan, khususnya dalam meningkatkan partisipasi dan kepemimpinan pemuda di daerah.

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah sebuah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan melalui lima domain utama: pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Dari kelima domain tersebut yang perlu mendapatkan perhatian lebih yaitu pada domain Kesehatan dan kesejahteraan terkait angka kesakitan pemuda dan persentese pemuda yang menjadi korban kejahatan. Pada domain lapangan dan kesempatan kerja yaitu tingkat pengangguran pemuda, dan pada domain gender dan diskriminasi yaitu angka perkawinan usia anak

Pembangunan pemuda di Pemerintah Provinsi NTB masih berada di bawah nasional. Tahun 2023, IPP NTB 53,57 sementara nasional 56,33. Kondisi pemuda di NTB tahun 2023 dilihat dari tingkat pendidikan, sebesar 39,87 persen pemuda lulusan SMP dan 40,82 persen pemuda lulusan SMA. Untuk angka kesakitan pemuda sebesar 11,22 persen sementara nasional hanya 6,80 persen. Dari sisi ketenagakerjaan, persentase pemuda bekerja di sektor formal NTB tahun 2023 senesar 38,32 persen sementara nasional sudah mencapai 57,20 persen.

Grafik 2. 70 Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi NTB Tahun 2020-2023

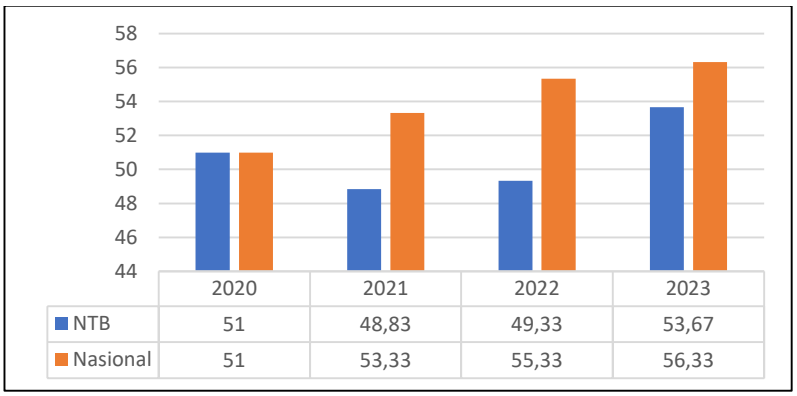

Sumber: Kemenpora (https://ipp.sarikata.com) 2025 (diolah), (Data Tahun 2024 Belum Tersedia)

Selama kurun waktu lima tahun, pembangunan gender di NTB belum menunjukkan kemajuan, ini tercermin dari tingginya angka IKG yang diakibatkan oleh tinggi proporsi perempuan yang melahirkan hidup pertama berusia < 20 tahun dan rendahnya keterwakilan perempuan di legislatif. Pada tahun 2023, ketimpangan gender paling rendah dicapai oleh Kabupaten Sumbawa dengan capaian IKG 0,350, sedangkan ketimpangan gender yang paling besar terdapat di Kabupaten Lombok Tengah dengan capaian IKG 0,603.

Ketimpangan gender yang masih tinggi merupakan salah satu penghambat dalam pembangunan inklusif. Untuk mencegah hal ini pemerintah dapat melakukan penguatan tata kelola penyelenggaraan PUG dan inklusi sosial dalam proses pembangunan secara komprehensif, penguatan kebijakan afirmasi untuk mengakselerasi kesetaraan gender dan mengurangi kesenjangan kelompok rentan melalui peningkatan kepemimpinan perempuan, pemberdayaan perempuan di ekonomi, dan penjaminan akses layanan dasar yang inklusif, dan penguatan lingkungan strategis untuk pelaksanaan PUG dan inklusi sosial yang efektif dan berkelanjutan, termasuk pengelolaan pengetahuan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, pengembangan mekanise insentif, dan pelibatan *vibrant community*.

Grafik 2. 71 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi NTB Tahun 2020-2024

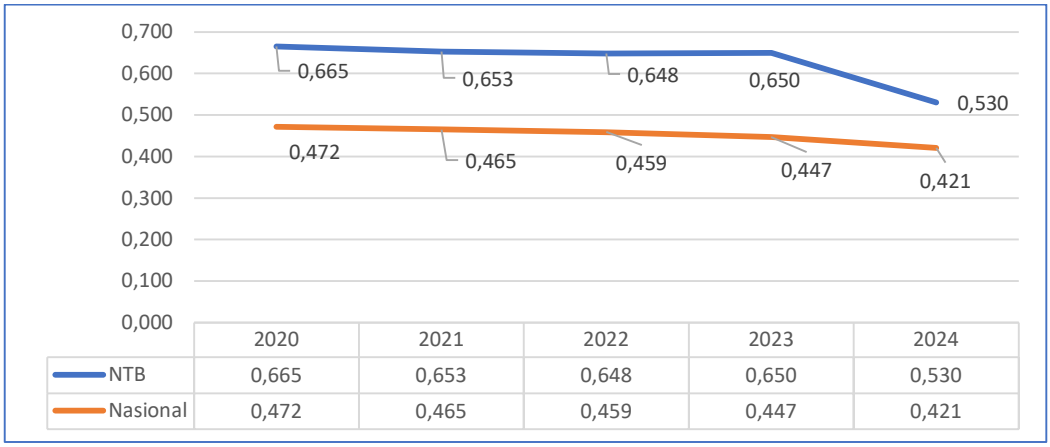

	2020	2021	2022	2023	2024
NTB	0,665	0,653	0,648	0,650	0,530
Nasional	0,472	0,465	0,459	0,447	0,421

Sumber: BPS NTB, 2024 (diolah)

Selama lima tahun terakhir IPG NTB mengalami peningkatan akan tetapi angka ini masih berada di bawah nasional ini mencerminkan masih adanya ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Hal utama yang menjadi penyebabnya adalah rendahnya tingkat Pendidikan perempuan yang berdampak pada kesempatan kerja dan partisipasi perempuan dalam sektor formal. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2023 58,03 persen penduduk perempuan bekerja akan tetapi 75,88 persen bekerja di sector informal dengan rata-rata upah perbulan sebesar 1,84 juta. Selain itu tingginya proporsi perempuan berusia 15–49 tahun yang melahirkan anak pertama sebelum usia 20 tahun yang menunjukkan masih tingginya angka pernikahan usia dini juga berkontribusi pada rendahnya IPG di NTB.

Grafik 2. 72 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi NTB Tahun 2020-2024

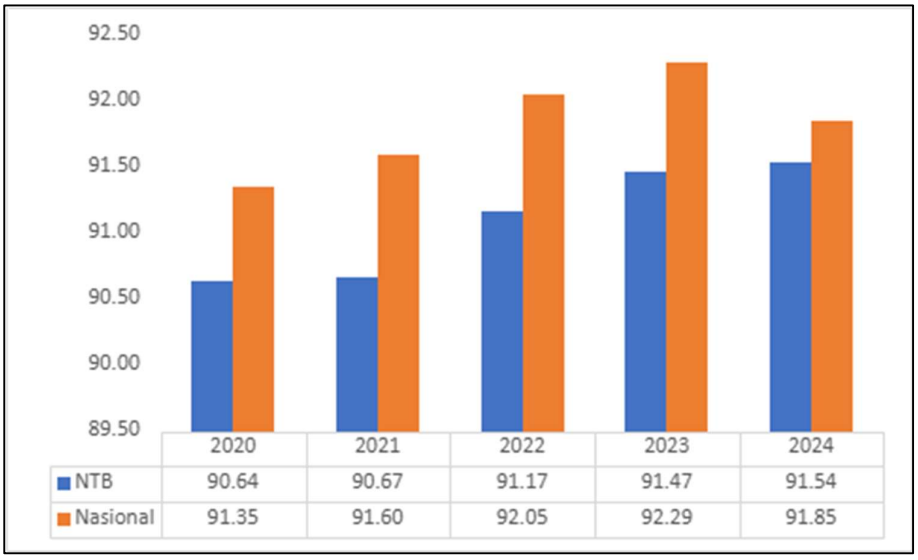

	2020	2021	2022	2023	2024
NTB	90.64	90.67	91.17	91.47	91.54
Nasional	91.35	91.60	92.05	92.29	91.85

Sumber: BPS NTB, 2024 (diolah)

2.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Daya saing sumber daya manusia Provinsi NTB menjadi motor penggerak produktivitas perekonomian daerah di Provinsi NTB. Berdasarkan kelompok umur selama kurun waktu 2019-2024, Provinsi NTB di dominasi oleh penduduk usia produktif (15-64) tahun dengan tingkat ketergantungan (dependency ratio) sebesar 48,85 persen yang artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 48 orang penduduk usia non produktif. Angka ini berada di atas angka nasional yaitu 44,82 persen, dan Kab/Kota dengan angka ketergantungan tertinggi tahun 2024 adalah Kab.Sumbawa Barat, Kab. Lombok Timur dan Kota Bima. Provinsi NTB telah memasuki masa bonus demografi. Fenomena ini sangat menguntungkan dari sisi pembangunan karena merupakan dampak dari pertumbuhan ekonomi, namun bonus demografi juga dapat memberikan dampak negatif apabila kualitas SDM penduduk usia produktifnya rendah dan kurangnya lapangan pekerja akan mengakibatkan terjadi pengangguran. Gambaran kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai dapat dilihat pada nilai Angka Ketergantungan sebagai berikut:

Grafik 2. 73 Tingkat Ketergantungan Berdasarkan Kelompok Umur di Provinsi NTB Tahun 2019-2024

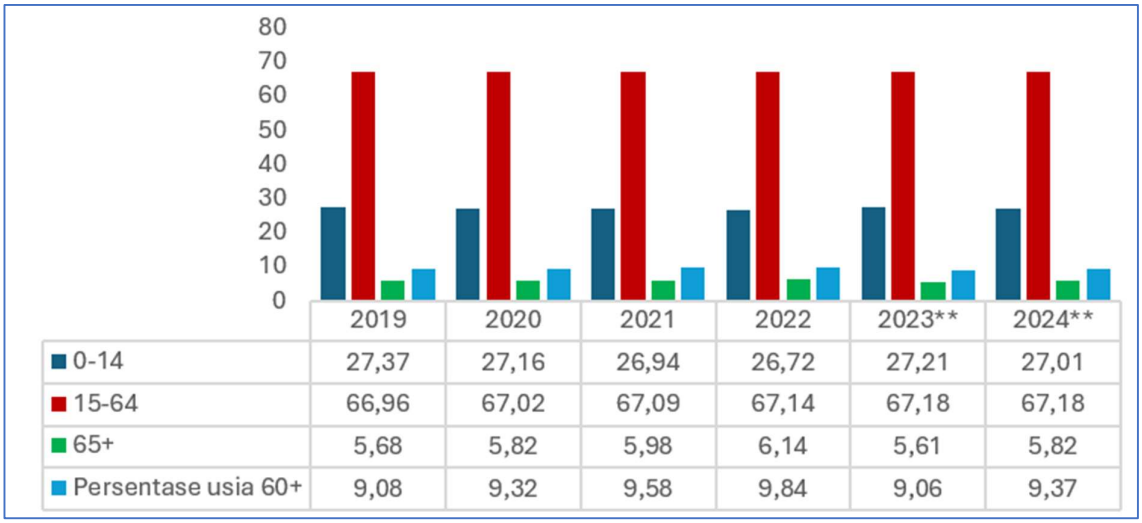

	2019	2020	2021	2022	2023**	2024**
0-14	27,37	27,16	26,94	26,72	27,21	27,01
15-64	66,96	67,02	67,09	67,14	67,18	67,18
65+	5,68	5,82	5,98	6,14	5,61	5,82
Persentase usia 60+	9,08	9,32	9,58	9,84	9,06	9,37

Sumber: BPS Provinsi NTB,2025

Rasio ketergantungan adalah angka yang menunjukkan besaran beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Semakin tinggi angka ketergantungan maka akan semakin tinggi beban penduduk produktif untuk membiayai/menanggung penduduk yang belum dan tidak produktif. Angka ketergantungan yang tinggi akan memberikan dampak yang kurang baik terhadap perkembangan perekonomian suatu daerah.

Selama enam tahun terakhir Dependency Ratio NTB menunjukkan trend menurun. Hal ini menunjukkan bahwa beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) semakin mengecil. Berdasarkan struktur penduduk NTB tahun 2024, NTB

saat ini sedang masuk dalam masa Bonus Demografi dimana penduduk produktif lebih banyak daripada penduduk usia nonproduktif. Ini merupakan peluang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sehingga perlu disiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dari segi Pendidikan dan Kesehatan, karena semakin berkualitas SDM akan semakin produktif serta diikuti dengan Dependency yang rendah maka petumbuhan ekonomi akan meningka dengan cepat.

Grafik 2. 74 Tingkat Ketergantungan (Dependency Ratio) NTB Tahun 2017-2024

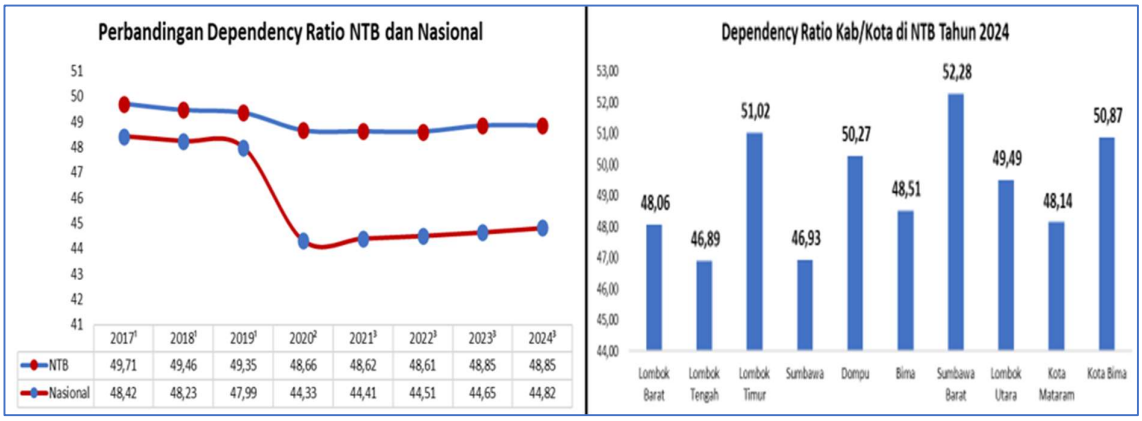

Sumber: BPS Provinsi NTB,2025

Bonus Demografi ini memiliki kurun waktu tertentu, setelah masanya selesai maka suatu daerah akan memasuki masa aging population, yaitu jumlah penduduk lanjut usia (nonproduktif) lebih banyak daripada jumlah penduduk produktif. Apabila tidak dipersiapkan dengan baik akan meningkatkan angka ketergantungan yang akan berpengaruh pada perekonomian suatu daerah. Oleh karena itu diperlukan perencanaan pembangunan yang mengarah pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini agar pada saat memasuki usia produktif, penduduk tersebut benar-benar produktif, mandiri, sehat dan cerdas, dan pada saat penduduk tersebut telah mencapai lanjut usia, dapat menjadi lansia yang sehat dan produktif, serta tidak menjadi beban pembangunan.

2.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Gambaran kondisi iptek dan inovasi di Provinsi NTB yang menjadi pendorong untuk menjaga, mempercepat keberlanjutan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi dalam jangka panjang dapat dilihat dari indikator Rasio PDRB Industri Pengolahan, Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum, Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif, Rasio Kewirausahaan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Indeks Inovasi Daerah, dan indikator terkait lainnya.

Tabel 2. 25 Rasio PDRB Industri Pengolahan (ADHB) Tahun 2020-2024

No	Tahun	Nilai Tambah Industri Pengolahan (Miliar Rupiah)	PDRB Provinsi (Miliar Rupiah)	Rasio PDRB Industri Pengolahan(%)
1	2020	5.393,74	133.613,74	4,04
2	2021	5.603,56	140.115,27	4,00
3	2022	5.906,72	156.942,67	3,76
4	2023*	6.430,81	166.395,45	3,86
5	2024**	7.056,02	182.265,19	3,87

Sumber: BPS, 2025

Kinerja sektor industri pengolahan di Provinsi NTB (NTB) selama periode 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan nilai tambah secara konsisten. Nilai tambah industri pengolahan naik dari Rp5.393,74 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp7.056,02 miliar pada tahun 2024, atau tumbuh rata-rata sekitar 6,9 persen per tahun. Pertumbuhan ini mencerminkan adanya penguatan kapasitas produksi dan peningkatan aktivitas industri di berbagai subsektor, sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam mendorong hilirisasi hasil pertanian, perikanan, dan sumber daya lokal lainnya.

Di sisi lain, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi NTB juga mengalami kenaikan signifikan dari Rp133.613,74 miliar pada 2020 menjadi Rp182.265,19 miliar pada 2024. Namun, laju pertumbuhan PDRB provinsi yang lebih cepat dibandingkan industri pengolahan menyebabkan rasio kontribusi industri pengolahan terhadap total PDRB cenderung stagnan bahkan menurun, yaitu dari 4,04 persen pada 2020 menjadi 3,87 persen pada 2024. Meskipun sempat turun ke titik terendah 3,76 persen pada 2022, kontribusi ini kembali sedikit menguat pada 2023–2024, menandakan adanya perbaikan kinerja subsektor industri pengolahan.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa pertumbuhan industri pengolahan di NTB belum sebanding dengan percepatan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang dalam perencanaan pembangunan ke depan, khususnya dalam RPJMD 2025–2029. Penguatan kebijakan hilirisasi, peningkatan investasi, pengembangan kawasan industri, serta dukungan infrastruktur dan teknologi diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah dan kontribusi sektor industri pengolahan, sehingga perannya sebagai penggerak ekonomi daerah semakin signifikan dan berkelanjutan.

Tabel 2. 26 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum (ADHB) Tahun 2020-2024

No	Tahun	Nilai Tambah Akomodasi Mamin (Miliar Rupiah)	PDRB Provinsi (Miliar Rupiah)	Rasio PDRB Industri Pengolahan(%)
1	2020	1.924,64	133.613,74	1,44

2	2021	1.973,00	140.115,27	1,41
3	2022	2.577,15	156.942,67	1,64
4	2023*	2.881,82	166.395,45	1,73
5	2024**	3.196,23	182.265,19	1,75

Sumber: BPS, 2025

Sektor akomodasi serta makanan–minuman di Provinsi NTB menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dan signifikan selama periode 2020–2024. Nilai tambah sektor ini meningkat dari Rp1.924,64 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp3.196,23 miliar pada tahun 2024, dengan laju pertumbuhan rata-rata sekitar 13–14 persen per tahun. Pertumbuhan tersebut melampaui kenaikan PDRB Provinsi yang naik dari Rp133.613,74 miliar menjadi Rp182.265,19 miliar pada periode yang sama. Rasio kontribusi sektor akomodasi dan makanan–minuman terhadap PDRB juga mengalami tren peningkatan, dari 1,44 persen pada tahun 2020 menjadi 1,75 persen pada tahun 2024, dengan lonjakan tertinggi pada tahun 2022 sebesar 1,64 persen yang mencerminkan pemulihan ekonomi dan kebangkitan pariwisata pascapandemi COVID-19.

Secara kualitatif, peningkatan kinerja sektor ini didorong oleh beberapa faktor strategis. Pemulihan pariwisata setelah pandemi, termasuk penyelenggaraan event internasional seperti MotoGP Mandalika dan berbagai festival budaya, mendorong permintaan layanan akomodasi dan konsumsi makanan–minuman. Pertumbuhan mobilitas masyarakat, meningkatnya daya beli, serta maraknya usaha kuliner lokal dan ekonomi kreatif turut memperkuat laju pertumbuhan. Di sisi lain, penguatan infrastruktur pariwisata dan transportasi, serta kebijakan pemerintah daerah yang mendukung promosi wisata dan pengembangan destinasi, memberikan dampak positif terhadap peningkatan nilai tambah sektor ini. Peran aktif usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mengembangkan produk kuliner berbasis kearifan lokal juga menjadi pendorong penting dalam meningkatkan daya saing dan kontribusi ekonomi.

Berdasarkan perkembangan tersebut, sektor akomodasi dan makanan–minuman telah menjadi salah satu pilar diversifikasi ekonomi yang berpotensi besar dalam mendukung penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan perputaran ekonomi daerah. Ke depan, melalui RPJMD Provinsi NTB 2025–2029, diperlukan penguatan strategi pengembangan pariwisata terpadu, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perhotelan dan kuliner, promosi investasi perhotelan dan restoran, serta sinergi dengan industri kreatif untuk memperbesar kontribusi sektor ini terhadap PDRB dan memperkuat struktur perekonomian daerah secara berkelanjutan.

Meningkatnya persentase TPAK NTB selama lima tahun terakhir disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi NTB yang terus membaik dengan menurunnya jumlah penduduk yang menganggur dan meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja. Berdasarkan jenis kelamin meningkatnya TPAK NTB juga disebabkan oleh relatif tingginya TPAK perempuan.

Jika kondisi ini tidak dimbangi dengan penyediaan lapangan kerja, implikasinya akan memperburuk persoalan pengangguran terbuka NTB di masa yang datang.

Grafik 2. 75 TPAK Berdasarkan Kab/Kota Provinsi NTB 2019 – 2024

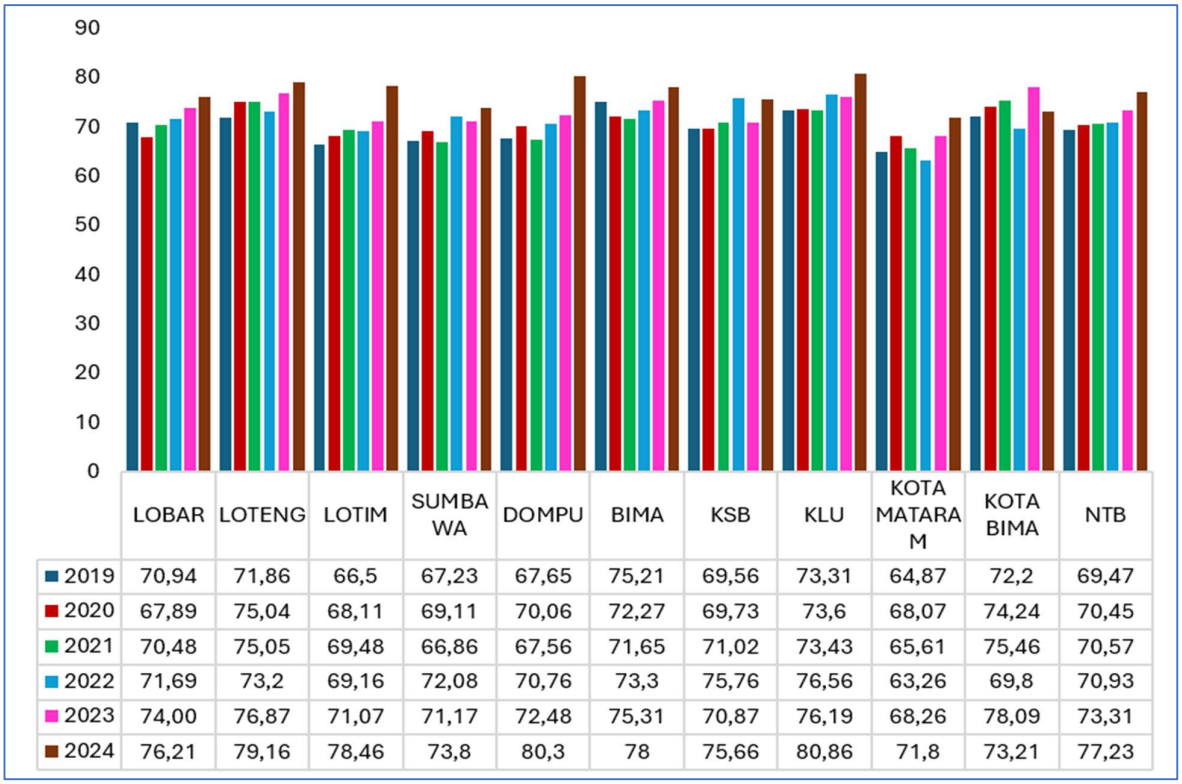

	LOBAR	LOTENG	LOTIM	SUMBAWA	DOMPU	BIMA	KSB	KLU	KOTA MATARAM	KOTA BIMA	NTB
2019	70,94	71,86	66,5	67,23	67,65	75,21	69,56	73,31	64,87	72,2	69,47
2020	67,89	75,04	68,11	69,11	70,06	72,27	69,73	73,6	68,07	74,24	70,45
2021	70,48	75,05	69,48	66,86	67,56	71,65	71,02	73,43	65,61	75,46	70,57
2022	71,69	73,2	69,16	72,08	70,76	73,3	75,76	76,56	63,26	69,8	70,93
2023	74,00	76,87	71,07	71,17	72,48	75,31	70,87	76,19	68,26	78,09	73,31
2024	76,21	79,16	78,46	73,8	80,3	78	75,66	80,86	71,8	73,21	77,23

Sumber: BPS NTB, 2025 (diolah)

Grafik 2. 76 Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin dan Tempat Tinggal Provinsi NTB 2020 – 2024

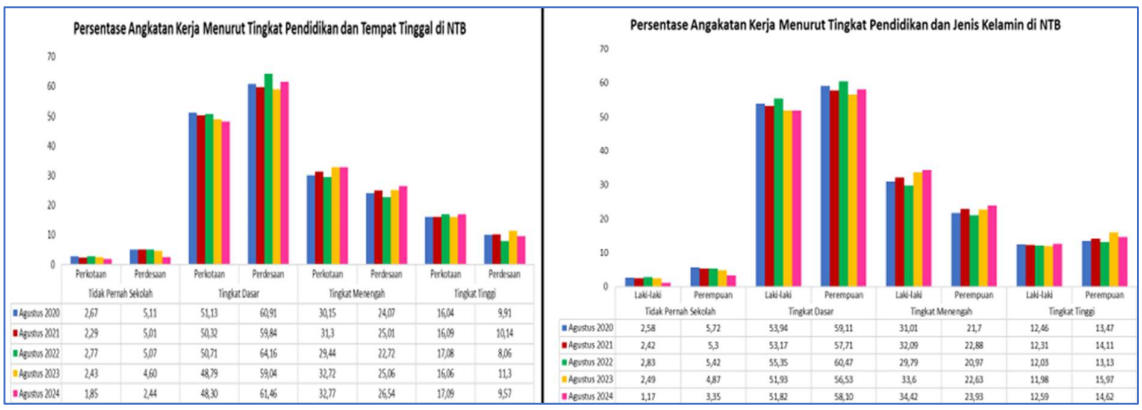

Sumber : BPS NTB, 2025, (Analisis Pasar Tenaga Kerja Provinsi NTB) (data diolah)

Angkatan kerja di NTB selama lima tahun terakhir didominasi oleh mereka yang berpendidikan rendah (tingkat sekolah dasar) baik berdasarkan jenis kelamin maupun berdasarkan tipe daerah. Angkatan kerja yang berpendidikan tinggi berdasarkan jenis kelamin di dominasi oleh angkatan kerja perempuan terutama di daerah perkotaan. Sementara angkatan kerja laki-laki mendominasi pada tingkat Pendidikan menengah terutama di daerah perkotaan.

Setiap tahun, kualifikasi lapangan pekerjaan semakin berkembang dan menuntut tingkat pendidikan tertentu sebagai cara untuk menyeleksi calon tenaga kerja. Dalam hal ini, peningkatan taraf pendidikan untuk tiap individu sangat penting karena dengan pendidikan yang tinggi dapat memperluas kesempatan seseorang untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Maka diperlukan perhatian dari pemerintah untuk meningkatkan program pembangunan pendidikan, agar lebih banyak yang berminat meningkatkan taraf pendidikannya terutama di daerah pedesaan.

Grafik 2. 77 Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Kelompok Umur Provinsi NTB Tahun 2019 – 2024

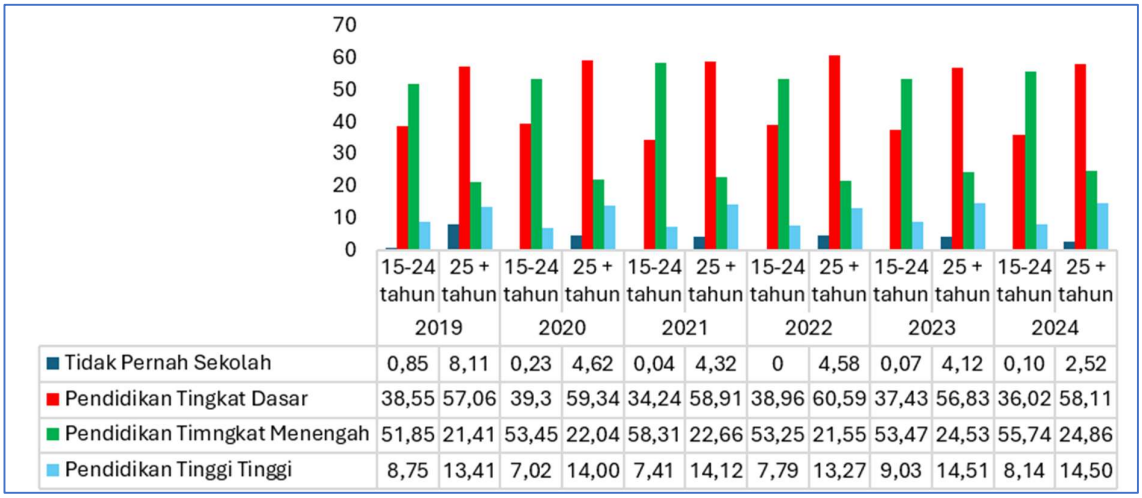

	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	15-24 tahun	25 + tahun	15-24 tahun	25 + tahun	15-24 tahun	25 + tahun	15-24 tahun	25 + tahun	15-24 tahun	25 + tahun	15-24 tahun	25 + tahun
Tidak Pernah Sekolah	0,85	8,11	0,23	4,62	0,04	4,32	0	4,58	0,07	4,12	0,10	2,52
Pendidikan Tingkat Dasar	38,55	57,06	39,3	59,34	34,24	58,91	38,96	60,59	37,43	56,83	36,02	58,11
Pendidikan Timngkat Menengah	51,85	21,41	53,45	22,04	58,31	22,66	53,25	21,55	53,47	24,53	55,74	24,86
Pendidikan Tinggi Tinggi	8,75	13,41	7,02	14,00	7,41	14,12	7,79	13,27	9,03	14,51	8,14	14,50

Sumber : BPS NTB, 2025, (Analisis Pasar Tenaga Kerja Provinsi NTB) (data diolah)

Dari data pendidikan angkatan kerja berdasarkan kelompok umur, diketahui bahwa kelompok penduduk umur muda didominasi oleh angakatan kerja yang berpendidikan tingkat menengah (55,74 persen), sementara kelompok penduduk umur dewasa didominasi oleh angkatan kerja yang berpendidikan tingkat dasar (58,11 persen). Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pendidikan angkatan kerja umur muda lebih tinggi jika dibandingkan rata-rata pendidikan angkatan kerja umur dewasa dan terdapat peningkatan taraf pendidikan penduduk usia kerja di masa kini.

Ekonomi kreatif merupakan sektor strategis dalam pembangunan ekonomi yang berbasis pada ide, kreativitas, budaya, dan inovasi, dengan kontribusi yang terus meningkat terhadap pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah. Di Provinsi NTB (NTB), ekonomi kreatif memiliki peran yang semakin penting sebagai penggerak ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan.

Provinsi NTB memiliki keragaman budaya, kekayaan alam, serta keunikan lokal yang menjadi modal besar dalam pengembangan berbagai subsektor ekonomi kreatif. Berdasarkan pemetaan nasional, terdapat 17 subsektor ekonomi kreatif, dan sejumlah subsektor unggulan telah berkembang pesat di NTB.

Sub sektor ekonomi kreatif Proviinsi NTB baru di hitung sampai tahun 2021 dan memberikan konstribusi dalam pembentukan PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi NTB. Perkembangan tenaga kerja ekonomi kreatif di NTB mengalami dinamika seperti terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 2. 27 Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif Tahun 2013-2021

No	Tahun	Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif (orang)
1	2013	156.490
2	2014	183.563
3	2015	198.101
4	2016	210.120
5	2021	143.163

Sumber: BPS, 2022

Perkembangan Ekonomi kreatif di NTB menurut lapangan usaha tahun 2021 berdasarkan Data BPS NTB, sub sektor Kriya mencapai 22,94%, Kuliner 16,4 % , seni rupa 13,14% dan 14 sub sektor lainnya 47,50%.

Tabel 2. 28 Kondisi Ekonomi Kreatif Provinsi NTB Tahun 2023

No	Kab/Kota	PDRB Penyumbang Ekraf (Milyar Rupiah)	Nilai Tambah Ekraf (Milyar Rupiah)	Share PDRB Ekraf terhadap Provinsi (%)
1	Lombok Barat	6,098.82	902.25	14,33
2	Lombok Tengah	5,743.52	733.99	11,66
3	Lombok Timur	8,625.79	1,162.48	18,46
4	Sumbawa	4,896.43	573.72	9,11
5	Dompu	2,373.41	278.23	4,42
6	Bima	3,567.29	420.98	6,69
7	Sumbawa Barat	1,755.58	203.06	3,22
8	Lombok Utara	1,719.36	216.42	3,44
9	Kota Mataram	12,121.70	1,531.18	24,32
10	Kota Bima	2,302.93	274.84	4,36
11	Provinsi NTB	48,866.37	6,247.83	12,79

Sumber: BPS NTB, 2025, (Data Tahun 2024 Belum Tersedia)

Indeks Inovasi Daerah adalah ukuran yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah melaksanakan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan. Indeks ini menjadi indikator penting dalam mencerminkan kapasitas daerah dalam menciptakan solusi kreatif, efisien, dan berkelanjutan guna menjawab tantangan pembangunan.

Provinsi NTB dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penguatan ekosistem inovasi daerah. Upaya ini tercermin dari peningkatan skor Indeks Inovasi Daerah serta berbagai program yang mendorong lahirnya inovasi dari tingkat provinsi hingga desa.

Indeks Inovasi Daerah (IID) Provinsi NTB menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, skor IID tercatat sangat rendah, yaitu hanya 3,00 poin, menandakan keterbatasan dalam dokumentasi maupun pelaksanaan inovasi di daerah.

Namun pada tahun 2021 terjadi lonjakan drastis menjadi 75,67, menempatkan NTB dalam kategori sangat inovatif menurut klasifikasi Kementerian Dalam Negeri. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan tata kelola inovasi, peningkatan pelaporan, dan penguatan program-program inovatif di berbagai sektor pemerintahan.

Pada tahun 2022, IID mengalami penurunan menjadi 68,51, namun tetap berada dalam kategori daerah inovatif. Tahun 2023 kembali mencatatkan peningkatan menjadi 75,37, mendekati capaian terbaik pada tahun 2021, menunjukkan bahwa upaya pemulihan dan konsistensi implementasi inovasi berjalan dengan baik.

Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan signifikan ke angka 63,40, menandakan adanya tantangan dalam menjaga kesinambungan inovasi, baik dari aspek kelembagaan, koordinasi antar perangkat daerah, maupun dokumentasi dan pelaporan inovasi yang dilakukan.

Tren ini menunjukkan bahwa meskipun NTB memiliki kapasitas dan potensi inovatif yang tinggi, stabilitas dan keberlanjutan inovasi perlu diperkuat. Hal ini mencakup penguatan sistem manajemen inovasi, insentif bagi inovasi pelayanan publik, serta pembinaan berkelanjutan terhadap perangkat daerah dalam mendokumentasikan dan mengembangkan inovasi.

Grafik 2. 78 Indeks Inovasi Daerah (IID) Provinisi NTB
Tahun 2020-2024

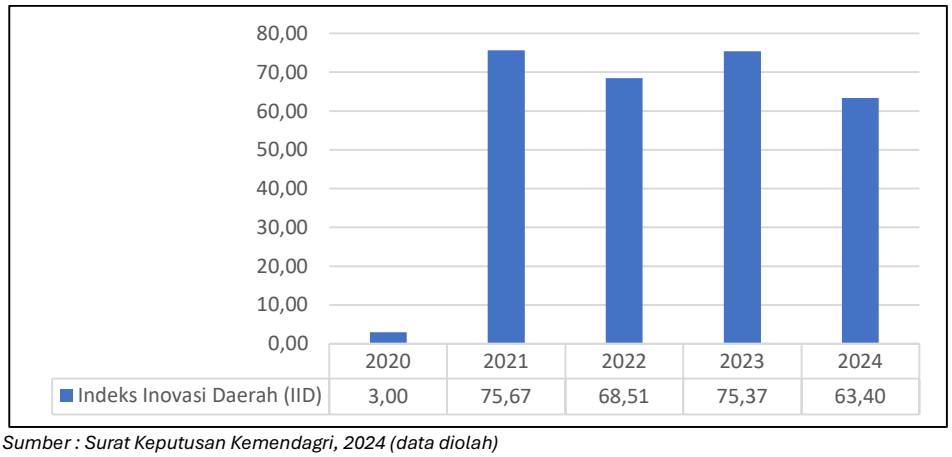

Sumber : Surat Keputusan Kemendagri, 2024 (data diolah)

2.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Implementasi konsep ekonomi hijau dan ekonomi biru dalam transformasi ekonomi bertujuan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan yang berkelanjutan. Gambaran implementasi ekonomi hijau dan ekonomi biru ini dapat dilihat dari Indeks Ekonomi Hijau, Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI), porsi EBT dalam Bauran Energi Primer, dan indikator terkait lainnya.

Indeks Ekonomi Hijau (IEH) di Provinsi NTB merupakan alat ukur penting untuk memantau dan mengukur sejauh mana pembangunan di daerah tersebut bergerak menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan. Berdasarkan data yang tersedia, Provinsi NTB menunjukkan skor yang cukup baik dalam Indeks Ekonomi Hijau, dengan skor rata-rata yang meningkat dari tahun ke tahun, mencerminkan perbaikan dalam penerapan prinsip-prinsip ekonomi hijau.

Indeks Ekonomi Hijau NTB didasarkan pada 16 indikator yang terbagi dalam tiga pilar utama, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan. Indikator lingkungan mencakup hal-hal seperti luas tutupan hutan, bauran energi baru terbarukan, kualitas air, dan penurunan emisi. Untuk sektor ekonomi, indikator yang diperhatikan antara lain adalah intensitas emisi dan energi, serta produktivitas di sektor-sektor seperti industri dan pertanian. Sektor sosial juga dipertimbangkan dengan indikator seperti rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, serta tingkat kemiskinan dan pengangguran. Dari 9 provinsi, 7 provinsi menunjukan tren indeks yang meningkat (pertumbuhan pada rentang -0,9% hingga 6,5%). Pertumbuhan tertinggi tersebut (yang juga tertinggi di Indonesia) diraih Provinsi NTB Skor komposit pilar lingkungan adalah yang terendah untuk kebanyakan provinsi (kecuali Banten, NTB, dan NTT dengan skor komposit pilar ekonomi terendah). Secara umum hal tersebut dikarenakan rendahnya bauran EBT, tutupan hutan, dan kualitas air (kecuali Jawa Tengah, Bali, dan NTT)

Secara kumulatif, Indeks Ekonomi Hijau dari tahun 2015 hingga 2021 menunjukkan adanya tren positif dalam keberlanjutan ekonomi hijau yang tercermin dari meningkatnya skor setiap tahunnya. Pada awal periode (2015 hingga 2016), nilai Indeks Ekonomi Hijau berada pada kategori Sedang Tier 1, dengan skor antara 26,01-37,50. Hal ini mengindikasikan bahwa pada tahun-tahun awal, fokus pada program-program yang mendukung keberlanjutan ekonomi hijau baru dimulai dan masih dalam tahap penguatan di berbagai sektor terkait.

Memasuki tahun 2017 hingga 2019, terdapat peningkatan skor yang membawa Indeks Ekonomi Hijau ke kategori Sedang Tier 2 dan kembali ke Sedang Tier 1 pada tahun 2018 dan 2019, dengan skor yang berkisar antara 37,51 hingga 50,00. Peningkatan ini mencerminkan adanya progres yang signifikan dalam penerapan indikator-indikator ekonomi hijau, seperti produktivitas pertanian, energi terbarukan, dan pengurangan emisi yang mulai dilaksanakan secara lebih konsisten di berbagai sektor.

Pada tahun 2020 dan 2021, skor terus meningkat dan berhasil mencapai kategori Baik Tier 1, dengan nilai 50,01 hingga 62,50. Ini menunjukkan bahwa indikator keberlanjutan ekonomi hijau semakin diperhatikan, dengan adanya perbaikan dalam

aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Pencapaian ini juga mengindikasikan keberhasilan implementasi kebijakan yang lebih mendalam terkait ekonomi hijau, serta keberhasilan dalam pengelolaan sumber daya alam yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa fluktuasi dalam kategori yang dicapai setiap tahunnya, tren umum menunjukkan peningkatan yang positif, menandakan pergeseran yang lebih baik dalam penerapan ekonomi hijau dari tahun ke tahun. Pencapaian ini layak diapresiasi sebagai bukti adanya komitmen yang lebih kuat dalam mencapai keberlanjutan lingkungan dan ekonomi di tingkat provinsi, dengan harapan untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan skor di masa depan.

Tabel 2. 29 Indeks Ekonomi Hijau

Pilar	No.	Indikator	Scoring dengan batas normalisasi MinMax						
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Lingkungan	1	Persentase luas tutupan hutan dari luas daratan Indonesia	42,02	49,64	42,73	42,19	47,37	46,84	46,84
	2	Bauran Energi Baru Terbarukan dari sumber energi primer	6,49	6,30	5,68	7,03	11,75	17,37	22,73
	3	Kualitas Air Permukaan pada Parameter BOD	0,00	1,42	30,00	0,00	0,00	65,00	91,75
	4	Persentase lahan gambut terdegradasi (penurunan tutupan gambut)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5	Kualitas Udara	76,83	76,96	79,48	77,56	77,78	77,69	77,39
	6	Persentase penurunan emisi kumulatif dari baseline	16,43	19,63	20,41	20,17	19,33	18,56	17,59
		SKOR PILAR LINGKUNGAN:	28,47	30,79	36,86	29,39	31,25	45,09	51,26
Ekonomi	7	Intensitas emisi	100,00	99,97	99,66	99,54	99,49	99,50	99,36
	8	Intensitas energi final	9,64	31,54	37,23	0,00	0,00	0,00	28,54
	9	Pendapatan Domestik Bruto per Kapita	8,07	9,54	11,45	12,03	13,11	10,04	10,57
	10	Indeks Produktivitas Pertanian (padi, kelapa sawit, perikanan budidaya)	55,41	57,28	58,54	50,41	50,00	50,00	51,16
		a. Produktivitas padi	10,82	14,56	17,08	0,82	0,00	0,00	2,32
		b. Produktivitas kelapa sawit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c. Produktivitas perikanan budidaya	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	11	Produktivitas tenaga kerja sektor industri	0,00	0,00	0,00	0,00	20,47	0,00	0,00
	12	Produktivitas tenaga kerja sektor jasa	14,45	11,80	15,37	18,78	45,93	8,31	7,02
		SKOR PILAR EKONOMI:	31,26	35,02	37,04	30,13	38,17	27,97	32,87
Sosial	13	Rata-rata lama sekolah	47,10	47,90	49,00	50,30	52,70	53,10	53,80
	14	Angka harapan hidup	50,88	51,07	51,20	52,76	54,83	56,15	57,24
	15	Tingkat kemiskinan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Tingkat pengangguran	77,58	92,17	97,33	95,17	97,67	89,83	99,92
		SKOR PILAR SOSIAL:	43,89	47,78	49,38	49,56	51,30	49,77	52,74
		Green Economy Score:	32,39	35,46	39,42	33,64	37,33	40,89	46,04

Sumber : Indeks Ekonomi Hijau, Bappenas, 2025 (Belum diukur setelah tahun 2021)

Indeks Ekonomi Biru Indonesia merupakan alat ukur komposit yang dikembangkan untuk menilai kinerja pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan di tingkat nasional dan daerah. Indeks ini mencerminkan keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi sumber daya laut dan pesisir dengan pelestarian ekosistem laut serta kesejahteraan masyarakat pesisir. Bagi Provinsi NTB, indeks ini menjadi instrumen penting untuk mengarahkan kebijakan ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan.

Sebagai provinsi kepulauan yang dikelilingi oleh Laut Flores, Selat Lombok, dan Samudera Hindia, NTB memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar, baik dari sisi sumber daya alam maupun ekonomi masyarakat pesisir. Pembangunan sektor kelautan di NTB juga telah menjadi salah satu prioritas strategis yang ditopang oleh potensi perikanan tangkap, budidaya laut, garam, wisata bahari, dan industri pengolahan hasil laut.

Sejak tahun 2022 capaian bauran energi terbarukan dalam bauran energi primer selalu melebihi dari target yang ditetapkan. Capaian terakhkir pada tahun 2024 adalah sebesar 23,25% dari target 22,72 MW. hal ini menunjukan komitmen serius dari pemerintah provinsi NTB dalam mencapai NZE pada tahun 2050. Banyak nya pembangkit

listrik yang bersumber dari energi terbarukan yang telah dibangun oleh PLN dan pihak swasta lainnya yang membuat capaian tersebut dapat melebihi dari target yang ditetapkan. Seperti perusahaan tambang terbesar di NTB yaitu PT. AMNT telah membangun PLTS dengan kapasitas 26,8 MW untuk mendukung operasi tambangnya dan PT STM akan mengembangkan Pembangkit listrik tenaga Panas Bumi dengan kapasitas 60 MW pada Tahun 2030 untuk menunjang operasi tambangnya sehingga hal ini dapat meningkatkan kontribusi energi terbarukan dalam bauran energi. Peran dari semua stakeholder terkait sangat diperlukan untuk mencapai target net zero emission pada tahun 2050.

Tabel 2. 30 Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer Tahun 2020-2024

Tahun				
2020	2021	2022	2023	2024
11,29	13,89	14,17	15,76	17,43

Sumber : Dinas ESDM Provinsi NTB, 2024

2.3.4 Transformasi Digital

2.3.4.1 Indeks Transformasi Digital Nasional

Provinsi NTB mengalami peningkatan kondisi pembangunan digital yang konsisten sejak tahun 2018 hingga 2022, yang dapat dilihat melalui peningkatan skor Indeks Transformasi Digital Nasional (Indeks TDN) dari 40,10 di tahun 2018 menjadi 45,85 di tahun 2022 dan masuk ke dalam Klasifikasi C (Cukup). Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah terus berupaya untuk mengembangkan transformasi digital di Provinsi NTB.

Grafik 2. 79 Nilai Indeks Transformasi Digital Nasional untuk Provinsi NTB

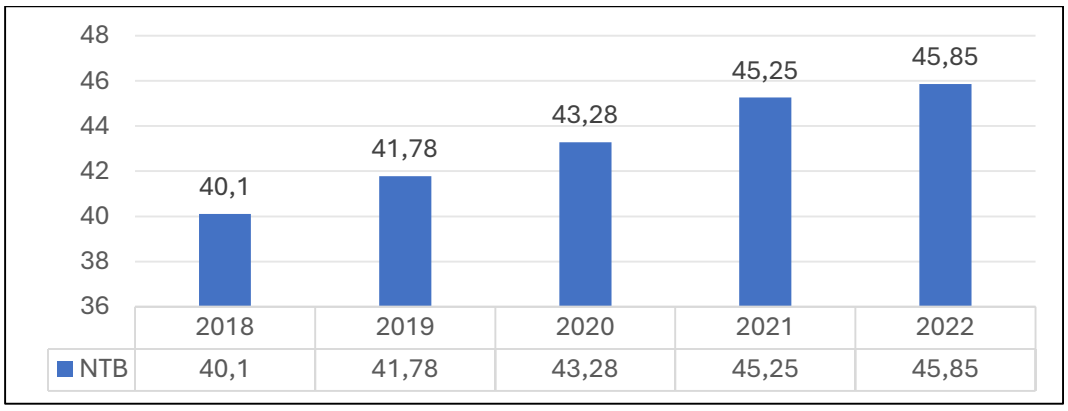

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Digital, 2024

Berdasarkan hasil Indeks TDN, pilar jaringan dan infrastruktur di provinsi NTB menunjukkan hasil yang cukup baik dengan skor 51,63 dan masuk ke dalam klasifikasi B (Baik). Hal ini terlihat dari kondisi penggelaran coverage jaringan 4G dan penetrasi

smartphone yang digunakan masyarakat sudah cukup baik. Namun, penetrasi jaringan 4G tersebut masih perlu didorong untuk ditingkatkan mengingat *coverage* 4G di Provinsi NTB masih sekitar 64,16% dengan masih terdapat 529 dari 1.166 desa/kelurahan masuk ke dalam sinyal lemah. Selain itu, kecepatan download di Provinsi NTB sudah cukup baik dengan rata-rata kecepatan download 64,55 Mbps dan rata-rata kecepatan upload sebesar 28,53 Mbps. Berdasarkan data Kemendikdasmen Tahun 2024, sebanyak 4.102 dari 5.087 atau 80,64% sekolah sudah terfasilitasi akses internet. Di samping itu, berdasarkan data Kemenkes Tahun 2024, sebanyak 172 dari 176 atau 97,73% puskesmas telah terfasilitasi akses internet.

Di samping itu, pilar pemerintah juga sudah tergolong baik dengan skor 51,09 yang masuk ke dalam klasifikasi B (Baik). Terlihat dari aspek skor *e-government Index* dan *e-participation Index* yang terus menunjukkan tren peningkatan tiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah terus mengembangkan pelayanan publiknya untuk masyarakat.

Selanjutnya, pilar yang memerlukan dorongan lebih jauh di Provinsi NTB adalah pilar bisnis yang memiliki skor sebesar 33,26 dan masuk ke dalam klasifikasi C (Cukup). Hal ini ditunjukkan dari aspek adopsi teknologi

baru untuk bisnis yang masih perlu ditingkatkan. Provinsi NTB memiliki potensi dari segi bisnis pariwisata dan ekonomi kreatif lokal, namun diperlukan upaya lebih besar dalam memanfaatkan potensi digital pada iklim usaha dan bisnis di NTB. Lebih lanjut, peningkatan inovasi dan kreativitas merupakan aspek yang penting untuk ditingkatkan. Pelibatan dan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat dapat dilakukan untuk mendorong ekosistem startup yang inovatif dan berbasis teknologi baru.

Di sisi lain, pilar masyarakat di provinsi NTB memiliki skor Indeks TDN sebesar 48,38 dan masuk ke dalam klasifikasi C (Cukup) pada tahun 2022. Angka ini terus menunjukkan tren peningkatan dalam lima tahun terakhir yang mengindikasikan bahwa pemerintah daerah sudah memberikan dukungan terhadap literasi digital masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan adopsi teknologi digital masyarakat, terutama pada upaya peningkatan keterampilan digital untuk seluruh segmen masyarakat.

2.3.4.2 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pengarusutamaan transformasi digital bertujuan meningkatkan peran teknologi informasi dan komunikasi digital yang dapat memberikan nilai tambah pada produktivitas perekonomian daerah. Transformasi digital ini mencakup pengembangan super platform, percepatan transformasi digital, dan produksi talenta digital. Gambaran nilai pengarusutamaan transformasi digital dapat dilihat pada nilai Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan indikator lainnya yang sesuai dengan konteks daerah.

Grafik 2. 80 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi NTB Tahun 2020-2024

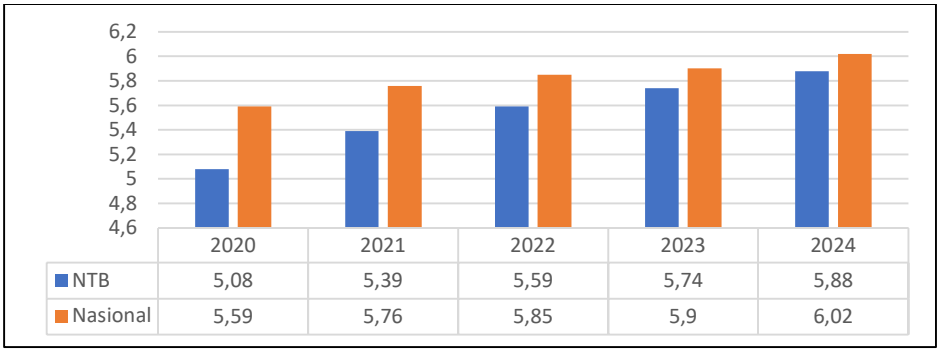

	2020	2021	2022	2023	2024
NTB	5,08	5,39	5,59	5,74	5,88
Nasional	5,59	5,76	5,85	5,9	6,02

Sumber: BPS, 2025

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Provinsi NTB menunjukkan perkembangan yang positif dari tahun 2020 hingga 2024, sejalan dengan tren nasional yang mengalami peningkatan secara konsisten. Secara umum, indeks ini mengukur kemajuan pembangunan TIK melalui tiga subindeks utama, yaitu akses dan infrastruktur TIK, penggunaan TIK, serta keahlian TIK. Ketiga subindeks ini mencerminkan aspek penting dalam membangun ekosistem digital yang kuat dan inklusif di NTB.

Dari data nasional, indeks TIK meningkat dari 5,08 pada tahun 2020 menjadi 5,88 pada tahun 2024, menandakan kemajuan yang berkelanjutan. Di tingkat provinsi, NTB juga menunjukkan tren serupa, meskipun terdapat tantangan khusus yang perlu diperhatikan. Subindeks akses dan infrastruktur TIK mencakup indikator seperti persentase rumah tangga dengan akses internet dan kepemilikan perangkat komputer, yang menjadi fondasi utama bagi masyarakat untuk terhubung dengan teknologi digital. Penggunaan TIK diukur melalui persentase individu yang aktif menggunakan internet dan pelanggan broadband, yang menunjukkan tingkat adopsi teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, subindeks keahlian TIK menilai kemampuan sumber daya manusia melalui indikator pendidikan seperti rata-rata lama sekolah dan partisipasi pendidikan menengah dan tinggi, yang sangat penting untuk mendukung pemanfaatan teknologi secara optimal.

Namun, penghitungan indeks di tingkat provinsi, termasuk NTB, menghadapi keterbatasan data, terutama untuk beberapa indikator yang hanya tersedia pada tingkat nasional, seperti bandwidth internet internasional dan data trafik internet. Oleh karena itu, pendekatan proxy dan imputasi data digunakan untuk memberikan gambaran yang representatif. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas dan ketersediaan data di tingkat daerah agar evaluasi pembangunan TIK dapat lebih akurat dan mendalam.

Tantangan utama yang dihadapi NTB meliputi pengembangan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah, peningkatan literasi digital masyarakat, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia agar mampu mengikuti perkembangan teknologi yang cepat. Perlambatan laju pertumbuhan indeks yang terlihat pada data nasional juga dapat menjadi peringatan agar NTB tidak hanya fokus pada perluasan akses, tetapi juga pada peningkatan kualitas layanan dan pemanfaatan teknologi secara efektif.

Untuk itu, strategi pembangunan TIK di NTB harus menitikberatkan pada peningkatan akses internet yang merata, pengembangan program pelatihan dan pendidikan digital, serta kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, NTB dapat mempercepat transformasi digitalnya, meningkatkan daya saing daerah, dan membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, Indeks Pembangunan TIK di NTB mencerminkan kemajuan yang menggembirakan, namun juga menuntut perhatian serius terhadap aspek kualitas dan pemerataan pembangunan TIK. Upaya berkelanjutan dalam pengembangan infrastruktur, peningkatan literasi digital, dan penguatan sumber daya manusia akan menjadi kunci utama dalam mendorong NTB menuju masyarakat informasi yang maju dan inklusif.

2.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Produktivitas perekonomian dalam negeri yang terintegrasi dan mendukung partisipasi dalam rantai pasok global merupakan tujuan dari pengembangan integrasi ekonomi domestik dan global. Gambaran integrasi ekonomi domestik dan global ini dijabarkan dalam indikator Pembentukan Modal Tetap Bruto, Ekspor Barang dan Jasa, dan indikator terkait lainnya.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi NTB berdasarkan pengeluaran menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dalam periode 2020 hingga 2024. PDRB atas dasar harga konstan 2010 meningkat dari Rp95,44 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp109,41 triliun pada tahun 2024, mencerminkan pertumbuhan ekonomi riil yang stabil di tengah dinamika global dan nasional.

Komponen utama yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga, yang menunjukkan pertumbuhan konsisten dari Rp57,75 triliun pada 2021 menjadi Rp65,23 triliun pada 2024 (harga konstan). Pertumbuhan ini mencerminkan pemulihan daya beli masyarakat, peningkatan mobilitas, serta membaiknya aktivitas ekonomi pascapandemi.

Sementara itu, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi mengalami pertumbuhan dari Rp31,59 triliun menjadi Rp34,79 triliun. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas investasi fisik, baik oleh sektor swasta maupun pemerintah, termasuk dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peralatan produksi, dan properti.

Pengeluaran konsumsi pemerintah juga menunjukkan tren meningkat, dari Rp12,51 triliun menjadi Rp13,61 triliun. Kenaikan ini mencerminkan adanya peran aktif belanja pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui program pembangunan dan pelayanan publik.

Dari sisi eksternal, ekspor barang dan jasa yang sempat melonjak pada 2022, mengalami penurunan pada 2023 menjadi Rp36,42 triliun (harga konstan), dan kenaikan kembali 2024 menjadi Rp38,52 triliun, kemungkinan dipengaruhi oleh menurunnya permintaan global atau penurunan harga komoditas unggulan. Sebaliknya, impor barang dan jasa terus meningkat, dari Rp36,16 triliun tahun 2021 menjadi Rp45,15 triliun pada

tahun 2024, mencerminkan meningkatnya permintaan domestik terhadap barang konsumsi maupun bahan baku dari luar daerah.

Tabel 2. 31 PDRB Atas Dasar Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (miliar rupiah) Tahun 2020-2024

Komponen Pengeluaran	Harga Berlaku					Harga Konstan 2010				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Tahunan	Tahunan	Tahunan	Tahunan	Tahunan	Tahunan	Tahunan	Tahunan	Tahunan	Tahunan
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	82,080.74	85,140.96	91,821.64	98,205.32	104,986.16	56,729.84	57,753.14	60,050.17	62,459.15	65,238.19
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,178.74	2,230.78	2,476.77	2,725.54	3,091.47	1,488.08	1,496.15	1,583.83	1,680.74	1,870.02
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	20,730.28	21,213.21	21,997.45	22,802.91	24,610.56	12,509.34	12,574.48	12,721.80	12,940.51	13,609.62
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	49,488.70	53,100.50	54,581.65	61,284.64	64,075.34	30,386.40	31,589.13	30,968.09	33,748.53	34,798.33
5. Perubahan Inventori	824.35	320.97	346.13	336.96	1,599.89	296.77	113.10	119.39	122.78	523.39
6. Ekspor Barang dan Jasa	49,031.39	56,696.35	84,361.85	78,461.89	86,096.17	25,504.20	28,073.11	40,832.87	36,425.22	38,526.63
7. Impor Barang dan Jasa	70,720.45	78,587.49	98,642.82	97,421.80	102,194.40	33,625.75	36,161.25	44,202.48	43,470.71	45,151.21
PDRB	133,613.74	140,115.27	156,942.67	166,395.45	182,265.19	93,288.87	95,437.86	102,073.66	103,906.22	109,414.97
Catatan Tahun 2023 : Angka sementara Tahun 2024 : Angka sangat sementara Tahun 2025 : Angka sangat sangat sementara										

Sumber: BPS, 2025

Secara keseluruhan, struktur PDRB NTB dari sisi pengeluaran menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi ditopang terutama oleh konsumsi rumah tangga dan investasi, sementara sektor ekspor perlu mendapat perhatian khusus akibat penurunan kontribusinya di tahun 2023. Untuk menjaga keseimbangan dan kemandirian ekonomi daerah, diperlukan penguatan sektor produksi dalam negeri dan peningkatan nilai tambah ekspor melalui hilirisasi dan diversifikasi produk.

2.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Gambaran kondisi pengembangan wilayah perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTB. Wilayah perkotaan sebagai pusat jasa dan perdagangan yang maju, menjadi kota yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan perdesaan yang mandiri secara berkelanjutan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Indikator yang menggambarkan kondisi pengembangan wilayah perkotaan dan perdesaan dapat dilihat pada nilai Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI), Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Persentase Desa Mandiri, dan indikator terkait lainnya.

Tabel 2. 32 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

No	Infrastruktur	Indeks Kinerja	Kategori	Indeks Harapan	Kategori	Tingkat Kesesuaian (%)
1	Irigasi	78,65%	Baik	96,38%	Sangat Penting	82%
2	Jalan dan Jembatan	81,35%	Baik	96,78%	Sangat Penting	84%
3	Air Minum	73,40%	Kurang Baik	97,09%	Sangat Penting	76%
4	Persampahan	75,04%	Kurang Baik	98,74%	Sangat Penting	76%
5	Drainase	73,77%	Kurang Baik	95,86%	Sangat Penting	77%
6	Permukiman Kumuh	64,27%	Tidak Baik	96,94%	Sangat Penting	66%
7	Terminal	77,45%	Baik	94,21%	Sangat Penting	82%
8	Pelabuhan	82,74%	Baik	93,74%	Sangat Penting	88%
NILAI IKLI		**75,83%**	**Kurang Baik**	**96,22%**	**Sangat Penting**	**79%**

Sumber : Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Provinsi NTB, 2024.

Pada Tabel disajikan data terkait Indeks Harapan, Indeks Kinerja, dan Tingkat Kesesuaian Layanan Infrastruktur di Provinsi NTB. Indeks Kinerja menggambarkan seberapa baik infrastruktur yang ada berfungsi saat ini, sedangkan Indeks Harapan mencerminkan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas layanan infrastruktur tersebut. Tingkat Kesesuaian dihitung dengan membandingkan antara kinerja aktual dan harapan masyarakat terhadap setiap sektor infrastruktur.

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai rata-rata Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Provinsi NTB pada tahun 2024 adalah 75,83%, yang masuk dalam kategori "Kurang Baik". Di sisi lain, rata-rata Indeks Harapan masyarakat mencapai 96,22%, yang termasuk dalam kategori "Sangat Penting". Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara harapan masyarakat dan kinerja aktual infrastruktur. Tingkat Kesesuaian secara keseluruhan tercatat sebesar 79%, yang mencerminkan bahwa ada ruang untuk perbaikan di beberapa sektor infrastruktur.

Beberapa sektor infrastruktur menunjukkan kesenjangan yang cukup besar antara kinerja dan harapan masyarakat. Misalnya, Permukiman Kumuh, dengan Indeks Kinerja terendah (64,27%) dan tingkat kesesuaian yang hanya 66%. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada harapan yang tinggi dari masyarakat terkait penataan kawasan permukiman kumuh, kinerjanya masih jauh dari ekspektasi. Sebaliknya, Pelabuhan menunjukkan kinerja terbaik dengan nilai Indeks Kinerja mencapai 82,74% dan tingkat kesesuaian tertinggi di antara sektor lainnya, yaitu 88%. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor pelabuhan telah memenuhi sebagian besar harapan masyarakat.

Sektor-sektor lain seperti Irigasi, Jalan dan Jembatan, dan Air Minum juga menunjukkan nilai Indeks Kinerja yang cukup baik, masing-masing berada pada kategori

"Baik" dengan nilai rata-rata 78,65%, 81,35%, dan 73,40%. Namun, tingkat kesesuaian sektor-sektor ini masih perlu ditingkatkan untuk lebih mendekati harapan masyarakat yang sangat tinggi, yang tercermin pada Indeks Harapan yang mencapai lebih dari 96%.

Secara keseluruhan, meskipun infrastruktur di Provinsi NTB telah menunjukkan perkembangan yang signifikan, masih ada kebutuhan untuk peningkatan agar lebih sesuai dengan harapan masyarakat, terutama pada sektor-sektor yang masuk dalam kategori "Kurang Baik" dan "Tidak Baik". Pemerintah perlu lebih fokus pada sektor-sektor tersebut untuk memastikan bahwa layanan infrastruktur yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Total panjang jalan kewenangan provinsi adalah 1.493,12 km, masing-masing Pulau Lombok sepanjang 516,44 km dan Pulau Sumbawa sepanjang 976,68 km sesuai Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor 620-335 Tahun 2024 tentang Status Ruas Jalan Provinsi NTB, bertambah 8,69 km akibat adanya ruas jalan nasional yang turun status menjadi jalan provinsi. Capaian kinerja kemantapan jalan provinsi sebesar 75,54% dengan rincian Pulau Lombok 91,37% (571,87km) dan Pulau Sumbawa 67,17% (656 km) . Capaian ini lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yang sebesar 79,94%. Penyebab utama tidak tercapainya target ini adalah belum optimalnya pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan, yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran. Selain itu, masih banyak pelanggaran terhadap pembatasan dimensi dan muatan kendaraan (over dimension over loading/ODOL), serta kerusakan dini akibat bencana alam seperti curah hujan tinggi dan perubahan tata guna lahan. Dalam mendukung fungsi jalan kewenangan provinsi, terdapat ruas jalan kewenangan nasional sepanjang 939,64 km dengan tingkat kemantapan 98,43%, masing-masing panjang jalan nasional di Pulau Lombok 320,55 km dengan tingkat kemantapan 99,13% sedangkan di Pulau Sumbawa panjangnya 619,09 km dengan tingkat kemantapan 98,06%.

Grafik 2. 81 Tingkat Kemantapan Jalan Nasional di Provinsi NTB Tahun 2020-2024

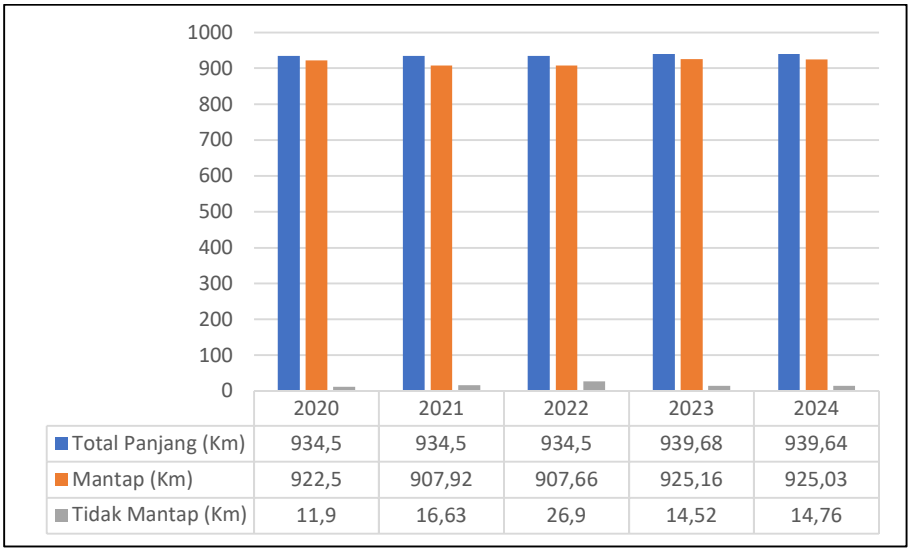

	2020	2021	2022	2023	2024
Total Panjang (Km)	934,5	934,5	934,5	939,68	939,64
Mantap (Km)	922,5	907,92	907,66	925,16	925,03
Tidak Mantap (Km)	11,9	16,63	26,9	14,52	14,76

Sumber : BPJN NTB, 2024

Grafik 2. 82 Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi NTB Tahun 2020-2024

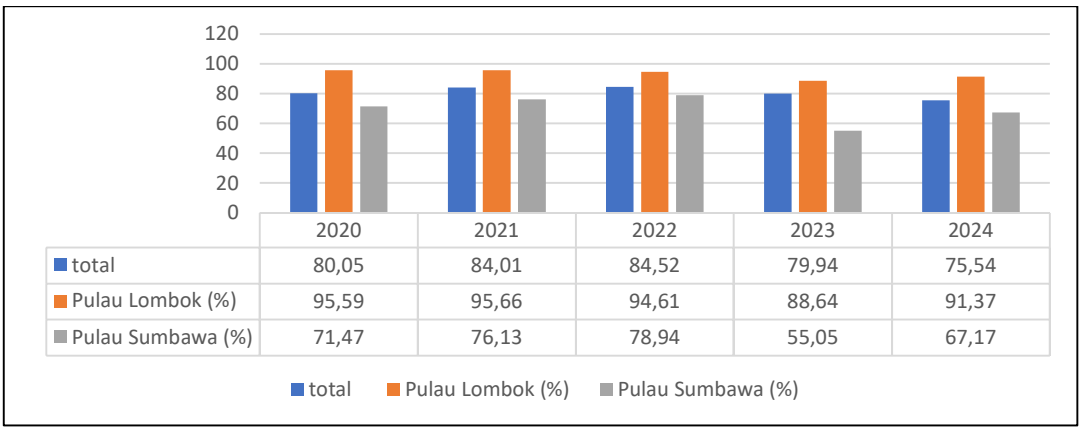

	2020	2021	2022	2023	2024
total	80,05	84,01	84,52	79,94	75,54
Pulau Lombok (%)	95,59	95,66	94,61	88,64	91,37
Pulau Sumbawa (%)	71,47	76,13	78,94	55,05	67,17

Sumber : Dinas PUPR NTB, Tahun 2024

Penanganan jalan provinsi dilakukan melalui dana dari APBN melalui Inpres Jalan Daerah (IJD), APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Salah satu sasaran strategis dari penanganan ini adalah peningkatan kemantapan jalan, yang menjadi salah satu indikator kinerja dalam pembangunan infrastruktur dasar mendukung pertumbuhan kawasan strategis.

Jenis pekerjaan penanganan jalan yang dilakukan meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan rekonstruksi pada ruas jalan tertentu. Pemeliharaan jalan dilaksanakan oleh Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi (BPJP) Wilayah Pulau Lombok, BPJP Pulau Sumbawa, dan BPJP Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur. Mendukung kemantapan jalan provinsi, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Inpres Jalan Daerah juga memfasilitasi pekerjaan pemelihaan/rehabilitasi jalan dan jembatan yang dilaksanakan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional NTB.

Grafik 2. 83 Panjang Jalan Kabupaten Kota di Provinsi NTB Tahun 2024

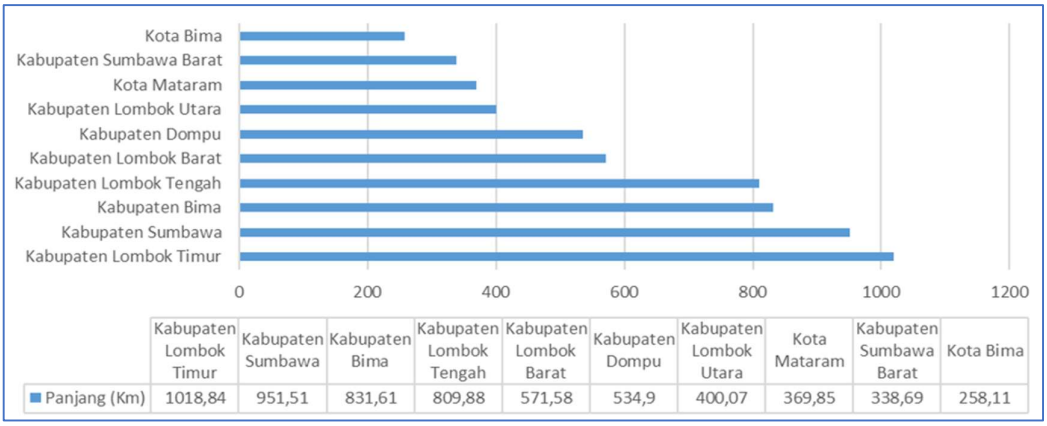

	Kabupaten Lombok Timur	Kabupaten Sumbawa	Kabupaten Bima	Kabupaten Lombok Tengah	Kabupaten Lombok Barat	Kabupaten Dompu	Kabupaten Lombok Utara	Kota Mataram	Kabupaten Sumbawa Barat	Kota Bima
Panjang (Km)	1018,84	951,51	831,61	809,88	571,58	534,9	400,07	369,85	338,69	258,11

Sumber : Dinas PUPR Tahun 2024

Pengelolaan Bidang Sumberdaya Air, pada tahun 2024 capaian realisasi Persentase Cakupan Pelayanan Areal Irigasi (Indikator Kinerja OPD) mencapai 80,35% melampaui capaian tahun sebelumnya sebesar 78,74%. Secara keseluruhan terdapat 58.105 ha luasan kewenangan daerah irigasi yang dikelola. Panjang saluran dari 35 Daerah Irigasi tersebut adalah Saluran Primer sepanjang 351,84 kilometer dengan 1,06% kondisi baik, 48,43% rusak ringan, 37,42% rusak sedang, dan 13,09% rusak berat dan saluran sekunder sepanjang 643,56 kilometer dengan 5,45% dalam kondisi baik, 30,64% rusak ringan, 46,61% rusak sedang, dan 17,30% rusak berat.

Grafik 2. 84 Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi Tahun 2024

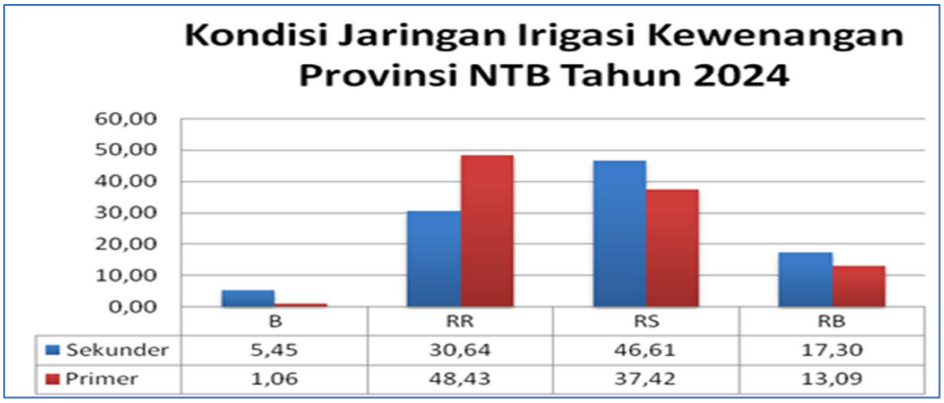

Sumber : Dinas PUPR Tahun 2024

Selanjutnya Cakupan pelayanan air minum merupakan salah satu indikator strategis dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan permukiman, dan kesejahteraan secara umum. Selama Tahun 2018–2024, capaian cakupan air minum menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dan konsisten.

Berdasarkan data, cakupan air minum meningkat dari 72,56% pada tahun 2018 menjadi 84,41% pada tahun 2024. Di sisi lain, target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan tahunan juga meningkat secara bertahap dari 72,56% di tahun 2018 menjadi 81,34% di tahun 2024. Yang menggembirakan, realisasi capaian selalu berada di atas target yang direncanakan sejak tahun 2019 hingga tahun 2024.

Kinerja terbaik terjadi pada tahun 2023 dan 2024, di mana realisasi cakupan mencapai masing-masing 83,12% dan 84,41%, melebihi target sebesar 2,53 poin dan 3,07 poin persentase. Hal ini menandakan keberhasilan pemerintah daerah dalam memperluas akses air minum yang layak, baik melalui penguatan infrastruktur SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum), peningkatan investasi daerah, maupun kolaborasi dengan pihak swasta dan masyarakat.

Grafik 2. 85 Realisasi Cakupan Air Minum Tahun 2018-2024

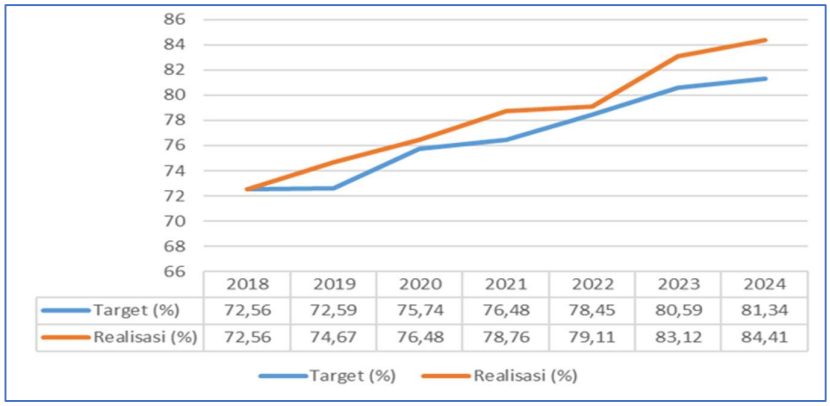

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Target (%)	72,56	72,59	75,74	76,48	78,45	80,59	81,34
Realisasi (%)	72,56	74,67	76,48	78,76	79,11	83,12	84,41

Sumber : Dinas PUPR Tahun 2024

Peningkatan yang signifikan dalam realisasi cakupan air minum dapat diatribusikan kepada berbagai faktor, termasuk peningkatan infrastruktur, program penyuluhan kepada masyarakat, dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga non-pemerintah. Program-program ini berfokus pada penyediaan akses air bersih yang lebih baik, terutama di daerah-daerah yang sebelumnya kurang terlayani. Namun, meskipun ada kemajuan, tantangan tetap ada. Tantangannya adalah upaya percepatan layanan air minum aman, yang memenuhi kriteria 4K (Kuantitas, Kualitas, Kontinuitas, Dan Keterjangkauan). Saat ini capaian air minum aman adalah 21,09% berdasarkan hasil evaluasi kinerja kelembagaan air minum yang dirilis oleh BPKP. Dari hasil penilaian tersebut dari 8 (delapan) badan usaha di bidang air minum terdapat 2 (dua) yang masih dalam kondisi sakit. Sehingga pemerintah provinsi perlu meningkatkan evaluasi dan pembinaan sesuai tanggungjawab dan wewenang yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Dengan komitmen yang berkelanjutan dan strategi yang tepat, diharapkan akses terhadap air bersih dapat terus meningkat, memberikan dampak positif bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Rumah menjadi jendela untuk melihat kualitas hidup masyarakat. BPS menerbitkan Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan Tahun 2023, yang menunjukkan 36,85% Rumah Tangga di Indonesia tinggal dalam rumah yang tidak layak huni. 36-37 rumah dari setiap 100 rumah tangga hidup dalam kondisi rumah yang tidak layak huni. Rumah sehat berkontribusi untuk mencapai Tujuan 11 SDGs 2030 yaitu Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan. Hunian Layak memenuhi 4 (empat) kriteria, yaitu: (1) kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m2 per kapita (sufficient living space) (2) memiliki akses terhadap air minum layak (3) memiliki akses terhadap sanitasi layak (4) ketahanan bangunan (durable housing), yaitu atap terluas berupa beton/ genteng/ seng/ kayu/ sirap; dinding terluas berupa tembok/ plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan dan batang kayu; dan lantai terluas berupa marmer/ granit/ keramik/ parket/vinil/karpet/ ubin/tegel/teraso/ kayu/papan/ semen/bata merah.

Gambar 2.9 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Berdasarkan Provinsi Tahun 2024

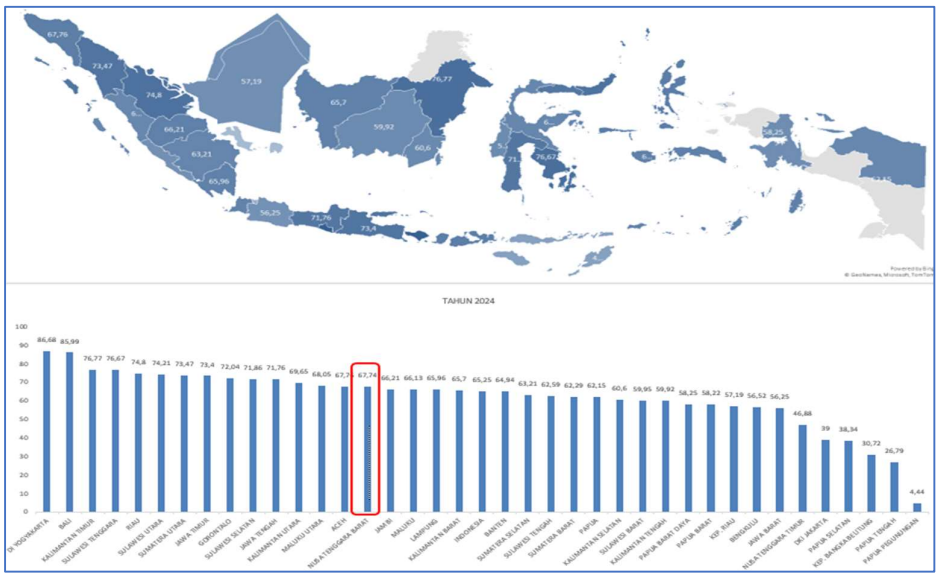

Sumber: https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTI0MSMy/percentage-of-households-with-access-to-adequate-and-affordable-housing-by-province.html

Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak di Provinsi NTB mencapai 66,31% pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 67,74% pada tahun 2024. Peningkatan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Daerah untuk penanggulangan kemiskinan dengan penyediaan perumahan, yaitu penyediaan rumah susun di kawasan perkotaan dan kawasan kumuh dan pemberian bantuan kredit perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai status perkembangan desa di Indonesia. Dalam kurun waktu lima tahun, NTB menunjukkan perkembangan yang positif. Pada tahun 2024, 80% desa di NTB telah mencapai status maju dan mandiri. Pemerintah Provinsi NTB terus berupaya meningkatkan status desa-desa tersebut melalui berbagai program pemberdayaan dan pembangunan. Salah satu langkah strategis yang direncanakan adalah penggabungan data Potensi Desa (Podes) dan IDM menjadi Indeks Desa pada tahun 2025. Indeks baru ini akan mencakup lima status desa: sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri, serta didukung oleh enam dimensi, yaitu aksesibilitas, layanan dasar, ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan desa. Gambaran Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi NTB Tahun 2017-2024 adalah sebagai berikut:

Grafik 2. 86 Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi NTB Tahun 2017-2024

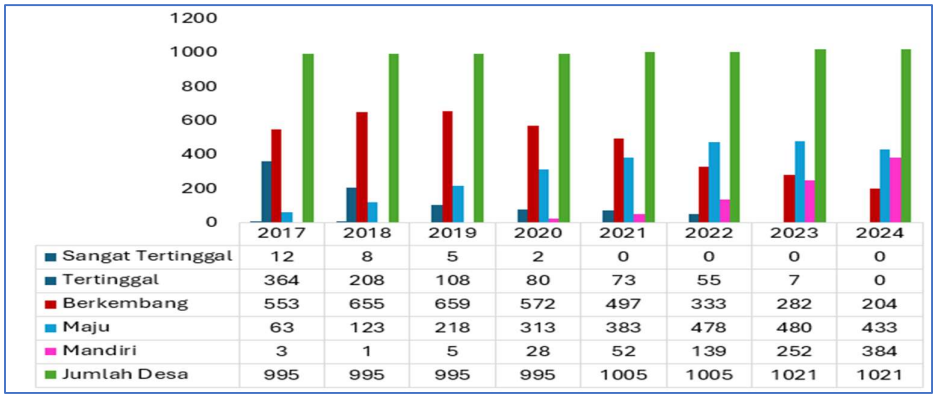

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sangat Tertinggal	12	8	5	2	0	0	0	0
Tertinggal	364	208	108	80	73	55	7	0
Berkembang	553	655	659	572	497	333	282	204
Maju	63	123	218	313	383	478	480	433
Mandiri	3	1	5	28	52	139	252	384
Jumlah Desa	995	995	995	995	1005	1005	1021	1021

Sumber: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2024 (diolah)

Pada akhir tahun 2024 telah dilakukan revitalisasi dan penyempurnaan alat ukur pembangunan desa hingga disepakati terdapat 1 alat ukur, yaitu Indeks Desa sebagai indikator tunggal pembangunan desa. Indeks Desa terdiri dari 6 dimensi dan 48 indikator penyusun, keenam dimensi tersebut adalah dimensi layanan dasar, dimensi sosial, dimensi ekonomi, dimensi lingkungan, dimensi aksesibilitas, dan dimensi tata kelola pemerintahan desa.

Indeks Desa bertujuan untuk mengukur tingkat kemajuan dan kemandirian desa untuk mencapai sasaran pembangunan desa yang berkelanjutan. Indeks ini disusun dengan dasar bahwa peningkatan kemandirian desa yang berkelanjutan merupakan proses akumulasi dari keenam dimensi pembentuk Indeks Desa. Indeks Desa dapat dimanfaatkan untuk menyusun kebijakan, merancang program pembangunan sesuai dengan kondisi lokal desa, menetapkan prioritas pembangunan, hingga evaluasi atas program yang telah dilaksanakan.

Indeks Desa akan mengklasifikasikan desa menjadi 5 status, yaitu desa sangat tertingal, desa tertinggal, desa berkembang, desa maju dan desa mandiri. Klasifikasi ini bertujuan untuk penetapan status perkembangan dan rekomendasi terhadap intervensi kebijakan yang perlu dilakukan sesuai dengan kondisi desa.

Pembangunan desa juga dilakukan melalui stategis pembangunan kawasan perdesaan. Konteks pembangunan kawasan pedesaan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Kolaborasi pentahelix diperlukan sebagai upaya untuk mencapai tujuan tersebut, kolaborasi tersebut akan menciptakan sinergisme dalam pembangunan kawasan perdesaan.

Pada RPJMN 2025-2029 telah ditetapkan Kawasan Perdesaan Berbasis Pariwisata Sembalun, Kabupaten Lombok Timur sebagai Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP). Intervensi pada KPP berbasis pariwisata Sembalun akan dilakukan melalui: peningkatan produktivitas perdesaan, pengembangan fasilitas pendukung perdesaan, penyediaan layanan dasar skala desa dan perdesaan, peningkatan aksesibilitas desa,

pengembangan dan diversifikasi ekonomi lokal, pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi lokal dan peningkatan kapasitas tata kelola desa untuk mewujudkan transparansi dan digitalisasi desa.

Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) akan menjadi dasar dalam penentuan strategi, arah kebijakan hingga program kegiatan untuk mengintervensi KPP berbasis pariwisata Sembalun secara kolaboratif.

2.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

Inflasi di NTB (NTB) menunjukkan tren yang fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir, sebagaimana ditampilkan dalam grafik. Pada tahun 2019, inflasi NTB tercatat sebesar 1,67%, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 2,72%. Namun, pada tahun 2020, inflasi NTB turun drastis ke 0,60%, sementara inflasi nasional hanya turun ke 1,68%, menunjukkan bahwa NTB lebih terdampak oleh perlambatan ekonomi akibat pandemi. Pada 2021, inflasi NTB mulai meningkat ke 2,12%, sedikit lebih tinggi dari nasional yang berada di 1,87%, mencerminkan pemulihan ekonomi yang mulai berjalan. Kenaikan tertinggi terjadi pada 2022, di mana inflasi NTB melonjak ke 6,23%, lebih tinggi dibandingkan nasional yang berada di 5,51%.

Peningkatan inflasi pada 2022 terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan pangan, energi, dan transportasi yang mengalami gangguan akibat ketidakstabilan global serta peningkatan permintaan pasca pandemi. Pada 2023, inflasi mulai turun menjadi 3,02% di NTB dan 2,61% di tingkat nasional, seiring dengan stabilisasi harga dan kebijakan pemerintah dalam mengendalikan inflasi. Pada tahun 2024 inflasi NTB turun ke 1,28%, lebih rendah dibandingkan nasional yang masih di angka 1,57%. Hal ini menunjukkan bahwa inflasi di NTB mulai terkendali, meskipun masih dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti harga pangan, sektor pariwisata, serta kebijakan energi dan transportasi yang terus berkembang. Perkembangan Inflasi Nasional dan Provinsi NTB Tahun 2011 – 2024 adadlah sebagai berikut:

Grafik 2. 87 Perkembangan Inflasi Nasional dan Provinsi NTB Tahun 2011 - 2024

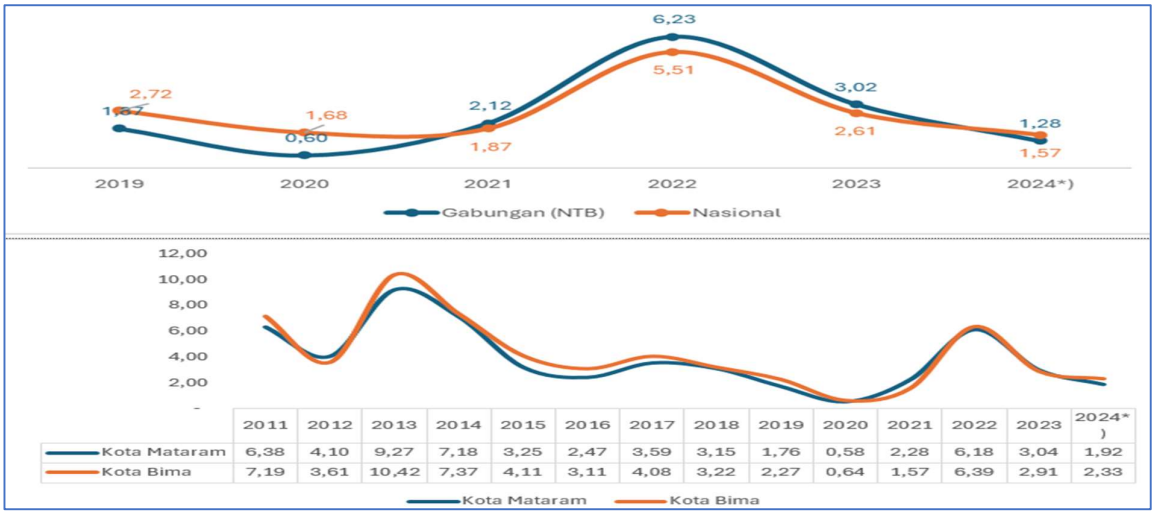

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024*)
Kota Mataram	6,38	4,10	9,27	7,18	3,25	2,47	3,59	3,15	1,76	0,58	2,28	6,18	3,04	1,92
Kota Bima	7,19	3,61	10,42	7,37	4,11	3,11	4,08	3,22	2,27	0,64	1,57	6,39	2,91	2,33

Sumber: BPS, 2025

Rasio Pajak merupakan salah satu matrik yang digunakan untuk mengukur perekonomian. Dimana rasio paak adalah perbandingan antara pendapatan pajak dan nilai total barang serta jasa yang dihasilkan . Beberapa factor yang memepengaruhi rasio pajak adalah kondisi ekonomi, kepatuhan masyarakt membayar paak dan kebiakan pemerintah. Semakin tinggi rasio pajak semakin baik kondisi ekonomi karena pajak yang dikumpulkan lebih banyak. Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan, rasio pajak menurut DJPB menargetkan pada level 3 Persen, sedangkan angka untuk rasio pajak NTB berada pada level 1 dan kurang dari 2 berada di bawah target yang ditetapkan oleh Kementrian Keuangan.

Tabel 2. 33 Rasio Pajak Terhadap PDRB

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB (ADHK 2010)	93,872,440,000,000	93,288,870,000,000	95,437,860,000,000	102,073,660,000,000	103,906,220,000,000	109,414,970,000,000
Pajak Daerah	1,404,964,803,251	1,328,307,081,373	1,418,222,758,511	1,706,131,394,926	1,880,836,787,108	2,045,004,056,872
Rasio Pajak Terhadap PDRB (%)	1.50	1.42	1.49	1.67	1.81	1.87

Sumber : Bappenda Provinsi NTB, 2024

Dalam beberapa tahun terakhir, Rasio Pajak terhadap PDRB di Provinsi NTB menunjukkan kecenderungan meningkat. Perubahan ini mencerminkan dinamika antara pertumbuhan ekonomi daerah dan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan pajak, baik pajak provinsi maupun pajak Kab/Kota.

Tren kenaikan Rasio Pajak terhadap PDRB di NTB mencerminkan penguatan kemandirian fiskal daerah. Artinya, semakin besar proporsi pendapatan daerah yang bersumber dari pajak, semakin kuat kapasitas pemerintah daerah dalam mendanai program pembangunan tanpa terlalu bergantung pada transfer pusat. Hal ini penting dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan, responsif, dan berbasis potensi lokal.

Walaupun Rasio Pajak terhadap PDRB NTB menunjukkan tren positif, capaian saat ini yang masih di bawah target nasional yang umumnya ditetapkan dalam kisaran minimal 2% terhadap PDRB sebagai standar ideal kontribusi fiskal dari penerimaan pajak daerah terhadap total output ekonomi. Mengindikasikan perlunya percepatan reformasi fiskal daerah. Pemerintah daerah perlu mendorong inovasi, kolaborasi lintas sektor, dan optimalisasi pemanfaatan potensi ekonomi daerah agar kontribusi pajak terhadap PDRB semakin meningkat. Hal ini penting untuk mewujudkan NTB yang tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga berdikari dalam pembiayaan pembangunan.

2.4 Aspek Pelayanan Umum

2.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Dalam aspek pelayanan umum, pemerintah wajib memberikan pelayanan umum yang berkualitas, inklusif, dan responsif dengan manajemen tata kelola pemerintahan yang baik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdampak baik pada pengelolaan sektor publik yang transparan dan akuntabel. Proses tata kelola pemerintahan ini digambarkan dengan pertukaran informasi yang terbuka, transparan, dan mematuhi kerangka hukum berlaku. Indikator yang menggambarkan kondisi Provinsi NTB untuk regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif adalah Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Reformasi Hukum, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Indeks Pelayanan Publik, Indeks Integritas Nasional, dan indikator terkait lainnya.

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business prosess*) dan sumber daya manusia aparatur serta manajemen keuangan daerah.

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbarui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.

Untuk memastikan pengelolaan reformasi birokrasi yang efektif, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2020 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang menjadi dokumen perencanaan reformasi birokrasi untuk dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan stakeholder. Pelaksanaan reformasi birokrasi nasional terbagi dalam tiga periode road map. Sebagai bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi dan rencana rinci reformasi periode ke 3 (tiga) ini serta melanjutkan Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 telah diterbitkan Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi

Birokrasi 2020-2024. Pada tahap akhir ini diharapkan, reformasi birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*World Class Bureaucracy*) yang dicirikan dengan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan 8 (delapan) area perubahan yang tertera dalam Road Map Reformasi Birokrasi yang menjadi fokus pembangunan antara lain sebagai berikut: Manajemen perubahan, Deregulasi kebijakan, Penataan organisasi, Penataan tatalaksana, Penataan SDM aparatur, Penguatan akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan kualitas pelayanan publik. Sebagai instrumen untuk pelaksanaan reformasi birokrasi, maka disusunlah Indeks Reformasi Birokrasi dengan mengacu pada PermenPANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi NTB dengan kategori "B" atau nilai 65,53 poin pada tahun 2020, kemudian di tahun 2021 menjadi "B" namun dengan nilai yang meningkat yaitu 65,76 poin, dan di tahun 2022 meningkat nilainya menjadi 67,02 namun tetap dengan kategori "B". Dari nilai yang telah diperoleh, komponen pengungkit yang perlu mendapatkan perhatian karena dari besaran bobot penilaian masih belum maksimal seperti pada sub komponen Pemenuhan dan Reformasi. Adapun hasil perkembangan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi NTB dapat dilihat pada tabel berikut.

Grafik 2. 88 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi NTB Tahun 2020 - 2024

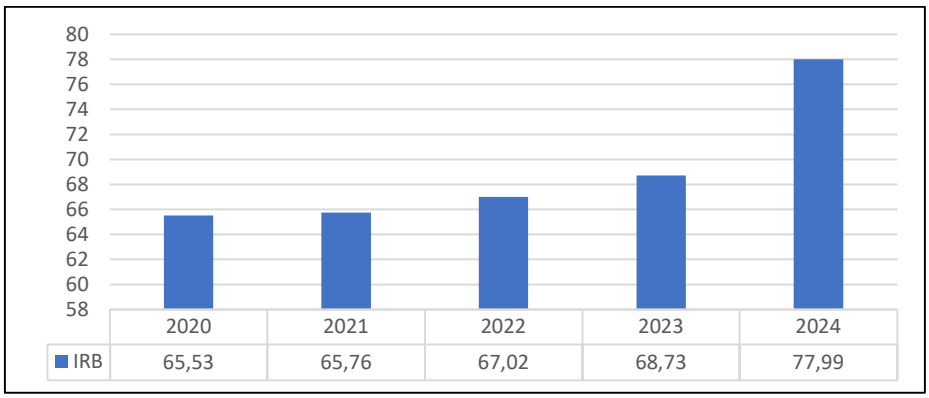

Sumber: Biro Organisasi Setda Prov. NTB, 2024 (data diolah)

Selanjutnya Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan salah satu proses monitoring dan evaluasi dari regulasi yang telah berjalan, dengan harapan bahwa setiap regulasi yang dilaksanakan dapat tepat guna dan tepat sasaran dan tidak berbenturan dengan regulasi yang ada di tingkat atas.

Indeks Reformasi Hukum ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang telah disusun menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, yang kemudian menjadi dasar pedoman Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Pada tahun 2023, nilai Indeks Reformasi Hukum NTB tercatat sebesar 54,10. Angka ini menunjukkan bahwa upaya reformasi hukum masih berada pada tahap awal penguatan kelembagaan dan pembenahan regulasi. Namun demikian, berbagai langkah strategis telah mulai menunjukkan hasil yang signifikan pada tahun 2024, di mana nilai indeks meningkat tajam menjadi 77,74.

Peningkatan sebesar lebih dari 23 poin ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memperkuat sinergi antar lembaga hukum, menyederhanakan regulasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Capaian ini juga menjadi indikator penting dalam mendukung terwujudnya sistem hukum yang adil, responsif, dan inklusif di daerah.

Grafik 2. 89 Perkembangan Indeks Reformasi Hukum Provinsi NTB Tahun 2023-2024

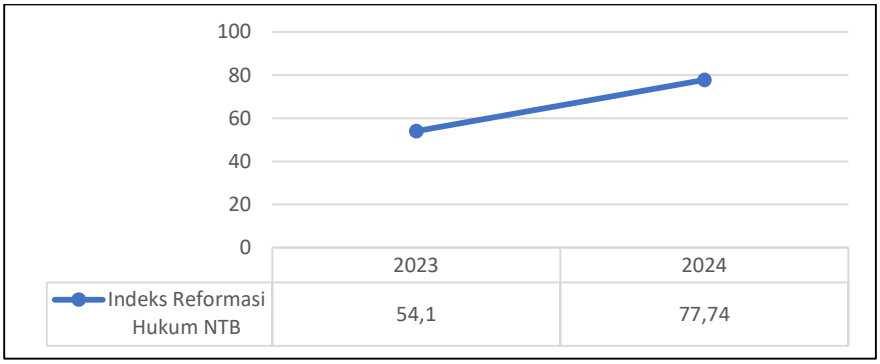

Sumber : Kemenkumham, 2024

Peningkatan Indeks Reformasi Hukum ini akan menjadi fondasi kuat dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi hukum, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel salah satunya juga melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Inisiatif ini sejalan dengan kebijakan nasional dalam mendukung transformasi digital pemerintahan serta mendorong peningkatan pelayanan publik yang efisien dan berbasis teknologi informasi.

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan merupakan salah satu prioritas utama Provinsi NTB dalam mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, dan transparan. Hal ini tercermin dari tren positif capaian Indeks SPBE NTB selama lima tahun terakhir.

Grafik 2. 90 Perkembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi NTB Tahun 2020-2024

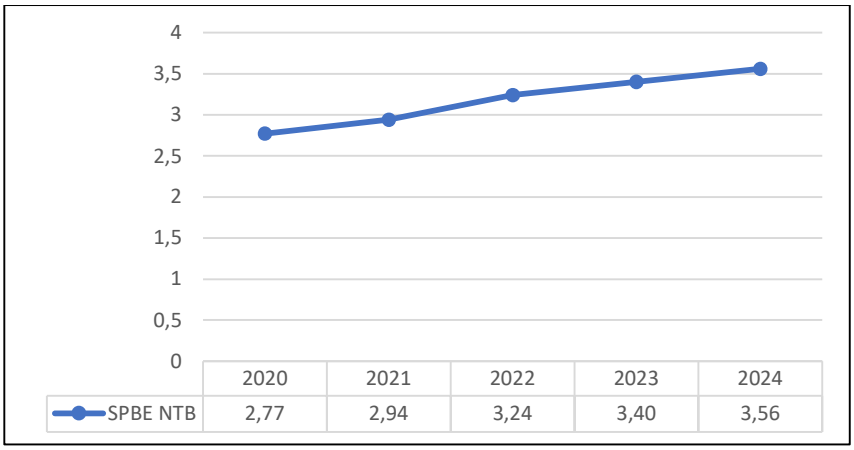

Sumber: data.ntbprov.go.id, 2025 (diolah)

Peningkatan ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Provinsi NTB dalam mengembangkan layanan digital publik yang terintegrasi, peningkatan infrastruktur teknologi informasi, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang digital. Capaian ini juga menjadi pondasi penting dalam mendukung reformasi birokrasi, mempercepat pelayanan publik, serta mendorong efisiensi anggaran dan peningkatan kepercayaan masyarakat.

Ke depan, Pemerintah Provinsi NTB akan terus mendorong penguatan arsitektur SPBE secara menyeluruh melalui integrasi layanan, interoperabilitas sistem, dan tata kelola data yang andal guna mendukung terwujudnya birokrasi digital yang adaptif dan inovatif. Selain itu, penguatan keamanan informasi dan perlindungan data pribadi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan SPBE di NTB. Pemerintah daerah juga terus berkolaborasi dengan instansi vertikal, perguruan tinggi, serta sektor swasta untuk mempercepat transformasi digital secara inklusif dan merata.

Peningkatan nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Provinsi NTB tidak hanya mencerminkan kemajuan dalam transformasi digital pemerintahan, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap perbaikan kualitas pelayanan publik. Melalui penerapan SPBE yang semakin matang, proses birokrasi menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel, yang pada gilirannya berkontribusi positif terhadap peningkatan Indeks Pelayanan Publik (IPP).

Grafik 2. 91 Perkembangan Indeks Pelayanan Publik Provinsi NTB Tahun 2020-2024

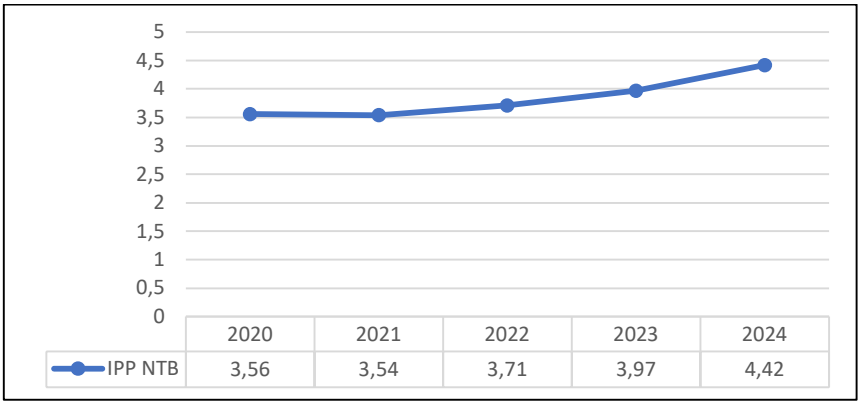

Sumber : Biro Organisasi Setda NTB, 2024 (diolah)

Capaian ini mencerminkan keberhasilan berbagai upaya reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas layanan di berbagai instansi pemerintah daerah, termasuk digitalisasi layanan, penyederhanaan prosedur, serta peningkatan kompetensi aparatur. Peningkatan IPP juga merupakan hasil sinergi dengan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mendukung efisiensi dan transparansi dalam pelayanan. Ke depan, Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen untuk terus memperkuat inovasi pelayanan publik yang berfokus pada kepuasan masyarakat, melalui peningkatan integrasi sistem layanan, perluasan akses layanan digital, serta penguatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja penyelenggara pelayanan publik.

2.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Dalam tahapan penanganan gangguan trantibum dan penegakan Perda dan Perkada terdapat tahap pencegahan diantara lain giat patroli, pengamanan, pengawalan, pembinaan dan penyuluhan, deteksi dini dan cegah dini, pengawasan perda dan perkada serta sosialisasi perda dan perkada, dari keseluruhan variabel tersebut dapat dipenuhi sesuai target namun terdapat dua variabel yang masih belum memenuhi target karena kurangnya pengawasan perda dan perkada dan sosialisasi perda dan perkada. Disisi lain bentuk penyelesaian pelanggaran perda dan perkada dalam kegiatan penanganan gangguan trantibum dan penegakan perda dapat dilakukan penyelesaian dari semua pelanggaran perda dan perkada yang terdeteksi dan/atau terlaporkan.

Tabel 2. 34 Indeks Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

No	INDIKATOR DALAM RPD 2024 - 2026	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET			Capaian						Rata-rata Persentase Capaian
				2024	2025	2026	2024		2025		2026		
							Kinerja	%	Kinerja	%	Kinerja	%	
1	Indeks Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	%	73%	100	100	100	136	136	-	-	-	-	136

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB, 2024

Selanjutnya perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi NTB selama periode 2020–2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, IDI NTB tercatat sebesar 74,27, kemudian mengalami penurunan menjadi 72,69 pada tahun 2021. Kondisi ini berangsur membaik pada tahun 2022 dengan capaian 73,38, namun kembali menurun pada tahun 2023 menjadi 70,03. Meskipun demikian, pada tahun 2024 capaian IDI NTB meningkat cukup signifikan hingga mencapai 76,37, yang sekaligus menjadi angka tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Dinamika capaian tersebut mencerminkan bahwa kualitas demokrasi di NTB masih berada pada kondisi yang relatif baik, meskipun belum sepenuhnya stabil. Penurunan capaian pada tahun 2021 dan 2023 mengindikasikan masih terdapat tantangan dalam konsolidasi demokrasi, terutama terkait dengan aspek kebebasan sipil, partisipasi politik, serta kinerja lembaga demokrasi. Namun, capaian positif pada tahun 2024 menunjukkan adanya perbaikan dalam praktik demokrasi di daerah, yang antara lain didorong oleh meningkatnya partisipasi masyarakat dan penguatan tata kelola politik yang lebih inklusif.

Tabel 2. 35 Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi NTB
Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Demokrasi Indonesia NTB	74,27	72,69	73,38	70,03	76,37

Sumber: BPS NTB, 2025

2.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen strategis untuk mengukur dan mengevaluasi kemampuan suatu daerah dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta daya saing jangka panjang. Bagi Provinsi NTB, IDSD menjadi salah satu barometer penting dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan yang berbasis pada potensi unggulan daerah, penguatan tata kelola, serta optimalisasi sumber daya manusia.

Indeks Daya Saing Daerah menjadi cermin dari kapasitas dan kesiapan NTB dalam bersaing di era ekonomi terbuka. Peningkatan IDSD tidak hanya menunjukkan

keberhasilan pembangunan, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menciptakan NTB yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

Tabel 2. 36 Perbandingan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Wilayah Bali-Nusa Tenggara Tahun 2022-2024

Tahun	2022	2023	2024
IDSD Provinsi NTB	3,22	3,44	3,50
IDSD Provinsi Bali	3,39	3,85	3,91
IDSD Provinsi NTT	3,20	3,42	3,41

Sumber : BRIN, 2024

Perkembangan IDSD menunjukkan dinamika positif di Provinsi NTB sepanjang periode 2022–2024. Nilai IDSD NTB meningkat dari 3,22 pada tahun 2022 menjadi 3,44 pada 2023, dan kembali naik menjadi 3,50 pada 2024. Kenaikan ini menandakan terjadinya perbaikan kondisi sosial-ekonomi desa, khususnya dalam aspek pelayanan dasar, infrastruktur, dan pengelolaan potensi lokal. Meskipun demikian, nilai IDSD NTB pada 2024 masih sedikit di bawah capaian Provinsi Bali yang mencapai 3,91, menandakan perlunya penguatan program pembangunan desa agar kesenjangan kualitas antarwilayah dapat semakin dipersempit.

Jika dibandingkan dengan Provinsi NTT, NTB menunjukkan capaian yang relatif lebih baik. NTT mencatat peningkatan dari 3,20 pada 2022 menjadi 3,42 pada 2023, namun sedikit menurun menjadi 3,41 pada 2024. Tren ini menunjukkan bahwa NTB tidak hanya mampu mempertahankan arah peningkatan, tetapi juga berhasil menjaga konsistensi perbaikan kondisi desa pada saat provinsi tetangga mengalami stagnasi.

Secara keseluruhan, capaian ini menegaskan efektivitas kebijakan pembangunan di NTB, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. sehingga penting dilakukan intervensi pembangunan dari komponen dasar daya saing yang diadopsi dalam pengukuran IDSD 2024, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Keempat komponen daya saing ini tetap dielaborasi ke dalam 12 pilar telah memberikan dampak positif terhadap kapasitas daya saing daerah.

Jika ditinjau per pilar, beberapa sektor menunjukkan kemajuan menonjol. Pilar Infrastruktur mengalami lompatan signifikan dari 3,03 (2022) menjadi 2,40 (2023) lalu naik tajam menjadi 3,10 (2024), menandakan adanya percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas. Pilar Adopsi TIK meningkat stabil dari 2,94 (2022) ke 3,26 (2023) dan 3,36 (2024), mencerminkan transformasi digital yang semakin merata. Pilar Keterampilan juga tumbuh pesat, dari 3,60 (2022) ke 3,64 (2023) dan melonjak ke 4,12 (2024), menunjukkan peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan. Pasar tenaga kerja naik dari 3,20 (2022) ke 3,35 (2023) lalu 3,66 (2024), menandakan efisiensi dan fleksibilitas pasar kerja yang lebih baik.

Meski demikian, beberapa pilar masih menghadapi tantangan. Pilar Institusi sempat naik dari 4,21 (2022) ke 4,37 (2023) namun sedikit turun menjadi 4,23 (2024), menandakan perlunya penguatan tata kelola pemerintahan dan kepastian hukum. Pilar Pasar Produk cenderung stagnan dan bahkan turun dari 3,48 (2022) ke 3,20 (2023) dan 3,66 (2024) tidak merata, sementara Pilar Sistem Keuangan menurun dari 3,90 (2022) ke 2,90 (2023) dan 2,78 (2024), menunjukkan keterbatasan akses dan inklusi keuangan. Pilar Kapabilitas Inovasi relatif stabil di kisaran 2,54–3,27 sepanjang periode.

Grafik 2. 92 Perbandingan Pilar IDSD Provinsi NTB Tahun 2022-2024

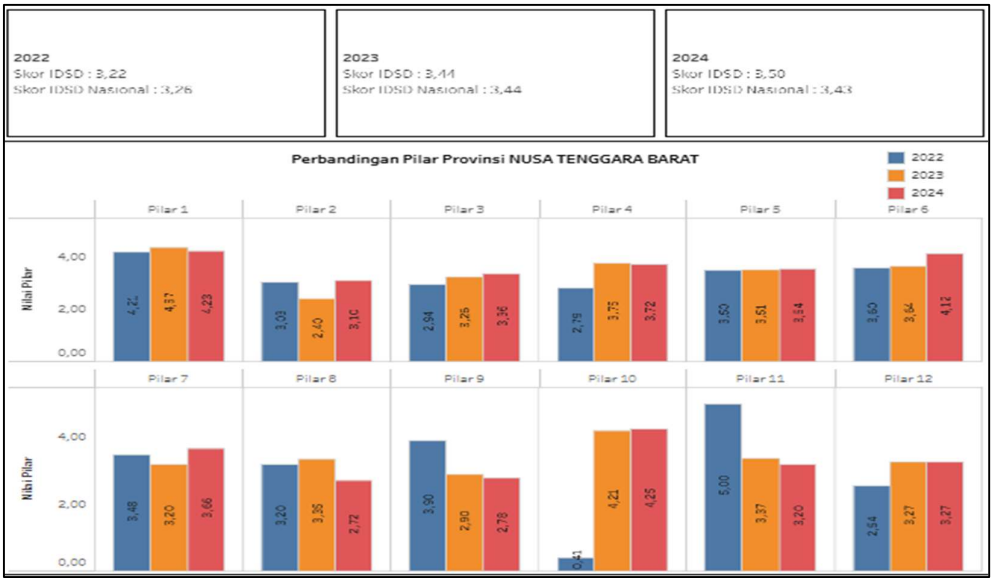

Sumber : BRIN, 2025

2.4.4 Kinerja setiap urusan pemerintahan daerah

2.4.4.1 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan bertujuan untuk menjadikan masyarakat memiliki kecakapan hidup (*life skills*) yang dapat mendorong pelaksanaan pembangunan. Guna pemenuhan hal tersebut, pemerintah berupaya melakukan jumlah fasilitas pendidikan, peningkatan mutu dan peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas bagi masyarakat. Salah satu indikator untuk menilai akses pendidikan adalah partsipasi sekolah. Indikator partisipasi sekolah merupakan gambaran pemerataan akses dan perluasan pelayanan pendidikan terhadap penduduk.

Tabel 2. 37 Progres Ketersediaan Satuan Pendidikan Tahun 2020 - 2024

Tahun	SMA		SMK		SLB	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
2020	159	173	97	223	16	29
2021	154	176	99	228	16	29

Tahun	SMA		SMK		SLB	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
2022	150	192	100	237	19	31
2023	150	192	100	239	19	31
2024	150	229	100	236	21	34

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun ketersediaan satuan pendidikan baik SMA, SMK maupun SLB terus mengalami peningkatan dari segi jumlahnya dengan kondisi sampai akhir tahun 2024 terdapat 377 sekolah yang terdiri dari 150 SMA Negeri dan 227 SMA Swasta, sedangkan untuk SMK terdapat 338 sekolah yang terdiri dari SMK Negeri sebanyak 100 sekolah dan SMK Swasta 238 sekolah dan untuk SLB terdapat 55 sekolah yang terdiri dari SLB Negeri sebanyak 21 sekolah dan SLB Swasta sebanyak 34 sekolah, sehingga total satuan Pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi adalah sebanyak 770 satuan Pendidikan yang terdiri dari 271 satuan Pendidikan negeri dan 499 satuan Pendidikan swasta.

Isu penting tentang keberadaan seorang guru dalam mendukung proses pembelajaran tercantum dalam salah satu target Sustainable Development Goals (SDG's) 4.c yaitu pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas.

Tabel 2. 38 Rasio Guru per Jenjang Terhadap Peserta Didik Tahun 2020 - 2024

Tahun	Rasio Guru terhadap Peserta Didik SMA		Rasio Guru terhadap Peserta Didik SMK		Rasio Guru terhadap Peserta Didik SLB	
	Standar Nasional	NTB	Standar Nasional	NTB	Standar Nasional	NTB
2020	01:20	01:18	01:15	01:18	01:05	01:10
2021	01:20	01:18	01:15	01:18	01:05	01:10
2022	01:20	01:11	01:15	01:11	01:05	01:07
2023	01:20	01:10	01:15	01:11	01:05	01:05
2024	01:20	01:12	01:15	01:12	01:05	01:07

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2025

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa ketersediaan guru baik pada jenjang SMA, SMK dari tahun ke tahun terus meningkatkan dan bahkan ditahun 2024 rasio ketersedian guru terhadap peserta didik pada jenjang SMA, SMK berada diatas Standar Nasional yaitu untuk SMA 1:12 dengan standar nasional 1:20 dan untuk SMK 1:12 dengan standar nasional 1:15 dan untuk SLB rasio ketersedian guru SLB terhadap peserta didik SLB yaitu 1:17 dibawah standar nasional yaitu 1:5. Peningkatan jumlah guru tersebut diikuti oleh peningkatan persentase guru yang memenuhi kualifikasi akademik minimal S1/D4. Meskipun telah terjadi peningkatan jumlah guru, distribusi guru yang ideal dan menyeluruh masih menjadi tantangan.

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu, baik pada pendikan formal (SD, SMP dan SMA/SMK) maupun pendidikan nonformal (Paket A, Paket B, dan

Paket C). APK yang tinggi menunjukkan tingkat partisipasi sekolah tinggi. Perkembangan APK pada jenjang SD/sederajat, SMP/sederajat dan SMA/sederajat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 39 Angka Partisipasi Kasar (APK) di Provinsi NTB Tahun 2020-2024

No	Tahun	APK SD/MI/ Paket A (%)	APK SMP/MTS/ Paket B (%)	APK SMA/MA/SMK/ Paket C (%)
1	2020	107,02	93,59	91,77
2	2021	107,23	93,72	93,75
3	2022	107,21	92,59	93,68
4	2023	107,07	93,32	93,23
5	2024	105,8	92,28	95,79

Sumber: BPS (Statistik Pendidikan Indonesia)

Dari tabel di atas diketahui bahwa APK SD/sederajat mencapai maksimal, sedangkan APK SMP/sederajat dan APK SMA/sederajat sudah cukup tinggi, walau belum mencapai maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin peduli akan pentingnya pendidikan seiring dengan semakin mudahnya masyarakat mengakses layanan pendidikan.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan, baik pada pendidikan formal maupun nonformal. Perkembangan APM di Provinsi NTB tahun 2019-2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 40 Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi NTB Tahun 2020 -2024

No	Tahun	APM SD/MI/Paket A (%)	APM SMP/ MTS/Paket B (%)	APM SMA/MA/SMK/ Paket C (%)
1	2020	98,78	84,98	66,81
2	2021	98,81	85,28	67,09
3	2022	98,83	86,05	67,61
4	2023	98,76	84,03	68,04
5	2024	98,57	83,55	71,09

Sumber: BPS (Statistik Pendidikan Indonesia)

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa dari ketiga jenjang pendidikan, nilai APM cenderung mengalami kenaikan dari tahun 2020 sampai 2024. APM mendekati 100 persen menunjukkan bahwa hampir 100 persen penduduk bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan usianya, sementara APM yang semakin rendah menunjukkan masih banyak penduduk yang tidak bersekolah pada jenjang yang sesuai usianya.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok

umur yang sesuai, baik pada pendidan formal maupun non formal. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Perekembangan APS disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 41 Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Provinsi NTB Thn 2019-2024

No	Tahun	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	19-24 Tahun
1	2020	99,52	98,32	77,64	25,97
2	2021	99,52	98,34	77,49	26,22
3	2022	99,17	97,74	77,43	25,64
4	2023	99,46	97,95	77,46	28,48
5	2024	99,47	97,86	77,81	28,88

Sumber: BPS (Statistik Pendidikan Indonesia), 2024

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, maka APS semakin rendah. Hal ini menunjukkan bahwa akses layanan pendidikan jenjang SD dan SMP cukup tinggi seiring adanya program wajib belajar 9 tahun, pembangunan rumah singgah dan penambahan ruang kelas baru serta dana BOS untuk membantu operasional sekolah. Sementara itu, APS usia 16-18 tahun (jenjang SMA) mengalami peningkatan 77,81 pada tahun 2024. Sedangkan usia 19-24 tahun (jenjang perguruan tinggi) cenderung fluktuatif pada tahun 2024 naik menjadi 28,88. APS kedua kelompok ini masih tergolong rendah disebabkan terbatasnya akses pendidikan menengah dan tinggi di kabupaten, kecamatan dan daerah terpencil.

Perkembangan terhadap angka melanjutkan sekolah dan angka drop out di Provinsi NTB cenderung membaik yang merupakan alat untuk mengukur kinerja pembangunan bidang pendidikan yang berimplikasi pada pencapaian rata-rata lama sekolah dan meningkatnya APK, APM dan APS pendidikan menengah.

Tabel 2. 42 Angka Melanjutkan dari Lulusan SMA ke Perguruan Tinggi Provinsi NTB Tahun 2024

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah Siswa	Angka Melanjutkan	(%)
1.	Kabupaten Lombok Barat	2.930	1.047	35,73
2.	Kabupaten Lombok Tengah	4.697	2.461	52,39
3.	Kabupaten Lombok Timur	6.196	3.784	61,07
4.	Kabupaten Lombok Utara	1.344	662	79,26
5.	Kabupaten Sumbawa	3.014	1.730	57,39
6.	Kabupaten Sumbawa Barat	1.110	472	42,52
7.	Kabupaten Dompu	2.787	1.514	54,32
8.	Kabupaten Bima	4.818	2.344	46,65
9.	Kota Mataram	3.141	2.208	70,29
10.	Kota Bima	1.392	924	66,37
JUMLAH		**31.429**	17.146	**54,55**

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2025

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa angka melanjutkan sekolah dari jenjang SMA ke Perguruan Tinggi Tahun 2024 sebesar 54,55 persen atau sebanyak 17.146 orang dari total 31.429 orang, data ini belum mencapai target yang ditetapkan karena sekolah khususnya SMA sedang melakukan penelusuran lulusan dan biasanya akan terkumpul di akhir Januari atau awal Februari tahun berjalan.

Tabel 2. 43 Angka Putus Sekolah (DO) SMA dan SMK Provinsi NTB dari Tahun 2017/2018 - 2023/2024

No.	Tahun	Angka Putus Sekolah (DO) SMA dan SMK			
		SMA	%	SMK	%
1	2017/2018	422	0,4	548	0,81
2.	2018/2019	393	0,37	465	0,65
3.	2019/2020	47	0,05	249	0,34
4.	2000/2021	972	0,92	1.241	1,91
5.	2021/2022	157	0,15	172	0,23
6.	2022/2023	117	0,1	157	0,15
7.	2023/2024	28	0,03	41	0,06

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa selama lima tahun terakhir Drop Out jenjang SMA dan SMK di NTB menunjukkan angka yang fluktuatif. Tahun 2024 pada jenjang SMA sebanyak 28 orang atau sebesar 0,03 persen dari total jumlah murid, artinya telah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 0,10 persen. Sedangkan untuk jenjang SMK jumlah Drop Out sebanyak 41 orang atau 0.06 persen dari total jumlah murid, telah melampaui target yang ditetapkan yaitu 0,15 persen hal ini disebabkan adanya SMA terbuka yang sebagian besar peserta didiknya berasal dari anak drop out dan putus sekolah.

Selain itu upaya yang dilakukan pemerintah untuk penurunan DO ini adalah dengan melakukan validasi data DO pada semua satuan Pendidikan SMA dan SMK baik negeri dan swasta dan salah satu hasil yang diperoleh pada saat melakukan asistensi dengan operator DAPODIK di satuan pendidikan adalah terdapat data peserta didik yang seharusnya tercatat mutasi namun dalam data PUSDATIN Kemendikbud ristek RI teridentifikasi sebagai DO karena sekolah tujuan mutasi melakukan pengentrian baru ke DAPODIK seharusnya anak yang mutasi tersebut datanya harus diangkat dari data sekolah awal sehingga anak tersebut tercatat sebagai mutasi bukan DO.

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variable pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Rata-rata lama sekolah (mean years of schooling) merupakan indikator yang menunjukkan rata-rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah

yang dicapai penduduk. Jumlah tahun efektif adalah jumlah tahun standar yang harus dijalani oleh seseorang untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan misalnya tamat SD adalah enam tahun, tamat SMP adalah sembilan tahun dan seterusnya. Perhitungan lama sekolah dilakukan tanpa memperhatikan apakah seseorang menamatkan sekolah lebih cepat atau lebih lama dari waktu yang telah ditetapkan. Semakin tinggi angka RLS maka semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan.

Tabel 2. 44 Rata-rata Lama Sekolah Provinsi NTB Tahun 2019-2024

No.	Kab/Kota	Rata-Rata Lama Sekolah					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Lombok Barat	6,37	6.41	6.42	6.60	6,87	6,88
2.	Lombok Tengah	6,27	6.28	6.29	6.44	6,61	6,73
3.	Lombok Timur	6,69	6.70	6.71	7.04	7,12	7,36
4.	Sumbawa	7,91	7.92	8.15	8.21	8,52	8,59
5.	Dompu	8,40	8.44	8.72	8.73	8,97	9,04
6.	Bima	7,77	7.78	7.91	8.17	8,29	8,3
7.	Sumbawa Barat	8,53	8.66	8.72	8.90	8,98	8,99
8.	Lombok Utara	5,84	5.91	6.04	6.30	6,39	6,4
9.	Kota Mataram	9,45	9.46	9.54	9.55	9,56	9,58
10.	Kota Bima	10,38	10.49	10.65	10.94	10,95	10,96
NTB		7,27	7,31	7,38	7,61	7.74	7,87

Sumber : BPS NTB, 2024 (diolah).

Tabel diatas menunjukkan rata-rata lama sekolah di Provinsi NTB mengalami peningkatan dari tahun 2019 - 2024. Rata-rata lama sekolah tahun 2024 sebesar 7.87 tahun ini artinya penduduk NTB yang berusia 25 tahun ke atas memiliki rata-rata lama sekolah 7,87 tahun, atau rata-rata penduduk usia 25 tahun keatas di NTB telah menamatkan pendidikan minimal kelas VII (atau kelas 2 SMP/sederajat).

Untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan bagi peserta didik secara berkualitas, terukur, cepat, dan terjangkau, diperlukan standar teknis pelayanan minimal pendidikan yang sesuai jenjang dan jalur pendidikannya. Standar teknis ini untuk membantu pemerintah daerah memahami indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM) di bidang pendidikan. Pengukuran capaian SPM tersebut harus menggunakan data yang akurat, sahih, dan terkini yang akan dijadikan dasar oleh seluruh pemangku kepentingan bidang pendidikan. Kemendikbudristek dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menetapkan delapan (8) indikator prioritas untuk provinsi dan delapan (8) indikator prioritas untuk Kab/Kota yang terdapat pada platform Rapor Pendidikan sebagai indikator prioritas Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan pendidikan. Kedelapan indikator ini akan digunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Daerah bidang pendidikan dalam pencapaian SPM. Mutu dan daya saing pendidikan relatif masih rendah, hal ini dapat dilihat dari tingkat capaian pada 29

(Dua Puluh Sembilan) SPM bila dibandingkan di Tingkat Nasional (sumber data Kemdikdasmen tahun 2025) adalah:

Tabel 2. 45 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan

No.	Indikator	Realisasi							
		2021		2022		2023		2024	
		NAS	NTB	NAS	NTB	NAS	NTB	NAS	NTB
1	Rerata Kompetensi Literasi SMA	62,78	56,99	62,95	55,31	68,38	61,98	71,99	64,78
2	Rerata Kompetensi Literasi SMK	60,11	53,68	59,06	51,13	64,4	56,97	67,3	58,58
3	Rerata Kompetensi Literasi SDLB	55,88	51,85	58,21	46,02	61,39	49,69	65,59	54,18
4	Rerata Kompetensi Literasi SMPLB	60,97	57,95	60,81	55,56	62,74	53,60	71,31	61,53
5	Rerata Kompetensi Literasi SMLB	59,11	53,19	55,40	50,62	59,6	53,08	68,33	61,92
6	Rerata kompetensi Numerasi SMA	50,67	47,64	53,20	48,43	58,18	53,48	60,54	55,43
7	Rerata Kompetensi Numerasi SMK	49,45	47,04	50,60	46,09	55,1	50,44	56,91	51,58
8	Rerata Kompetensi Numerasi SDLB	45,85	41,49	48,54	38,26	54,4	42,02	62,17	50,79
9	Rerata Kompetensi Numerasi SMPLB	55,38	53,49	56,04	50,78	61,03	54,93	66,75	59,4
10	Rerata Kompetensi Numerasi SMLB	49,86	48,69	51,37	45,31	55,44	49,31	63,34	59,22
11	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	29,93	34,01	87,07	86,56	85,62	84,94	84,64	84,07
12	Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	70,90	100,00	70,90	100,00	80,5	91,87	81,1	86,21
13	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18	73,09	77,50	73,15	77,43	73,42	77,46	74,64	77,81
14	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 4-18 Penyandang Disabilitas	28,31	29,89	26,03	25,66	56,39	48,86	58,06	48,86
15	Indeks Iklim Keamanan SMA	74,26	74,68	69,09	78,09	71,83	69,04	71,33	68,18
16	Indeks Iklim Keamanan SMK	71,87	67,49	66,83	73,89	68,94	65,26	68,28	63,82
17	Indeks Iklim Keamanan SDLB	80,06	78,00	76,12	76,88	74,77	70,89	76,53	71,03
18	Indeks Iklim Keamanan SMPLB	79,48	75,07	72,46	76,89	71,53	68,65	72,27	71,91
19	Indeks Iklim Keamanan SMALB	78,23	74,28	70,79	77,13	70,77	67,07	70,75	70,8
20	Indeks Iklim Kebinekaan SMA	61,56	63,08	67,68	73,82	73,85	71,78	71,9	68,53
21	Indeks Iklim Kebinekaan SMK	60,15	58,87	65,23	66,50	70,75	67,70	68,6	65,18
22	Indeks Iklim Kebinekaan SDLB	60,38	61,05	70,18	78,34	66,35	62,66	69,78	63,87
23	Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB	60,46	57,55	66,89	71,59	66,38	64,17	69,47	63,52
24	Indeks Iklim Kebinekaan SMALB	60,97	66,76	66,41	68,43	66,57	60,71	69,99	65,6
25	Indeks Iklim Inklusivitas SMA	53,42	65,39	56,27	73,68	58,9	55,46	59,98	56,31
26	Indeks Iklim Inklusivitas SMK	52,67	62,80	54,90	69,76	56,19	52,85	56,63	52,99
27	Indeks Iklim Inklusivitas SDLB	58,31	75,93	59,94	69,60	60,17	53,76	67,66	61,34
28	Indeks Iklim Inklusivitas SMPLB	58,18	70,80	62,58	74,25	65,05	60,58	68,71	63,06
29	Indeks Iklim Inklusivitas SMALB	58,77	70,08	61,93	74,40	64,54	56,07	67,21	64,03

Sumber : data Kemdikdasmen, 2025

2. Kesehatan

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan salah satu indikator utama dalam pengukuran Indeks Modal Manusia (IMM), yang mencerminkan keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. AHH mengindikasikan rata-rata usia harapan hidup seseorang sejak lahir, dengan

mempertimbangkan kondisi kesehatan, lingkungan, pelayanan medis, dan perilaku hidup sehat.

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, UHH Provinsi NTB mengalami peningkatan secara konsisten, dari 71,17 tahun pada tahun 2020 menjadi 72,25 tahun pada tahun 2024. Kenaikan sebesar 1,08 tahun dalam lima tahun terakhir ini menunjukkan tren positif terhadap perbaikan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, UHH nasional juga meningkat dari 73,37 tahun (2020) menjadi 74,15 tahun (2024). Meskipun UHH Provinsi NTB masih berada di bawah rata-rata nasional, terdapat penyempitan kesenjangan, dari selisih 2,20 tahun pada tahun 2020 menjadi 1,90 tahun pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pembangunan kesehatan di NTB semakin mendekati capaian nasional, yang merupakan indikator positif terhadap keberhasilan program pembangunan daerah.

Grafik 2. 93 Perbandingan UHH Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2020-2024

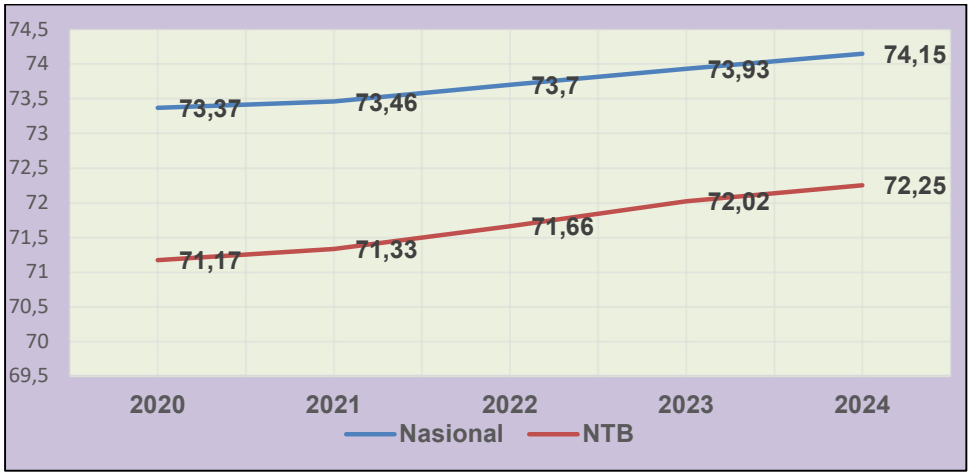

Sumber : BPS Provinsi NTB, 2024

Selanjutnya data per wilayah kabupaten dan kota menunjukkan bahwa capaian Angka Harapan Hidup tahun 2024 tertinggi di capai Kota Mataram yakni sebesar 74,83 tahun dan capaian terendah adalah Kabupaten Lombok Utara yakni sebesar 71,52 tahun. Capaian Usia Harapan Hidup per kabupaten dan kota selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 46 Usia Harapan Hidup Per Kab/Kota Tahun 2020-2024

KABUPATEN/ KOTA	USIA HARAPAN HIDUP KAB/KOTA TAHUN 2019-2024				
	2020	2021	2022	2023	2024
Lombok Barat	66,94	67,19	67,63	72,37	72,64
Lombok Tengah	67,17	67,36	66,75	71,39	71,59
Lombok Timur	66,21	66,38	66,55	71,72	71,95

KABUPATEN/ KOTA	USIA HARAPAN HIDUP KAB/KOTA TAHUN 2019-2024				
	2020	2021	2022	2023	2024
Sumbawa	65,9	66,16	68,12	72,41	72,67
Dompu	68,07	68,31	67,36	71,54	71,76
Bima	67,54	67,73	66,87	71,65	71,88
Sumbawa Barat	66,62	66,99	68,74	72,65	72,97
Lombok Utara	66,33	66,5	67,75	71,26	71,52
Kota Mataram	71,76	71,88	71,76	74,65	74,83
Kota Bima	70,38	70,5	70,83	72,97	73,15
PROVINSI NTB	**71,17**	**71,33**	**71,66**	**72,02**	**72,25**

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2024

Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan indikator utama untuk menilai derajat kesehatan masyarakat, khususnya dalam kelompok rentan seperti bayi baru lahir dan ibu hamil. Penurunan kedua indikator ini secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH), yang merupakan salah satu komponen utama dalam pengukuran IMM.

Tabel 2. 47 Jumlah Kasus Kematian Bayi (AKB) di Provinsi NTB Thn 2020-2024

No	Kab/Kota	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Lombok Barat	42	46	43	116	70
2	Lombok Tengah	194	189	192	128	119
3	Lombok Timur	297	237	219	172	157
4	Sumbawa	76	64	59	60	64
5	Dompu	36	44	65	43	59
6	Bima	81	83	71	76	91
7	Sumbawa Barat	13	13	18	12	19
8	Lombok Utara	69	60	60	53	37
9	Kota Mataram	37	56	45	63	60
10	Kota Bima	14	19	16	19	225
NTB		**859**	**811**	**788**	**742**	**701**

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2024

Pada tabel di atas terlihat bahwa jumlah kematian bayi dalam 5 tahun terakhir terus menurun. Capaian ini cukup akseleratif untuk mendukung pencapaian indikator angka harapan hidup (AHH). Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah menjadi kabupaten dengan kasus kematian bayi tertinggi, sedangkan Sumbawa Barat dan Kota Bima merupakan kabupaten dengan kasus kematian bayi terendah. Penyebab kematian bayi terbanyak tahun 2024 penyebab lain-lainnya (174 kasus), BBLR (158 kasus) dan Afiksia (150 kasus), Infeksi (136 kasus), Penyebab lain adalah kelainan bawaan (46 kasus), RDS Berat (30 kasus), Pneumonia (28 kasus), dan Sepsis (20 kasus) dan Faktor jumlah penduduk dan sosial budaya adalah sebagian faktor di luar kesehatan yang berpengaruh terhadap jumlah kasus kematian bayi.

Tabel 2. 48 Proporsi Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Provinsi NTB Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi (per 1.000 KH)	8,38	8,23	7,92	8,36	8,76

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2024.

Pada tahun 2020 hingga 2022, terjadi penurunan angka kematian bayi dari 8,38 menjadi 7,92 per 1.000 kelahiran hidup. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan awal berbagai program intervensi kesehatan bayi baru lahir, termasuk peningkatan cakupan imunisasi, pemantauan tumbuh kembang, dan perbaikan gizi ibu dan bayi.

Namun, pada tahun 2023 dan 2024, AKB kembali meningkat hingga mencapai 8,76 per 1.000 kelahiran hidup. Kenaikan ini menjadi perhatian serius karena dapat mengindikasikan adanya penurunan kualitas pelayanan kesehatan, ketimpangan akses terhadap layanan kesehatan dasar, atau belum optimalnya fungsi sistem rujukan serta layanan pasca-persalinan. Kondisi ini berpengaruh signifikan terhadap capaian AHH Provinsi NTB yang ikut mengalami peningkatan. Kematian bayi terkait erat dengan kematian ibu. Berikut gambaran kasus kematian ibu di Provinsi NTB.

Tabel 2. 49 Jumlah Kasus Kematian Ibu (AKI) di Provinsi NTB Tahun 2020-2024

No	Kab/Kota	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Lombok Barat	14	12	8	16	5
2	Lombok Tengah	29	33	19	22	21
3	Lombok Timur	43	45	34	22	24
4	Sumbawa	11	9	8	6	8
5	Dompu	1	7	2	3	1
6	Bima	10	12	10	9	8
7	Sumbawa Barat	1	2	2	1	4
8	Lombok Utara	3	3	3	2	2
9	Kota Mataram	7	15	8	5	4
10	Kota Bima	3	6	3	5	2
NTB		**122**	**144**	**97**	**91**	**79**

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2024.

Dari tabel di atas, diketahui bahwa kasus kematian ibu selama lima tahun terakhir tahun 2020-2024 mengalami penurunan kecuali pada tahun 2021. Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur menjadi daerah dengan jumlah kematian ibu tertinggi tahun 2024. Penyebab kematian ibu terbanyak tahun 2023 adalah pendarahan (23 kasus) dan tidak tahu/lain-lain (21 kasus). Penyebab lain adalah eklampsia (13 kasus), jantung (8 kasus), infeksi (7 kasus), hipertensi (6 kasus), komplikasi obstetri lain (4 kasus), gangguan metabolik (2 kasus), placenta previa (2 kasus), obstetric embolism (2 kasus), komplikasi non obstetrik (2 kasus), dan covid 19 (1 kasus).

Tabel 2. 50 Proporsi Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup di Provinsi NTB Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi (per 100.000 KH)	119,05	146,69	85,3	102,51	102,51

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2023.

Dari tabel di atas terlihat bahwa proporsi angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup selama tahun 2020-2024 cenderung fluktuatif. Tahun 2020 dan 2021 kenaikan kasus kematian tertinggi karena pandemi Covid-19 sehingga akses ke pelayanan kesehatan terbatas. Selain itu, tahun 2021 jumlah kelahiran hidup tidak mencapai 100.000 kelahiran. Progres positif didukung oleh peningkatan kualitas pelayanan baik dari sumberdaya manusianya, perbaikan koordinasi dan monitoring evaluasi yang intens serta pembinaan layanan kesehatan ibu dan anak.

Perbaikan kualitas pelayanan ditunjukkan dengan pencapaian positif dari pelayanan antenatal (ANC) K1 s/d K4, pertolongan persalinan, pelayanan Kesehatan ibu nifas, pelayanan kesehatan neonatus, deteksi dini komplikasi kehamilan, pelayanan Kesehatan bayi, pelayanan kesehatan anak dan balita serta kualitas KB.

Tabel 2. 51 Capaian Indikator Pendukung Kematian Bayi dan Kematian Ibu di Provinsi NTB Tahun 2020 – 2024 (dalam %)

Indikator	2020		2021		2022		2023		2024	
	Target	capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
K1	100	105,05	100	101,8	100	97,05	90	98,9	100	73,67
K4	98	95,94	98	93,4	98	88,05	92	81,9	95	73,08
Komplikasi Maternal	90	126,72	90	119,5	90	131,51	20	27,66	20	30,09
Persalinan oleh Nakes	90	97,79	90	96,7	90	92,45	90	86,4	90	71,44
Persalinan di Faskes	96,5	97,44	97	95,1	85	91,44	90	70,3	95	69,41
Kunjungan Ibu Nifas	95	96,26	95	91,9	95	87,67	92	79,83	95	71,4
Kunjungan Neonatal 1	96	102,46	96	100,1	96	95,19	96	90,02	96	75,95
Kunjngan Neonatal 3	96	97,44	96	97,8	96	92,96	93	88,4	95	74,95
Komplikasi Neonatal	84	70,65	84	65,1	84	63,69	15	6,58	15	5,79
Kunjungan Bayi IV	96	101,19	96	99,8	96	97,12	96	67,01	96	77,94
Kunjungan Balita II	85	80,36	85	74,62	85	82,97	80	83	85	85,81

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2024.

Kinerja penyelenggaraan pelayanan kesehatan, selain data/informasi kesehatan ibu dan anak, data kekurangan gizi, khususnya stunting, merupakan data strategis dalam analisis pembangunan kualitas sumber daya manusia. Angka stunting berkorelasi positif dengan angka kemiskinan. Pelaporan stunting melalui aplikasi elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Provinsi NTB berfluktuatif dalam 5 tahun terakhir. Prevalensi stunting tahun 2019 sebesar 19,02 %, meningkat menjadi 23,51 % pada 2020, kemudian mengalami

penurunan menjadi 19,23 % pada tahun 2021 dan menurun pada tahun 2022 menjadi 16,99%. Kembali menurun pada tahun 2024 sebesar 12,17 %.

Grafik 2. 94 Prevalensi Stunting Kab./Kota se-NTB Tahun 2019-2024

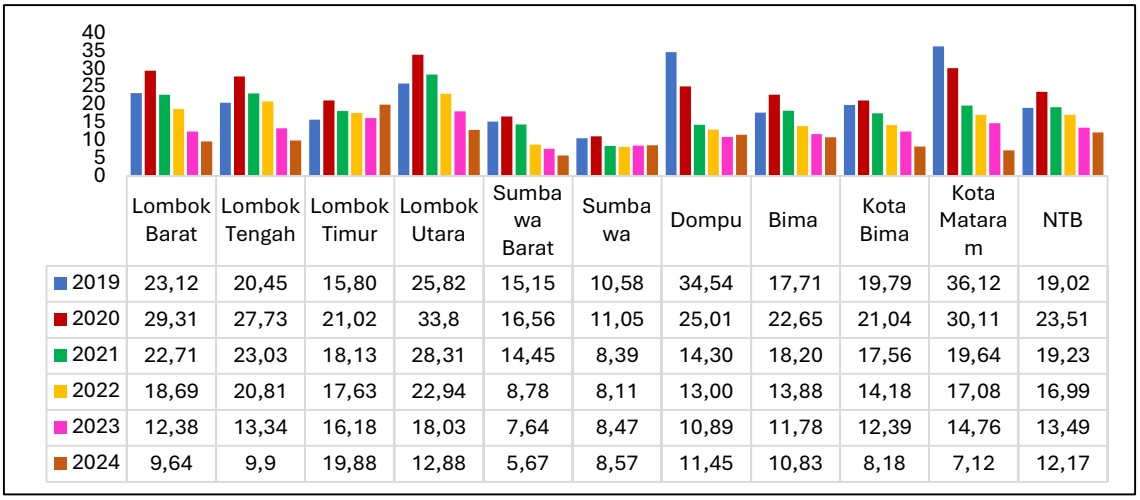

	Lombok Barat	Lombok Tengah	Lombok Timur	Lombok Utara	Sumbawa Barat	Sumbawa	Dompu	Bima	Kota Bima	Kota Mataram	NTB
2019	23,12	20,45	15,80	25,82	15,15	10,58	34,54	17,71	19,79	36,12	19,02
2020	29,31	27,73	21,02	33,8	16,56	11,05	25,01	22,65	21,04	30,11	23,51
2021	22,71	23,03	18,13	28,31	14,45	8,39	14,30	18,20	17,56	19,64	19,23
2022	18,69	20,81	17,63	22,94	8,78	8,11	13,00	13,88	14,18	17,08	16,99
2023	12,38	13,34	16,18	18,03	7,64	8,47	10,89	11,78	12,39	14,76	13,49
2024	9,64	9,9	19,88	12,88	5,67	8,57	11,45	10,83	8,18	7,12	12,17

Sumber Data: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2025 (diolah).

Penanggulangan stunting erat kaitannya dengan pendidikan atau edukasi gizi bagi masyarakat, yang ditunjukkan dengan terus meningkatnya partisipasi masyarakat di posyandu, disamping faktor asupan gizi yang terus membaik. Hygiene sanitasi lingkungan dan perorangan serta akses air bersih yang terus membaik berkorelasi positif dengan penurunan kasus stunting. Berikut data pencapaian proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tabel 2. 52 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian
Proporsi RT dengan Akses Sanitasi Layak	80,27	80,5	81,83	83,12	85,45

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2024.

Akses terhadap sanitasi layak merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan kesehatan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat. Sanitasi layak berkontribusi besar terhadap penurunan penyakit menular, perbaikan status gizi, dan peningkatan derajat kesehatan secara umum, serta menjadi salah satu penentu Angka Harapan Hidup (AHH).

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, capaian proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak di Provinsi NTB menunjukkan tren peningkatan yang stabil dan signifikan. Kondisi ini didukung oleh komitmen semua pihak untuk menuntaskan pilar-

pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Untuk Pilar 1 terkait Open Defecation Free (ODF) atau Stop Buang Air besar Sembarangan (SBS) Provinsi NTB adalah Provinsi Ke-2 di Indonesia yang dinyatakan ODF pada tahun 2022. Berikut data capaian ODF tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tabel 2. 53 Capaian Cakupan Desa ODF Tahun 2019-2024

NO	KABUPATEN / KOTA	CAKUPAN DESA ODF (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kota Mataram	78	100	100	100	100
2.	Kab. Lombok Barat	77,05	100	100	100	100
3.	Kab. Lombok Tengah	61,87	100	100	100	100
4.	Kab. Lombok Timur	46,06	91,34	100	100	100
5.	Kab. Lombok Utara	27,27	66,67	100	100	100
6.	Kab. Sumbawa Barat	100	100	100	100	100
7.	Kab. Sumbawa	55,42	66,87	100	100	100
8.	Kab. Dompu	39,24	72,46	100	100	100
9.	Kab. Bima	72,25	63,87	100	100	100
10.	Kota Bima	39,47	60,61	100	100	100
	NTB	**63,85**	**82,06**	**100**	**100**	**100**

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2025 (diolah).
Catatan : Tahun 2023 Cakupan Desa ODF 100 sama dengan tahun 2022

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator keberhasilan dari sektor infrastruktur bidang pekerjaan umum adalah persentase capaian kinerja infrastruktur yang meliputi Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi, akses layanan air minum, kinerja irigasi, cakupan drainase. Capaian sepanjang Tahun 2020 – 2024 menunjukan kondisi yang dinamis, dapat dirincikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 54 Capaian Kinerja Infrastruktur Provinsi NTB Tahun 2020 - 2024

No	Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kemantapan Jalan	%	80,05	84,01	84,52	79,94	75,54
2	Kemantapan Sistem Irigasi	%	48,11	50,88	52,91	56,87	62,93
3	Layanan Akses Air Minum	%	74.67	78.76	79,11	83,12	84,41
4	Sanitasi	%	4,29	4,4	5,53	5,56	6,84

Sumber : Dinas PUPR Provinsi NTB, 2025

Capaian kemantapan jalan cenderung mengalami penurunan disebabkan oleh hal-hal antara pemeliharaan yang dilakukan tidak merata di seluruh ruas jalan provinsi,

selain itu akibat kelebihan kapasitas atau over-dimension over-loading (ODOL) yang mengakibatkan umur konstruksi jalan yang seharusnya bisa bertahan lama menjadi lebih cepat rusak.

Capaian kinerja layanan akses air minum mengalami peningkatan. Hal ini merupakan dampak positif dari kolaborasi berbagai pihak baik pemerintah pusat melalui APBN dan sumber pendanaan lainnya seperti Loan Bank Dunia (Program ITDP/P3TB), Kab/Kota yang melakukan pembangunan, peningkatan, maupun rehabilitasi/optimalisasi infrastruktur.

Capaian Kemantapan Sistem Irigasi mengalami peningkatan. Hal ini merupakan dampak dari sinkronisasi program baik yang dilakukan pemerintah pusat, provinsi dan Kab/Kota melalui pembangunan, peningkatan, optimalisasi sistem irigasi.

Capaian Sanitasi Aman mengalami peningkatan. Namun masih terdapat perbedaan formula perhitungan antara provinsi dan Kab/Kota. Perhitungan provinsi berdasarkan pedoman pengukuran capaian pembangunan perumahan dan permukiman berbasis hasil, dimana dipersyaratkan SPALD-S melakukan penyedotan minimal 3-5 tahun sekali, sementara kab/kota mengklaim seluruh SPALD-S terbangun yang berstandar SNI tidak perlu melakukan penyedotan.

Untuk mengetahui efektifitas penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang dilaksanakan sampai dengan tahun 2023, Tahun 2024 telah dilakukan perhitungan kepuasan layanan infrastruktur dan menghasilkan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI). Dimana variabel pendukungnya meliputi Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi, akses layanan air minum, kinerja irigasi, persampahan, drainase. Berdasarkan hasil perhitungan Tahun 2024, poin IKLI adalah 75,83. Ini menunjukan bahwa kepuasan layanan infrastruktur bidang pekerjaan umum kurang baik. Hal ini dipengaruhi oleh poin masing-masing variabel sebagai berikut:

Dari lima jenis layanan infrastruktur yang diukur, dua layanan memperoleh kategori “Baik”, yaitu Jalan dan Jembatan (81,35%): Merupakan infrastruktur dengan tingkat kepuasan tertinggi, yang menunjukkan kinerja pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi sudah dirasakan manfaatnya secara luas oleh masyarakat. Irigasi (78,65%): Menunjukkan bahwa masyarakat petani dan pelaku sektor pertanian cukup puas terhadap fungsi dan ketersediaan sistem irigasi yang mendukung produktivitas lahan pertanian.

Sementara itu, tiga layanan lainnya berada dalam kategori “Kurang Baik”, yaitu Air Minum (73,40%): Capaian ini menunjukkan masih terbatasnya cakupan layanan air minum yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan di beberapa wilayah. Persampahan (75,04%): Menandakan bahwa sistem pengelolaan sampah, termasuk pengangkutan, pengolahan, dan tempat pembuangan akhir, belum optimal. Drainase (73,77%): Mengindikasikan bahwa sistem drainase di beberapa wilayah belum efektif dalam mengatasi genangan dan banjir lokal, terutama saat musim hujan.

Indeks ini menunjukkan bahwa akses dan kualitas infrastruktur strategis seperti jalan dan irigasi telah menjangkau masyarakat secara luas, namun masih terdapat tantangan dalam sektor utilitas dasar, khususnya air minum, drainase, dan pengelolaan sampah. Kualitas layanan infrastruktur yang kurang baik berdampak langsung pada kesehatan lingkungan, kenyamanan ruang hidup, dan ketahanan masyarakat terhadap bencana iklim. Ke depan, perencanaan dan investasi infrastruktur harus diarahkan tidak hanya pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas layanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Urusan perumahan sebagai urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar menjadi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengharuskan setiap tingkatan pemerintahan untuk menyelenggarakan urusan perumahan dan kawasan permukiman. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kab/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman bertindak sebagai pembina penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Peran strategisnya adalah melakukan pembinaan dalam perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.

Terpenuhinya kebutuhan rumah sangat bergantung pada sisi kebutuhan (demand) dan sisi penyediaan (supply). Sisi kebutuhan dipengaruhi oleh kemampuan pendapatan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan rumah. Sedangkan sisi penyediaan ditentukan oleh kemampuan badan usaha/lembaga untuk membangun rumah. Masih terjadinya kesenjangan antara sisi kebutuhan dan penyediaan atau dikenal dengan istilah backlog rumah memberikan gambaran adanya masyarakat yang masih belum terpenuhi kebutuhan perumahan pada kawasan permukiman. Backlog dapat diartikan sebagai kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat. Backlog terbagi menjadi 2 (dua) yaitu backlog kepemilikan dan backlog kepenghunian. Konsep menghuni yang dimaksud adalah keluarga atau rumah tangga yang tidak memiliki rumah, tetapi menghuni rumah yang layak baik sewa/ kontrak, beli/menghuni rumah milik sendiri, maupun tinggal di rumah milik kerabat/keluarga. Sedangkan untuk backlog kepemilikan adalah berdasarkan pada presentase rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri, sehingga backlog kepemilikan adalah rumah tangga yang tidak memiliki rumah milik sendiri seperti sewa/kontrak, beli/menghuni rumah milik sendiri, maupun tinggal di rumah milik kerabat/ keluarga.

Tabel 2. 55 Backlog Kepenghunian dan Kepemilikan Di Provinsi NTB
Tahun 2020–2024

No	Kab/Kota	2020		2021		2022		2023		2024	
		Backlog Kepemilikan	Backlog Kepenghunian	Backlog Kepemilikan	Backlog Kepenghunian	Backlog Kepemilikan	Backlog Kepenghunian	Backlog Kepemilikan	Backlog Kepenghunian	Backlog Kepemilikan	Backlog Kepenghunian
1	Lombok Barat	34.813	28.294	27.376	20.780	25.675	22.987	26.695	23.848	26.411	23.575

No	Kab/Kota	2020		2021		2022		2023		2024	
		Backlog Kepemilikan	Backlog Kepenghunian	Backlog Kepemilikan	Backlog Kepenghunian	Backlog Kepemilikan	Backlog Kepenghunian	Backlog Kepemilikan	Backlog Kepenghunian	Backlog Kepemilikan	Backlog Kepenghunian
2	Lombok Tengah	51.715	44.364	31.074	28.102	28.832	27.145	29.388	27.672	28.945	27.182
3	Lombok Timur	90.657	79.650	67.005	59.853	63.897	60.013	64.702	60.858	64.017	60.155
4	Sumbawa	20.017	15.493	16.707	13.246	16.270	14.349	18.769	16.459	19.308	16.838
5	Dompu	10.003	7.173	7.671	5.541	7.174	6.227	7.502	6.575	7.756	6.860
6	Bima	19.649	14.581	13.351	11.341	13.739	12.509	14.292	13.036	14.206	12.967
7	Sumbawa Barat	6.044	4.515	6.209	4.525	6.271	4.945	7.385	5.543	7.402	5.699
8	Lombok Utara	9.920	8.365	4.991	4.310	4.842	4.394	5.198	4.650	5.255	4.709
9	Kota Mataram	21.744	15.141	27.887	13.356	28.227	22.120	30.831	24.325	32.089	25.705
10	Kota Bima	6.650	4.840	7.595	5.088	7.646	6.047	8.538	6.547	8.465	6.459
NTB		**271.212**	**222.416**	**209.866**	**166.142**	**202.573**	**180.736**	**213.300**	**189.513**	**213.854**	**190.149**

Sumber : BKKBN Provinsi NTB, 2025

Salah satu bentuk fasilitasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTB adalah menyediakan rumah yang layak huni dengan menyediakan bantuan stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam bentuk rumah subsidi, dalam rangka pemenuhan backlog kepemilikan di Provinsi NTB.

Rumah yang layak huni menurut penjelasan pasal 24 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni. Dalam definsi lain, Sebuah rumah dikatakan layak huni jika kualitas atap, dinding dan lantainya baik, alat penerangan yang bersumber dari listrik serta memiliki akses air bersih dan sanitasi yang baik.

Sejak tahun 2019, rumah tangga diklasifikasikan memiliki akses terhadap hunian/rumah layak huni apabila memenuhi 4 (empat) kriteria rumah layak huni yang disesuaikan indikator Sustainable Development Goals (SDGs), yakin ketahanan bangunan (durable housing), memiliki akses terhadap air minum layak (access to improved water), memiliki akses terhadap sanitasi layak (access to adequate sanitation) dan kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m2 per kapita (sufficient living space). Perubahan indikator rumah layak huni tersebut juga berpengaruh terhadap jumlah rumah layak huni di NTB seperti Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 56 Jumlah Rumah Tangga Yang Menempati Rumah Tidak Layak Huni di NTB Tahun 2020-2024

No	Kab/Kota	2020		2021		2022		2023		2024	
		(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah
1	Lombok Barat	50,44	72.364	47,93	56.632	45,99	98.922	40,69	86.872	41,12	88.590
2	Lombok Tengah	38,45	78.192	41,51	85.090	44,34	142.848	40,79	142.470	39,70	131.677
3	Lombok Timur	36,71	109.330	34,51	108.046	37,00	148.015	31,98	143.075	30,88	129.433
4	Sumbawa	41,94	155.027	37,53	147.934	37,37	52.475	30,81	46.744	30,19	42.802
5	Dompu	41,34	26.495	34,77	24.311	37,41	25.506	34,7	20.278	31,72	19.823

No	Kab/Kota	2020		2021		2022		2023		2024	
		(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah
6	Bima	30,26	37.769	30,95	41.689	27,50	37.303	26,57	36.391	23,28	32.091
7	Sumbawa Barat	35,60	14.109	32,72	12.433	25,11	9.533	22,55	8.392	22,03	8.839
8	Lombok Utara	44,27	29.737	53,01	30.635	48,28	35.565	39,78	31.563	39,07	28.894
9	Kota Mataram	20,83	27.276	25,05	32.515	26,91	31.624	24,81	26.437	23,23	28.272
10	Kota Bima	26,65	12.213	19,60	7.635	21,79	8.935	19,13	6.984	16,44	6.753
NTB		**37,47**	**557.092**	**37,10**	**556.338**	**37,70**	**582.962**	**33,69**	**539.845**	**32,26**	**509.645**

Sumber data : BPS, 2020-2024 (diolah Dinas Perkim NTB)

Berdasarkan data rumah tangga yang mengakses rumah tidak layak huni di Provinsi NTB selama periode 2020–2024, terlihat bahwa pada tahun 2020 hingga 2022 persentasenya relatif stabil di kisaran 37 persen, masing-masing sebesar 37,47 persen pada tahun 2020, 37,10 persen pada tahun 2021, dan sedikit meningkat menjadi 37,70 persen pada tahun 2022. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada periode tersebut belum terjadi perubahan signifikan terhadap penurunan jumlah rumah tangga yang menghuni rumah tidak layak huni.

Memasuki tahun 2023, terjadi penurunan yang cukup signifikan menjadi 33,69 persen, dan berlanjut turun pada tahun 2024 menjadi 32,26 persen. Tren penurunan ini mengindikasikan mulai efektifnya berbagai program peningkatan kualitas rumah layak huni yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi NTB bersama pemerintah pusat, pemerintah Kab/Kota, dan pihak swasta. Upaya tersebut antara lain melalui program rehabilitasi rumah, bantuan pembangunan rumah baru, serta peningkatan infrastruktur pendukung perumahan.

Secara keseluruhan, meskipun angka rumah tangga yang mengakses rumah tidak layak huni masih berada di atas 30 persen, arah pergerakan yang menurun dalam dua tahun terakhir menunjukkan kemajuan yang positif. Dengan mempertahankan dan memperluas cakupan program perbaikan rumah layak huni, target penurunan di bawah 30 persen dalam jangka menengah diharapkan dapat tercapai sebagai bagian dari peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat NTB.

Aspek lingkungan juga berperan penting dalam capaian RLH. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pembangunan berkelanjutan, program-program perumahan yang ramah lingkungan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Misalnya, penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam pembangunan rumah dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan daya tarik investasi.

Secara keseluruhan, meskipun ada kemajuan dalam capaian rumah layak huni di NTB, tantangan yang ada masih memerlukan perhatian serius. Keterkaitan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan menunjukkan bahwa untuk mencapai target perumahan yang lebih baik, diperlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta akan menjadi kunci untuk meningkatkan akses terhadap rumah layak huni dan menciptakan lingkungan yang lebih

baik bagi masyarakat. Perkembangan penanganan RTLH dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 di NTB dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 57 Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Provinsi NTB
Tahun 2018–2024

NO.	KABUPATEN/ KOTA	TAHUN PER UNIT					TOTAL
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Kota Mataram	66	2	6	0	8	82
2	Lombok Barat	105	18	3	30	10	166
3	Lombok Tengah	137	30	80	26	14	287
4	Lombok Timur	327	76	20	42	30	495
5	Lombok Utara	2	6	4	5	23	40
6	Sumbawa	151	50	1	18	25	245
7	Sumbawa Barat	91	9	0	6	14	120
8	Dompu	38	5	10	14	20	87
9	Bima	45	1	6	4	15	71
10	Kota Bima	11	2	2	4	16	35
TOTAL		**973**	**199**	**132**	**149**	**175**	**1.628**

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Prov, NTB, 2025

Selanjutnya Pemerintah Daerah wajib menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 terdapat 2 jenis layanan terkait Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan yaitu: Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi; dan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.

Provinsi NTB termasuk daerah dengan tingkat kerawanan bencana tinggi yang terdiri dari 7 kawasan rawan bencana. Salah satu bencana yang terjadi di NTB pada tahun 2018 yang berdampak pada 7 Kab/Kota dengan kerusakan bangun sebanyak 243.195 unit, dengan rinciang rusak berat (RB) 83.751 unit, rusak sedang (RS) sebanyak 38.764 unit dan rusak ringan (RR) sebanyak 120.680 unit.

Rendahnya tingkat kesejahteraan, rendahnya perilaku hidup sehat, ketaatan dan kesadaran hukum terhadap kelestarian lingkungan menjadi salah satu faktor tumbuhnya kawasan permukiman kumuh. Perkembangan pusat pusat pertumbuhan baru yang disertai dengan peningkatan pemanfaatan lahan permukiman secara swadaya masyarakat khususnya kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) seringkali tidak difasilitasi dengan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) yang memadai, seperti tersedianya air bersih dan sanitasi yang baik, mengakibatkan penurunan kualitas kawasan permukiman yang dibangun pengembang dan munculnya kawasan permukiman kumuh baru yang dibangun MBR.

Penanganan permukiman kumuh diawali dengan identifikasi lokasi permukiman kumuh dan penetapan lokasi permukiman kumuh melalui SK Walikota/Bupati. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan

luasan kawasan kumuh dibagi menjadi 3 kewenangan yaitu luasan kumuh dibawah 10 ha menjadi kewenangan Pemerintah Kab/Kota, luasan kumuh 10-15 ha merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, serta luasan kumuh di atas 15 ha merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.

Luas Kawasan kumuh di NTB berdasarkan SK. Gubernur Nomor 600-231 Tahun 2023 adalah 612,83 Ha yang tersebar di 10 Kab/Kota sedangkan capaian penataan kawasan kumuh tahun 2024 baru seluas 297,47 Ha di seluruh kawasan kumuh Kab/Kota se NTB sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 58 Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Yang Tertangani Sampai Dengan Tahun 2024 Di Provinsi NTB

NO	KAB/KOTA	Target Penanganan Kawasan Kumuh (Ha)	Kawasan Kumuh Tertangani 2020-2021 (Ha)	Kawasan Kumuh Tertangani 2022 (Ha)	Kawasan Kumuh Tertangani 2023 (Ha)	Kawasan Kumuh Tertangani 2024 (Ha)	Total Kawasan Kumuh Yang Tertangani (Ha)
1	Kota Mataram	12,04	3,86	1,65	1,48	3.39	10.38
2	Kota Bima	24,65	1,55	2,08	6,45	9.75	19.83
3	Lombok Barat	37,64	8,12	3,73	17,03	5.44	34.32
4	Lombok Tengah	29,11	34,79	9,25	6,92	6.46	57.42
5	Lombok Timur	64,68	25,73	4,49	8,62	9.66	48.50
6	Sumbawa	200,82	10,67	6,23	16,1	20.76	53.76
7	Sumbawa Barat	18,72	1,39	0,47	0	1.74	3.60
8	Bima	63,4	5,82	2,18	4,94	4.88	17.82
9	Lombok Utara	78,07	1,8	2,49	10,68	19.46	34.43
10	Dompu	91,9	1,29	0,61	7,46	8.06	17.42
NTB		**621,03**	**95,03**	**33,18**	**79,68**	**89,59**	**297,47**

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB;2025

Sebagai upaya mewujudkan pemenuhan hak dasar masyarakat atas hunian yang layak, pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Perumahan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan SPM ini menjadi landasan dalam penyediaan pelayanan dasar di bidang perumahan, yang meliputi: 1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi, 2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi.

Tabel 2. 59 Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja/Jennis Layanan Spm	Satuan	Capaian
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi	%	100
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi	%	100

Sumber : Aplikasi e-spm Kemendagri, Januari 2025

Layanan 1 yaitu Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi persentase capaian sebesar **100 %**. Tidak adanya bencana skala provinsi selama 3 (tiga) tahun terakhir yang ditetapkan dengan surat keputusan Gubernur maka tidak ada masyarakat yang harus dilayani, capaian 100%. Dengan ketentuan bobot Penerima Layanan Dasar sebesar 80%, maka Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar menjadi 80% dikali 100% menjadi **80%**. Selain Pencapaian Penerima Layanan Dasar, juga diperhitungkan Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar yang diberi bobot 20% dimana jika tidak terjadi bencana maka layanan Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM berupa pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya).

Layanan 2 yaitu Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi persentase capaian sebesar 100 %. Tidak adanya program pemerintah yang mengharuskan masyarakat untuk direlokasi yang ditetapkan dengan surat keputusan Gubernur maka tidak ada masyarakat yang harus dilayani, capaian 100%. Dengan ketentuan bobot Penerima Layanan Dasar sebesar 80%, maka Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar menjadi 80% dikali 100% menjadi **80%**. Selain Pencapaian Penerima Layanan Dasar, juga diperhitungkan Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar yang diberi bobot 20% dimana jika tidak ada relokasi maka layanan Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM berupa pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya).

5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama di tingkat daerah. Pengelolaan ketenteraman dan ketertiban umum bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat, sekaligus mencegah serta menangani gangguan yang dapat mengancam stabilitas sosial. Ketenteraman dan ketertiban umum mengacu pada kondisi di mana masyarakat dapat menjalani kehidupan sehari-hari tanpa adanya gangguan yang mengancam keamanan, ketertiban, dan stabilitas sosial. Tugas untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban ini melibatkan penegakan aturan, pencegahan tindakan kriminal, serta pelaksanaan peraturan daerah (Perda)

Selanjutnya perlindungan masyarakat mencakup berbagai upaya yang dilakukan untuk menjaga dan melindungi warga dari ancaman yang bisa menimbulkan kerugian, baik fisik maupun materi. Perlindungan ini meliputi langkah-langkah pencegahan

bencana, penanganan keadaan darurat, serta penyediaan bantuan bagi masyarakat yang terkena dampak bencana atau gangguan ketertiban. Beberapa aspek penting dalam perlindungan masyarakat diantaranya adalah Mitigasi Bencana dimana Pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bekerja sama dengan Satpol PP untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, atau kebakaran. Langkah mitigasi termasuk edukasi masyarakat, pelatihan kesiapsiagaan bencana, dan penyediaan alat tanggap darurat.

Penanganan Konflik Sosial dimana Satpol PP dan instansi terkait juga berperan dalam mencegah dan menangani konflik antarwarga atau kelompok masyarakat yang dapat memicu ketegangan sosial, seperti bentrokan etnis, konflik lahan, atau kerusuhan sosial. Edukasi dan Sosialisasi, Pemerintah daerah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban dan peran mereka dalam memastikan lingkungan yang aman. Edukasi ini dilakukan melalui program sosialisasi di sekolah, komunitas, dan tempat publik.

Upaya penurunan konflik di Provinsi NTB dilakukan melalui koordinasi dengan aparat keamanan dan organisasi (mitra kerja) yang dibentuk untuk keperluan tersebut seperti: Forum Koordinasi Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem), dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT). Sekecil apapun isu yang berpotensi menimbulkan konflik yang berdasarkan hasil deteksi dini akan ditindaklanjuti dengan berbagai kegiatan atau aksi dalam pencegahan dini.

Terkait penanganan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, telah dilakukan secara preventif. Selama tahun 2020-2024, jumlah pelanggaran terhadap PERDA dan Peraturan Gubernur sebanyak 56 kasus dan telah tertangani seluruhnya, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 60 Data Pelanggaran Atas Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur di Provinsi NTB Tahun 2020-2024

NO.	JENIS PERATURAN	TAHUN					TOTAL
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	PERATURAN DAERAH	6	7	8	5	5	38
2	PERATURAN GUBERNUR	6	6	1	1	2	18

Sumber : SATPOL PP Provinsi NTB, 2025

Selanjutnya ketentraman dan ketertiban umum diukur dari pencegahan, penanganan dan pengendalian bencana. Bencana yang terjadi di Provinsi NTB selama tahun 220-2024 sebagian besar berupa gejala alam antara lain: banjir/bandang, tananh longsor, angin kencang/putting beliung, kekeringan, kebakaran, gempa bumi dan gelombang pasang/banjir ROB. Jenis dan jumlah bencana tersebut disajikan pada tabel berikut. Jenis dan jumlah bencana tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 61 Jumlah Bencana yang Terjadi di Provinsi NTB Tahun 2020-2024

No	Jenis Bencana	2020	2021	2022	2023	2024
1	Banjir/ Banjir Bandang	43	89	46	63	62
2	Tanah Longsor	13	25	10	22	22
3	Angin Kencang /Puting Beliung	32	17	30	27	62
4	Kekeringan	9	9	10	9	10
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	3	0	0	3	7
6	Gempa Bumi	0	0	0	0	3
7	Gelombang Pasang / Banjir ROB	2	10	7	0	6

Sumber: BPBD Provinsi NTB, 2023.

Berdasarkan data kejadian bencana di Provinsi NTB selama periode 2020–2024, terlihat bahwa bencana hidrometeorologi masih mendominasi. Banjir dan banjir bandang menempati posisi tertinggi dengan fluktuasi yang signifikan, dari 43 kejadian pada 2020 meningkat tajam menjadi 89 kejadian pada 2021, kemudian menurun dan relatif stabil di kisaran 60-an kejadian pada 2023–2024. Tanah longsor juga menunjukkan pola yang serupa meskipun jumlahnya lebih kecil, dengan puncak 25 kejadian pada 2021 dan stabil di angka 22 kejadian pada 2023–2024. Sementara itu, kejadian angin kencang/puting beliung memperlihatkan lonjakan pada 2024 menjadi 62 kejadian, jauh di atas tahun-tahun sebelumnya. Bencana kekeringan cenderung stabil di kisaran 9–10 kejadian per tahun, sedangkan kebakaran hutan dan lahan relatif rendah namun meningkat menjadi 7 kejadian pada 2024. Bencana geologi seperti gempa bumi baru tercatat pada 2024 dengan 3 kejadian, sedangkan gelombang pasang/banjir rob mengalami fluktuasi dengan puncak 10 kejadian pada 2021 dan kembali meningkat menjadi 6 kejadian pada 2024.

Secara keseluruhan, tren ini menegaskan pentingnya penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana hidrometeorologi, khususnya banjir dan angin kencang yang cenderung meningkat, serta peningkatan kapasitas adaptasi terhadap potensi kebakaran hutan dan kejadian geologi yang muncul. Analisis ini menjadi dasar strategis bagi RPJMD 2025–2029 dalam merumuskan kebijakan penanggulangan bencana berbasis pengurangan risiko, pembangunan infrastruktur tangguh, dan edukasi masyarakat guna meningkatkan ketahanan daerah terhadap ancaman bencana yang semakin kompleks.

Selanjutnya terkait dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), IndIndonesia telah mengembangkan pengukuran demokrasi yang berbasis provinsi yang disebut Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi. Pada dasarnya IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi. Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang diukur. Di samping level nasional, IDI juga dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi seluruh Indonesia.

Pada tahun 2022, BPS menghitung angka IDI menggunakan metode baru. Penghitungan IDI menggunakan metode baru mewakili tiga dimensi yaitu dimensi politik, dimensi ekonomi, dan dimensi sosial. Ketiga dimensi itu dihitung dari 22 indikator yang memberikan kontribusi terhadap 3 aspek IDI. Tiga aspek tersebut adalah aspek Kebebasan, aspek Kesetaraan, dan aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi. Penghitungan IDI menggunakan metode baru, yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, menyebabkan nilai IDI tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Potret demokrasi di NTB tetap dapat dilihat dari nilai IDI NTB. Tingkat demokrasi dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori yakni 'rendah' (indeks < 60), 'sedang' (indeks 60 – 80), dan 'tinggi' (indeks >80). Sejak tahun 2020 IDI NTB mengalami fluktuasi setiap tahunnya.

Grafik 2. 95 Perkembangan Indeks Demokrasi Provinsi NTB Tahun 2020-2024

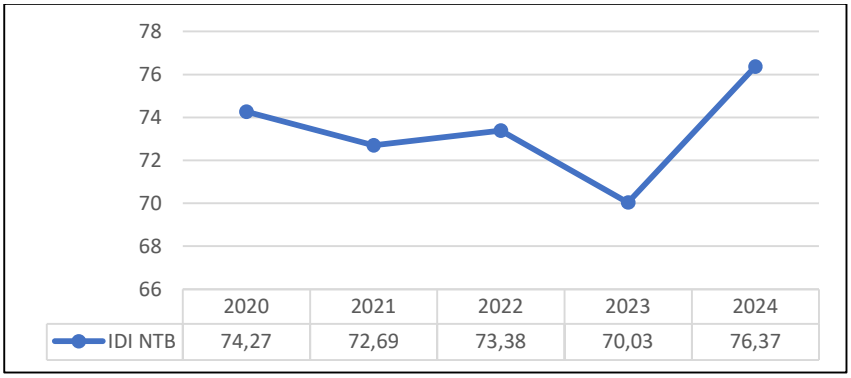

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2025

Capaian IDI NTB pada tahun 2020 dengan skor 74,27 yang mencerminkan kualitas demokrasi daerah berada pada tingkat sedang namun mendekati kategori baik. Sejak 2021, IDI NTB mengalami penurunan bertahap hingga mencapai 70,03 pada tahun 2023. Namun pada tahun 2024, terjadi lonjakan yang cukup signifikan dengan capaian 76,37, tertinggi dalam lima tahun terakhir. Kenaikan tajam pada tahun 2024 mencerminkan adanya perbaikan kinerja pemerintahan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya demokrasi lokal. Demokrasi yang sehat merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang responsif dan pembangunan daerah yang inklusif. Oleh karena itu, peningkatan kualitas demokrasi harus menjadi bagian integral dari strategi reformasi birokrasi dan penguatan partisipasi publik.

6. Sosial

Pemerintah Provinsi NTB telah masih menghadapi tantangan dalam menangani permasalahan sosial yaitu penanganan dan pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui peningkatan kualitas layanan sarana dan prasarana

sosial baik Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) maupun Sumber Daya Manusia (SDM) Kesejahteraan Sosial.

Jumlah LKS yang sudah terakreditasi di Provinsi NTB pada tahun 2024 sebanyak 266 lembaga dari 510 total LKS yang ada. Artinya sudah lebih dari setengah LKS telah melakukan pelayanan sesuai setandar namun masih lebih dari 40% perlu difasilitasi untuk peningkatan kapasitas dan akreditasi seperti disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 62 Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) menurut Kab/Kota di Provinsi NTB Tahun 2024

No	Kab/Kota	Jenis LKS								semua jenis LKS	
		LKS Anak		LKSLU		LKSPD		LKS NAPZA			
		akreditasi	non akreditasi	akreditasi	non akreditasi	akreditasi	non akreditasi	akreditasi	non akreditasi	akreditasi	non akreditasi
1	Lombok Barat	41		6	7		11			47	18
2	Lombok Tengah	87		4	27		17			91	44
3	Lombok Timur	3	133	16	8		12			19	153
4	Sumbawa	6			1					6	1
5	Dompu	29		8	3					37	3
6	Bima	13		3	4					16	4
7	Sumbawa Barat	5			2					5	2
8	Lombok Utara	2	5				2			2	7
9	Kota Mataram	13		4	6		3		1	17	10
10	Kota Bima	20		6	2					26	2
	jumlah	**219**	**138**	**47**	**60**	**0**	**45**	**0**	**1**	**266**	**244**
								Total		510	

Sumber: Dinas Sosial Provinsi NTB, 2024.
Catatan : Data tersebut adalah jumlah LKS yang bermitra dengan Dinsos Informasi dari Dinsos belum dilakukan pendatan jumlah LKS secara keseluruhan. Kalaupun akan dilakukan akan memakan biaya dan waktu yang cukup lama jadi dari dinsos menyarankan menggunakan data yang ini yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pada Tahun 2024 jumlah PPKS di Provinsi NTB sebanyak 1,145,145 dan yang sudah diberikan pelayanan sebanyak 884,404 atau sebesar 77.23 % dari total jumlah PPKS di NTB. Angka PPKS yang terlayani masih terbatas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi NTB seperti pemberian bantuan sosial dan bantuan usaha untuk fakir miskin melalui Dinas Sosial. Pelayanan ini tentu akan lebih optimal dan menjangkau seluruh PPKS dengan koordinasi dan kolaborasi seluruh pihak lintas pemerintah pusat dan daerah serta organsiasi masyarakat sipil dan Swasata. Jenis dan jumlah PPKS di Provinsi NTB tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 63 Pemerlu Pelayanan Sosial (PPKS) di Provinsi NTB Tahun 2024

NO	JENIS PMKS	SATUAN	TOTAL PPKS	PPKS tertangani	% yang tertangani
1	Anak Balita Terlantar	Jiwa	47		-
2	Anak Terlantar	Jiwa	21,104	20,748	98
3	Anak Nakal/Anak Berhadapan dengan Hukum	Jiwa	209		-
4	Anak Jalanan	Jiwa	-		
5	Anak Dengan Kedisabilitasan	Jiwa	1,170		-
6	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan	Jiwa	50		-
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan khusus	Jiwa	63		-

NO	JENIS PMKS	SATUAN	TOTAL PPKS	PPKS tertangani	% yang tertangani
8	Lanjut Usia Terlantar	Jiwa	42,268	130	0
9	Penyandang Disabilitas	Jiwa	11,761	335	3
10	Tuna Susila	Jiwa	46		-
11	Gelandangan	Jiwa	94	94	100
12	Pengemis	Jiwa	92	28	30
13	Pemulung	Jiwa	458		-
14	Kelompok Minoritas	Jiwa	38		-
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	Jiwa	1,560		-
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	Jiwa	101		-
17	Korban Penyalahgunaan Napza	Jiwa	229		-
18	Korban Traficking	Jiwa	7		-
19	Korban Tindak Kekerasan	Jiwa	20		-
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	Jiwa	98		-
21	Korban Bencana Alam	KK	49,184	49,184	100
22	Korban Bencana Sosial	KK	4,587		-
23	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	Jiwa	6,866		-
24	Keluarga Fakir Miskin	KK	1,004,103	813,885	81
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	KK	961		-
26	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	KK	29		-
	JUMLAH		**1,145,145**	**884,404**	**77.23**

Sumber: Dinas Sosial Provinsi NTB, 2023.

2.4.4.2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Fokus utama dalam urusan tenaga kerja adalah tingkat pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2024 sebesar 2,73 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 2 sampai 3 orang yang menganggur. Melihat tren TPT sejak 2019-2024, TPT NTB mengalami penurunan, hal ini menunjukkan program pembangunan ketenagakerjaan telah menunjukkan hasil yang baik. Gambaran perkembangan TPT di Provinsi NTB tahun 2019-2024 disajikan pada gambar berikut.

Grafik 2. 96 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi NTB Tahun 2019-2024

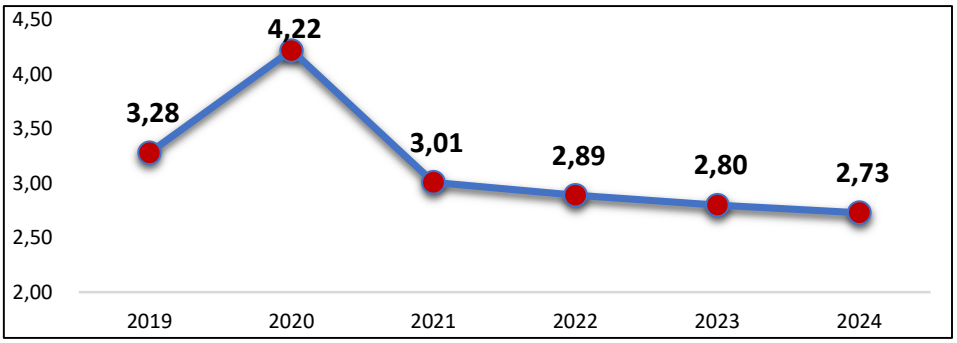

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2024.

Berdasarkan jenis kelamin, TPT laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, hal ini disebabkan perempuan sebagian besar terserap pada sektor non formal dan menjadi pekerja tidak dibayar.

Grafik 2. 97 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin di Provinsi NTB Tahun 2020-2024

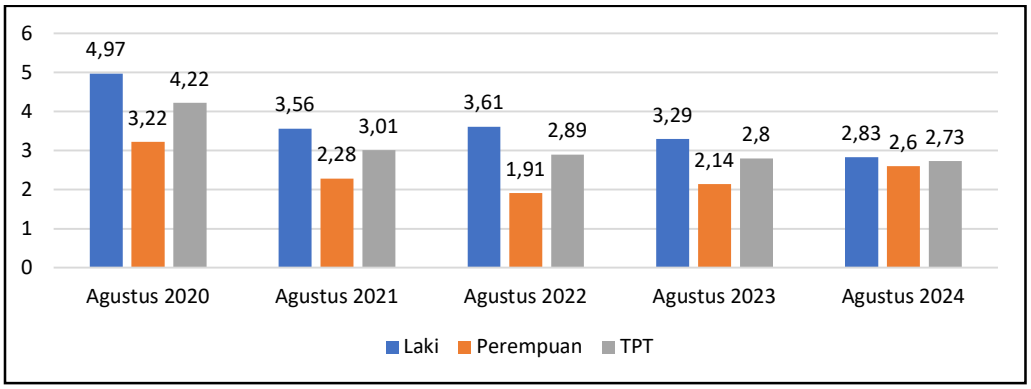

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2024

Berdasarkan BPS NTB (2024), jumlah angkatan kerja tahun 2024 sebanyak 3.19 juta orang, mengalami peningkatan sebanyak 216,34 ribu orang dibandingkan tahun 2023. Peningkatan jumlah Angkatan kerja sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk. Komposisi Angkatan kerja pada tahun 2024 terdiri dari 3,11 juta orang penduduk yang bekerja dan 87,01 ribu orang pengangguran.

Tabel 2. 64 Jumlah Tenaga Kerja, TPAK dan TPT di Provinsi NTB Tahun 2019 - 2024

No	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tenaga Kerja (orang):	3.600.432	3.817.696	3.882.460	3.946.546	4.059.604	4.133.780
	Laki-laki (orang)	1.711.887	1.853.517	1.890.023	1.926.328	2.020.540	2.061.160

No	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Perempuan (orang)	1.888.545	1.964.179	1.992.437	2.020.218	2.039.064	2.072.620
2	Angkatan Kerja (orang):	2.471.552	2.689.38	2.739.890	2.799.178	2.976.225	3.192.560
	Laki-laki (orang)	1.405.339	1.537.239	1.560.836	1.603.994	1.700.943	1.782.340
	Perempuan (orang)	1.066.213	1.152.147	1.179.054	1.195.184	1.275.282	1.410.220
	TPAK (%)	**68,65**	**70,45**	**70,57**	**70,93**	**73,31**	**77,22**
3	Pengangguran (orang):	84.516	113.430	82.495	80.833	83.243	87.011
	Laki-laki (orang)	47.866	76.357	55.559	57.956	55.944	50.369
	Perempuan (orang)	36.650	37.073	26.936	22.877	27.299	36.642
	TPT (%)	**3,42**	**4,22**	**3,01**	**2,89**	**2,8**	**2,73**

Sumber : BPS Provinsi NTB, 2025

Selanjutnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) NTB meningkat seiring dengan peningkatan jumlah angkatan kerja. TPAK adalah persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. TPAK dihitung dengan membandingkan jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK merupakan indikator yang menunjukkan besarnya partisipasi angkatan kerja dalam dunia kerja. TPAK yang tinggi menunjukkan bahwa kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja juga tinggi.

Tabel 2. 65 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2020 –Agustus 2024

Status keadaan ketenagakerjaan	Agustus 2020 (Ribu orang)	Agustus 2021 (Ribu orang)	Agustus 2022 (Ribu orang)	Agustus 2023 (Ribu orang)	Agustus 2024 (Ribu orang)
Penduduk Usia Kerja	3.817,70	3.882,46	3.946,55	4.059,60	4.133,78
Angkatan Kerja	2.689,39	2.739,89	2.799,18	2.976,23	3.192,56
- Bekerja	2.575,96	2.657,40	2.718,35	2.892,98	3.105,55
- Pengangguran	113,43	82,5	80,83	83,24	87,01
Bukan Angkatan Kerja	1.128,31	1.142,57	1.147,37	1.083,38	941,22
Persen	Persen	Persen	Persen	Persen	Persen
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4, 22	3,01	2,89	2,8	2,73
- Perkotaan	5,04	3,85	3,52	3,27	2,91
- Perdesaan	3,44	2,18	2,28	2,32	2,53
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,45	70,57	70,93	73,31	77,23
- Laki-Laki	82,94	82,58	83,27	84,18	86,47
- Perempuan	58,66	59,18	59,16	62,54	68,04

Sumber : BPS Provinsi NTB, 2025

Berdasarkan data diatas pada tahun 2024, TPAK laki-laki sebesar 86,47 persen, lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan yaitu 68,04 persen. TPAK perempuan tahun 2024 mengalami peningkatan 5,50 poin dari tahun 2023. Jika dibandingkan dengan TPAK laki-laki, hanya mengalami peningkatan 2,29 poin dibandingakan tahun 2023. Peningkatan TPAK Perempuan yang signifikan dari tahun 2022-2024 menunjukkan upaya

pemerintah untuk Pembangunan yang lebih inklusif melalui pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan akses, pertisipasi, manfaat dan control Perempuan terhadap pembangunan yang sama dengan laki-laki telah memberikan hasil yang cukup baik.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan dua variabel ketenagakerjaan yang sangat penting diperhatikan dalam pembangunan wilayah. Peningkatan TPAK dan penurunan TPT dilakukan melalui perluasan kesempatan kerja dan penciptaan peluang berusaha pada berbagai sektor ekonomi/lapangan usaha. Sebaran angkatan kerja (usia 15 tahun ke atas) yang bekerja pada berbagai sektor ekonomi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 66 Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja menurut Sektor Ekonomi/Lapangan Usaha Tahun 2020 – 2024 (Persen)

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	34,68	32,61	34,57	33,54	36,16
Pertambangan dan Penggalian	1,09	1,45	1,5	1,1	1,43
Industri Pengolahan	11,14	12,09	10,11	12,37	10,17
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,35	0,29	0,51	0,67	0,68
Konstruksi	6,29	6,58	6,19	6,29	6,24
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil & Sepeda Motor	20,99	21,23	22,04	18,32	18,89
Transportasi dan Pergudangan	3,48	3,36	2,82	2,95	2,69
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,62	5,51	4,78	5,6	5,72
Informasi dan Komunikasi	0,49	0,53	0,43	0,5	0,51
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,89	0,89	1,06	1,28	1,19
Jasa Perusahaan	0,81	0,68	0,95	1,25	1,03
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	3,8	3,83	4,1	3,84	3,92
Jasa Pendidikan	5,27	5,59	5,46	6,99	5,7
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,74	1,52	1,47	1,43	1,9
Pengadaan Listrik dan Gas, Real Estate, Jasa Lainnya	4,36	3,83	4,01	3,87	3,78
Jumlah	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber : BPS Provinsi NTB, 2025

Penduduk bekerja menurut lapangan usaha dapat menggambarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja. Berdasarkan hasil Sakernas 2024, terdapat 3 (tiga) lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 36,16 persen; perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor sebesar 18,89 persen; serta industry pengolahan sebesar 10,17 persen.

Jika dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Pada Agustus 2024, penduduk yang bekerja di kegiatan informal sebanyak 2,19 juta orang (70,51 persen), sedangkan yang bekerja di kegiatan formal sebanyak 915,85 ribu orang (29,49 persen). Penduduk yang bekerja di kegiatan formal pada Agustus 2024 naik sebesar 1,79 persen poin jika dibandingkan Agustus 2023. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka yang berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar dan

buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar).

Kualitas dan produktivitas tenaga kerja sangat dipengaruhi salah satunya oleh Tingkat Pendidikan tenaga kerja. Pada Agustus 2024, penduduk bekerja masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD ke bawah yaitu sebesar 41,49 %. Sementara tenaga kerja yang berpendidikan tinggi yaitu Diploma I/II/III dan Universitas sebesar 13,43 %. Dibandingkan dengan Agustus 2023, tenaga kerja berpendidikan SD ke bawah, Sekolah Menengah Pertama, dan Universitas turun masing-masing sebesar 0,59 %, 0,38 %, dan 0,56 %. Sementara penduduk bekerja dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Diploma I/II/III mengalami peningkatan masing-masing sebesar 0,50 %, 0,58 %, dan 0,45 % sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 67 Distribusi Penduduk Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan, Tahun 2020-2024

Tingkat Pendidikan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
SD Kebawah	44,07	42,93	46,53	42,08	41,49
Sekolah Menengah Atas	20,67	21,54	19,68	22,05	22,55
Sekolah Menengah Pertama	16,74	16,61	15,75	16,16	15,79
Universitas	10,57	10,91	10,42	11,83	11,27
Sekolah Menengah Kejuruan	5,71	5,96	5,67	6,16	6,74
Diploma	2,24	2,05	1,94	1,71	2,16

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2025

2. Pertanahan

Pada Tahun 2024 rapat koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) sebagai upaya percepatan Reforma Agraria di wilayah hutan, transmigrasi, Hak Guna Usaha yang habis, dan pengembangan penataan akses ketahanan pangan. Rapat Koordinasi membahas tentang pelaksanaan legalisasi aset yang meliputi redistribusi tanah yang bersumber dari kawasan hutan, legalisasi aset berupa pensertifikatan tanah transmigrasi dan masyarakat, serta redistribusi tanah kepada masyarakat yang berasal dari penyelesaian konflik antara masyarakat dengan badan hukum (HGU).

Selanjutnya terkait penataan akses, dibahas aspek-aspek dalam membangun dan meningkatkan kapasitas UMKM. Dalam Rakor GTRA Provinsi NTB terdapat tiga pokja yang terbagi dalam tiga kelompok kerja. Pokja I membahas tentang penataan aset reform dan potensinya sebagai sumber TORA serta penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan dan penyelesaiaan sengketa konflik. Pokja II membahas tentang penataan aset reform dan potensinya sebagai sumber TORA yang berasal dari lahan transmigrasi, perpanjangan HGU, Perubahan HGU Menjadi HGB dan Tanah Terlantar. Pokja III membahas tentang pelaksanaan penataan akses reform dan pencanangan Kampung Reforma Gemilang.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 11 menjabarkan bahwa urusan pemerintahan Konkruen yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pertanahan adalah Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Indikator kinerja daerah urusan pertanahan yang tertuang didalam dokumen RPD tahun 2024-2026 adalah Persentase Fasilitasi Penyelesaian Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dengan target 100 persen dan Cakupan konflik pertanahan yang difasilitasi target 100 persen. Pada Tahun 2024 kedua indicator kinerja tersebut terealiasi 100 persen, artinya semua konflik pertanahan dapat difasilitasi secara keseluruhan.

Tabel 2. 68 Rekapitulasi konflik Pertanahan yang difasilitasi Biro Pemerintahan Tahun 2024

NO	KABUPATEN	LOKASI KONFIK	PERMASALAHAN	KET
1.	Lombok Tengah	Kawasan Ekonmi Khusus (KEK) Mandalika	Adanya keberatan masyarakat terhadap lahan yang digunakan dan ada masyarakat yang belum menerima pembayaran jual beli tanah di kawasan	Penyelesaian dikoordinasikan oleh Satgas KEK Mandalika
2.	Lombok Utara	Tanah HGU Gili Trawangan	Adanya masyarakat yang ingin menguasai tanah ex HGU	Penyelesaian oleh Pemerintah Provinsi NTB dan BPN Provinsi NTB
3.	Lombok Tengah	Tanah HGU PT. Trisno Kenangan	Penyalahgunaan lahan ex HGU oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah	Penyelesaian oleh Gugus Tugas Reform Agraria NTB
4.	Sumbawa Barat	Tanah HGU PT.Bumi Harapan Jaya	Penyalahgunaan lahan HGU oleh masyarakat	Penyelesaian oleh Gugus Tugas Reform Agraria NTB

Sumber : Biro Pemerintahan & Otda Setda Provinsi NTB, 2023

Berdasarkan data dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB, tanah terindikasi terlantar sesuai jenis Hak Guna Usaha (HGU) di Kab/Kota Se NTB seluas 15.521,71Ha. Semuanya telah masuk dalam kegiatan penertiban dan sudah diberi peringatan. Sebagian diusulkan menjadi tanah bermasalah, berlokasi di Kab/Kota se NTB, termasuk di dalamnya badan usaha yang diberi kesempatan, dan ada yang sudah keluar dari database dapat dipergunakan oleh negara. secara rinci disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2. 69 Rekapitulasi Tanah Terindikasi Terlantar Berdasarkan Hak Guna Usaha (HGU) s.d Tahun 2023

NO.	KABUPATEN	NAMA PERUSAHAAN	JENIS HAK NO.TGL	LOKASI DESA, KECAMATAN	LUAS TANAH (Ha)	PERUN-TUKAN	PENGGUNAAN TANAH SAAT INI	LUAS TANAH TERINDIKASI TERLANTAR	KET
1.	Lombok Tengah	PT. Trisno Kenangan	a.Konversi Hak erfacth	. Batukliang	355,1000	Perkebunan	Bangunan, Kolam Renang, Kebun Kopi,	355,100	Kegiatan Penertiban 2013

NO.	KABUPATEN	NAMA PERUSAHAAN	JENIS HAK NO.TGL	LOKASI DESA, KECAMATAN	LUAS TANAH (Ha)	PERUN-TUKAN	PENGGUNAAN TANAH SAAT INI	LUAS TANAH TERINDIKASI TERLANTAR	KET
			No.333/ 1966 b.14 Des 1966 c.HGU	. Lantan dan Karang Sidemen			Tanaman Berkayu Keras		
2.	Lombok Timur	PT.Kosambi factory Lac Liendarto Wirawan Jl.Kerta Jaya No.79A Surabaya	a. 31/HGU/BPN/1990 b. 20 Desember 1990 c. HGU	a.Sembalun b.Sajang	99,4160	Perkebunan Kosambi, dan Penularan Kutu Lac	Hutan, Rumput, campur, Tambak udang	99,4160	Kegiatan Penertiban 2010, diusulkan sebagai TANAH TERLANTAR
		3.PT.Tanjung Kenanga Yahya Surya Buana,SE Jl.Panca Usaha No.1 Mataram	a. 80/HGU/DA/ 1988 b. 01 Januari 1988	a. Sambelia b. Belanting	38,5000	Perkebunan	Kebun, Pemukima, Tambak	38,5000	Kegiatan Penertiban 2013, pemberian PERINGATAN
		4.PT.Bumi Padak Goar	a. 540.3/01/1/HGU/62/2005 b. 13 Juli 2005 c. HGB	a.Sambelia b.Labu Pandan	85,1890	Tambak	Tambak Udang, Ladang	45,1890	Masuk dalam Kegiatan Penertiban Tahun 2011,dengan keputusan diberi PERINGATAN
3.	Sumbawa Barat	1.PT.Hutan Mente Indonesia Surabaya	a.Pemecahan HGU 1 Senayan	a.Seteluk b.Senayan	1,9845	Perkebunan Jambu Merah	Ditanami Palawija oleh masyarakat sekitar	1,9845	
		2.PT Hutan Mente Indonesia Surabaya	a.HGU	a.Seteluk b.Senayan	93,4110	Perkebunan Jambu Merah	Ditanami Palawija oleh masyarakat sekita	93,4110	Masuk dalam kegiatan penertiban tahun 2011, dengan keputusan diberi PERINGATAN
		3.PT Hutan Mente Indonesia Surabaya	a. 72/HGU/BPN/1994 b. 27 oktober 2000 c. HGU	a.Seteluk b.Senayan	156,0600	Perkebunan Jambu Merah	Ditanami Palawija oleh masyarakat sekitar	156,0600	Masuk dalam kegiatan penertiban tahun 2011, dengan keputusan diberi PERINGATAN
		4.PT.Sekar Abadi Jaya Surabaya	a.540.3/01/1/01/HGU/62/2000 b.16 oktober 2000 c. HGU	a.Seteluk b.Senayan	170,332	Tambak	Semak Belukar	170,332	Masuk dalam kegiatan penertiban tahun 2011,dengan keputusan diberi PERINGATANI
		5.PT.Sekar Abadi Jaya Surabaya	a.540.3/01/1/01/HGU/62/2000 b.5 Juli 2001 c.HGU	a.Seteluk b.Senayan	70,1410	Tambak	Semak Belukar	70,1410	Masuk dalam kegiatan penertiban tahun 2011,dengan keputusan

NO.	KABUPATEN	NAMA PERUSAHAAN	JENIS HAK NO.TGL	LOKASI DESA, KECAMATAN	LUAS TANAH (Ha)	PERUN-TUKAN	PENGGUNAAN TANAH SAAT INI	LUAS TANAH TERINDIKASI TERLANTAR	KET
									diberi PERINGATAN
4.	Sumbawa	1.PT.Alam Hijau Heny Firmansyah Desa Empang Bawah Kec.Empang Kab.Sumbawa	a.13/HGU/1987 b.15 oktober 1987 c.HGU	a.Empang b.Boal	650,0000	Tambak Udang	Bekas tambak, Tegalan, sawah, padak, usaha perikanan/ tambak udang	650,0000	Masuk dalam kegiatan penertiban tahun 2011,dengan keputusan diberi PERINGATAN
		2.PT.Multimina Mertasari kusnadi said Desa Rhee,Kec.Rhee, Kab. Sumbawa	a.07/HGU/02-BKPMD/1989 b.24 oktober 1989 c.HGU	a.Rhee b.Rhee	79,0739	Tambak Udang	Bekas Tambak, semak belukar	79,0739	Masuk dalam kegiatan penertiban tahun 2011,dengan keputusan diberi PERINGATAN
		3.PT.Peterta	a.30.a/HGU/DA/80 b.28 februari 1980 c.HGU	a.Lape-Lapok b.Lab.Kuris	1.885,0000	peternakan	Semak belukar, padang rumput	1.885,0000	Masuk dalam kegiatan penertiban tahun 2011,dengan keputusan diberi PERINGATAN
		4.PT.MINA AQUA CULTURA Yala Agra Pratama Inc	a.01/HGU/02-BKPDM/87 b.10 agustus 1987 c.HGU	a.Alas b.Gontar	98,0000	Tambak	Bekas Tambak	98,0000	Masuk dalam kegiatan penertiban tahun 2011,dengan keputusan diberi PERINGATAN
		5.PT.Dinaco Widjaja Kusuma	a.01/HGU/02-BKPMB/90 b.20-06-1990 c.HGU	a.Moyo Hilir b.Penyaring	32,8178		Tambak	32,8178	
		6.PT.Dani Tama Land	a.25/HGU/BPN/2004 b.04 juli 2004 c.HGU	a. Moyo Hilir b.Penyaring	276,9101	Perkebunan jeruk dan agrowisata	Perkebunan jeruk	100,9101	Masuk dalam kegiatan penertiban tahun 2011,dengan keputusan diberi PERINGATAN
5.	Kab.Dompu	1.PT.BALI ANACARDIA Toriqullie Jl.Sebandaran Timur 383 Blok E Semarang telp.024-3547156;024-3547367	a.52/HGU/BPN/1997 b.27 juni 1997 c.HGU	a.pekat b.Doropeti	1650,9000	Perkebunan jambu merah	Perkebunan jambu mente, perkampungan, masjid, SD dan Semak/ rumput	1650,9000	Masuk dalam kegiatan penertiban tahun 2010,dengan keputusan dialihkan haknya kepada PT.sukses Mantap Sejahtera sesuai surat kepala BPN RI tgl 27-12-2012 No.4684/14.3/XII/2012

NO.	KABUPATEN	NAMA PERUSAHAAN	JENIS HAK NO.TGL	LOKASI DESA, KECAMATAN	LUAS TANAH (Ha)	PERUN-TUKAN	PENGGUNAAN TANAH SAAT INI	LUAS TANAH TERINDIKASI TERLANTAR	KET
		2.PT.Bali Anacardia Toriqullie Jl.Sebandaran Timur 383 Blok E Semarang telp.024-3547156;024-3547367	a.52/HGU/BPN/1997 b.27 juni 1997 c.HGU	a.pekat b.Doropeti	3.889,5900	Perkebunan jambu merah	Perkebunan jambu mente, perkampungan, basecamp	3.889,5900	Masuk dalam kegiatan penertiban tahun 2011,dgn keputusan dialihkan haknya kepada PT.sukses Mantap Sejahtera sesuai surat kepala BPN RI tgl 27-12-2012 No.4684/14.3/XII/2012
		3.PT.Tugu Vanila Jaya Edi Toet Hendratno,SH Jl.Pejaten Mas V-B 16 Jakarta	a.19/HGU/BPN/1999 b.01 Maret 1999 c.HGU	a.pekat b.Doropeti	1.043,2400	Peternakan	Basecamp, pemagaran kandang, pemagaran hijau, makanan ternak, semak rumput & sapi 150 ekor	388,5000	Masuk dalam kegiatan penertiban tahun 2011,dengan keputusan diberi PERINGATAN
		4.PT.Lawata Permai H.idrus Usman,BSC Jl.Belimbing-Bima	a.06/HGU/BPN/1987 b.19/05/1987 c.HGU	a.pekat b.Doropeti	200,0000	Peternakan	Semak rumput	200,0000	Masuk dalam kegiatan penertiban tahun 2010
		5.PT.Asia Tunggal Inti M.Budiman Hasta Centre Blok 16 Lt.I Kav.9 Jl.S.Parman, Jakarta	a.05/HGU/1993 b.05 maret 1993 c.HGu a.540.3/03/1/03/52/62/1994 b.29 desember 1994 c.HGU	a.pekat b.pekat a.pekat b.Tolokalo	999,6 143,18	Penggembalaan ternak sapi Penggembalaan ternak sapi	Kandang dan barak, bak air minum hewan dekat mata air, sapi 100 ekor dan semak/ rumput	999,6 143,18	Masuk dalam kegiatan penertiban tahun 2011,dengan keputusan diberi PERINGATAN Masuk dalam kegiatan penertiban tahun 2011,dengan keputusan diberi PERINGATAN
		6.PT.Putra Purna Yudha Jl.Al Inabah No.22 Pancoran Jakarta Selatan	a.11/HGU/BPN/1989 b.17 oktober 1989 c.HGU	a.Pekat b.Doropeti	200,0000	peternakan	Semak/ rumput	200,0000	Masuk dalam kegiatan penertiban tahun 2010
6.	Kab.Bima	1.PT.Sondi Bima Sakti Dr.Sanusi H.Ibrahim Jl.Anggrek No.2 Kelapa Dua Kebun Jeruk Jakarta	a.540.3/02/1/62/1994 b.07 Juli 1994 c.HGU	a.Tawah b.Wera	112,0000	Peternakan sapi potong	Semak dan padang rumput	112,0000	Masuk dalam kegiatan penertiban tahun 2011,dengan keputusan diberi PERINGATAN
		2.PT.Sanggar Agro Karya Persada I Drs.H.Anas Moezakir,MBA Jl.Rajawali No.	a.60/HGU/BPN/1996 b.14 desember 1996 c.HGU	a.Sanggar b.Piong	598,8000	Peternakan sapi	Peternakan,rumah jaga dan satu kandang paksa		Masuk dalam kegiatan penertiban tahun 2011,dengan keputusan

NO.	KABUPATEN	NAMA PERUSAHAAN	JENIS HAK NO.TGL	LOKASI DESA, KECAMATAN	LUAS TANAH (Ha)	PERUN-TUKAN	PENGGUNAAN TANAH SAAT INI	LUAS TANAH TERINDIKASI TERLANTAR	KET
		11/5 kawasan Industri Pulogadung, Jakarta							diberi PERINGATAN
		3.PT.SANGGAR AGRO KARYA PERSADA I Drs.H.Anas Moezakir,MBA Jl.Rajawali No. 11/5 kawasan Industri Pulogadung ,Jakarta	a. 22/hgu/bpn /1999 b. 11 maret 1999 c. HGU	a.Sanggar b.Piong	3.962,0000	Perkebunan	Sudah tidak digunakan oleh pemegang hak, seluas 477 Ha telah dimanfaatkan oleh masyarakat 159 kk, sebagai lahan perkebunan mente, tegalan, serta pemukiman, fasilitas umum	3962,0000	Masuk dalam kegiatan penertiban tahun 2011,dengan keputusan diberi PERINGATAN
		4.PT.TERNAK LESTARI H.Jakariah H.Majid Jl.Tongkol ,Pasar raya kota Bima	a.540.3/01/1/01/62/1994 b.19/04/1994 c.HGU	a.Wera b.Nunggi	100,0000	peternakan	Semak dan rumput	100,0000	Masuk dalam kegiatan penertiban tahun 2011,dengan keputusan diberi PERINGATAN

Sumber: Biro Pemerintahan & Otda Setda Provinsi NTB, 2024

Persoalan tanah bukan persoalaan sederhana jika tidak mempunyai kemampuan dan kesabaran di atas orang rata-rata. Dengan bekal itu persoalan tanah ini bisa selesai dengan baik di NTB ini. Meski demikian persoalan tanah di NTB masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Masih ada sedikit masalah tersisa di Gili Trawangan, Mandalika, Rinjani dan berbagai tempat di NTB. Melalui pola kerjasama yang baik dengan Kantor Wilayah BPN/ATR NTB akan bisa selesaikan permaslahan dan konflik pertanahan di kemudian hari. Diharapkan beban berat yang menghadang bisa diurai satu per satu untuk kemudian bisa menghadirkan kemaslahatan bersama. Rapat koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) sebagai upaya percepatan Reforma Agraria di wilayah hutan, transmigrasi, Hak Guna Usaha yang habis, dan pengembangan penataan akses ketahanan pangan di Kecamatan Labangka, Sumbawa.

Di NTB terdapat empat Kabupaten telah melaksanakan kegiatan GTRA yaitu Lombok Utara, Lombok Barat, Sumbawa dan Bima. Dari Reformasi Agraria tahun 2020 lalu penataan aset sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) pelepasan kawasan hutan telah ditindaklanjuti dengan kegiatan retribusi tanah yaitu pensertifikatan tanah kepada masyarakat NTB sebanyak sebanyak 604 KK dengan luas 33 hektar yang telah diserahkan Presiden sertifikatnya secara virtual pada 22 September 2020. Ditambahkan sisa 36 ha di Lombok Barat ditindaklanjuti tahun 2022. Demikian juga penyelesaian konflik agrarian antara salah satu PT yang memiliki Hak Guna Usaha (HGU) dengan

masyarakat di Lombok Timur telah selesai juga telah diupayakan dengan musyawarah mufakat.

3. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Hal lain yang menjadi bagian urusan wajib non pelayanan dasar adalah perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Hal tersebut, merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia yang wajib dipenuhi dan dilindungi agar masa pertumbuhan anak dapat berjalan dengan optimal. Pentingnya pemenuhan hak-hak anak dikarenakan anak yang akan melanjutkan perjuangan bangsa. Upaya perlindungan dan pemenuhan hak bagi setiap anak merupakan kewajiban bagi negara. Upaya pemenuhan hak anak sudah dimulai sejak anak belum dilahirkan melalui pemenuhan gizi bagi ibu hamil. Pemenuhan hak dasar juga menjadi sangat penting dalam menjamin kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang anak.

Keberhasilan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dapat diukur dari capaian peringkat Kab/Kota Layak Anak (KLA). Penilaian KLA ini meliputi penilaian aspek kelembagaan yang meliputi kebijakan daerah tentang KLA, kelembagaan KLA dan keterlibatan masyarakat, dunia usaha dan media massa serta 5 klaster KLA yang meliputi perlindungan dan pemenuhan hak anak. Saat ini, pencegahan perkawinan anak, peningkatan peran orang tua dalam pengasuhan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan penurunan pekerja anak menjadi prioritas isu dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di Provinsi NTB.

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, kasus kekerasan terhadap anak masih relatif tinggi dan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021, jumlah kasus kekerasan anak mencapai 598 kasus dengan jumlah kasus terbesar terjadi di Kabupaten Lombok Timur dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 640 kasus dengan kasus terbanyak di Kabupaten Lombok Timur. Tahun 2023, cenderung mengalami penurunan kasus menjadi 607 kasus dan Kabupaten Lombok Timur menjadi lokus kasus kekerasan tertinggi selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Adapun perkembangan kasus kekerasan terhadap anak menurut Kab/Kota sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 70 Perkembangan kasus kekerasan terhadap anak menurut Kab/Kota Tahun 2020-2024

No	Kab/Kota	Kasus kekerasan terhadap anak				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Lombok Barat	27	73	66	79	55
2	Lombok Tengah	32	28	66	42	22
3	Lombok Timur	118	205	179	156	189
4	Sumbawa	44	51	45	39	15
5	Dompu	42	46	64	37	28
6	Bima	17	28	36	68	85

No	Kab/Kota	Kasus kekerasan terhadap anak				
		2020	2021	2022	2023	2024
7	Lombok Utara	97	96	104	95	115
8	Sumbawa Barat	24	11	24	20	20
9	Kota Bima	32	38	21	35	20
10	Kota Mataram	49	22	35	36	84
	JUMLAH	482	598	640	607	549

Sumber: Dinas P3AP2KB Provinsi NTB, 2025

Kasus kekerasan terhadap anak meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, trafficking, penelantaran dan kasus kekerasan lainnya. Dari berbagai bentuk kekerasan terhadap anak tersebut, angka tertinggi pada bentuk kekerasan yang dialami anak-anak yaitu kekerasan seksual. Selain kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap perempuan juga menjadi salah satu masalah dalam isu perlindungan perempuan di Provinsi NTB. Angka kasus kekerasan terhadap perempuan dalam lima tahun terakhir masih tinggi dan mengalami fluktuasi. Rincian perkembangan kasus kekerasan terhadap perempuan menurut Kab/Kota disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 71 Perkembangan kasus kekerasan terhadap perempuan menurut Kab/Kota Tahun 2020-2024

No	Kab/Kota	Kasus Kekerasan terhadap perempuan				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Lombok Barat	74	67	53	57	52
2	Lombok Tengah	18	10	35	26	19
3	Lombok Timur	59	185	51	48	88
4	Sumbawa	19	28	19	9	13
5	Dompu	26	22	67	54	17
6	Bima	14	53	44	58	52
7	Sumbawa Barat	11	10	15	16	17
8	Lombok Utara	17	28	14	51	28
9	Kota Bima	68	27	20	22	26
10	Kota Mataram	57	32	26	24	31
	JUMLAH	**363**	**462**	**344**	**365**	**312**

Sumber: Dinas P3AP2KB Provinsi NTB, 2025

Tingginya kasus kekerasan anak dan perempuan menunjukan bahwa sistem perlindungan anak dan perempuan di NTB masih lemah. Selain itu, tinggi nya kasus dari tahun ke tahun dapat pula menunjukan bahwa kesadaran masyarakat atau korban untuk melaporkan kekerasan ini semakin tinggi, karena data yang ditampilkan adalah data kekerasan yang dilaporkan. Partisipasi masyarakat pada tingkat pemerintahan terendah seperti di desa memiliki peranan yang sangat penting dalam pencegahan kasus kekerasan pada anak dan perempuan, selain itu peranan UPT PPA dalam penanganan kasus juga sangat strategis di setiap Kab/Kota dan juga Provinsi.

Hal lain yang manjadi isu utama pada perlindungan perempuan dan anak adalah perkawinan anak. Masalah perkawinan anak menjadi sangat penting di dan membutuhkan perhatian khusus di Provinsi NTB, dikarenakan prevalensi nya tertinggi kedua di Indonesia dan dampak dari perkawinan anak ini pada seluruh sektor pembangunan manusia. Kasus perkawinan anak membutuhkan kontribusi seluruh pihak, karena merupakan masalah lintas sektor dan mempunyai dampak yang luas dalam pembangunan manusia.

Tabel 2. 72 Kasus Perkawinan Anak Berdasarkan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Tinggi Agama Provinsi NTB Menurut Kab/Kota
Tahun 2020-2024

No	Kab/Kota	Kasus Perkawinan Anak				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kota Mataram	1	12	3	5	1
2	Kabupaten Lombok Barat	245	89	39	56	49
3	Kabupaten Lombok Tengah	145	307	47	40	14
4	Kabupaten Lombok Timur	40	141	31	29	15
5	Kabupaten Lombok Utara	-	-	-	-	-
6	Kabupaten Sumbawa Barat	120	27	21	3	1
7	Kabupaten Sumbawa	108	163	122	87	72
8	Kabupaten Dompu	140	139	171	194	130
9	Kabupaten Bima	13	249	276	309	299
10	Kota Bima	-	-	-	-	-
JUMLAH		**370**	812	1.127	710	723

Sumber: Dinas P3AP2KB Provinsi NTB, 2024

4. Pangan

Ketahanan pangan dapat terwujud melalui keterlibatan seluruh komponen bangsa, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ketahanan pangan dirumuskan sebagai “kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan”. Ketahanan pangan merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan

domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro; tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan dukungan kebijakan ekonomi makro yang mampu mewujudkan stabilitas ekonomi menjamin stabitas pasokan dan harga pangan.

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan yang mantap dan berkesinambungan, ada 3 (tiga) komponen yang harus diperhatikan, yaitu : 1) ketersediaan pangan yang cukup dan merata; 2) keterjangkauan pangan yang efektif dan efisien; dan 3) konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman dan halal. Ketiga komponen tersebut diwujudkan sampai dengan tingkat rumah tangga, dengan : (1) memanfaatkan potensi sumberdaya lokal yang beragam untuk peningkatan ketersediaan pangan dan teknologi spesifik local dan ramah lingkungan; (2) Mendorong masyarakat untuk mau dan mampu mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman dan halal untu kesehatan; (3) Mengembangkan perdagangan pangan, sehingga menjamin pasokan pangan ke seluruh wilayah dan terjangkau oleh masayarakat; dan (4) Memberikan jaminan bagi masyarakat miskin dalam mengakses pangan yang bersifat pokok.

Tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator yang digunakan dalam IKP didasarkan pada: (i) hasil review terhadap indeks ketahanan pangan global; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan; dan (iv) ketersediaan data secara rutin untuk periode tertentu (tahunan) serta mencakup seluruh Kab/Kota dan provinsi.

Gambar 2. 10 Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi

Sumber : Badan Ketahanan Nasional, Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2023

Selanjutnya konsumsi pangan penduduk secara kuantitas yang ditunjukkan melalui volume konsumsi pangan penduduk (gram/kap/hari dan kilogram/kap/tahun), konsumsi energi penduduk (kkal/kap/hari) dan konsumsi protein penduduk (gram/kap/hari). Salah satu instrumen atau indikator yang digunakan dalam menilai kualitas konsumsi pangan adalah Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi. PPH mengelompokkan pangan menjadi 9 kelompok yaitu padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, minyak dan lemak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, serta aneka bumbu dan bahan minuman. Sasaran Skor PPH ideal yaitu 100 persen sesuai dengan bobotnya masing-masing.

Berdasarkan perkembangan skor PPH Provinsi NTB lima tahun terkahir menunjukkan bahwa pola konsumsi mendekati ideal sesuai dengan prinsip gizi seimbang. Artinya, masyarakat mengonsumsi berbagai jenis makanan dengan proporsi belum tepat, termasuk karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Sebagian ada ketergantungan pada satu jenis pangan tertentu, misalnya hanya pada beras atau karbohidrat lain.

Grafik 2. 98 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Provinsi NTB Tahun 2020-2024

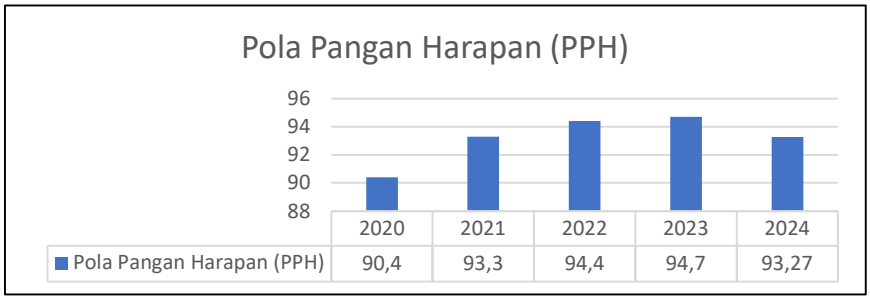

Sumber : Badan Ketahanan Nasional, 2024 (diolah Bappeda NTB)

Sedangkan perkembangan kualitas konsumsi pangan penduduk NTB berdasarkan kelompok bahan pangan dari tahun 2020 s.d 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2. 73 Perkembangan Kualitas Konsumsi Pangan Penduduk NTB Tahun 2020-2024 berdasarkan Kelompok Bahan Pangan

No	Kelompok Pangan	Skor PPH				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Padi-padian	25	25	25	25	25
2	Umbi-umbian	1,1	1,1	1,1	1,2	0,9
3	Pangan Hewani	24	24	24	24	24
4	Minyak dan Lemak	5	5	5	5	5
5	Buah/biji berminyak	0,5	0,5	0,5	0,4	0,37
6	Kacang-kacangan	6,2	6,2	6,2	7,7	6,9
7	Gula	1,5	1,5	1,5	1,4	1,1
8	Sayuran dan buah	30	30	30	30	30
9	Lain-lain	-	-	-	-	-
	Jumlah	90,4	93,3	94,4	94,7	93,27

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, 2024

Berdasarkan grafik dan tabel di atas terlihat bahwa skor PPH Konsumsi Penduduk NTB Tahun 2024 sebesar 93,27 point mengalami penurunan sebesar 1,43 Point (-1,51%) dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 94,70 point. Hal ini disebabkan karena penurunan konsumsi kelompok pangan: umbi-umbian, buah/biji berminyak, kacang-kacangan serta gula. Capaian Skor PPH Konsumsi Tahun 2024 masih dibawah target akhir RPD pada tahun 2026 sebesar 97,22 Point dan masih lebih rendah dari skor ideal yang dipersyaratkan sebesar 100 point.

Permasalahan yang menjadi penyebab kualitas konsumsi pangan penduduk NTB belum ideal adalah: 1) Tingginya konsumsi kelompok pangan padi-padian khususnya beras; dan 2) Rendahnya rasio konsumsi kelompok pangan umbi-umbian, buah/biji berminyak, kacang-kacangan dan gula terhadap standar konsumsi ideal kelompok pangan tersebut.

Permasalahan yang masih dihadapi adalah tingginya konsumsi padi-padian khususnya beras yang dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain : a) perilaku masyarakat yang merasa belum makan jika belum makan nasi; b) masih rendahnya daya beli masyarakat; c) rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pola pangan beragam dan bergizi seimbang dan masih adanya keterbatasan aksesibilitas terhadap pangan; d) kurang berkembangnya teknologi untuk memproduksi maupun mengolah bahan pangan terutama pangan lokal non beras dan non terigu.

Tingkat konsumsi beras penduduk NTB Tahun 2024 sebesar 119,35 Kg/Kap/Tahun. Capaian ini masih sangat tinggi jika dibandingkan dengan standar ideal yang dipesyaratkan sebesar 100,4 Kg/Kap/Tahun. Konsumsi beras tahun 2024 ini juga mengalami penurunan sebesar 0,05 Kg/Kap/Tahun (0,04%) dibandingkan dengan konsumsi beras tahun 2023 sebesar 119,4 Kg/Kap/Tahun. Perkembangan tingkat konsumsi beras penduduk NTB Tahun 2020 s.d 2024 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 99 Perkembangan Konsumsi Beras Penduduk NTB Periode Tahun 2020-2024

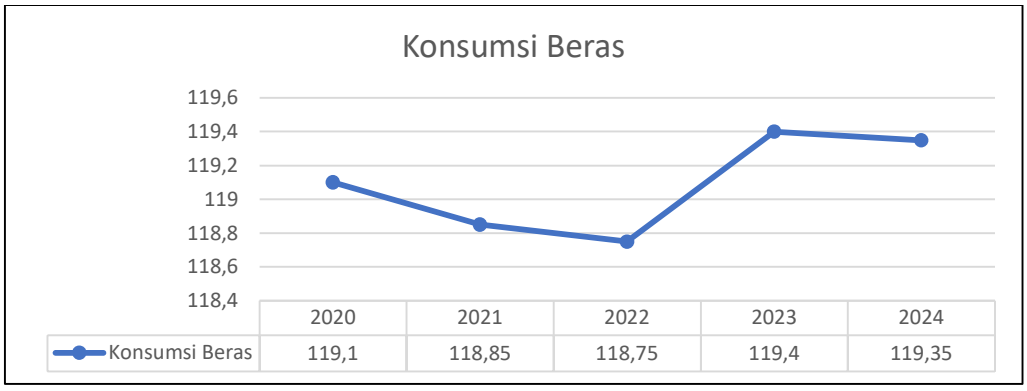

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, 2024

Selanjutnya untuk melihat Jumlah Penduduk Rawan Pangan diukur dengan indikator kinerja Angka Rawan Pangan (ARP). Pada tahun 2018 telah dilakukan upaya penyempurnaan perhitungan penduduk rawan pangan dengan metode PoU (Prevalensi

of Undernourishment) atau prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan dibawah kebutuhan minimum energi/Minimum Dietary Energy Reguirement (MDER) untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif sesuai dengan tinggi badan menurut umur, jenis kelamin serta konsumsi kalori.

5. Lingkungan Hidup

Kondisi kualitas lingkungan suatu wilayah untuk memantau dan mengevaluasi keberlanjutan pembangunan terkait lingkungan hidup digambarkan melalui pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH Provinsi NTB selama periode 2020–2024 menunjukkan tren positif dengan peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2020 nilai IKLH tercatat sebesar 68,58, kemudian meningkat menjadi 69,89 pada tahun 2021, 70,56 pada tahun 2022, 71,92 pada tahun 2023, dan mencapai 73,18 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan kualitas pengelolaan lingkungan, meskipun masih terdapat dinamika pada masing-masing komponen penyusunnya. Secara umum, peningkatan IKLH NTB dari 68,58 pada 2020 menjadi 73,18 pada 2024 menunjukkan adanya kemajuan dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerah. Kualitas udara dan laut mengalami perbaikan signifikan, sementara kualitas tutupan lahan relatif stabil. Namun demikian, kualitas air (IKA) masih menjadi tantangan utama yang harus mendapatkan perhatian lebih serius dalam perencanaan pembangunan daerah ke depan.

Tabel 2. 74 Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi NTB Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	**68,58**	**69,89**	**70,56**	**71,92**	**73,18**
Indeks Kualitas Air (IKA)	50,98	45,10	43,39	47,78	47
Indeks Kualitas Udara (IKU)	88,63	88,52	89,3	90,21	93,13
Indesk Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	66,74	65,59	65,61	66,60	66,49
Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	67,49	80,22	89,48	82,88	85,83

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2024

Berdasarkan tabel di atas bisa dilihat bahwa nilai IKA NTB masih dalam kondisi buruk dan terus mengalami penurunan sejak tahun 2020, hal ini disebabkan sebagian besar sampel memiliki nilai DO yang tidak memenuhi nilai baku mutu dan nilai fecal coliform yang tinggi. Oksigen terlarut atau DO (dissolved oxygen) adalah jumlah oksigen terlarut dalam air yang berasal dari fotosintesa dan absorbs atmosfer/udara. Oksigen terlarut di suatu perairan sangat berperan dalam proses penyerapan makanan oleh mahkluk hidup dalam air, jika kadar oksigen terlarut yang terlalu rendah akan menimbulkan bau yang tidak sedap akibat degradasi anaerobik yang mungkin saja terjadi. Sebanyak 117 dari 120 sampel yang diambil dalam pemantauan kualitas air

sungai pada tahun 2020 memiliki nilai DO diatas 4 mg/L sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 22 Tahun 2021. Sehingga dari komponen pembentuk IKLH yang menjadi perhatian adalah pada Indeks Kualitas Air (IKA) skornya masih dibawah 50 persen, yang mengindikasikan bahwa kualitas air di Provinsi NTB belum memenuhi standar baku mutu lingkungan. Ini berarti air di sungai, danau, waduk, atau sumber air lainnya mengandung zat pencemar dalam konsentrasi tinggi, yang dapat mengganggu ekosistem dan menimbulkan risiko bagi kesehatan manusia.

Sementara untuk nilai indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) yang merupakan ukuran untuk menunjukkan sejauh mana lahan di suatu wilayah dikelola dengan baik dan berkelanjutan serta kondisi tutupan lahan berperan dalam menjaga kualitas lingkungan. Selanjutnya IKTL digunakan untuk memantau keseimbangan antara penggunaan lahan untuk pembangunan, pertanian, dan kawasan hijau guna memastikan tidak terjadi degradasi lingkungan namun sampai dengan tahun 2024 menunjukkan nilai IKTL Provinsi NTB masih rendah dikarenakan luas lahan kritis yang meningkat dan terdapat lahan kritis yang belum direhabilitasi serta masih maraknya okupasi lahan untuk penanaman tanaman semusim.

Neraca Pengelolaan Sampah

Neraca pengelolaan sampah merupakan indikator untuk memetakan alur timbulan, pengelolaan, dan pembuangan sampah di suatu wilayah. Tujuannya adalah untuk mengetahui jumlah timbulan sampah, jenis sampah, cara pengelolaannya, serta berapa banyak sampah yang berhasil ditangani atau yang berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA). Dengan neraca ini, pemerintah dapat mengukur efektivitas sistem pengelolaan sampah dan menentukan strategi perbaikan. Dimana neraca pengelolaan sampah merupakan penjumlahan nilai persentase penanganan sampah dan presentase pengurangan sampah.

Grafik 2. 100 Neraca Pengelolaan Persampahan Tahun 2020-2024

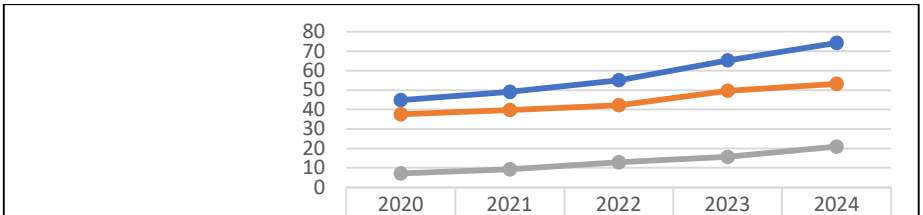

	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pengelolaan Sampah (%)	44,82	49,02	54,98	65,31	74,15
Persentase Penanganan Sampah (%)	37,63	39,68	42,2	49,64	53,2
Persentase Pengurangan Sampah (%)	7,19	9,34	12,78	15,67	20,95

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehhutanan Provinsi NTB, 2023

Berdasarkan grafik di atas neraca pengelolaan persampahan selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan baik dari penanganan sampah dan pengurangan sampah namun tidak terlalu signifikan. Hal ini disebabkan beberapa kendala terkait minimnya sarpras pengangkutan sampah, reaktivasi TPS 3R, dan pembangunan serta pengembangan pusat-pusat pengolahan sampah skala desa, belum optimalnya pencatatan data pengurangan sampah di sebagian besar Kab/Kota dan masih banyaknya timbunan sampah illegal di sungai, pantai, hutan akibat rendahnya perhatian dan kesadaran masyarakat dalam pengelolan sampah. Hal ini akan berimbas pada sektor pariwisata yang merupakan salah satu sektor andalan sebagai penopang ekonomi masyarakat di NTB. Penanganan sampah yang berada di bawah kewenangan Provinsi NTB dikelola oleh UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Kebon Kongok mulai Januari 2018. TPA ini melayani sampah yang masuk dari Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan rangkaian kegiatan untuk mengelola data dan dokumen kependudukan serta mencatat peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, seperti kelahiran, kematian, pernikahan, dan perceraian. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa setiap penduduk memiliki dokumen identitas resmi dan tercatat secara sah dalam sistem negara. Sehingga setiap penduduk di suatu wilayah mendapatkan identitas resmi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran.

Tahun 2023, jumlah penduduk NTB yang wajib KTP adalah 5.576.992 orang, dari jumlah tersebut penduduk yang telah melakukan perekaman sebanyak 3.898.224 orang atau atau rata–rata persentase perekaman di 10 Kab/Kota se–NTB sebesar 99,05%, masih terdapat 32.502 orang penduduk yang belum melakukan perekaman e-KTP. Sedangkan dari 3.898.224 orang yang telah melakukan perekaman, 3.865.506 orang atau 99,16 % yang telah dilakukan pencetakan e-KTP. Meskipun target belum terlampaui, evaluasi tetap dilakukan untuk terus dapat meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat terkait kebutuhan dokumen kependudukan. Beberapa hal yang menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti adalah meningkatkan kualitas SDM petugas ASN tersebut. Disamping itu juga diharapkan Kab/Kota dapat menambah peralatan adminduk dalam bentuk mobil keliling dari dana APBD Kab/Kota.

Tabel 2. 75 Rekapitulasi Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Kab/Kota Se-NTB Sampai Dengan Desember 2024

NO	Provinsi/Kab/Kota	Smt I 2024		PEREKAMAN		CETAK KTP	
		Jmlh Penduduk	Wajib KTP	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	NTB	5.666.314	4.019.306	4.002.119	99,57	3.976.259	99,35
2	KAB. LOMBOK BARAT	748.580	530.204	535.920	101,08	534.585	99,75

NO	Provinsi/Kab/Kota	Smt I 2024		PEREKAMAN		CETAK KTP	
		Jmlh Penduduk	Wajib KTP	JUMLAH	%	JUMLAH	%
3	KAB. LOMBOK TENGAH	1.106.619	779.840	786.857	100,9	782.163	99,4
4	KAB. LOMBOK TIMUR	1.427.856	990.842	1.004.304	101,36	998.931	99,47
5	KAB. SUMBAWA	526.008	389.906	368.330	94,47	367.222	99,7
6	KAB. DOMPU	270.664	192.276	194.755	101,29	193.747	99,48
7	KAB. BIMA	541.319	393.403	372.788	94,76	361.860	97,07
8	KAB. SUMBAWA BARAT	153.575	107.286	107.858	100,53	107.769	99,92
9	KAB. LOMBOK UTARA	268.186	189.693	188.523	99,38	188.115	99,78
10	KOTA MATARAM	459.683	329.141	326.670	99,25	325.959	99,78
11	KOTA BIMA	163.824	116.715	116.114	99,49	115.908	99,82

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan SipilProvinsi NTB, 2025

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan komposit dari Ketahanan Sosial, Ketahanan Ekonomi serta Ketahanan Ekologi Desa yang dikembangkan lebih lanjut melalui 22 variabel dan 52 indikator. IDM ditujukan untuk mengetahui tingkat kemajuan dan kemandirian desa serta informasi tentang pembangunan desa. IDM mengklasifikasikan desa dalam 5 satus yaitu Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri.

Tahun 2019, masih terdapat desa dengan status Sangat Tertinggal yakni sebanyak 5 desa, kemudian desa dengan status Tertinggal sebanyak 108 desa. Tahun 2021, sudah tidak terdapat desa dengan status Sangat Tertinggal, 2 desa sangat tertinggal yang ada pada tahun 2020 berhasil dinaikkan statusnya, sehingga keluar dari status Sangat Tertinggal. Kemudian jumlah desa dengan status Tertinggal pada tahun 2022 sebanyak 55 desa, bila dibandingkan dengan tahun 2021 atau menurun sebanyak 18 desa. Pada tahun 2023 jumlah desa sebanyak 1021 desa dengan status Tertinggal sebanyak 7 desa dan desa dengan status maju menjadi 480 desa.

Tabel 2. 76 Rincian Status Desa tahun 2020 – 2024

KABUPATEN	JUMLAH DESA	SANGAT TERTINGGAL			TERTINGGAL				BERKEMBANG				MAJU				MANDIRI			
		2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Lombok Barat	119	0	0	0	0	0	0	0	71	54	33	24	71	55	69	73	6	10	17	22
Lombok Tengah	142	0	0	0	0	0	0	0	42	25	26	22	42	73	64	53	15	29	52	67
Lombok Timur	239	0	0	0	0	0	0	0	91	36	26	12	129	143	125	92	19	60	88	135
Sumbawa	157	0	0	0	10	49	2	0	98	55	35	23	49	81	79	69	0	15	41	65
Dompu	72	0	0	0	0	0	0	0	54	38	22	11	18	29	37	37	0	5	13	24
Bima	191	2	0	0	63	6	5	0	104	106	131	108	23	34	47	65	1	2	8	18
Sumbawa Barat	58	0	0	0	0	0	0	0	17	8	1	0	35	38	39	25	5	11	18	33
Lombok Utara	43	0	0	0	0	0	0	0	20	11	8	4	17	25	20	19	6	7	15	20
Jumlah	**1021**	**2**	**0**	**0**	**73**	**55**	**7**	**0**	**497**	**333**	**282**	**200**	**384**	**478**	**480**	**389**	**52**	**139**	**252**	**331**

Sumber: IDM Kementerian Desa Tahun 2024

Lembaga Adat yang terbentuk dan aktif adalah salah satu indikator program prioritas yang digunakan untuk mengukur kinerja DPMPD Dukcapil Provinsi NTB. Lembaga Adat merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa. Pencapaian sampai dengan akhir Desember 2023, jumlah lembaga adat yang telah terbentuk sebanyak 786 lembaga adat dari 1.166 desa/kelurahan di NTB.

Tabel 2. 77 Rekapitulasi Jumlah Lembaga Adat di Provinsi NTB Tahun 2019-2024

NO	KAB. / KOTA	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa dan Kelurahan	Jumlah Lembaga Adat					
						2019	2020	2021	2022	2023	2024
	NTB	**117**	**1021**	**145**	**1166**	**768**	**779**	**786**	**786**	**786**	**786**
1	LOMBOK BARAT	10	119	3	122	45	49	50	50	50	50
2	LOMBOK TENGAH	12	142	12	154	129	130	131	131	131	131
3	LOMBOK TIMUR	21	239	15	254	230	232	232	232	232	232
4	SUMBAWA	24	157	8	165	149	150	151	151	151	151
5	DOMPU	8	72	9	81	21	21	23	23	23	23
6	BIMA	18	191	0	191	65	66	66	66	66	66
7	SUMBAWA BARAT	8	58	7	65	64	64	64	64	64	64
8	LOMBOK UTARA	5	43	0	43	32	32	32	32	32	32
9	KOTA MATARAM	6	0	50	50	27	27	29	29	29	29
10	KOTA BIMA	5	0	41	41	6	8	8	8	8	8

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB, 2025

Meskipun lembaga adat yang terbentuk sudah cukup banyak, namun legalitas dan penyiapan perangkat kelembagaannya belum sepenuhnya terpenuhi. Upaya legalisasi dan penyiapan perangkat lembaga adat sudah dan sedang berproses sampai dengan saat ini. Pembentukan lembaga adat juga bertujuan menghidupkan kembali nilai-nilai luhur adat/budaya lokal atau local wisdom sebagai landasan utama kehidupan bermasyarakat termasuk dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai program pembangunan yang dimulai dari desa dengan masyarakat sebagai subyek pembangunannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa, Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) merupakan lembaga pelayanan Teknologi Tepat Guna (TTG) antar desa yang berkedudukan di kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG. Tahun 2023, posyantek baru terbentuk di 77 kecamatan (65,81%) dari 117 kecamatan yang ada. Hanya ada 1 kabupaten yang sama sekali belum membentuk posyantek yaitu kabupaten Lombok Tengah.

Tabel 2. 78 Posyantek yang telah terbentuk di Provinsi NTB

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Posyantek		Kecamatan	No. / Tanggal SK
1.	Kota Mataram	6	Posyantek	Cakranegara, Ampenan, Selaparang, Sekarbela, Sandubaya, Mataram	Keputusan Walikota Mataram Nomor: 157 / II / 2018, Tanggal: 2 Pebruari 2018
2.	Kabupaten Lombok Utara	5	Posyantek	Bayan, Pemenang, Tanjung, Gangga, Kayangan	Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor: 74/05/DP2KBPMD/2017, Tanggal: 1 Pebruari 2017
3.	Kabupaten Sumbawa Barat	8	Posyantek	Jereweh, Maluk, Sekongkang, Brang Rea, Brang Ene, Seteluk, Poto Tano, Taliwang	Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor: 4012 tahun 2017 Tanggal: 23 November 2017
4.	Kabupaten Lombok Barat	1	Posyantek	Kecamatan Labuapi	Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor: 414.3/52/DPMPD/2010; Tanggal: 6 mei 2010
5	Kabupaten Sumbawa	24	Posyantek	Empang, Torano, Plampang, Labangka, Maronge, Lape, Moyo Hilir, Unter Iwes, Utan, Alas, Alas Barat	Keputusan Bupati Sumbawa Nomor: 51 Tahun 2011 Tanggal: 31 Januari 2011
				Sumbawa, Ropang, Lunyuk, Orong Telu, Moyo Hulu, Moyo Utara	Keputusan Bupati Sumbawa Nomor: 1254 Tahun 2011, Tanggal: 17 Oktober 2011
				Buer, Labuan Badas, Lopak, Batu Lanteh, Lenangguar, Lantung, Rhee	Keputusan Bupati Sumbawa Nomor: 1130 Januari 2012, Tanggal: 10 September 2012
6	Kabupaten Bima	9	Posyantek	Soromandi, PAlibelo, LAnggudu, Wera, Ambalawi, Sanggar, Lambitu, Madapangga, Bolo	Keputusan Bupati Bima Nomor: 188.45/276/06.16/tahun2021 Tanggal: 2 Oktober 2021
7	Kota Bima	1	Posyantek	Mpunda	Keputusan Walikota Bima Nomor: 188.45/183/050/II/2020 Tanggal: 21 Februari 2020
8	Kabupaten Lombok timur	21	Posyantek	Keruak, Sakra, Terara, Sikur, Mssbagik, Sukamulia, Selong, Pringgabaya, Aikmel, Sembalun, Sambalia, Montong Gading, Pringgasela, Suralaga, Wanasaba, Suela, Labuahn Haji, Sakra Barat, Sakra Timur, Jerowaru, Lenek	Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/64/PMD/2021 Tanggal: 22 Januari 2021
9	Kabupaten Dompu	2	Posyantek	Kempo, Pajo	Keputusan Bupati Dompu Nomor: 43 Tahun 2022

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Posyantek		Kecamatan	No. / Tanggal SK
Total		77	Posyantek		

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB, 2024

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan, DPMPD Dukcapil Provinsi NTB menyelenggarakan program Pemberdayaan BUMDes dalam bentuk pemberian bantuan modal. BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes dimaksudkan untuk menampung seluruh kegiatan masyarakat di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan atau kerjasama antar desa.

Dari 1.021 desa yang ada di NTB, sampai tahun 2024 telah terbentuk 1.005 BUMDes aktif. BUMDes berkembang baik di NTB salah satunya didorong oleh adanya kebijakan penggunaan Dana Desa untuk membentuk dan mengembangkan BUMDes.

Dalam rangka mewujudkan bumdes aktif, tahun 2021 pemerintah Provinsi NTB melakukan penguatan kelembagaan BUMDes dengan menyalurkan bantuan guna memperkuat permodalan BUMDes. Tahun 2022 bantuan yang diberikan kepada BUMDes tidak dalam bentuk bantuan modal, melainkan bantuan alat untuk 9 BUMDes, sedangkan pada tahun 2024 tidak ada pemberian bantuan kepada BUMDes, hanya dilakukan peningkatan kapasitas bagi pengelola BUMDes.

Sejak Tahun 2022, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah menetetapkan Keputusan Menteri PDTT tentang Formula Pemeringkatan BUMDes / BUMDesma. Kepmendes tersebut dikeluarkan adalah sebagai dasar untuk mengukur perkembangan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) / Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMdesma). Disamping itu juga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) juga menetapkan peraturan tentang Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) / Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma). untuk menjalankan kedua peraturan tersebut antara Kemendes PDTT dan Kemenkumham berkolaborasi dalam menerbitkan lagalisasi BUMdes/BUMDesma dalam bentuk Badan Hukum.

Berdasarkan hasil pemeringkatan yang telah dilakukan dan di keluarkan oleh Kemendes PDTT dari 1.005 Bumdes pada 8 kabupaten terdapat 10 BUMDes Maju; 85 BUMDes Berkembang; 185 BUMDes Pemula; dan 302 BUMDes Perintis. Totalnya sebanyak 582 Bumdes sudah mendapatkan pemeringkatan.

Tabel 2. 79 Rekapitulasi Perkembangan BUMDes Aktif di NTB 2020-2024

No	Kabupaten	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah BUMDes				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Lombok Timur	21	239	239	239	239	239	239
2	Lombok Tengah	12	142	127	127	127	127	127
3	Lombok Barat	10	119	116	116	119	119	119
4	Lombok Utara	5	43	33	33	43	43	43
5	Sumbawa	24	157	154	157	157	157	157
6	Dompu	8	72	72	72	72	72	72
7	Bima	18	191	189	189	191	191	191
8	Sumbawa Barat	8	58	54	55	57	57	57
	JUMLAH	**106**	**1021**	**984**	**988**	**1005**	**1005**	**1005**

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB, 2024

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Laju Pertumbuhan penduduk alamiah dipengaruhi oleh dua komponen utama yaitu tingkat kelahiran (fertilitas) dan tingkat kematian (mortalitas). Fertilitas dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti jumlah penduduk perempuan, jumlah penduduk usia produktif, status perkawinan, dan usia pada perkawinan pertama.

Tabel 2. 80 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk NTB Tahun 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk	5.320.092	5.387.148	5.473.970	5.560.287	5.646.015
Laju Petumbuhan Penduduk	1,63	1,65	1,61	1,62	1,60

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2024.

Jumlah penduduk NTB terus bertambah setiap tahunnya berbeda dengan laju pertumbuhan penduduk yang menurun dari tahun 2020 (1,63%) sampai tahun 2024 (1,60%). Penurunan laju pertumbuhan penduduk per tahun juga inline dengan angka total fertility rate (TFR) NTB yang sejak Sensus Penduduk 1971 (6,66%) terus menurun sampai Sensus Penduduk 2020 (2,43%). Pengendalian penduduk ini sangat perlu untuk dilakukan mengingat keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan sehingga pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali sangat berdampak negatif pada aspek sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Jumlah penduduk yang terus meningkat sementara ruang untuk menampung penduduk terbatas sehingga perlu program pengendalian penduduk salah satunya adalah program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, harapannya jumlah penduduk dapat terkendali, lingkungan dapat terjaga kelestariannya dan kualitas penduduk yang ada terjamin.

Grafik 2. 101 Angka Kelahiran Total / Total Fertility Rate

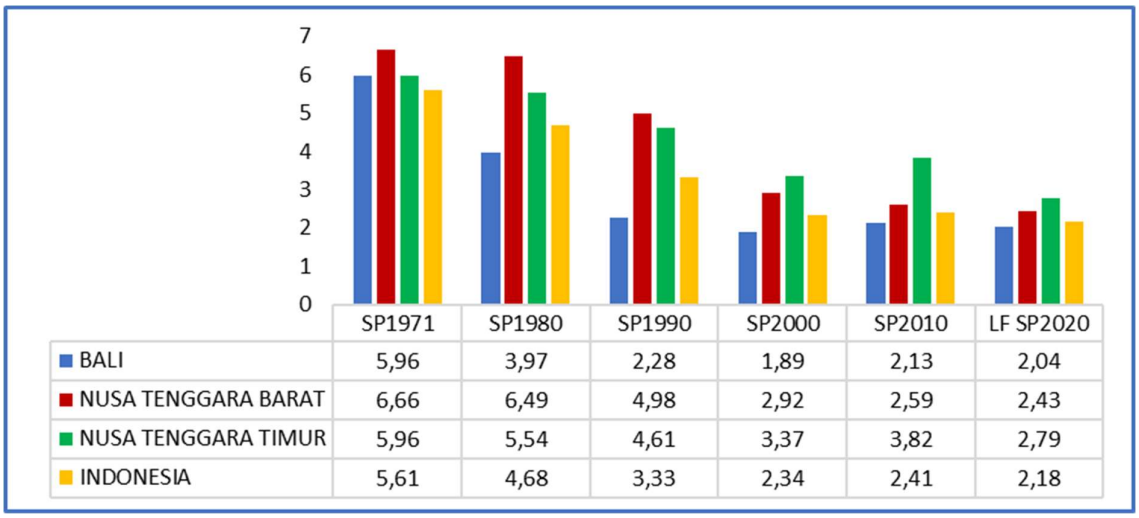

	SP1971	SP1980	SP1990	SP2000	SP2010	LF SP2020
BALI	5,96	3,97	2,28	1,89	2,13	2,04
NUSA TENGGARA BARAT	6,66	6,49	4,98	2,92	2,59	2,43
NUSA TENGGARA TIMUR	5,96	5,54	4,61	3,37	3,82	2,79
INDONESIA	5,61	4,68	3,33	2,34	2,41	2,18

Sumber : BPS LF SP2020

Keberhasilan dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk serta keluarga akan memperbaiki segala aspek dan dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat untuk lebih maju, mandiri dan dapat berdampingan dengan bangsa lain dan dapat mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan sehingga penduduk menjadi sumberdaya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional dan dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata. Pemerintah Provinsi NTB tahun 2023 menyelenggarakan program Keluarga Berencana dengan maksud untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas (Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009).

Progam pengendalian penduduk tahun 2023 juga dilaksanakan melalui penyusunan dokumen Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) Provinsi NTB Tahun 2025–2045. Proses penyusunan dokumen GDPK ditargetkan selesai lebih cepat sehingga dapat dimanfaatkan oleh instansi terkait. Akan tetapi, terdapat tiga kendala yang dihadapi. Pertama, data sektoral belum tersedia sesuai dengan target dan minimnya data sektoral yang membuat proses penyusunan dokumen menjadi terhambat. Kedua, update data belum dilakukan. GDPK membutuhkan data dukung yang memadai sehingga tidak adanya update data membuat proses penyusunan dokumen GDPK menjadi terhambat. Ketiga, keterbatasan tim penyusun. Tidak adanya dukungan tenaga ahli membuat dokumen yang disusun kurang sempurna.

Menyikapi ketiga permasalahan dalam penyusunan dokumen GDPK, DP3AP2KB melakukan tiga upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Pertama, membentuk tim

penyusun penyempurnaan GDPK untuk memaksimalkan pengumpulan data sektoral yang belum tersedia. Kedua, mengoptimalkan koordinasi dengan BPS, Dukcapil, BKKBN, dan OPD/Instansi terkait untuk mendapatkan data yang sudah diupdate. Ketiga, melibatkan tenaga ahli agar dokumen GDPK dapat dirancang secara baik dan tepat waktu. DP3AP2KB menargetkan penyelesaian dokumen GDPK dalam waktu dekat, hal ini agar keputusan Gubernur terkait dokumen GDPK segera diterbitkan sehingga dapat segera disosilisasikan dan dimanfaatkan oleh perangkat daerah.

Selain penyusunan dokumen GDPK, pada tahun 2023 DP3AP2KB juga melaksanakan kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi aplikasi Sistem Peringatan Dini Kependudukan (Siperindu) dengan melibatkan instansi terkait di Kabupaten Lombok Timur. Kegiatan ini menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Perlu adanya petugas atau operator di Provinsi dan Kabupaten yang mengelola Siperindu.
2. Provinsi dan Kabupaten Lombok Timur melaporkan peringatan dini Pengendalian Penduduk sesuai indikator setiap awal tahun melalui Siperindu
3. Perlunya kabupaten dan provinsi untuk melakukan koordinasi lintas sektor terkait dengan indikator Siperindu yang ditetapkan
4. Menyusun rencana aksi Siperindu untuk Provinsi dan Kabupaten sesuai dengan Kepmendagri
5. Provinsi melakukan pembinaan peningkatan dan pengembangan Siperindu di Kab/Kota se-Provinsi NTB.

Salah satu upaya untuk menekan laju pertumbuhan penduduk adalah dengan meningkatkan kesertaan ber-KB. Mendukung upaya tersebut, DP3AP2KB melaksanakan program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan sub kegiatan Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB. Kegiatan ini dilaksanakan di tiga kabupaten, yaitu Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Utara. Sasaran peserta pada kegiatan tersebut yaitu, unsur Ormas, kader Posyandu, Darma Wanita, dan Dinas Pengampu urusan Pengendalian Penduduk. Total keseluruhan peserta berjumlah 105 (seratus lima) orang.

Kegiatan Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB bertujuan untuk: 1) mengenal permasalahan dalam pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB, 2) mengetahui sumber daya atau segenap potensi yang ada dalam peningkatan dan pengembangan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB; dan 3) mendapat masukan peran organisasi kemasyarakatan dalam pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.

Berdasarkan data BPS NTB (2024), persentase wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin dan menggunakan KB pada tahun 2023 mencapai 57,82 persen, angka

ini meningkat signifikan dibandingkan tahun 2022 (53,89%). Hal ini menunjukkan bahwa kesertaan ber KB di NTB sudah cukup tinggi. Upaya untuk lebih meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat KB sebagai salah satu upaya preventif untuk menjaga jarak kehamilan untuk mencegah kematian bayi dan kematian ibu saat melahirkan, perlu lebih digalakkan, berkolaborasi dengan masyarakat melalui kegiatan-kegaitan posyandu ataupun melalui kegiatan PKK.

Grafik 2. 102 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin dan menggunakan KB di Provinsi NTB 2019-2024

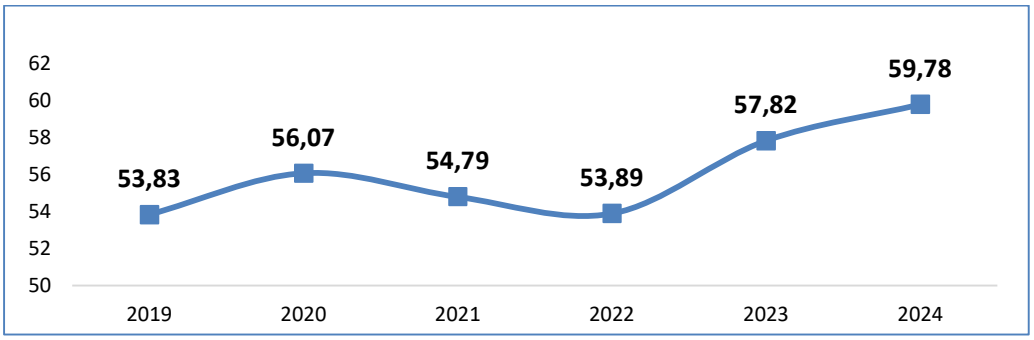

Sumber : BPS Provinsi NTB, 2025.

Capaian indikator median usia kawin pertama (MUKP) Perempuan di Provinsi NTB tahun 2023 adalah 2,80* tahun (angka sementara). Capaian ini masih di bawah target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. DP3AP2KB terus mendorong peningkatan MUKP Perempuan salah satunya melalui program peningkatan keluarga sejahtera (KS) dengan kegiatan "Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling – Remaja (PIK-R)" di Kampung KB. Kegiatan fasilitasi tersebut dilakukan untuk menguatkan kelompok PIK-R dalam menyampaikan informasi mengenai pendewasaan usia perkawinan, pemberian keterampilan hidup, pelayanan konseling, serta rujukan bagi penyiapan kehidupan berkeluarga untuk Remaja. Di samping itu, kegiatan tersebut juga bertujuan untuk mencegah stunting, perilaku bullying, dan mendeteksi persoalan yang dihadapi oleh remaja.

Pada tahun 2023, fasilitasi ini telah dilaksanakan di 3 Kab/Kota dengan sasaran kepala sekolah, kepala desa, tokoh pemuda, pengelola PIK-R, dan dinas terkait. Kegiatan fasilitasi juga dimaksudkan untuk mendukung program Generasi Berencana (GENRE) yang dikelola dari, oleh, dan untuk remaja sebagai sarana komunikasi, informasi, dan konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga, serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya yang berkaitan dengan remaja.

Jika melihat rata-rata usia kawin pertama perempuan di NTB lima tahun terakhir tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi dan masih berkisar di usia 20 tahun. Data menunjukkan bahwa rata-rata usia kawin pertama perempuan di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok

Utara, masih berkisar 19-20 tahun. Rata-rata usia kawin pertama perempuan di 4 kabupaten tersebut lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata usia kawin pertama perempuan di Kabupaten Sumbawa, Dompu, Bima, Sumbawa Barat, Kota Mataram dan Kota Bima. Untuk terus meningkatkan rata-rata usia kawin pertama perempuan harus kolaborasi lintas sektor dan lintas program, keterlibatan pemerintah pusat sampai dengan pemerintahan desa termasuk kesadaran masyarakat akan dampak negatif perkawinan usia anak menjadi modal dasar bagi peningkatan usia kawin pertama perempuan di NTB.

Tabel 2. 81 Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan Provinsi NTB Tahun 2020-2024

No	Keterangan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Lombok Barat	20,54	20,14	20,05	19,92	19,90
2	Lombok Tengah	19,32	19,61	19,38	19,08	19,27
3	Lombok Timur	19,7	19,49	19,52	19,5	19,66
4	Sumbawa	21,5	21,49	21,63	21,92	21,94
5	Dompu	21	21,3	21,55	21,33	21,44
6	Bima	21,24	21,57	21,36	21,63	21,38
7	Sumbawa Barat	21,44	22,36	22,25	22,46	22,29
8	Lombok Utara	20,22	19,97	19,81	19,59	19,74
9	Mataram	21,15	21,25	21,27	20,72	21,11
10	Kota Bima	22,03	22,51	22,64	22,49	22,10
	NTB	**20,35**	**20,39**	**20,37**	**20,25**	**20,35**

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2025.

Rata-rata usia kawin pertama perempuan tersebut tersebut inline dengan data proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus hidup bersama sebelum umur 18 tahun. Data BPS NTB menunjukkan proporsi perempuan 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 18 tahun di NTB tahun 2024 sebesar 14,96 persen, menurun dibandingkan tahun 2023 (17,32 persen). Ini menunjukkan bahwa berkurangnya jumlah perempuan muda yang menikah atau hidup bersama sebelum usia 18 tahun, atau dengan kata lain, angka perkawinan anak sedang menurun.

Grafik 2. 103 Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen)

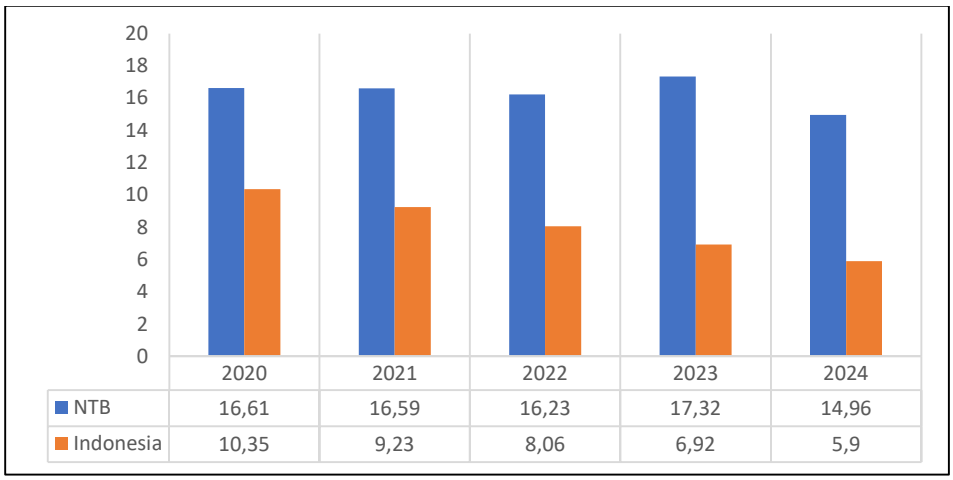

Sumber : BPS Provinsi NTB, 2024

9. Perhubungan

Meningkatnya jumlah penduduk provinsi NTB akan disertai dengan pertambahan jumlah sarana angkutan darat, baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat, serta menuntut ketersediaan prasarana perhubungan jalan yang memadai untuk pengangkutan barang dan jasa baik dalam kota maupun ke luar kota. Tantangan yang dihadapi dalam sarana dan prasarana perhubungan darat adalah memfasilitasi kebutuhan angkutan publik melalui penyebaran jalur-jalur angkutan dan peningkatan serta pembangunan prasarana jalan.

Tabel 2. 82 Jumlah Armada Antar Kota dalam Provinsi Tahun 2020-2024

No.	Jenis Pelayanan	2020		2021		2022		2023		2024	
		Unit	Seat	Unit	Seat	Unit	Seat	Unit	Seat	Unit	Seat
1	AKDP Lombok	99	1.617	104	1.695	104	1.695	71	2221	85	2767
2	AKDP Sumbawa dan Sumbawa Barat	134	2.716	134	2.716	134	2.716	160	3235	160	3189
3	AKDP Dompu	48	1.455	48	1.455	48	1.455	55	1902	64	2244
4	AKDP Bima	115	3.335	115	3.335	115	3.335	66	1803	70	7883

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi NTB, 2024.

Terdapat tren peningkatan kapasitas (seat) meskipun tidak selalu disertai dengan peningkatan jumlah unit kendaraan. Beberapa wilayah seperti Dompu menunjukkan pertumbuhan layanan secara stabil, sedangkan wilayah seperti Bima memperlihatkan fluktuasi ekstrem yang perlu dikaji lebih dalam. Hal ini mencerminkan adanya upaya peningkatan efisiensi transportasi AKDP di NTB, dengan mendorong kendaraan

berkapasitas besar guna memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat antarwilayah di provinsi.

Dengan trend peningkatan kapasitas tentunya juga harus memperhatikan keselamatan pengguna transportasi agar kecelakaan lalu lintas dapat ditekan seminimal mungkin. Pengukuran indikator rasio kecelakaan transportasi dihitung berdasarkan rata-rata dari hasil penjumlahan rasio fatalitas ditambah rasio kecelakaan angkutan penyebrangan. Rasio fatalitas dihitung berdasarkan jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan transportasi tahun 2024 dibandingkan dengan jumlah kendaraan bermotor tahun 2024 dikali 10.000.

Tabel 2. 83 Rasio Fatalitas Provinsi NTB Tahun 2020 – 2024

No	Tahun	Jumlah Kendaraan	Meninggal Dunia Karena Kecelakaan	Rasio Fatalitas
1	2020	1.647.061	402	2,44
2	2021	1.237.624	375	3,03
3	2022	1.791.426	391	2,18
4	2023	1.837.342	290	1,58
5	2024	2.072.681	394	2,02

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi NTB, 2024

Selama periode 2020–2024, rasio fatalitas menunjukkan tren fluktuatif namun cenderung menurun, dari 2,44 pada tahun 2020 menjadi 2,02 pada tahun 2024. Penurunan paling signifikan terjadi pada tahun 2023, dengan rasio fatalitas terendah sebesar 1,58 korban jiwa per 1.000 kendaraan. Penurunan tersebut diduga merupakan hasil dari meningkatnya efektivitas kampanye keselamatan lalu lintas, pengawasan terpadu lintas sektor, serta perbaikan infrastruktur jalan dan fasilitas keselamatan.

Namun demikian, pada tahun 2024, terjadi kembali peningkatan jumlah korban meninggal dunia menjadi 394 jiwa, dengan rasio fatalitas sebesar 2,02. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah kendaraan terus meningkat, upaya penurunan fatalitas kecelakaan harus tetap diperkuat, khususnya dalam pengawasan lalu lintas, edukasi keselamatan pengguna jalan, serta rekayasa lalu lintas di titik-titik rawan kecelakaan.

10. Komunikasi dan Informatika

Penerapan teknologi informasi melalui media online dalam hal ini website telah menjadi kebutuhan yang wajib dan sebagai salah satu pelayanan yang disediakan oleh pemerintah bagi masyarakat luas. Ketersediaan website milik Pemerintah Provinsi NTB telah tersedia selama ini. Salah satunya melalui http://ntbprov.go.id/.

Transparansi penyelenggaraan pemerintahan Provinsi NTB menjadi tuntutan yang tidak dapat ditawar lagi. Terbukanya akses informasi pelayanan kepada masyarakat baik mengenai data perencanaan, keuangan, pengadaan barang dan jasa, capaian kinerja,

statistik, regulasi, LHKPN dan data aset. Selain itu, informasi mengenai pelayanan publik meliputi maklumat pelayanan, daftar informasi pelayanan (DIP), jenis pelayanan, standar pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan laporan permohonan dan keberatan terpublikasikan dalam website Provinsi NTB. Adanya kemudahan akses yang diimbangi dengan integritas jajaran Pemprov diharapkan akan menghasilkan percepatan pembangunan Provinsi NTB dan meningkatkan kepercayaan publik kepada birokrasi.

Grafik 2. 104 Perbandingan Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet di Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2020-2024

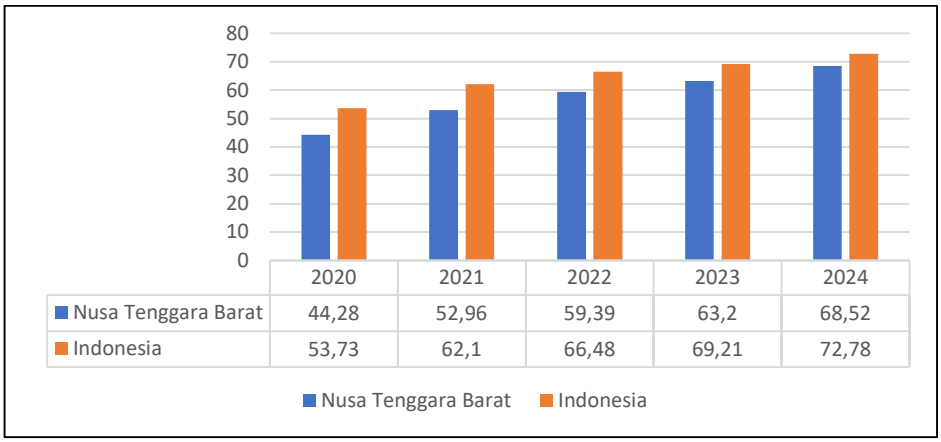

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), 2024

Tingkat akses internet penduduk berumur 5 tahun ke atas di Provinsi NTB (NTB) menunjukkan tren peningkatan yang konsisten sepanjang periode 2020–2024. Persentase pengguna internet di NTB naik dari 44,28 persen pada tahun 2020 menjadi 68,52 persen pada tahun 2024. Peningkatan sebesar 24,24 poin persentase ini menggambarkan percepatan adopsi teknologi informasi di daerah. Meski demikian, capaian NTB masih berada di bawah rata-rata nasional yang juga mengalami pertumbuhan positif, dari 53,73 persen pada tahun 2020 menjadi 72,78 persen pada tahun 2024. Kesenjangan antara NTB dan nasional yang pada tahun 2020 sebesar 9,45 poin persentase berhasil ditekan menjadi 4,26 poin pada tahun 2024. Data ini mencerminkan kemajuan signifikan dalam upaya pemerataan akses internet di NTB, sekaligus menegaskan pentingnya penguatan infrastruktur digital dan literasi teknologi sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah untuk mendukung transformasi digital dan peningkatan daya saing di berbagai sektor dalam dokumen RPJMD 2025–2029.

Salah satu program yang dilaksanakan di Provinsi NTB dalam rangka mempercepat penyebarluasan informasi adalah melalui pengembangan kampung media. Kampung media merupakan program untuk penyebarluasan informasi yang berbasis komunitas yang seluruh kegiatannya menggunakan sebuah portal informasi, berita dan jurnalisme. Metode yang dimanfaatkan adalah dengan menggunakkan kemampuan jurnalisme

warga, yang diunggah oleh setiap orang yang sudah terdaftar sebagai Warga Kampung Media. Warga Kampung Media diberi kebebasan untuk mengemukakan, mengekspresikan, serta menyampaikan berbagai gagasan, pendapat, ulasan, ataupun tanggapan, sepanjang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku. Melalui kampung media masyarakat dapat ikut secara langsung berpartisipasi dalam penyebaran informasi publik. Sampai tahun 2018 komunitas kampung media mencapai 2.105 komunitas yang tersebar di 10 Kab/Kota se NTB dengan jumlah 5.735 anggota.

Komitmen Pemerintah terhadap penyediaan jaringan telekomunikasi di daerah-daerah terpencil terus diwujudkan, dan awal tahun 2018 telah dibangun fasilitas komunikasi di salah satu kecamatan terpencil di Kabupaten Sumbawa, NTB melalui program Telkomsel Bakti. Program Telkomsel Bakti membangun fasilitas komunikasi di Desa Sebeok dan Dusun Harapan Jaya, Desa Senawang dengan menggunakan GSM 900, yang coverage atau jangkuannya meliputi empat desa di Kecamatan Orong Telu, yakni Desa Senawang, Desa Sebeok, Desa Kelawis dan Desa Mungkin.

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi memiliki peran strategis sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi daerah. Oleh karena itu, kinerja koperasi tidak hanya dilihat dari sisi jumlah, tetapi lebih penting dari sisi kualitas dan keberlanjutan operasionalnya, yang tercermin dalam persentase koperasi aktif.

Tabel 2. 84 Kondisi Koperasi di Provinsi NTB Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Koperasi	4.218	4.363	4.433	4.725	4.835
2	Jumlah Koperasi Aktif	2.499	2.707	2.774	2.457	2.598
3	Persentase Koperasi Aktif	59,25	62,04	62,58	52,00	53,73

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2023 dan Dinas Koperasi, 2024

Dalam lima tahun terakhir, jumlah koperasi secara total mengalami peningkatan dari 4.218 koperasi pada tahun 2020 menjadi 4.835 pada tahun 2024. Namun, dari sisi persentase koperasi aktif, terjadi penurunan signifikan pada tahun 2023, dari 62,58% (2022) menjadi 52,00%, dan hanya sedikit membaik menjadi 53,73% pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan bahwa meskipun jumlah koperasi bertambah, banyak koperasi yang tidak aktif secara kelembagaan maupun usaha. Hal ini bisa disebabkan oleh kelemahan dalam manajemen, rendahnya kualitas SDM koperasi, belum optimalnya pendampingan dan pengawasan, serta tantangan dalam adaptasi digital dan pasar.

Rendahnya persentase koperasi aktif menghambat kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah, terutama dalam mendukung UMKM, penguatan ekonomi desa, dan inklusi keuangan masyarakat. Hal ini juga menunjukkan perlunya pergeseran fokus dari kuantitas menuju kualitas kelembagaan koperasi, agar koperasi benar-benar berfungsi sebagai entitas ekonomi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.

Selain itu, Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM Provinsi NTB merupakan lembaga yang bernaung di bawah Dinas Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi NTB. PLUT-KUMKM bertugas memberikan pendampingan dan pemberdayaan kepada KUMKM secara komperhensif dan terpadu untuk meningkatkan produksi, produktivitas, nilai tambah dan daya saingnya. Di dalam fungsinya sebagai lembaga pendamping, PLUT-KUMKM memiliki 7 (tujuh) bidang layanan pendampingan, yaitu (1) Bidang Kelembagaan, (2) Bidang Produksi, (3) Bidang Pemasaran, (4) Bidang Pembiayaan, (5) Bidang Sumber Daya Manusia, (6) Bidang Pengembangan Informasi dan Teknologi, dan (7) Bidang Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha.

Sebagai Pusat Layanan berarti PLUT-KUMKM merupakan sebuah lembaga yang senantiasa memberikan layanan kepada Koperasi dan para pengusaha mikro, kecil, dan menengah dalam satu atap yang mampu memberikan solusi bagi pelaku KUMKM secara komprehensif dan efektif sehingga mampu mengembangkan potensi unggulan daerah untuk menjadi produk dan komoditas unggulan.

12. Penanaman Modal

Kebijakan peningkatan investasi oleh Pemerintah Provinsi NTB baik dalam negeri maupun asing merupakan upaya untuk mendorong kegiatan ekonomi suatu daerah, penyerapan tenaga kerja, peningkatan produktivitas yang dihasilkan, penghematan devisa bahkan penambahan devisa. Kebijakan investasi yang ramah dan iklim usaha yang kondusif sangat mempengaruhi besar kecilnya nilai realisasi investasi suatu daerah. Oleh karena itu, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTB menetapkan Nilai Realisasi Investasi dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024 sebagai instumen pengukuran dalam penyelenggaraan urusan bidang penanaman modal. Target dan capaian indikator kinerja urusan bidang penanaman modal tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 85 Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Penanaman Modal pada DPMPTSP Provinsi NTB Tahun 2020 – 2024

Indikator Bidang Urusan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.
Nilai Realisasi Investasi (Rp.T)	11,574	11,600	13,362	14,879	15,428	21,606	17,814	39,896	25,4	54,55

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, 2024

Realisasi investasi di Provinsi NTB sejak tahun 2020 hingga 2024 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 nilai realisasi investasi mencapai Rp11.600.614.960.397 atau 100,23% dari target sebesar Rp 11.574.000.000.000. Pada tahun 2021 Nilai Realisasi Investasi di Provinsi NTB meningkat menjadi Rp. 14.879.279.663.896 melampaui target yang telah ditetapkan, yaitu Rp. 13.362.851.642.245 atau 111,35%. Selanjutnya pada tahun 2022 Nilai Realisasi Investasi di Provinsi NTB sebesar Rp. 21.606.673.873.316 melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 15.428.818.751.352 atau 140,04%. Kemudian pada tahun 2023, Nilai Realisasi Investasi di Provinsi NTB sebesar Rp. 39.896.928.511.784 melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp.17.814.195.235.806 atau 223,96%. Peningkatan realisasi investasi terus terjadi hingga tahun 2024 mencapai Rp 54.553.729.977.861 atau 214,78% dari target Rp25.400.000.000.000. Capaian Nilai Realisasi Investasi selama kurun waktu enam tahun terakhir tersebut selalu meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa Provinsi NTB memiliki potensi yang cukup besar untuk menarik investor yang akan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa terdapat 2 (dua) status permodalan yaitu : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yang merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri; Penanaman Modal Asing (PMA), yang merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya, maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Perkembangan nilai investasi PMDN dan PMA Provinsi NTB tahun 2020-2024 secara umum menunjukkan peningkatan terutama untuk PMDN. Proporsi nilai PMDN juga selalu lebih besar dari PMA. Adapun perkembangan nilai investasi PMDN dan PMA di Provinsi NTB selama tahun 2020– 2024 dapat dilihat pada gambar berikut :

Tabel 2. 86 Perkembangan Investasi PMDN dan PMA di Provinsi NTB Tahun 2020 - 2024

Tahun	Jenis Investasi (Rupiah)				Total (Rupiah)
	PMDN		PMA		
2020	7.117.434.218.089	61,35%	4.483.180.742.308	38,65%	11.600.614.960.397
2021	11.334.069.286.351	76,17%	3.545.204.377.544	23,83%	14.879.273.663.895
2022	14.177.661.576.421	65,62%	7.429.012.296.895	34,38%	21.606.673.873.316
2023	31.849.653.936.049	79,78%	8.047.274.575.735	20,17%	39.896.928.511.784
2024	43.762.503.303.672	80,22%	10.791.226.674.189	19,78%	54.553.729.977.861

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, 2024

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa nilai realisasi investasi untuk PMDN lebih tinggi dari PMA. Tahun 2020, realisasi PMDN sebesar Rp7.117.434.218.089 atau

61,35%, sedangkan realisasi PMA sebesar Rp 4.483.180.742.308 atau 38,65% dari total keseluruhan nilai realisasi investasi Rp 11.600.614.960.397. Tahun 2021 realisasi PMDN sebesar Rp. 11.334.069.286.351 atau 76,17%, sedangkan realisasi PMA sebesar Rp. 3.545.204.377.544 atau 23,83% dari nilai total keseluruhan nilai realisasi investasi sebesar Rp. 14.879.273.663.895. Kemudian pada tahun 2022, Nilai Realisasi Investasi untuk PMDN sebesar Rp. 14.177.661.576.421 atau 65,62%, sedangkan kategori PMA sebesar Rp.7.429.012.296.895 atau 34,38% dari nilai total keseluruhan nilai realisasi investasi sebesar Rp. 21.606.673.873.316. Selanjutnya di tahun 2023 Nilai Realisasi Investasi untuk PMDN sebesar Rp. 31.849.653.936.049 atau 79,78%, sedangkan untuk PMA sebesar Rp.8.047.274.575.735 atau 20,17% dari nilai total keseluruhan nilai realisasi investasi sebesar Rp. 39.896.928.511.784. Adapun pada tahun 2024 nilai realisasi investasi untuk PMDN sebesar Rp 43.762.503.303.672 atau 80,22%, sedangkan realisasi PMA sebesar Rp10.791.226.674.189 atau 19,78% dari total keseluruhan nilai realisasi investasi Rp54.553.729.977.861. Realisasi investasi terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun selama lima tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi NTB melalui DPMPTS perlu meningkatkan daya tarik yang ditentukan oleh regulasi, iklim investasi yang kondusif, sarana dan prasarana yang memadai, lembaga yang berkualitas, dan promosi yang semakin gencar, agar PMA lebih mengambil peran dalam pembangunan daerah.

Untuk sebaran capaian Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA menurut Kab/Kota se-NTB periode tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 87 Realisasi Investasi PMDN Menurut Kab/Kota Tahun 2020 – 2024

No	Kab/Kota	Realisasi PMDN										Rata-Rata (%)
		2020		2021		2022		2023		2024		
		Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	
1	Kota Mataram	647.135.250.572	9,09	706.535.042.988	6,23	1.195.125.116.786	8,43	1.035.389.606.990	3,25	872.417.495.944	1,99	6,92
2	Lombok Utara	51.456.450.229	0,72	1.161.749.559.554	10,25	202.009.346.030	1,42	574.834.893.370	1,80	447.236.322.578	1,02	3,01
3	Lombok Barat	1.572.064.286.166	22,09	1.500.268.505.882	13,24	252.985.623.373	1,78	620.358.305.798	1,95	1.065.784.386.534	2,44	11,82
4	Lombok Tengah	239.399.349.414	3,36	4.337.920.366.830	38,27	360.856.618.894	2,55	2.723.642.685.710	8,55	198.963.015.612	0,45	11,77
5	Lombok Timur	2.571.308.963.312	36,13	1.441.285.552.380	12,72	78.636.909.746	0,55	663.616.052.796	2,08	397.227.924.696	0,91	9,12
6	Sumbawa Barat	1.628.602.959.377	22,88	1.687.904.651.737	14,89	11.577.027.797.735	81,66	24.031.792.120.302	75,45	38.988.567.122.526	89,09	52,48
7	Sumbawa	257.554.253.706	3,62	201.988.977.881	1,78	255.933.672.361	1,81	1.778.454.774.295	5,58	1.591.177.280.905	3,64	2,99
8	Dompu	30.285.966.872	0,43	53.214.365.895	0,47	64.681.893.780	0,46	96.787.448.528	0,30	50.227.497.585	0,11	0,31
9	Bima	102.530.377.450	1,44	154.416.195.962	1,36	10.076.103.488	0,07	241.892.094.838	0,76	40.379.300.226	0,09	0,62
10	Kota Bima	17.096.361.000	0,24	88.786.067.242	0,78	180.328.494.228	1,27	82.885.953.422	0,26	110.522.957.066	0,25	0,96
	Jumlah	**7.117.434.218.098**	**100**	**11.334.069.286.351**	**100**	**14.177.661.576.421**	**100**	**31.849.653.936.049**	**100**	**43.762.503.303.672**	**100**	**100**

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, 2024

Realisasi PMDN Tahun 2024 terbesar berada di Kabupaten Sumbawa Barat dengan kontribusi Rp. 38.988.567.122.526 (89,09%). Dalam kurun waktu tahun 2020-2024 juga menunjukkan bahwa Kabupaten Sumbawa Barat masih mendominasi daya tarik PMDN

di Provinsi NTB dengan rata-rata 56,80% Hal ini disebabkan adanya pertambangan tembaga dan emas oleh PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) yang berdampak pada berkembangan sektor-sektor lainnya, misalnya sektor perdagangan, pertanian/perkebunan dan peternakan dan lain sebagainya. Kemudian menyusul Kabupaten Sumbawa pada tahun 2024, dengan kontribusi PMDN sebesar Rp.1.591.177.280.905 (3,64%) dan diurutan selanjutnya Kabupaten Lombok Barat dengan kontribusi PMDN sebesar Rp 1.065.784.386.534 (2,44%) . Berikutnya berturut-turut disusul oleh Kota Mataram Rp. 872.417.495.944 (1,99%), Kabupaten Lombok Utara Rp. 447.236.322.578 (1,02%), Kabupaten Lombok Timur Rp. 397.227.924.696 (0,91%), Kabupaten Lombok Tengah Rp 198.963.015.612 (0,45%), Kota Bima Rp 110.522.957.066 (0,25%), Dompu Rp 50.227.497.585 (0,11%) dan terakhir Kabupaten Bima Rp. 40.379.300.226 (0,09%). Khusus 3 Kab/Kota terakhir, baik realisasi pada tahun 2024 maupun rata-rata 5 tahun terakhir, masih menjadi yang paling rendah realisasi investasi PMDN-nya. Tentunya ke depan, akan terus dilakukan koordinasi dengan pemerintah Kab/Kota terkait dalam rangka peningkatan realisasi PMDN.

Sementara itu, untuk realisasi PMA terbesar tahun 2024, Kabupaten Sumbawa Barat juga masih mendominasi, sama hal nya dengan realisasi PMDN, yaitu sebesar Rp.6.004.148.160.468 (55,64%). Kemudian pada posisi berikutnya adalah Kabupaten Dompu dengan realisasi PMA sebesar Rp. 1.910.164.723.047 (17,70%). Hal ini seiring dengan pelaksanaan kegiatan PT. Sumbawa Timur Mining selaku pemegang kontrak karya pertambangan tembaga dan emas. Untuk realisasi tahun 2024 maupun 5 tahun terakhir, Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Dompu menjadi 2 teratas Kabupaten dengan realisasi PMA terbesar di Provinsi NTB. Berturut-turut kontribusi Kab/Kota menyusul Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Dompu untuk realisasi PMA tahun 2024 adalah sebagai berikut: Kabupaten Lombok Tengah Rp. 916.645.278.066 (8,49%), Kabupaten Lombok Utara Rp. 634.130.320.300 (5,88%), Kota Mataram Rp. 494.550.562.933 (4,58%), Kabupaten Bima Rp. 400.656.150.349 (3,71%), Kabupaten Lombok Barat Rp. 258.217.358.278 (2,39%), Kabupaten Sumbawa Rp. 104.395.723.759 (0,97%), Kabupaten Lombok Timur Rp.66.329.578.989(0,61%), dan Kota Bima Rp. 1.988.818.000 (0,02%). Realisasi Investasi PMA Menurut Kab/Kota Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 88 Realisasi Investasi PMA Menurut Kab/Kota Periode Tahun 2020-2024

No.	Kabupaten/ Kota	Realisasi PMA										Rata-Rata (%)
		2020		2021		2022		2023		2024		
		Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	
1	Kota Mataram	21.027.090.873	0,47	99.950.475.623	2,82	406.345.552.226	5,47	163.573.604.712	2,03	494.550.562.933	4,58	3,07
2	Lombok Utara	166.619.510.182	3,72	221.598.732.590	6,25	19.063.460.385	0,26	534.911.850.655	6,65	634.130.320.300	5,88	4,55
3	Lombok Barat	343.751.660.411	7,67	244.792.935.564	6,90	342.036.723.365	4,60	333.110.878.161	4,14	258.217.358.278	2,39	5,14
4	Lombok Tengah	330.088.229.673	7,36	330.809.588.846	9,33	16.474.289.329	0,22	481.418.234.695	5,98	916.645.278.066	8,49	6,28
5	Lombok Timur	62.979.229.182	1,40	11.713.993.826	0,33	336.127.975.355	4,52	56.461.531.527	0,70	66.329.578.989	0,61	1,52

No.	Kabupaten/ Kota	Realisasi PMA										Rata-Rata (%)
		2020		2021		2022		2023		2024		
		Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	
6	Sumbawa Barat	1.448.493.803.855	32,31	1.521.475.035.708	42,92	3.042.832.321.780	40,96	4.551.547.520.144	56,56	6.004.148.160.468	55,64	45,68
7	Sumbawa	45.896.880.438	1,02	30.017.194.987	0,85	17.411.038.217	0,23	31.324.944.864	0,39	104.395.723.759	0,97	0,69
8	Dompu	2.061.398.739.600	45,98	1.083.382.078.616	30,56	3.218.212.482.097	43,32	1.878.972.309.763	23,35	1.910.164.723.047	17,70	32,18
9	Bima	2.566.968.858	0,06	168.292.087	0,00	29.508.454.141	0,40	14.454.862.440	0,18	400.656.150.349	3,71	0,87
10	Kota Bima	358.629.236	0,01	1.296.049.697	0,04	1.000.000.000	0,01	1.534.838.773	0,02	1.988.818.000	0,02	0,02
	J u m l a h	**4.483.180.742.308**	**100**	**3.545.204.377.544**	**100**	**7.429.012.296.895**	**100**	**8.047.274.575.735**	**100**	**10.791.226.674.189**	**100**	**100**

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, 2024

Meningkatnya investasi PMDN dan PMA dipengaruhi oleh investor (perusahaan) yang melakukan investasi di daerah dengan bebagai kemudahan dan fasilitasi yang diberikan kepada pelaku usaha sehingga memberikan kenyamanan dalam berinvestasi. Berdasarkan sektor, baik kategori PMDN dan PMA untuk seluruh sektor tiap tahunnya mengalami fluktuasi. Untuk kategori PMDN secara keseluruhan capaian nilai realisasi investasi dari tahun 2020 sampai 2024 mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 total realisasi investasi PMDN sebesar Rp. 7.117.434.216.089 meningkat menjadi Rp. 43.762.503.303.672 atau 514,86%. Sektor pertambangan merupakan penyumbang terbesar (rata-rata 48,63%) dari capaian realisasi investasi dan diikuti oleh sektor perindustrian (rata-rata 12,88%), pariwisata dan ekonomi kreatif (rata-rata 10,98%), dan kemudian diikuti oleh perhubungan transportasi (rata-rata 8,94%). Hal ini mengindikasikan bahwa potensi sektor pertambangan, perindustrian, pariwisata dan ekonomi kreatif serta perhubungan transportasi menjadi sektor yang menjadi potensi dan unggulan di Provinsi NTB, hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 89 Realisasi Investasi PMDN Menurut Sektor Periode Tahun 2020–2024

No	Sektor	Realisasi PMDN									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
1	Pariwisata & ekonomi kreatif	694.145.315.315	9,75	2.361.030.370.153	20,83	1.265.742.863.001	8,93	3.892.397.973.760	12,22	1.389.781.561.555	3,18
2	Perhubungan Transportasi	1.486.915.009.167	20,89	2.263.446.554.370	19,97	290.799.027.478	2,05	373.174.710.482	1,17	267.426.644.549	0,61
3	Perdagangan	248.356.777.217	3,49	702.687.757.693	6,2	618.002.124.865	4,36	1.338.051.726.623	4,2	1.215.880.065.483	2,78
4	Pertanian/perkebunan dan peternakan	2.860.309.150	0,04	134.164.106.288	1,18	48.756.835.797	0,34	219.580.369.653	0,69	46.145.845.360	0,11
5	Perkebunan	-		-		-		-		0	0,00
6	Kehutanan dan Ling. Hidup	-		895.000.000	0,01	-		-		150.000.000	0,00
7	Perikanan	85.169.482.914	1,20	160.121.623.460	1,41	125.149.198.758	0,88	77.190.391.440	0,24	230.333.356.346	0,53
8	Peternakan	36.237.161.722	0,51	-		-		-		0	0,00
9	Ketenagalistrikan	2.550.285.364.959	35,83	-		-		-		0	0,00
10	PUPR	46.909.694.246	0,66	2.602.788.875.013	22,96	73.107.528.605	0,52	161.125.315.744	0,51	158.379.145.911	0,36

No	Sektor	Realisasi PMDN									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
11	Kesehatan, Obat & Makanan	43.824.159.039	0,62	48.244.587.322	0,43	36.474.472.135	0,26	62.322.370.943	0,2	49.135.742.983	0,11
12	Pertambangan, Energi (ESDM)	1.348.596.392.901	18,95	2.851.273.829.390	25,16	10.336.530.634.918	72,91	18.155.590.191.264	57	30.259.419.006.085	69,14
13	Industri/Perindustrian	544.776.583.769	7,65	189.096.308.958	1,67	1.309.342.587.322	9,24	7.430.573.302.124	23,33	9.853.765.342.819	22,52
14	Jasa Lainnya	29.087.967.699	0,41	-		-		-		0	0,00
15	Ketenagakerjaan	-		14.814.950.922	0,13	71.526.044.440	0,5	134.187.923.498	0,42	273.121.509.873	0,62
16	Pos Telekomunikasi, sistem dan transaksi elektronik	-		4.493.320.762	0,04	2.198.579.102	0,02	4.179.436.611	0,01	16.214.375.150	0,04
17	Pendidikan	-		962.002.020	0,01	-		-		850.400.000	0,00
18	Keuangan/ koperasi	270.000.000	0,00	50.000.000	0,00	31.680.000	0,00	1.280.223.907	0,00	1.900.307.558	0,00
	J u m l a h	**7.117.434.218.098**	**100**	**11.334.069.286.351**	**100**	**14.177.661.576.421**	**100**	**31.849.653.936.049**	**100**	**43.762.503.303.672**	**100**

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, 2024

Pada kategori PMA selama kurun waktu lima tahun terakhir sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, secara total nilai realisasi investasi mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, realisasi PMA sebesar Rp 4.483.180.742.308 atau meningkat 140,70% menjadi Rp10.791.226.674.189 pada tahun 2024. Sektor yang menjadi penyumbang terbesar terhadap nilai realisasi investasi adalah pertambangan (rata-rata 73,43%). Untuk lebih jelasnya berikut disajikan perkembangan nilai realisasi investasi PMA menurut sektor kurun waktu tahun 2020 – 2024 :

Tabel 2. 90 Realisasi Investasi PMA Menurut Sektor Periode Tahun 2020–2024

No.	Sektor	Realisasi PMA									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
1	Pariwisata & Ekonomi Kreatif	769.024.365.885	17,16	652.896.873.144	18,42	738.393.638.403	9,94	2.233.628.220.039	27,76	2.680.286.592.777	24,84
2	Perhubungan Transportasi	60.571.335.000	1,35	-		-		95.000.000	0,00	36.600.000	0,00
3	Perdagangan	6.486.775.216	0,14	4.487.505.844	0,13	107.345.605.496	1,44	37.501.021.048	0,47	144.230.949.860	1,34
4	Pertanian/Perkebunan & peternakan	-		1.333.600.000	0,04	-		19.769.966.466	0,25	7.536.402.426	0,07
5	Perkebunan	-		-		-		-		0	0,00
6	Ketenagalistrikan	10.171.996.063	0,23	-		-		-		0	0,00
7	PUPR	90.563.822.100	2,02	231.271.777.967	6,52	10.479.091.432	0,14	8.150.805.566	0,1	6.202.598.746	0,06
8	Kesehatan, Obat dan Makanan	335.165.517	0,01	2.962.733.347	0,08	7.655.000	0,00	-		1.525.153.400	0,01
9	Lingk. Hidup & Kehutanan	-		1.208.523.999	0,03	-		-		1.625.033.600	0,02
10	Perikanan	20.201.006.000	0,45	2.572.568.666	0,07	17.300.775.765	0,23	13.357.980.027	0,17	43.780.218.130	0,41

No.	Sektor	Realisasi PMA									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
11	Peternakan			-		-		-		0	0,00
12	Pertambangan, Energi (ESDM)	3.475.551.047.647	77,53	2.574.011.901.192	72,61	6.151.978.369.559	82,81	5.063.063.080.562	62,92	7.690.817.042.887	71,27
13	Industri/ Perindustrian	4.662.096.377	0,10	1.474.000.000	0,04	5.151.183.592	0,07	548.456.914.842	6,82	182.996.926.345	1,70
14	Pos Telekomunikasi sistem dan transaksi elektronik	-		72.984.893.385	2,06	398.355.977.648	5,36	122.890.575.785	1,53	24.217.986.757	0,22
15	Ketenagakerjaan	-		-		-		10.000.000	0,00	6.991.883.311	0,06
16	Jasa Lainnya	45.047.798.696	1,00	-		-		-		0	0,00
17	Pendidikan	-		-		-		351.011.400	0,00	100.582.000	0,00
18	Keuangan	-		-		-		-		878.703.950	0,01
Jumlah		**4.482.615.408.501**	**100**	**3.545.204.377.544**	**100**	**7.429.012.296.895**	**100**	**8.047.274.575.735**	**100**	**10.791.226.674.189**	**100**

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, 2024

Perkembangan positif dari Nilai Realisasi Investasi tidak lepas dari komitmen Pemerintah Provinsi NTB untuk terus melakukan berbagai terobosan di antaranya penetapan NTB sebagai daerah Ramah Investasi sebagai salah satu program unggulan dalam RPJMD NTB tahun 2019-2023. Program ini diwujudkan dalam bentuk pemberian insentif dan berbagai kemudahan penanaman modal dan fasilitas investasi hingga pemasaran. Dimulai regulasi terkait insentif/kemudahan penanaman modal sampai kebijakan penyederhanaan prosedur dan regulasi perizinan, kemudahan persyaratan, waktu pemberian izin hingga penyediaan fasilitas lainnya. Tahun 2024 Kontribusi Sektor Pertambangan, Sektor Pariwisata dan Sektor Perindustrian menduduki tiga besar realisasi investasi di Provinsi NTB baik itu PMDN maupun PMA, dengan perincian bahwa sektor Pertambangan/Energi atau Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi tertinggi sebesar Rp. 37.950.236.048.972; posisi kedua Sektor Perindustrian sebesar Rp. 10.036.762.269.164; disusul sektor Pariwisata sebesar Rp. 4.070.068.154.332.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB khususnya di Layanan Perizinan, sejak tahun 2017 sampai dengan 2024 telah menggunakan aplikasi dan terus dikembangkan baik yang merupakan produk dari daerah maupun dari pusat, dimana saat ini aplikasi yang digunakan adalah OSS (Online Single Submision). Aplikasi ini lebih memberikan kemudahan kepada pengusaha/investor untuk membuat izin usaha investasinya di daerah. Sistem ini mewajibkan pengusaha untuk melakukan pendaftaran ulang (registrasi) perusahaannya pada aplikasi OSS dengan membuat NIB (Nomor Induk Berusaha). Kelebihan aplikasi ini adalah mampu memberikan kepastian waktu proses penyelesaian setiap jenis perizinan yang ada pada OSS yang dilaksanakan sesuai dengan standar perizinan. Jenis perizinan dan waktu penyelesaian yang diberikan, setelah NIB dikeluarkan namun belum berlaku efektif jika

belum memenuhi komitmen artinya bahwa perusahaan diharuskan untuk mengurus izin utama dan izin penunjang yang dilaksanakan di8Kab/Kota. Jumlah bidang perizinan (izin dan non izin) pada tahun 2024 sebanyak 7667, terdiri dari 7643 izin dan 25 non izin. Terjadi peningkatan izin sebanyak 52,91% dari tahun 2021 ke tahun 2024, sedangkan untuk non izin sebanyak 16 %. Jumlah Bidang Perizinan Tahun 2021-2024 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2. 91 Jumlah Bidang Perizinan (Izin dan Non Izin) yang Diterbitkan Tahun 2021-2024

No	Bidang Perizinan	Izin				Non Izin				Jumlah 2024
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Penanaman Modal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Perikanan dan Kelautan	610	617	1908	4900	0	2332	0	0	1900
2	Pertanian &Perkebunan	3	0	25	27	0	23	0	0	27
3	Koperasi & UMKM	1	0	0	0	0	6	0	0	0
4	Pekerjaan Umum	36	18	44	9	0	29	0	0	9
5	Kehutanan	11	19	6	3	2	19	6	5	8
6	Lingkungan Hidup & Penelitian	51	4	6	7	0	4	0	0	7
7	Perindustrian	0	0	541	538	0	277	0	0	538
8	Perdagangan	1	4	3	6	3	5	2	3	9
9	Perkebunan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Hubkominfo	59	0	43	0	0	2	0	0	0
11	Pertambangan/ ESDM (2021)	195	242	212	66	0	350	0	0	66
12	Perencanaan Pembangunan Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kesehatan	16	1	25	13	0	19	0	1	14
14	Pariwisata	0	0	47	24	0	56	0	0	24
15	Pertanahan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Peternakan	2612	1273	2175	1989	0	1273	0	0	1989
17	Sosial	4	22	2	3	16	22	15	16	19
18	Pendidikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Ketenagakerjaan		0	75	31	0	72	0	0	31
20	Perhubungan		7	43	27	0	82	0	0	27
	Jumlah	**3599**	**2207**	**5155**	**7643**	**21**	**4571**	**23**	**25**	**7668**

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, 2023

Berdasarkan tabel di atas, terjadi peningkatan penerbitan izin dari tahun 2022 ke tahun 2023, yaitu sebesar 2207 izin menjadi 5155 izin atau peningkatan sebesar 133,57%. Pada tahun 2024 penerbitan izin meningkat lagi menjadi 7643 izin. Izin yang terbit paling banyak pada bidang perikanan dan kelautan (4.900 izin), berturut-turut disusul bidang peternakan (1.989 izin), perindustrian (538 izin), pertambangan (66 izin), ketenagakakerjaan (31 izin), pertanian dan perkebunan (27 izin), perhubungan (27 izin),

pariwisata (24 izin), pekerjaan umum (9 izin), lingkungan hidup (7 izin), perdagangan (6 izin), kehutanan (3 izin), sosial (3 izin), dan kesehatan (3 izin)

Persentase Izin yang Diterbitkan Tahun 2024 Berdasarkan Sektor dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Grafik 2. 105 Persentase Izin yang Diterbitkan Tahun 2024 Berdasarkan Sektor

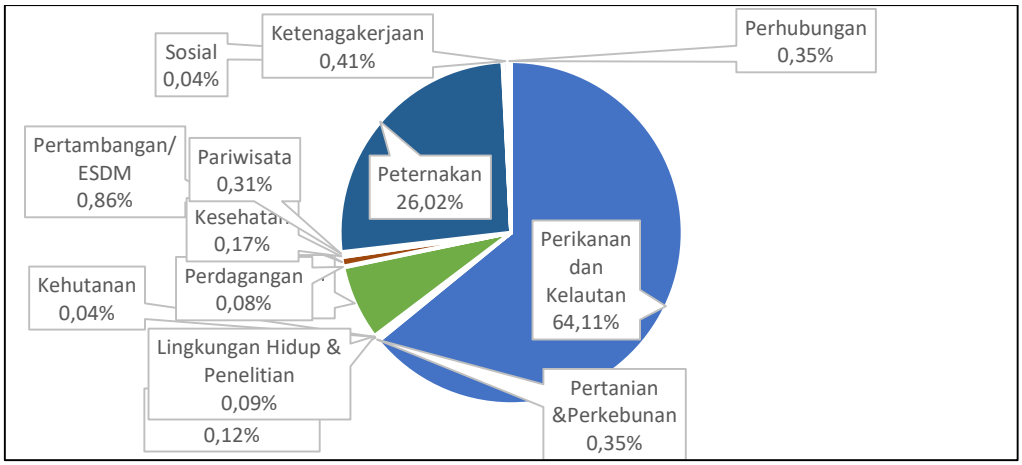

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, 2024

Upaya untuk meningkatkan investasi PMDN dan PMA di Provinsi NTB dalam lima tahun kedepan adalah sebagai berikut

1. Perbaikan regulasi dan kepastian hukum
   a. Penyederhanaan perizinan investasi melalui system digital seperti Online Single Submission (OSS)
   b. Penghapusan regulasi yang tumpang tindih
   c. Menjamin kepastian hukum dan perlindungan investor, termasuk kepastian dalam penyelesaian sengketa
2. Peningkatan infrastruktur
   a. Pembangunan infrastruktur dasar dan pendukung investasi terutama pada Kawasan Strategis Provinsi seperti jalan, pelabuhan, listrik, air dan telekomunikasi dan sebagainya.
   b. Pengembangan kawasan industri dan ekonomi khusus yang terintegrasi
3. Stabilitas politik dan ekonomi
   a. Menjaga stabilitas makro ekonomi seperti inflasi, nilai tukar dan suku bunga
   b. Menunjukkan komitmen yang kuat terhadap transformasi ekonomi dan iklim usaha serra mendorong peningkatan peran UMKM.
4. Pemberian insentif investasi
   a. Pemberian insentif fiskal, seperti tax holiday, tax allowence dan pembebasan bea masuk

b. Pemberian kemudahan non fiskal, seperti kemudahan dalam pembebeasan lahan dan perizinan yang cepat

5. Promosi dan Kemudahan Informasi melalui
   a. Promosi investasi aktif melalui forum, misi dagang dan platform digital serta meningkatkan kolaborasi dengan stake holder lainnya dalam melakukan promosi.
   b. Penyediaan data dan informasi investasi yang transparan dan real time.
6. Penguatan Layanan Satu Pintu
   a. Optiimalisasi Mall Pelayanan Publik DPMPTSP di provinsi dan Kab/Kota
   b. Penugasan petugas penghubung untuk mendampingi investor
7. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
   a. Menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perizinan
8. Meningkatkan ppengawasan dan sanksi tegas terhadap praktik pungli.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga di Provinsi NTB tahun 2020-2024 melalui pelaksanaan program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan. Kinerja program prioritas tersebut diukur dengan indikator prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional, prestasi pemuda di tingkat nasional dan internasional dan proporsi wirausaha muda.

Medali yang diperoleh Provinsi NTB berasal dari berbagai macam cabang olahraga berprestasi, seperti pada table berikut ini:

Tabel 2. 92 Prestasi Olahraga Atlet Provinsi NTB Tahun 2020 – 2024

No	Tahun	Event	Jenis Lomba	Emas	Perak	Perunggu	Jumlah Medali	Keterangan
1.	**2020**	Nasional		-	-	-	-	NIHIL
		Internasional		-	-	-	-	NIHIL
2.	**2021**	Nasional	Atletik	6	4	3	13	PON di Papua
			Panjat Tebing	2	1	-	3	
			Balap Motor	1	-	-	1	
			Kempo	2	-	1	3	
			Bola Voli Pasir	1	1	-	2	
			Tarung Derajat	1	-	3	4	
			Menembak	-	3	1	4	
			Sepak Bola	-	-	1	1	
			Tinju	2	2	3	7	
			Atletik	1	-	2	3	PEPARPENAS di PAPUA
			Bulutangkis	-	-	1	1	
		Internasional	-	**-**	**-**	**-**	**-**	
Jumlah				**16**	**11**	**15**	**42**	
3.	**2022**	Nasional	Atletik	5	6	3	14	Kejurnas Atletik di Semarang
				1	1	2	4	Marathon 10 K Samota di Sumbawa

No	Tahun	Event	Jenis Lomba	Emas	Perak	Perunggu	Jumlah Medali	Keterangan
				-	-	1	1	PORWANAS di Malang
			Tarung Derajat	1	-	2	3	Kejurnas Tarung Derajat di Bandung
				3	-	-	3	POMNAS di Sumatera Barat
			Taekwondo	-	1	-	1	
			Karate	-	-	1	1	
				5	3	5	13	Kejurnas Karate INKAI ALT CUP di Jakarta
				1	1	1	3	Kejurnas Piala Umum PB FORKI di Padang
			Pencak Silat	4	5	-	9	Pra POPNAS di Kalimantan Timur
			Balap Motor	2	-	-	2	Kejurnas ONEPRIX di Jakarta
			Menembak	2	3	3	8	Kejurnas PERBAKIN Aniversary di Jakarta
			Balap Sepeda	1	-	-	1	Raja gunung Road Bike Race di Bali
			Bola Voli Pantai	3	1	-	4	Liga Voli Pantai Nasional di Jawa Timur
				1	-	-	1	Kejurnas Bola Voli Pantai di Yogyakarta
			Taekwondo	1	1	5	7	Kejurnas Taekwondo di Banten
			Muay Thai	2	-	2	4	Kejurnas Muay Thai di Banten
			Selancar	-	-	1	1	Kejurnas di Bali
		Internasional	Atletik	1	-	-	1	Thailand open track and field championship
				-	-	1	1	SEA GAMES di Vietnam
			Karate	1	-	-	1	
			Tinju	-	1	-	1	
			Bola Voli Pantai	-	1	-		
			Panjat Tebing	1	-	-	1	IFSC Climbing Asin Championship di Seoul, Korea Selatan
			Binaraga	1	-	-	1	Internasional Binaraga WWF World Indonesia
	Jumlah			**36**	**24**	**27**	**86**	
4.	**2023**	Nasional	PENCAK SILAT	1	1	2	4	POPNAS XVI di Palembang -

No	Tahun	Event	Jenis Lomba	Emas	Perak	Perunggu	Jumlah Medali	Keterangan
								Sumatera Selatan
			TAEKWONDO		1	2	3	
			ATLETIK	1	2	1	4	
			SHORINJI KEMPO		1	1	2	
			ATLETIK	1	1	1	3	Kerjurnas antar PPLP/SKO/PPLP D cabor Atletik di Depok-Jawa Barat
			TAEKWONDO			1	1	Kerjurnas antar PPLP/SKO/PPLP D cabor Taekwondo di NTB
			PENCAK SILAT	2		2	4	Kerjurnas antar PPLP/SKO/PPLP D cabor Pencak Silat di Palu-Sulawesi Tengah
			TAEKWONDO			2	2	Kejuaraan Nasional Best of The Best KEMENPORA RI di Jakarta
			ATLETIK	1			1	Student Athletic Championship di Jakarta
			TAEKWONDO	2	2		4	Kejurnas Taekwondo Wilayah IV di Bali
			ATLETIK	3	4		7	Babak Kualifikasi PON Aceh-Sumut
			BERKUDA	1		1	2	
			BERMOTOR	2	2		4	
			BILIARD			1	1	
			BOLA VOLI PASIR	3			3	
			BRIDGE			1	1	
			BULU TANGKIS	7			7	
			CATUR	2			2	
			GATE BALL	1			1	
			GULAT		1	2	3	
			HAPKIDO			1	1	
			HOCKEY			1	1	
			SEPAK TAKRAW		1		1	
			KABADDI		1	1	2	
			KARATE	1			1	
			SHORINJI KEMPO	2	1	4	7	
			MENEMBAK	7	2	3	12	
			KICK BOXING	3	1		4	
			MUAYTHAI	1	1	6	8	
			PENCAK SILAT		3	2	5	
			PETANQUE		1		1	
			RENANG			2	2	
			SEPATU RODA	2	5	3	10	
			SOFT TENIS			1	1	
			TAEKWONDO			1	1	
			SPORT DANCE	3	3	1	7	

No	Tahun	Event	Jenis Lomba	Emas	Perak	Perunggu	Jumlah Medali	Keterangan
			Tarung Derajat	3	3	2	8	
			TINJU	3		1	4	
			WUSHU	2	1		3	
		Internasional	ATLETIK	1		1	2	Sea Youth Athlethics Campionship di Thailand
Jumlah				**55**	**38**	**47**	**140**	
5.	**2024**	Nasional	Atletik	4	2	3	9	PON di Sumut-Aceh
			Panjat Tebing				0	
			Balap Motor				0	
			Kempo	4	1	2	7	
			Muaythai	1	2	1	4	
			Bola Voli Pasir	1		1	2	
			Tarung Derajat	2	1	1	4	
			Menembak	1	3		4	
			Sepak Bola				0	
			Tinju	1	1	1	3	
			Dance Sport	1	1	1	3	
			Biliar		1	1	2	
			Pencak Silat		1	1	2	
			Soft Tennis		1		1	
			Bermotor		2		2	
			Hapkido			1	1	
			Gulat			1	1	
			Taekwondo			1	1	
			Kickboxing			3	3	
			Kabaddi			2	2	
			Atletik	2	1	2	5	PEPARPENAS di SOLO
			Bulutangkis	-	-	1	1	
			Pencak Silat	3	3	4	10	PRA POPNAS SULAWESI TENGGARA 17-24 NOVEMBER 2024
			Tinju		1		1	
			Pencak Silat	4	1	3	8	Kejurnas Antar PPLP/PPLPD/SKO 2024 di Kalsel
			Atletik	1			1	Kejurnas Antar PPLP/PPLPD/SKO 2024 di Babel
			Taekwondo			3	3	Kejurnas Antar PPLP/PPLPD/SKO 2024 di NTT
		Internasional	-	-	-	-	-	
Jumlah				**25**	**22**	**33**	**80**	

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB, 2024.

Berbagai prestasi yang telah dicapai oleh atlet Provinsi NTB merupakan hasil dari pembinaan yang telah dilakukan melalui Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) Provinsi NTB. Peserta PPLP ini merupakan hasil seleksi di Kab/Kota dengan 3 (tiga) pilihan mekanisme seleksi, yaitu *talent scooting*, Pekan Olahraga Daerah dan turnamen. Pola pembinaan yang dilakukan melaui sistem promosi-degradasi artinya ketika atlet mengalami penurunan prestasi maka terdegradasi dan dikeluarkan dari pusat pelatihan,

sedangkan atlet yang berpotensi akan masuk menggantikannya pada pusat pelatihan. Peserta PPLP yang dibina setiap tahunnya sebanyak 46 atlet pelajar dengan pembiayaan utama berasal dari Dana Dekonsentrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Saat ini, atlet pelajar yang dibina di PPLP adalah berasal dari cabang olahraga: voli pasir, silat, taekwondo dan atletik. Penentuan cabang olahraga ini berdasarkan hasil pemetaan dan evaluasi yang dilakukan oleh Kemenpora terhadap prestasi cabang olahraga di Provinsi NTB. Faktor lain yang tidak kalah penting dalam peningkatan prestasi olahraga adalah dukungan sarana prasarana olahraga. Gambaran distribusi sarana dan prasarana olahraga pada Kab/Kota dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 2. 93 Jumlah Prasarana Olahraga di NTB Tahun 2024

No	Kab/Kota	Data Prasarana Keolahragaan yang dikelola	Alamat	Pengelola	Kondisi				Data Sarpras Keolahragaan Yang Berstandar			
					layak	Tidak Layak	Rusak Ringan	Rusak Berat	Nasional	Internasional	berstandar	Tidak Berstandar
1	Kota Bima	1. Lapangan Atletik Mangge Maci	Mangge Maci	Pemkot Bima		v	v		v			
		2. Lapangan Bola Mangge Maci	Mangge Maci	Pemkot Bima	v			v	v			
		3. Wall Clambing Mangge Maci	Mangge Maci	Pemkot Bima	v		v		v			
		4. Gor Koni	Mangge Maci	Pemkot Bima	v	v	v		v			
		5. Lapangan Basket Rabangodu	Rabangodu	Pemkot Bima	v		v		v			
2	Kabupaten Bima	1. Lapangan Bola Gor Mini	Woha	Pemkab Bima	v		v		v			
		2.Lapangan Bola Gor Mini	Talabiu	Pemkab Bima	v		v		v			
		3. Gor Induk Panda	Panda	Pemkab Bima	v		v		v			
		- Futsal			v		v		v			
		- Volly										
		- dsb										
3	Kabupaten Dompu	1. Gor Ginte	Ginte	Pemkab Dompu	v		v		v			
		- Lapangan Bola	Ginte	Pemkab Dompu	v		v		v			
		- Lintasan Atletik	Ginte	Pemkab Dompu	v		v		v			
		- Panahan	Ginte	Pemkab Dompu	v		v		v			
		- Basket	Ginte	Pemkab Dompu	v		v		**v**			
		- Tenis Lapangan	Ginte	Pemkab Dompu	v		v		v			
		- Panjat Tebing	Ginte	Pemkab Dompu	v		v		v			
4	Kabupaten Sumbawa	1. Gor serbaguna	Jalan Cendrawasih No.1032	Pemkab Sumbawa	v		v		v			

No	Kab/Kota	Data Prasarana Keolahragaan yang dikelola	Alamat	Pengelola	Kondisi				Data Sarpras Keolahragaan Yang Berstandar			
					layak	Tidak Layak	Rusak Ringan	Rusak Berat	Nasional	Internasional	berstandar	Tidak Berstandar
		Mampis Rungan	brang biji kec.sumbawa									
		2. Gedung Bulutangkis Pragas	Jalan Cendrawasih No.1032 brang biji kec.sumbawa	Pemkab Sumbawa	v		v		v			
		3. Lapangan Bola Pragas	Jalan Cendrawasih No.1032 brang biji kec.sumbawa	Pemkab Sumbawa	v		v		v			
		4. Lintasan Atletik Cendrawasih	Jalan Cendrawasih No.1032 brang biji kec.sumbawa	Pemkab Sumbawa	v		v		v			
		5. Lapangan Bola Cendrawasih	Jalan Cendrawasih No.1032 brang biji kec.sumbawa	Pemkab Sumbawa	v		v		v			
5	KSB	1. GOR Lalu Magaparang	Taliwang KOMPLEK KTC -taliwang ksb	Pemkab Sumbawa barat	v		v		v			
		2. Stadion Gibraltar	Taliwang KOMPLEK KTC -taliwang ksb	Pemkab Sumbawa barat	v				v			
		3. Lapangan Ateletik	Taliwang KOMPLEK KTC -taliwang ksb	Pemkab Sumbawa barat	v				v			
		4. Lapangan Volly Sport Center	Taliwang KOMPLEK KTC -taliwang ksb	Pemkab Sumbawa barat	v				v			
		5. Lapangan Basket Sport Center	Taliwang KOMPLEK KTC -taliwang ksb	Pemkab Sumbawa barat	v				v			
		6. Panjat Tebing	Taliwang KOMPLEK KTC -taliwang ksb	Pemkab Sumbawa barat	v				v			
		7. Lapangan Tenis Sport	Taliwang KOMPLEK KTC -taliwang ksb	Pemkab Sumbawa barat	v				v			
		8. Lapangan Basket Sport Center	Taliwang KOMPLEK KTC -taliwang ksb	Pemkab Sumbawa barat	v				v			
6	Lombok Timur	1. Lapangan Bola Porda Selong	Selong	Pemkab Lotim	v		v		v			
		2. Lintasan Atletik Porda Selong	Selong	Pemkab Lotim		v	v		v			

No	Kab/Kota	Data Prasarana Keolahragaan yang dikelola	Alamat	Pengelola	Kondisi				Data Sarpras Keolahragaan Yang Berstandar			
					layak	Tidak Layak	Rusak Ringan	Rusak Berat	Nasional	Internasional	berstandar	Tidak Berstandar
		3. Panjat Tebing Porda Selong	Selong	Pemkab Lotim		v	v		v			
		4. Gedung Futsal Selong	Selong	Pemkab Lotim		v	v		v			
		5. Lapangan Tenis Porda Selong	Selong	Pemkab Lotim		v	v					
7	Lombok Tengah	1. Gor Praya	Praya	Pemkab Loteng	v		v		v			
		2. Lapangan Bola Praya	Praya	Pemkab Loteng	v		v		v			
8	Lombok Utara	1. Lapangan Bola Gondang	Gondang	Pemkab Lombok Utara	v		v		v			
		2. Lapangan Bola Tanjung	Tanjung	Pemkab Lombok Utara	v		v		v			
9	Lombok Barat	1. Gor Tripat	Gerung	Pemkab Lobar	v		v		v			
		2. meninting bikepack	jalan. Raya meninting no.8 kec. Batulayar	pemprov ntb			v		v			
10	Kota Mataram	1. Lapangan Bola Malomba	Ampenan	Pemkot Mataram	v		v		v			
		2. Lapangan Bola Salagalas	Salagalas	Pemkot Mataram	v		v		v			
		3. Sirkuit Motor Salagalas	Salagalas	Pemkot Mataram	v		v		v			
		4. Kolam Renang Mataram Water Park	Udayana	Pemkot Mataram	v		v		v			
11	provinsi	1. gor turide 17 desember mataraM	jalan. Tgh faesal no.99x mandalika kec. Sandubaya	pemprov ntb	v			v	v			
		2. gelanggang pemuda mataram	jalan pendidkan dasan agung baru mataram	pemprov ntb	v		v		v			
		3. lapangan atletik lawata	jalan pemuda dasan agung baru	pemprov ntb	v			v	v			
		4. lapangan tenis handayani	jalan pemuda gomong kec. Selaparang	pemprov ntb	v		v		v			

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB, 2024.

Pembangunan dan perawatan sarana prasarana olahraga merupakan suatu hal yang krusial, karena akan memberikan pengaruh besar pada pencapaian prestasi olahraga. Sarana prasarana olahraga di Provinsi NTB memerlukan perhatian khusus, terutama setelah ditetapkannya Provinsi NTB menjadi tuan rumah PON tahun 2028. Tuan rumah PON 2028, harus memliki sarana dan prasarana olahraga sesuai standar nasional/international yang akan digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan/perlombaan cabang olahraga.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing adalah melalui pembangunan pemuda. Pembangunan pemuda memiliki arti penting bagi keberlangsungan suatu negara-bangsa karena pemuda adalah penerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa dan salah satu penentu optimalisasi bonus demografi.

Indikator kepemudaan di Provinsi NTB adalah pemuda yang berprestasi di tingkat regional, Nasional dan Internasional. Pemuda berprestasi ini meliputi Paskibraka Nasional, Pertukaran Pemuda antar Negara dan Pemuda Pelopor.

Sementara itu, pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan, yang berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan. Isu-isu strategis dalam pembangunan kepemudaaan telah dipetakan dalam Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kepemudaan, yaitu: Penyadaran Pemuda, Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan Kepemimpinan Pemuda, Pengembangan Kewirausahaan Pemuda, Pengembangan Kepeloporan Pemuda, Penelitian dan Kajian Kepemudaan, dan Penanggulangan Perilaku Negatif Pemuda.

14. Statistik

Pemerintah Provinsi NTB terus berkomitmen mendorong penguatan tata kelola statistik sektoral melalui pelaksanaan kebijakan Satu Data NTB. Salah satu tolok ukur utama dalam mengukur kemajuan tersebut adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS) yang mencerminkan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral di daerah. Pada tahun 2023, Provinsi NTB berhasil meraih nilai IPS sebesar 3,10 poin dengan predikat Baik. Capaian tersebut tidak lepas dari optimalisasi peran BPS selaku pembina data Provinsi, yang secara aktif melakukan koordinasi, asistensi, dan pembinaan kepada OPD selaku produsen data.

Namun pada tahun 2024, terjadi sedikit penurunan nilai IPS menjadi 2,77 poin dengan predikat Baik. Penurunan ini mengindikasikan adanya beberapa tantangan dalam konsistensi pelaksanaan kegiatan statistik sektoral, baik dari aspek kelengkapan metadata, pemutakhiran data, maupun koordinasi lintas perangkat daerah. Meskipun demikian, capaian IPS di tahun 2024 tetap menunjukkan fondasi yang kuat dalam pengelolaan statistik di NTB. Pemerintah Provinsi terus mengambil langkah-langkah perbaikan strategis, antara lain: 1) Penguatan peran Walidata dan Walidata Pendukung

melalui peningkatan koordinasi rutin dan monitoring kinerja statistik OPD, 2) Revitalisasi sistem informasi data sektoral untuk memastikan keterpaduan dan keterbukaan data, 3) Peningkatan kompetensi SDM statistik melalui pelatihan dan kolaborasi dengan BPS Provinsi NTB sebagai Pembina Data dan 4) Evaluasi menyeluruh atas implementasi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia di tingkat perangkat daerah.

Dengan berbagai upaya tersebut, Pemerintah Provinsi NTB menargetkan peningkatan kembali nilai IPS pada tahun mendatang. Konsistensi dalam tata kelola statistik bukan hanya penting untuk penilaian, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam pengambilan kebijakan pembangunan yang berbasis data (*evidence-based policy*).

Grafik 2. 106 Indeks Pembangunan Statistik Provinsi NTB Tahun 2023-2024

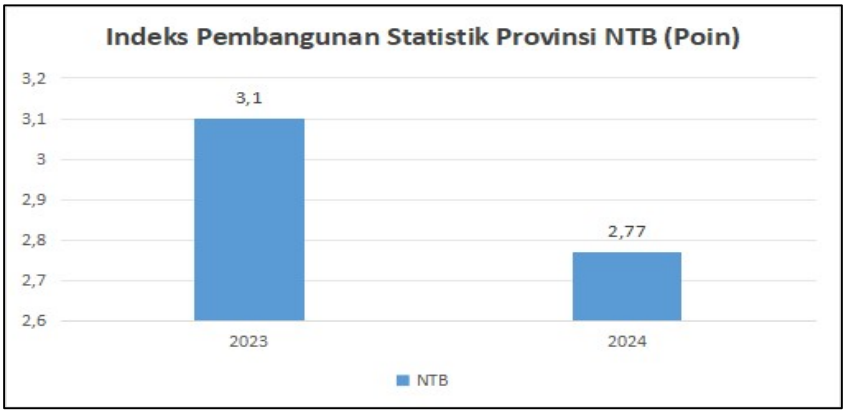

Sumber: data.ntbprov.go.id, 2024

15. Persandian

Pemerintah Provinsi NTB telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memperkuat urusan persandian sebagai bagian dari tata kelola keamanan informasi pemerintah daerah. Hal ini tercermin dari berbagai upaya strategis, capaian signifikan, dan peningkatan kualitas infrastruktur serta sumber daya manusia di bidang keamanan siber dan persandian.

Tahun 2020–2021 merupakan fase awal dengan fokus utama pada pemetaan kebutuhan dan evaluasi awal sistem keamanan informasi melalui self-assessment berbasis Indeks KAMI (Keamanan Informasi). Langkah ini menjadi landasan untuk memperbaiki tata kelola dan prosedur pengamanan data dan informasi, terutama pada sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Beberapa capaian awal antara lain pembentukan tim pengelola keamanan informasi di lingkungan Diskominfotik NTB, penerapan kebijakan internal pengamanan informasi dasar, koordinasi awal dengan BSSN dan instansi vertikal.

Sejalan dengan peningkatan kesadaran dan kapasitas kelembagaan, pada tahun 2022, Pemerintah Provinsi NTB memperoleh skor Indeks KAMI 208 poin, hal ini menandakan kemajuan awal dalam struktur keamanan informasi. Tahun 2023 skor KAMI

NTB meningkat signifikan menjadi 302 poin, mencerminkan pengembangan yang nyata dalam lima domain penilaian yaitu tata kelola, manajemen risiko, pengelolaan aset, teknologi & SDM, serta keamanan fisik. Peningkatan ini menunjukkan sistem keamanan semakin matang dan siap diuji melalui audit internal dan kesiapan operasional CSIRT.

Dan pada tahun 2024, Provinsi NTB mencatatkan skor Indeks KAMI 437 poin, yang menempatkannya pada kategori matang. Hal ini menunjukkan bahwa aspek pengamanan informasi telah menjadi bagian terintegrasi dalam proses kerja dan layanan pemerintahan, dengan sistem kontrol yang berjalan efektif dan berkesinambungan. Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan sinergis antara Dinas Kominfotik NTB selaku leading sektor, perangkat daerah terkait, serta kolaborasi dengan BSSN melalui kegiatan pendampingan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan informasi dan persandian.

Grafik 2. 107 Skor Indeks Keamanan Informasi Provinsi NTB Tahun 2022-2024

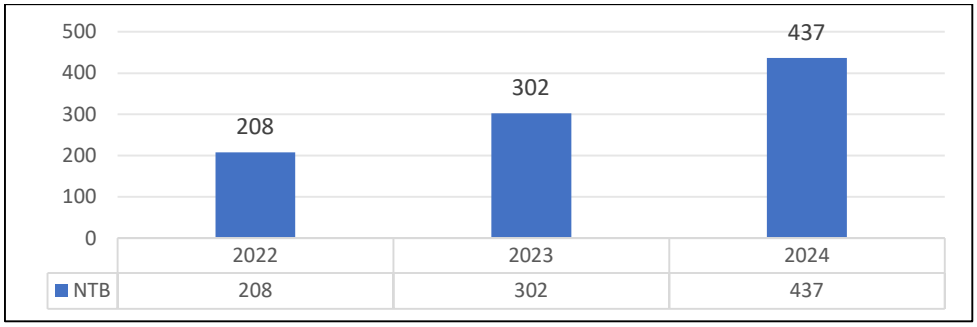

Sumber : Kementerian Komunikasi dan Digital RI, 2024

16. Kebudayaan

Amanat Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 pasal 2 tentang kebudayaan. Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara: memutakhirkan data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu secara terus-menerus; mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya; dan. memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagai warisan budaya dunia. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2020-2024 oleh Pemerintah Provinsi NTB dalam rangka memperkenalkan nilai-nilai budaya daerah, membentuk karakter masyarakat seturut nilai-nilai budaya lokal yang pada akhirnya bermuara pada pelestarian nilai-nilai budaya. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan. Pemajuan Kebudayaan bertujuan untuk: (a) mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa; (b) memperkaya keberagaman budaya; (c) memperteguh jati diri bangsa; (d) memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa; (e). mencerdaskan kehidupan bangsa; (f) meningkatkan citra bangsa. Ada 11 (sebelas) Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dapat di data di tingkat Provinsi sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 94 Perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Tahun 2020 – 2024

No	OBJEK	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tradisi Lisan	116	-	-	-	-
2	Manuskrip	-	-	1	1	-
3	Adat Istiadat		10	-	3	-
4	Ritus	3	23	-	2	-
5	Pengetahuan Tradisional	-	38	10	5	10
6	Teknologi Tradisional				-	-
7	Seni	55		116	28	-
8	Bahasa	-	-	28	0	-
9	Permainan Rakyat	118	201	22	8	-
10	Olahraga Tradisional	131	201	-	336	1
11	Cagar Budaya	-	1	-	37	11

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

Berdasarkan data kunjungan pada periode 2020–2024, tercatat perkembangan yang cukup signifikan baik dari sisi jumlah maupun keragaman jenis pengunjung. Secara keseluruhan, jumlah pengunjung meningkat dari 9.388 orang pada tahun 2020 menjadi 63.822 orang pada tahun 2024. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2022, dengan lonjakan hampir empat kali lipat dibanding tahun sebelumnya, yang menunjukkan adanya pemulihan dan rebound pasca pandemi COVID-19. Dari sisi komposisi, pengunjung dengan latar belakang pendidikan (TK, SD, SLTP, SLTA, dan mahasiswa) merupakan kelompok dominan, khususnya pada periode 2022–2023. Hal ini menegaskan bahwa sektor pendidikan masih menjadi basis utama kunjungan, meskipun pada tahun 2024 terjadi penurunan yang cukup signifikan, sehingga diperlukan inovasi program edukasi agar tetap menarik bagi lembaga pendidikan.

Di sisi lain, terdapat tren positif dari kunjungan wisatawan asing (WTA). Setelah mengalami penurunan tajam pada 2021 akibat pandemi, jumlah kunjungan wisatawan asing meningkat secara konsisten hingga mencapai 2.517 orang pada 2024, melampaui angka kunjungan sebelum pandemi. Hal ini menunjukkan adanya potensi besar pengembangan destinasi sebagai daya tarik wisata internasional. Pengunjung dari kalangan peneliti juga mulai menunjukkan peningkatan, walaupun jumlahnya masih relatif kecil. Kehadiran peneliti yang konsisten pada 2023–2024 memberikan peluang untuk memperkuat peran destinasi sebagai pusat riset dan edukasi. Sementara itu, kunjungan rombongan tamu daerah maupun negara masih sangat terbatas, sehingga diperlukan strategi untuk menarik segmen ini melalui penyelenggaraan event dan kerja sama antar daerah maupun internasional.

Adapun pengunjung umum mengalami tren fluktuatif, dengan peningkatan signifikan hingga tahun 2023 kemudian menurun pada 2024. Hal ini mengindikasikan adanya pengaruh event-event tertentu yang meningkatkan minat kunjungan, sehingga konsistensi program promosi dan kegiatan tematik menjadi penting untuk menjaga stabilitas kunjungan.

Tabel 2. 95 Pengunjung Museum Negeri Provinsi NTB Tahun 2020-2024

No	Jenis Pengunjung	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	TK	2.199	3.166	11.660	11.254	9.234
2	SD	1.652	2.817	14.152	15.621	10.150
3	SLTP	711	1.443	5.841	5.962	4.817
4	SLTA	789	2.273	7.472	6.323	4.291
5	Mahasiswa	348	1.062	2.089	1.911	1.483
6	Peneliti	11	7	0	75	76
7	WTA (Wisatawan Asing)	391	25	504	1.564	2.517
8	RTD(Rombongan Tamu Daerah)	25	41	0	0	0
9	RTN (Rombongan Tamu Negara)	0	0	0	0	0
10	Pengunjung Umum	3.262	4.672	16.217	17.723	10.195
JUMLAH		**9.388**	**15.506**	**57.935**	**60.433**	**63.822**

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024.

17. Perpustakaan

Perpustakaan sebagai tempat untuk mengakses informasi saat ini terus berbenah untuk dapat memberikan pelayanan dengan baik, melalu pelaksanaan tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan pengumpulan, penyimpanan, serta pelestarian terbitan Indonesia sebagai khazanah kebudayaan serta menjamin pemeliharaan terbitan Indonesia.

Tabel 2. 96 Jumlah Pengunjung ke Perpustakaan dan Anggota Perpustakaan Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengunjung Perpustakaan (orang)	16.190	26.945	48.100	49.704	59.027
2	Anggota Perpustakaan (orang)	5.560	7.713	8.089	7.014	4.677
	- Umum	415	481	587	517	400
	- Pelajar	256	444	489	638	554
	- Mahasiswa	4.832	6.982	6.863	5.653	3.723
	- Unverified	57	159	150	206	-

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB, 2024.

Jumlah pengunjung perpustakaan tiap tahunnya mengalami fluktuatif dengan rata-rata 112 %. Sedangkan untuk jumlah anggota perpustakaan pada tahun 2021 jumlah anggota yang terdaftar sebanyak 7.715 orang, meningkat sebanyak 374 orang di tahun 2022 yaitu sebanyak 8.089 orang, selanjutnya pada tahun 2023 menurun sebesar 7.014.

Untuk mendukung minat baca dan peningkatan jumlah pengunjung pada perpustakaan di NTB, telah berkembang secara signifikan komunitas perpustakaan pada tahun 2015 sebanyak 101 Komunitas meningkat menjadi 182 Komunitas pada tahun 2019. Komunitas ini akan terus berkembang dengan adanya pembinaan yang dilakukan oleh baik Perpustakaan Provinsi maupun Perpustakaan Kab/Kota. Ada perkembangan komunitas perpustakaan di NTB sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 97 Jumlah Perpustakaan Komunitas Di NTB Tahun 2020-2024

No	Kab/Kota	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Lombok Barat	-	-	-	-	-
2	Lombok Tengah	25	25	25	25	25
3	Lombok Timur	24	24	24	24	24
4	Lombok Utara	-	-	-	-	-
5	Sumbawa Barat	-	-	-	-	-
6	Sumbawa	7	7	7	7	7
7	Dompu	10	10	10	10	10
8	Bima	-	-	-	-	-
9	Kota Mataram	-	-	-	-	-
10	Kota Bima	9	9	9	9	9
Jumlah		**75**	**75**	**75**	**75**	**75**

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB

18. Kearsipan

Kearsipan merupakan suatu proses yang diawali dari penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan dan perawatan serta penyimpanan menurut sistem tertentu. Kearsipan memegang peranan penting bagi kelancaran jalannya organisasi, yaitu sebagai sumber informasi dan sebagai pusat ingatan bagi organisasi.

Penyelamatan arsip Pemerintah Provinsi NTB yang tercipta di seluruh Perangkat Daerah dilakukan melalui proses akuisisi. Akusisi arsip adalah pengumpulan arsip yang dilaksanakan melalui kegiatan penilaian, penataan dan pembuatan daftar arsip statis yang bertujuan untuk penyelamatan dan pelestarian serta pencari jejak informasi bersejarah dalam bentuk memori kolektif kehidupan berbangsa dan bernegara kepada generasi mendatang. Upaya yang telah dilakukan dalam pengelolaan arsip di Provinsi NTB selama kurun tahun 2020 – 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 98 Upaya Pengelolaan Arsip Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Peningkatan Khasanah arsip statis (berkas)	26.100	24.994	25.367	27.406	28.698
2	Jumlah Arsip Perangkat Daerah/Lembaga (berkas)	15.000	20.000	20.000	20.000	46.447
3	Pengembangan Arsip Desa / Kelurahan (Desa)	12	-	-	-	-
4	*Record centre* (Perangkat Daerah)	21	21	22	22	22

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB, 2023

2.4.4.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Pembangunan dan pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi NTB menjadi sangat penting ditengah isu kerawanan pangan, stunting serta kemiskinan yang masih tinggi. Wilayah perencanaan Provinsi NTB berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi

NTB Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB Tahun 2024-2044. Berdasarkan data spasial tersebut, Provinsi NTB memiliki garis pantai sepanjang ± 2.999,54 Km2 dengan perairan laut seluas ± 2.791.492 hektare (59 persen) yang terdiri dari perairan pesisir sejauh 12 mil laut dari pantai dan pulau-pulau kecil. Adapun daratan Provinsi NTB berdasarkan intepretasi data spasial adalah ± 1.966.639 hektare (41 persen). Potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang demikian besar memerlukan pengelolaan secara berkelanjutan sehingga dapat meningkatan produksi perikanan yang menjadi sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan, juga untuk menjaga ketersediaan kebutuhan konsumsi sumber protein ikan dan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan.

Ketersediaan produksi ikan secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian ekosistem sumberdayanya, dilakukan dengan pengelolaan dan pengendalian eksplorasi dan eksploitasinya. Sehingga pengelolaan sumberdaya kelautan pesisir dan pulau-pulau kecil melalui upaya rehabilitasi, konservasi, mitigasi, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan perlu dilakukan secara optimal, sehingga dapat memberikan pemanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat perikanan secara khusus dan masyarakat secara umum.

Dalam upayanya untuk menjamin ketersediaan produksi perikanan secara berkelanjutan, pengelolaan kelautan dan perikanan sebagaimana disebutkan pada pasal 27 Undang-undang nomor 23 tahun 2014, adalah selain melakukan eksplorasi, eksploitasi, pengembangan bioteknologi dan jasa kelautan lainnya, juga harus melakukan konservasi paling sedikit 10% dari total luas wilayah perairan teritorialnya serta pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Dengan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang besar tersebut, tentunya sektor sumber daya perikanan dan kelautan perlu dimanfaatkan dan dikelola secara tepat bagi sebanyak-banyaknya bagi kesejahteraan rakyat. Capaian kinerja beberapa indikator urusan kelautan dan perikanan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, secara terinci dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 99 Capaian Kinerja urusan kelautan dan perikanan Provinsi NTB
Tahun 2020 – 2024

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kontribusi PDRB Sektor Perikanan (Milyar Rupiah)	4.037,45	4.118,85	4.211,03	4.318,92	4.507,97
2.	Produksi Perikanan (ton)	1.133.997,58	1.187.198,59	1.201.455,19*	1.227.761,88	1.235.424,00
3.	Nilai Tukar Nelayan (index)	109,08	116,58	112,75*	108,25	105,84
5.	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (index)	100,12	103,21	106,06*	102,97	104,69
6.	Angka Konsumsi Ikan (kg/kap/tahun)	50,21	52,48	53,12*	53,29*	58,39
7.	Proporsi Tangkapan Ikan Yang Berada Dalam	71,59	76,39	75,04*	-	-

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Batasan Biologis Yang Aman (%)					
8.	Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial (%)	4,33	4,53	4,53	6,28	6,55

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, 2025

Fluktuasi produksi yang terjadi tidak serta merta menurunkan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor perikanan. Tercatat kontribusi sektor perikanan selama kurun waktu lima tahun ini terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,70% pertahun. Artinya terjadi penurunan produksi perikanan secara kuantitas, sedangkan nilai tambah produksinya tetap mengalami peningkatan. Hal ini tentunya dapat terbaca dari perkembangan nilai tukar perikanan yang tetap mencatat terjadi surplus pada usaha sector perikanan sebagaimana tercantum pada tabel diatas. Walaupun jika dilihat dari fakta di lapangan, masyarakat perikanan khususnya yang berada di wilayah pesisir masih tercatat sebagai daerah penyumbang angka kemiskinan daerah.

Selanjutnya kinerja angka konsumsi ikan selama periode lima tahun terakhir ini terus meningkat, walaupun capaian kinerja angka konsumsi sebesar 53,29 kg/kap/tahun ini masih berada dibawah angka konsumsi ikan secara nasional. Oleh karena itu untuk meningkatkan capaian AKI diperlukan konvergensi program stunting dan PMT Bumil Balita dengan program gemarikan serta program lainnya perlu ditingkatkan dan dapat laksanakan secara beriringan dengan melibatkan stakeholder terkait dan koordinasi lintas sector. Tidak terbatas hanya pada produksi perikanan, kinerja sector perikanan juga mengamanahkan pengalokasian kawasan konservasi daerah di Provinsi NTB sebagai salah satu upaya menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya alam hayati dan non hayati, sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) yang telah diintegrasikan kedalam RTRW Provinsi NTB. Terdapat 11 kawasan konservasi daerah di Provinsi NTB, dan diantaranya terdapat 6 kawasan konservasi daerah yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang harus dikelola secara efektif menuju pengelolaan yang optimal.

Dari sisi kinerja ekspor kelautan dan perikanan turut menunjukkan kontribusi strategis terhadap perekonomian NTB. Komoditas ikan dan udang menjadi penyumbang ekspor terbesar kedua setelah sektor tambang. Nilai ekspor yang mencapai USD 28,27 juta pada 2020 sempat menurun akibat gangguan global, namun kembali menguat pada 2024 menjadi USD 22,38 juta, menandakan pemulihan dan daya saing komoditas kelautan NTB di pasar internasional.

Grafik 2. 108 Perkembangan Ekspor hasil perikanan Provinsi NTB Tahun 2020-2024

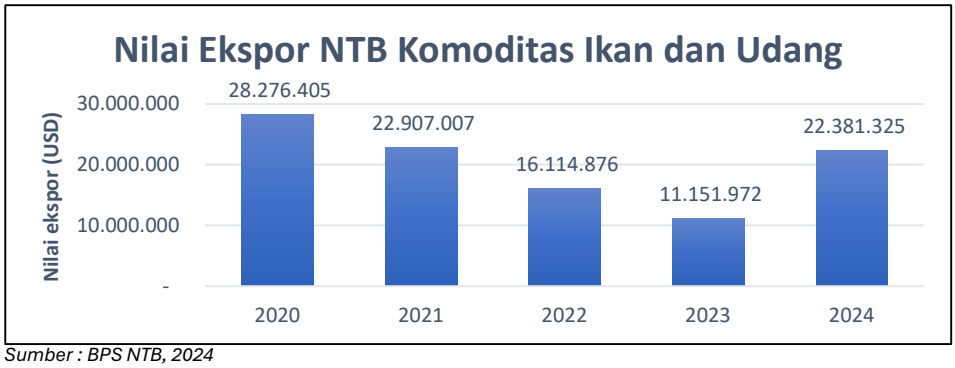

Sumber : BPS NTB, 2024

2. Pariwisata

Sektor pariwisata NTB memiliki potensi yang besar banyaknya destinasi dan keragaman potensi wisata kelas dunia, mulai dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Kawasan Teluk Saleh, Pulau Moyo dan Tambora (Samota), Geopark Gunung Rinjani, Pantai Senggigi, pesona gili-gili kekayaan tradisi, seni budaya, sejarah, dan industri kerajinan rakyat yang unik dan potensial.

Pembangunan pariwisata memiliki kontribusi signifikan dalam pembangunan ekonomi daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah. Keberhasilan Kinerja pembangunan pariwisata ini ditunjukkan dengan Peningkatan jumlah tamu menginap khususnya pada hotel berbintang seperti yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 100 Jumlah Tamu Menginap dan Rata-rata Lama Menginap Pada Hotel Bintang Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Tamu Menginap	Orang	397.715	446.661	754.053	935.194	1.113.211
Rata-rata Lama Menginap	Hari	1,88	2,23	2,31	1.89	1,72

Sumber: BPS, 2025.

Perkembangan jumlah tamu menginap pada hotel berbintang di Provinsi NTB menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, jumlah tamu menginap tercatat sebanyak 397.715 orang, dan terus meningkat hingga mencapai 1.113.211 orang pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan pemulihan yang kuat setelah dampak pandemi COVID-19, serta semakin meningkatnya kepercayaan wisatawan terhadap NTB sebagai destinasi wisata unggulan nasional dan internasional. Pertumbuhan ini juga didorong oleh penyelenggaraan event internasional di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, seperti MotoGP dan even lainnya, yang

berkontribusi besar terhadap peningkatan okupansi hotel berbintang di wilayah Lombok Tengah dan sekitarnya.

Meskipun jumlah tamu meningkat tajam, rata-rata lama menginap (RLM) justru mengalami tren penurunan. Setelah sempat mencapai 2,31 hari pada tahun 2022, angka ini menurun menjadi 1,72 hari pada tahun 2024. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun kunjungan meningkat, wisatawan cenderung melakukan perjalanan singkat.

Selanjutnya berdasarkan data PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), sektor Akomodasi dan Makan Minum di Provinsi NTB menunjukkan kinerja yang terus membaik selama periode 2020–2024. Nilai rasio sektor ini terhadap total PDRB sempat menurun pada tahun 2021, namun kembali mengalami pertumbuhan positif pada tahun-tahun berikutnya. Tren peningkatan dari sekitar 1,42 persen pada tahun 2020 menjadi 1,75 persen pada tahun 2024 mencerminkan adanya penguatan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah.

Grafik 2. 109 Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum (ADHB)
Provinsi NTB Tahun 2020-2024

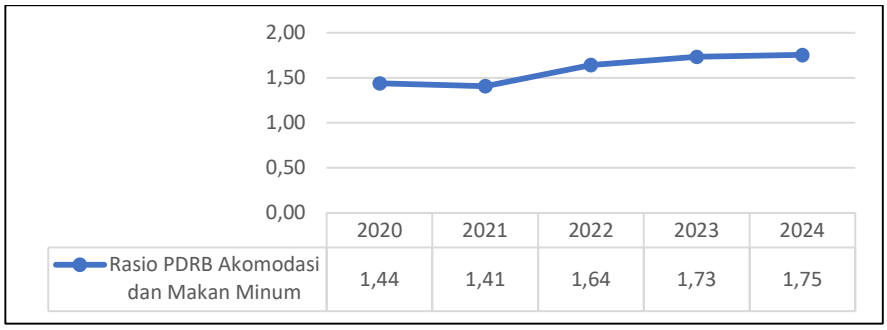

Sumber: BPS, 2025.

Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa sektor akomodasi dan makan minum menjadi salah satu motor penggerak pemulihan ekonomi NTB pascapandemi COVID-19. Aktivitas pariwisata meningkat seiring dengan penyelenggaraan berbagai event internasional di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, seperti MotoGP, dan even lainnya yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan permintaan jasa perhotelan, restoran, serta layanan kuliner lokal. Selain itu, berkembangnya wisata berbasis komunitas, wisata halal, dan wisata kuliner khas daerah turut memperluas dampak ekonomi sektor ini hingga ke pelaku UMKM dan masyarakat lokal. Meskipun menunjukkan tren positif, kontribusi sektor ini masih perlu diperkuat agar memberikan efek pengganda yang lebih merata antarwilayah.

Secara keseluruhan, tren kenaikan rasio PDRB sektor Akomodasi dan Makan Minum ADHB menunjukkan bahwa struktur ekonomi NTB mulai bergeser menuju sektor jasa berbasis pariwisata dan ekonomi kreatif, yang diharapkan menjadi pengungkit utama pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di masa mendatang.

3. Pertanian

Melihat geografis NTB serta sebagian besar mata pencaharian utama masyarakat NTB sebagai petani, sudah barang tentu hal tersebut menjadikan sektor pertanian sebagai sektor yang sangat strategis dalam struktur perekonomian NTB. Seiring dengan berkembangnya perekonomian yang mencanangkan masa depan NTB menuju era industrialisasi dan daerah pariwisata dunia tentunya sector pertanian memiliki peran penting dalam mewujudkannya.

Sektor pertanian NTB terdiri atas tiga sub sektor yaitu sub sektor tanaman pangan, tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan. Komoditi strategis tanaman pangan yaitu padi, jagung dan kedelai yang memiliki peranan pokok dalam memenuhi kebutuhan pangan, pakan dan industri dalam negeri setiap tahunnya, yang cenderung meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan berkembangnya industri pangan dan pakan. Sehingga dari sisi Ketahanan Pangan Nasional fungsinya menjadi sangat penting dan strategis. Pemenuhan kebutuhan pangan bagi seluruh penduduk menjadi agenda utama kebijakan pangan bagi pemerintah suatu negara. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar menghadapi tantangan yang sangat kompleks dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya, sehingga masalah ketahanan pangan menjadi isu sentral dalam pembangunan dan menjadi fokus dalam pembangunan pertanian. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, bertambah pula kebutuhan pangan yang harus disediakan. Oleh karena itu, pencapaian produksi pertanian yang terus diikuti dengan alih fungsi lahan pertanian menjadi tantangan bagi pemerintah dalam rangka peningkatan produksi pertanian.

Dalam rangka mempertahankan swasembada pangan diperlukan suatu langkah terobosan untuk meningkatkan luas tambah tanam (LTT) maupun produkstivitas (hasil per hektar) diwilayah yang belum optimum indeks pertanamannya, serta perlu dilakukan rekayasa intensifikasi bagi wilayah yang mengalami pelandaian bahkan penurunan produktivitas pertanamannya. Oleh karena itu upaya optimalisasi lahan melalui kegiatan Perluasan Areal Tanam (PAT) maupun Peningkatan Indeks Pertanaman (PIP), sistem tanam tumpang sari diharapkan dapat meingkatkan luas areal tanam serta penggunaan varietas unggul, pemupukan berimbang spesifik lokasi dan komoditas, budidaya sesuai anjuran diharapkan dapat berkontribusi positif terhadap produktivitas tanaman. Penggunaan alat dan mesin pertanian serta optimalisasi irigasi dalam rangka efektif dan efisiensi budidaya yang dilakukan petani diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para petani.

Jika melihat trend produksi tanaman pangan, maka produksi tanaman padi dan jagung megalami fuktuasi, sedangkan produksi kedelai dari tahun ketahun mengalami penurun. Penurun produksi kedelai disebabkan persaingan ketat penggunaan lahan dengan komoditas lain yang juga strategis, seperti jagung yang secara ekonomis lebih menguntungkan dibandingkan menanam kedelai. Disamping itu harga kedelai yang tidak stabil menyebabkan pegtani enggan untuk menanam kedelai. Adapun produksi

komoditas tanaman pangan di Provinsi NTB Tahun 2020-2024 mengalami perkembangan sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 101 Produksi Tanaman Pangan Tahun 2020-2024

NO	JENIS TANAMAN	PRODUKSI (TON)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Padi (Ton)	1.317.190	1.419.560	1.452.945	1.538.537	1.453.408
2	Jagung (JPK KA 14 %) (Ton)	860.495	1.019.225	1.421.922	1.281.035	1.209.784
3	Jagung (JPK KA 28 %) (Ton)	1.164.007	1.378.725	1.923.461	1.732.880	1.636.497
4	Kedelai (Ton)	32.415	19.393	9.713	20.011	8.770

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2024.

**) Angka Tahun 2022 jagung dan kedelai adalah Angka Perkiraan - Produksi Padi 2022, padi 2023 dan jagung 2023 merupakan angka tetap dari Rilis Berita Statistik tanggal 1 Maret 2023 dan 1 Maret 2024*

***) Angka sementara – Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov NTB*

Penetapan kawasan aneka cabai dan bawang merah diperlukan untuk memudahkan upaya penumbuhan dan pengembangan kawasan bawang merah dan cabai berbasis agribisnis mulai dari penyediaan sarana produksi, budidaya, pascapanen dan pemasaran serta kegiatan pendukungnya secara terpadu, dan berkelanjutan. Kawasan aneka cabai adalah sebaran usaha yang disatukan oleh faktor ilmiah, sosial budaya, dan infrastruktur fisik buatan, serta dibatasi oleh agroekosistem yang sama sedemikian rupa sehingga mencapai skala ekonomi dan efektivitas manajemen usaha. Kawasan bawang merah dan cabai dapat meliputi kawasan yang telah ada maupun lokasi baru yang memiliki potensi SDA yang sesuai dengan agroekosistem, dan lokasinya dapat berupa hamparan dan atau luasan terpisah, dalam satu kawasan yang dihubungkan dengan aksesibilitas memadai.

Cabai merupakan komoditas hortikultura yang perlu mendapat perhatian khusus, karena komoditas ini dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia dalam jumlah besar, sehingga pemenuhan kebutuhannya dapat memicu inflasi di Indonesia. Jika dilihat dari kondisi kedua komoditas tersebut saat ini, produksinya tidak merata sepanjang tahun yang mengakibatkan terjadinya fluktuasi harga di beberapa daerah di Indonesia. Selain itu kesenjangan harga antara petani dan pengepul/distributor yang tinggi, dengan kata lain keuntungan hanya dirasakan secara signifikan oleh pengepul, yang biasanya disertai oleh permainan di tingkat pasar.

Produksi komoditas hortikultura unggulan di Provinsi NTB dalam kurun waktu 2020–2024 menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif. Tiga komoditas utama yaitu cabe, bawang merah, dan manggis memperlihatkan tren yang berbeda-beda sehingga memberikan implikasi penting terhadap arah kebijakan pembangunan pertanian ke depan.

Pertama, komoditas cabe. Pada tahun 2020 produksi cabe mencapai 119.034 ton, namun menurun cukup tajam pada 2021–2022 hingga berada pada angka 71.738 ton. Sejak 2023 produksi mulai mengalami pemulihan menjadi 83.908 ton dan meningkat

lebih lanjut pada 2024 hingga mencapai 110.303 ton. Fluktuasi ini menggambarkan adanya kerentanan produksi cabe terhadap perubahan iklim, serangan organisme pengganggu tanaman, maupun dinamika harga pasar. Kendati demikian, tren pemulihan produksi dalam dua tahun terakhir menunjukkan adanya potensi penguatan melalui intervensi kebijakan yang tepat.

Kedua, komoditas bawang merah yang merupakan salah satu andalan hortikultura NTB. Produksi bawang merah relatif tinggi dengan capaian tertinggi pada 2021 sebesar 222.620 ton. Namun, setelah itu produksi cenderung menurun dan pada 2024 tercatat hanya 159.885 ton, lebih rendah dibanding capaian awal. Fluktuasi yang signifikan ini berpotensi menimbulkan ketidakstabilan pasokan dan harga, sehingga memerlukan langkah-langkah strategis dalam peningkatan produktivitas, penguatan kelembagaan petani, serta penyediaan sarana produksi dan teknologi budidaya yang adaptif terhadap perubahan iklim.

Ketiga, komoditas manggis menunjukkan tren penurunan yang cukup konsisten. Setelah sempat mencapai 24.850 ton pada 2021, produksi terus menurun hingga hanya 11.340 ton pada 2024. Kondisi ini mengindikasikan lemahnya upaya peremajaan tanaman, keterbatasan akses pasar, serta rendahnya perhatian terhadap pengembangan buah tropis unggulan yang memiliki nilai ekspor tinggi. Padahal manggis memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan petani sekaligus memperluas pasar ekspor hortikultura NTB.

Berdasarkan perkembangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sektor hortikultura di Provinsi NTB masih menghadapi tantangan stabilisasi produksi, penguatan daya saing, serta pemanfaatan peluang pasar domestik dan internasional. Adapun perkembangan produksi tanaman hortikultura sebagai mana tabel berikut:

Tabel 2. 102 Produksi Tanaman Hortikultura Tahun 2020-2024

No	JenisTanaman	Produksi (Ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Cabe (Ton)	119.034	78.625	71.738	83.908	110.303
2	Bawang Merah (Ton)	188.740	222.620	201.155	212.618	159.885
3	Manggis (Ton)	20.644	24.850	16.778	18.081	11.340

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Angka Tetap (ATAP) BPS Provinsi NTB 2024

Selain komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Tanaman Perkebunan dinilai menjadi kekuatan dan penopang ekonomi nasional, hal ini terbukti dari tahun ke tahun selalu berkontribusi dalam meningkatkan besaran PDB; nilai investasi/ penanaman modal dalam negeri maupun luar negeri yang tinggi; menyumbang surplus neraca perdagangan internasional; sumber devisa negara; berkontribusi dalam peningkatan penerimaan negara melalui cukai tembakau, pajak ekspor dan bea keluar; pungutan ekspor bagi produk minyak sawit, penyediaan bahan pangan dan bahan baku industry. Selain peran ekonomi, perkebunan juga memiliki peran ekologis dan sosial budaya. Peran inklusiftas ekologis diasumsikan perkebunan sebagai salah satu paru-paru

ekosistem yang menyerap dan mereduksi karbondioksida sekaligus mengeluarkan oksigen di atmosfer bumi, penyedia bahan bakar nabati dan bioenergy yang bersifat ramah lingkungan yang terbarukan, penurun emisi gas rumah kaca serta mendukung pelestarian SDA dan lingkungan hidup sedangkan peran sosial perkebunan pembuka lapangan kerja dan penyerap tenaga kerja yang berkelanjutan sesuai amanat Undang-Undang No. 39/2014 tentang Perkebunan. Adapun produksi komoditi tanaman perkebunan Provinsi NTB tahun 2020 -2024 sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 103 Produksi Komoditi Tanaman Perkebunan Tahun 2020 -2024

No	Komoditi	Produksi (Ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kopi (Ton)	5.616	6.328	6.483	6.429	6.462
2	Kakao (Ton)	2.566	2.639	2.520	2.569	2.619
3	Kelapa (Ton)	47.646	48.851	45.877	49.684	49.814
4	Mete (Ton)	11.313	11.617	10.850	10.130	10.213
5	Tembakau (Ton)	57.065	52.632	59.786	66.437	67.570
	Vanili (Ton)	34,14	36,99	37,90	43,11	42,58

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, 2024.
Keterangan:) Angka Sementara.*

Walaupun produksi tembakau mengalami fluktuasi, namun tembakau merupakan produk perkebunan yang memberikan sharing paling besar dalam menciptakan nilai tambah di sektor perkebunan adalah komoditi tembakau. Provinsi NTB merupakan penghasil tembakau terbesar dalam produk nasional dan pemasok utama untuk industry rokok secara nasional.

4. Kehutanan

Dalam rangka mendukung pengelolaan hutan, diperlukan upaya untuk menjaga kelestarian kawasan hutan dan lahan melalui perencanaan pengelolaan hutan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) dan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPd). Provinsi NTB telah melaksanakan pembinaan dan pengendalian RPHJP/RPHJPd terhadap 23 unit KPH dan 1 unit Tahura Nuraksa.

Di Provinsi NTB sendiri juga terdapat Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus yang selanjutnya disingkat KHDTK adalah kawasan hutan yang secara khusus diperuntukkan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan kehutanan, pendidikan dan pelatihan kehutanan serta religi dan budaya. Tahun 2024, Provinsi NTB telah melaksanakan pembinaan dan pengendalian pengelolaan KHDTK seluas 1.449,37 ha dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 104 Data dan Informasi Wilayah Usaha Perizinan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Pada Balai KPH (L/P)

No	Pengelola	Nomor SK	Kegiatan	Luas (Ha)
1	Universitas Mataram	SK.392/Menhut-II/2014	Hutan Pendidikan	225.7
2	Universitas Muhammadiyah Mataram	SK.405/MenLHK/Setjen /PLA.0/6/2016	Pendidikan dan Pelatihan	93.55
3	KHDTK Rarung	SK.4762/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2016	Peneltian, Pengembangan, Pendidikan, Pelatihan, Religi, dan Budaya	325.87
4	Universitas Teknologi Sumbawa	SK.89/MenLHK/Setjen/ PLA.0/2/2018	Pendidikan dan Pelatihan	510
5	Yayasan Dea Malela	SK.286/MenLHK/Setjen /PLA.0/6/2018	Religi dan Budaya	76.49
6	Universitas Pendidikan Mandalika (UNDIKMA)*			217.76
TOTAL				**1,449.37**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutan Provinsi NTB, 2025

Berbagai upaya lainnya yang dilakukan oleh Provinsi NTB dalam rangka mempertahankan kelestarian kawasan hutan ialah monitoting izin penggunaan kawasan hutan, penyelesaian permasalahan tenurial, dan melakukan verifikasi lahan yang berbatasan dengan kawasan hutan. Hutan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.

Sampai tahun 2024, di Provinsi NTB terdapat 27 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang dimonitoring oleh Dinas LHK NTB, antara lain.

Tabel 2. 105 Data dan Informasi Wilayah Usaha Perizinan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Pada Balai KPH (L/P)

No.	Proses Perizinan	Luas dalam Hektar	Jumlah Izin
1	Penyesuaian IUPJLWA ke PBPH	1.675,72	7
2	Survey FS	3.554,98	1
3	Terbit Verifikasi Teknis	10.014,21	2
4	Batal	4.688,49	1
5	Penetuan Tarif Iuran PBPH	8.096,89	1
6	Rekomendasi PBPH	90.979,43	12
7	Definitif PBPH	39.389,33	3
	Total	**158.399,05**	27

Sumber : *Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2025*

Upaya lainnya terkait pengolahan hasil hutan telah dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pengelolaan hutan melalui Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan, Monitoring Produksi Hasil Hutan Kayu, Monitoring Produksi Hasil Hutan Kayu, dan Monitoring Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GanisPH).

Upaya untuk menurunkan lahan kritis di Provinsi NTB telah dilaksanakan melalui kegiatan penanaman di luar dan dalam kawasan hutan dengan reboisasi dan penghijauan. Reboisasi atau rehabilitasi hutan bertujuan untuk menghutankan kembali kawasan hutan yang kritis yang dilaksanakan bersama masyarakat secara partisipatif. Sedangkan penghijauan adalah penanaman pada lahan kosong diluar kawasan hutan. Berikut rincian luas areal kegiatan RHL tahun 2020-2024 dengan total luasan 44.164,15 ha disajikan pada tabel berikut

Tabel 2. 106 Rincian Luas Areal Kegiatan RHL Tahun 2020-2024 di Provinsi NTB

Tahun	Penghijauan (Ha)	Reboisasi (Ha)	Total (Ha)
2020	7,458.50	2,812.00	10,270.50
2021	7,336.60	5,127.00	12,463.60
2022	9,333.63	4,616.00	13,949.63
2023	4,388.49	1,931.81	6,320.30
2024	131.34	1,028.78	1,160.12
Grand Total	**28,648.56**	**15,515.59**	**44,164.15**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutan Provinsi NTB, 2022

Pada sektor Kehutanan, permasalahan yang dihadapi adalah masih tingginya gangguan keamanan hutan baik terhadap kawasan dan hasil hutannya. Gangguan keamanan hutan belum dapat diantisipasi dan ditangani dengan baik mengingat begitu kompleksnya permasalahan dalam pengelolaan kawasan hutan. Saat ini, perambahan hutan menjadi hal yang cukup serius untuk segera ditangani sebab sebagian besar lahan yang dirambah telah berubah fungsi menjadi areal tanaman jagung. Data hasil identifikasi pada tahun 2023 menunjukkan bahwa luas perambahan kawasan hutan di Provinsi NTB seluas 287 hektar. Pada satu sisi mendorong pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lainnya mendorong degradasi hutan dan lahan yang berpotensi menimbulkan bencana alam seperti banjir, longsor dan lain-lain, jika tidak ditangani dengan segera.

Selain itu, kemiskinan sekitar kawasan hutan juga menjadi hal penting pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Berdasarkan overlay data desa Provinsi NTB dengan kawasan hutan, dapat diketahui jumlah desa yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan sejumlah 470 desa. Kemudian data desa sekitar kawasan hutan tersebut dioverlay dengan data rekomendasi 500 desa miskin (Keputusan

Gubernur NTB Nomor 400 - 234 Tahun 2019), didapatkan sebanyak 200 desa miskin yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Desa miskin sekitar kawasan hutan paling banyak tersebar di Kabupaten Bima yaitu sebanyak 48 desa. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan pada wilayah pemanfaatan hutan kemasyarakatan masih terkendala kurangnya keterampilan masyarakat dalam mengolah hasil panen dari areal kelola masyarakat baik di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Saat ini, konsep Perhutanan Sosial digunakan sebagai skema pemanfaatan kawasan hutan yang bertujuan untuk pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, serta mengatasi ketimpangan melalui 3 pilar yaitu lahan, kesempatan usaha, dan sumber daya manusia. Skema perhutanan sosial yang sudah diterapkan dan berjalan di Provinsi NTB antara lain Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Desa (HD) dan Kemitraan Kehutanan (KK). Total areal Perhutanan Sosial yang sudah berjalan sampai dengan tahun 2024 adalah 71.980 hektar dengan jumlah kelompok sebanyak 533 Kelompok Tani Hutan (KTH). Diharapkan konsep Perhutanan Sosial dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, meningkatkan kelestarian hutan dan menyelesaikan masalah tenurial dan keadilan bagi masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat yang ada di dalam atau sekitar hutan.

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB, pembentukan Dinas ESDM Provinsi NTB dihajatkan untuk menjawab isu strategis di sektor ESDM yang memerlukan penanganan lebih intensif untuk mengurangi angka kemiskinan yang masih relatif tinggi, serta masih adanya kesenjangan pembangunan infrastruktur antar wilayah di berbagai sektor. Dinas ESDM yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang ESDM yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan Pemerintah Provinsi dalam urusan pemerintahan bidang ESDM terdiri dari kewenangan sub urusan bidang mineral dan batubara, sub urusan bidang geologi, sub urusan bidang energi baru terbarukan dan sub urusan bidang ketenagalistrikan. Sedangkan sub urusan bidang minyak dan gas bumi seluruhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Dalam perkembangannya hingga akhir tahun 2022 beberapa peraturan dan perundangan telah terbit yang mengubah kewenangan sebelumnya terkait bidang mineral dan batubara dan bidang geologi. Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan sub urusan bidang mineral dan batubara berpindah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Namun demikian pada tahun 2022 terbit Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sehingga

pengurusan perizinan pertambangan batuan dan mineral bukan logam dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi. Sedangkan untuk urusan perizinan di bidang air tanah, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, pasca terbitnya Kepmen ESDM Nomor 259.K/GL.01/MEM.G/2022 tentang Standar Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah, sejak tanggal 19 Oktober 2022 perizinan air tanah dilaksanakan oleh Menteri ESDM. Kewenangan Provinsi di bidang geologi yang dibatasi pada konservasi air tanah dan Penetapan Nilai Perolehan Air. Perubahan regulasi pada kedua bidang tersebut tersebut membutuhkan proses transisi dalam pelaksanaannya selama tahun 2022.

Selanjutnya berdasarkan kewenangan yang sudah ditetapkan, maka tercatat sampai dengan tahun 2024 berdasarkan data PLN rasio desa berlistrik sudah mencapai 100% dari jumlah desa/kelurahan sebanyak 1.143 mendapatkan listrik dari sumber PLN sedangkan 5 desa sisanya mendapatkan listrik dari sumber Non PLN.

Tabel 2. 107 Sebaran Desa Berlistrik di Provinsi NTB Tahun 2024

No.	KAB/KOTA	JUMLAH DESA/KEL	JML DESA/KEL BERLISTRIK	KETERENGAN
1.	Kota Mataram	50	50	50 Desa / Kelurahan Listrik PLN
2.	Kab. Lombok Barat	122	122	122 Desa Listrik PLN
3.	Kab. Lombok Tengah	139	139	139 Desa Listrik PLN
4.	Kab. Lombok Timur	254	254	254 Desa Listrik PLN
5.	Kab. Lombok Utara	33	33	33 Desa Listrik PLN
6.	Kab. Sumbawa Barat	65	65	65 Desa Listrik PLN
7.	Kab. Sumbawa	165	165	160 Desa Listrik PLN dan 5 Desa listrik non PLN
8.	Kab. Dompu	81	81	81 Desa Listrik PLN
9.	Kab. Bima	193	193	193 Desa Listrik PLN
10.	Kota Bima	41	41	41 Desa/Kelurahan Listrik PLN
Total		**1.143**	**1.143**	

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB, 2024

Sebanyak 5 (lima) desa yang mendapatkan listrik dari sumber Non PLN berada pada Kabupaten Sumbawa yang terdiri dari Desa Tepal, Desa Baodesa, Desa Tangkam Pulit dan Desa Baturotok yang masuk dalam Kecamatan Batulanteh dan Desa Mungkin Kecamatan Orong Telu. Kelima desa tersebut mendapatkan listrik dari sumber PLTMH. Kelima desa tersbut berada pada wilayah pegunungan di Kabupaten Sumbawa dimana jaringan listrik PLN belum dapat menjangkau wilayah tersebut. Kendala akses jalan bagi pembangunan jaringan PLN menjadi permasalahan utama belum masuknya jaringan listrik di wilayah tersebut. Untuk mengatasi masalah tersebut Dinas ESDM telah melakukan koordinasi secara berkala dengan PLN Wilayah NTB, Dinas PUPR Provinsi NTB dan Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa dalam rangka mempercepat peningkatan jalan menuju ke wilayah tersebut.

Pemerintah Provinsi NTB bersama dengan stakeholder energi telah menunjukkan capaian positif dalam memperluas akses listrik bagi masyarakat melalui program pemasangan sambungan listrik baru. Selama kurun waktu 2020–2024, tercatat sebanyak 16.839 sambungan listrik telah direalisasikan di seluruh Kab/Kota, mencerminkan kemajuan signifikan dalam mewujudkan energi yang adil dan merata. Kabupaten Lombok Tengah menjadi daerah dengan capaian tertinggi, menandakan keberhasilan pelaksanaan program elektrifikasi terutama di wilayah pedesaan dan kantong-kantong permukiman yang sebelumnya belum menikmati layanan listrik. Wilayah lain seperti Lombok Barat, Lombok Timur, dan beberapa kabupaten di Pulau Sumbawa juga menunjukkan tren peningkatan, walaupun dengan kecepatan yang bervariasi.

Tahun 2021 tercatat sebagai puncak pelaksanaan program pemasangan listrik, kemungkinan sebagai bagian dari akselerasi pemulihan pasca pandemi dan realisasi program prioritas nasional terkait energi berkeadilan. Namun demikian, ketimpangan antarwilayah dan fluktuasi tahunan menjadi catatan penting bagi upaya perencanaan ke depan. Dengan capaian ini, diharapkan rasio elektrifikasi Provinsi NTB terus meningkat menuju 100%, sekaligus mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, produktivitas ekonomi rumah tangga, dan penguatan layanan dasar di daerah tertinggal dan terpencil.

Tabel 2. 108 Pemasangan Listrik Murah dan Hemat Tahun 2020-2024

NO	KAB/KOTA	TAHUN					JUMLAH
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Kota Mataram	-	-	-	9		333
2	Kab. Lombok Utara	87	-	13	115		1155
3	Kab. Lombok Barat	270	-	33	110		2132
4	Kab. Lombok Tengah	398	1.951	66	474	120	5005
5	Kab. Lombok Timur	500	254	13	292	0	3529
6	Kab. Sumbawa Barat	-	97	-	48	0	615
7	Kab. Sumbawa	-	211	-	336	0	1341
8	Kab. Dompu	-	170	-	59	34	808
9	Kab. Bima	-	156	-	117	41	1538
10	Kota Bima	-	66	-	-		383
Provinsi NTB		**1.255**	**2.905**	**125**	**1.560**	**195**	**16.839**

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB, 2024

6. Perdagangan

Kondisi perdagangan internasional di Provinsi NTB selama kurun waktu 2020 sampai dengan 2024 mengalami fluktuatif namun secara umum meningkat. Untuk perdagangan ekspor, pada tahun 2020 besaran nilai transaksi sebanyak 643.488.423 USD, kemudian terus meningkat sampai di tahun 2022 menjadi 3.099.841.552 USD. Pada tahun 2023 besaran nilai transaksi menurun sebesar 1.049.547.810 USD tetapi pada tahun 2024 kembali naik 21.250.124 USD menjadi 2.071.543.866 USD. Adapun

gambaran perdagangan ekspor di Provinsi NTB selama tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.

Grafik 2. 110 Nilai Ekspor Provinsi NTB Tahun 2020-2024 (USD)

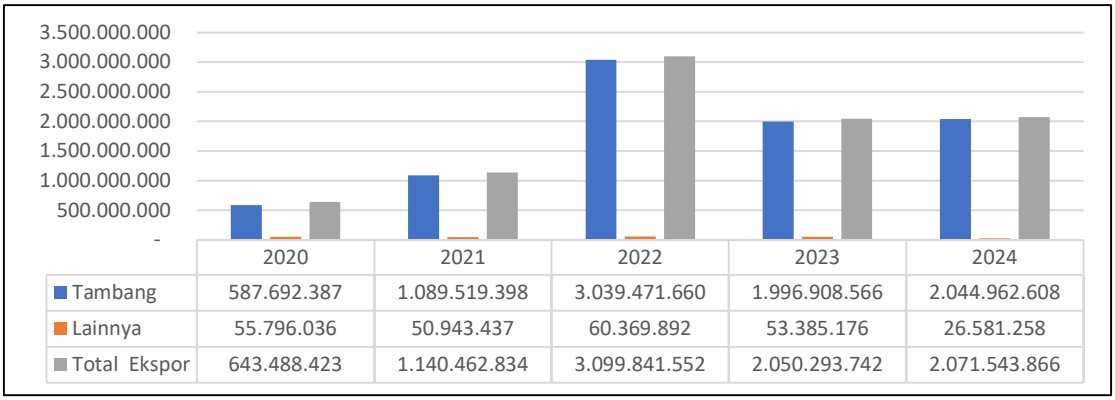

	2020	2021	2022	2023	2024
Tambang	587.692.387	1.089.519.398	3.039.471.660	1.996.908.566	2.044.962.608
Lainnya	55.796.036	50.943.437	60.369.892	53.385.176	26.581.258
Total Ekspor	643.488.423	1.140.462.834	3.099.841.552	2.050.293.742	2.071.543.866

Sumber: BPS NTB, 2024 (data diolah)

Data ekspor Provinsi NTB tahun 2020–2024 menunjukkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap sektor tambang, yang menyumbang lebih dari 95% dari total nilai ekspor setiap tahunnya. Puncak kinerja ekspor terjadi pada tahun 2022, dengan total nilai ekspor mencapai lebih dari Rp 3 triliun—angka tertinggi dalam lima tahun terakhir, didorong oleh ekspor tambang yang melonjak drastis. Namun, tren ini tidak berlanjut. Pada tahun 2023 dan 2024, terjadi penurunan signifikan nilai ekspor, meskipun sektor tambang masih mendominasi. Penurunan ini mencerminkan tingginya vulnerabilitas ekonomi daerah terhadap fluktuasi sektor ekstraktif, yang sangat dipengaruhi oleh dinamika global seperti harga logam mulia dan kebijakan ekspor nasional.

Sementara itu, ekspor dari sektor non-tambang (lainnya) masih sangat terbatas dan belum mampu berkontribusi signifikan terhadap total ekspor daerah. Hal ini menegaskan pentingnya dorongan terhadap diversifikasi produk ekspor, terutama di sektor pertanian, perikanan, dan industri kreatif, guna memperkuat ketahanan ekonomi daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap sektor tambang.

Komoditi ekspor yang mendominasi perolehan devisa pada tahun 2021–2024, hanya terdapat satu komoditi yang mendominasi dengan angka yang cukup signifikan setiap tahunnya yaitu komoditi hasil tambang dengan presentase pangsa ekspor NTB diatas 90 persen. Seluruh komoditi ekspor NTB setiap tahun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 109 Volume dan Nilai Ekspor Menurut Jenis Komoditi di Provinsi NTB Tahun 2021-2024

KOMODITAS	Nilai Ekspor (US $)			
	2021	2022	2023	2024
Hasil Tambang	1.214.480.423,52	3.119.406.275,03	2.049.385.065.,06	2.387.089.850,39
Hasil Kerajinan	447.369,56	369.709,82	131.526,33	0
Hasil Industri	0	0	18.552,80	310.110,83
Hasil Pertanian dan Perkebunan	674.583,32	7.109.584,00	383.961,32	629.181,27
Hasil Perikanan dan Kelautan	5.961.927,24	4.898.268,54	14.430.055,41	12.674.160,09
Hasil Kehutanan	0	78.648,00	72.000,00	0
Total Ekspor	**1.221.564.303,63**	**3.133.519.559,53**	**15.036.095,86**	**2.400.703.302.579,00**

Sumber: Dinas Perdagangan Provinsi NTB, 2024.

Perkembangan ekspor Provinsi NTB dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan dominasi sektor tambang yang masih sangat kuat. Namun, terdapat indikasi positif dari sektor-sektor lain seperti kelautan dan industri yang mulai tumbuh. Untuk mewujudkan struktur ekspor yang lebih seimbang dan berkelanjutan, diperlukan strategi penguatan daya saing komoditas unggulan, diversifikasi pasar, serta pengembangan hilirisasi produk di sektor pertanian, perikanan, dan industri kreatif. Upaya ini akan mendukung ketahanan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kontribusi NTB dalam perekonomian nasional.

7. Perindustrian

Sektor industri masih memiliki peran strategis dalam perekonomian NTB. Hal ini terlihat dari kemajuan ekonomi kerakyatan yang medorong tumbuh dan berkembangnya pelaku-pelaku ekonomi lokal berbasis komoditi unggulan lokal dan mampu menyerap tenaga kerja. Oleh karena Pemerintah Provinsi NTB terus berupaya meningkatkan daya saing produk industri dengan menumbuhkan Industri Kecil Mengah (IKM), memfasiltasi sertifikasi halal dari MUI, bimbingan teknis desain produksi, fasilitasi pendaftaran HKI Karya Seni Budaya Daerah (Desain industry, merek, hak cipta), dan sertifkasi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah rangkaian kegiatan dan kebijakan yang tujuan akhirnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memperluas lapangan kerja, serta pemerataan pendapatan, dengan kata lain pemerataan pendapatan masyarakat yang peningkatan kesejahteraan.

Pada Perindustrian dengan indikator tujuan pembangunan pertumbuhan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor Industri. Dimana PDRB pada tingkat provinsi merupakan gambaran kemampuan suatu daerah dalam menciptakan nilai tambah suatu produk dalam suatu waktu tertentu. Dalam perhitungan PDRB tersebut digunakan dua pendekatan yaitu produksi dan penggunaan. Keduanya menyajikan

komposisi data nilai tambah yang dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha).

Pertumbuhan PDRB provinsi NTB belum memperlihatkan nilai yang signifikan, masih didominasi oleh nilai pertambangan dan pertanian perkebunan. Adapun nilai PDRB sektor Industri tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 110 PDRB ADHK sektor Industri Pengolahan Provinsi NTB Tahun 2020 – 2024

Sub Kategori PDRB	[Seri 2010] PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Industri Pengolahan	4.351,56	4.442,86	4.530,84	4.644,52	4.839,21

Sumber BPS Provinsi NTB 2024.

Tujuan pokok pembangunan industri adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tidak hanya sekedar pencapaian pembangunan yang tinggi melainkan untuk menciptakan suatu kegiatan yang mandiri. Bertambahnya jumlah industri, akan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah kapasitas produksi disuatu daerah yang nantinya akan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Pertambahan jumlah industri yang ada dapat memperluas penyerapan tenaga kerja dalam sektor perekonomian.

Berkembangnya sektor industri diharapkan dapat menjadi penggerak bagi sektor yang lainnya. Dalam RPD Provinsi NTB disebutkan sebagai lokomotif pembangunan dan sektor lainnya adalah gerbong yang terus mendukung dalam pencapaian tujuan pembangunan di NTB. Perkembangan leading sector atau sektor penggerak tersebut akan mempengaruhi perkembangan sektor yang lainnya dikarenakan antar sektor memiliki keterkaitan yang sangat erat. Untuk itu dengan tumbuhnya IKM sudah tentu akan dapat mendukung perekonomian daerah. Adapun data pertumbuhan industri di provinsi NTB dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 111 Pertumbuhan Industri Provinsi NTB tahun 2020 – 2024

Tahun	Jumlah IKM	Jumlah Tenaga Kerja
2020	96.300	321.132
2021	102.983	341.428
2022	110.664	363.754
2023	120.592	388.256
2024	123.006	391.423

Sumber : Dinas Perindustrian Provinsi NTB, tahun 2024

Pertumbuhan IKM di NTB selama periode 2020–2024 menunjukkan bahwa sektor ini memiliki dinamika yang adaptif dan resilien, termasuk dalam menghadapi tantangan

pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19. Kenaikan jumlah IKM dan tenaga kerja dari tahun ke tahun menandakan adanya ekosistem usaha yang mulai berkembang, baik melalui inisiatif masyarakat, dukungan kebijakan, maupun fasilitasi pembiayaan dan pemasaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Namun demikian, meskipun tren pertumbuhan terlihat positif, peningkatan jumlah IKM pada tahun 2024 tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya, yakni hanya bertambah sekitar 2% dibandingkan tahun 2023. Hal ini dapat menjadi indikator perlunya intervensi yang lebih strategis untuk mendorong transformasi IKM ke arah yang lebih produktif, inovatif, dan berdaya saing, terutama melalui digitalisasi, standarisasi mutu produk, serta penguatan akses ke pasar ekspor.

Dari sisi ketenagakerjaan, pertumbuhan jumlah tenaga kerja yang cenderung linear dengan pertumbuhan IKM mengindikasikan bahwa sektor ini tetap menjadi tulang punggung penting dalam penciptaan lapangan kerja informal dan semi-formal di NTB. Ke depan, penguatan kapasitas SDM IKM dan dukungan terhadap wirausaha baru perlu menjadi bagian penting dari strategi pembangunan ekonomi lokal.

8. Transmigrasi

Transmigrasi bertujuan untuk memfasilitasi perpindahan penduduk/transmigran untuk dapat hidup secara berkualitas dan sejahtera dengan memanfaatkan sumberdaya alam secara berkesinambungan di wilayah potensial melalui penyediaan areal permukiman yang layak untuk dihuni, layak untuk diusahakan, dan layak untuk dikembangkan secara lestari.

Jumlah alokasi transmigran yang ditempatkan di dalam Provinsi NTB maupun yang diarahkan keluar provinsi relatif berkurang. Transmigran yang masih dibina berada di UPT Sori Panihi SP.6 di Kabupaten Bima sejak tahun 2013 dengan jumlah 300 KK (1.218 jiwa), UPT Brang lamar Kabupaten Sumbawa 100 KK (422 jiwa), dan UPT Tongo II SP 2 Kabupaten Sumbawa Barat 225 KK (1.096 jiwa). Sedangkan jumlah transmigran asal Provinsi NTB yang mengikuti program transmigrasi keluar provinsi dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 112 Perkembangan Transmigran Keluar Provinsi NTB dan Tujuan Daerah Tahun 2019 – 2024

No	Jumlah	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	KK	10	0	0	7	Nihil	Nihil
2.	Jiwa	39	0	0	27	Nihil	Nihil
3.	Daerah Tujuan	Sulawesi Tenggara 10 KK (39 Jiwa)	0	0	Sulawesi Tenggara 17 KK	Nihil	Nihil

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, 2025

Dari tabel diatas perkembangan transmigrasi di Provinsi NTB Berdasarkan data tahun 2019, Provinsi NTB telah mengirim 10 KK atau 39 jiwa ke Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada bulan Juli 2022, Disnakertrans NTB melepas 7 KK atau 28 jiwa ke Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemberangkatan transmigran tahun 2022 ini seharusnya dilaksanakan sejak tahun 2021, namun tertunda akibat pandemi covid-19. Pada tahun 2023 dan tahun 2024 tidak ada pengiriman transmigran ke luar Provinsi NTB.

2.4.4.4 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Bidang Perencanaan merupakan salah satu unsur penunjang yang melaksanakan fungsi-fungsi yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan di daerah. Sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 260 bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan Daerah yang dimaksud dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 263, bahwa Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas: (1). RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun; (2) RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun; dan (3) RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.

Sebagai bagian dari upaya evaluasi kinerja perencanaan daerah, capaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Pemerintah Provinsi NTB menjadi salah satu indikator penting untuk menilai sejauh mana kualitas, sinergitas, dan keterhubungan dokumen perencanaan telah sesuai dengan standar nasional. Berdasarkan data tahun 2023 dan 2024, hasil pengukuran IPPN dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2. 113 Capaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Pemerintah Provinsi NTB pada tahun 2023 dan 2024

No.	Indikator / Komponen	Satuan	Bobot Maksimal	Tahun	
				2023	2024
1	**Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Pemerintah Daerah**	**Indeks**	**100**	**87,83**	**91,47**
a	Sinergitas	Nilai	32,01	25,11	26,34
b	Kualitas	Nilai	58	53,01	55,42
c	Keterhubungan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	10	9,71	9,71

Sumber: BAPPEDA Provinsi NTB, Data olahan 2024

Kinerja perencanaan pembangunan Pemerintah Provinsi NTB (NTB) yang diukur melalui Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) menunjukkan tren peningkatan positif. Nilai IPPN meningkat dari 87,83 pada tahun 2023 menjadi 91,47 pada tahun 2024, mendekati bobot maksimal 100. Pencapaian ini mencerminkan semakin baiknya kualitas penyusunan dokumen perencanaan daerah yang selaras dengan standar nasional dan mampu menjawab isu-isu strategis pembangunan.

Secara rinci, komponen sinergitas yang menilai keselarasan perencanaan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional dan antarlevel pemerintahan, meningkat dari 25,11 pada 2023 menjadi 26,34 pada 2024, mendekati bobot maksimal 32,01. Hal ini menunjukkan perbaikan koordinasi lintas sektor dan penguatan hubungan perencanaan daerah dengan agenda pembangunan nasional. Komponen kualitas, yang memiliki bobot terbesar yakni 58, juga mengalami peningkatan dari 53,01 pada 2023 menjadi 55,42 pada 2024, menandakan perbaikan substansi, metodologi, dan ketepatan sasaran dokumen perencanaan. Sementara itu, komponen keterhubungan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan kinerja perangkat daerah stabil pada 9,71 dari bobot maksimal 10, mengindikasikan bahwa integrasi antara dokumen perencanaan makro dan rencana kinerja perangkat daerah telah terjaga dengan baik.

Peningkatan nilai IPPN NTB dari 2023 ke 2024 menunjukkan bahwa kualitas dan sinergi perencanaan pembangunan daerah semakin matang dan efektif, menjadi landasan penting dalam penyusunan RPJMD 2025–2029. Ke depan, diperlukan langkah strategis untuk mempertahankan bahkan melampaui capaian tersebut, melalui penguatan inovasi perencanaan, peningkatan kualitas data statistik sektoral, dan optimalisasi keterlibatan pemangku kepentingan agar perencanaan pembangunan daerah semakin adaptif dan berkelanjutan.

Tabel 2. 114 Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2024

No	Sasaran	Indikator	Realisasi 2023	Realisasi 2024
1	Meningkatnya Efektivitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti	70%	75%
2	Meningkatnya Peran Koordinatif Bappeda dalam rangka pencapaian target-target program daerah	Persentase target Tahunan Indikator Kinerja Utama pada RKPD yang tercapai	70%	61,46%
		Perkembangan jumlah mitra pembangunan	143 Unit	153 Unit

Sumber: BAPPEDA Provinsi NTB, Data olahan 2024

Tahun 2024 target tahunan indikator kinerja utama pada RKPD adalah 70% dengan capaian 61,46% belum mencapai target dikarenakan terdapat nilai dari beberapa indikator yang ada di RKPD belum dirilis oleh kementerian terkait maupun BPS sehinga

mempengaruhi capaian Indikator. Capaian ini juga didukung oleh optimalisasi pelaksanaan program unggulan daerah dan optimalisasi peran Lembaga Mitra (NGO) serta dukungan dari program kegiatan yang bersumber dari dana APBN untuk mendukung pembangunan di NTB

2. Keuangan

Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Bidang Keuangan diselenggarakan oleh 2 Perangkat Daerah. yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA). Adapun capaian dari penyelenggaraan urusan dari kedua Perangkat Daerah tersebut dapat dirincikan sebagai berikut.

a. Capaian indikator kinerja yang telah dilakukan oleh BPKAD Provinsi NTB sebagai berikut

Berdasarkan Indikator Sasaran RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB melaksanakan urusan keuangan sesuai dengan tugas dan fungsi mencapai indikator kinerja tersebut yang mempertahakan Opini WTP dari BPK RI. Salah Satu Wujud Tata Kelola Organisasi yang dilakukan oleh BPKAD Provinsi NTB adalah Menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Akuntabel dan Transparan guna mempertahankan Opini WTP dari BPK RI.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah Opini Audit yang diterbitkan jika Laporan Keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika Laporan Keuangan diberikan opini artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum dengan baik, kalaupun ada kesalahan dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pembalikan keputusan. Di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 telah memenuhi kriteria:

a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
b. Kecukupan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan;
c. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan;
d. Efektifitas Sistem Pengendalian Intern, yaitu meliputi Keberadaan Aset, Kelengkapan Bukti dan Nilai Aset.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemerintah Provinsi NTB berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima tahun terakhir sejak tahun 2020 hingga tahun 2024. Provinsi NTB memperoleh predikat tertinggi dalam akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Capaian ini menunjukkan bahwa tata kelola keuangan daerah Provinsi NTB telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintahan berbasis akrual, mematuhi standar akuntansi pemerintahan (SAP), serta memperhatikan kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Konsistensi pencapaian opini WTP tersebut bukan hanya mencerminkan meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, melainkan juga menjadi indikator penting meningkatnya kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini sekaligus mendukung pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta memberikan landasan kuat bagi pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Tabel 2. 115 Opini BPK RI Tahun 2020-2024

TAHUN	OPINI
2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2021	Wajar Tanpa Pengeculian (WTP)
2022	Wajar Tanpa Pengeculian (WTP)
2023	Wajar Tanpa Pengeculian (WTP)
2024	Wajar Tanpa Pengeculian (WTP)

Sumber : BPKAD Provinsi NTB, 2024

b. Capaian indikator kinerja yang telah dilakukan oleh Bappenda Provinsi NTB dideskripsikan berikut ini.

Keberhasilan penyelenggaraan Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Keuangan yang ditangani oleh BAPPENDA Provinsi NTB diukur melalui 1 indikator kinerja, yaitu: Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam menetapkan target PAD, Pemerintah Provinsi NTB senantiasa memperhatikan estimasi dasar, peningkatan cakupan, pertumbuhan penduduk, kenaikan pendapatan riil per kapita, inflasi, perubahan tarif, pembangunan baru dan perubahan peraturan. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: 1) Pendapatan Pajak Daerah, 2) Hasil Retribusi Daerah, 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Pada tahun 2023, realisasi PAD sebesar Rp 2.790.069.455.407,- dan Pendapatan Daerah Rp5.798.011.398.325,-, sehingga kontribusi PAD terhadap APBD (Pendapatan Daerah) adalah 48,12%. Adapun pada tahun 2024, realisasi PAD sebesar Rp 3.3294.373.420.660 dan Pendapatan Daerah Rp 6.621.561.189.046, sehingga kontribusi PAD terhadap APBD meningkat 1,63 poin menjadi 49,75 %. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, capaian (perbandingan antara realisasi dengan target) kontribusi PAD terhadap APBD fluktuatif. Pada tahun 2020 sebesar 91,73%, menurun menjadi 83,62% di tahun 2021, kemudian kembali meningkat sedikit menjadi 83,69% di tahun 2022, kemudian kembali meningkat menjadi 90,91% di tahun 2023 dan pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi 99,65%.

Tabel 2. 116 Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD Tahun 2020-2024

Indikator Bidang Urusan	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD (%)	36,62	35,09	39,34	35,45	48,36	43,23	48,69	48,12	49,14	49,75

Sumber : BAPPENDA Provinsi NTB, 2024, Keterangan : T=Target, R=Realisasi

Grafik 2. 111 Capaian Kontribusi PAD terhadap APBD Tahun 2020-2024

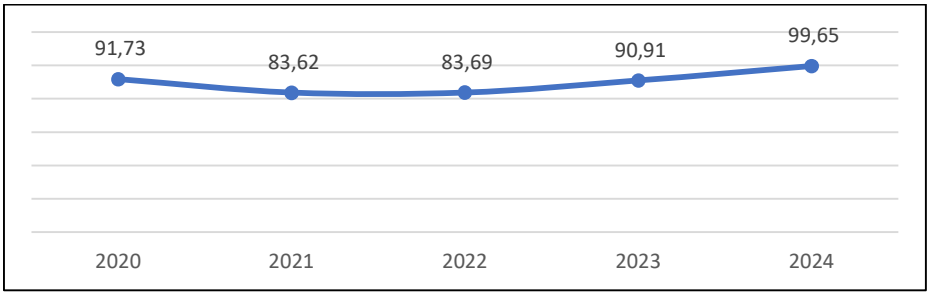

Sumber : BAPPENDA Provinsi NTB, 2024

Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi NTB menunjukkan peningkatan tiap tahunnya, namun belum signifikan. Rata-rata capaian Indeks Kapasitas Fiskal Provinsi NTB berada pada kategori "Rendah". Rentang KFD baik Provinsi maupun Kab/Kota yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan berubah setiap tahunnya. Perkembangan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi NTB selama tahun 2020 sampai dengan 2024 berfluktuatif. Pada tahun 2020 sampai 2021 nilai IKFD NTB rata-rata 0,363 (kategori Rendah). Kemudian di tahun 2022 sampai dengan 2024, rata-rata sebesar 1,360 atau kategori "Rendah". Pola pengukuran IKFD tahun 2019-2021 berbeda dengan tahun 2022-2024, dimana pada tahun 2022-2024 perhitungan RKFD (Rasio Kapasitas Fiskal Daerah) telah memasukkan variabel Pembiayaan, sedangkan 2020-2021 tidak memasukkan Pembiayaan sebagai variabel pengukuran indikator. Capaian IKFD/RKFD yang dihitung dipengaruhi oleh jumlah perolehan PAD yang harus mengimbangi dana transfer namun tidak termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) karena dana yang bersumber dari APBN ini lebih difokuskan untuk mendanai kegiatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi NTB berupaya sekuat tenaga memacu pertumbuhan PAD, paling tidak dapat mendekati atau sedikit lebih tinggi dari dana transfer dan mengurangi belanja pegawai untuk bisa mencapai kategori sedang. Capaian Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2020-2024 disajikan pada grafik berikut:

Grafik 2. 112 Perkembangan Indeks Kapasitas Fiskal Provinsi NTB Tahun 2020-2024

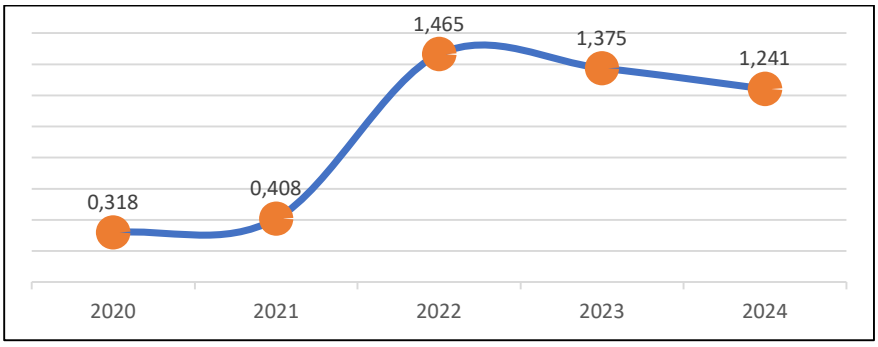

Sumber: Kementerian Keuangan RI, 2024

Dalam grafik diatas menunjukkan bahwa IKFD/RKFD Provinsi NTB mengalami fluktuasi setiap tahun berdasarkan perhitungan Kementerian Keuangan RI. Hal ini dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah, transfer ke daerah, pendapatan transfer antar daerah, lain-lain pendapatan daerah yang sah, sisa lebih perhitungan anggaran, belanja pegawai, belanja bagi hasil, belanja bunga serta pembiayaan utang daerah. Faktor pembentuk IKFD inilah yang mempengaruhi perbedaan rentang IKFD setiap tahunnya untuk seluruh provinsi di Indonesia. Berikut adalah rentang KF:

Tabel 2. 117 Rentang dan Kategori Indeks Kapasitas Fiskal Daerah

Rentang Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD)	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
RKFD < 1,119	Sangat rendah
1,119 ≤ RKFD < 1,656	Rendah
1,656 ≤ RKFD < 2,193	Sedang
2,193 ≤ RKFD < 2,730	Tinggi
2,730 ≤ RKFD	Sangat tinggi

Sumber: PMK RI Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah

Kemandirian fiskal daerah juga menjadi perhatian khusus pemerintah pusat, karena masih banyak ruang untuk melakukan optimalisasi penerimaan, terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah.

3. Kepegawaian

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB. Sebelumnya urusan bidang kepegawaian ini dilaksanakan oleh BKD dan DIKLAT Provinsi NTB. Namun sesuai amanat Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB. Urusan bidang kepegawaian daerah diselenggarakan oleh BKD selama kurun waktu 2020-2024 dilaksanakan melalui Program:

a. Peningkatan Kualitas Kelembagaan;
b. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

Konsistensi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB dalam melakukan pemetaan kompetensi dan pemetaan komposisi ASN berdasarkan kualifikasi jabatan yang diembannya mendapat apresiasi dari Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia. Hal ini ditandai dengan diperolehnya penghargaan sebagai “Terbaik V Implementasi Assesment Center Pemerintah Provinsi Tahun 2016”. Dengan adanya penghargaan ini. maka BKD semakin terdorong untuk terus meningkatkan / pengembangan manajemen kepegawaian yang lebih baik dan profesional.

BKD Provinsi NTB selaku Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan khususnya di bidang kepegawaian terus mengembangkan inovasi-inovasi seperti penyampaian informasi melalui website http://bkd.ntbprov.go.id yang dapat diakses

oleh siapa pun. kapan pun. dimana pun; pemutakhiran data melalui aplikasi SIMPEG. dan yang terbaru adalah aplikasi SIMADU (Sistem Management ASN Terpadu). dimana sistem ini merupakan sistem aplikasi yang memudahkan user. operator bahkan ASN itu sendiri. untuk secara mandiri memanfaatkan. mengolah. dan up date data kepegawaian sehingga mampu terdokumentasi dengan baik dalam rangka pembinaan. penempatan dan pengembangan karier ASN. Lebih lanjut secara bersamaan juga dikembangkan sistem aplikasi SIMATA (Sistem Manajemen Penataan ASN) yang merupakan sistem aplikasi yang memudahkan user (Pejabat Pembina Kepegawaian) dalam rangka melihat/mengamati secara lebih detail data. talenta dan rekam jejak seorang ASN untuk pengembangan karier sesuai dengan kompetensinya masing-masing.

Adapun terkait dengan profesionalisme ASN Provinsi NTB yang mencakup kualifikasi pendidikan, tingkat kompetensi, kinerja dan disiplin hingga tahun 2024 baru mencapai 0.78 point, masuk dalam kategori sedang. Angka ini mencerminkan bahwa ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB telah memiliki tingkat profesionalisme yang cukup baik dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Namun, untuk menuju tingkat profesionalisme yang lebih optimal, dibutuhkan penguatan sistemik dalam pengelolaan manajemen ASN secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap indikator-indikator penerapan sistem merit yang merujuk pada perjanjian kinerja perangkat daerah, diperoleh total skor sebesar 264,5 poin. Nilai ini menunjukkan bahwa secara umum, penerapan prinsip-prinsip meritokrasi dalam manajemen ASN di Provinsi NTB masih berada pada kategori awal atau belum optimal.

Tabel 2. 118 Capaian Indeks Profesionalisme ASN Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
Indikator Kinerja Daerah							
1	Indeks Profesionalisme ASN	Persen	59	68,5	63	77,64	78,43
Indikator Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah							
1	Perencanaan Kebutuhan	Poin	35.00.00	37.05.00	37.05.00	37.05.00	37.05.00
2	Pengadaan	Poin	40	40	40	40	40
3	Pengembangan Karir	Poin	37.05.00	37.05.00	52.05.00	60	52.05.00
4	Promosi dan Mutasi	Poin	25	25	22.05	17.05	10
5	Manajemen Kinerja	Poin	75	75	65	62.05.00	62.05.00
6	Perlindungan dan Pelayanan	Poin	14	14	16	16	16
7	Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	Poin	37.05.00	37.05.00	37.05.00	35	30
8	Sistem Informasi	Poin	15	15	16	16	16
TOTAL NILAI PENERAPAN SISTEM MERIT		**Poin**	**279.00.00**	**281.05.00**	**287.00.00**	**284.05.00**	**264.05.00**

Sumber: Badan Kepegawaian Daeran Provinsi NTB, 2025

Berdasarkan data yang disajikan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB (NTB), terdapat dinamika yang menarik dalam pencapaian Indeks Profesionalisme (IP) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penerapan Sistem Merit selama periode 2020 hingga 2024. Secara garis besar, IP ASN menunjukkan tren positif yang signifikan, meskipun di sisi lain, total nilai penerapan sistem merit mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir.

Indikator utama, yaitu Indeks Profesionalisme ASN, secara konsisten menunjukkan pertumbuhan yang meyakinkan selama lima tahun terakhir. Angkanya meningkat dari 59,00 pada tahun 2020 menjadi 78,43 pada tahun 2024. Meskipun terjadi sedikit koreksi pada tahun 2022, indeks ini berhasil pulih dan terus menanjak, mengindikasikan adanya perbaikan berkelanjutan dalam kualitas, kompetensi, kinerja, dan disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB secara keseluruhan. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan program-program pembinaan dan pengembangan aparatur yang telah dijalankan.

Di balik tren positif IP ASN, data penerapan Sistem Merit menunjukkan gambaran yang lebih kompleks. Total nilai yang menjadi cerminan implementasi 8 indikator utama justru mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir, dari puncaknya di angka 287,0 pada tahun 2022 menjadi 264,5 pada tahun 2024.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pendidikan dan Pelatihan diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi NTB. Secara kelembagaan, sesuai amanat Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB. BPSDMD Provinsi NTB selaku unit kerja yang menyelenggarakan kegiatan Bidang Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 69 yang mengamanatkan bahwa pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah. Kompetensi ASN meliputi Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural yang ditingkatkan melalui salah satunya dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang merupakan hak dan kesempatan untuk mengembangkan karir.

BPSDMD Provinsi NTB dalam melaksanakan urusan serta tugas dan fungsinya, difokuskan pada Dimensi Kompetensi. Dimensi kompetensi merupakan salah satu dari empat komponen yang digunakan untuk mengukur nilai Indeks Profesionalisme ASN. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Dimensi kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan yang

pernah diikuti oleh Aparat Sipil Negara dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan. Dimensi Kompetensi diperhitungkan sebesar 40 persen dari keseluruhan pengukuran Indeks Profesionalisme ASN dengan jenis diklat kompetensi yaitu diklat kompetensi manajerial, diklat kompetensi fungsional, dan diklat kompetensi teknis.

Capaian Indikator perjanjian kinerja perangkat daerah BPSDM Daerah Provinsi NTB tahun 2023 dapat dijelaskan hal sebagai berikut yaitu Indikator rata – rata ASN yang memiliki kompetensi tahun 2023 dari target 0.28 point atau 28 % terealisasi capaian sebesar 0.26 point atau 26.22 % dengan tingkat capaian sebesar 92.85 persen. Capaian 92.85 persen untuk capaian rata-rata ASN yang memiliki kompetensi dapat dikatakan berpredikat baik karena hampir memenuhi target yang ditetapkan. Sedangkan jika dilihat dari target dan capaian IPA Dimensi Kompetensi yang ditentukan oleh Pemerintah Provinsi NTB secara nasional yaitu di angka 0.28 point atau 28 persen, dapat dikatakan IPA dimensi kompetensi NTB masih rendah.

Jadi berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2023 Persentase ASN yang Tersertifikasi Kompetensi dari target 0.021 persen terealisasi sebesar 0.002 persen dengan tingkat capaian 9.10 persen. Kinerja 9.10 persen ini untuk uji sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan untuk ASN Pemerintah Provinsi NTB dikatakan masih rendah. Capaian 0,002 persen hanya mencakup kewenangan BPSDMD Provinsi NTB untuk melakukan sertifikasi kompetensi hanya pada fungsional dibawah Kemendagri RI yaitu pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pengawas penyelenggaan urusan pemerintahan di daerah (P2UPD) pada Inspektorat Provinsi NTB, dan selebihnya hanya bersifat fasilitasi saja. Kegiatan fasilitasi sertifikasi kompetensi yang dilakukan oleh BPSDMD Provinsi NTB kepada perangkat daerah lainnya selain Satpol PP dan Inspektorat, datanya belum tertata dengan baik. Kedepan, data terkait kegiatan fasilitasi dan koordinasi terkait sertifikasi kompetensi dengan perangkat daerah perlu dikelola dengan baik sehingga dapat meningkatkan capaian kinerja BPSDMD Provinsi NTB untuk indicator persentase ASN yang tersertifikasi kompetensi.

5. Penelitian dan Pengembangan

Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai amanat Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB. Namun sejak awal tahun 2022, urusan penelitian dan pengembangan menjadi bagian dari tugas dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Provinsi NTB. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur NTB Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-badan Daerah Provinsi NTB. Regulasi ini telah dilakukan beberapa penyesuaian terkini dalam Peraturan Gubernur NTB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi NTB menjadi dasar pembagian peran, tugas dan fungsi Brida Provinsi NTB.

Capaian kinerja pembangunan daerah urusan penunjang penelitian dan pengembangan dalam RPJMD Provinsi NTB 2020-2023 diukur dengan indikator kinerja persentase pemanfaatan hasil penelitian (lokus NTB), sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 119 Persentase capaian pemanfaatan hasil kelitbangan (lokus NTB) Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (lokus NTB)	%	0	0	34,78	34,78	34,78	34,78	37,14	37,14	55,56	55,56

Sumber: Brida Provinsi NTB, 2023

Tercapainya target tersebut tidak terlepas dari upaya yang dilakukan Brida Provinsi NTB untuk menerapkan Research-Based Policy, dimana hasil kajian penelitian dan pengembangan digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan daerah. Penyusunan daftar kajian untuk penelitian dan pengembangan yang akan dilaksanakan, Brida Provinsi NTB berkoordinasi dengan Bappeda Provinsi NTB, Perangkat Daerah, Lembaga Riset, Perguruan Tinggi, dan Mitra Pembangunan Daerah lainnya untuk menggali permasalahan dan isu strategis daerah yang memerlukan kajian, penelitian dan pengembangan. Bersama dengan Dewan Riset Daerah, Brida Provinsi NTB membangun kolaborasi dan penguatan kelembagaaan menumbuhkan ekosistem dan budaya meneliti di Provinsi NTB.

2.4.4.5 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Unsur pendukung merupakan salah satu fungsi penunjang yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi pemerintahan, organisasi dan administrasi umum serta fungsi pendukung lainnya yang dilaksanakan oleh sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dan Pengubung Daerah. Selama kurun waktu sampai dengan tahun 2022, beberapa capaian kinerja dari unsur pendukung pemerintahan antara lain pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pada tahun 2022 Target nilai SAKIP kategori BB atau skor (73,01-76,00) capaian nilai pada tahun 2021 adalah B tingkat capaian 87,24 persen. Capaian nilai sementara pada tahun 2022 adalah BB dengan tingkat capaian 75,00.

Dalam Keberhasilan Indek Reformasi Birokrasi adalah indikator yang merupakan aspek daya saing daerah mengambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Indeks Reformasi Birokrasi sendiri adalah skor pengukuran capaian reformasi birokrasi

dengan sekitar 132 komponen, mulai dari manajemen perubahan di lingkungan organisasi, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga nilai persepsi korupsi yang melibatkan survei eksternal dengan capaian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 120 Capaian Indek Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Tahun 2021-2024

Indikator	Satuan	2021		2022		2023		2024	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Indek Reformasi Birokrasi	%	B	100	B	100	BB	100	BB	100

Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi NTB, 2025

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi sesuai dengan hasil rilis Laporan Hasil Evaluasi dari Kementerian RB Tahun 2021 dan tahun 2021 mencapai B sesuai target, pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan dari target B hasil capaian BB, dan pada tahun 2023 hasil capaian BB sesuai target, ini diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien, bersih dari KKN, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, reformasi birokrasi adalah instrumen hulu untuk menyelesaikan berbagai problem masyarakat, yang dimaknai bukan sekedar persoalan administrasi belaka, tetapi harus membawa dampak pada tingkat kesejahteraan dan kepuasan masyarakat.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi NTB meraih predikat B tahun 2021, melalui peran Biro Organisasi yang telah melakukan upaya peningkatan kualitas pada tahun 2024, nilai hasil evaluasi menunjukkan peningkatan mendapat predikat penilaian BB, dengan rincian komponen: Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; Evaluasi Kinerja.

Tabel 2. 121 Capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Provinsi Tahun 2021-2024

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	2021		2022		2023		2024	
		BOBOT	NILAI	BOBOT	NILAI	BOBOT	NILAI	BOBOT	NILAI
a	Perencanaan Kinerja	30	24,69	30	25,2	30	25,41	30	25,41
b	Pengukuran Kinerja	25	17,67	30	21,64	30	21,9	30	21,9
c	Pelaporan Kinerja	15	11,67	15	11,4	15	11,54	15	11,24
d	Evaluasi Internal	10	6,62	25	14,53	25	14,63	25	14,95
e	Capaian Kinerja	20	9,94	-	-	-	-	-	-
	Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**70,59**	**100**	**72,77**	**100**	**73,48**	**100**	**72,88**
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**BB**		**BB**		**BB**		**BB**

Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi NTB, 2025

Selama kurun waktu 2020-2024, Biro Hukum Setda Provinsi NTB telah menghasilkan produk hukum sebagai indikator kinerja yang dapat diukur, yakni pada tahun 2020 jumlah Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur sebanyak 1.040, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 sebanyak 900, namun pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi sebesar 1.051, dan pada tahun 2023 turun menjadi 954 produk hukum. Adapun produk hukum yang telah difasilitasi dan dievaluasi produk hukum dari Kab/Kota se-NTB sebanyak 344 produk hukum sampai dengan tahun tahun 2024. Data Perda/Perbup/Perwal yang Dikaji selama tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 122 Jumlah Produk hukum yang dihasilkan Tahun 2020 – 2024

NO.	PRODUK HUKUM	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Peraturan Daerah	Perda	11	16	9	4	10
2.	Peraturan Gubernur	Perkada	88	56	114	104	49
3.	Keputusan Gubernur	Keputusan Gubernur	941	828	928	846	808
Jumlah			**1.040**	**900**	**1.051**	**954**	**867**

Sumber: Biro Hukum Setda NTB, 2025

Tabel 2. 123 Jumlah Perda/Perbup/Perwal yang Difasilitasi dan Dievaluasi Pada Tahun 2023-2024

NO	Kab. / Kota	Difasilitasi						Dievaluasi					
		Raperda/ Perda		Raperbub/ Perbup		Raperwal/ Perwal		Raperda/ Perda		Raperbub/ Perbup		Raperwal/ Perwal	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	Kota Mataram	10	3	-	-	3	-	4	3	-	-	3	3
2	Lombok Barat	26	1	6	-	-	-	4	3	6	3	-	-
3	Lombok Tengah	5	6	21	10	-	-	4	18	5	4	-	-
4	Lombok Timur	9	-	44	59	-	-	3	4	3	8	-	-
5	Lombok Utara	7	8	4	-	-	-	3	3	3	3	-	-
6	Sumbawa Barat	12	6	41	21	-	-	4	4	4	9	-	-
7	Sumbawa	10	5	22	8	-	-	4	4	3	3	-	-
8	Dompu	10	-	23	31	-	-	4	4	3	5	-	-
9	Kota Bima	7	-	-	-	3	16	4	4	-	-	3	3
10	Bima	5	3	3	-	-	-	3	4	3	7	-	-
Jumlah		**101**	**32**	**164**	**129**	**6**	**16**	**37**	**51**	**37**	**42**	**6**	**6**

Sumber: Biro Hukum Setda NTB, 2025

Tabel 2. 124 Penyelesaian Sengketa Hukum (Perkara) Provinsi NTB Tahun 2024

No	No. Gugatan	Penggugat/Pembanding	Tergugat/ terbanding	Obyek Sengketa	Putusan pengadilan			Lokasi	Tahapan kasus
					PN/PTUN No. Putusan	PT No. PTS	MA No PTS		
1.	Perkara Perdata No. 1/PDT.G/2024/PN.Mtr	Maritha Caroline (Penggugat)	Pemerintah Provinsi NTB (Tergugat 1)	Perkara Gugatan Perdata, Wanprestasi	-	-	-	Gili Trawangan	Putus Inkracht di PN Mataram
2.	Perkara Perdata No. 101/PDT.G/2024/PN.Mtr	Lalu Reby Hasbullah (Penggugat)	H. Basaruddin (Tergugat 1) Pemerintah Provinsi NTB (Tergugat 2)	Perkara Gugatan Perdata, Wanprestasi	-	-	-	Gili Trawangan	Putus Banding PT.
3.	Perkara Perdata No. 88/PDT.G/2024/PN.Mtr	Lalu Reby Hasbullah (Penggugat)	H. Basaruddin (Tergugat 1) Pemerintah Provinsi NTB (Tergugat 2)	Perkara Gugatan Perdata, Wanprestasi	-	-	-	Gili Trawangan	dicabut

No	No. Gugatan	Penggugat/Pembanding	Tergugat/ terbanding	Obyek Sengketa	Putusan pengadilan			Lokasi	Tahapan kasus
					PN/PTUN No. Putusan	PT No. PTS	MA No PTS		
4.	Perkara Perdata No. 161/PDT.G/2024/PN.Mtr	Ketut Ciriadi (Penggugat)	PT. Sincere Wonderful Future (Tergugat 1) Pemerintah Provinsi NTB (Tergugat 2)	Perkara Gugatan Perdata, Wanprestasi	-	-	-	Gili Trawangan	sidang Tambahan Alat Bukti
5.	Perkara Perdata No. 56/PDT.G/2024/PN.Pya	I Gusti Putu Arnawa (Penggugat)	T1. PT. ITDC, T2. Gubernur NTB, T3. Hotel Pullman Lombok Mandalika Beach Resort, T4. Kantor Pertanahan Kab. Lombok Tengah	terkait dengan permasalahan lahan di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah (lahan PT. ITDC)				Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah (lahan PT. ITDC)	Pemeriksaan Bukti surat Para Tergugat
6.	Perkara Perdata No. 35PDT.G/2024/PN.Rbi	ASIKIN (Penggugat)	T1. Sukaina Binti M. Jafar Bin Hasan, T2. H.M Nur, T3. Sukardi, T4. Siti Andi, T5. Drs. Junaidi, S.Pd, T6. Juniarti Aisyah, T7. Pemerintah Provinsi NTB, T8. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bima	terkait dengan tanah seluas 7 are di Sape bangunan resort pengelolaan hutan sape	-	-	-	Kec. Sape, Kab. Bima, NTB	Cabut
7	Perkara Perdata No. 67/PDT.G/2024/PN.Sbw	H. MAKSUD	T1. GUBERNUR NTB, T2. Bappenda, T3. Bupati kab. Sumbawa, T4. Kantor Samsat Sumbawa, TT. BPN Sumbawa	terkait dengan permasalahan lahan Kantor Samsat Sumbawa Besar yang di klaim oleh H. Maksud di Pengadilan Negeri Sumbawa				Sumbawa Besar	Mediasi
8	Perkara Perdata No. 295/PDT.G/2024/PN.Mtr	IDA MADE ARKA (Penggugat)	T1. GUBERNUR NTB		-	-	-	terletak di Prabu	Sidang Pembacaan

No	No. Gugatan	Penggugat/Pembanding	Tergugat/ terbanding	Obyek Sengketa	Putusan pengadilan			Lokasi	Tahapan kasus
					PN/PTUN No. Putusan	PT No. PTS	MA No PTS		
			T2. DIREKTUR RSU DAERAH NTB	terkait tanah di RSUP NTB				Rangkasari, Kel. Dasan Cermen, Kec. Sandubaya, Kota Mataram, NTB.	Gugatan setelah Mediasi
9	Perkara Perdata No. 51/PDT.G/2024/PN.Sbw	H. MAKSUD (Penggugat)	T1. GUBERNUR NTB, T2. Bappenda, T3. Bupati kab. Sumbawa, T4. Kantor Samsat Sumbawa, TT. BPN Sumbawa NTB	terkait dengan permasalahan lahan Kantor Samsat Sumbawa Besar yang di klaim oleh H. Maksud di Pengadilan Negeri Sumbawa	-	-	-	Sumbawa Besar	Cabut
10	Perkara Perdata No. 356/PDT.G/2024/PN.Mtr	LALU ZULKIFLI (Penggugat)	Pemerintah Provinsi NTB (Tergugat)	terkait wanprestasi PT. Lombok Plaza	-	-	-	PT. Lombok Plaza yang berkedudukan di jalan Bung Karno, Lingkungan Karang Tapen, Kel. Cilinaya, Kec. Cakra, Kota Mataram, NTB.	Sidang Pertama

Sumber: Biro Hukum Setda Provinsi NTB, 2025

Penanganan penyelesaian sengketa hukum pada tahun 2023 yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga permasalahan hukum/perkara hukum dapat diselesaikan sebanyak 11 perkara dengan rincian perkara yang dimenangkan ditingkat Pertama 3 perkara, tidak terlibat 1 Perkara, cabut gugatan 1 perkara, dan 5 perkara masih dalam proses.

Penyelesaian Permasalahan Non Litigasi dilakukan dalam rangka menyelesaikan permalahan diluar pengadilan dalam bentuk mediasi. Sub kegiatan fasilitasi bantuan hukum merupakan pendukung program Fasilitasi dan koordinasi Hukum, sebagaimana tercantum dalam tabel :

Tabel 2. 125 Penyelesaian Sengketa Hukum (Perkara) Non Litigasi Provinsi NTB Tahun 2024

No.	Dasar	Pihak Yang Keberatan	Objek Sengketa	Lokasi	Uraian Kasus	Tahapan Kasus
1	Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia	Persatuan anggota badan permusyawaratan desa seluruh Indonesia	Lahan seluas 3,50 Ha	Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Lombok Tengah	Tanggal 19 Oktober 2022, persatuan anggota badan permusyawaratan desa seluruh Indonesia bersurat kepada pemprov NTB terkait permohonan audiensi permasalahan antara pemkab. Lombok tengah dengan PT. Tisno Kenanga atas kepemilikan lahan di desa lantan Biro hukum telah melakukan mediasi dengan memanngil para pihak untuk dimintai keterangan	Mediasi masih berlanjut
2	Ibu Laela	Ibu Laela	hotel di Gili Tramena	Gili Tramena	Ganti rugi pembangunan hotel di Gili Tramena	Mediasi masih berlanjut
3	Samsul Qomar dkk	Samsul Qomar	Tanah di sekitar kawasan KEK Mandalika	Kawasan KEK Mandalika , Lombok Tengah	Samsul Qomar bersurat kepada Pemprov. NTB dan ITDC terkait permasalahan ganti rugi atas lahan yang diklaim masyarakat di sekitar kawasan KEK Mandalika Tanggal 17 November 2022 2022 dilakukan pertemuan masyarakat yang diwakili Samsul Qomar di Ruang Kerja Gubernur NTB Biro Hukum telah melakukan mediasi dengan memanggil para pihak untuk dimintai keterangan	Mediasi masih berlanjut
4	Asmadi	Asmadi	Lahan mata air ambungdesa rempung kecamatan pringngasela	mata air ambungdesa rempung kecamatan pringngasela	Mohon Agar Bapak Gubernur Menyarankan Bupati Lombok Timur Untuk Melakukan	Mediasi masih berlanjut

No.	Dasar	Pihak Yang Keberatan	Objek Sengketa	Lokasi	Uraian Kasus	Tahapan Kasus
			seluas 2000 meter persegi		Pembayaran Sesuai Dengan Perhitungan Apparaisal, Terkait Ganti Rugi Tanah Lahan Mata Air Ambung Desa Rempung Kec. Pringgesela	
5	Drs. Lalu Suhaenan	Drs. Lalu Suhaenan	Lahan Seluas 522 m2	Jl. Lalu Muchdar Selong	Tanah tidak bisa disertifikat dikarenakan tanah yang dimohonkan untuk sertifikat masih dalam sengketa	Mediasi masih berlanjut

Sumber: Biro Hukum Setda NTB, 2025

2.4.4.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Inspektorat

Inspektorat sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pengawasan merupakan pilar utama selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang memiliki posisi sangat strategis baik dari aspek pelaksanaan fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian Visi dan Misi serta program Pemerintah Daerah sesuai RPJMD. Inspektorat dalam kaitannya dengan pencapaian indikator RPJMD yang merupakan penegak supremasi hukum, pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), dan memantapkan otonomi daerah sekaligus mengawal pelaksanaan program yang ditetapkan dalam APBD sehingga target RPJMD dapat tercapai.

Dalam rangka meminimalkan timbulnya kerugian negara/daerah baik yang bersumber dari dana pusat maupun dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Inspektorat Provinsi NTB telah membentuk Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) bekerjasama dengan Kejaksaan dan Kepolisian untuk mengawal program/kegiatan (proyek) yang ada di perangkat daerah. Pelaksana Unsur Pengawasan urusan Pemerintah Provinsi NTB tahun 2023, capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja perangkat daerah menunjukkan bahwa 7 (tujuh) Indikator Kinerja terlaksana dengan baik dengan capaian kinerja yang memuaskan bahkan telah melampaui dari terget yang direncanakan. Capaian pelaksanaan urusan pengawasan selama tahun 2023-2024 sebagai berikut:

Tabel 2. 126 Capaian Indikator Inspektorat Provinsi NTB Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Bidang Urusan	Tahun 2023	Tahun 2024
			Realisasi	Realisasi
1	Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan	Persentase Penurunan Nilai Kerugian Negara/Daerah	4,61%	6,59%
		Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	84%	89%
		Opini BPK	WTP	WTP
2	Meningkatnya Pengendalian Intern	Tingkat Maturitas SPIP	Level III	Level III
			-3	-3,15
3	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Tingkat Kapabilitas APIP		

No.	Sasaran	Indikator Bidang Urusan	Tahun 2023	Tahun 2024
			Realisasi	Realisasi
			Level III (3,00)	Level III (3,06)
4	Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase Peningkatan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi	-	5%

Sumber : Inspektorat Provinsi NTB, 2025

Secara umum, capaian indikator pada bidang pengawasan, pengendalian intern, dan reformasi birokrasi menunjukkan tren positif yang memperkuat tata kelola pemerintahan di Provinsi NTB. Pertama, kualitas hasil pengawasan mengalami peningkatan. Persentase penurunan nilai kerugian negara/daerah meningkat dari 4,61% pada 2023 menjadi 6,59% pada 2024. Hal ini mengindikasikan semakin efektifnya fungsi pengawasan dalam menekan potensi kerugian negara/daerah. Selain itu, tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan juga mengalami kenaikan dari 84% pada 2023 menjadi 89% pada 2024, yang menunjukkan meningkatnya komitmen perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. Konsistensi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK pada 2023 dan 2024 memperkuat bukti akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Kedua, pengendalian intern masih berada pada Level III. Hasil maturitas SPIP pada 2023 menunjukkan skor 3,00 dan meningkat menjadi 3,15 pada 2024. Capaian ini menandakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah sudah terdokumentasi dan dilaksanakan secara konsisten, namun masih perlu penguatan agar dapat naik ke Level IV dengan karakteristik lebih terukur dan terkelola.

Ketiga, kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga menunjukkan perbaikan. Tingkat kapabilitas APIP meningkat dari Level III (3,00) pada 2023 menjadi Level III (3,06) pada 2024. Peningkatan ini masih tergolong moderat, sehingga ke depan perlu akselerasi penguatan kompetensi auditor dan perluasan peran APIP dalam fungsi assurance dan konsultasi untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif.

Keempat, implementasi reformasi birokrasi mulai menunjukkan kemajuan. Pada 2024, persentase peningkatan hasil evaluasi reformasi birokrasi tercatat 5%, yang menunjukkan adanya komitmen nyata pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola birokrasi sejalan dengan agenda reformasi birokrasi nasional.

2.5 Gambaran Keuangan Daerah

2.5.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Pencapaian kinerja pembangunan daerah tidak terlepas dari berbagai sumber daya yang dimiliki termasuk sumber daya keuangan dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, baik pengelolaan terhadap upaya-upaya optimalisasi target Penerimaan Daerah hingga mobilisasi sumber-sumber yang tersedia untuk percepatan pelaksanaan program prioritas pembangunan melalui Pengeluaran Daerah yang dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Gambaran kondisi keuangan daerah Provinsi NTB tahun 2020-2024 dijabarkan berdasarkan ruang lingkup pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini. Kinerja keuangan masa lalu merupakan gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi tahun-tahun mendatang, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu ukuran utama kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik untuk mendukung pembangunan di daerah. APBD yang mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan, yang semuanya diarahkan untuk mendanai program-program pembangunan dan pelayanan publik, oleh karenanya kinerja pelaksanaan APBD sangat penting untuk menunjukkan seberapa efektif penggunaan anggaran dalam mencapai prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

Secara umum kinerja pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020-2024 menunjukkan peran APBD sebagai stimulus kinerja pembangunan daerah telah berkontribusi dalam mendukung pencapaian target-target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi NTB sesuai yang ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTB Tahun 2020-2024. Kinerja pelaksanaan APBD tahun sebelumnya dapat dilihat dari aspek tingkat realisasi atau penyerapan APBD setiap tahunnya yang dapat diketahui dari kinerja pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Secara umum gambaran kinerja pelaksanaan APBD disajikan berikut ini:

2.5.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang meliputi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Kinerja pendapatan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal nasional terkait dengan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dan realisasi pendapatan dari tahun sebelumnya.

Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penerapan pelayanan prima pada unit pengelola melalui upaya penggalian dan pengembangan sumber penerimaan

daerah, serta penyempurnaan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah. Untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah, maka Pemerintah Provinsi NTB melakukan berbagai upaya dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen dari pendapatan daerah sebagai sumber penerimaan pendapatan yang merupakan otoritas daerah dimana pelaksanaannya diorientasikan dan berbasis kepada potensi daerah, oleh karenanya PAD sering dijadikan parameter kemandirian fiskal suatu daerah dalam aspek kemampuan keuangan daerahnya. Peningkatan PAD pada dasarnya adalah merupakan upaya internal suatu daerah untuk memperkecil celah fiskal (*fiscal gap*).

Pemerintah Provinsi NTB berupaya menjadikan komponen PAD sebagai sumber dana yang terus ditingkatkan penerimaannya guna lebih memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab serta menciptakan kemandirian daerah dalam pembiayaannya. Oleh karena itu pemerintah daerah selalu dan terus meningkatkan hasil PAD setiap tahunnya dalam rangka mendukung sektor belanja APBD untuk memenuhi berbagai kebutuhan pemerintah dan masyarakat.

Tabel 2. 127 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi NTB Tahun 2020-2024

Kode	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan
1	2	4	5	6	7	8	9
1	**Pendapatan**	**5.174.293.221.665**	**5.326.932.790.704**	**5.302.613.771.986**	**5.798.011.398.325**	**6.621.561.189.046**	**6,41**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**1.815.690.092.106**	**1.888.456.286.096**	**2.292.065.852.875**	**2.790.069.455.407**	**3.294.373.420.660**	**16,30**
1.1.1	Pajak Daerah	1.328.307.081.373	1.418.222.758.511	1.706.131.394.926	1.880.836.787.108	2.045.004.056.872	11,51
1.1.2	Retribusi Daerah	16.474.033.077	10.448.164.349	14.455.210.916	12.474.027.934	720.036.975.056	1.415,09
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	61.121.457.472	46.263.633.608	50.616.995.897	68.185.855.182	79.902.735.899	9,25
1.1.4	Lain-Lain PAD Yang Sah	409.787.520.184	413.521.729.628	520.862.251.136	828.572.785.183	449.429.652.833	10,05
1.2	**Pendapatan Transfer**	**3.351.385.124.044**	**3.414.313.104.250**	**2.978.480.323.175**	**3.007.931.709.650**	**3.327.187.768.386**	**-0,01**
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.349.721.895.031	3.412.475.468.388	2.976.614.420.050	3.004.817.639.100	3.322.615.573.146	-0,09
1.2.1.1	Dana Perimbangan	3.310.586.841.031	3.343.953.221.388	2.937.450.374.050	3.004.817.639.100	3.300.345.380.146	0,25
1.2.1.1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	233.260.247.715	276.889.215.058	454.633.783.742	457.937.054.154	488.434.616.000	22,57
1.2.1.1.2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.475.540.106.000	1.475.675.853.000	1.475.280.205.081	1.623.630.483.000	1.781.174.009.000	4,94
1.2.1.1.3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	355.203.497.834	346.452.123.817	442.204.312.842	306.852.319.835	358.033.134.458	2,81
1.2.1.1.4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	1.246.582.989.482	1.244.936.029.513	565.332.072.385	616.397.782.111	672.703.620.688	-9,14
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	39.135.054.000	68.522.247.000	39.164.046.000	-	22.270.193.000	-16,94
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	1.663.229.013	1.837.635.862	1.865.903.125	3.114.070.550	4.572.195.240	31,44

Kode	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan
1	2	4	5	6	7	8	9
1.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya	1.663.229.013	1.837.635.862	1.865.903.125	3.114.070.550	4.572.195.240	31,44
1.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**7.218.005.515**	**24.163.400.358**	**32.067.595.936**	**10.233.268**	**-**	**16,88**
1.3.1	Pendapatan Hibah	7.218.005.515	24.163.400.358	32.067.595.936	10.233.268	-	16,88

Sumber: LRA Prov. NTB 2020-2024, diolah

Berdasarkan tabel di atas diperoleh gambaran bahwa selama kurun waktu Tahun 2020–2024, realisasi pendapatan daerah mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat rata-rata 6,41 persen. Adapun pendapatan transfer selama periode 2020-2024 mengalami kecenderungan menurun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -0,01 persen dimana transfer pusat mengalami tren penurunan sebesar -0,09 persen dan transfer daerah mengalami tren meningkat sebesar 31,44 persen. Untuk Dana Perimbangan selama tahun 2020-2024 trennya mengalami peningkatan dengan rata-rata mencapai 0,25 persen, komponen transfer pusat yang mengalami tren peningkatan adalah Dana Bagi Hasil yang mencapai 22,57 persen dan Dana Alokasi Umum yakni sebesar 4,94 persen. Sementara untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik maupun Non Fisik mengalami fluktuasi selama tahun 2020-2024, dimana DAK Fisik rata-rata meningkat 2,81 persen dan DAK Non Fisik rata-rata menurun sebesar 9,14 persen.

Pendapatan Provinsi NTB periode 2020 - 2024 mayoritas disumbang oleh Pendapatan Transfer dengan kontribusi rata-rata mencapai 57,40 persen. Pajak Daerah merupakan kontributor terbesar bagi PAD dengan kontribusi rata-rata sebesar 70,44 persen, disusul oleh komponen Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar 22,11 persen, Retribusi Daerah sebesar 4,88 persen dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2,58 persen. Secara nilai, Pajak Daerah mengalami peningkatan sepanjang tahun 2020 hingga 2024 seiring dengan peningkatan keseluruhan Pendapatan Asli Daerah Nusa Tenggara Daerah dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 11,51 persen.

Grafik 2. 113 Rata-rata Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Provinsi NTB Tahun 2020-2024

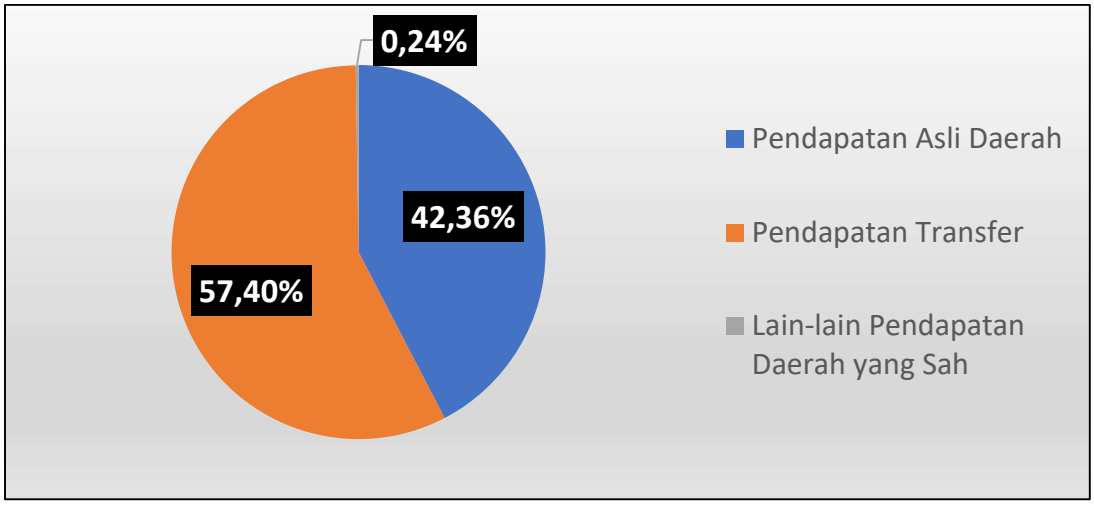

Sumber: LRA Prov. NTB 2020-2024, diolah

Pendapatan transfer merupakan komponen terbesar yang berkontribusi pada pendapatan daerah selama periode Tahun 2020-2024. Yang tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan kontribusi mencapai 64,77 persen, akan tetapi selama periode tersebut trennya mengalami penurunan dan sebaliknya pada komponen PAD mengalami tren meningkat meskipun masih merupakan komponen yang mendominasi pendapatan daerah. Komponen PAD memiliki kontribusi terbesar pada pendapatan daerah adalah pada tahun 2024 yakni mencapai 49,75 persen.

Grafik 2. 114 Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Provinsi NTB Tahun 2020-2024

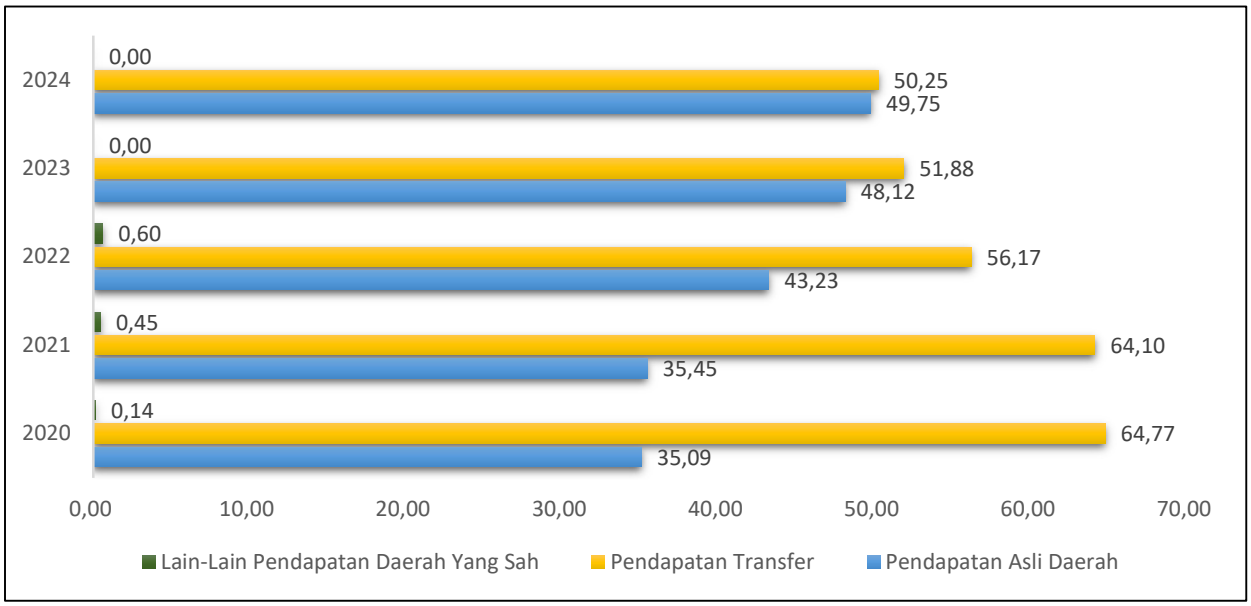

Sumber: LKPD Prov. NTB 2020-2023 audited, LKPD Provinsi NTB 2024 unaudited diolah

Rincian dari pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 disajikan sebagai berikut.

A. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang dipungut oleh daerah berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pemerintah Provinsi NTB dalam menetapkan target senantiasa memperhatikan estimasi dasar, peningkatan cakupan, pertumbuhan penduduk, kenaikan pendapatan riil per kapita, inflasi, perubahan tarif, pembangunan baru dan perubahan peraturan.

Grafik 2. 115 Realisasi PAD Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi NTB Tahun 2020-2024

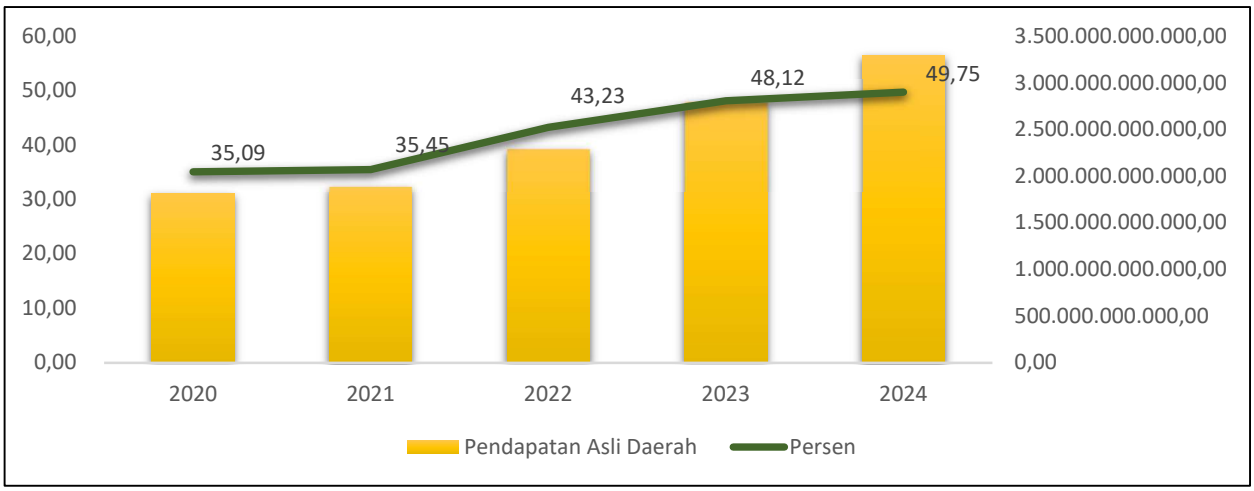

Sumber: LRA Prov. NTB 2020-2024, diolah

Penerimaan daerah secara konsisten mengalami peningkatan selama periode tahun 2020-2024, demikian dengan halnya komponen pendapatan asli daerah (PAD) yang mengalami peningkatan dengan rata-rata capaian yakni 2,42 Triliun lebih atau 16,30 persen. Realisasi PAD tertinggi terjadi pada tahun 2024 dengan capaian 99,65 persen sementara realisasi terendah terjadi pada tahun 2021 yang mencapai 83,62 persen. Pada tahun 2020 terjadi penurunan realisasi dibandingkan tahun 2021 yang diakibatkan kondisi Covid. Rata-rata pertumbuhan PAD pada tahun 2020-2024 sebesar 16,30 persen, dimana peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2023 yang mengalami peningkatan mencapai 21,73 persen atau 498 Milyar.

Grafik 2. 116 Proporsi Realisasi Komponen PAD Terhadap Total PAD Provinsi NTB Tahun 2020-2024

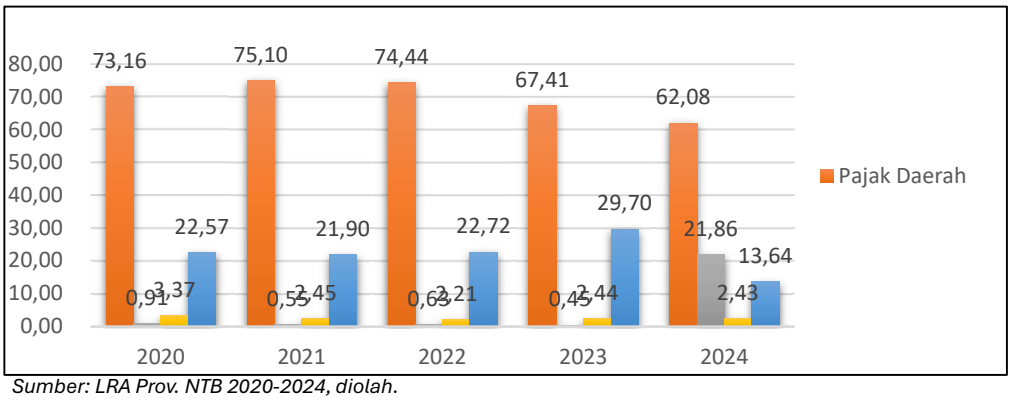

Sumber: LRA Prov. NTB 2020-2024, diolah.

Grafik 2. 117 Rata-rata Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Provinsi NTB Tahun 2020-2024

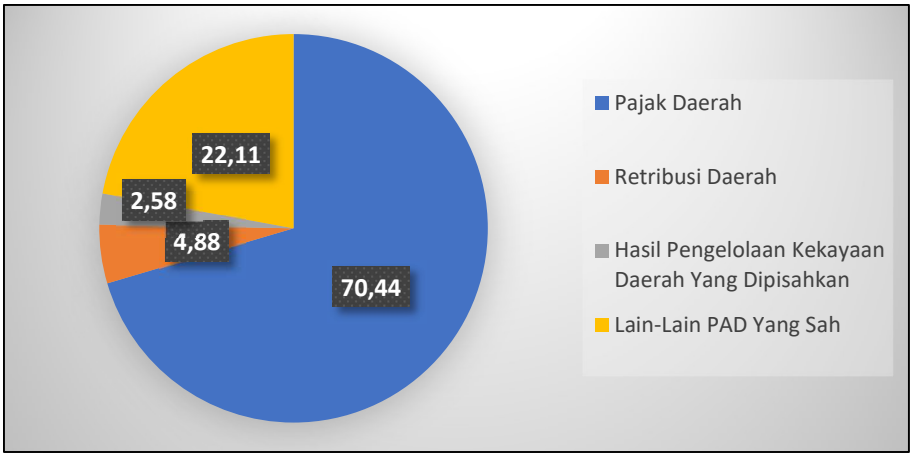

Sumber: LRA Prov. NTB 2019-2023, diolah

Pajak Daerah menjadi komponen terbesar pada pendapatan asli daerah provinsi NTB disusul kemudian oleh komponen Lain-lain PAD yang Sah. Rata-rata pertumbuhan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah adalah sebesar 70,44 persen, selanjutnya Lain-lain PAD yang sah pertumbuhan rata-ratanya mencapai 22,11 persen. Kontribusi pajak tertinggi pada pendapatan daerah sebesar 75,10 persen di tahun 2021 dan kontribusi terendah sebesar 62,08 pada tahun 2024. Sementara itu untuk komponen Lain-lain PAD Yang Sah selama periode tahun 2020-2024 secara konsisten mengalami peningkatan dalam berkontribusi membentuk pendapatan daerah, namun kontribusinya mengalami penurunan dari 29,70 persen di tahun 2023 menjadi 13,64 persen di tahun 2024 atau menurun 16,05 persen kontribusinya terhadap pendapatan daerah.

1. Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Realisasi pajak daerah sejak tahun 2020 sampai 2024 mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 11,51 persen. Pada tahun 2020 realisasi pajak daerah sebesar Rp 1.328.307.081.373 dan tahun 2021 realisasi pajak daerah meningkat menjadi Rp1.418.222.758.511 atau meningkat 6,77 persen dibandingkan tahun 2020. Tahun 2022 realisasi pajak daerah sebesar Rp 1.706.131.394.926 atau meningkat 20,30 persen, sementara pada tahun 2023 realisasi pajak daerah sebesar Rp 1.880.836.787.108 atau meningkat 10,24 persen. Tren

peningkatan ini terus berlanjut hingga tahun 2024 dengan realisasi pajak daerah mencapai Rp 2.044.955.702.722 atau meningkat 8,73 persen dari tahun 2023. Kontribusi pajak daerah bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan rata-rata kontribusi 30,44 persen, kemudian diikuti oleh Pajak Rokok dengan rata-rata kontribusi 23,94%, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dengan rata-rata kontribusi 23,05 persen, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan rata-rata kontribusi 22,45 persen dan terakhir Pajak Air Permukaan (PAP) dengan rata-rata kontribusi 0,09 persen. Dengan terbitnya UU HKPD terdapat terdapat beberapa perubahan terkait dengan pajak daerah, antara lain adanya penerapan opsen untuk PKB dan BBNKB serta adanya tambahan jenis pajak baru yang dipungut oleh pemerintah provinsi yaitu pajak alat berat dan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB). Pajak Alat Berat (PAB) di tahun 2024 realisasinya mencapai Rp3.203.633.154, sementara opsen pajak MBLB belum ada realisasi di tahun. Adapun rincian realisasi pajak daerah di Provinsi NTB Tahun 2020-2024 berdasarkan jenisnya disajikan pada grafik berikut.

Grafik 2. 118 Realisasi Komponen Pajak Daerah Provinsi NTB Tahun 2020-2024

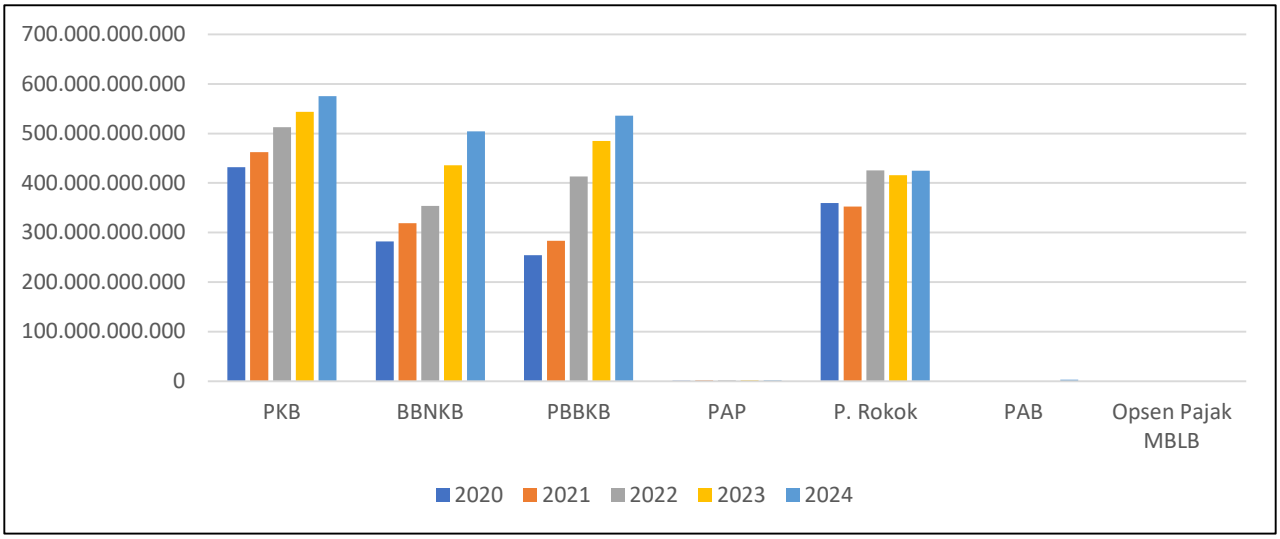

Sumber: LKPD Prov. NTB 2020-2023 audited, LKPD Provinsi NTB 2024 unaudited diolah

a) Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraab Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Sejak tahun 2020-2024 realisasi pajak kendaraan bermotor di provinsi NTB terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,47 persen. Tahun 2020 realisasi PKB mencapai Rp 431,77 M, tahun 2021 meningkat menjadi Rp 462,26 M, tahun 2022 kembali meningkat menjadi Rp 512,76 M, tahun 2023 realisasi PKB mencapai Rp 543,72 M dan di tahun 2024 kembali meningkat menjadi Rp 575,48 M.

Grafik 2. 119 Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi NTB Tahun 2020-2024

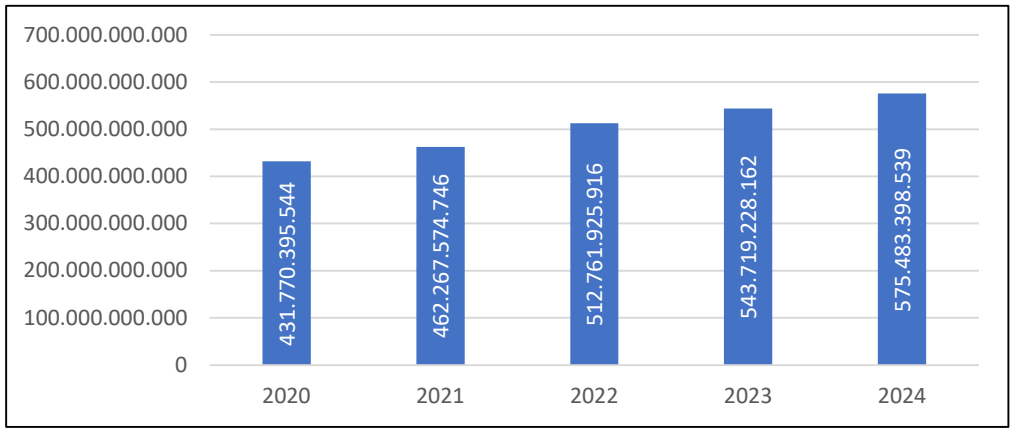

Sumber: LKPD Prov. NTB 2020-2023 audited, LKPD Provinsi NTB 2024 unaudited diolah

Peningkatan realisasi PKB didukung dengan jumlah kendaraan eksisting yang ada ditambah peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Provinsi NTB, baik kendaraan baru maupun kendaraan mutasi dari luar daerah sehingga total potensi jumlah kendaraan di Provinsi NTB mencapai 1,95 juta kendaraan di tahun 2024. Dari jumlah tersebut sebanyak 89,88 persen merupakan kendaraan roda 2 dan sisanya sebanyak 10, 12 persen merupakan kendaraan roda 4. Untuk kendaraan baru di Provinsi NTB jumlahnya mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu sebanyak 77.512 kendaraan baru di tahun 2020, 81.122 kendaraan di tahun 2021, 89.746 kendaraan baru di tahun 2022, 115.101 kendaraan di tahun 2023 dan jumlah tertinggi di tahun 2024 yang mencapai 137.624 kendaraan baru.

Grafik 2. 120 Jumlah Kendaraan Baru Roda 2 dan Roda 4 di Tahun 2020-2024

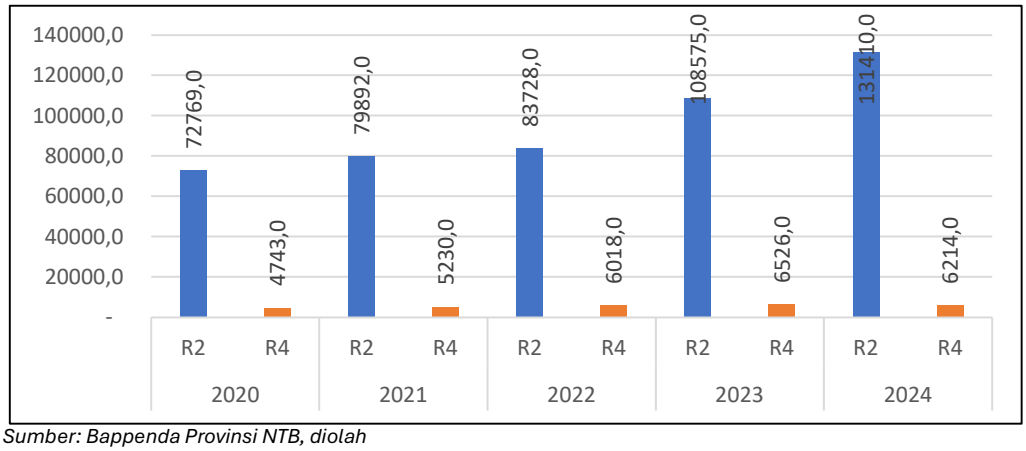

Sumber: Bappenda Provinsi NTB, diolah

Adapun jumlah kendaraan mutasi yang masuk ke NTB dan membayar PKB mencapai 7.557 kendaraan di tahun 2020, 6.595 kendaraandi tahun 2021,5.636 kendaraan di tahun 2022, 11.613 kendaraan di tahun 2023 dan tertinggi di tahun 2024 yeng jumlahnya mencapai 12.213 kendaraan.

Berdasarkan jenis plat kendaraannya, dari 1,95 juta potensi kendaraan yang ada sebanyak 97,63 persen adalah kendaraan plat hitam, 1,68 persen kendaraan plat merah dan sisanya 0,70 persen kendaraan plat kuning. Dari total 1,95 juta potensi kendaraan yang ada di Provinsi NTB, jumlah kendaraan yang membayar PKB sebanyak 972.571 kendaraan atau 49,88 persen dari total potensi. Untuk kedepannya diperlukan strategi yang efektif untuk dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar PKB.

b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotr sebagai akibat perjannian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jua beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha. Sejak tahun 2020-2024 realisasi pajak kendaraan bermotor di provinsi NTB terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 15,75 persen. Tahun 2020 realisasi BBNKB mencapai Rp 281,72 M, tahun 2021 meningkat menjadi Rp 318,73 M, tahun 2022 kembali meningkat menjadi Rp 353,85 M, tahun 2023 realisasi BBNKB mencapai Rp 435,51 M dan di tahun 2024 kembali meningkat menjadi Rp504,25 M.

Grafik 2. 121 Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi NTB Tahun 2020-2024

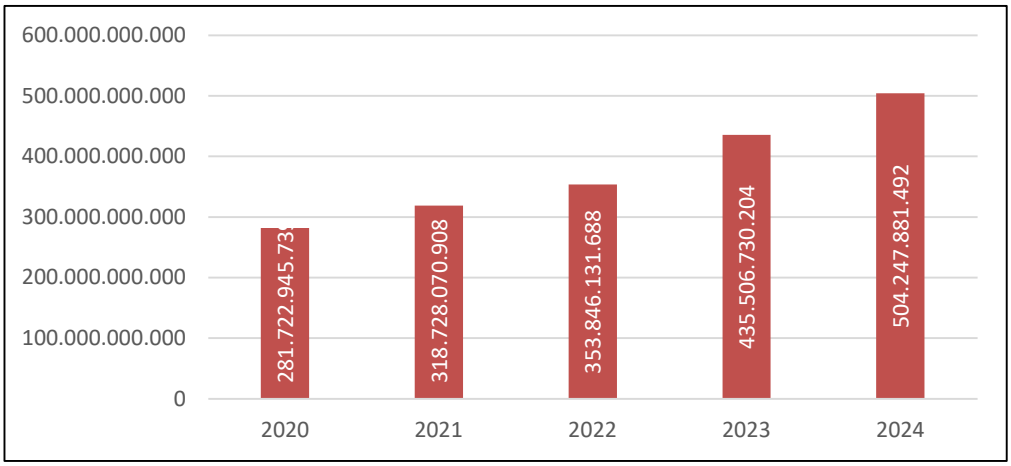

Sumber: LKPD Prov. NTB 2020-2023 audited, LKPD Provinsi NTB 2024 unaudited diolah

Realisasi BBNKB berasal dari kendaraan baru dan kendaraan mutasi yang masuk ke NTB. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa kendaraan baru yang ada di NTB terus mengalami peningkatan, demikian pula dengan kendaraan mutasi.

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan alat berat. Realisasi PBBKB di

Provinsi NTB terus mengalami peningkatan dari tahun 2020-2024 dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 21,27 persen. Tahun 2020 realisasi PBBKB mencapai Rp 254,18 M, tahun 2021 meningkat menjadi Rp 318,73 M, tahun 2022 kembali meningkat menjadi Rp 412,84 M, tahun 2023 realisasi PBBKB mencapai Rp 484,59 M dan di tahun 2024 kembali meningkat menjadi Rp535,59 M.

Grafik 2. 122 Realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Provinsi NTB Tahun 2020-2024

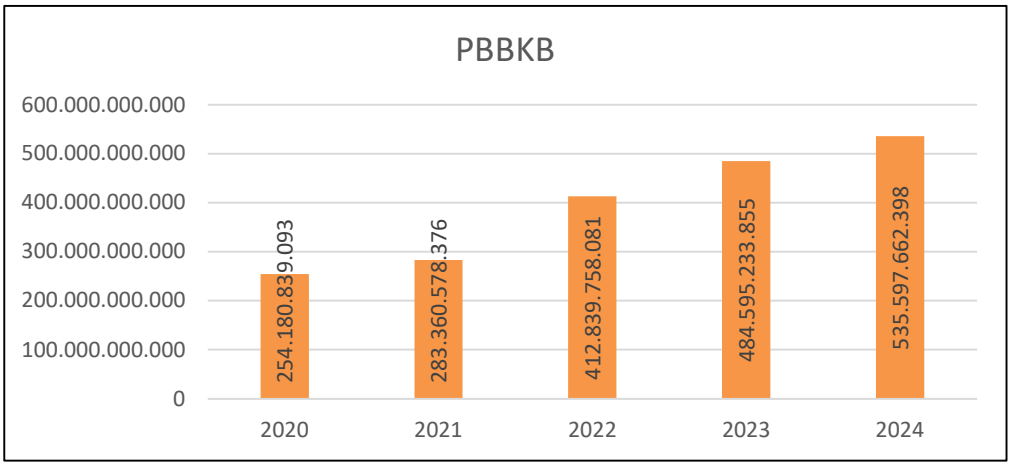

Sumber: LKPD Prov. NTB 2020-2023 audited, LKPD Provinsi NTB 2024 unaudited diolah

Realisasi PBBKB di Provinsi NTB mengalami tren peningkatan yang disebabkan oleh peningkatan konsumsi bahan bakar minyak, baik yang subsidi maupun non subsidi. Jumlah konsumsi BBM di Provinsi NTB mencapai 923.650.903 liter di tahun 2020, kemudian meningkat menjadi 931.774.038 liter di tahun 2021. Tren peningkatan ini terus terjadi di tahun 2022 hingga 2024 yang mencapai 1.012.077.984 liter (2022), 1.042.892.601 liter (2023) dan 1.175.865.651 liter (2024). Penggunaan BBM didominasi oleh BBM penugasan berupa pertalite sebesar 44,76 persen, BBM industri berupa bio solar dan pertamina dex sebesar 32,82 persen, BBM subsidi berupa bio solar sebesar 17,89 persen dan BBM umum berupa bio solar, premium, pertalite, pertamax, dexlite, pertamina dex dan pertamax turbo sebesar 4,53 persen.

d) Pajak Air Permukaan (PAP)

Pajak Air Permukaan (PAP) adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Realisasi PAP di Provinsi NTB terus mengalami peningkatan dari tahun 2020-2024 dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 6,26 persen. Tahun 2020 realisasi PAP mencapai Rp 1,23 M, tahun 2021 meningkat menjadi Rp 1,50 M, tahun 2022 kembali meningkat menjadi Rp 1,56 M, tahun 2023 realisasi PAP mencapai Rp 1,60 M dan di tahun 2024 realisasi menurun menjadi Rp 1,54 M.

Grafik 2. 123 Realisasi Pajak Air Permukaan di Provinsi NTB
Tahun 2020-2024

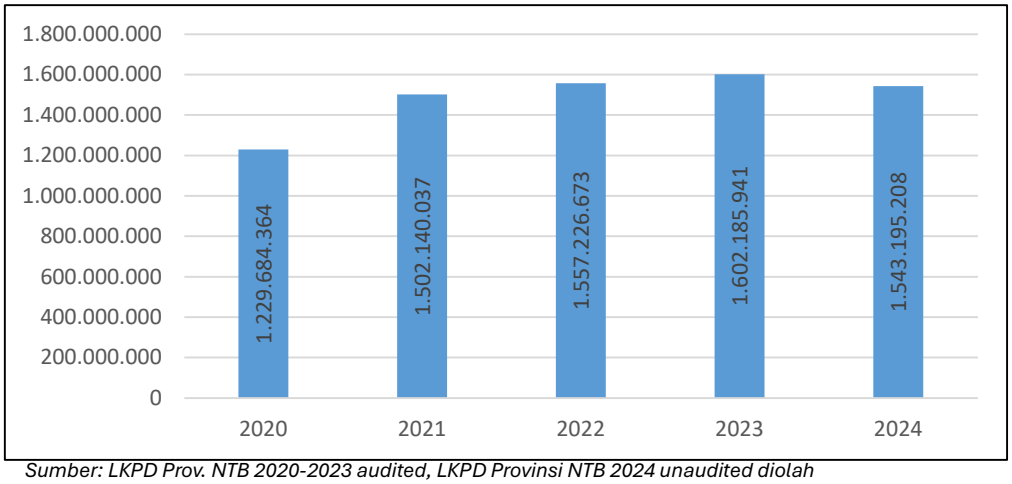

Sumber: LKPD Prov. NTB 2020-2023 audited, LKPD Provinsi NTB 2024 unaudited diolah

Grafik 2. 124 Realisasi Penggunaan Air Permukaan di Provinsi NTB Tahun 2020-2024

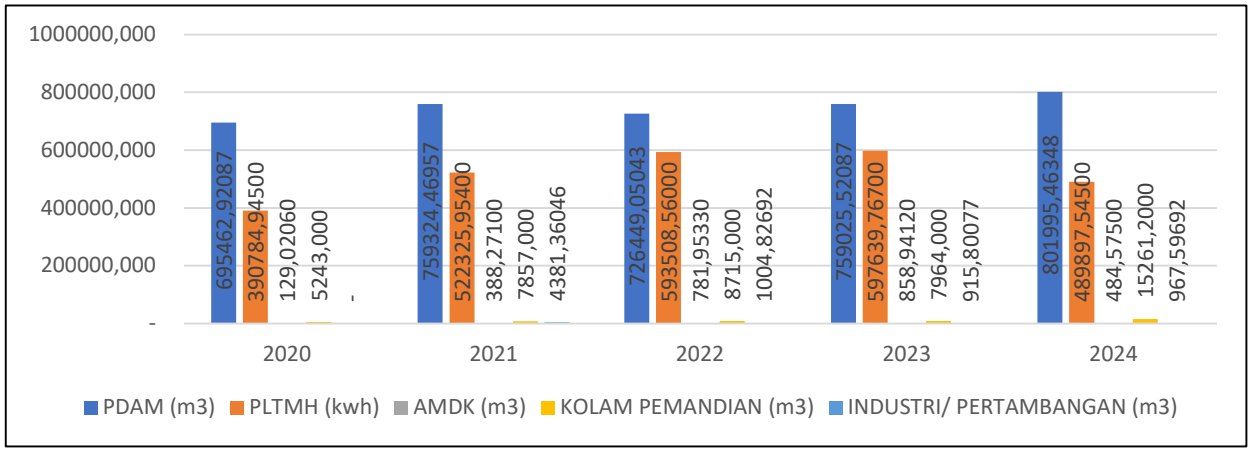

Sumber: Bappenda Provinsi NTB diolah

Realisasi PAP di Provinsi NTB mengalami tren peningkatan yang disebabkan oleh peningkatan penggunaan air permukaan. Volume terbesar penggunaan air permukaan adalah PDAM yang volumenya mencapai 695.462,92 m3 di tahun 2020, 759.324,47 m3 di tahun 2021, 726.449,05 m3 di tahun 2022, 75.025,52 m3 di tahun 2023 dan 801.995,46 m3 di tahun 2024. Penggunaan terbesar kedua PAP digunakan untuk PLTMH yang realisasinya mencapai 390.784,95 kwh di tahun 2020 dan tren ini terus mengalami peningatan hingga tahun 2023 yang mencapai 57639,77 kwh. Namun di tahun 2024, penggunaan PAP untuk PTMH menurun menjadi 489.897,55 kwh. Adapun penggunaan PAP selanjutnya adalah kolam pemandian dan industri/pertambangan yang realisasinya di tahun 2020 mencapai 5.243 m3 untuk kolam pemandian dan tidak ada realisasi untuk industri/pertambangan. Penggunaan PAP untuk kolam pemandian dan industri/pertambangan ini meningkat di tahun 2024

yang mencapai 15.261,20 m3 untuk kolam pemandian dan 967,60 m3 untuk industri/pertambangan.

Untuk tarif untuk PAP masih menggunakan masih menggunakan Peraturan Gubernur No. 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Permukaan, dimana besaran tarif adalah Rp 115/m3 untuk PDAM, Rp 100/kwh untuk PTMH, Rp 500/m3 untuk kolam pemandian dan Rp 650/m3 untuk inustri/pertambangan. Kedepannya tarif PAP perlu disesuaikan dengan tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat, harga yang berlaku serta aspek-aspek lainnya.

e) Pajak Rokok

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Realisasi pajak rokok di Provinsi NTB terus mengalami peningkatan dari tahun 2020-2024 dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 4,67 persen. Tahun 2020 realisasi pajak rokok mencapai Rp 359,40 M, tahun 2021 meningkat menjadi Rp 352,36 M, tahun 2022 kembali meningkat menjadi Rp 425,13 M, namun tahun 2023 realisasi pajak rokok menurun menjadi Rp 415,41 M dan di tahun 2024 realisasi kembali meningkat menjadi Rp 424,88 M.

Grafik 2. 125 Realisasi Pajak Rokok di Provinsi NTB
Tahun 2020-2024

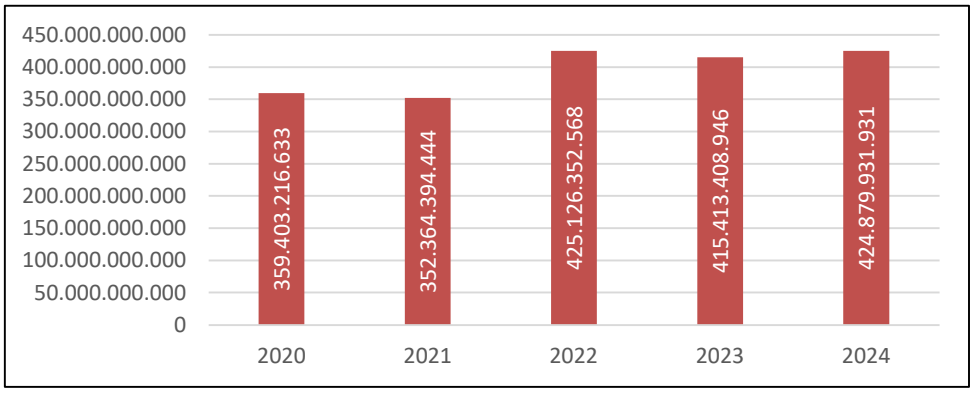

Sumber: LKPD Prov. NTB 2020-2023 audited, LKPD Provinsi NTB 2024 unaudited diolah

Objek pajak rokok adalah komsumsi rokok yang dapat berupasigaret,cerutu, rokok daundan bentuk rokok lainnyayang dikenakan cukai rokok. Adapun subjek pajak rokok adalah konsumen rokok. Oleh karenanya dalam penentuan estimasi besaran pajak rokok sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk sebagai bagian dari konsumen rokok. Untuk kedepannya diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan penerimaan yang bersumber dari pajak rokok.

f) Pajak Alat Berat (PAB)

Pajak Alat Berat (PAB) adalah pajak atas kepemilikandan/atau penguasaan alat berat. Pajak alat berat ini mulai dipungut oleh pemerintah Provinsi NTB di tahun 2024 setelah penerapan UU HKPD dan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 2

Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Tahun 2024 realisasi PAB mencapai Rp 3,2 M. Kedepannya realisasi PAB ini semakin meningkat seiring dengan bertambahnya penggunaan alat berat untukpengerjaan konstruksi maupun industri dan pertambangan.

g) Opsen Pajak MBLB

Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) adalah opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok pajak MBLB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sama halnya dengan Pajak Alat Berat, opsen pajak MBLB dipungut oleh pemerintah Provinsi NTB di tahun 2025 setelah penerapan UU HKPD dan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024. Oleh karenanya dalam pemungutan jenis pajak ini pemerintah provinsi perlu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pemerintah Kab/Kota di NTB.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Realisasi retribusi daerah di Provinsi NTB sejak tahun 2020 sampai 2024 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2020 realisasi retribusi daerah sebesar Rp 16.474.033.077 dan tahun 2021 realisasi retribusi daerah menurun menjadi Rp 10.448.164.349 atau menurun 36,58 persen dibandingkan tahun 2020. Tahun 2022 realisasi retribusi daerah sebesar Rp 114.455.210.916 atau meningkat 38,35 persen, sementara pada tahun 2023 realisasi retribusi daerah kembali menurun menjadi Rp12.474.027.934 atau menurun 13,71 persen. Adapun tahun 2024 realisasi retribusi daerah mencapai Rp 715.049.735.056 atau meningkat 5.632,31 persen dibandingkan tahun 2024, hal ini disebabkan adanya penambahan BLUD yang dibentuk, baik untuk SMK maupun perangkat daerah sehingga harus dimasukkan dalam laporan keuangan pemerintah provinsi.

Grafik 2. 126 Realisasi Komponen Retribusi Daerah Provinsi NTB Tahun 2020-2024

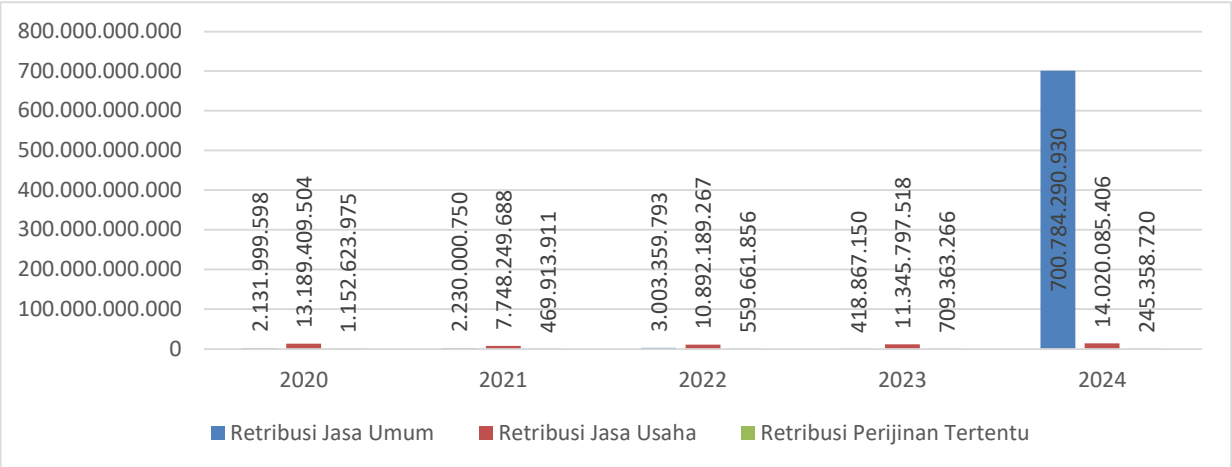

Sumber: LKPD Prov. NTB 2020-2023 audited, LKPD Provinsi NTB 2024 unaudited diolah

Retribusi daerah bersumber dari retribusi jasa umum dengan kontribusi 31,28 persen, retribusi jasa usaha dengan kontribusi 64,50 persen dan retribusi perijinan tertentu dengan kontribusi 4,22 persen. Dengan kontribusi tersebut, diharapkan kedepannya peran retribusi daerah dalam pendapatan daerah dapat terus ditingkatkan seiring dengan perbaikan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat maupun pihak terkait lainnya.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah pendapatan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, seperti penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pendapatan ini merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan bertujuan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah serta mendukung pembangunan daerah. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejak tahun 2020 sampai 2024 mengalami fluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,25 persen. Pada tahun 2020 realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 61.121.457.472 dan tahun 2021 realisasinya menurun menjadi Rp 46.263.633.608 atau menurun 24,31 persen dibandingkan tahun 2020. Tahun 2022 realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp50.616.995.897 atau meningkat 9,41 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sementara pada tahun 2023 realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 68.185.855.182 atau meningkat 34,71 persen. Tren peningkatan ini terus berlanjut hingga tahun 2024 dengan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencapai Rp 79.902.735.899 atau meningkat 9,25 persen dari tahun 2023.

Grafik 2. 127 Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Provinsi NTB Tahun 2020-2024

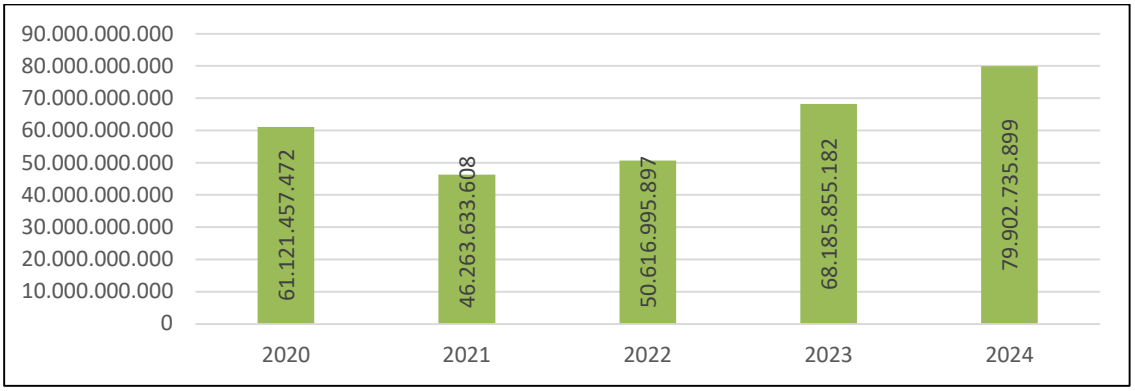

Sumber: LKPD Prov. NTB 2020-2023 audited, LKPD Provinsi NTB 2024 unaudited diolah

Hasil pengelolaan kekayaan daerah Provinsi NTB berasal dari deviden BUMD yaitu PT. Bank NTB Syariah, PT. BPR NTB, PT. Gerbang NTB Emas, PT. Jamkrida dan PT. Asuransi Bangun Askrida. Kontribusi deviden terbesar berasal dari PT. Bank NTB Syariah yang mencapai 82,56 persen, kemudian diikuti PT. BPR NTB dengan kontribusi 16,62 persen, PT. Jamkrida dengan kontribusi1,43 persen, PT. Gerbang Emas dengan kontribusi 1,35 persen dan PT. Asuransi Bangun Askrida dengan kontribusi 0,05 persen. Berdasarkan peraturan perundangan-undangan terkait pemenuhan modal inti BUMD, semua BUMD di Provinsi NTB belum memenuhi ketentuan tersebut sehingga kedepannya diperlukan strategi agar dapat memenuhi ketentuan tersebut dan upaya untuk menjadikan BUMD agar tetap sehat.

4. Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini mencakup berbagai jenis penerimaan yang sah menurut peraturan perundang-undangan, dan menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah. Lain-lain PAD yang Sah terdiri dari : (a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Ini termasuk penjualan aset daerah yang tidak termasuk dalam pengelolaan khusus; (b) Hasil pemanfaatan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yaitu pemanfaatan aset daerah, seperti penyewaan atau penggunaan aset untuk kegiatan tertentu; (c) Jasa giro dan pendapatan bunga yaitu pendapatan yang diperoleh dari simpanan atau investasi daerah; (d) Tuntutan ganti rugi yaitu penerimaan dari klaim ganti rugi yang diajukan oleh daerah; (e) Keuntungan selisih nilai tukar yaitu keuntungan yang diperoleh dari perbedaan nilai tukar mata uang asing; (f) Penerimaan dari kerjasama daerah yaitu pendapatan yang diperoleh dari kerjasama dengan pihak lain, baik pemerintah maupun swasta; (g) Pendapatan dari denda yaitu denda yang dikenakan atas pelanggaran peraturan daerah atau keterlambatan pembayaran; (h) Pendapatan dari hasil eksekusi jaminan yaitu pendapatan yang diperoleh dari pencairan jaminan yang diberikan oleh pihak lain; (i) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yaitu pendapatan dari kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh daerah; (j) Pendapatan dari pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yaitu pendapatan yang diperoleh dari BLUD yang dikelola oleh daerah; (k) Pendapatan lain-lain yang sah yaitu endapatan yang tidak termasuk dalam kategori di atas, tetapi diatur dalam peraturan perundang-undangan. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah sejak tahun 2020 sampai 2023 mengalami peningkatan, sementara tahun 2024 realisasinya menurun. Rata-rata pertumbuhan Lain-lain PAD yang Sah dalam kurun waktu 5 tahun sebesar 10,04 persen. Pada tahun 2020 realisasi Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp 409.787.520.184 dan tahun 2021 realisasinya meningkat menjadi Rp 413.521.729.628

atau meningkat 0,91 persen dibandingkan tahun 2020. Tahun 2022 realisasi Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp 520.862.251.136 atau meningkat 25,96 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sementara pada tahun 2023 realisasi Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp 828.572.785.183 atau meningkat 59,08 persen. Namun tahun 2024 dengan realisasi Lain-lain PAD yang Sah menurun menjadi Rp 449.326.099.366 atau menurun 45,77 persen dari tahun 2023. Hal ini disebabkan menurunnya pendapatan BLUD dari pelayanan kesehatan dari Rp 663.794.091.021 di tahun 2023 menjadi Rp 17.208.306.309 di tahun 2024.

Grafik 2. 128 Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Provinsi NTB Tahun 2020-2024

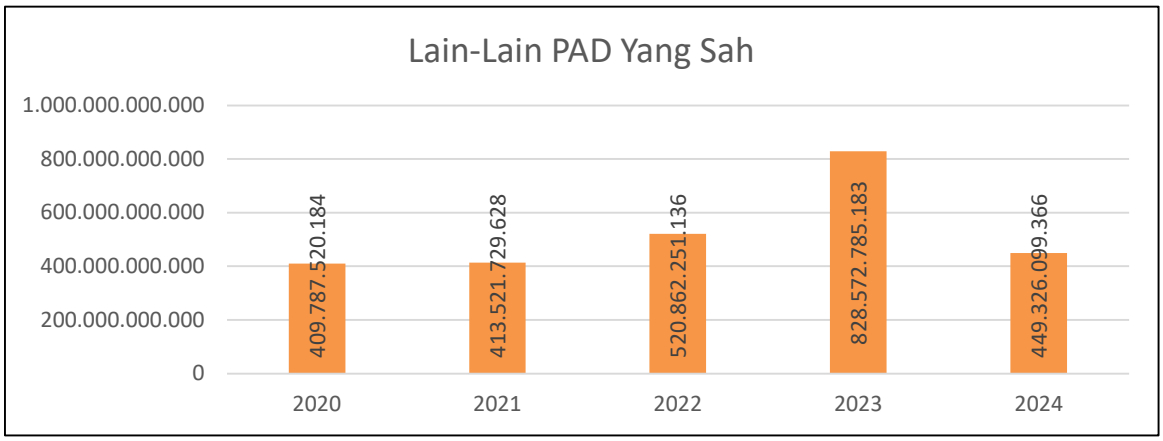

Sumber: LKPD Prov. NTB 2020-2023 audited, LKPD Provinsi NTB 2024 unaudited diolah

Komponen terbesar penyumbang Lain-lain PAD yang Sah adalah Pendapatan BLUD dari pelayanan kesehatan dengan rata-rata kontribusi 71,45 persen, kemudian diikuti oleh penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain dengan rata-rata kontribusi 21,41 persen serta pendapatan denda pajak dengan rata-rata kontribusi 2,44 persen. Kedepannya dalam rangka peningkatan Lain-lain PAD yang Sah perlu dilakukan optimalisasi terutama untuk komponen penyumbang terbesar Lain-lain PAD yang Sah.

B. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer pemerintah pusat adalah penerimaan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk berbagai keperluan, termasuk pelaksanaan desentralisasi. Dana transfer ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah dan mendukung pembangunan daerah. Pendapatan transfer meliputi :

1. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan pendapatan transfer yang bersumber dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum dan Khusus sebagaimana

diatur melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 24 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dana Perimbangan menjadi komponen Pendapatan Transfer terbesar yang membentuknya, selama tahun 2020-2024 pendapatan transfer mengalami kecenderungan menurun. Demikian halnya dengan Dana Perimbangan oleh karena itu dapat disimpulkan pendapatan transfer Provinsi NTB masih dipengaruhi oleh Dana Perimbangan Pusat. Tren Dana Perimbangan cenderung fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan realisasinya mencapai 0,25 persen. Rata-rata kontribusi dana perimbangan pada pendapatan transfer mencapai 99,02 persen dengan kontribusi tertinggi yakni sebesar 99,90 di tahun 2023, hal ini menunjukan masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah pada dana transfer khususnya dana perimbangan.

Grafik 2. 129 Perkembangan Realisasi Pendapatan Transfer dan Dana Perimbangan Tahun 2020-2024

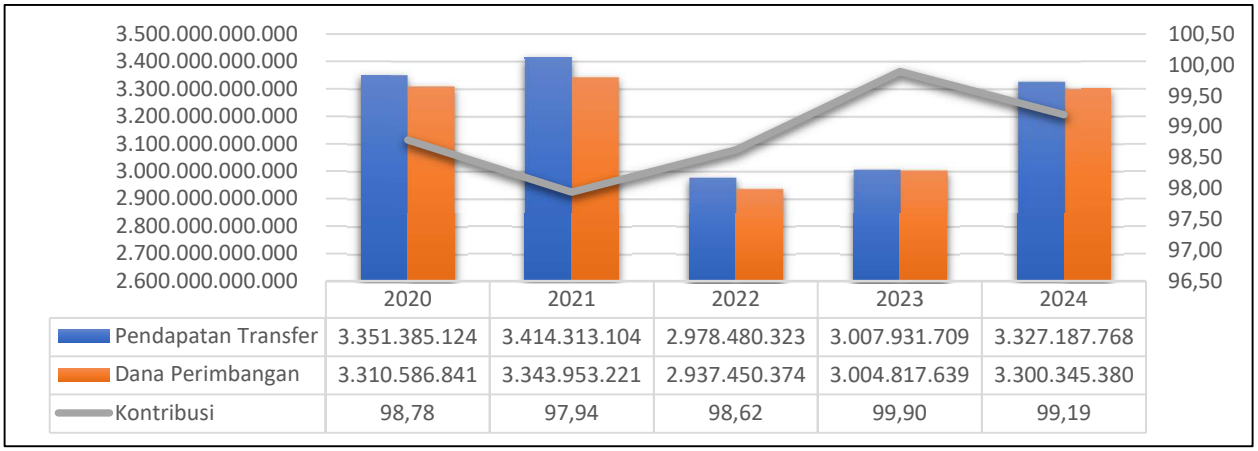

	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan Transfer	3.351.385.124	3.414.313.104	2.978.480.323	3.007.931.709	3.327.187.768
Dana Perimbangan	3.310.586.841	3.343.953.221	2.937.450.374	3.004.817.639	3.300.345.380
Kontribusi	98,78	97,94	98,62	99,90	99,19

Sumber: LRA Prov. NTB 2020-2024, diolah

Grafik 2. 130 Perkembangan Realisasi Dana Perimbangan dan Komponennya Tahun 2020-2024

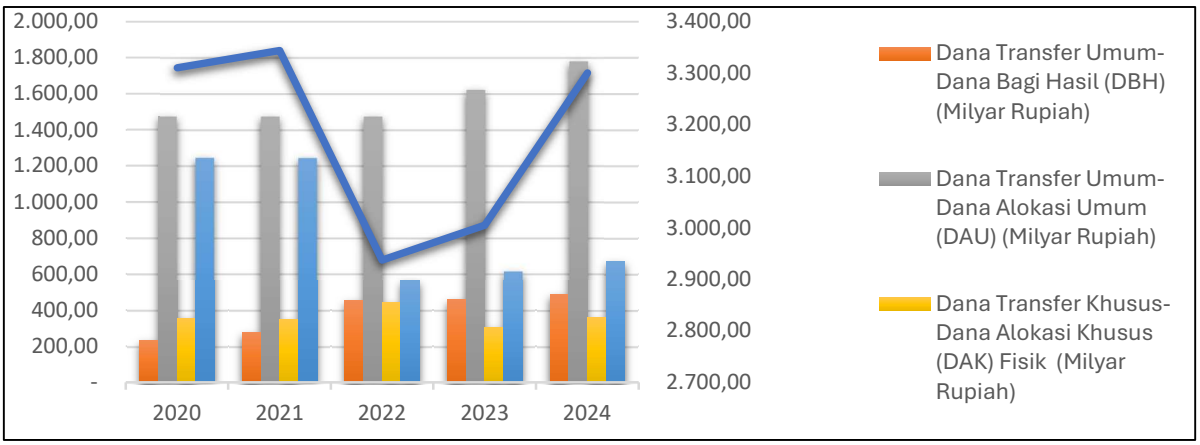

Sumber: LRA Prov. NTB 2020-2024, diolah

Tren Dana Perimbangan Provinsi NTB mengalami peningkatan sejak tahun 2020-2024, kecuali di tahun 2022 dengan rata-rata pertumbuhan selama periode tahun 2020-2024 adalah sebesar 0,25 persen. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan komponen pendapatan terbesar, dengan rata-rata mencapai Rp 1.566,27 Milyar lebih sementara Dana Bagi hasil merupakan komponen terkecil dengan rata-rata mencapai Rp 383,23 Milyar lebih. Untuk komponen pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) terdiri dari DAK Fisik dan Non Fisik, dimana selama tahun 2020-2024 tren DAK Fisik rata-rata pertumbuhannya sebesar 2,81 persen dan -9,14 persen untuk DAK Non Fisik. Rata-rata pendapatan yang bersumber DAK Fisik sebesar Rp 361,75 Milyar lebih, sementara untuk DAK Non Fisik mencapai Rp 869,19 Milyar lebih.

2. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya

Komponen pendapatan transfer selain pendapatan transfer pusat adalah pendapatan transfer antar daerah berupa Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah (Pemda) lainnya yang dukungan anggaran yang diberikan oleh pemerintah provinsi atau daerah lain kepada Kab/Kota atau daerah yang memerlukan. Bantuan ini bertujuan untuk mendukung pembangunan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat di daerah penerima. Bantuan ini diatur dalam regulasi perundangan sebagai salah satu bentuk hubungan keuangan antara pemerintah provinsi dan Kab/Kota.

Grafik 2. 131 Perkembangan Realisasi Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya Tahun 2020-2024

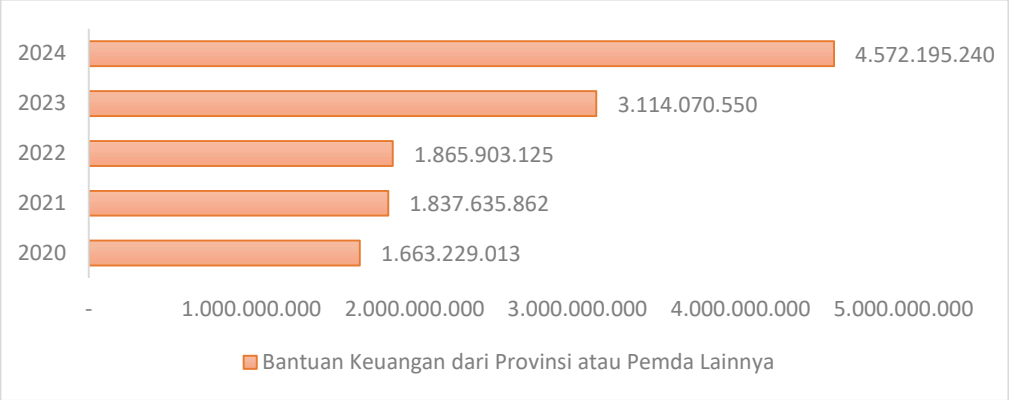

Sumber: LRA Prov. NTB 2020-2024, diolah

Selama tahun 2020-2024 rata-rata pertumbuhannya dengan kecenderungan meningkat mencapai 9,38 persen dimana pendapatan tertinggi terdapat pada tahun 2024 sebesar Rp.4.572.195.240 atau mengalami peningkatan 46,82 persen dari tahun sebelumnya.

C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah semua pendapatan daerah yang tidak termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer. Pendapatan ini mencakup hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada struktur APBD Provinsi NTB selama periode 2020-2024 adalah Pendapatan Hibah, berikut ini perkembangan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun 2020 -2024.

Grafik 2. 132 Perkembangan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Provinsi NTB Tahun 2020-2024

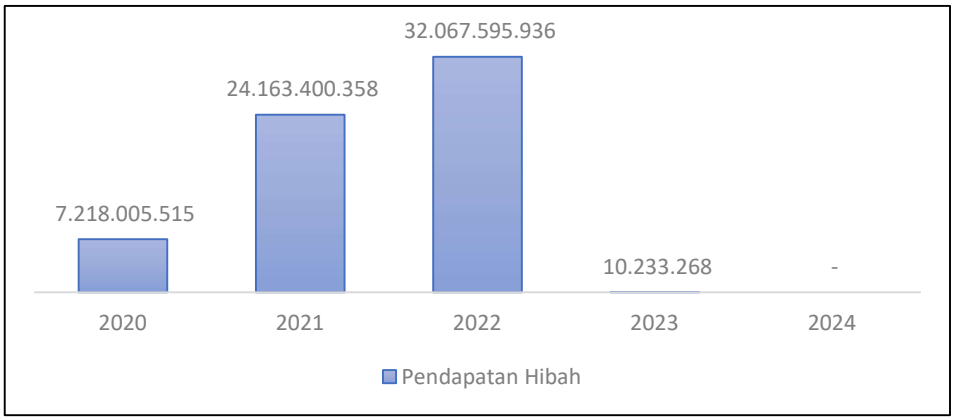

Sumber: LRA Prov. NTB 2020-2024, diolah

Rata-rata pertumbuhan pos lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam bentuk pendapatan hibah selama tahun 2020-2024 yakni sebesar 41,88 persen, kontribusi terbesar terhadap pendapatan daerah yakni pada tahun 2022 sebesar 0,60 persen, sementara untuk tahun 2023 dan 2024 mengalami penurunan. Rata-rata realisasi pendapatan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah sebesar Rp. 12.691.847.015 dimana nilai tertinggi adalah pada tahun 2022 yang mencapai Rp. 32.067.595.936. Hibah ini berasal dari badan/lembaga/organisasidalamnegeri/luarnegeriyangmerupakan kelanjutan dari hibah Program Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi Terpadu (IPDMIP) merupakan tindak lanjut dari perjanjian hibah antara Pemerintah republik Indonesia dengan Asian Development Bank (ADB) dan Asean Infrastructure Fund (AIF). Program IPDMIP ini dilaksanakan hingga tahun 2022 dan tahun 2023 merupakan tahun terakhir pelaksanaanprogram.

2.5.1.2 Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilaikekayaan bersih dalam satu tahun anggaran. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengklasifikasikan belanja daerah

menjadi empat kategori, yakni belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Sejalan dengan peningkatan pendapatan daerah, jumlah belanja daerah selama kurun waktu tahun 2019-2023 cenderung mengalamipeningkatan yang diperuntukkan pada belanja prioritas daerah.

Tabel 2. 128 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Provinsi NTB Tahun 2020-2024

Kode	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan
1	2	3	4	5	6	7	8
2	**Belanja**	**5.199.504.575.008**	**5.545.143.797.895**	**5.873.545.697.438**	**5.685.599.632.381**	**6.524.655.104.542**	**6,03**
2.1	**Belanja Operasi**	**3.640.079.368.674**	**4.083.390.493.558**	**3.701.095.254.838**	**4.206.705.437.138**	**5.027.607.043.872**	**9,00**
2.1.1	Belanja Pegawai	1.394.575.008.135	1.507.538.794.099	1.644.607.308.322	1.807.361.962.660	2.334.452.787.499	14,06
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.080.977.858.050	1.388.499.647.799	1.749.452.823.696	2.118.748.493.977	2.343.702.423.204	21,54
2.1.3	Belanja Bunga	-	1.387.500.000	36.942.131.831	47.402.497.868	46.602.880.945	647,28
2.1.4	Belanja Subsidi	308.091.627	392.732.190	195.256.110	-	-	-5,70
2.1.5	Belanja Hibah	1.151.239.535.162	1.177.818.830.870	262.660.784.878	223.473.807.133	295.516.952.224	-14,52
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	12.978.875.700	7.752.988.600	7.236.950.000	9.718.675.500	7.332.000.000	-9,30
2.2	**Belanja Modal**	**608.297.481.636**	**771.280.939.990**	**1.313.667.766.855**	**545.851.730.154**	**520.804.751.498**	**8,52**
2.2.1	Belanja Tanah	59.820.000	1.055.172.000	9.756.533.668	-	-	622,14
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	314.594.712.993	193.087.079.752	348.582.890.160	214.469.606.585	250.135.497.757	5,02
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	153.647.739.033	113.312.529.954	485.429.865.169	139.046.199.064	187.599.413.355	66,43
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	113.159.214.527	446.081.496.995	432.412.628.484	171.376.022.309	65.651.015.926	42,27
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	26.835.995.083	17.744.661.289	37.485.849.374	20.366.207.196	17.022.415.460	3,82
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	593.695.000	396.409.000	-33,23
2.3	**Belanja Tidak Terduga**	**311.110.985.117**	**33.364.840.102**	**466.511.668**	**2.133.476.223**	**71.133.029**	**18,20**
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	311.110.985.117	33.364.840.102	466.511.668	2.133.476.223	71.133.029	18,20
2.4	**Belanja Transfer**	**640.016.739.581**	**657.107.524.245**	**858.316.164.077**	**930.908.988.867**	**976.172.176.144**	**11,65**
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	639.658.652.081	655.804.671.445	853.165.811.077	913.225.468.067	975.488.676.144	11,62
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	358.087.500	1.302.852.800	5.150.353.000	17.683.520.800	683.500.000	176,59

Sumber: LRA Prov. NTB 2020-2024, diolah

Grafik 2. 133 Rata-Rata Kontribusi Komponen Belanja Terhadap Belanja Daerah Provinsi NTB Tahun 2020-2024

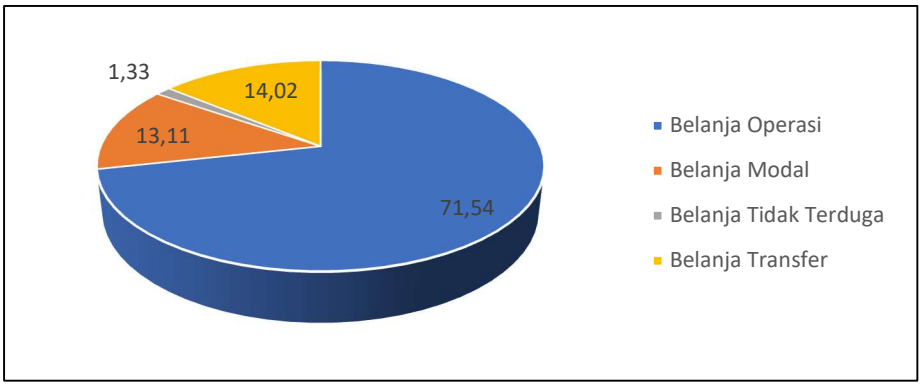

Sumber: LKPD Prov. NTB 2020-2023 audited, LKPD Provinsi NTB 2024 unaudited diolah

Struktur belanja daerah sebagaimana ditampilkan pada grafik menunjukkan bahwa alokasi belanja masih didominasi oleh belanja operasi dengan porsi sebesar 71,54 persen. Kondisi ini mencerminkan bahwa sebagian besar anggaran daerah diarahkan untuk membiayai kebutuhan rutin penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pemeliharaan sarana prasarana yang sudah ada. Sementara itu, belanja modal memperoleh alokasi sebesar 13,11 persen yang diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dan pengadaan aset produktif, namun porsinya masih relatif terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan investasi jangka menengah dan panjang. Selanjutnya, belanja transfer mencapai 14,02 persen yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas desa dan lembaga penerima transfer guna mendukung pembangunan kewilayahan. Adapun belanja tidak terduga hanya sebesar 1,33 persen, sejalan dengan sifatnya yang diperuntukkan bagi keadaan darurat atau kebutuhan mendesak.

Grafik 2. 134 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Provinsi NTB Tahun 2020-2024

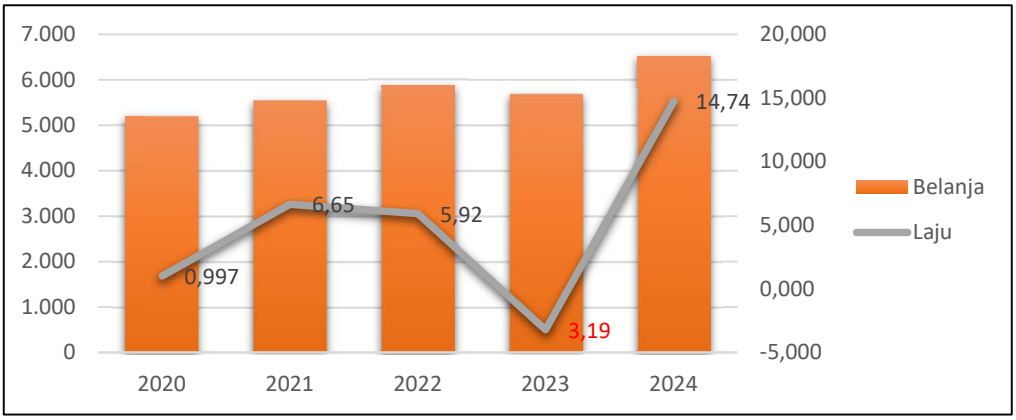

Sumber: LKPD Prov. NTB 2020-2023 audited, LKPD Provinsi NTB 2024 unaudited diolah

Perkembangan realisasi belanja daerah Provinsi NTB selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2020, belanja daerah tumbuh sebesar 0,99 persen, yang relatif rendah akibat dampak pandemi Covid-19 serta adanya kebijakan realokasi anggaran untuk penanganan kesehatan dan jaring pengaman sosial. Memasuki tahun 2021, pertumbuhan belanja meningkat signifikan menjadi 6,65 persen sebagai respon atas upaya pemulihan ekonomi dan penguatan kapasitas pelayanan publik. Pada tahun 2022, laju pertumbuhan sedikit melambat menjadi 5,92 persen, namun tetap mencerminkan konsistensi dalam menjaga kesinambungan program prioritas pembangunan. Sementara itu, pada tahun 2023 terjadi kontraksi pertumbuhan yang cukup tajam menjadi hanya 3,19 persen, yang diduga dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas fiskal, penyesuaian anggaran, serta perlambatan penyerapan belanja. Kondisi ini kemudian berbalik pada tahun 2024, ketika pertumbuhan realisasi belanja meningkat tajam hingga mencapai 14,74 persen seiring dengan penguatan kapasitas fiskal dan optimalisasi pelaksanaan program pembangunan. Secara rata-rata, pertumbuhan belanja daerah pada periode 2020–2024 berada pada kisaran 6–7 persen per tahun, yang menunjukkan bahwa meskipun menghadapi berbagai tantangan, Pemerintah Provinsi NTB tetap mampu menjaga stabilitas fiskal dan mengarahkan belanja daerah untuk mendukung pencapaian target pembangunan jangka menengah.

Grafik 2. 135 Rasio Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Provinsi NTB Tahun 2020-2024

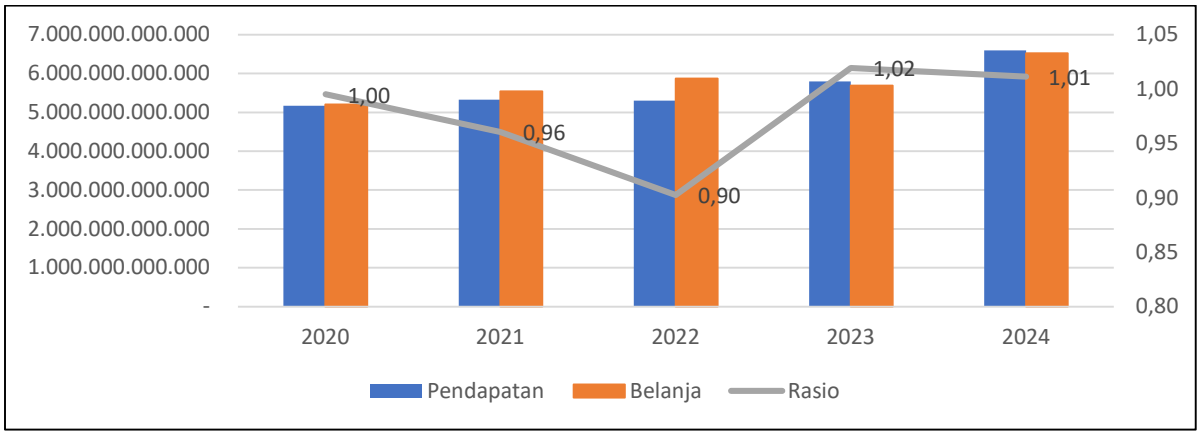

Sumber: LKPD Prov. NTB 2020-2023 audited, LKPD Provinsi NTB 2024 unaudited diolah

Rasio kemampuan mendanai belanja pemerintah merupakan perbandingan antara total penerimaan dengan total pengeluaran. Pada tahun 2020-2024, rasio kemampuan mendanai belanja daerah mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun dari tahun 2020-2022 dan meningkat di tahun 2023, namun kembali menurun di tahun 2024 dengan rata-rata rasio mencapai 0,98. Hal ini menunjukan bahwa pendapatan lebih besar dibandingkan belanja dan memiliki kemampuan untuk mendanai pembangunan di daerah.

Grafik 2. 136 Perkembangan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD)/Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD) Provinsi NTB Tahun 2020-2024

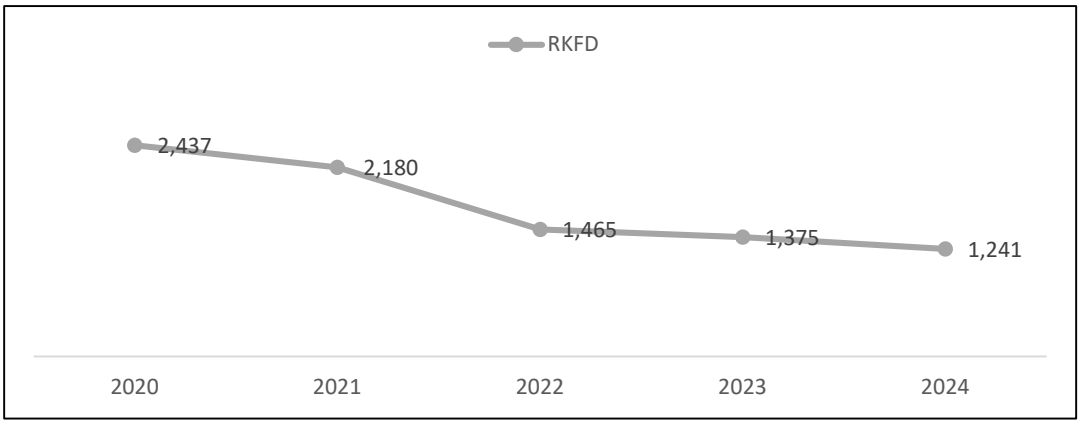

Sumber: PMK Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah 2019-2023, diolah

Perkembangan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) atau Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD) Provinsi NTB selama periode 2020–2024 menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, nilai RKFD tercatat sebesar 2,437 yang mencerminkan kapasitas fiskal daerah masih berada pada posisi relatif kuat. Namun, pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 2,180, seiring dengan dampak lanjutan pandemi Covid-19 yang menekan kinerja pendapatan asli daerah maupun dana transfer dari pemerintah pusat. Tren penurunan berlanjut pada tahun 2022 dengan capaian 1,465 yang menandakan semakin terbatasnya ruang fiskal daerah dan meningkatnya ketergantungan pada sumber pembiayaan eksternal. Pada tahun 2023 nilai RKFD kembali turun menjadi 1,375, sebelum mencapai titik terendah pada tahun 2024 sebesar 1,241. Kondisi ini menggambarkan bahwa kapasitas fiskal Provinsi NTB masih lemah dan rentan, sehingga ruang fiskal yang tersedia untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah menjadi semakin terbatas. Oleh karena itu, dalam periode RPJMD 2025–2029 diperlukan strategi yang lebih terarah untuk memperkuat kapasitas fiskal, antara lain dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan efisiensi belanja, serta pengembangan inovasi pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan.

2.5.1.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih

besarnya Belanja Daerah dibandingkan dengan Pendapatan yang diperoleh, atau sebaliknya untuk memanfaatkan adanya surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Sementara pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Realisasi pembiayaan daerah Provinsi NTB Tahun 2020-2024 di rinci sebagai berikut.

Tabel 2. 129 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi NTB Tahun 2020-2024

Kode	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan
1	2	3	4	5	6	7	8
6	**Pembiayaan**	**145.073.790.630**	**302.367.513.687**	**633.458.744.496**	**51.532.705.112**	**71.145.736.232**	**44,53**
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**145.073.790.630**	**307.367.513.687**	**633.458.744.496**	**62.536.729.044**	**263.944.471.056**	**44,98**
6.1.1	Penggunaaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	144.929.221.703	119.812.846.687	84.156.506.496	62.526.819.044	163.944.471.056	8,27
6.1.2	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	0,00
6.1.3	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	187.500.000.000	549.292.350.000	-	100.000.000.000	38,59
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	144.568.927	54.667.000	9.888.000	9.910.000	-	-33,79
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**-**	**5.000.000.000**	**-**	**11.004.023.932**	**192.798.734.824**	**-25,00**
6.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	-	5.000.000.000	-	70.000.000	-	-20,00
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	10.934.023.932	192.798.734.824	18,87
	Pembiayaan Netto	145.073.790.630	302.367.513.687	633.458.744.496	51.532.705.112	71.145.736.232	41,15
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	119.812.846.687	84.156.506.496	62.526.819.044	163.944.471.056	168.076.572.024	18,37

Sumber: LRA Prov. NTB 2020-2024, diolah

Rata-rata pertumbuhan Pembiayaan netto untuk tahun 2020-2024 mencapai 41,15 persen, dimana penerimaan pembiayaan mengalami fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 44,98 persen sementara untuk pengeluaran pembiayaan rata-rata pertumbuhannya cenderung negatif yang mencapai -25 persen.

Rata-rata penerimaan pembiayaan daerah didominasi oleh komponen pinjaman dalam negeri dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 38,59 persen. Sementara untuk komponen rata-rata pengeluaran pembiayaan yang terbesar adalah pembayaran cicilan pokok utang yang mencapai 18,87 persen.

2.5.2 Neraca Daerah

Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas. Neraca daerah merupakan kondisi keuangan Provinsi NTB serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas. Berikut ini kondisi pertumbuhan pos-pos neraca di Provinsi NTB tahun 2020-2024.

Tabel 2. 130 Neraca Daerah Provinsi NTB Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi (Rp)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**A S E T**						
2	**ASET LANCAR**						
3	Kas di Kas Daerah	3.332.903.665,16	5.335.867.447,29	25.508.703.956,55	144.679.134.254,86	144.946.730.458,96	147,01
4	Kas di Bendahara Penerimaan	302.100.000,00	0,00	14.850.000,00	3.510.000,00	3.656.880,00	234,43
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	83.145.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,22
6	Kas di BLUD	113.060.573.518,94	78.024.158.954,44	36.624.417.605,61	19.214.582.994,25	23.109.109.499,68	-1,33
7	Kas Dibendahara Dana BOS	3.034.111.178,00	799.364.898,00	291.662.122,00	46.588.367,00	20.063.450,00	141,24
8	Kas Lainnya	1.987.987.954,60	1.510.370.708,02	1.991.455.963,79	2.498.340.377,78	2.121.661.529,05	1.513,51
9	Investasi Jangka Pendek						
10	Piutang Pajak	130.701.032,00	126.404.385,00	118.287.256,00	131.613.250,00	0,00	-13,11
11	Penyisihan Piutang Pajak	-68.804.405,63	-73.310.538,07	-62.226.197,29	-72.395.571,77	0,00	-14,64
12	Piutang Pajak Netto	61.896.626,38	53.093.846,93	56.061.058,71	59.217.678,23	0,00	-10,25
13	Piutang Retribusi	7.844.763.931,00	4.967.127.498,00	5.882.858.554,00	4.590.156.288,00	4.540.847.908,00	4,67
14	Penyisihan Piutang Retribusi	-1.566.580.774,83	-1.297.859.785,36	-1.527.238.274,15	-1.741.196.713,24	-2.019.542.155,58	22,23
15	Piutang Retribusi Netto	6.278.183.156,18	3.669.267.712,64	4.355.620.279,85	2.848.959.574,76	2.521.305.752,42	-0,71
16	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	247.369.676,00	403.238.422,00	79.780.327.128,00	1.181.809.352,00	3.274,90
17	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	-247.369.676,00	-2.016.192,11	-398.901.635,64	-118.180.935,20	3.252,56
18	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Netto	0,00	0,00	401.222.229,89	79.381.425.492,36	1.063.628.416,80	3.264,37
19	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah			26.658.415.890,78	78.743.872.776,23	47.066.272.125,76	25,86
20	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah			-4.561.343.638,84	-6.415.022.531,27	-8.442.433.276,13	12,04
21	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Netto			22.097.072.251,94	72.328.850.244,96	38.623.838.849,63	30,12
22	Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	122.396.525,00	22.972.675,00	608.942.895,00	550.015.185,00	409,97

No	Uraian	Realisasi (Rp)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
23	Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah				-3.044.714,48	-2.750.075,93	-1,61
24	Piutang Transfer Antar Daerah Netto				605.898.180,52	547.265.109,07	-1,61
25	Beban Dibayar Dimuka	178.433.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09
26	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	77.234.295,00	69.184.295,00	0,00	0,00	0,00	-18,40
27	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-77.234.295,00	-69.184.295,00	0,00	0,00	0,00	-18,40
28	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	3.563.635.110,30	2.617.330.178,51	0,00	0,00	0,00	6,02
30	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-1.064.448.425,68	-1.068.531.088,78	0,00	0,00	0,00	-9,03
31	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto	2.499.186.684,62	1.548.799.089,73	0,00	0,00	0,00	27,14
32	Piutang Lainnya	20.251.494.221,33	136.829.659.497,33	16.777.725.813,64	259.696.429.199,81	2.214.963.949,81	312,61
33	Penyisihan Piutang Lainnya	-3.224.645.005,14	-4.526.513.118,64	-1.181.985.368,45	-1.628.143.259,54	-1.946.384.934,00	5,45
34	Piutang Lainnya Netto	17.026.849.216,19	132.303.146.378,70	15.595.740.445,19	258.068.285.940,27	268.579.015,81	348,37
35	Persediaan	82.305.714.682,19	59.833.557.886,67	118.256.592.414,42	124.392.497.792,87	159.644.874.307,66	22,88
36	**JUMLAH ASET LANCAR**	**230.151.085.416,25**	**283.200.023.447,41**	**225.216.371.002,95**	**704.127.290.897,86**	**372.870.713.269,08**	**32,90**
37	**INVESTASI JANGKA PANJANG**						
38	**Investasi Non Permanen**						
39	Investasi Dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Investasi Non Permanen Lainnya	3.308.162.258,49	2.868.049.272,16	1.976.722.523,86	1.501.049.335,17	1.080.829.800,41	-32,20
41	**Jumlah Investasi Non Permanen**	**3.308.162.258,49**	**2.868.049.272,16**	**1.976.722.523,86**	**1.501.049.335,17**	**1.080.829.800,41**	**-32,20**
42	**Investasi Permanen**						
43	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	865.632.453.741,35	846.882.444.916,78	976.848.726.604,32	933.976.274.674,23	1.044.276.315.822,94	4,13
44	Investasi Permanen Lainnya	980.000.000,00	980.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-16,67
45	**Jumlah Investasi Permanen**	**866.612.453.741,35**	**847.862.444.916,78**	**976.848.726.604,32**	**933.976.274.674,23**	**1.044.276.315.822,94**	**4,11**
46	**JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG**	**869.920.615.999,84**	**850.730.494.188,94**	**978.825.449.128,18**	**935.477.324.009,40**	**1.045.357.145.623,35**	**3,87**
47	**ASET TETAP**						
48	Tanah	5.909.088.552.967,54	5.891.180.972.684,70	5.845.939.890.908,00	5.840.630.196.953,69	5.799.175.998.553,69	-0,15
49	Peralatan dan Mesin	1.965.861.435.478,88	2.175.550.185.207,61	2.546.070.955.072,16	2.757.200.560.375,09	2.966.626.094.199,25	15,72
50	Gedung dan Bangunan	2.722.935.924.145,81	2.861.281.647.814,81	3.179.822.635.782,19	3.395.864.542.864,36	3.556.053.084.879,72	11,05
51	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.727.271.860.969,01	4.882.537.039.559,01	5.724.641.179.832,03	5.911.434.432.661,29	6.057.936.344.994,29	11,68
52	Aset Tetap Lainnya	141.266.771.208,27	152.792.237.492,27	167.946.810.025,27	209.860.463.490,27	253.296.629.972,27	17,53
53	Konstruksi Dalam Pengerjaan	144.559.631.767,00	546.302.909.781,00	341.367.259.968,03	318.983.708.802,00	252.306.906.166,50	35,70

No	Uraian	Realisasi (Rp)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
54	Akumulasi Penyusutan	-4.018.802.691.845,66	-4.587.263.539.714,25	-5.246.626.958.360,34	-5.901.867.810.703,15	-6.556.296.179.181,50	15,72
55	**JUMLAH ASET TETAP**	**11.592.181.484.690,80**	**11.922.381.452.825,20**	**12.559.161.773.227,30**	**12.532.106.094.443,50**	**12.329.098.879.584,20**	**1,45**
56	**PROPERTY INVESTASI**						
57	Property Investasi			19.965.883.102,38	20.162.055.102,38	20.162.055.102,38	0,16
58	Akumulasi Penyusutan Property Investasi			-1.540.134.740,00	-1.701.952.500,00	-1.767.293.129,00	2,39
59	**JUMLAH PROPERTY INVESTASI**			**18.425.748.362,38**	**18.460.102.602,38**	**18.394.761.973,38**	**-0,03**
60	**ASET LAINNYA**						
61	Tuntuan Ganti Rugi				2.124.995.000,00	1.142.707.500,00	-7,70
62	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	121.077.954.720,00	118.046.029.720,00	118.046.029.720,00	135.305.857.802,38	108.183.002.700,00	-0,91
63	Aset Tak Berwujud	8.718.828.619,00	9.777.702.644,00	10.342.364.394,00	11.278.977.394,00	12.284.748.894,00	10,00
64	Amortisasi Aset Tak Berwujud	-6.733.402.034,00	-7.807.740.293,00	-8.686.631.740,00	-9.574.076.528,00	-10.431.501.585,00	15,07
65	Aset Tak Berwujud Netto	1.985.426.585,00	1.969.962.351,00	1.655.732.654,00	1.704.900.866,00	1.853.247.309,00	-4,00
66	Aset Lain-Lain	35.432.411.891,02	96.985.618.940,45	134.213.951.187,09	291.851.710.606,97	294.160.936.182,37	54,72
67	**JUMLAH ASET LAINNYA**	**158.495.793.196,02**	**217.001.611.011,45**	**253.915.713.561,09**	**430.987.464.275,35**	**405.339.893.691,37**	**19,80**
68	**JUMLAH ASET**	**12.850.748.979.303,00**	**13.273.313.581.473,00**	**14.035.545.055.281,90**	**14.621.158.276.228,50**	**14.171.061.394.141,40**	**2,13**
69	**KEWAJIBAN**						
70	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**						
71	Utang PFK	1.984.759.971,57	1.513.255.512,00	1.904.270.604,00	2.497.684.938,00	2.121.649.793,66	8.401,18
72	Utang Bunga	0,00	1.160.625.000,00	3.115.032.001,00	3.869.026.505,00	3.214.475.138,00	29,28
73	Bagian Lancar Pinjaman Jangka Panjang				122.798.734.824,00	122.798.734.824,00	0,00
74	Pendapatan diterima dimuka	737.233.850,00	508.897.184,00	2.203.176.051,50	1.607.717.859,33	1.368.603.849,33	42,20
75	Utang Jangka Pendek Lainnya	225.852.092.001,00	332.971.950.908,00	0,00	53.325.833,55	6.663.833,55	22,02
76	Utang Beban	52.206.233.679,00	161.399.370.167,00	0,00	0,00	0,00	803,57
77	Utang Belanja			632.180.327.591,18	564.714.971.759,14	176.310.297.556,56	-13,24
78	Utang Pinjaman Jangka Pendek				0,00	30.000.000.000,00	0,00
79	**Jumlah Kewajiban Jangka Pendek**	**280.780.319.501,57**	**497.554.098.771,00**	**639.402.806.247,68**	**695.541.461.719,02**	**335.820.424.995,10**	**66,17**
80	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**						
82	Utang Kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Utang Kepada Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	187.500.000.000,00	736.792.350.000,00	603.059.591.244,00	480.260.856.420,00	42,41
85	Utang Kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	**Jumlah Kewajiban Jangka Panjang**	**0,00**	**187.500.000.000,00**	**736.792.350.000,00**	**603.059.591.244,00**	**480.260.856.420,00**	**42,41**
87	**JUMLAH KEWAJIBAN**	**280.780.319.501,57**	**685.054.098.771,00**	**1.376.195.156.247,68**	**1.298.601.052.963,02**	**816.081.281.415,10**	**89,39**
88	**JUMLAH EKUITAS**	**12.569.968.659.801,40**	**12.588.259.482.702,00**	**12.659.349.899.034,30**	**13.322.557.223.265,50**	**13.354.980.112.726,30**	**1,37**

No	Uraian	Realisasi (Rp)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
89	JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS	12.850.748.979.303,00	13.273.313.581.473,00	14.035.545.055.281,90	14.621.158.276.228,50	14.171.061.394.141,40	2,13

Sumber: LRA Prov. NTB 2020-2024, diolah

Neraca atau laporan posisi keuangan menggambarkan tiga pos utama yaitu aset, kewajiban dan ekuitas daerah. Berikut ini gambaran umum Neraca Daerah Provinsi NTB yang disajikan menurut pos pembentuknya.

2.5.2.1 Aset

Rata-rata pertumbuhan aset daerah tahun 2020-2024 adalah sebesar 2,13 persen per tahun. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kepemilikan atau pengadaan aset oleh pemerintah daerah, kondisi ini tergolong moderat dan perlu dikaji lebih lanjut dari sisi kualitas dan produktivitas aset. Aset yang tumbuh belum tentu sejalan dengan peningkatan pemanfaatan atau kontribusinya terhadap pelayanan publik dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa aset yang bertambah tersebut benar-benar berfungsi optimal, terpelihara dengan baik, memiliki legalitas lengkap, dan dikelola dengan pendekatan ekonomi (misalnya melalui kerja sama pemanfaatan).

Nilai aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi NTB pada kurun waktu 2020-2024 mengalami kecenderungan ke arah yang positif, dengan rata-rata nilai mencapai Rp. 13,79 Triliun lebih dimana nilai aset daerah pada tahun 2024 yakni sebesar 14,171 Triliun lebih mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya atau turun sebesar 3,08 persen.

Grafik 2. 137 Perkembangan Aset Daerah Provinsi NTB Tahun 2020-2024

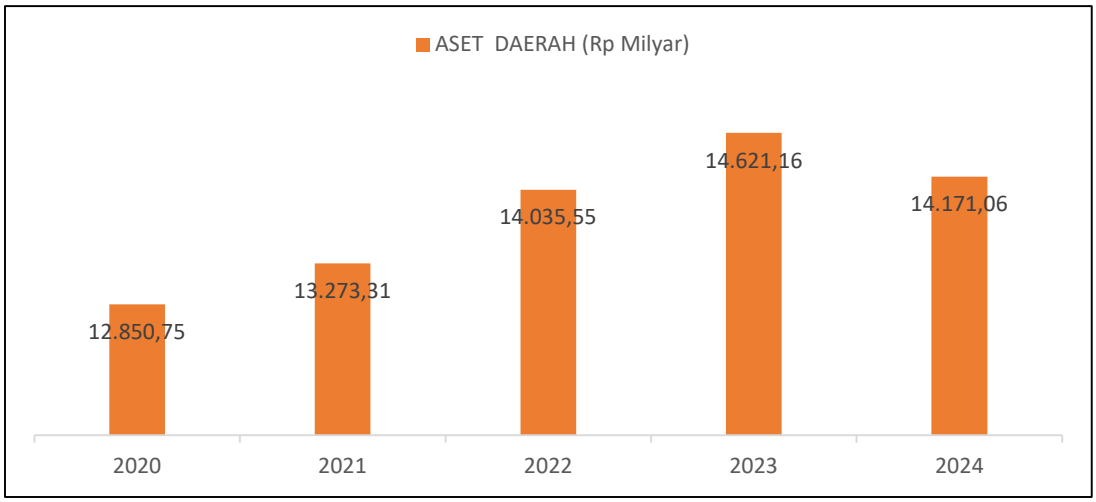

Sumber: LRA Prov. NTB 2020-2024, diolah

Rata-rata pertumbuhan untuk masing-masing jenis aset antara lain Aset Lancar rata-rata tumbuh sebesar 48,88 persen, Aset Tetap memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 2,06

persen, Investasi Jangka Panjang memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 2,29 persen dan Aset Lainnya memiliki kecenderungan naik dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 23,50 persen.

Grafik 2. 138 Rata-Rata Proporsi Komponen Aset Daerah Provinsi NTB Tahun 2020-2024

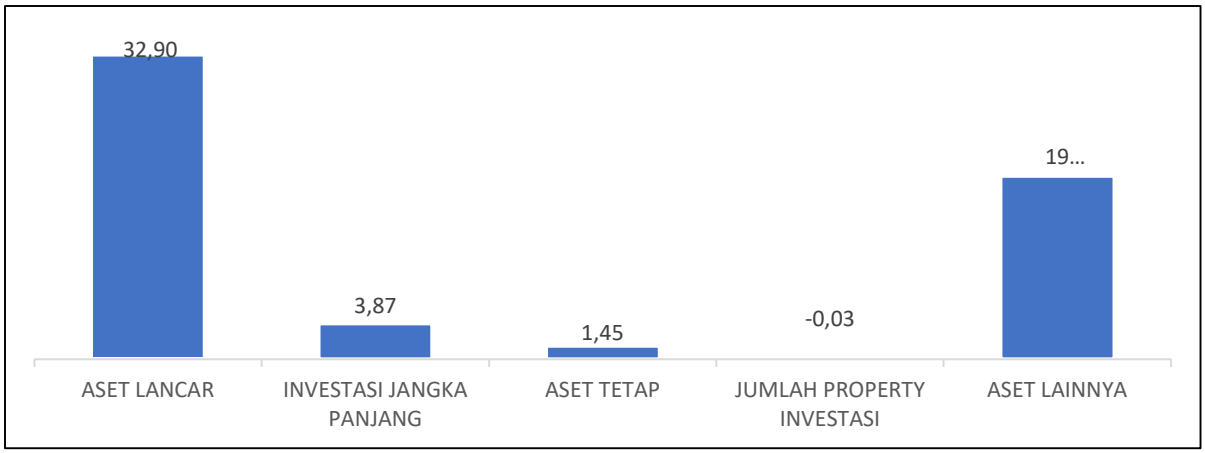

Sumber: LRA Prov. NTB 2020-2024, diolah

2.5.2.2 Kewajiban

Kewajiban yang dimiliki oleh Provinsi NTB pada tahun 2020-2024 terdiri atas kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek artinya adalah kewajiban yang jangka waktu penyelesaiannya maksimal satu periode atau satu tahun, sementara kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang jangka waktu penyelesaiannya lebih dari 1 tahun.

Grafik 2. 139 Perkembangan Kewajiban Daerah Provinsi NTB Tahun 2020-2024

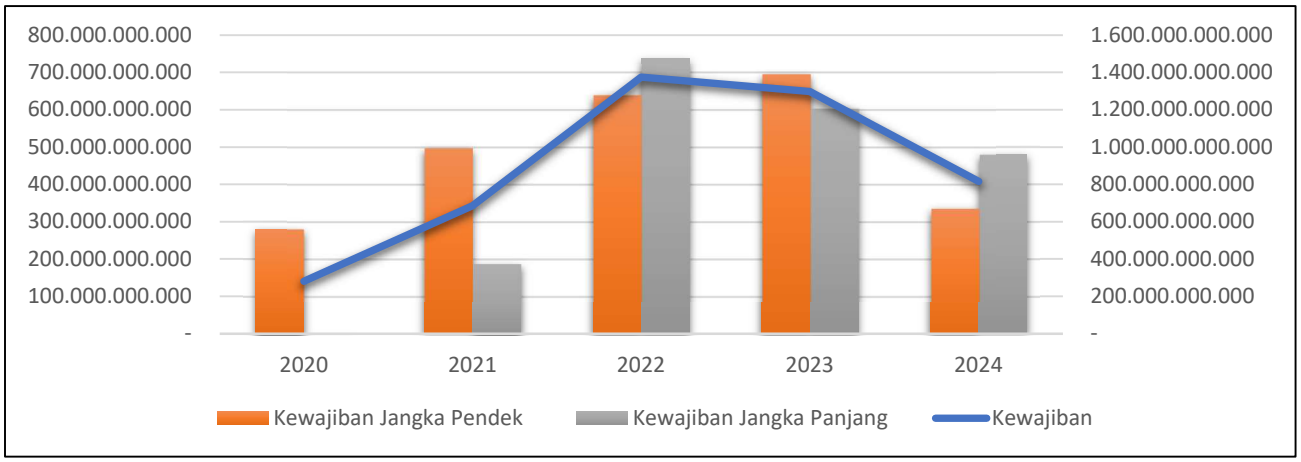

Sumber: LRA Prov. NTB 2019-2023, diolah

Kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi NTB selama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami kecenderungan menurun, dengan rata-rata pertumbuhan selama periode tersebut sebesar 89,39 persen dengan rata-rata nilai mencapai Rp. 891.342.381.779,67. Kewajiban ini berasal dari kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, dimana kewajiban daerah lebih didominasi oleh kewajiban jangka pendek dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 66,17 persen dan kewajiban jangka panjang dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 42,41 persen.

2.5.2.3 Ekuitas Dana

Jumlah Ekuitas Dana Provinsi NTB pada tahun 2020-2024 menunjukan hal yang positif dan terus bertumbuh. Rata-rata pertumbuhan ekuitas daerah selama lima tahun terakhir tercatat sebesar 1,37 persen.

Grafik 2. 140 Perkembangan Ekuitas Dana Provinsi NTB Tahun 2020-2024

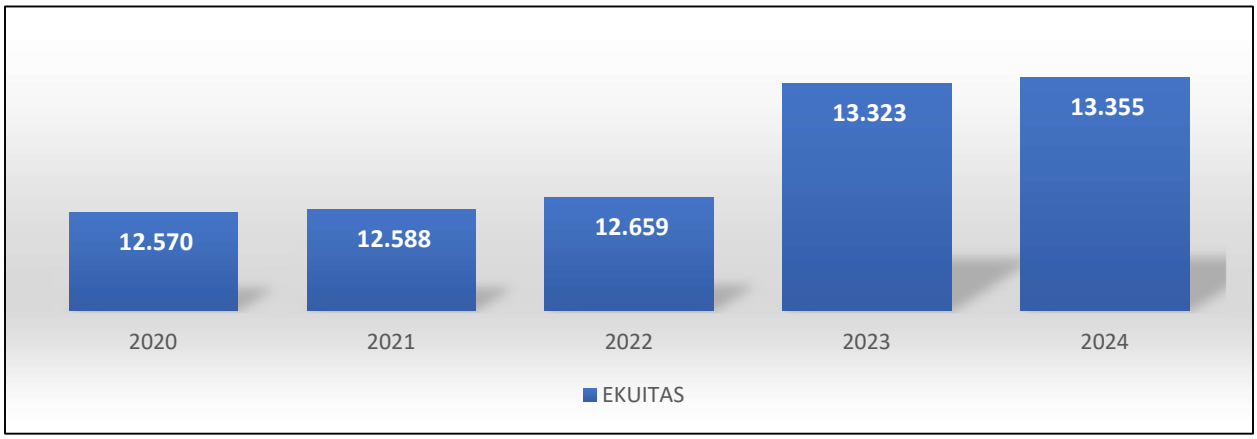

Sumber: LRA Prov. NTB 2020-2024, diolah

Ekuitas daerah Provinsi NTB pada lima tahun terakhir menunjukan tren yang meningkat. Ekuitas daerah pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 12.570 Milyar lebih kemudian meningkat hingga mencapai angka Rp 13.355 Milyar lebih pada tahun 2024.

Pertumbuhan ekuitas daerah sebesar 1,37 persen per tahun mencerminkan peningkatan kekayaan bersih pemerintah daerah setelah dikurangi kewajiban. Namun, laju pertumbuhan ini tergolong karena ekuitas yang tumbuh lambat juga bisa menjadi sinyal perlunya peningkatan produktivitas aset daerah dan penguatan kebijakan fiskal.

2.5.3 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode sebelumnya, kebijakan pengelolaan keuangan daerah umumnya difokuskan pada peningkatan kemandirian fiskal, efektivitas pengelolaan anggaran, dan akuntabilitas dalam pengeluaran.

RPJMD merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan strategis lima tahunan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing.

Secara umum kebijakan pengelolaan keuangan terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diharapkan memanfaatkan dan mengoptimalkan setiap potensi pendapatan daerah yang digunakan untuk mendanai belanja daerah dengan efektif dan efisien guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan pengelolaan keuangan pada APBD Provinsi NTB periode RPJMD lalu diuraikan sebagai berikut:

1. Kebijakan Pendapatan

   Kebijakan pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara nasional, dan memiliki kepastian, serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan pendapatan daerah tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari: sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan. Untuk meningkatkan pendapatan daerah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

   a. Memantapkan kelembagaan melalui peningkatan peran dan fungsi UPT dan Perangkat Daerah Penghasil.
   b. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.
   c. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama antara pusat-daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non perimbangan.
   d. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi.
   e. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional.
   f. Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan.
   g. Pemantapan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.
   h. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima

   Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan dana perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah sebagai berikut:

   a. Mengoptimalkan penerimaan pajak orang pribadi dalam negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21, pajak ekspor, dan PPh Badan;
   b. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana perimbangan; dan

c. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat untuk dana perimbangan dan Kab/Kota untuk obyek pendapatan sesuai wewenang provinsi.

Peningkatan PAD adalah salah satu fokus utama dalam RPJMD periode sebelumnya, dengan tujuan mengurangi ketergantungan daerah pada dana transfer dari pemerintah pusat melalui :

a. Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah: Daerah didorong untuk memaksimalkan penerimaan dari pajak dan retribusi yang sesuai dengan potensi wilayahnya, termasuk sektor pariwisata, perikanan, dan industri lokal.
b. Pemanfaatan Aset Daerah: Pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah ditingkatkan agar aset-aset yang tidak terpakai atau kurang produktif dapat dioptimalkan, baik melalui penyewaan, kerja sama pemanfaatan, atau penjualan aset yang tidak diperlukan.
c. Pengembangan Sumber Pendapatan Baru: Banyak daerah memulai diversifikasi sumber pendapatan dari sektor lain, seperti pariwisata dan industri kreatif, agar PAD dapat terus bertumbuh secara berkelanjutan.

2. Kebijakan Belanja

RPJMD periode sebelumnya mengarahkan alokasi anggaran daerah pada program prioritas yang sesuai dengan visi dan misi kepala daerah yang menekankan pada efisiensi belanja daerah agar dana yang dialokasikan dapat digunakan dengan efektif dan tepat sasaran seperti penerapan anggaran berbasis kinerja yang menekankan pada capaian output dan outcome dari setiap program, pengurangan belanja pegawai yang berlebihan dan lebih memprioritaskan untuk belanja publik dan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan, terutama di daerah tertinggal, peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan serta Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Ekonomi Lokal melalui program-program untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta program kesejahteraan sosial yang diperkuat untuk meningkatkan ekonomi daerah dan mengurangi angka kemiskinan.

Kebijakan pengelolaan keuangan belanja daerah juga berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi keuangan dalam rangka menciptakan tata kelola yang baik melalui penerapan sistem akuntansi untuk memperoleh laporan keuangan pemerintah daerah yang lebih transparan dan akurat dan penguatan peran pengawasan dan Audit sebagai dasar penilaian kinerja daerah dalam penggunaan anggaran.

Kebijakan belanja daerah, sebagai berikut:

a. Memprioritaskan belanja untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dan pilihan;
b. Memprioritaskan pemenuhan rencana pembangunan RPJMD Tahun 2019-2023;

c. Sinkronisasi prioritas pembangunan RPJMN Tahun 2019-2024 dan RPJMD Tahun 2019-2023;
d. Pendukungan terhadap pencapaian Millenium Development Goals (MDG`s) dan Sustainable Development Goals (SDG's);
e. Pemenuhan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Belanja Daerah;
f. Pemenuhan anggaran fungsi kesehatan sekurang-kurangnya 10 persen dari total belanja APBD;
g. Pemenuhan anggaran fungsi infrastruktur sekurang-kurangnya 40 persen;
h. Pengalokasian Bantuan keuangan Kab/Kota, bantuan desa, hibah, Bansos dan subsidi sebagai implementasi kebijakan perimbangan keuangan antara provinsi dan Kab/Kota;
i. Pengalokasian Anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Belanja Operasional Sekolah (BOS) Pusat, Pajak Rokok sesuai dengan peruntukan yang di tetapkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
j. Mengalokasikan anggaran untuk kepentingan nasional serta kebutuhan penting dan mendesak lainnya.

3. Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan sehingga terdapat defisit.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan sebagai berikut:

a. Pemerintah daerah dapat melakukan percepatan pembangunan (khususnya melalui peningkatan pelayanan publik);
b. Adanya unsur keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah akan menjadi daya dukung tersendiri bagi pemerintah daerah;
c. Peningkatan ekonomi daerah melalui penyediaan layanan umum yang menunjang aktivitas perekonomian;
d. Kebijakan utang daerah diatur lebih ketat, dengan batasan utang maksimum berdasarkan kapasitas fiskal dan proyeksi pendapatan daerah. Tujuannya agar utang tidak mengganggu stabilitas keuangan jangka panjang

2.5.3.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Provinsi NTB pada periode tahun anggaran sebelumnya. Hasilnya digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam

rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah serta untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang.

Penggunaan anggaran belanja daerah diantaranya adalah untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Pemerintah Daerah Provinsi NTB, realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Grafik 2. 141 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi NTB Tahun 2020-2024

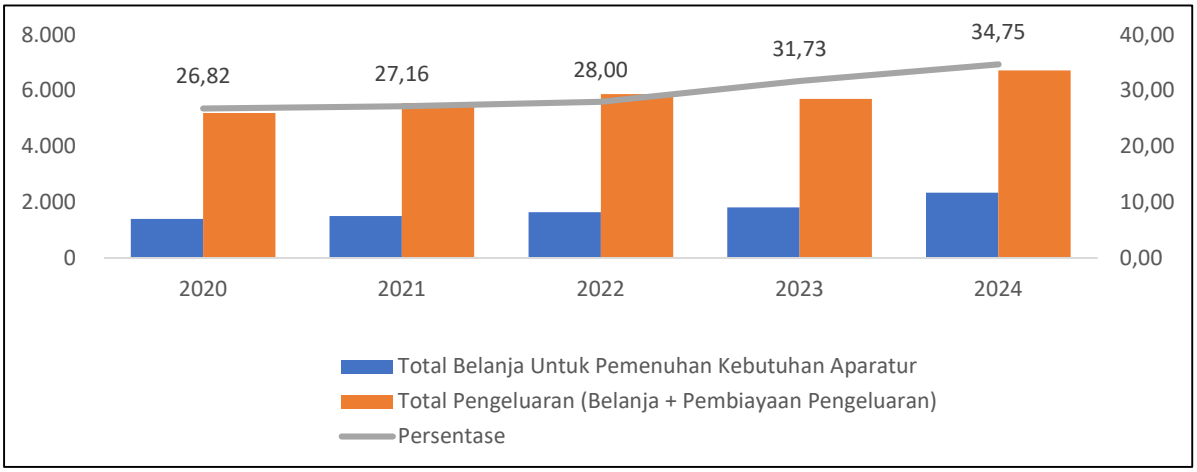

Sumber: LRA Prov. NTB 2020-2024, diolah

Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, dengan rata-rata belanja mencapai 29,92 persen. Pemenuhan terbesar untuk kebutuhan aparatur atau belanja pegawai adalah 31,73 persen atau Rp. 5.697 Milyar lebih yang terjadi pada tahun 2023, kondisi ini melebihi dari ketentuan belanja pegawai yang dipersyaratkan Kementerian Keuangan yakni maksimal 30 persen. Diharapkan tidak terjadi peningkatan kembali untuk belanja pegawai pada tahun-tahun berikutnya agar tidak berakibat pada kurang optimalnya pelayanan dan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.

2.5.3.2 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Realisasi pengeluaran wajib dan mengikat adalah sebagai berikut.

Grafik 2. 142 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Provinsi NTB Tahun 2020–2024 (Miliar Rupiah)

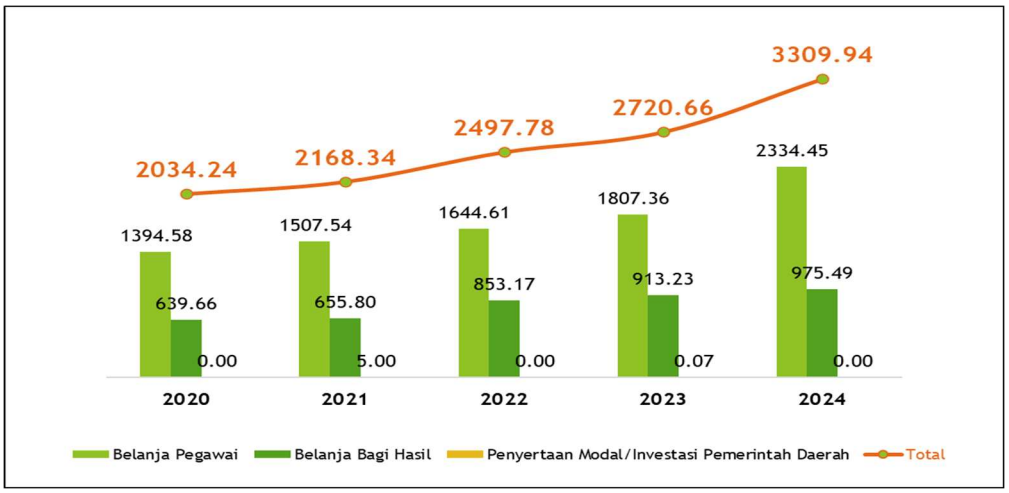

Sumber: LRA Prov. NTB 2020-2024, diolah

Selama periode tahun 2020-2024 pengeluaran periodik wajib dan mengikat mengalami kecenderungan meningkat. Pengeluaran terbesar adalah pada komponen belanja pegawai yang mengalami peningkatan cukup signifikan setiap tahunnya. Kemudian belanja wajib mengikat lainnya adalah belanja bagi hasil kepada Kab/Kota yang juga mengalami tren peningkatan. Sementara untuk penyertaan modal terjadi pada tahun 2021 dan 2023.

Grafik 2. 143 Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi NTB Tahun 2020-2024

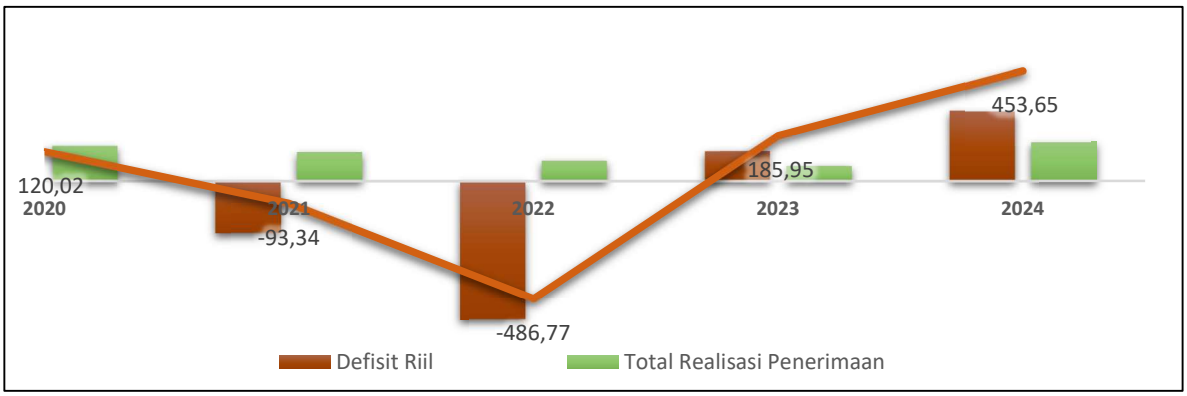

Sumber: LRA Prov. NTB 2020-2024, diolah

Perencanaan penganggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran pada tahun 2020-2024 menunjukkan nilai yang fluktuatif, nilai sisa lebih anggaran tertinggi mencapai Rp 453,65 Milyar Lebih pada tahun 2024 sementara itu sisa lebih anggaran juga pernah terjadi sampai pada level minus yakni Rp. 486,77 Milar lebih pada tahun 2022. Rincian SiLPA selama periode tahun 2020 – 2024 adalah berupa kas sebagai penerimaan pembiayaan yang terdiri dari :

a. Kas di Kas Daerah
b. Kas di Bendahara Penerimaan
c. Kas di Bendahara Pengeluaran
d. Kas di BLUD
e. Kas di Bendahara BOS
f. Kas Lainnya

2.5.4 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan daerah merupakan acuan dalam menyusun strategi pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah sesuai dengan prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kerangka ini mencakup berbagai sumber dana yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk mendanai program pembangunan, baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer dari pemerintah pusat, maupun sumber pendanaan lain seperti pinjaman daerah dan kerja sama swasta. Kerangka pendanaan daerah memainkan peran penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program pembangunan.

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan yang dialokasikan kedalam 3 (tiga) prioritas yaitu :

a. Prioritas Pertama, untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;
b. Prioritas Kedua, untuk membiayai belanja pemenuhan visi misi Kepala Daerah;
c. Prioritas Ketiga, untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

2.5.4.1 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah 2026 – 2030

Berdasarkan hasil analisis tren realisasi keuangan daerah selama periode 2020–2024, dapat diproyeksikan perkembangan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah pada periode tahun 2026–2030. Proyeksi ini disusun dengan mempertimbangkan arah kebijakan fiskal nasional, asumsi makro ekonomi daerah, serta dinamika kebutuhan pembangunan.

a. Kemandirian Fiskal Pemerintah Provinsi NTB cukup tinggi selama periode tahun 2020-2024 sebesar 59,86 persen, dengan demikian kondisi ini akan lebih ditingkatkan kembali pada periode selanjutnya dengan memaksimalkan komponen-komponen pendapatan asli daerah seperti Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan memperhatikan

peraturan perundangan dan karakteristik Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi. PAD Dihitung berdasarkan tren historis dengan penyesuaian faktor-faktor seperti penambahan obyek pajak dan tarif serta meningkatkan potensi PAD melalui pemutakhiran basis data wajib pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, penyesuaian tarif pajak dan retribusi, peningkatan deviden BUMD serta optimalisasi aset.

b. Proyeksi transfer dari pusat dapat dilihat dari kebijakan fiskal nasional, terutama jika pemerintah pusat merencanakan untuk meningkatkan alokasi DAU atau DAK. Proyeksi DBH didasarkan pada harga komoditas utama seperti minyak bumi atau gas, jika daerah memiliki hasil sumber daya alam.
c. Proyeksi komponen Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dilakukan berdasarkan kesepakatan atau MoU yang telah ada dengan pihak pemberi dana atau donor serta konsolidasi dengan perusahaan tambang yang beroperasi di NTB. Proyeksi ini dapat ditingkatkan dengan upaya memperluas jejaring dan kerja sama internasional atau dengan sektor swasta.
d. Proyeksi belanja daerah dilakukan berdasarkan prioritas yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta memperhitungkan tren belanja di tahun-tahun sebelumnya (analisis historis) dengan memprediksi kebutuhan pengeluaran daerah untuk periode mendatang seperti belanja yang sifatnya rutin (belanja pegawai atau belanja barang), efektivitas dan efisiensi belanja daerah di masa lalu, untuk mengidentifikasi program yang memerlukan alokasi lebih besar atau lebih kecil serta mencari peluang untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, kemampuan pendapatan daerah, pendekatan kebutuhan dengan memperhitungkan target dan prioritas pusat dan daerah yang tergambarkan pada RPJMN, RPJMD dan RKP serta RKPD. Selain itu proyeksi yang dilakukan juga berdasarkan faktor-faktor eksternal seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah pusat, yang dapat memengaruhi besaran dana yang dialokasikan ke daerah, serta memproyeksikan belanja modal dengan memastikan bahwa pengeluaran tersebut akan memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan dalam jangka panjang.
e. Pembiayaan daerah digunakan untuk menutupi defisit anggaran atau membiayai kegiatan investasi dalam rangka mendukung pelaksanaan APBD. Proyeksi pembiayaan daerah dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan biaya, kebutuhan investasi yang telah diidentifikasi dalam dokumen perencanaan, analisa terhadap kapasitas fiskal dan kemampuan daerah dalam membayar utang dan memenuhi kewajiban lainnya serta analisa terhadap potensi SiLPA atau sisa lebih anggaran yang dapat digunakan sebagai penutup defisit dengan mempertimbangkan saldo anggaran yang tidak terpakai akibat penghematan atau efisiensi belanja.

Namun demikian dalam melakukan proyeksi juga tetap memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh seperti kondisi ekonomi makro (pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar dan sektor ekonomi) yang berdampak langsung pada penerimaan pajak dan retribusi daerah. Selain itu dengan tetap memperhatikan kebijakan fiskal pemerintah pusat, seperti perubahan dalam alokasi dana transfer, pajak daerah, dan retribusi, akan berpengaruh langsung pada jumlah pendapatan daerah, penggunaan belanja dan pembiayaan daerah.

Tabel 2. 131 Proyeksi Kerangka Pendanaan Daerah Provinsi NTB
Tahun 2026 - 2030

Uraian	Baseline	Target RPJMD				
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
Pendapatan	**6.186.148.954.375,00**	**6.557.466.967.649,64**	**6.861.984.074.055,57**	**7.189.315.786.399,28**	**7.549.091.840.623,91**	**7.912.690.824.501,04**
Pendapatan Asli Daerah	**2.513.229.453.125,00**	**2.973.055.155.566,64**	**3.201.929.983.848,57**	**3.453.322.925.857,28**	**3.736.857.858.168,91**	**4.023.955.868.434,16**
Pendapatan Transfer	**3.462.818.364.000,00**	**3.365.702.781.088,00**	**3.436.790.835.532,00**	**3.508.066.292.794,00**	**3.579.531.030.572,00**	**3.651.410.883.317,88**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**3.459.852.889.000,00**	**3.362.446.464.888,00**	**3.433.485.674.632,00**	**3.504.711.554.494,00**	**3.576.125.971.172,00**	**3.647.954.759.117,88**
Pendapatan Transfer Antar Daerah	**2.965.475.000,00**	**3.256.316.200,00**	**3.305.160.900,00**	**3.354.738.300,00**	**3.405.059.400,00**	**3.456.124.200,00**
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	**210.101.137.250,00**	**218.709.030.995,00**	**223.263.254.675,00**	**227.926.567.748,00**	**232.702.951.883,00**	**237.324.072.749,00**
Belanja	**6.218.298.929.286,00**	**6.434.668.241.657,64**	**6.739.185.348.063,57**	**7.066.517.060.407,28**	**7.426.293.114.631,91**	**7.789.892.098.509,04**
Belanja Operasi	**4.686.988.594.675,00**	**4.872.868.730.440,30**	**5.015.136.477.916,13**	**5.244.202.732.621,56**	**5.532.671.581.905,97**	**5.854.825.472.405,97**
Belanja Pegawai	2.490.695.599.610,00	2.616.786.869.388,38	2.654.122.606.776,15	2.673.934.445.877,79	2.734.343.462.565,96	2.775.358.614.504,45
Belanja Barang dan Jasa	2.040.484.412.766,00	2.071.795.755.599,91	2.107.539.229.126,16	2.316.949.004.648,79	2.540.427.625.825,72	2.816.892.881.013,35
Belanja Bunga	34.956.621.056,00	34.956.621.056,00	45.305.524.288,32	45.065.405.009,60	45.741.386.084,74	46.427.506.876,01
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	116.833.961.243,00	142.261.614.396,00	200.734.237.718,00	200.934.237.718,00	204.952.922.472,36	209.051.980.921,81
Belanja Bantuan Sosial	4.018.000.000,00	7.067.870.000,00	7.434.880.007,50	7.319.639.367,38	7.206.184.957,19	7.094.489.090,35
Belanja Modal	**571.541.348.013,00**	**712.917.210.928,55**	**844.991.412.517,93**	**911.767.498.428,02**	**950.211.242.838,24**	**967.327.927.346,12**
Belanja Tidak Terduga	**161.606.865.872,00**	**20.000.000.000,00**	**20.000.000.000,00**	**20.000.000.000,00**	**20.000.000.000,00**	**20.000.000.000,00**
Belanja Transfer	**798.162.120.726,00**	**828.882.300.288,80**	**859.057.457.629,51**	**890.546.829.357,70**	**923.410.289.887,69**	**947.738.698.756,96**

Uraian	Baseline	Target RPJMD				
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
Belanja Bagi Hasil	797.478.620.726,00	828.198.800.288,80	858.373.957.629,51	889.863.329.357,70	922.726.789.887,69	947.055.198.756,96
Belanja Bantuan Keuangan	683.500.000,00	683.500.000,00	683.500.000,00	683.500.000,00	683.500.000,00	683.500.000,00
Surplus / (Defisit)	**-32.149.974.911,00**	**122.798.725.992,00**	**122.798.725.992,00**	**122.798.725.992,00**	**122.798.725.992,00**	**122.798.725.992,00**
Pembiayaan						
Penerimaan Pembiayaan	**154.948.700.903,00**	**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**
Pengeluaran Pembiayaan	**122.798.725.992,00**	**127.798.725.992,00**	**127.798.725.992,00**	**127.798.725.992,00**	**127.798.725.992,00**	**127.798.725.992,00**
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	122.798.725.992,00	122.798.725.992,00	122.798.725.992,00	122.798.725.992,00	122.798.725.992,00	122.798.725.992,00
Pembiayaan Netto	**32.149.974.911,00**	**-122.798.725.992,00**	**-122.798.725.992,00**	**-122.798.725.992,00**	**-122.798.725.992,00**	**-122.798.725.992,00**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Sumber : TAPD Provinsi NTB (diolah, 2025)

A. Proyeksi Pendapatan

Pendapatan daerah untuk kurun waktu lima tahun ke depan diproyeksikan akan tumbuh 4,44 – 5,66 persen atau rata-rata tumbuh 4,80 persen lebih rendah dibandingkan tren pertumbuhan selama periode sebelumnya yang mencapai 4,76 persen. Pertumbuhan pendapatan daerah tersebut dipengaruhi oleh diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) terutama dengan adanya penerapan opsen pajak untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan bermotor (BBNKB) serta opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang merupakan salah satu jenis pajak baru untuk provinsi. Dengan diberlakukannya UU HKPD maka dalam proyeksi pendapatn daerah lima tahun ke depan bagi hasil pajak dalam bentuk opesen untuk kabuoaten/kota sudah dipisahkan sejak awal. Hal ini mengakibatkan secara kumulatif pendapatan daerah menurun, namun Pendapatan Asli Daerah meningkat.

Proyeksi untuk Pendapatan Daerah menggunakan dua pendekatan alterhatif yaitu alternatif 1 (satu), Peningkatan Pendapatan Daerah mengalami pertumbuhan sebesar 3.59 persen, sedangkan pada alternatif 2 (dua) peningkatan pendapatan Daerah tumbuh sebesar 4,76 persen. Kedua alternatif tersebut didasarkan pada optimalisasi potensi sumber-sumber pendapatan yang berasal dari pajak dan retribusi. Pada alternatif 1 (satu) peningkatan PAD menggunakan beberapa asumsi yaitu : (a) pertambahan jumlah kendaraan baru rata-rata mencapai 133.400 per tahun dengan tingkat kepatuhan pajak sebesar 50 persen; (b) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Kendaraan Bermotor (PBBKB) proyeksi peningkatan sebesar 5 persen sesuai dengan peningkatan kebutuhan bahan bakar; (c) Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok mengalami peningkatan masing-masing sebesar 3 persen dengan menggunakan tarif yang lama untuk Pajak Air Permukaan; (d) untuk Pajak Alat Berat dan opsen mineral bukan logam dan batuan (MBLB) diasumsikan sesuai dengan potensi di masing-masing Kab/Kota dan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1 persen setiap tahun. Adapun untuk alternatif 2 (dua) asumsi yang digunakan adalah : (a) pertambahan jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya sebesar 2 persen hingga 4 persen dari tahun 2026-2030 dari jumlah 137.624 kendaraan baru di tahun 2025; (b) Tingkat kepatuhan pajak meningkat setiap tahunnya dari 58,79 persen di tahun 2026 menjadi 76,07 persen di tahun 2030. Tingkat kepatuhan ini dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu mempertahankan pendaftaran ulang untuk kendaraan yang sudah melakukan daftar ulang maupun kendaraan baru hingga 95 persen dari potensi, meningkatkan kepatuhan kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang (TMDU) 1-5 tahun hingga 20 persen, serta meningkatkan kepatuhan kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang (TMDU) lebih dari 5 tahun hingga 5 persen dari potensi; (c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor, Pajak Air Permukaan, pajak Rokok, Pajak Alat Berat maupun opsen MBLB menggunakan asumsi yang sama dengan alternatif 1.

Untuk retribusi daerah diproyeksikan meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 1,68 hingga 1,77 persen berdasarkan potensi yang ada saat ini. Peningkatan tersebut bersumber dari peningkatan retribusi jasa umum sebesar 1,49 persen dan peningkatan retribusi jasa usaha sebesar 4,65 persen. Sementara untuk hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan berupa deviden BUMD diproyeksikan meningkat dengan rata-rata 7,83 persen dengan asumsi pemenuhan kebutuhan modal inti dipenuhi secara bertahap untuk masing-masing BUMD sesuai dengan ketentuan paraturan perundang-undangan. Adapun untuk Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan meningkat dengan rata-rata 17,43 persen, terutama dengan mendorong peningkatan pendapatan yang bersumber dari pendapatan BLUD serta kerjasama pemanfaatan aset daerah.

Berdasarkan tabel APBD tahun 2025 (Revisi 2) dan target RPJMD untuk tahun 2026 dan 2030, terlihat adanya tren pertumbuhan baik pada sisi pendapatan maupun belanja daerah Provinsi NTB. Pada tahun 2025, total pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp6,19 triliun, yang sebagian besar berasal dari pendapatan transfer, yakni mencapai Rp3,46 triliun atau sekitar 56% dari total pendapatan. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat sebesar Rp2,51 triliun, menunjukkan kontribusi yang signifikan namun masih di bawah pendapatan transfer.

Memasuki tahun 2026, proyeksi pendapatan daerah meningkat menjadi antara Rp6,43 hingga Rp6,56 triliun. Kenaikan ini sebagian besar didorong oleh peningkatan PAD dan stabilitas pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Pada tahun 2030, target pendapatan daerah diharapkan meningkat lebih tinggi, yaitu antara Rp7,43 triliun hingga Rp7,91 triliun, yang mencerminkan proyeksi pertumbuhan fiskal yang cukup optimis seiring dengan peningkatan PAD hingga di atas Rp4 triliun.

Kebijakan fiskal daerah dirancang untuk mengakomodasi pertumbuhan belanja seiring dengan meningkatnya kapasitas fiskal daerah. Namun demikian, keberlanjutan fiskal tetap harus dijaga melalui optimalisasi pendapatan asli daerah dan pengelolaan pembiayaan yang hati-hati, terutama mengingat ketergantungan yang masih tinggi terhadap transfer pusat dan risiko defisit yang dapat timbul jika realisasi pendapatan tidak sesuai target.

Dalam upaya pencapaian rencana Pendapatan Daerah diatas, beberapa langkah yang dilakukan antara lain:

1. Optimalisasi sumber-sumber penerimaan PAD melalui peningkatan kapasitas administrasi dan sistem pemungutan PAD;
2. Mendorong pengembangan sektor unggulan lokal yang berpotensi besar memberikan kontribusi PAD untuk memperkuat basis penerimaan daerah, seperti pengembangan KIHT (Kawasan Industri Hasil Tembakau), pengembangan KAIWS (Kawasan Agro Industri Wisata STIP), Samsat Perikanan, pengembangan sektor lingkungan hidup dan

kehutanan, pengembangan destinasi wisata olahraga, pengembangan terminal sehat, pengembangan pabrik es kapasitas 15 ton dan lain-lain;

3. Melaksanakan program edukasi dan sosialsiasi kepada wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran dalam pembayaran pajak daerah.
4. Pemutakhiran data potensi pendapatan asli daerah yang berkelanjutan;
5. Intensifikasi dan ekstensifikasi objek pendapatan daerah yang lebih efektif.
6. Intensifikasi dan ekstensifikasi objek pendapatan daerah yang lebih efektif.
7. Standarisasi dan Sertifikasi Prosedur Pelayanan;
8. Meningkatkan kapasitas administrasi dan sistem pemungutan PAD optimalisasi pendapatan daerah.
9. Peningkatan penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/Bukan Pajak bekerjasama dengan Pemerintah Kab/Kota dan instansi terkait.
10. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pajak dan retribusi daerah, serta menyusun kebijakan insentif berbasis kinerja untuk pelaku usaha dan wajib pajak strategis agar dapat mendorong peningkatan PAD sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.
11. Memperkuat dukungan kepada BUMD melalui penyehatan BUMD dan pemenuhan modal inti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar dapat meningkatkan kontribusi devidennya.
12. Memperkuat strategi pengelolaan fiskal yang mandiri dengan mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat melalui peningkatan efisiensi dan inovasi pendapatan asli daerah.
13. Optimalisasi pengelolaan Pendapatan transfer dengan memenuhi aspek kepatuhan dalam penyampaian laporan serta berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat.
14. Memanfaatkan keberadaan KEK Mandalika dan event-event internasional untuk meningkatkan perekonomian daerah.
15. Mempercepat pemenuhan syarat salur DAK Fisk sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan agar transfer dari pemerintah pusat ke daerah berjalan optimal dan kegiatan yang diprogramkan dapat segera berjalan.

B. Proyeksi Belanja

Komposisi belanja daerah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja daerah diproyeksikan mengalami penurunan dalam kurun waktu lima tahun ke depan jika dibandingkan periode tahun sebelumnya yakni sebesar 0,48 persen dari tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 yang diarahkan pada tema Penguatan Landasan Transformasi sebagai tahap pertama dalam perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPD) NTB.

Di sisi belanja, total belanja daerah tahun 2025 mencapai Rp6,22 triliun, dengan mayoritas dialokasikan untuk belanja operasi (sekitar Rp4,69 triliun), yang mencakup belanja pegawai, barang dan jasa, serta hibah dan bantuan sosial. Belanja modal tercatat sebesar Rp571,45 miliar atau sekitar 9% dari total belanja. Untuk tahun 2026 dan 2030, belanja daerah diproyeksikan meningkat seiring dengan kenaikan pendapatan, dengan estimasi mencapai hingga Rp6,34 triliun pada 2026 dan Rp7,69 triliun pada 2030. Kenaikan belanja operasi dan belanja modal menjadi indikator utama dari ekspansi pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.

Kebijakan belanja daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun kebijakan belanja daerah Provinsi NTB, sebagai berikut:

1. Dialokasikan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat meliputi: Belanja Pegawai, BLUD; Belanja Penunjang seperti Listrik, Air, Telepon/Internet; Belanja Pemeliharaan Gedung/Kendaraan; Belanja Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor; dan Belanja Program dan Kegiatan yang sudah diarahkan.
2. Dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar.
   a. Prioritas pembangunan daerah Provinsi NTB Tahun 2025-2029
   b. Pemenuhan sasaran pembangunan dalam rangka perwujudan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2025-2029.
   c. Penerapan standar pelayanan minimal (SPM) kewenangan Provinsi
3. Pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)*.
4. Sinkronisasi prioritas pembangunan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
5. Penggunaan dana fungsi pendidikan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan, dana fungsi kesehatan dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan, dana fungsi infrastruktur untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrim dan pengendalian inflasi.
6. Dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya untuk mendanai program-program perangkat daerah yang menjadi kewenangan provinsi namun tidak menjadi prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2026-2030, serta merupakan program pendukung penyelenggaraan perkantoran.
7. Isu strategis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Mendorong alternatif pembiayaan untuk menambah porsi belanja modal/infrastruktur, antara lain pemanfaatan pinjaman daerah dan menjalin kerjasama dengan badan usaha (KPBU).

9. Pengurangan proporsi belanja rutin untuk menaikkan porsi belanja modal.
10. Membentuk dana cadangan APBD khusus keadaan darurat.
11. Menerapkan kontrak kerja lintas perangkat daerah berbasis keluaran agar pertumbuhan belanja tetap berkualitas, ketahanan fiskal terjaga dan proyek infrastruktur strategis berjalan tanpa mengabaikan layanan dasar.
12. Menerapkan skema keseimbangan layanan dasar dengan menaikkan porsi belanja perlindungan sosial dan kesehatan.
13. Mempertahankan belanja pendidikan serta meningkatkan tambahan dana infrastruktur pada capaian mutu layanan publik sehingga pembangunan fisik, kesehatan, pendidikan dan jaringan pengaman sosial tumbuh selaras di seluruh wilayah.

C. Proyeksi Pembiayaan

Pembiayaan daerah diarahkan pada penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pada pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan untuk pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo. Pada Tahun 2025 terdapat defisit anggaran sebesar Rp32,1 miliar yang ditutup melalui pembiayaan netto dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp154,95 miliar. Di sisi lain, pengeluaran pembiayaan sebesar Rp122,8 miliar digunakan sepenuhnya untuk pembayaran cicilan pokok utang jatuh tempo. Untuk periode 2026-2030, penerimaan pembiayaan diproyeksikan pada komponen SiLPA sebesar 5 Milyar, sementara untuk pengeluaran pembiayaan diproyeksikan untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo dimana pada tahun 2026-2030 merupakan periode terakhir untuk pembayaran hutang yang dimiliki oleh provinsi NTB di PT. SMI selain itu pengeluaran pembiayaan direncanakan juga untuk Penyertaan Modal di BUMD Provinsi NTB.

Agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebagai sumber pembiayaan yang efisien.
2. Mengembangkan mekanisme penerimaan pembiayaan melalui pinjaman daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memastikan pinjaman memberikan dampak sosial dan ekonomi yang nyata kepada masyarakat.
3. Mendorong optimalisasi peran provinsi dalam penggunaan pembiayaan, antara lain melalui penyertaan modal sehingga dapat memberikan dampak yang optimal.

Sementara untuk kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah sebagai berikut:

1. Memanfaatkan peluang penyertaan modal daerah untuk mendukung pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau investasi strategis lainnya dengan memperhatikan skala prioritas dan kebutuhan daerah.
2. Mengelola risiko pembiayaan, terutama dalam hal pinjaman daerah, dengan mempertimbangkan kemampuan membayar kembali utang (*debt service ratio*).
3. Mengarahkan pembiayaan pada sektor-sektor unggulan daerah yang berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
4. Menghindari pembiayaan yang tidak produktif atau yang memiliki dampak jangka panjang negatif terhadap stabilitas fiskal daerah.
5. Pembentukan dana cadangan

D. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah perlu dilakukan sebagai dasar untuk menghitung kebutuhan pembiayaan program yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi misi Kepala Daerah dan pelaksanaan urusan pemerintah daerah.

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Provinsi NTB pada periode proyeksi 2026–2030 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Berdasarkan perhitungan, pendapatan daerah diproyeksikan tumbuh stabil dari sebesar Rp6,557 triliun pada tahun 2026 menjadi Rp7,913 triliun pada tahun 2030. Kondisi ini menggambarkan adanya potensi penguatan kapasitas fiskal, baik melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dari dana transfer pemerintah pusat. Penerimaan pembiayaan diperkirakan relatif kecil dan cenderung stagnan pada kisaran Rp5 miliar per tahun, yang menunjukkan bahwa strategi fiskal daerah lebih diarahkan pada pemanfaatan pendapatan riil daripada ketergantungan pada sumber pembiayaan sementara.

Di sisi lain, belanja tidak langsung diproyeksikan meningkat dari Rp3,555 triliun pada tahun 2026 menjadi Rp3,911 triliun pada tahun 2030, mencerminkan bertambahnya kewajiban rutin daerah seperti belanja pegawai, hibah, dan transfer. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan relatif konstan pada kisaran Rp222,8 miliar per tahun. Setelah memperhitungkan seluruh komponen tersebut, kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan, dari Rp2,785 triliun pada tahun 2026 menjadi Rp3,784 triliun pada tahun 2030.

Dengan demikian, proyeksi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan beban belanja rutin, ruang fiskal daerah Provinsi NTB untuk pembiayaan pembangunan tetap tumbuh positif dengan rata-rata kenaikan sekitar 7–8 persen per tahun. Hal ini memberikan landasan optimisme bagi pelaksanaan RPJMD 2025–2029, di mana pemerintah daerah memiliki kapasitas yang lebih kuat untuk mengarahkan belanja

pembangunan secara produktif, khususnya dalam memperkuat infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung program prioritas yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 132 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi NTB Tahun 2026 - 2030

No	Uraian	Target (Rp)	Proyeksi (Rp)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Pendapatan	6.186.148.954.375,00	6.557.466.967.649,64	6.861.984.074.055,57	7.189.315.786.399,28	7.549.091.840.623,91	7.912.690.824.501,04
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Penerimaan Pembiayaan	154.948.700.903,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	Total Penerimaan	6.341.097.655.278,00	6.562.466.967.649,64	6.866.984.074.055,57	7.194.315.786.399,28	7.554.091.840.623,91	7.917.690.824.501,04
	Dikurangi						
4	Belanja Tidak Langsung	3.606.273.168.507,00	3.554.955.275.129,18	3.691.654.706.419,48	3.742.800.557.330,47	3.840.654.245.967,94	3.910.671.290.149,58
5	Pengeluaran Pembiayaan	122.798.725.992,00	222.798.725.992,00	222.798.725.992,00	222.798.725.992,00	222.798.725.992,00	222.798.725.992,00
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	2.612.025.760.779,00	2.784.712.966.528,46	2.952.530.641.644,09	3.228.716.503.076,81	3.490.638.868.663,97	3.784.220.808.359,46

Sumber : TAPD Provinsi NTB (diolah), 2025

Berdasarkan ketersediaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi NTB tahun 2026-2030, direncanakan penggunaannya untuk membiayai pembangunan daerah, yang dikelompokkan ke dalam tiga prioritas pembangunan, seperti disajikan pada tabel berikut

Tabel 2. 133 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi NTB
Tahun 2026 - 2030

No.	Uraian	Proyeksi				
		2026	2027	2028	2029	2030
1.	**Prioritas I,** dialokasikan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat meliputi: Belanja BLUD, Pembayaran Hutang, Belanja Penunjang Urusan seperti Operasional Kantor (Listrik, Air, Telepon/Internet); Belanja Pemeliharaan Gedung/Kendaraan; Belanja Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor; Belanja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi, Belanja Fasilitasi Pimpinan (KDH/WKDH/Anggota DPRD) dan Belanja administrasi lainnya	1.113.885.186.611,39	1.181.012.256.657,63	1.291.486.601.230,72	1.396.255.547.465,59	1.513.688.323.343,79
2.	**Prioritas II,** dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan Visi dan Misi KDH, pemenuhan penerapan pelayanan dasar, dan mandatory spending. Alokasi belanja pada prioritas II diarahkan untuk: a. Prioritas pembangunan daerah Provinsi NTB Tahun 2025 - 2029 yang termuat dalam Sapta Cita dan Program Unggulan b. Pemenuhan sasaran pembangunan dalam rangka perwujudan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2025 - 2029 c. Pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) kewenangan Provinsi d. Pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) e. Sinkronisasi prioritas pembangunan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)	1.392.356.483.264,23	1.476.265.320.822,04	1.614.358.251.538,41	1.745.319.434.331,98	1.892.110.404.179,73

No.	Uraian	Proyeksi				
		2026	2027	2028	2029	2030
	f. Pemenuhan Mandatory Spending yakni pemenuhan penyelenggaraan pendidikan, belanja fungsi kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan, belanja fungsi infrastruktur publik untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan infrastruktur, belanja fungsi pengawasan					
	g. Penurunan stunting					
	h. Penghapusan kemiskinan ekstrim					
	i. Pengendalian inflasi					
3.	**Prioritas III,** dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya yakni untuk mendanai program-program perangkat daerah yang tidak termasuk dalam kategori Prioritas I dan Prioritas II yang meliputi program-program untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi, bersifat darurat, penyertaan modal dan pembiayaan lainnya yang juga menjadi prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2025-2029, belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya untuk mendanai program-program perangkat daerah yang menjadi kewenangan provinsi namun tidak menjadi prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2025-2029, serta merupakan program pendukung penyelenggaraan perkantoran dan Isu strategis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	278.471.296.652,85	295.253.064.164,41	322.871.650.307,68	349.063.886.866,40	378.422.080.835,95

Sumber : Bappeda Provinsi NTB (diolah), 2025

2.5.5 Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya

Dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur antara lain SPAM Regional, Percepatan Jalan Tahap Ketiga di Provinsi NTB membutuhkan pembiayaan yang cukup besar dan tidak memungkinkan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah Provinsi akan memperkuat integrasi sumber pendanaan pembangunan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kolaborasi APBD Kab/Kota, Obligasi, Pinjaman Daerah, dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

2.5.5.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pembangunan Provinsi NTB selain bersumber dari APBD Provinsi NTB, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh Perangkat Daerah Provinsi.

2.5.5.2 Kolaborasi APBD Kab/Kota

Keterbatasan sumber pembiayaan dalam pembangunan daerah melalui APBD Provinsi NTB dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan melalui kolaborasi pembiayaan dengan APBD Kab/Kota. Kolaborasi sangat diperlukan agar tercipta sinkronisasi dalam menuntasan program dan kegiatan yag telah direncanakan, sehingga nantinya diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih terarah dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Kolaborasi dapat dilakukan dengan syarat bahwa program dan kegiatan provinsi sejalan dan sinergis dengan program dan kegiatan pemerintah Kab/Kota, sehingga antara provinsi dan Kab/Kota dapat bekerjasama didalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun penuntasannya dilakukan dengan sharing pendanaan ataupun pembagian peran pendanaannya.

2.5.5.3 Obligasi

Obligasi daerah merupakan alternatif kanal pembiayaan yang layak dipertimbangkan sebagai sumber pendanaan daerah, instrumen ini adalah efek berupa surat hutang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan tidak dijamin oleh pemerintah pusat, hanya untuk membiayai kegiatan investasi sarana prasarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD. Namun pada dasarnya penerbitan obligasi daerah sangat bergantung pada kapasitas daerah tersebut. Pembangunan sarana dan prasarana yang diajukan harus mempunyai nilai keuntungan secara ekonomis, keuntungan dari sarana prasarna tersebut digunkan untuk membayar pokok hutang beserta bunganya.

Kelebihan obligasi daerah sebagai alternatif pendanaan pembangunan antara lain mampu menarik minat pemilik dana atau masyarakat untuk berinvestasi dan mampu menyediakan dana dalam jumlah besar. Mekanisme penerbitan obligasi daerah diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penerbitan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Obligasi Daerah.

Pemerintah Provinsi NTB belum pernah menerbitkan obligasi daerah, namun Pemerintah NTB merupakan salah satu Pemerintah Daerah yang serius menjajaki kemungkinan penerbitan obligasi daerah.

2.5.5.4 Pinjaman Daerah

Dalam pelaksanaan pembangunan, pinjaman daerah dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan pembangunan. Konsep dasar pinjaman daerah dalam Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 2011 yang pada prinsipnya diturunkan dari Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman. Namun demikian, mengingat pinjaman memiliki berbagai resiko seperti resiko kesinambungan fiskal, resiko tingkat bunga, resiko pembiayaan kembali, resiko kurs, dan resiko operasional, maka Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal nasional menetapkan batas-batas dan rambu-rambu pinjaman daerah.

Beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dari pinjaman daerah di antaranya:

1. Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah.
2. Pinjaman Daerah harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah.
3. Pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan kas.
4. Pemerintah Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri.
5. Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan jaminan terhadap pinjaman pihak lain.
6. Pinjaman daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dan Pemerintah Daerah sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman.
7. Pendapatan daerah dan/atau barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah.
8. Proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan Obilgasi Daerah.
9. Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pinjaman daerah dicantumkan dalam APBD.

Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah, diantaranya bersumber dari:

1. Pemerintah Pusat, berasal dari APBN termasuk dana investasi Pemerintah, penerusan pinjaman dalam negeri, dan/atau penerusan pinjaman luar negeri;
2. Pemerintah Daerah lain;
3. Lemabaga Keuangan Bank, yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Lembaga Keuangan Bukan Bank, yaitu lembaga pembiayaan yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Masyarakat, berupa Obligasi Daerah yang diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri.

Pemerintah Daerah dapat menggunakan hasil dari Pinjaman Daerah sebagaimana jenis pinjamannya, yaitu:

1. Pinjaman Jangka Pendek dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas.
2. Pinjaman Jangka Menengah dipergunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan.
3. Pinjaman Jangka Panjang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang (i) menghasilkan penerimaan langsung, (ii) menghasilkan penerimaan tidak langsung, (iii) memberikan manfaat ekonomi dan sosial.
4. Khusus pinjaman jangka panjang dalam bentuk obligasi daerah digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut.

2.5.5.5 Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha.

Kerjasama pemerintah dengan badan usaha dilakukan dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum. Kerjasama tersebut mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para fihak.

Skema pendanaan KPBU dimaksudkan untuk pembangunan prasarana dasar yang tidak layak secara finansial namun layak secara ekonomis dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Kerjasama pemerintah dan badan usaha menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi.

Karateristik proyek KPBU meliputi:

1. Proyek KPBU merupakan proyek infastruktur yang penyediaannya dilakukan Pemerintah melalui kerjasama dengan badan usaha.
2. Skema diwujudkan melalui ikatan perjanjian (kontrak) kerjasama yang melibatkan pemerintah sebagai PJPK dan suatu badan usaha.

3. Dalam perjanjian kerjasama proyek, pihak badan usaha dapat bertanggung jawab atas desain, kontribusi, pembiayaan dan operasi proyek KPBU.
4. Perjanjian kerjasama skema KPBU biasanya memiliki jangka waktu relatif panjang (lebih dari 15 tahun) untuk memungkinkan pengembalian investasi bagi pihak badan usaha.
5. Basis dan perjanjian kerjasama proyek KPBU tersebut adalah pembagian alokasi risiko antara pemerintah melalui PJPK dan badan usaha.

Kriteria dan jenis infrastruktur prioritas yang dapat dibiayai melalui pendanaan KPBU terdiri:

1. Memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;
2. Memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah;
3. Memiliki keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah;
4. Memiliki peran strategik terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan nasional; dan/atau
5. Membutuhkan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah, dalam penyediaan infrastruktur prioritas kerja sama pemerintah dan swasta.

Pendanaan Pembangunan melalui KPBU memiliki beberapa keuntungan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas proyek dengan pelibatan badan usaha yang memungkinkan adanya pembagian risiko dan menjamin ketepatan waktu dan anggaran (on schedule-on budget).
2. Menjamin kualitas pelayanan karena performance diperjanjikan dalam kontrak.
3. KPBU memiliki perlindungan hukum yang baik karena regulasinya jelas dan governance terjaga melalui mekanisme KPBU yang melibatkan pemangku kepentingan (Bappenas dalam pemilihan proyek, Kementerian Keuangan dalam pemberian fasilitas fiskal, LKPP dalam proses pengadaan, BKPM dalam menjajaki minat dan nilai pasar, Kementerian Dalam Negeri dalam pemberian rekomendasi Availability Payment/AP Daerah, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian dalam debottlenecking, dan PT. PII dalam pemberian penjaminan Pemerintah), serta best practice KPBU sudah ada di berbagai negara dan berbagai sektor.

KPBU di Indonesia sudah dibuka untuk 19 sektor baik KPBU ekonomi maupun sosial yang mempunyai kelayakan finansial tinggi (full cost recovery) atau kelayakan marjinal, 19 jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan badan usaha yaitu: 1) infrastruktur transportasi; 2) infrastruktur jalan; 3) infrastruktur sumber daya air dan irigasi; 4) infrastruktur air minum; 5) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat; 6) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat; 7) infrastruktur sistem pengelolaan persampahan; 8) infrastruktur telekomunikasi dan informatika; 9) infrastruktur energi dan

ketenagalistrikan, termasuk infrastruktur energi terbarukan; 10) infrastruktur konservasi energi; 11) infrastruktur ekonomi fasilitas perkotaan; 12) infrastruktur kawasan; 13) infrastruktur pariwisata, antara lain pusat informasi pariwisata (tourism information center); 14) infrastruktur fasilitas pendidikan, penelitian dan pengembangan; 15) infrastruktur fasilitas sarana olahraga, kesenian dan budaya; 16) infrastruktur kesehatan; 17) infrastruktur pemasyarakatan; 18) infrastruktur perumahan rakyat; 19) infrastruktur fasilitas sarana olahraga, kesenian dan budaya.

Pengelompokan 19 (sembilan belas) jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan badan usaha melaui skema pendanaan KPBU dikelompokan menjadi 3 (tiga) kelompok terdiri kelompok pertama 7 (tujuh) jenis infrastruktur konektivitas (tranportasi, jalan, ketenagalistrikan, migas dan energi baru dan terbarukan (EBT), konservasi energi, telekomunikasi dan informatika), kelompok kedua 7 (tujuh) jenis infrastruktur fasilitas perkotaan (air minum, pengelolaan limbah setempat, pengelolaan limbah terpusat, pengelolaan sampah, SDA dan irigasi, pasar tradisional, perumaha rakyat, dan kelompok ketiga 6 jenis infrastruktur fasilitas sosial (pariwisata, fasilitas pendidikan, lembaga pemasyarakatan, sarana olah raga dan budaya, kawasan/*technopark*, kesehatan).

2.6 Permasalahan Dan Isu Strategis Daerah

2.6.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan daerah adalah upaya strategis untuk mengarahkan sumber daya daerah dalam mencapai tujuan pembangunan. Namun, dalam implementasi proses pencapaian tujuan sering menghadapi sejumlah permasalahan karena adanya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Idenfitikasi permasalahan pembangunan di NTB dapat dikelompokkan berdasarkan 4 (empat) aspek, sebagai berikut:

2.6.1.1 Permasalahan Aspek Geografi dan Demografi

1. Belum optimalnya memanfaatkan posisi strategis NTB yang berada di jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Asia, Australia dan kawasan Pasifik, menjadi bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang digunakan sebagai jalur pelayaran kapal-kapal internasional yang memberikan peluang untuk memperkuat perdagangan ekspor dengan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik termasuk Australia dan Asia Timur, karena belum didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai.
2. Belum optimalnya pengembangan ekonomi berbasis Agro-Maritim yang ditandai dengan kontribusi sektor perikanan kelautan baru mencapai 4,30%, padahal dengan luas wilayah yang didominasi oleh perairan, NTB memiliki peluang besar dalam pengembangan Ekonomi Agro-Maritim seperti perikanan tangkap, budidaya laut serta industri garam dan perkapalan; Ekowisata Bahari dan Pesisir dengan destinasi unggulan seperti Gili Trawangan, Pantai Kuta Mandalika dan perairan Pulau Moyo; dan Keamanan

dan Pengelolaan Sumber Daya Laut, mengingat besarnya luas laut yang memerlukan perlindungan dari eksploitasi berlebihan dan aktivitas ilegal.

2.6.1.2 Permasalahan Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Produktivitas Sektor Ekonomi Belum Optimal
2. Pusat Pertumbuhan Ekonomi Belum Merata
3. Perlambatan Realisasi Investasi
4. Fiskal Daerah Masih Rendah
5. Pendidikan Berkualitas Belum Merata
6. Pelayanan Kesehatan Untuk Semua Belum Merata
7. Kesejahteraan Sosial Belum Merata
8. Digitalisasi Pelayanan Publik Belum Optimal
9. Profesionalisme Manajemen Talenta SDM Belum Optimal
10. Stabilitas Keamanan Daerah belum Optimal

2.6.1.3 Permasalahan Aspek Daya Saing Daerah

1. Degradasi Lingkungan
2. Kebencanaan Masih Tinggi

2.6.1.4 Permasalahan Aspek Pelayanan Umum

2.6.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Bidang Pendidikan
   Beberapa permasalahan pada bidang pendidikan adalah sebagai berikut :
   a. Rendahnya kompetensi Literasi dan numerasi pada jenjang SMA, SMK dan SLB;
   b. Belum semua pendidik berkualifikasi pendidikan Strata I
   c. Rendahnya keterserapan lulusan SMK terhadap Industri dan Dunia Kerja (IDUKA);
   d. Masih ada satuan pendidikan yang belum terakreditasi;
   e. Masih ada siswa yang tidak menyelesaikan pendidikan formalnya *(Drop Out)*;
   f. Belum semua lulusan SMA melanjutkan;
   g. Terbatasnya Guru Pendamping Khusus pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif;
   h. Kemampuan Literasi dan numerasi pada semua jenjang Pendidikan baik SMA, SMK dan SLB masih dibawah rata – rata nasional;

2. Bidang Kesehatan
   Beberapa permasalahan pada bidang kesehatan adalah sebagai berikut :
   a. Masih rendahnya Umur Harapan Hidup 72,25 DAN NASIONAL 74,15
   b. Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) 257
   c. Masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) 29,37
   d. Rasio tenaga kesehatan (nakes) dan tenaga medis (named) belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan serta pendistribusian nakes dan named belum merata

e. Pemenuhan Sarana, Prasana dan Alat kesehatan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah belum memenuhi standar
f. Kapasitas RS Manambai sebagai Rumah Sakit Rujukan Provinsi di pulau sumbawa belum terpenuhi
g. Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) pada fasilitas pelayanan kesehatan masih belum optimal
h. Pengawasan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan swasta dan praktik pribadi belum optimal
i. Upaya pelayananan kesehatan terintegrasi UKBM, UKM dan UKP bagi masyarakat belum berjalan optimal terkai implementasi transformasi pelayanana kesehatan
j. Kepesertaan JKN bagi penduduk melalui pembiayaan mandiri belum otimal
k. Tingkat kebutaan NTB peringkat 2 tertinggi dengan gangguan penglihatan di NTB masih tinggi (0,4) dibanding nasional (0,6).
l. Prevalensi gangguan jiwa di Provinsi NTB masih menunjukkan angka yang relatif tinggi.

3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Beberapa permasalahan pada bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

a. Database infrastruktur permukiman yang belum optimal dan Lokasi yang diajukan tidak memiliki akses untuk infrastruktur permukiman yang akan dibangun.
b. Kondisi kualitas dan kuantitas air menurun karena Alih fungsi lahan yang menyebabkan tingginya sedimentasi dan berkurangan ketersediaan air
c. Masih terdapat di beberapa daerah Kab/Kota yang belum terlayani SPAM, karena di daerah tersebut memiliki keterbatasan air baku.
d. Keberfungsian dan kondisi Infrastruktur terbangun belum optimal, menyebabkan ketimpangan layanan infrastruktur.
e. Kelembagaan air minum belum seluruhnya berkinerja baik berdasarkan penilaian BPKP, disebabkan :
   - Pendataan ulang jumlah asset (infrastruktur) yang belum lengkap
   - Semua kelembagaan air minum belum memiliki bussines plan dan rencana anggaran yang baik
   - Sumber Daya Manusia Pengelola Air minum belum berkompeten
f. Kinerja Sistem Irigasi kewenangan provinsi masih belum optimal karena :
   - Umur sarana dan prasarana irigasi serta Minimnya dana Operasi, Pemeliharan dan Rehabilitas
   - Kondisi daerah rawan Bencana Alam
   - Dokumen terkait lingkungan dan analisis risiko belum semua tersedia
   - Adanya sedimentasi dan sampah yang mengganggu distribusi air
   - Inventarisasi, identifikasi dan penertiban aset irigasi belum tuntas
   - Pelaksanaan irigasi partisipatif belum berjalan dengan baik
g. Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi belum optimal, karena :

- Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi belum dimaksimalkan fungsinya
- Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) belum ada databse yang memadai. Selain itu fasilitasi dan penguatan kapasitas masih belum berjalan baik untuk meningkatkan kinerja kelembagaan
- Manajemen perencanaan dan pengelolaan sumber daya air dan irigasi terkoneksi untuk Pulau Lombok masih belum berjalan baik karena kondisi jaringan, sampah dan sedimentasi.

h. Pengawasan tata ruang dilaksanakan melalui perangkat daerah dan pranata yang belum memadai, karena fungsi belum didukung dengan kelembagaan yang kuat dalam menangani pelanggaran tata ruang.

i. Ketersediaan Rencana Tata Ruang (RTR) sebagai acuan pembangunan di Kab/Kota masih rendah sehingga masih adanya indikasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR).

4. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Beberapa permasalahan pada bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

a. Belum terkoordinasi dan terintegrasinya dengan baik pengembangan perumahan antara Kabupaten / Provinsi dengan pusat
b. Belum optimalnya Penanganan RTLH dan Rendahnya akses RLH bagi MBR
c. Belum tertanganinya kawasan kumuh secara optimal
d. Tingginya angka backlog kepemilikan rumah
e. Program tiga (3) juta rumah, keterpaduan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman belum optimal
f. Isu sertifikasi pengembang dan pemenuhan standar pelayanan minimal perumahan

5. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Beberapa permasalahan pada bidang Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut :

a. Masih Terjadinya Pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah
b. Belum Optimalnya Fungsi Perlindungan Masyarakat
c. Belum Optimalnya Penanganan Gangguan Dalam Rangka Mewujudkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
d. Belum Optimalnya Pencegahan Atas Potensi Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
e. Rendahnya Resiliensi Terhadap Bencana

6. Bidang Sosial

Beberapa permasalahan pada bidang sosial adalah sebagai berikut :

a. Rendahnya fungsi sosial masyarakat rentan
b. Rendahnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat rentan

c. Rendahnya keberdayaan ekonomi masyarakat rentan
d. Aksesbilitas Pelayan Publik Pada Penyandang Disabilitas Terbatas
e. Pemenuhan SPM Sosial yang belum optimal

2.6.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Beberapa permasalahan pada urusan tenaga kerja adalah sebagai berikut :

a. Terjadi Kesenjangan skill/kompetensi angkatan kerja tidak sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dunia industri
b. Masih terbatasnya penempatan pekerja formal
c. Masih Rendahnya kualitas CPMI / PMI
d. Cakupan Perlindungan sosial ketenagakerjaan belum optimal
e. Masih Rendahnya penempatan pekerja disabilitas disektor formal

2. Pertanahan

Beberapa permasalahan pada urusan pertanahan adalah sebagai berikut :

a. Lemahnya Sistem Administrasi Pertanahan
b. Pemanfaatan tanah sering tidak sesuai dengan RTRW
c. Ancaman terhadap ketahanan pangan karena berkurangnya lahan produktif

3. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Beberapa permasalahan pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

a. Rendahnya Kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender
b. Rendahnya Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak
c. Masih tingginya ketimpangan gender
d. Angka perkawinan anak 14,96% tertinggi di Indonesia

4. Pangan

Beberapa permasalahan pada urusan pangan adalah sebagai berikut :

a. Ketersediaan Pangan Belum Beragam
b. Masih adanya Daerah Rentan Rawan Pangan
c. Distribusi Pangan Belum Merata
d. Belum tercapainya Kualitas Konsumsi Pangan penduduk
e. Rendahnya Produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan

5. Lingkungan Hidup

Beberapa permasalahan pada urusan lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

a. Rendahnya kualitas lingkungan hidup
b. Rendahnya upaya pengendalian emisi gas rumah kaca
c. Masih rendahnya kinerja pengelolaan sampah

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Beberapa permasalahan pada urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah sebagai berikut :

a. Belum optimalnya pengelolaan data
b. Kurangnya pemanfaatan data Administrasi Kependudukan
c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen administrasi kependudukan

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Beberapa permasalahan pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :

a. Rendahnya Kapasitas Pengelola BUMDesa
b. Belum optimalnya Tatakelola penyelenggaraan Pemerintahan Desa
c. Rendahnya Kemandirian Desa

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Beberapa permasalahan pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

a. Sebaran Penduduk Belum Seimbang antar Pulau
b. Belum optimalnya pengelolaan Bonus Demografi
c. Perkawinan usia dini masih terjadi di beberapa daerah

9. Perhubungan

Beberapa permasalahan pada urusan perhubungan adalah sebagai berikut :

a. Belum optimalnya sistem transportasi darat yang terintegrasi dengan kawasan pertumbuhan ekonomi
b. Rendahnya tingkat keselamatan transportasi
c. Belum Optimalnya Regulasi dan Tata Kelola Pelayanan Transportasi Publik
d. Belum Optimalnya Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dari Sektor Transportasi

10. Komunikasi dan Informatika

Beberapa permasalahan pada urusan Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

a. Belum Optimalnya Penyelenggaran Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Pemerintah Daerah
b. Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi belum optimal
c. Manajemen SPBE yang belum memadai

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Beberapa permasalahan pada urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

a. Persentase KoperasiTidak Aktif cukup tinggi(Koperasi tidak aktif masih tinggi)
b. Kontribusi Koperasi terhadap PDRB masih rendah
c. Digitalisasi dan Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal

d. Kualitas SDM Pengurus/Pengelola Koperasi belum memadai
e. Daya Saing dan Produktivitas Pelaku Usaha belum memadai

12. Penanaman Modal

Beberapa permasalahan pada urusan Penanaman Modal adalah sebagai berikut :

a. Iklim Investasi Belum Kompetitif
b. Promosi dan Informasi Investasi Belum Optimal
c. Minimnya Investasi Berkualitas dan Berkelanjutan
d. UMKM dan pelaku usaha lokal belum mampu menjadi mitra atau bagian dari rantai pasok investasi besar
e. Koordinasi Lintas Sektor dan Lembaga Belum Efektif

13. Kepemudaan dan Olahraga

Beberapa permasalahan pada urusan Kepemudaan dan Olahraga adalah sebagai berikut :

a. Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga yang kurang memadai dan belum berstandar
b. Masih Kurangnya SDM pelaku olahraga yang berprestasi dan bersertifikat
c. Partisipasi Pemuda yang masih rendah

14. Kebudayaan

Beberapa permasalahan pada urusan kebudayaan adalah sebagai berikut :

a. Belum semua Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) didokumentasikan;
b. Terbatasnya sarana dan prasarana pengembangan OPK;
c. Terbatasnya ketersediaan SDM bidang Kebudayaan;
d. Belum adanya data base pendukung pengembangan OPK.

15. Perpustakaan

Beberapa permasalahan pada urusan perpustakaan adalah sebagai berikut :

a. Kompetensi Sumber Daya Manusia masih rendah
b. Sarana dan prasana perpustakaan masih kurang memadai
c. Pemanfaatan teknologi berbasis digital belum maksimal dalam mendukung digitalisasi perpustakaan

16. Kearsipan

Beberapa permasalahan pada urusan kearsipan adalah sebagai berikut :

a. Kompetensi Sumber Daya Manusia masih rendah
b. Sarana dan prasana kearsipan masih kurang memadai
c. Pemanfaatan teknologi berbasis digital belum maksimal dalam mendukung digitalisasi kearsipan

17. Persandian

Beberapa permasalahan pada urusan persandian adalah sebagai berikut :

a. Belum optimalnya Keamanan Informasi dan Tata Kelola Persandian di Lingkup Pemerintah
b. Terbatasnya Kapasitas SDM Pengelola persandian

18. Statistik

Beberapa permasalahan pada urusan statistik adalah sebagai berikut :

a. Rendahnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Pemerintah Daerah
b. Belum optimalnya layanan data dan informasi yang terintegrasi pada lingkup perangkat daerah

2.6.1.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Beberapa permasalahan pada urusan Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut :

a. Produksi dan Produktivitas Perikanan tangkap belum optimal
b. Belum optimalnya pelayanan pelabuhan perikanan
c. Belum optimalnya produksi perikanan budidaya
d. Terbatasnya penanganan kasus hama penyakit ikan
e. Belum optimalnya volume hasil olahan ikan
f. Menurunnya daya dukung dan kerusakan ekosistem pesisir (abrasi, mangrove dan terumbu karang)

2. Pariwisata

Beberapa permasalahan pada urusan Pariwisata adalah sebagai berikut :

a. Kurangnya daya dukung aksesbilitas menuju daerah wisata
b. Belum terlaksananya standarisasi kopetensi SDM pariwisata
c. Masih belum optimal tata kelolah destinasi
d. Belum optimalnya wadah dan pengembangan ekonomi kreatif

3. Pertanian

Beberapa permasalahan pada urusan Pertanian adalah sebagai berikut :

a. Belum optimalnya Produktivitas Tanaman Pangan dan komoditi Perkebunan
b. Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian
c. Akses pasar dan permodalan masih terbatas
d. Tata kelola Kelembagaan petani belum memadai
e. Produksi dan produktivitas ternak yang masih rendah
f. Masih adanya kejadian kasus penyakit hewan menular
g. Masih rendahnya pemanfaatan teknologi inseminasi buatan dan masih terjadi kasus inbreeding sehingga berpengaruh terhadap kualitas produktivitas ternak
h. Produk hasil peternakan belum mampu bersaing dengan produk luar daerah
i. Masih rendanya pemanfaatan teknologi Peternakan dan Kesehatan Hewan

4. Kehutanan

Beberapa permasalahan pada urusan Kehutanan adalah sebagai berikut :

a. Minimnya upaya rehabilitasi dan perlindungan hutan
b. Rendahnya produktivitas urusan kehutanan terhadap capaian PDRB NTB
c. Rendahnya kontribusi Perhutanan Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan desa sekitar lingkar hutan

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Beberapa permasalahan pada urusan Energi dan Sumber Daya Mineral adalah sebagai berikut :

a. Masih terdapat masyarakat yang belum menikmati layanan listrik sesuai dengan keselamatan ketenagalistrikan
b. Masih rendahnya kontribusi EBT dalam bauran energi
c. Pemanfaatan dan konservasi air tanah belum optimal
d. Kurangnya peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha pertambangan

6. Perdagangan

Beberapa permasalahan pada urusan Perdagangan adalah sebagai berikut :

a. Kurangnya konektivitas pelabuhan/penerbangan ekspor dari NTB
b. Tidak meratanya harga barang kebutuhan pokok dan penting antar daerah di NTB
c. Belum optimalnya pemanfaataan E-Commerce

7. Perindustrian

Beberapa permasalahan pada urusan Perindustrian adalah sebagai berikut :

a. Kualitas dan Ketersediaan SDM Industri Masih Rendah
b. Akses Bahan Baku dan Teknologi Terbatas
c. Lemahnya Rantai Pasok dan Hilirisasi
d. Rendahnya Daya Saing dan Nilai Tambah Produk
e. Belum Optimalnya Pengembangan Industri Berbasis Potensi Lokal

8. Transmigrasi

Beberapa permasalahan pada urusan Transmigrasi adalah sebagai berikut :

a. Rendahnya Minat Transmigrasi
b. Keterbatasan Fasilitasi dan Pembinaan transmigran
c. Rendahnya Tingkat Kemandirian dan Kesejahteraan Transmigran

2.6.1.3.4 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Pengelolaan Penghubung

Beberapa permasalahan pada urusan Pengelolaan Penghubung adalah sebagai berikut :

a. Kurangnya Data dan Informasi yang Tersedia terkait potensi daerah, peluang investasi, budaya, serta program daerah tidak terdokumentasi dan tidak siap saji bagi pihak luar

b. Koordinasi Lintas Instansi Belum Efektif antar perangkat daerah
c. Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi Lemah untuk mendukung fungsi penghubung

2. Perencanaan

Beberapa permasalahan pada urusan Perencanaan adalah sebagai berikut :

a. Belum Optimalnya Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan
b. Kualitas Perencanaan Belum Sepenuhnya Berbasis Data dan Evidence-Based
c. Lemahnya Konsistensi Perencanaan–Penganggaran–Pelaksanaan–Evaluasi

3. Keuangan

Beberapa permasalahan pada urusan Keuangan adalah sebagai berikut :

a. Sinkronisasi dan Konsistensi RKPD–Renja–RKA–APBD Lemah
b. Masih Ditemukan Temuan Audit dari BPK
c. Data Aset Belum Tertib dan Terverifikasi
d. Pemanfaatan Aset Belum Maksimal
e. Sistem Informasi Manajemen Aset Belum Terintegrasi
f. Ketergantungan Tinggi pada Dana Transfer
g. Potensi PAD Belum Tergali Optimal

4. Kepegawaian

Beberapa permasalahan pada urusan Kepegawaian adalah sebagai berikut :

a. Rendahnya Kompetensi Pegawai yang berimplikasi kepada rendahnya produktifitas Individu dan/organisasi
b. Promosi, Mutasi dan Rotasi belum menggunakan Mekanisme sistem merit sesuai dengan kaidah Talent Manajemen
c. Belum Optimalnya Pelaksanaan Manajemen ASN

5. Pendidikan dan Pelatihan

Beberapa permasalahan pada urusan Pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai berikut :

a. Pendidikan dan Pelatihan Belum Berbasis Kebutuhan Nyata Jabatan
b. Kurangnya penggunaan teknologi dan digital learning dalam pelatihan ASN
c. Rendahnya Akses ASN Terhadap Pelatihan Berkualitas
d. Sertifikasi dan Kompetensi ASN Belum Merata

6. Penelitian dan Pengembangan

Beberapa permasalahan pada urusan Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut :

a. Peran Litbang Belum Menjadi Rujukan Utama dalam Perumusan Kebijakan
b. Kolaborasi Litbang dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset belum optimal
c. Sistem Informasi dan Data Penelitian Belum Terintegrasi

2.6.1.3.5 Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

   Beberapa permasalahan pada urusan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

   a. Masih adanya Konflik Sosial di masyarakat
   b. Kurangnya literasi media dan informasi di kalangan masyarakat yang mengganggu keamanan serta ketertiban
   c. Politik Uang dan Praktik Politik Tidak Sehat

2.6.1.3.6 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

   Beberapa permasalahan pada urusan Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

   a. Koordinasi Antar perangkat daerah Belum Optimal
   b. Lemahnya Pelaksanaan Fungsi Pengendalian dan Evaluasi
   c. Sistem Administrasi dan Dokumentasi belum terintegrasi secara digital

2. Sekretariat DPRD

   Beberapa permasalahan pada urusan Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

   a. Pengelolaan Administrasi dan Dokumentasi belum terintegrasi secara digital
   b. Belum optimalnya pelayanan fasilitasi koordinasi antara pihak legislatif dengan eksekutif

2.6.1.3.7 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Inspektorat Daerah

   Beberapa permasalahan pada urusan Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut :

   a. Rendahnya Penggunaan Sistem Pengawasan Berbasis Teknologi
   b. Belum Optimalnya Pengelolaan Data dan Pelaporan Hasil Audit

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan gambaran umum pembangunan Provinsi NTB baik pada aspek geografi demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, asepk daya saing, dan aspek pelayanan umum, maka dapat dirumuskan permasalahan pokok pembangunan Provinsi NTB adalah; 1) Masih Tingginya Tingkat Kemiskinan dan Masalah Sosial lainnya, 2) Masih Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia, 3) Pertumbuhan Ekonomi Daerah Belum Inklusif, 4) Belum Optimalnya Pembangunan Infrastruktur, 5) Degradasi Lingkungan dan Kebencanaan Masih Tinggi, dan 6) Masih belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah.

2.6.2 Isu Strategis

2.6.2.1 Isu Global

Perencanaan pembangunan daerah perlu memperhatikan dampak isu global yang menjadi tantangan dan peluang pembangunan daerah. Sebagai satu-satunya organisasi global yang benar-benar universal, PBB telah menjadi forum terdepan untuk mengatasi permasalahan yang melampaui batas-batas negara dan tidak dapat diselesaikan oleh satu

negara saja. Meskipun resolusi konflik dan pemeliharaan perdamaian terus menjadi salah satu upaya yang paling terlihat, bersama dengan badan-badan khususnya, juga terlibat dalam beragam kegiatan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Perubahan global tersebut merupakan perubahan transformatif berskala besar, berjangka waktu panjang, dan bersifat sangat masif terutama disebabkan oleh kemajuan teknologi digital dan komputasi termasuk kecerdasan buatan (*artificial intelligence*).

Adapun isu global yang menjadi tantangan adalah sebagai berikut :

1. Perkembangan demografi global,
2. Geopolitik dan geoekonomi,
3. Perkembangan teknologi,
4. Peningkatan urbanisasi dunia,
5. Konstelasi perdagangan global,
6. Tata kelola keuangan global,
7. Pertumbuhan kelas menengah (*middle class*),
8. Peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam, dan
9. Perubahan iklim

2.6.2.2 Isu Strategis Nasional

Isu nasional yang menjadi perhatian Pemerintah Pusat saat ini adalah pemulihan ekonomi nasional masih berlangsung namun belum optimal dan berdampak langsung pada pemulihan ekonomi daerah. Dalam sektor perdagangan, secara nasional, produk komoditas Indonesia akan mengalami hambatan ekspor karena isu lingkungan dan keberlanjutan yang menjadi perhatian dunia global saat ini. Secara paralel, isu produktivitas dan daya saing, akses bahan baku domestik dan impor, kemampuan inovasi, akses pembiayaan dan investasi, akses pasar dan buyer, integrasi program fasilitasi promosi ekspor antar Kementerian/Lembaga. Isu ini terkait dengan kinerja ekspor non komoditas yang masih terkendala dengan berbagai permasalahan dalam negeri. Berbagai perubahan tersebut menimbulkan tantangan terhadap upaya pencapaian sasaran Visi Indonesia Emas 2045 yang meliputi berbagai aspek ekonomi, sosial, tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, pertahanan dan diplomasi, ketahanan social budaya dan ekologi, kewilayahan dan infrastruktur, serta pembiayaan dan manajemen pembangunan. Beberapa tantangan Pembangunan ke depan periode 2025 sampai dengan 2029, yaitu :

1. Rendahnya Produktivitas

Tingkat produktivitas masih rendah di tengah persaingan global yang semakin meningkat. Mengacu pada rilis laporan Asian Productivity Organization (2024), rata-rata produktivitas Indonesia yang tecermin dari totat *Factor Productivity* selama tahun 2015-2022 hanya tumbuh positif sebesar 6O basis poin dari periode sebclumnya tahun 2010-2015 (-0,9 persen ke -0,3 persen). Capaian tersebut relatif tertinggal dibandingkan Korea Selatan yang mampu mencapai 1,78 ketika masih berada pada posisi menuju negara maju periode 1971-1995 dan tiongkok scbesar 2,12 selama kurun waktu 2005-2022. Kondisi produktivitas

yang rendah di antaranya disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang masih tertinggal, terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan teknologi, dan inovasi yang tertinggal, serta kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah. Rendahnya Produktivitas tenaga kerja perempuan dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang belum mendukung mereka untuk masuk dan bertahan di pasar kerja, antara lain norma sosial budaya yang membebankan peran pengasuhan dan tugas domestik pada perempuan, jam kerja yang kurang fleksibel, serta minimnya akses layanan *daycare* berkualitas yang terjangkau.

2. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Asian Productivity Organization (2024|, produktivitas tenaga kerja Indonesia yang diukur dari Produk Domestik Bruto per tenaga kerja tahun 2022 relatif rendah, yaitu sebesar US$28.600 per pekerja. Angka tersebut masih tertinggal jauh di bawah Amerika Serikat US$149.100 per pekerja dan di bawah rata-rata kawasan Association of Southeast Asian Nations sebesar US$30.200 per pekerja. Tantangan peningkatan Produktivitas tenaga kerja di antaranya disumbang oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dicerminkan dari capaian rata-rata nilai *Programme for Intemational student Assessment* siswa Indonesia untuk semua aspek (membaca, matematika, dan sains) sebesar 369,3 pada tahun 2o22. Angka terscbut menurun dibanding tahun 2018 dengan niLai rata-rata 382 serta masih tertinqgal dibandingkan siswa dari negara-negara *The Organization for Economic Cooperation and Devclopment* sebesar 488,33.

Pembangunan manusia unggul juga dihadapkan pada tantangan rendahnya daya saing tenaga kerja yang ditunjukkan dengan rendahnya kualifikasi pendidikan tenaga kerja. Berdasarkan pada kualifikasi pendidikan, data Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2024 menunjukkan sebesar 52,32 persen penduduk yang termasuk angkatan kerja merupakan lulusan pendidikan rendah (sekolah menengah pertama/ madrasah tsanawiyah sederajat ke bawah), sedangkan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan menengah (sekolah menengah ates/ sekolah menengah kejuruan sederajat) sebesar 34,82 persen, dan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan tinggi sebeear 12,86 persen. Kualifikasi pendidikan tenaga kerja yang rendah berdampak Pada keterserapan tenaga kerja di pasar kerja, hanya 41,23 persen pekerja yang bckerja di bidang keahlian menengah dan tinggi. Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan yang optimal, lndonesia harus mampu mengatasi berbagai dampak risiko ini dan melakukan investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

3. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat

Calon kelas menengah merupakan kelompok sosial ekonomi terbesar di Indonesia. Pada periode 2019-2024, jumlahnya meningkat sebesar 8,65 juta orang sehingga mencapai 137,5 juta orang atau sekitar 49,2 persen dari total populasi. Di sisi lain, jumlah warga yang rentan miskin juga meningkat sebanyak 12,72 juta orang dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, angka ini mencapai 67,69 juta atau 24,33 persen dari total populasi (Badan

Pusat statistik, 2024). Meskipun jumlah masyarakat calon kelas menengah dan yang rentan miskin terus bertambah, populasi kelas menengah justru mengalami penurunan. Risiko pergeseran status ini, dari kelas menengah menjadi calon kelas menengah dan rentan miskin, disebabkan oleh tingginya angka pemutusan hubungan keda. Pada Agustus 2024, tercatat 46.420 pekerja mengalami pemutusan hubungan keia (Kementerian Ketenagakerjaan,2024) dan angka ini diperkirakan akan terus meningkat.

Salah satu faktor yang memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja adalah rendahnya daya beli masyarakat. Hal ini terlihat dari deflasi yang terjadi pada komponen harga yang diatur pemerintah dan harga bergejolak. Menurut laporan lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis universitas Indonesia (2024), komponen harga yang diatur pemerintah mengalami deflasi dari 1,68 persen pada Agustus 2024 menjadi 1,40 persen pada September 2024. Sementara itu, komponen harga bergejolak mengalami deflasi yang signitikan, dari 3,04 persen pada Agustus 2024 menjadi 1,43 persen pada September 2024. Daya beli masyarakat yang rendah berimplikasi pada menurunnya permintaan terhadap barang-barang yang diproduksi oleh industri. Dengan permintaan yang lemah, industri tidak dapat memenuhi biaya operasional, yang pada akhirnya memaksa untuk mengurangi jumlah karyawan atau bahkan menutup usaha.

4. Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) diproyeksikan mencapai 147,71 juta jiwa. Hal ini menjadi tantangan pembangunan, yaitu tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam (pangan, energi, dan air) serta lahan. Selain itu, terdapat kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial, jaminan kesehatan, pendidikan, dan pembukaan lapangan pekerjeen. Oleh karena itu, diperlukan strategi dalem upaya pemenuhan kebutuhan penduduk yang besar.

5. Krisis Lingkungan

Perkembangan dunia saat ini dihadapkan dengan tiga krisis lingkungan (*triple planetary crisis*) yang mengancam masa depan bumi dan manusia, yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan. Sekitar 50-75 persen dari populasi global berpotensi terdampak kondisi iklim yang mengancam jiwa pada tahun 2100 (lntergovernmental Panel on climate change, 2022). Kerugian ekonomi akibat risiko bcncana diprakirakan sebesar Rp22,8 triliun per tahun (Kementerian Keuangan, 2023), sementara jumlah kematian selama 10 tahun terakhir mencapai 9.176 orang (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2024).

Sekitar satu juta spesies tumbuhan dan hewan menghadapi ancaman kepunahan (lntergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, 2019). sementara itu, risiko polusi udara merupakan penyebab penyakit dan kematian dini terbesar di dunia, serta menyebabkan hingga 4,2 juta kematian setiap tahun (united Nations

Framework Convention on Climate Change, 2022). Indonesia merupakan negara dengan tingkat polusi tertinggi di Asia Tenggara dengan konsentrasi *particulate matter* 2,5 (world Health organization, 2021). Sekitar 70 persen dari 20 ribu sumber air minum rumah tangga yang diuji tercemar (Badan Pusat Statistik, 20221. Pada tahun 2020, sebanyak 40,3 persen timbulan sampah merupakan sampah makanan dan diproyeksikan akan menghasilkan 344 kg/kapita/tahun pada tahun 2045 (Proyeksi Business-As-Usual, Report Food and Loss Waste in Indonesia, 2021). Perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi udara juga sccara langsung akan menyebabkan krisis sumber daya alam.

6. Geopolitik dan Geoekonomi

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara, tak terkecuali Indonesia. Pcrkembangan risiko geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global, Salah satu tantangan geopolitik yang Perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah memengaruhi perkembangan kondisi di kawasan maupun tatanan global, serta sikap Indonesia dalam dunia internasional.

Perang antara Rusia dan Ukraina telah meningkatkan kewaspadaan Global terhadap potensi konflik geopolitik ke depan di kawasan lainnya, seperti konflik di Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan taut China Selatan. Perang menyebabkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi negara-negara lainnya, seperti tekanan inflasi global yang tinggi serta adanya krisis energi dan pangan. Selain itu, perang juga mendorong negara-negara untuk mencari instrumen militer demi melindungi kedaulatan mereka. Hal tersebut berpotensi meningkatkan ketegangan antarnegara sehingga memungkinkan terjadinya kembali konflik atau perang di masa depan. Persaingan geopolitik terutama di kawasan Indo-Pasifik yang dekat dengan Indonesia semakin meningkat dan meluas. Kawasan Indo-Pasifik muncul karena adanya dinamika geopolitik yang berkembang dan melibatkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik sebagai zona maritim. Nilai strategis Kawasan Indo-Pasifik yang diproyeksikan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dunia telah menarik perhatian banyak pihak. Tentu saja hal tersebut berdampak pada penciptaan persaingan pengaruh antarnegara, baik yang berada di dalam maupun luar kawasan.

7. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah

Pemberantasan korupsi merupakan isu strategis yang membutuhkan sinergi dari semua pemangku kepentingan. Hal ini menjadi prasyarat upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional, mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, serta meningkatkan investasi. Hal ini merupakan pijakan untuk memastikan Pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi.

Dalam lima tahun terakhir, Indeks Persepsi Korupsi/ *Coruption Perpection Index* lndonesia menunjukkan tren penurunan dari 40 pada tahun 2019 menjadi 34 pada tahun 2022 dan stagnan di angka yang sama pada 2O23 (peringkat 115 dari 180 negara). Adapun pada indikator Indeks Perilalu Anti Korupsi Indonesia, meski mengalami tren Perbaikan pada periode 2019-2022, namun capaian tersebut sedikit mengalami tantangan pada tahun bcrikutnya. Hal ini mencerminkan risiko dalam pencapaian pemberantasan korupsi. Selanjutnya, tata kelola data memainkan peran kunci dalam mendukung pembangunan nasional, terutama dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat, efektif, dan bcrkelanjutan. Tingkat keamanan data privasi dan siber untuk data pemerintah dan nasional belum scpenuhnya dapat mengantisipasi terjadinya risiko peretasan dan pembajakan serta pengelolaan data dalam skala besar yang dapat menciptakan potensi pelanggaran privasi dan ancaman keamanan.

2.6.2.3 Isu Regional

Isu regional wilayah pengembangan Bali dan Nusa Tenggara merupakan isu pembangunan yang terkait dengan kewilayahan di Bali dan Nusa Tenggara serta skala ekonomi pengembangan wilayah. Provinsi Bali bergabung pada Wilayah Pembangunan Jawa-Bali, sedangkan Provinsi NTB dan Provinsi NTT merupakan bagian inti dari Wilayah Pengembangan Nusa Tenggara. Isu strategi Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara berkaitan dengan upaya mengoptimalkan keunggulan wilayah khususnya pada sektor perikanan, perkebunan, peternakan, pertambangan, dan pariwisata, dengan menggunakan pendekatan gugus pulau. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional telah menjabarkan bahwa Wilayah Bali-Nusa Tenggara memiliki potensi pariwisata yang beragam mulai dari wisata alam, wisata bahari, wisata budaya, wisata buatan dan wisata minat khusus yang tersebar di seluruh wilayah, serta potensi ekonomi kreatif berbasis komoditas unggulan dan budaya tradisi lokal.

Pengembangan potensi ini telah didukung dengan adanya penetapan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan destinasi pariwisata pengembangan yang diharapkan mampu memberikan multiplier effects pada berbagai sektor khususnya terkait industri pariwisata dan ekonomi kreatif seperti akomodasi, kuliner, fesyen, kriya, seni pertunjukan, dan lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Wilayah Bali-Nusa Tenggara juga memiliki berbagai potensi ekonomi kreatif baik yang didukung oleh komoditas unggulan maupun yang dipengaruhi oleh ragam budaya dan tradisi lokal. Provinsi Bali sebagai salah satu tulang punggung pariwisata di Indonesia, telah memiliki 3.219 usaha ekonomi kreatif dan memiliki potensi yang dapat terus dikembangkan berupa kopi Kintamani dan Pupuan, Mete Kubu, Salak Sibetan Karangasem, Garam Amed, Kerajinan Perak Celuk Gianyar, dan Tenun Gringsing.

Selanjutnya Provinsi NTB telah memiliki 1.127 usaha ekonomi kreatif dengan potensinya yang dapat dikembangkan berupa Susu Kuda Sumbawa, Kangkung Lombok, Madu Hutan

Sumbawa, dan Kopi Tambora. Sebagai provinsi yang memiliki destinasi pariwisata tujua wisatawan mancanegara. Kemudian Provinsi NTT telah didukung dengan adanya 693 usaha ekonomi kreatif yang dapat terus dikembangkan untuk mengoptimalkan potensi wilayah. Adapun berdasarkan indikasi geografis, potensi ini meliputi kopi Flores Bajawa, Robusta Flores Manggarai, Arabika Flores Manggarai, serta vanili Kepulauan Alor, jeruk Soe Mollo, gula Lontar Rote, serta potensi kerajinan tenun seperti tenun ikat Sikka dan Alor, serta songket Alor. Tenun di Wilayah Bali-Nusa Tenggara memiliki motif yang khas sebagai wujud rantai budaya dan tradisi turun temurun yang bernilai ekonomi, serta potensial untuk dikembangkan hingga mampu berkontribusi pada industri *fesyen* internasional.

Pengembangan kawasan ekonomi Bali, NTB, NTT (Bali-Nusra) akan memiliki lompatan ekonomi yang hebat dengan pariwisatanya yang mendunia dan harus menjadi satu kesatuan lompatan ekonomi mendukung pemulihan ekonomi nasional. Miniatur Indonesia sebagai representasi 3 budaya daerah yang sesuai ajaran agama Hindu, Islam, dan Nasrani untuk membangun toleransi beragama sebagai modal sosial mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Wilayah Bali dan Nusa Tenggara masih terkendala isu strategis konektivitas yang mampu mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi regional.

Potensi sumber daya alam menjadi daya tarik pariwisata yang perlu dikembangkan dengan manajemen pengelolaan destinasi wisata yang profesional. Pembangunan pariwisata akan memberikan dampak dari rantai nilai sektor pariwisata, mendorong sektor hulu dan sektor hilir, seperti pertanian dalam arti luas, perdagangan, transportasi, akomodasi, makan minum, telekomunikasi dan lainnya. Disamping itu, wilayah Bali dan Nusa Tenggara memiliki sumber daya alam yang potensial untuk pengembangan potensi energi terbarukan yang terdiri dari angin, laut, bioenergi, hidro, surya/tenaga matahari, dan panas bumi. Pemanfaatan sumber energi ini masih kurang optimal untuk mendukung transformasi ekonomi daerah melalui optimalisasi industri pengolahan.

Provinsi Bali, NTB, dan NTT juga memiliki potensi kemaritiman yang besar yang dapat mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi regional. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga perlu mendapat perhatian, terutama wilayah pulau kecil yang menjadi destinasi pariwisata yang berkelanjutan. Pengembangan wilayah Bali dan Nusa Tenggara ini masih terkendala dengan ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana, riset dan inovasi yang mendukung berbagai aktivitas ekonomi, pergerakan orang, dan pergerakan barang. Isu strategis dalam pengembangan wilayah regional ini adalah optimalisasi upaya membangun sistem konektivitas, aksesibilitas, infrastruktur, dan logistik regional darat, laut, dan udara, yang mampu mendorong pengembangan potensi yang sama di 3 provinsi. Pola-pola kerjasama antar daerah juga belum fokus pada pengembangan pariwisata, pertanian, peternakan, perindustrian, perdagangan, Perhubungan, kelautan, perikanan, dan UMKM yang berdaya-saing. Potensi energi baru terbarukan di 3 Provinsi ini dapat menjadi sumber energi baru yang sejalan dengan transformasi ekonomi hijau. Selain itu, isu kebencanaan juga menjadi penting dalam regional Bali-Nusra karena kondisi alam

secara geografis berada pada lempeng gunung api, yang rentan terhadap bencana gempa bumi dan lainnya.

Berdasarkan arah pembangunan wilayah Bali-Nusra dengan tema Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara Bertaraf Internasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, maka beberapa isu regional Bali-Nusra sekaligus sebagai arah pembangunan adalah sebagai berikut :

Kawasan Strategis :

1. Percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas destinasi pariwisata khususnya wisata petualangan pada kawasan prioritas DPP Lombok-Gili Tramena.
2. Pengembangan aglomerasi industri Kawasan Industri Sumbawa Barat sebagai pusat pertumbuhan baru.
3. Penguatan kawasan papriwisata prioritas eksisting DPP Labuan Bajo dan destinasi perpanjangan di Pulau Flores (Kabupaten Manggarai, Kabupaten Ngada, Kabupaten Ende).
4. Pengembangan ekosistem dan destinasi kepariwisataan holistik 6A guna mewujudkan *quality & sustainable tourism* sesuai klasterisasi keunggulan aktivitas di Provinsi Bali.

Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah :

Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat intra dan antar wilayah tersebar di beberapa Kab/Kota.

Kawasan Sentra Produksi Pangan :

1. Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP) Belu yang didukung dengan kawasan transmigrasi Tasifeto-Mandeu dan KSP Sumba Tengah.
2. Penguatan kemandirian pangan daerah dengan pengembangan pertanian holistik kemitraan hulu-hilir sesuai klasterisasi pengembangan koridor pangan dan pertanian prioritas di Provinsi Bali.
3. Pengembangan lumbung pangan nasional berupa pertanian dan peternakan di Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB.
4. Penguatan sentra pangan lokal berupa pertanian tanaman pangan, akuistik, hewan dan buah-buahan di Provinsi NTT.

Sentra Pemerataan Ekonomi Rintisan :

1. Kawasan Pariwisata Rintisan : Penyiapan kawasan pariwisata rintisan di Pulau Sumba (Kabupaten Sumba Barat daya)
2. Kawasan Terintegrasi Berbasis Perikanan : Penyiapan pengembangan ekosistem serta industri berbasis komoditas rumput laut di Jabupaten Alor, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Kupang dan Kota Kupang dengan dukungan kontribusi produksi kabupaten sekitarnya.

3. Kawasan Perkotaan :
    a. Pengembangan ekosistem high value economy & industry pada WM Denpasar (kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan).
    b. Pengembangan kawasan perkotaan singaraja (kabupaten bulelelng) sebagai kota pendidikan dan riset berwawasan global serta kota pariwisata pusaka dan sejarah.
    c. Pengembangan kawasan perkotaan pariwisata Mataram.
    d. Pengembangan kawasan perkotaan pariwisata Manggarai Barat.

2.6.2.4 Isu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi NTB Tahun 2025-2045

Berbagai kondisi yang menjadi tantangan dalam pencapaian sasaran Visi Indonesia Emas 2045 yang meliputi berbagai aspek ekonomi, sosial, tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, pertahanan dan diplomasi, ketahanan sosial budaya dan ekologi, kewilayahan dan infrastruktur, serta pembiayaan dan manajemen pembangunan yang dirumuskan dalam Isu Strategis jangka panjang daerah Provinsi NTB adalah sebagai berikut :

1. Produktivitas dan Pengembangan Wilayah Kepulauan Masih Rendah
2. Kualitas Sumber Daya Manusia Masih Rendah
3. Kondisi Lingkungan Sosial Budaya Dan Ekologi Belum Aman Berkelanjutan Mendukung Transformasi Daerah
4. Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal
5. Taraf Hidup Dan Kesejahteraan Masyarakat Masih Rendah

2.6.2.5 Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2025-2029

Penyusunan RPJMD yang terintegrasi dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) memerlukan hasil analisis yang sistematik, partisipatif, dan menyeluruh guna mendukung perumusan isu-isu strategis daerah dan arah kebijakan melalui rekomendasi KLHS. Kajian ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan telah memperhatikan potensi dampak pembangunan terhadap lingkungan, serta memenuhi prinsipprinsip pembangunan berkelanjutan. KLHS menghasilkan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, dan adaptasi.

KLHS RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 menjadi dasar dalam mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029, dengan memastikan bahwa data dan informasi, hasil analisis, serta rekomendasi kebijakan, prinsip pembangunan berkelanjutan yang tertuang pada KLHS telah menjadi dasar dan terintegrasi di dalam muatan kebijakan, rencana, dan program dalam dokumen RPJMD.

Berdasarkan capaian daerah kewenangan Provinsi NTB untuk TPB, ada 235 indikator dalam mencapai SDGs hingga tahun 2030. Adapun setelah dilakukan pengelompokkan dan kategorisasi isu strategis, diperoleh sebanyak 9 (sembilan) isu strategis sebagai berikut:

1. Masih tingginya angka kemiskinan;
2. Masih rendahnya taraf kesehatan masyarakat;

3. Masih rendahnya kualitas maupun kuantitas pendidikan;
4. Belum optimalnya konektivitas dan infrastruktur dasar wilayah;
5. Masih tingginya angka pengangguran dan kurangnya kualitas tenaga kerja;
6. Degradasi lingkungan hidup, perubahan iklim, dan mitigasi bencana;
7. Kurangnya kepastian hukum, serta lemahnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
8. Kurangnya daya saing wilayah; dan
9. Lemahnya kapasitas kelembagaan, birokrasi, dan belum optimalnya pelayanan publik.

2.6.2.6 Isu Strategis Provinsi NTB

Isu strategis merupakan kondisi yang harus mendapatkan perhatian atau prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah karena mempunyai dampak yang signifikan bagi daerah masa mendatang dan bersifat mendasar dan membutuhkan perhatian serta solusi yang tepat agar tidak menghambat perkembangan. Sehingga isu strategis menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan rencana pembangunan. Berdasarkan identifikasi dari berbagai sumber yaitu hasil analisis isu strategis global, nasional dan regional, serta mempertimbangkan kebijakan pembangunan Provinsi NTB dari berbagai dokumen diantaranya, RPJPD, RTRW, KLHS dan potensi dan permasalahan pembangunan kekinian di Provinsi NTB dan daerah sekitar, maka ditetapkan isu strategis Provinsi NTB yaitu :

1. Penurunan Tingkat Kemiskinan

Isu kemiskinan di NTB masih menjadi perhatian serius. Meskipun ada upaya penurunan, angka kemiskinan di NTB masih di atas rata-rata nasional dan menjadi tantangan bagi pemerintah daerah. Pada Maret 2024, persentase penduduk miskin di NTB mencapai 12,91% atau sekitar 709.01 ribu orang, yang turun dari periode sebelumnya. Meskipun ada penurunan, NTB masih berada di atas rata-rata kemiskinan nasional yang sekitar 9,03%

Beberapa faktor yang memperburuk permasalahan kemiskinan di NTB:

- Kualitas Sumber Daya Manusia yang Rendah, hal ini dipengaruhi oleh akses dan kualitas pendidikan yang belum merata, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan, menjadi salah satu penyebab kemiskinan.
- Keterbatasan Lapangan Kerja, karena kurangnya lapangan pekerjaan yang memadai dan berkualitas, serta persaingan yang ketat, menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan penghasilan yang layak.
- Ketergantungan pada Sektor Pertanian, dimana sebagian besar masyarakat NTB bekerja di sektor pertanian dengan produktivitas yang masih rendah dan rentan terhadap perubahan iklim, seperti kekeringan dan banjir, dapat mengganggu sektor pertanian yang merupakan mata pencaharian utama masyarakat miskin
- Kondisi Geografis dan Infrastruktur, di beberapa daerah di NTB memiliki kondisi geografis yang sulit dijangkau dan infrastruktur yang terbatas, menghambat akses ke layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
- Kesenjangan Pendapatan, yang ditunjukkan oleh adanya kesenjangan pendapatan yang cukup tinggi antara kelompok masyarakat mampu dan tidak mampu, yang memperburuk kondisi kemiskinan

- Keterpaduan program dan ketidak-tepatan kelompok sasaran yang disebabkan oleh lemahnya koordinasi dan sinergi antar lembaga terkait, baik di tingkat nasional, provinsi maupun Kab/Kota, masih perlu ditingkatkan dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM),

Kualitas Sumber Daya Manusia di NTB masih menjadi tantangan, meskipun ada peningkatan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas SDM di NTB antara lain pendidikan dan kesehatan, yang diindikasikan dengan rendahnya rata-rata lama sekolah yang baru mencapai 7,87 tahun, yang setara dengan sekitar dua tahun di Sekolah Menengah Pertama (SMP), hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan penduduk NTB dengan tamatan SD ke bawah yang masih cukup tinggi mencapai 42,08%. Untuk itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam peningkatan kualitas SDM, termasuk melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi agar SDM NTB mampu bersaing dan berkontribusi positif bagi pembangunan daerah. Pada aspek kesehatan, masih tingginya angka kematian ibu dan balita sehingga berdampak pada rendahnya usia harapan hidup. Masih tingginya angka prevalensi stunting serta peningkatan kasus penyakit menular dan tidak menular seperti tubercolosis, diabetes, hipertensi, dan obesitas juga menjadi perhatian

3. Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan antar wilayah sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan Provinsi NTB merupakan isu penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Latar belakang isu ini terjadi karena Ketimpangan pembangunan antar Kab/Kota di Pulau Lombok, Provinsi NTB, menunjukkan bahwa Kota Mataram masih merupakan daerah cepat maju dan cepat tumbuh, dan jauh meninggalkan 9 kabupaten kota lainnya, tingkat ketimpangan di Pulau Lombok relatif rendah dengan nilai IW < 0,035. Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tingkat ketimpangan, Kurangnya pertimbangan lingkungan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan seperti menurunnya kualitas guna lahan, degradasi lingkungan. Penetapan sektor unggulan dalam pengembangan wilayah belum berdasarkan hasil identifikasi potensi pembangunan masing-masing wilayah. Pengembangan infrastruktur dan sumber daya manusia belum mampu meningkatkan daya saing wilayah Pengembangan infrastruktur dan sumber daya manusia belum mampu meningkatkan daya saing wilayah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, perlu mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Pemerintah daerah, masyarakat, dan stakeholder lainnya perlu bekerja sama untuk mengatasi isu pertumbuhan dan pemerataan pembangunan antar wilayah sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan di Provinsi NTB

4. Produktivitas dan Perkuatan Pembangunan Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan

NTB memiliki potensi ekonomi yang menjanjikan, terutama di sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Dengan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan diversifikasi ekonomi, NTB seharusnya dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, namun dalam kenyataannya, kemiskinan masih tinggi, produktivitas masih rendah, serta pendapatan per kapita masih rendah. maka peningkatan produktivitas, baik dalam tenaga kerja maupun dalam sektor-sektor ekonomi, menjadi kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, melalui hilirisasi ekonomi, mendorong terus sektor-sektor yang mempunyai nilai tambah tinggi, serta mengoptimalkan pengelolaan potensi pariwisata. Dengan produktivitas yang lebih tinggi, maka NTB dapat menghasilkan lebih banyak barang dan jasa dengan sumber daya yang sama, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan per kapita dan kesejahteraan masyarakat

Isu strategis dalam produktivitas dan penguatan pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan mencakup berbagai aspek penting. Beberapa isu utama meliputi keterbatasan infrastruktur, rendahnya produktivitas, ketimpangan ekonomi, serta kurangnya kesempatan kerja dan lapangan usaha. Selain itu, tantangan dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan juga menjadi perhatian.

a. Keterbatasan Infrastruktur

Infrastruktur Dasar: Keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, listrik, air bersih, dan fasilitas sanitasi dapat menghambat aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.

Infrastruktur Pendukung: Keterbatasan infrastruktur pendukung seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, dan telekomunikasi juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.

Ketimpangan Infrastruktur: Kesenjangan infrastruktur antara daerah perkotaan dan perdesaan juga menjadi masalah yang perlu diperhatikan.

b. Produktivitas Rendah

Produktivitas Tenaga Kerja: Produktivitas tenaga keja yang rendah dapat disebabkan oleh kurangnya keterampilan, pendidikan, dan pelatihan.

Produktivitas Sektor Ekonomi: Produktivitas sektor ekonomi seperti pertanian, perikanan, dan industri juga perlu ditingkatkan melalui inovasi teknologi dan penerapan praktik terbaik.

Rendahnya Daya Saing: Wilayah dengan produktivitas rendah cenderung memiliki daya saing yang rendah dalam skala regional maupun global.

c. Ketimpangan Ekonomi

Kesenjangan Pendapatan: Kesenjangan pendapatan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin dapat memperburuk kondisi sosial dan ekonomi.

Kesenjangan Wilayah: Kesenjangan pembangunan antar wilayah juga perlu diperhatikan, terutama antara daerah perkotaan dan perdesaan.

Akses Terhadap Sumber Daya: Akses terhadap sumber daya seperti modal, teknologi, dan informasi yang tidak merata juga dapat memperburuk ketimpangan ekonomi.

d. Kesempatan Kerja dan Lapangan Usaha

Pengangguran: Tingkat pengangguran yang tinggi, terutama di kalangan pemuda, dapat menjadi masalah serius yang menghambat pertumbuhan ekonomi.

Penciptaan Lapangan Kerja: Pemerintah daerah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja baru.

Diversifikasi Ekonomi: Mendorong diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor potensial selain sektor yang sudah ada dapat menciptakan lapangan kerja baru.

e. Pembangunan Berkelanjutan:

Pelestarian Lingkungan: Pembangunan ekonomi harus mempertimbangkan kelestarian lingkungan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

Pemanfaatan Teknologi: Pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dan efisien dalam kegiatan ekonomi dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Pengelolaan Bencana: Pembangunan berkelanjutan juga perlu mempertimbangkan potensi bencana alam dan upaya mitigasinya.

f. Tata Kelola Pemerintahan

Efektivitas Tata Kelola: Tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan publik dan menarik investasi.

Keterlibatan Masyarakat: Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan daerah.

Koordinasi Antar Lembaga: Koordinasi yang baik antar lembaga pemerintah dan sektor swasta juga penting untuk mencapai tujuan pembangunan.

g. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Pendidikan dan Pelatihan: Investasi dalam pendidikan dan pelatihan tenaga kerja dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Kesehatan Masyarakat: Kesehatan masyarakat yang baik juga merupakan faktor penting dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup.

Pemberdayaan Masyarakat: Pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam pembangunan.

h. Pengembangan Potensi Daerah

Komoditas Unggulan: Mengembangkan komoditas unggulan daerah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan menarik investasi.

Pariwisata: Pengembangan potensi pariwisata daerah dapat meningkatkan pendapatan daerah dan menciptakan lapangan kerja.

Sektor Ekonomi Kreatif: Pengembangan sektor ekonomi kreatif seperti seni, budaya, dan kerajinan tangan dapat meningkatkan pendapatan dan daya tarik daerah.

5. Penguatan Tata kelola Pemerintahan Daerah.

Salah satu tantangan dalam Birokrasi identik dengan pelayanan yang lambat, prosedur yang berbelit, dan budaya afiliasi yang melekat sehingga mendorong terjadinya praktik KKN, maka pemerintah provinsi NTB dalam melakukan tata kelola pemerintahan daerah harus

berfokus pada peningkatan transparansi, efektivitas dan efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam hal pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya daerah. Dengan kemajuan teknologi dan informatika, sudah seharusnya Pemerintah NTB terus berupaya membangun tata kelola yang baik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi melalui e-government/penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, digitalisasi pelayanan publik serta meningkatkan sinergi dan kolaborasi antarinstansi dan pemangku kepentingan, dengan terus meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur, melakukan transformasi birokrasi dengan penyederhanaan struktur organisasi, peningkatan efisiensi, dan penerapan meritokrasi dalam pengelolaan sumber daya aparatur

Tabel 2. 134 Rumusan Isu Strategis Daerah RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis Daerah
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Provinsi NTB memiliki Bonus demografi jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif (0–14 tahun dan 65+ tahun) pada periode 2025–2035 2. Pertanian di Provinsi NTB memiliki potensi yang besar dan variatif didukung oleh kondisi agroekosistem yang cocok untuk pengembangan komoditas pertanian dan sebagai komponen penting dalam pembangunan daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan yang mencakup sektor tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan, dan peternakan. 3. Provinsi NTB terdiri dari 2 pulau Besar yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, dan dikeliling 401 pulau kecil dengan 32 pulau diantaranya berpenghuni dan Sebagian menjadi obyek pariwisata. Dalam konteks geografi pariwisata, Provinsi NTB berada pada posisi yang strategis atau berada pada segitiga emas daerah tujuan wisata (DTW) utama Indonesia yaitu Pulau Bali di sebelah barat sebagai tujuan wisata internasional, Taman Wisata Pulau Komodo di sebelah timur dan Tanah Toraja di sebelah utara 4. Provinsi NTB merupakan salah satu provinsi yang memiliki komoditas sumber daya mineral yang sangat besar yang dapat memberikan kontribusi bagi	Masih Tingginya Tingkat Kemiskinan dan Masalah Sosial lainnya	Masih tingginya angka kemiskinan	1. Geopolitik dan Geoekonomi 2. Perlemahan ekonomi China 3. KebUakan Protekslonltme Amerika Serikat 4. Dampak Perubahan Iklim Global	Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat	TPT seluruh provinsi telah lebih rendah dari capaian nasional, namun tingkat pengangguran terbuka tertinggi cenderung terdapat pada lulusan di atas pendidikan dasar	Penurunan Tingkat Kemiskinan
		Masih tingginya angka pengangguran dan kurangnya kualitas tenaga kerja		Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif	Kesejahteraan Bali lebih baik dibandingkan Witayah Nusa Tenggara yang angka kemiskinannya masih tinggi	
					kondisi kemiskinan yang masih tinggi di NTB dan NTT juga disebabkan oleh tingginya status pekerja buruh tidak tetap	
	Masih Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Masih rendahnya taraf kesehatan masyarakat		Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	NTB dan NTT memiliki IPM lebih rendah dari Nasional	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
		Masih rendahnya kualitas maupun kuantitas pendidikan			Kualitas SDM yalg rendah juga disebabkar oteh tingginya prevalensi stunting dibandingkan nasional	
	Pertumbuhan Ekonomi Daerah Belum Inklusif	Kurangnya daya saing wilayah		Rendahnya Produktivitas	Perekonomian Wilayah Bali-Nusa Tenggara mengalami perlambatan	Produktivitas dan Perkuatan Pembangunan Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis Daerah
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
pembangunan wilayah. Beberapa jenis mineral yang ditemukan di NTB, antara lain; emas, perak, bauksit, timah, pasir besi, batu bara, kalsium, dan mangan 5. Adanya kebijakan hilirisasi melalui pembangunan smelter yang memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja industri pengolahan khususnya sub sektor industri pengolahan logam dasar di NTB 6. Provinsi NTB memiliki potensi energi terbarukan yang dapat dikembangkan sebagai sumber energi listrik diantaranya panas bumi, energi air, energi angin dan terutama energi matahari. 7. Sebagai provinsi dengan memiliki wilayah perairan yang luas, potensi perikanan di Provinsi NTB cukup menjanjikan bahkan salah satu komoditi ekspor unggulannya adalah ikan segar dan mutiara. Komoditas perikanan terbagi menjadi perikanan tangkap seperti cakalang, tongkol, tuna, udang, dan lainnya. Untuk perikanan budidaya dengan komoditas rumput laut, lobster, kerapu, udang, bandeng, nila, lele, mas, gurami, dan lainnya.	Belum Optimalnya Pembangunan Infrastruktur	Belum optimalnya konektivitas dan infrastruktur dasar wilayah			Isu kesenjangan antarwilayah masih terjadi di Provinsi NTB dan NTT, seiring dengan terkonsentasinya aktivitas ekonomi pada Kab/Kota tertentu	Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
	Degradasi Lingkungan dan Kebencanaan Masih Tinggi	Degradasi lingkungan hidup, perubahan iklim, dan mitigasi bencana		Krisis Lingkungan	Wilayah Bali-Nusa Tenggara memiliki indeks risiko bencana kategori sedang, namun terdapat potensi bencana karena dilewati beberapa patahan sesar seperti *Flores Back Arc Thrust, Lombok Strait Strike-slip Fault, Teluk Panas Fault, Sape Strike slip Fault, Bondowatu Fault, Sumba Ridge Thrust, Savu Thrust, Semau Fault, Sape Strike-slip Fault, dan Sumba Strike-slip Fault*	
					Banyaknya kawasan konservasi yang berlokasi di sekltar kawasan pertumbuhan sehingga berpotensi terdampak oleh pengembangan kawasan pertumbuhan	

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis Daerah
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Masih belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah	Kurangnya kepastian hukum, serta lemahnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		Geopolitik dan Geoekonomi		Penguatan Tata kelola Pemerintahan Daerah
		Lemahnya kapasitas kelembagaan, birokrasi, dan belum optimalnya pelayanan publik		Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah		

Sumber : Analisa Bappeda NTB, 2025

Gili Terawangan

Gili Trawangan adalah surga tropis kecil di Lombok yang penuh pesona unik dan budaya global. Pulau tanpa kendaraan bermotor ini hanya mengenal sepeda dan cidomo, menciptakan suasana tenang tanpa asap dan bising. Di bawah lautnya, hamparan terumbu karang dan penyu laut menarik wisatawan penyelam dari seluruh dunia. Saat senja tiba, pantai berubah jadi panggung pesta dengan musik, fire dance, dan cahaya lampu yang romantis. Uniknya, dari satu pulau ini kamu bisa menikmati matahari terbit di balik Gunung Rinjani dan matahari tenggelam di balik Gunung Agung.

Kab. Lombok Utara, Provinsi NTB
8°20'53.0"S 116°02'15.9"E

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Sirkuit Mandalika

Sirkuit Internasional Mandalika adalah lintasan balap motor berkelas internasional yang terletak di area pantai mandalika dengan panjang lintasan 4,31 km dan 17 tikungan, dimana penyelenggaraan ajang balap motor paling bergengsi MotoGP digelar pada tanggal 19-20 Maret 2022

Kab. Lombok Timur, Provinsi NTB
8°24'52"S 116°27'35"E /
8.414414°S 116.459767°E

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB (NTB) Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan tahap pertama dalam implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi NTB Tahun 2025-2045. RPJPD Provinsi NTB telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

Dalam RPJPD tahun 2025-2045 telah ditetapkan visi Provinsi NTB Tahun 2045 adalah terwujudnya NTB Provinsi Kepulauan yang Maju, Kuat, Aman Berkelanjutan dan Sejahtera. visi tersebut disebut dengan visi NTB Emas 2045; yang mana pada saat Indonesia merayakan 100 tahun Indonesia merdeka, Provinsi NTB dapat mencapai masa keemasannya untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas tahun 2045.

Visi NTB Emas 2045 tercermin pada Ekonomi Maju, Sumber Daya Manusianya Kuat, Aman Berkelanjutan Lingkungannya, serta Sejahtera Masyarakatnya. Ekonomi NTB semakin maju bertransformasi menjadi provinsi kepulauan dengan pendapatan perkapita yang setara dengan daerah maju. Selanjutnya manusia NTB semakin sehat, cerdas, kuat, memiliki kompetensi, karakter unggul, andal dan taqwa. Adapun wilayah NTB diharapkan semakin aman, memiliki ketangguhan menghadapi risiko bencana dan pengelolaan lingkungan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pada akhirnya diharapkan masyarakat NTB dapat hidup sejahtera, memiliki kecukupan pangan, sandang, papan/perumahan, air, energi serta keluarga berkualitas, kesetaraan gender, inklusif, kreatif, inovatif, adaptif dan berprestasi.

Gambar 3. 1 Visi NTB Emas 2045

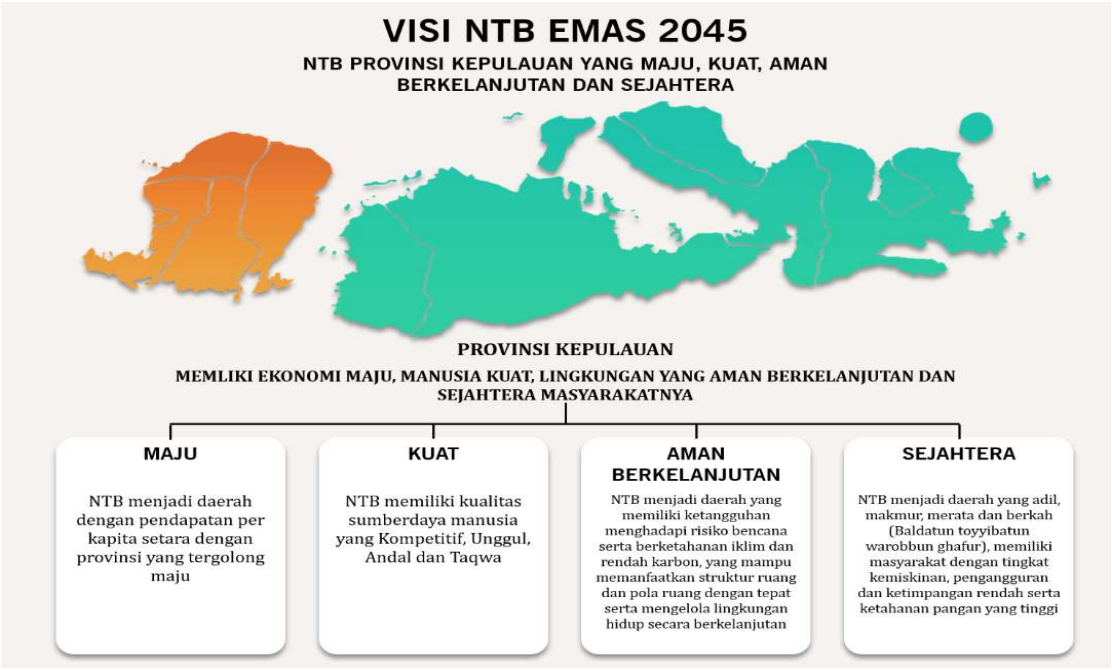

Sumber : Perda No. 9 Tahun 2024 tentang RPJPD Provinsi NTB Tahun 2025-2045

Pencapaian visi NTB Emas 2045 dilaksanakan melalui 8 misi (agenda) pembangunan yang selaras dengan misi (agenda) pembangunan nasional 2025-2045 sebagaimana termuat didalam Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. Indikator pencapaian visi NTB Emas 2045 digambarkan dalam 5 sasaran visi RPJPD provinsi NTB tahun 2025-2045 sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Lima Sasaran Visi NTB Emas 2045

RPJPD NTB 2025-2045					
NO	SASARAN VISI		INDIKATOR	SASARAN	
				2025	2045
1	Peningkatan Pendapatan Per Kapita	a	PDRB PER KAPITA (JUTA RUPIAH)	32,73 – 32,98	241,48 - 275,57
		b	INDEKS EKONOMI BIRU INDONESIA (IBEI)	54,53	210,50
		c	KONTRIBUSI PDB INDUSTRI PENGOLAHAN (PERSEN)	7,66	18,95 - 21,27
2	Pengentasan Kemiskinan dan ketimpangan	a	TINGKAT KEMISKINAN (PERSEN)	11,68 - 12,18	0,30 - 0,80
		b	RASIO GINI	0,369 - 0,373	0,307 - 0,351
		c	KONTRIBUSI PDRB PROVINSI (PERSEN)	0,82	1,21
		d	PERTUMBUHAN EKONOMI (PERSEN)	6,00 - 6,50	6,33 - 7,76
3	Pengaruh kepemimpinan Pemerintah Daerah yang efektif	a	INDEKS INOVASI DAERAH	76,5	100
		b	INDEKS DAYA SAING DAERAH	3,4	5
4	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	a	INDEKS MODAL MANUSIA	0,54	0,67
5	Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju emisi nol bersih (*net zero emission*)	a	PENURUNAN INTENSITAS EMISI GRK (PERSEN)	25,99	94,88
		b	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	76,19	83,34

Sumber : Perda No. 9 RPJPD NTB Tahun 2025-2045

Untuk mencapai 5 sasaran visi tersebut dilaksanakan 8 misi (agenda) pembangunan provinsi NTB tahun 2025-2045 sebagai berikut :

1. **Mewujudkan Transformasi Sosial**

   Transformasi sosial diperlukan dalam rangka menjamin tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat dan kecukupan ekonomi masyarakat sehingga tercapai manusia NTB yang kompetitif, unggul, andal, taqwa berdaya saing dan semakin sejahtera. Transformasi sosial dilakukan dengan memastikan penyediaan layanan dasar secara merata dan inklusif, terutama penyediaan akses pendidikan yang semakin inklusif, kesehatan untuk semua, dan jaminan perlindungan sosial. Dengan transformasi sosial, pemerintah daerah menjamin bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki hak yang sama dan inklusif dalam mendapatkan pelayanan dasar tanpa memandang latar belakang, identitas, dan status.

2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi

Transformasi ekonomi NTB 2045 ditunjukkan dengan proses secara terus-menerus untuk mendorong sektor-sektor ekonomi yang saat ini memiliki produktivitas rendah menjadi sektor-sektor ekonomi yang saat ini memiliki produktivitas tinggi, terutama dengan menggerakkan sektor-sektor unggulan daerah. Transformasi ekonomi juga dilakukan dengan menggerakkan sumber daya manusia (SDM) ditengah tantangan meningkatnya jumlah penduduk usia produktif agar menjadi bonus/deviden demografi yang perlu prasyarat investasi yaitu dengan memasukkan ilmu pengetahuan dan vokasi/keterampilan ke dalam sumber daya pikir agar lebih kreatif, produktif dan inovatif sehingga mampu menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai tambah dan bersaing di pasar global. Sektor unggulan daerah NTB yang sampai saat ini memberikan kontribusi besar pada perekonomian NTB yaitu pertambangan, sektor pertanian (dalam arti luas), sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, dan sektor pariwisata. Agar tingkat produktivitas meningkat ke depan, maka produksi sektor-sektor tersebut lebih didorong untuk mampu menuju hilirisasi, didukung dengan digitalisasi ekonomi, serta berbasis pada riset dan inovasi. Selain itu juga didorong untuk pengembangan ekonomi kreatif dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Transformasi ekonomi tersebut diarahkan dengan menerapkan ekonomi hijau dan ekonomi biru yaitu model pembangunan ekonomi yang menunjang pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Selain itu, transformasi ekonomi juga dilakukan melalui transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola

Transformasi tata kelola menjadi penting dalam rangka mendorong pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan untuk bekerja lebih efektif dan akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan publik lebih optimal. Transformasi tata kelola pemerintahan ke depan mengarah pada tata kelola pemerintahan yang dinamis dengan memperkuat pemerintahan yang semakin adaptif dan kolaboratif, senantiasa bergerak cepat, tanggap dalam menghadapi situasi maupun gejolak apapun dan dapat langsung beradaptasi pada segala bentuk perubahan yang terjadi dengan tetap menjaga integritas semakin kuat. Birokrasi yang dinamis tercermin dari pelayanan publik yang semakin berkualitas, manajemen organisasi dan proses bisnis yang semakin adaptif dan berorientasi pada hasil, kelembagaan yang efektif, digitalisasi tata kelola pemerintahan, manajemen sumber daya aparatur yang efektif dan efisien, regulasi, pengawasan yang independen dan berintegritas, pengembangan budaya kerja, pola pikir birokrasi, serta komitmen. Birokrasi kolaboratif juga menjadi hal penting untuk diwujudkan dalam konteks membangun tata kelola pemerintahan yang dinamis. Hal tersebut didasari karena adanya dependensi antardaerah yang pada akhirnya akan semakin besar. Tidak

hanya kolaborasi antardaerah, kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya perlu semakin diperkuat agar tujuan pembangunan daerah dapat dicapai.

4. **Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah**

   Upaya perwujudan visi pembangunan daerah jangka panjang melalui transformasi akan dapat berjalan semakin optimal dengan didukung kondisi keamanan daerah yang tangguh, demokrasi substansial, dan stabilnya ekonomi makro daerah. Kemanan daerah yang tangguh akan menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, rasa aman dan nyaman, serta wilayah yang kondusif bagi seluruh masyarakat NTB. Selanjutnya, perwujudan demokrasi substansial akan mampu menghasilkan pemerintahan yang semakin efektif dan responsif. Sedangkan stabilnya kondisi ekonomi makro daerah akan mampu menciptakan kemudahan bagi masyarakat dan usaha kecil menengah dalam mengakses layanan keuangan, mendorong pertumbuhan inklusif dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dengan terciptanya kondisi tersebut, diharapkan akan mendukung implementasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, menarik investasi, menciptakan pekerjaan yang layak, dan mengalokasikan sumber daya secara efektif.

5. **Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi**

   Modernisasi dan globalisasi memiliki dua sisi implikasi terhadap kehidupan masyarakat. Di satu sisi, kehidupan modern dan maju perlu direspon agar tidak terjadi ketertinggalan. Di sisi lain, modernisasi dan globalisasi juga memberikan implikasi negatif pada pola pikir dan perilaku masyarakat yang kehilangan identitas dan jati dirinya, sehingga muncul karakter baru yang tidak sejalan dengan budaya asli Sasak, Samawa, Mbojo (Sasambo), mengabaikan aspek moral, serta menganggap bahwa nilai spiritual menjadi tidak penting. Untuk itu ketahanan budaya menjadi hal penting untuk kemudian akan mampu mengembalikan karakter masyarakat NTB pada identitas dan jati diri yang sesuai dengan budaya luhur NTB.

   Membangun ketahanan budaya setidaknya ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh masyarakat. Pertama, kemampuan memelihara sistem nilai budaya Sasak, Samawa, Mbojo (Sasambo) yang dianut karena budaya adalah endapan dari perilaku manusia. Budaya masyarakat itu sendiri dapat berubah karena terjadi transformasi nilai dari masyarakat terdahulu ke masyarakat saat ini dan kemudian, tetapi dengan tetap memelihara nilai-nilai luhur. Kedua, kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan dunia yang berubah dengan cepat. Masyarakat akan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan serta memanfaatkan peluang yang timbul untuk menjadi unggul. Ketiga, adanya fungsi integrasi semua unsur masyarakat yang beraneka ragam secara terus menerus sehingga terbentuk kekuatan yang semakin menyatukan masyarakat. Keempat, masyarakat harus memiliki tujuan bersama dari masa ke masa untuk bertransfromasi karena terus

akan diperbaiki oleh dinamika masyarakatnya dan oleh para pemimpinnya. Selain itu juga menjadi penting untuk menempatkan peran dan fungsi agama dalam konteks membangun ketahanan budaya. Dengan menganut agama secara mendalam dan inklusif maka masyarakat diharapkan akan mampu melihat perubahan dan kemajuan yang terjadi di dunia secara jernih sekaligus dapat membentengi diri dari terjangan budaya asing yang banyak tidak sesuai dengan karakter dan budaya.

Untuk membentuk ketahanan budaya, nilai agama dan nilai budaya ditanamkan sejak dini melalui pendidikan karakter dari dalam keluarga, sehingga hal ini juga berkaitan dengan pentingnya ketahanan keluarga sebagai pondasi pembentukan karakter masyarakat sejak dini. Setelah itu, penanaman pondasi karakter juga mulai dilakukan di sektor pendidikan formal untuk melengkapi proses karakterisasi anak-anak sejak dini. Penanaman nilai budaya tidak terbatas pada pembelajaran seni, tradisi, dan warisan budaya semata, namun juga upaya menumbuhkembangkan budaya mencintai alam lingkungan dan mitigasi bencana, serta budaya literasi dalam berbagai aspek. Ketahanan budaya yang kuat dan kokoh akan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat, selain itu sebaliknya ketahanan budaya akan tercapai apabila didukung dengan kondisi lingkungan wilayah yang kondusif yang akan menjamin lancar dan amannya semua pihak dalam proses pembangunan NTB.

Di sisi lain, pembangunan akan dapat berjalan dengan optimal tidak terlepas dari kebutuhan akan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup yang baik. Oleh karena itu, ketahanan sumber daya alam dan ekologi harus kuat, maka menjadi penting untuk menjaga kelestarian sumber daya alam untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah NTB. Ketahanan ekologi fokus pada memantapkan ketahanan sumber daya lahan dan pesisir, ketahanan air, ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan sumber daya mineral, kualitas lingkungan hidup, penataan ruang, ketahanan perubahan iklim, dan ketangguhan bencana. Dengan terjaganya sumber daya alam dan lestarinya lingkungan hidup akan dapat mengurangi potensi terjadinya bencana. Pemantapan ketahanan ekologisalah satu upayanya adalah dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas masyarakat, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan

Arah pembangunan kewilayahan di NTB adalah untuk mengembangkan perekonomian wilayah berdasarkan potensi dan karakteristik masing-masing daerah. Pembangunan perekonomian NTB berbasis pada sektor pertambangan, pertanian (dalam arti luas), industri, perdagangan, dan pariwisata yang dikembangkan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah untuk memadukan

fungsi budidaya dan lindung, serta keterpaduan pengelolaan alam darat dan pesisir.

Pembangunan wilayah di NTB dibagi menjadi 3 (tiga) Rencana Sistem Pusat Permukiman, yaitu (1) Pusat Kegiatan Nasional (PKN); (2) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); dan (3) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan mempertimbangkan kesatuan geografis, karakteristik dan interaksi wilayah serta sistem permukiman. Pembagian wilayah pengembangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah dan kelompok pendapatan, yang dilihat dari tingkat kesejahteraan serta pertumbuhan ekonomi serta berfungsi untuk mengembangkan wilayah-wilayah yang masih berada pada performa pertumbuhan yang rendah dan mendorong kerja sama antardaerah yang saling menguntungkan pada berbagai sektor.

7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi salah satu prasyarat penting dalam peningkatan perekonomian daerah, serta menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung upaya transformasi. Dukungan pembangunan sarana dan prasarana tersebut berkaitan dengan pergerakan orang, distribusi barang dan jasa, serta upaya peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah. Upaya yang dilakukan terutama dengan penyediaan jalan dan jembatan dalam kondisi mantap dan sesuai standar, peningkatan kelancaran serta keselamatan perjalanan dan transportasi, didukung juga dengan peningkatan kualitas, pemerataan simpul dan jaringan transportasi, serta integrasi pelayanan transportasi umum.

Sarana prasarana lainnya yang menjadi penting untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah adalah sarana prasarana sumber daya air terutama untuk penyediaan air baku, jaringan listrik, energi, komunikasi dan informasi. Penyediaan sarana prasarana bagi masyarakat juga menjadi salah satu prasyarat untuk mendukung aktivitas masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama dalam penyediaan perumahan, permukiman, air minum aman, dan sanitasi aman. Pembangunan sarana prasarana tersebut tetap berprinsip pada sarana prasarana yang ramah lingkungan guna menjaga kelestarian lingkungan serta mengurangi risiko kerusakan lingkungan. Untuk itu menjadi penting bahwa pembangunan sarana prasarana harus berpedoman pada rencana tata ruang yang sudah ditetapkan agar kualitas ruang tetap terjaga dan lestari.

8. Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan untuk Mengawal Pencapaian Indonesia Emas

Dalam rangka perwujudan visi pembangunan NTB 2045 agar tercapai maka diperlukan implementasi pembangunan yang berkesinambungan. kesinambungan pembangunan sampai dengan tahun 2045 didukung dengan

kaidah pelaksanaan yang efektif dan pembiayaan pembangunan yang memadai. Kaidah pelaksanaan merupakan norma yang mengatur mekanisme proses pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pengendalian, sistem insentif, perubahan, dan komunikasi kepada publik. Selain itu, upaya perwujudan visi pembangunan agar tetap berkesinambungan akan memerlukan kapasitas pembiayaan yang memadai dengan menciptakan lingkungan pembiayaan yang kondusif, dan pengembangan inovasi pembiayaan.

Misi pembangunan diatas dijabarkan dalam 17 arah dan sasaran pokok pembangunan yang capaian kinerjanya diukur melalui 45 indikator utama pembangunan (IUP). Pada kurun waktu tahun 2025-2029 sebagai tahap pertama implementasi RPJPD tahun 2025-2045 ditetapkan sebagai tahapan perkuatan fondasi transfromasi. Pada tahap pertama ini diharapkan terbangun fondasi transformasi yang kokoh dengan mendayagunakan modal pembangunan yang telah dimiliki dan meningkatkan capaian kinerja yang belum optimal sehingga dapat menyiapkan tahapan akselerasi transformasi pada tahun 2030-2034.

Gambar 3. 2 Fokus Arah Kebijakan RPJPD Provinsi NTB Tahun 2025-2045 Tahap Pertama

Tahapan Pertama merupakan penguatan Fondasi Transformasi

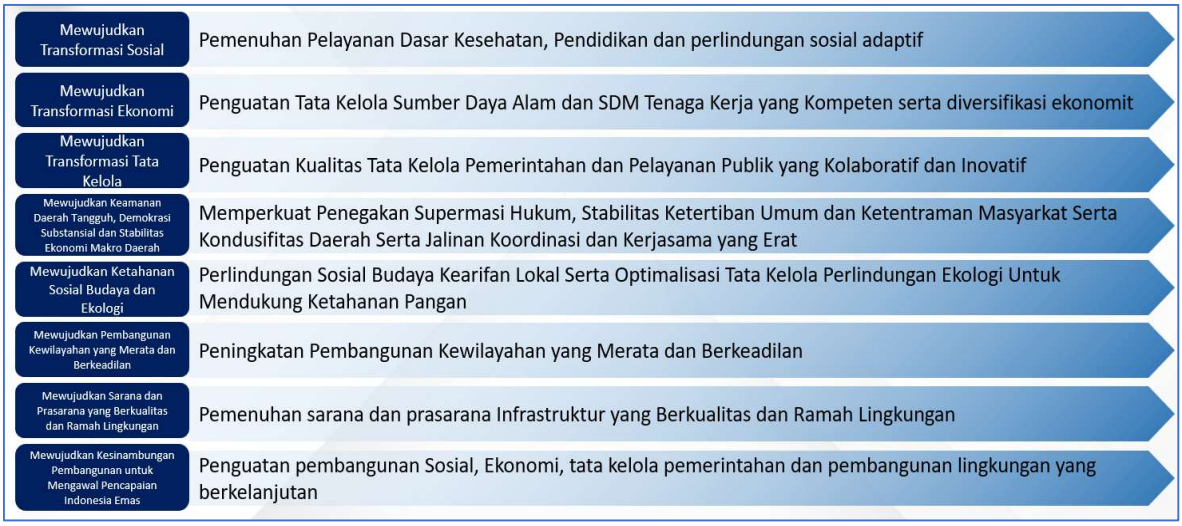

Sumber : Perda No. 9 RPJPD NTB Tahun 2025-2045

Selanjunya sesuai prinsip imperatif RPJPN sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMN dan RPJPD maka RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 diisusun dengan memperhatikan penyelerasan dengan kebijakan RPJPN dan RPJPD Tahun 2025-2045 serta diintegrasikan dengan visi, misi dan Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur.

3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

3.1.1. Visi dan Misi

Dalam pemilihan kepala daerah secara serentak tanggal 27 November 2024 terpilih pasangan Iqbal Dinda sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTB Periode 2025-

2030 dengan Visi Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang makmur mendunia. Visi tersebut telah disosialisasikan dan disampaikan sejak masa kampanye sebagai janji politik yang akan ditunaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi NTB selama masa kepemimpinannya. Oleh karena itu visi tersebut perlu diintegerasikan kedalam dokumen RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 yang disusun secara teknokratis.

Pengintegerasian visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur kedalam dokumen RPJMD berpedoman pada Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Setelah melalui proses pengajuan persetujuan visi dan misi ke DPRD yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2025 berdasarkan kesepakatan Gubernur provinsi NTB dengan DPRD provinsi NTB tentang Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTB Tahun 2025-22029 maka visi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2025-2030 telah meningkat menjadi visi kolektif masyarakat NTB yaitu Visi NTB sebagai Provinsi Kepulauan yang Makmur dan Mendunia.

Sebagai satu visi kolektif masyarakat NTB, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyatakan bahwa provinsi NTB masih dihadapkan dalam tantangan yang memerlukan langkah bersama mengatasi masalah, menemukan solusi dan bertindak nyata untuk mewujudkan NTB yang Makmur dan Mendunia. Makmur diartikan sebagai meningkatnya kesejahteraan rakyat dan menjadikan NTB sebagai lumbung pangan nasional. Sedangkan Mendunia berarti menghadirkan NTB sebagai destinasi pariwisata berkelas internasional. Semangat NTB Makmur Mendunia diyakini dapat menghapus kemiskinan ekstrim dengan membangun dari desa dan menyiapkan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Berlandaskan pada pemikiran tersebut maka rumusan visi RPJMD provinsi NTB tahun 2025-2029 adalah ”BANGKIT BERSAMA MENUJU NTB PROVINSI KEPULAUAN YANG MAKMUR DAN MENDUNIA”. Rumusan visi tersebut mengandung makna filosofis sebagai suatu pemahaman yang mendalam dan mendasar mencakup aspek-aspek hakiki dan karakteristik yang dapat menggambarkan secara jelas dan nyata kondisi Provinsi NTB pada tahun 2029. Ada empat kata kunci yang perlu dipahami artinya untuk menggambarkan pencapaian visi RPJMD Tahun 2025-2029 yakni :

A. Bangkit Bersama:

Suatu spirit dan Tekad Masyarakat NTB melakukan:

1. Akselerasi mengejar ketertinggalan capaian pembangunan nasional
2. Mengokohkan kolaborasi dan sinergi semua pihak
3. Memantapkan peran strategis Provinsi NTB sebagai daerah kepulauan
4. Kontribusi NTB meningkat dalam pembangunan regional dan nasional

B. Provinsi Kepulauan:

Provinsi Kepulauan diartikan sebagai suatu cara pandang atau paradigma dengan

Mengintegrasikan pengelolaan wilayah darat (agro) dan laut (maritim) sebagai satu kesatuan sehingga potensi agromaritim yang dimiliki provinsi NTB dapat

dioptimalkan untuk melakukan diversifikasi ekonomi baik dalam bidang ekonomi hijau, ekonomi biru dan ekonomi sirkuler.

C. Makmur:

Masyarakat NTB dapat mencapai:

1. Kualitas hidup masyarakat NTB mencapai taraf berkecukupan, tidak kekurangan
2. Memiliki derajat kesehatan keluarga yang tergolong keluarga sehat
3. Berpendidikan menengah ke atas
4. Memiliki jaminan sosial
5. Memiliki lingkungan sosial aman dan bebas dari ancaman bencana lingkungan hidup

D. Mendunia

Provinsi NTB berkembang menjadi:

1. Destinasi pariwisata berkualitas dan berkelanjutan dari Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) menjadi Destinasi Pariwisata Standar Global (DPSG)
2. Pilihan utama wisatawan mancanegara menikmati pelayanan pariwisata standar global
3. Diaspora NTB semakin meluas berkembang ke seluruh dunia

Gambar 3. 3 Makna Visi RPJMD NTB 2025-2029

Sumber : Bappeda NTB, 2025

Visi RPJMD Provinsi NTB 2025-2029 selanjutnya disebut sebagai Visi NTB Makmur Mendunia diharapkan dapat mendukung pencapaian Visi Presiden periode 2025-2029 sebagaimana termuat didalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun 2025-2029 yaitu : ”BERSAMA INDONESIA MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045”.

Untuk mencapai Visi NTB Makmur Mendunia ditetapkan tujuh Misi yang disebut SAPTA CITA yaitu :

1. Membangun Manusia yang Berkarakter Unggul, Produktif dan Kompetitif
2. Memperkuat Ekonomi Daerah melalui Peningkatan Produktivitas, Daya Saing dan Pendapatan Perkapita Masyarakat sebagai Fondasi Mewujudkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan
3. Membangun Ekosistem Industri Komoditas Unggulan Sektor Pertanian, Peternakan dan Kelautan Perikanan Menuju terwujudnya Industri Agromaritim yang Berkelanjutan
4. Membangun Sektor Pariwisata Berkualitas, Industri Kreatif serta Mengembangkan Seni Budaya Daerah dan Prestasi Olahraga
5. Memperkuat Sistem Mitigasi Bencana, Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Ramah Lingkungan dan Investasi Berkelanjutan
6. Memantapkan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah yang Berwawasan Lingkungan Serta Memastikan Penegakan Tata Ruang yang Berkelanjutan
7. Mempercepat Transformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Inovatif serta Kepemimpinan yang Kolaboratif dari Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota Sebagai Fondasi Percepatan Pembangunan Daerah

Tujuh Misi NTB Makmur Mendunia yang disebut SAPTA CITA ditetapkan sebagai prioritas daerah yang menjadi struktur pokok seluruh rencana pembangunan dalam RPJMD Tahun 2025-2029. Prioritas daerah diterjemahkan kedalam Program Unggulan sebagai Program Prioritas kepala daerah dengan berbagai kegiatan strategis yang memiliki sasaran kinerja yang terukur dan diintegerasikan dengan Kegiatan Prioritas Utama RPJMN maupun Proyek Strategis Nasional.

Gambar 3. 4 Visi dan Misi RPJMD NTB Tahun 2025-2029

Sumber : Bappeda NTB, 2025

Gambar 3. 5 Sapta Cita sebagai Prioritas Pembangunan Daerah

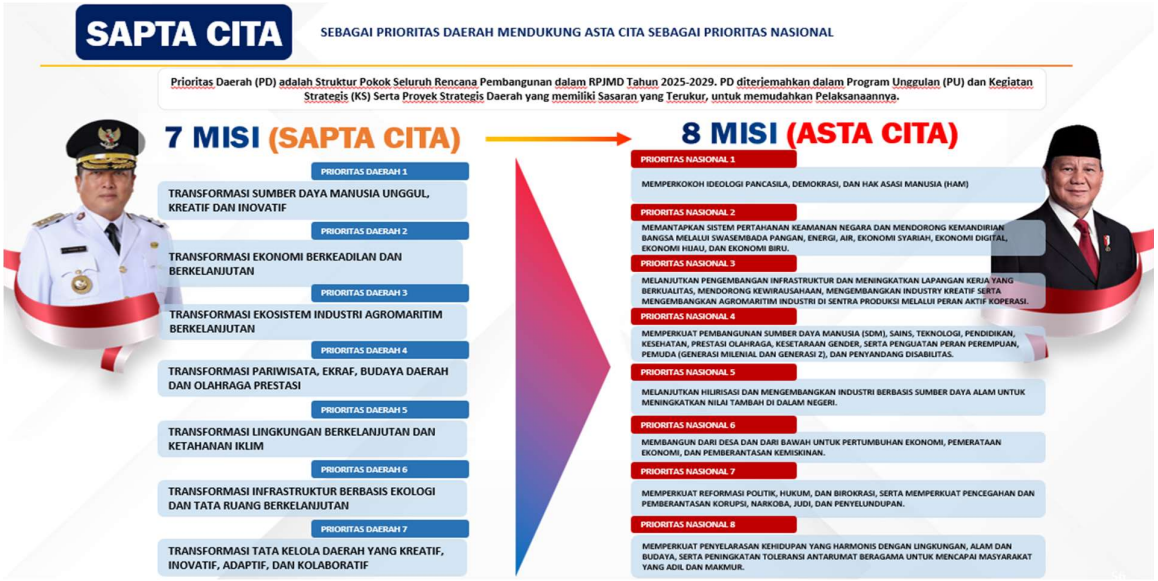

Sumber : Bappeda NTB, 2025

Dalam mewujudkan Visi NTB Makmur Mendunia dengan mengusung tiga agenda besar sebagai pilar pembangunan daerah, yaitu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan yang diharapkan kemiskinan ekstrem menuju nol, penguatan ketahanan pangan yang diharapkan menjadikan NTB sebagai lumbung Pangan nasional dan pengembangan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan yang diharapkan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia, sebagai tujuan utama pembangunan daerah 2025-2029.

Triple Agenda NTB Makmur Mendunia menjadi tujuan pembangunan daerah tahun 2025-2029 yaitu : 1) Pengentasan Kemiskinan Terutama Kemiskinan Ekstrim; 2) Penguatan Ketahanan Pangan Melalui Pembangunan Ekosistem Industri Pertanian Dan Sub Sektornya, dan 3). Menjadikan Ntb Destinasi Wisata Berkelas Dunia. Triple Agenda NTB makmur mendunia selaras dan mendukung Trisula Pembangunan Nasional, yaitu pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Triple Agenda Pertama bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan melalui penyediaan layanan dasar. Agenda kerja prioritas untuk penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan adalah pemenuhan layanan dasar, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi, mengurangi kesenjangan dan ketimpangan, implementasi prinsip GEDSI, pengurangan risiko bencana, peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, akses perlindungan sosial adaptif, ketahanan terhadap risiko dan kerentanan. Penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan, terutama pada kemiskinan ekstrem menuju Nol pada tahun 2029. Fokus pada optimalisasi pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk ketepatan sasaran pengentasan kemiskinan pada kantong kemiskinan di level desa/kelurahan, dengan skema graduasi dan pendampingan intensif, perlindungan sosial adaptif, dan penguatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat untuk kemandirian yang berkelanjutan. Hal ini juga memperhatikan implementasi prinsip

Gender Equality Disability Social Inclusion (GEDSI) dalam pengentasan kemiskinan dan ketimpangan.

Triple Agenda Kedua bertujuan untuk penguatan ketahanan pangan menuju NTB sebagai Lumbung Pangan Nasional. Agenda kerja prioritasnya adalah peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian dan subsektornya, terwujudnya ekosistem industri pertanian dengan sistem agribisnis terintegrasi dari hulu ke hilir, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, penguatan kelembagaan dan kemitraan usaha tani dan nelayan, diversifikasi pangan lokal, infrastruktur dan logistik pangan, akses teknologi dan inovasi, regenerasi petani dan nelayan, ketahanan terhadap risiko dan krisis pangan. Fokus pada upaya untuk mengembangkan industrialisasi dan hilirisasi potensi agromaritim di Provinsi NTB, mengembangkan kawasan industri/hilirisasi agromaritim di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, yang inklusif, padat karya, dan ramah lingkungan. Provinsi NTB mendukung lokasi prioritas kawasan perrtumbuhan, kawasan swasembada pangan, air, energi, kawasan afirmasi, dan kawasan konservasidan rawan bencana, dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Hal lainnya adalah mengembangkan sentra komoditas unggulan berbasis potensi dan keuanggulan tiap Kab/Kota di NTB untuk mendukung ekonomi hijau, ekonomi biru, dan ekonomi sirkular, penguatan ekosistem integrasi hulu-hilir yang bernilai tambah, didukung oleh peta jalan pengembangan komoditas unggulan yang komprehensif.

Triple Agenda Ketiga bertujuan untuk pengembangan pariwisata berkualitas (*quality Tourism*) dan berkelanjutan mewujudkan NTB Destinasi Wisata Berstandar Global. Agenda kerja prioritasnya adalah peningkatan kualitas dan daya saing destinasi wisata, aksesibilitas dan konektivitas, investasi pariwisata berkualitas, MICE, sport tourism kelas dunia, wisata petualangan, ekraf, pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, paariwisata berbasis masyarakat, melestarikan warisan budaya dan kearifan lokal, kualitas SDM dan layanan wisata, digitalisasi dan promosi pariwisata global. Penguatan SDM pariwisata, pemajuan kebudayaan, penyelenggaraan even regional/nasional/internasional secara berkala, membangun Travel Information Center (TIC), dan konektivitas transportasi darat-laut-udara, di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional. Fokus pada sektor pariwisata sebagai sektor basis untuk pengembangan sektor lainnya, dengan implementasi kebijakan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan sejalan dengan amanat RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029. Optimalisasi manajemen risiko kebencanaan pada destinasi pariwisata daerah dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Hal ini akan menjadi standar pariwisata global untuk mewujudkan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.

Dalam era transformasi menuju NTB Emas 2045, Provinsi NTB menegaskan lima sasaran visi pembangunan jangka panjang yang merupakan turunan dari visi Indonesia Emas 2045. Dengan demikian, RPJMD 2025–2029 menjadi fondasi strategis yang menghubungkan langkah-langkah operasional di lapangan dengan sasaran besar RPJPD, memastikan bahwa visi NTB Emas 2045 tidak hanya menjadi cita-cita, tetapi terwujud secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan dengan lima sasaran pembangunan daerah sebagai berikut :

Gambar 3. 6 Ringkasan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029

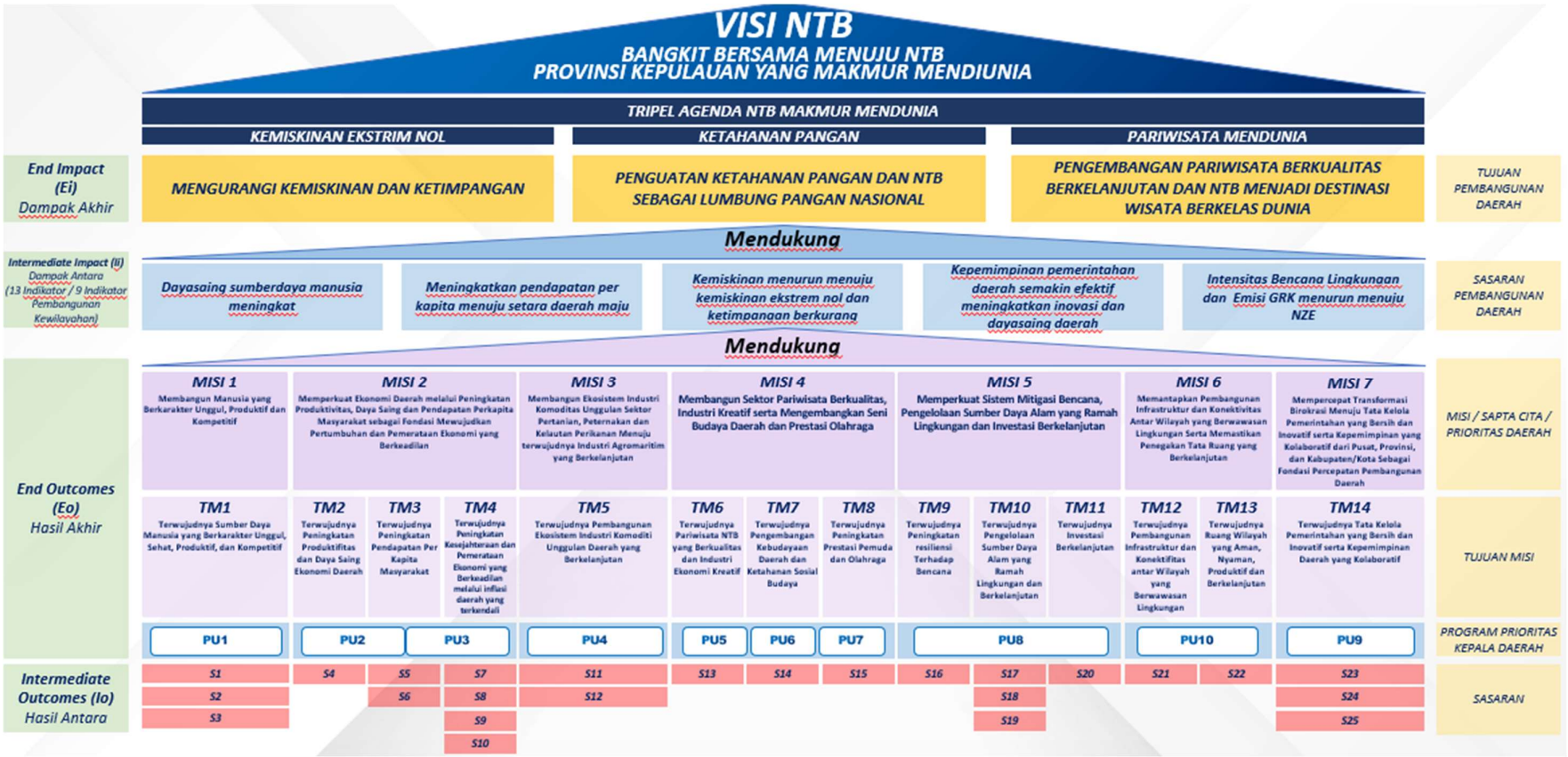

Sumber : Bappeda Provinsi NTB

3.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 258 menyatakan bahwa tujuan pembangunan daerah adalah peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Mengacu pada ketentuan tersebut maka tujuan pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan dari Tahun 2025-2029 merupakan dampak akhir yang diharapkan *(End Impact)* dari seluruh proses pembangunan yang berjalan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, dunia usaha, maupun mitra pembangunan.

Tujuan pembangunan daerah yang disebut sebagai dampak akhir *(End Impact)* meliputi:

1. Mengurangi kemiskinan dan ketimpangan menuju kemiskinan ekstrim nol ;
2. Penguatan ketahanan pangan menuju NTB sebagai Lumbung Pangan Nasional
3. Pengembangan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan menuju NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia

Tiga tujuan pembangunan daerah diatas disebut sebagai Tripel Agenda NTB Makmur Mendunia dimana seluruh agenda pembangunan yang dilaksanakan di Provinsi NTB selama lima tahun yang akan datang sampai pada Tahun 2030 ditargetkan dapat secara nyata berdampak pada tiga fokus tujuan pembangunan daerah tersebut. Adapun sasaran pembangunan daerah untuk mencapai Tripel Agenda NTB Makmur Mendunia yaitu :

1. Daya saing sumber daya manusia meningkat
2. Meningkatkan pendapatan perkapita menuju setara daerah maju
3. Kemiskinan menurun menuju kemiskinan ekstrim nol dan ketimpangan menurun
4. Kepemimpinan pemerintahan daerah semakin efektif meningkatkan inovasi dan daya saing daerah
5. Intensitas bencana lingkungan dan emisi gas rumah kaca (GRK) menurun menuju Net Zero Emmision (NZE)

Lima sasaran pembangunan daerah Provinsi NTB Tahun 2025–2029 dirumuskan secara selaras dengan lima sasaran visi pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2025–2045, serta sejalan dengan arah RPJPN 2025–2045 dan sasaran pembangunan nasional sebagaimana dimuat dalam RPJMN 2025–2029. Keselarasan ini mencerminkan adanya keterpaduan visi, misi, dan strategi pembangunan, baik pada tingkat daerah maupun nasional, sehingga setiap langkah pembangunan di NTB menjadi bagian integral dari agenda pembangunan Indonesia secara keseluruhan.

Keterpaduan tersebut dapat ditelusuri melalui kesesuaian indikator antara sasaran pembangunan daerah dan sasaran pembangunan nasional. Indikator yang digunakan tidak hanya menjadi tolok ukur keberhasilan di tingkat daerah, tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian indikator pembangunan nasional. Dengan demikian, pencapaian target RPJMD NTB 2025–2029 akan berimplikasi langsung pada keberhasilan RPJPD 2025–2045 serta mendukung pencapaian tujuan strategis pembangunan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

Gambar 3. 7 Indikator Sasaran Pembangunan Nasional dan Daerah

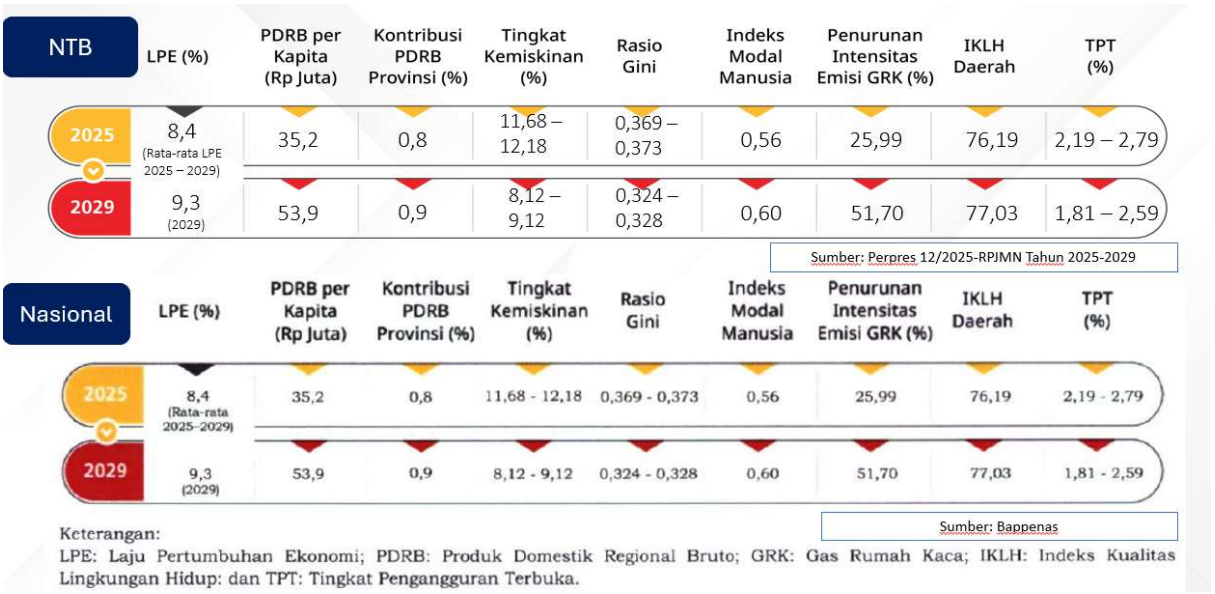

NTB	LPE (%)	PDRB per Kapita (Rp Juta)	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Gini	Indeks Modal Manusia	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	IKLH Daerah	TPT (%)
2025	8,4 (Rata-rata LPE 2025 – 2029)	35,2	0,8	11,68 – 12,18	0,369 – 0,373	0,56	25,99	76,19	2,19 – 2,79
2029	9,3 (2029)	53,9	0,9	8,12 – 9,12	0,324 – 0,328	0,60	51,70	77,03	1,81 – 2,59

Sumber: Perpres 12/2025-RPJMN Tahun 2025-2029

Nasional	LPE (%)	PDRB per Kapita (Rp Juta)	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Gini	Indeks Modal Manusia	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	IKLH Daerah	TPT (%)
2025	8,4 (Rata-rata 2025-2029)	35,2	0,8	11,68 - 12,18	0,369 - 0,373	0,56	25,99	76,19	2,19 - 2,79
2029	9,3 (2029)	53,9	0,9	8,12 - 9,12	0,324 - 0,328	0,60	51,70	77,03	1,81 - 2,59

Sumber: Bappenas

Keterangan:
LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

Sumber : Perpres 12/2025-RPJMN Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah, diperlukan tolok ukur yang jelas melalui penetapan indikator sasaran pembangunan. Indikator tersebut disusun dengan mengacu pada indikator makro pembangunan kewilayahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025–2029. Penetapan indikator makro sebagai indikator sasaran pembangunan daerah Provinsi NTB dilakukan untuk memastikan keterpaduan dan konsistensi arah pembangunan, sehingga selaras dengan lima sasaran visi RPJPD Provinsi NTB 2025–2045 serta RPJPN 2025–2045.

Lebih lanjut, target sasaran pembangunan daerah Provinsi NTB Tahun 2025–2029 telah disesuaikan dengan hasil penyelarasan bersama Kementerian PPN/Bappenas, sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor T-09509/Dt.02.01/PP.03.01/06/2025 tanggal 19 Juni 2025. Penetapan target ini dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan di daerah mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional sekaligus menjawab kebutuhan prioritas pembangunan daerah. Adapun indikator dan target sasaran pembangunan daerah Provinsi NTB Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

Gambar 3. 8 Sasaran Pembangunan daerah Provinsi NTB Tahun 2025-2029

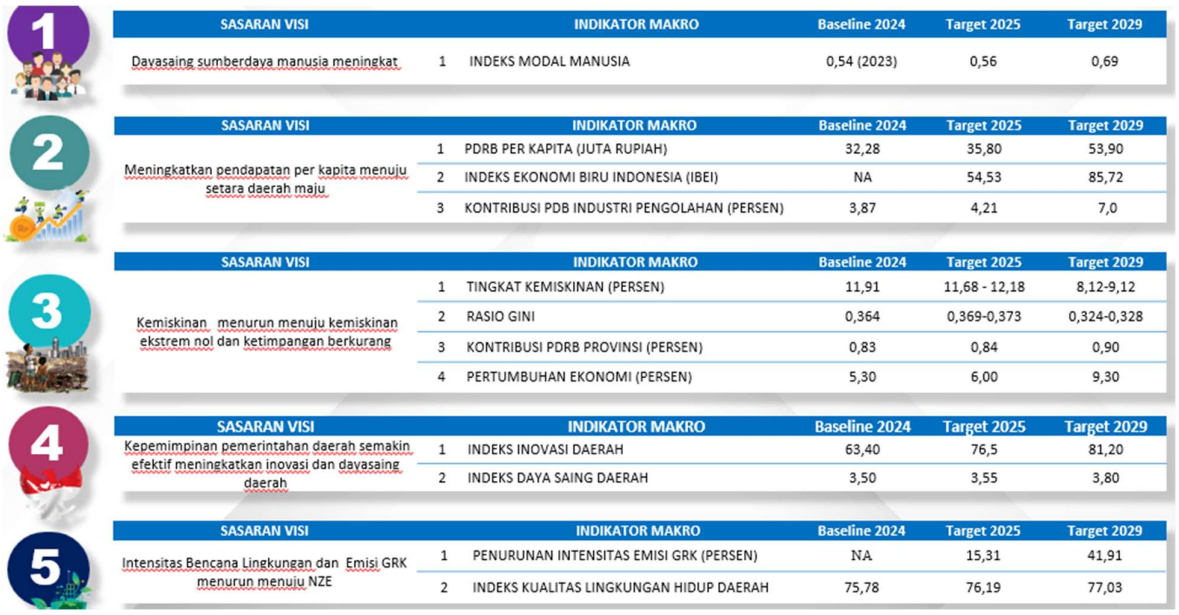

SASARAN VISI		INDIKATOR MAKRO	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
Davasaing sumberdaya manusia meningkat	1	INDEKS MODAL MANUSIA	0,54 (2023)	0,56	0,69
Meningkatkan pendapatan per kapita menuju setara daerah maju	1	PDRB PER KAPITA (JUTA RUPIAH)	32,28	35,80	53,90
	2	INDEKS EKONOMI BIRU INDONESIA (IBEI)	NA	54,53	85,72
	3	KONTRIBUSI PDB INDUSTRI PENGOLAHAN (PERSEN)	3,87	4,21	7,0
Kemiskinan menurun menuju kemiskinan ekstrem nol dan ketimpangan berkurang	1	TINGKAT KEMISKINAN (PERSEN)	11,91	11,68 - 12,18	8,12-9,12
	2	RASIO GINI	0,364	0,369-0,373	0,324-0,328
	3	KONTRIBUSI PDRB PROVINSI (PERSEN)	0,83	0,84	0,90
	4	PERTUMBUHAN EKONOMI (PERSEN)	5,30	6,00	9,30
Kepemimpinan pemerintahan daerah semakin efektif meningkatkan inovasi dan dayasaing daerah	1	INDEKS INOVASI DAERAH	63,40	76,5	81,20
	2	INDEKS DAYA SAING DAERAH	3,50	3,55	3,80
Intensitas Bencana Lingkungan dan Emisi GRK menurun menuju NZE	1	PENURUNAN INTENSITAS EMISI GRK (PERSEN)	NA	15,31	41,91
	2	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	75,78	76,19	77,03

Sumber : *Perpres 12/2025-RPJMN Tahun 2025-2029, Hasil Penyelarasan Kementerian PPN/Bappenas dan RPJPD Provinsi NTB Tahun 2025-2045*

Tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan tujuh misi yang telah ditetapkan sebagai SAPTA CITA untuk mendukung ASTA CITA yang menjadi prioritas nasional Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Tujuh misi yang dirumuskan sebagai agenda politik Iqbal Dinda sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur telah diintegerasikan secara teknokratis kedalam dokumen RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029.

Tujuan RPJMD merupakan penjabaran dari setiap misi (agenda) pembangunan sebagai elemen kunci dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan RPJMD menggambarkan kondisi ideal yang akan diwujudkan setiap tahun secara bertahap dalam berbagai agenda pembangunan yang mencakup aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan.

Tujuan Misi RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Tujuan Misi Kesatu

Agenda pembangunan untuk mencapai tujuan misi satu yakni : (1) Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Unggul, Sehat, Produktif, dan Kompetitif.

Pembentukan sumber daya manusia yang berkarakter unggul dan sehat serta produktif dan kompetitif akan dilaksanakan melalui akan dilaksanakan melalui :

a. Pencegahan stunting terutama pada 1000 HPK ;
b. Pencegahan dan deteksi dini pada penyakit serta pembudayaan hidup sehat ;
c. Peningkatan akses dan layanan kesehatan ;
d. Peningkatan akses layanan pendidikan ;
e. Peningkatan kualitas pendidikan ; dan
f. Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas.

g. Revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi secara konsisten ;
h. Reskilling dan upskilling untuk memenuhi dinamika pekerjaan baru ;
i. Penciptaan iklim ketenagakerjaan yang mendukung pasar kerja fleksibel, responsif gender, inklusif, dan memfasilitasi dinamika perubahan pola bekerja ;

Tujuan Misi Kedua

Ada tiga tujuan yang akan diwujudkan melalui misi kedua yaitu : (1) Terwujudnya peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah ; (2) Terwujudnya peningkatan pendapatan perkapita masyarakat ; (3) Terwujudnya peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan.

Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui :

a. Penguatan Kapasitas Produksi & Manajemen dengan Pelatihan kewirausahaan, digital marketing, manajemen keuangan, dan standarisasi produk;
b. Pengembangan peluang kewirausahaan ;
c. Akses Permodalan dengan Memperluas fasilitas pembiayaan mikro;
d. Pengembangan Pusat Distribusi & Pemasaran, membentuk marketplace lokal berbasis digital dan fisik untuk memperluas pasar produk UMKM;
e. Fasilitasi Sertifikasi & Standar Mutu;
f. Revitalisasi Koperasi dengan peningkatan tata kelola yang transparan;
g. Diversifikasi Usaha Koperasi;
h. Digitalisasi Layanan Koperasi, Implementasi *e-coop* untuk transaksi dan pencatatan keuangan secara online;
i. Pengembangan Infrastruktur Perdagangan, Modernisasi pasar rakyat, pembangunan pusat grosir, dan gudang logistik;
j. Penguatan konektivitas antara daerah produsen dan pasar, termasuk pengiriman lintas provinsi;
k. Promosi dan Pameran Dagang;
l. Pemanfaatan pelabuhan dan bandara sebagai gerbang ekspor dengan fasilitas *cold storage* dan *warehouse*; dan
m. Peningkatan Kualitas & Standarisasi Produk

Selanjutnya peningkatan pendapatan perkapita masyarakat dilaksanakan melalui :

a. Pemagangan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja ;
b. Pengembangan sistem informasi pasar kerja dan bursa kerja khusus ;
c. Penerapan sertifikasi kompetensi kerja ;
d. Peningkatan perlindungan sosial adaptif bagi pekerja termasuk pekerja migran Indonesia ;
e. Penciptaan lapangan pekerjaan pada sektor unggulan daerah terutama untuk meningkatkan nilai tambah serta memperluas kegiatan yang bersifat padat karya dan produktif ;

f. Perluasan kesempatan tenaga kerja asal NTB yang berketerampilan menengah tinggi di pasar kerja global dan
g. Peningkatan upah kerja.

Untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan dilaksanakan percepatan penurunan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrim serta penurunan ketimpangan antar wilayah. Penurunan kemiskinan dilaksanakan dengan pengembangan kawasan pertumbuhan, kawasan komuditas unggulan, kawasan swasembada pangan air dan energi, kawasan afirmasi, kawasan konservasi dan rawan bencana. Sedangkan untuk penurunan ketimpangan dilakukan melalui intervensi pembangunan kewilayahan dengan penguatan ekosistem percepatan pembangunan wilayah sebagai pondasi untuk dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Penguatan ekosistem percepatan pembangunan wilayah antara lain melalui penuntasan perubahan RTRW Kab/Kota, penyediaan data dan informasi yang terintegerasi, peningkatan kapasitas fiskal daerah, dukungan percepatan pelaksanaan reforma agraria, pemenuhan standar pelayanan minimal, pemenuhan akses air minum dan sanitasi, peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, pengembangan konektivitas pendukung layanan dasar dan Pembangunan kawasan afirmasi dan pedesaan serta menjaga stabilitas makro ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif;.

Tujuan Misi Ketiga

Ada satu tujuan yang akan diwujudkan melalui misi ketiga yaitu : (1) Terwujudnya Pembangunan Ekosistem Industri Komoditi Unggulan Daerah yang Berkelanjutan.

Pembangunan industri agro maritim yang berkelanjutan akan dilaksanakan melalui :

a. Penerapan ekonomi biru, ekonomi hijau, dan ekonomi sirkular ;
b. Hilirisasi dan industrialisasi yang bersifat padat karya serta berorientasi ekspor dan berkelanjutan ;
c. Peningkatan produktivitas pertanian dalam artian luas dan subsektornya menguatkan ketahanan pangan ;
d. Pengembangan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi ;
e. Transformasi digital ;
f. Peningkatan investasi berkelanjutan ;
g. Belanja daerah untuk peningkatan produktivitas.

Pembangunan ekosistem industri komoditas unggulan daerah diarahkan untuk meningkatkan ekspor barang dan jasa terutama dalam upaya mengembangkan diversifikasi ekonomi untuk mengoptimalkan pengembangan potensi agromaritim. Prioritas lokasi untuk pengembangan ekosistem ini dilaksanakan pada kawasan pertumbuhan, kawasan komunitas unggulan (kawasan perkebunan, kawasan peternakan, kawasan sentra garam,

kawasan perikanan dan sentra rumput laut, kawasan akua kultur, kawasan perkembangan sentra berbasi perikanan tangkap, kawasan transmigrasi, serta kawasan strategis provinsi.

Tujuan Misi Keempat

Ada tiga tujuan yang akan diwujudkan melalui misi keempat yaitu : (1) Terwujudnya pariwisata berkualitas dan industri ekonomi kreatif ; (2) Terwujudnya pengembangan kebudayaan daerah dan ketahanan sosial budaya ; (3) Terwujudnya peningkatan prestasi pemuda dan olahraga.

Pengembangan pariwisata berkualitas akan ditempuh melalui percepatan pembangunan destinasi pariwisata berkualitas Lombok Gili Tramena didukung dengan pengembangan destinasi yang terintegerasi antara pulau lombok dan pulau sumbawa serta pengembangan desa wisata maju. Selain itu juga dilakukan dengan pembangunan budaya dan identitas daerah, peningkatan MICE, pengembangan *Muslim Friendly Toursim,* serta peningkatan investasi pariwisata pada kawasan-kawasan strategis provinsi. Adapun untuk pengembangan ekonomi kreatif yang dilakukan melalui pengembangan industri ekonomi kreatif, pengembangan UMKM dan industri kreatif, penyediaan ruang kaum muda kreatif dan peningkatan daya saing produk unggulan. Selanjutnya pengembangan kebudayaan daerah dan ketahanan sosial budaya diarahkan dengan meningkatkan upaya kolaborasi antara pemangku kepentingan untuk peningkatan kesatuan dan persatuan bangsa serta pemantapan nilai-nilai kebangsaan untuk terus meningkatkan ketahanan nasional. Selain itu juga dilakukan upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan serta meningkatkan kohesi sosial untuk menjaga kerukunan umat beragama sebagai modal sosial pembangunan, termasuk menerapkan GEDSI mulai dari perencanaan dan implementasi pembangunan. Adapun untuk peningkatan prestasi pemuda dan olahraga akan dilaksanakan peningkatan kualitas pendidikan yang semakin baik, peningkatan *link and match* antara dunia pendidikan dan lapangan kerja serta persiapan sebagai tuan rumah penyelenggaraan PON Tahun 2028 yang disertai dengan peningkatan prestasi olahraga pada tingkat nasional dan internasional.

Tujuan Misi Kelima

Ada tiga tujuan yang akan diwujudkan melalui misi kelima yaitu : (1) Terwujudnya Peningkatan resiliensi Terhadap Bencana; (2) Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan; (3) Terwujudnya investasi berkelanjutan.

Sistem mitigasi bencana diarahkan untuk meningkatkan kewaspadaan dan mencega dampak negatif yang mungkin timbul dari kejadian bencana terutama pada kawasan yang rawan bencana gempa di darat, seperti kota mataram sebagai pusat kegiatan nasional (PKN) serta melindungi kawasan-kawasan konservasi. Adapun untuk pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan diarahkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas upaya yang dikerahkan untuk melestarikan keanekaragaman hayati, sehingga dapat didaya gunakan untuk pengembangan ekonomi hijau, ekonomi biru dan ekonomi sirkuler. Selain

itu juga untuk menjaga kelestarian hutan serta meningkatkan ketangguhan terhadap bencana. Pelestarian keanekaragaman hayati ini juga dapat mendukung pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim. Pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan juga memberi perhatian yang besar pada peningkatan layanan sanitasi dan kebersihan dasar melalui peningkatan pengelolaan sampah sehingga dapat mendukung peningkatan investasi yang berkelanjutan terutapa pada sektor pariwisata. Pada akhirnya diharapkan terbangun ketahanan energi, air dan pangan. Ketahanan pangan diupayakan melalui pengembangan pangan lokal dan nabati, pengembangan pangan akuatik, serta pengembangan pangan hewani yang difokuskan pada kawasan pengembangan lokal yang telah ditentukan. Untuk investasi berkelanjutan diarahkan sebagai upaya pembentukan modal tetap bruto melalui pembangunan infrastruktur yang dapat menambah aset tetap. Pengembangan investasi kedepan akan terus diperkuat dengan pendalaman / intermediasi sektor keuangan yang mengarah pada meningkatnya inklusi keuangan.

Tujuan Misi Keenam

Ada dua tujuan yang akan diwujudkan melalui misi keenam yaitu : (1) Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah yang berwawasan lingkungan; (2) Terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Pembangunan infrastruktur dan konektivitas diarahkan melalui Pembangunan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan provinsi yang menghubungkan pusat pertumbuhan ekonomi, Pengembangan Infrastruktur Pendukung Kawasan Strategis, Integrasi sistem informasi transportasi, logistik, dan layanan publik berbasis teknologi, Penyediaan dan Peningkatan Akses Hunian Layak, Pengembangan Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi dan Pembangunan Berbasis Prinsip Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana.

Selanjutnya dalam mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan diarahkan melalui Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum Tata Ruang, Penguatan unit pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di tingkat provinsi/Kab/Kota, Pengembangan sistem informasi tata ruang berbasis GIS yang mudah diakses publik, Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Pelaku Usaha dan Integrasi Perencanaan Tata Ruang dengan Pembangunan Sektoral.

Tujuan Misi Ketujuh

Ada satu tujuan yang akan diwujudkan melalui misi ketujuh yaitu : (1) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan inovatif serta kepemimpinan daerah yang kolaboratif.

Melalui tujuan diatas diharapkan terbangun sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dapat meningkatkan kualitas layanan publik serta meningkatnya upaya pencegahan korupsi maupun kualitas demokrasi di daerah. Jumlah kerjasama dalam rangka meningkatkan kolaborasi dan sinergitas dalam melaksanakan pembangunan terus ditingkatkan sehingga pengembangan wilayah berbasis desa yang pada akhirnya dapat mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah.

Indikator Kinerja Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025–2029 merupakan tolok ukur yang dirancang secara sistematis untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah dalam periode lima tahun. Indikator ini berfungsi sebagai instrumen evaluasi yang dapat memberikan gambaran obyektif mengenai tingkat pencapaian target, baik pada aspek hasil (outcome) maupun manfaat (impact) dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Penyusunan indikator kinerja dalam RPJMD ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip keterukuran, relevansi, dan keselarasan. Setiap indikator dipastikan memiliki kesesuaian langsung dengan tujuan dan sasaran misi daerah, serta mendukung pencapaian sasaran yang termuat dalam RPJPD Provinsi NTB 2025–2045, RPJPN 2025–2045, dan RPJMN 2025–2029. Dengan demikian, capaian pembangunan daerah selama lima tahun pertama ini tidak hanya berkontribusi pada kemajuan NTB, tetapi juga menjadi bagian integral dari pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Selain sebagai alat evaluasi, indikator kinerja ini juga berperan sebagai panduan strategis bagi perangkat daerah dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan menyesuaikan kebijakan pembangunan secara adaptif terhadap dinamika yang terjadi di lapangan. Pemantauan terhadap indikator akan dilakukan secara berkala melalui mekanisme pelaporan kinerja tahunan, sehingga setiap deviasi dari target dapat segera direspon dengan langkah-langkah korektif yang tepat.

Dengan pendekatan ini, RPJMD NTB 2025–2029 diharapkan menjadi dokumen perencanaan yang operasional, terukur, dan mampu mengarahkan pembangunan daerah secara konsisten menuju terwujudnya visi NTB Emas 2045. Rincian Indikator Kinerja Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. 2 Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi NTB 2025-2029

Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator /Alat Ukur RPJMD		Satuan	Kondisi Awal (2024)	Tahun						Ket.
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Visi : NTB BANGKIT BERSAMA MENUJU PROVINSI KEPULAUAN YANG MAKMUR MENDUNIA													
Misi 1 : Membangun Manusia yang Berkarakter Unggul, Produktif dan Kompetitif													
	Tujuan 1	**Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Unggul, Sehat, Produktif, dan Kompetitif**	**1**	**Indeks Modal Manusia (IMM)**	**Indeks**	**0,54 (2023)**	**0,56**	**0,57**	**0,58**	**0,59**	**0,60**	**0,61**	Sasaran Visi
			2	**Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga**	**Indeks**	**65,51**	**66,71**	**67,58**	**68,23**	**68,73**	**69,14**	**69,49**	IUP 39
	Sasaran 1	Meningkatnya Akses dan Layanan Pendidikan Berkualitas yang Merata di NTB	1	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	Tahun	7,87	8,6-8,63	8,69-8,71	8,77-8,79	8,86-8,88	9,03-9,04	9,11-9,12	IUP 5c
			2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,98	14,1-14,13	14,15-14,18	14,20-14,23	14,25-14,27	14,35-14,37	14,40-14,42	IUP 5d
			3	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	9,44	10,02	10,11	10,20	10,29	10,47	10,56	IUP 6
			4	Persentase Kab/Kota yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk:									IUP 5a
				a) Literasi Membaca	%	NA	10	10	20	20	30	40	IUP 5a; a)
				b) Numerasi	%	NA	0,00-10,00	10	10	20	20	30	IUP 5a; b)

Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator /Alat Ukur RPJMD		Satuan	Kondisi Awal (2024)	Tahun						Ket.
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			5	Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk:									IUP 5b
				a) Literasi Membaca	%	NA	26,24-28,74	27,28-29,78	28,32-30,82	29,36-31,86	31,44-33,94	32,48-34,98	IUP 5b; a)
				b) Numerasi	%	NA	22,68-25,18	23,48-25,98	24,28-26,78	25,08-27,58	26,68-29,18	27,48-29,98	IUP 5b; b)
	Sasaran 2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	72,25	72,92	73,21	73,5	73,79	73,98	74,45	IUP 1
			2	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	29,8	21,7	20,74	19,78	18,82	16,9	15,94	IUP 2b
	Sasaran 3	Meningkatnya Penguatan Ketahanan dan Keharmonisan Keluarga, serta Kesetaraan Gender	1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,53	0,517	0,508	0,499	0,49	0,472	0,463	IUP 40
			2	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	60,02	61,70	63,40	65,10	66,80	68,50	70,20	
Misi 2 : Memperkuat Ekonomi Daerah melalui Peningkatan Produktivitas, Daya Saing dan Pendapatan Perkapita Masyarakat sebagai Pondasi Mewujudkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan													
	Tujuan 2	**Terwujudnya Peningkatan Produktifitas dan Daya Saing Ekonomi Daerah**	**1**	**Laju Pertumbuhan Ekonomi :**									Sasaran Visi
			1a	**- Dengan Tambang**	**%**	**5,30**	**6,00**	**6,90**	**7,70**	**8,50**	**9,30**	**10,10**	
			1b	**- NonTambang**	**%**	**3,87**	**6,00 - 6,50**	**6,02-6,56**	**6,03-6,63**	**6,05-6,69**	**6,07-6,75**	**6,09 - 7,00**	

Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator /Alat Ukur RPJMD		Satuan	Kondisi Awal (2024)	Tahun						Ket.
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			2	**Kontribusi PDRB Provinsi**	**%**	**0,83**	**0,84**	**0,86**	**0,87**	**0,89**	**0,90**	**0,91**	Sasaran Visi
	Sasaran 4	Meningkatnya Produktivitas UMKM, Koperasi, dan Nilai Tambah Perdagangan	1	Rasio kewirausahaan Daerah	%	0,12	2,37	2,40	2,42	2,45	2,50	2,53	IUP 14b
			2	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	%	0,95	0,97	0,98	0,99	1,01	1,03	1,04	IUP 14c
			3	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	14,20	14,27	14,45	14,80	15,22	15,87	16,10	
	Tujuan 3	**Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Per Kapita Masyarakat**	**1**	**PDRB Per Kapita**	**Juta Rupiah**	**32,28**	**35,80**	**40,93**	**45,25**	**49,58**	**53,90**	**58,22**	Sasaran Visi
	Sasaran 5	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja dan Menurunnya Tingkat Pengangguran	1	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah/Tenaga Kerja	35.182,00	35.408,24	35.585,28	35.763,20	35.942,02	36.121,73	36.302,34	
			2	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,73	2,19-2,79	2,10-2,74	2,00-2,69	1,91-2,64	1,81 - 2,59	1,72-2,54	Sasaran Visi
	Sasaran 6	Meningkatnya Ketersediaan Akses Keuangan	1	Inklusi Keuangan	%	NA	88,70	89,25	89,80	90,36	91,46	92,01	IUP 34
	Tujuan 4	**Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan melalui inflasi daerah yang terkendali**	**1a**	**Tingkat Kemiskinan**	**%**	**11,91**	**11,68-12,18**	**10,79-11,41**	**9,9-10,65**	**9,01-9,88**	**8,12-9,12**	**7,23-8,35**	Sasaran Visi
			1b	**Tingkat Kemiskinan Ekstrem NTB**	**%**	**2,04**	**1,64**	**1,24**	**0,84**	**0,44**	**0**	**0**	
			2	**Rasio Gini**	**Poin**	**0,364**	**0,369-0,373**	**0,358-0,362**	**0,347-0,351**	**0,335-0,339**	**0,324-0,328**	**0,313-0,317**	Sasaran Visi
			3	**Tingkat Inflasi**	**%**	**1,28**	**3-3,7**	**2,60-3,61**	**2,20-3,52**	**1,80-3,42**	**1,4-3,3**	**1,00-3,24**	IUP 32

Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator /Alat Ukur RPJMD		Satuan	Kondisi Awal (2024)	Tahun						Ket.
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sasaran 7	Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat	1	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	NA	46,00	47,00	48,00	49,00	50,00	51,00	
	Sasaran 8	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan yang berkelanjutan	1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	78,44	78,83	79,23	79,62	80,02	80,42	80,82	
	Sasaran 9	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di wilayah Pedesaan	1	Indeks Desa	(%)	77,08	77,88	78,57	79,2	79,95	80,64	81,33	
	Sasaran 10	Menurunnya disparitas harga antar wilayah dalam provinsi	1	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	Koefisien	NA	7,30	7,22	7,14	7,06	6,90	6,82	IUP 20
Misi 3 : Membangun Ekosistem Industri Komoditas Unggulan Sektor Pertanian, Peternakan dan Kelautan Perikanan Menuju terwujudnya Industri Agromaritim yang Berkelanjutan													
	Tujuan 5	**Terwujudnya Pembangunan Ekosistem Industri Komoditi Unggulan Daerah yang Berkelanjutan**	**1**	**Kontribusi PDRB Industri Pengolahan**	**%**	**3,87**	**4,21**	**4,91**	**5,61**	**6,30**	**7,00**	**7,30**	Sasaran Visi dan IUP 11
	Sasaran 11	Meningkatnya Kontribusi Industri Agromaritim	1	Persentase Peningkatan PDRB Sub Sektor Industri Pengolahan Berbasis Agromaritim	%	5,30	5,3 - 6,4	6,4 - 7,2	7,2 - 8,0	8,0 - 8,6	8,6 - 9,6	9,6 - 10,0	
	Sasaran 12	Meningkatnya Produktivitas Sektor Agromaritim (Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan, dan Kehutanan)	1	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	1,54	3,20	3,49	3,79	4,08	4,70	4,99	IUP 11b
Misi 4 : Membangun Sektor Pariwisata Berkualitas, Industri Kreatif serta Mengembangkan Seni Budaya Daerah dan Prestasi Olahraga													
	Tujuan 6	**Terwujudnya Pariwisata NTB yang Berkualitas dan Industri Ekonomi Kreatif**	**1**	**Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku**	**%**	**11,45**	**11,64**	**11,87**	**12,11**	**12,35**	**12,60**	**12,85**	
			2	**Proporsi Nilai Tambah Ekonomi Kreatif Provinsi**	**%**	**NA**	**0,39**	**0,41**	**0,42**	**0,44**	**0,47**	**0,50**	IUP 13

Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator /Alat Ukur RPJMD		Satuan	Kondisi Awal (2024)	Tahun						Ket.
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional									
	Sasaran 13	Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1	Jumlah tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	349.447	382.813	418.797	458.164	501.231	548.347	600.000	IUP 12b
			2	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	1,75	2,03	2,12	2,22	2,31	2,50	2,59	IUP 12a
			3	Rasio PDRB Industri Ekonomi Kreatif	%	3,72	3,76	3,79	3,83	3,87	3,91	3,95	
	Tujuan 7	**Terwujudnya Pengembangan Kebudayaan Daerah dan Ketahanan Sosial Budaya**	**1**	**Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)**	**Indeks**	**57,37 (2023)**	**58,64-58,78**	**59,22-59,43**	**59,80-60,08**	**60,37-60,72**	**60,95-61,37**	**61,53-62,02**	IUP 37
	Sasaran 14	Meningkatnya budaya literasi, ekspresi budaya, warisan budaya dan ekonomi budaya	1	Indeks budaya literasi	Indeks	(2023) 61.20	64,42	66,03	67,64	69,25	70,86	72,47	
			2	Indeks ekspresi budaya	Indeks	39.74 (2023)	44,48	46,85	49,22	51,29	53,96	56,63	
			3	Indeks warisan budaya	Indeks	48.37 (2023)	50,17	51,07	51,97	52,87	53,77	54,67	
			4	Indeks ekonomi budaya	Indeks	41.92 (2023)	44,26	45,43	46,60	47,77	48,94	50,11	
	Tujuan 8	**Terwujudnya Peningkatan Prestasi Pemuda dan Olahraga**	**1**	**Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)**	**Indeks**	**53,67 (2023)**	**53,94**	**54,21**	**54,48**	**54,75**	**55,03**	**55,30**	
			2	**Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)**	**Indeks**	**0,345**	**0,346**	**0,347**	**0,348**	**0,349**	**0,350**	**0,351**	
	Sasaran 15	Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan Prestasi Olahraga	1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Pemuda	%	69,68	70,18	70,68	71,18	71,68	72,18	72,68	

Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator /Alat Ukur RPJMD		Satuan	Kondisi Awal (2024)	Tahun						Ket.
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			2	Persentase Peningkatan Perolehan Medali Tingkat Nasional dan Internasional	% (medali)	(43 medali)	9,3 (47 medali)	10,64 (52 Medali)	11,53 (58 Medali)	12,07 (65 Medali)	12,31 (73 Medali)	12,33 (82 Medali)	
			3	Persentase Pemuda dan atlet berprestasi yang mendapat insentif dan atau beasiswa	%	100	100	100	100	100	100	100	
Misi 5 : Memperkuat Sistim Mitigasi Bencana, Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Ramah Lingkungan dan Investasi Berkelanjutan													
	Tujuan 9	**Terwujudnya Peningkatan resiliensi Terhadap Bencana**	**1**	**Indeks Risiko Bencana (IRB)**	**Indeks**	**113,64**	**135,41**	**134,34-133,30**	**133,27-131,18**	**132,20-129,07**	**131,13 - 126,95**	**130,06-124,84**	IUP 44
	Sasaran 16	Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	1	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,56	0,59	0,61	0,63	0,65	0,67	0,69	
	Tujuan 10	**Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan**	**1**	**Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**	**Indeks**	**NA**	**0,536**	**0,539**	**0,543**	**0,546**	**0,553**	**0,556**	IUP 41
			2	**Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)**	**%**	**NA**	**15,31**	**21,96**	**28,61**	**35,26**	**41,91**	**48,56**	Sasaran Visi
	Sasaran 17	Meningkatnya Pengelolaan lingkungan Hidup Berkualitas	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	75,78	76,19	76,40	76,61	76,82	77,03	77,24	Sasaran Visi dan IUP 42a
	Sasaran 18	Meningkatnya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem	1	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Sektor Kehutanan dan Lahan	Indeks	0,327	0,331	0,334	0,337	0,340	0,342	0,344	
			2	Persentase Luas Lokasi Prioritas Rehabilitasi	%	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	

Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator /Alat Ukur RPJMD		Satuan	Kondisi Awal (2024)	Tahun						Ket.
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Ekosistem Berstatus Baik									
	Sasaran 19	Meningkatnya Ketahanan Energi Ramah Lingkungan dan konsumsi listrik yang merata serta berkelanjutan	1	Intensitas energi primer	SBM/Rp milyar	NA	192,23	184,56	176,89	169,22	161,55	153,88	IUP 43a
			2	Konsumsi Listrik per kapita	kWh	709,00	751,00	779,00	808,00	840,00	872,00	876,00	IUP 43a
	Tujuan 11	**Terwujudnya Investasi Berkelanjutan**	**1**	**Pembentukan Modal Tetap Bruto**	**% PDRB**	**31,8**	**36,9**	**36,96-37,11**	**37,03-37,32**	**37,09-37,53**	**37,15-37,74**	**37,21-37,95**	IUP 21
	Sasaran 20	Meningkatnya Realisasi Investasi	1	Nilai Realisasi Investasi	Rp Triliun	54,55	61,09	68,43	76,65	85,88	96,22	107,81	
Misi 6 : Memantapkan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah yang Berwawaasan Lingkungan Serta Memastikan Penegakan Tata Ruang yang Berkelanjutan													
	Tujuan 12	**Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas antar Wilayah yang Berwawasan Lingkungan**	**1**	**Indeks Kemantapan Infrastruktur**	**Indeks**	**74,96**	**76,35**	**77,37**	**78,40**	**79,42**	**81,00**	**82,01**	
	Sasaran 21	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas Antar Wilayah yang Terintegrasi	1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	75,83	76,21	76,59	76,97	77,36	77,74	78,13	
			2	Persentase Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	%	67,74	71,68-71,7	71,96-72,08	72,24-72,45	72,51-72,83	73,07-73,2	73,35-73,58	IUP 23b
			3	Rasio Konektivitas	Rasio	0,82	0,83	0,84	0,85	0,86	0,87	0,88	
	Tujuan 13	**Terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan**		**Persentase capaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang**	**%**	**62,17**	**63,05**	**64,12**	**65,40**	**66,63**	**67,15**	**68,83**	
	Sasaran 22	Meningkatnya kepatuhan dalam penyelenggaraan penataan ruang		Persentase capaian kesesuaian	%	83,13	83,38	83,63	83,88	84,13	84,38	84,64	

Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator /Alat Ukur RPJMD		Satuan	Kondisi Awal (2024)	Tahun						Ket.
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				pemanfaatan ruang									
Misi 7 : Mempercepat Transformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Inovatif serta Kepemimpinan yang Kolaboratif dari Pusat, Provinsi dan Kab/Kota Sebagai Fondasi Percepatan Pembangunan Daerah													
	Tujuan 14	**Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Inovatif serta Kepemimpinan Daerah yang Kolaboratif**	**1**	**Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)**	**Indeks (Kategori)**	**77,99 (BB)**	**78,77 (BB)**	**79,56 (BB)**	**80,35 (A)**	**81,16 (A)**	**81,97 (A)**	**82,79 (A)**	
			2	**Indeks Ketahanan Nasional**	**Indeks**	**3,01**	**3,03**	**3,07**	**3,13**	**3,20**	**3,26**	**3,33**	**IUP 36**
			3	**Indeks Inovasi Daerah**	**Indeks**	**63,40**	**76,50**	**77,68**	**78,85**	**80,03**	**81,20**	**82,38**	**Sasaran Visi**
	Sasaran 23	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	1a	Reformasi Birokrasi General	Skor	68,8	69,49	70,18	70,88	71,59	72,31	73,03	
			1b	Reformasi Birokrasi Tematik	Skor	9,19	9,28	9,37	9,47	9,56	9,66	9,76	
			2	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Poin	1,241	1,100	1,129	1,199	1,293	1,362	1,449	
			3	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Provinsi	Indeks	91,47	91,50	91,75	92,00	92,25	92,50	92,75	
	Sasaran 24	Meningkatnya Penegakan Hukum yang Adil dan Terpeliharanya Stabilitas Keamanan untuk Mendukung Demokrasi yang Berkualitas	1	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	76,37	75,37-78,63	76,06-79,32	76,75-80,00	77,43-80,69	78,12-81,37	78,81-82,06	IUP 30
			2	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM Daerah	%	NA	65,00	68,75	72,50	76,25	80,00	83,75	IUP 28a
			3	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan	Indeks	49,76	75,00	75,75	76,51	77,27	78,05	78,83	

Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator /Alat Ukur RPJMD		Satuan	Kondisi Awal (2024)	Tahun						Ket.
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Ketertiban Umum (IPKKU)									
	Sasaran 25	Meningkatnya Keunggulan Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah	1	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	%	NA	50	60	70	80	90	100	
			2	Persentase Inovasi yang di terapkan dalam pembangunan daerah	%	94,63	95,58	96,53	97,50	98,47	99,46	100,00	

Sumber : Bappeda Provinsi NTB

3.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

3.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

3.2.1.1 Kerangka Pikir

RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 disusun menggunakan pendekatan perencanaan teknokratik yang diintegerasikan dengan pendekatan politis untuk mengintegerasikan janji-janji politik yang disampaikan kepala daerah pada masa pilkada serentak. Oleh karena itu prioritas pembangunan yang dimuat pada RPJMD Tahun 2025-2029 berisi perpaduan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur dan kebijakan RPJPD Tahun 2025-2045 yang telah diselaraskan RPJPN Tahun 2025-2045. Dengan demikian diharapkan terbangun kesatuan arah pembangunan sebagai salah satu kunci keberhasilan pembangunan nasional. Kesatuan arah pembangunan itu tercermin pada komitmen untuk mencapai lima sasaran visi pembangunan nasional yang juga menjadi sasaran pembangunan daerah dalam jangka menengah. Pada akhirnya diharapkan dapat membawa dampak pada pencapaian tujuan pembangunan daerah yang dikenal sebagai Tripel Agenda NTB Makmur Mendunia, seperti digambarkan dibawah ini :

Gambar 3. 9 Kerangka Pikir RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029

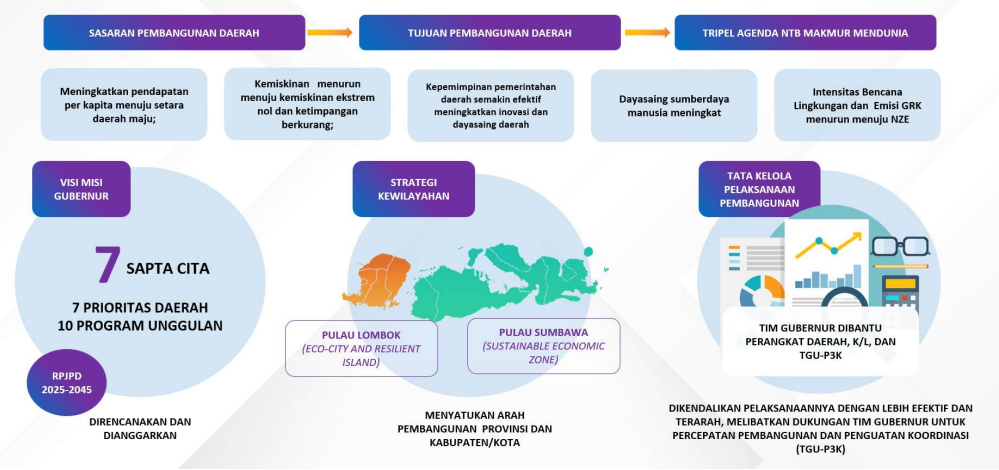

Sumber : Bappeda Provinsi NTB

Selain sinkronisasi dibidang perencanaan dilakukan juga sinergi antara perencanaan dan penganggaran yang juga merupakan bagian yang penting didalam melaksanakan prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan dimuat dalam strategi pembangunan kewilayahan dengan konsep tematik, holistik, integratif dan spasial. Strategi kewilayahan mencakup pembangunan wilayah pulau lombok dan pulau sumbawa dengan menerapkan pembangunan wilayah berbasis pedesaan dalam rangka mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrim. Selain itu berdasarkan Perda 5/2024 tentang RTRW Provinsi NTB dilakukan pengembangan kawasan strategis provinsi dalam rangka mengembangkan kawasan cepat tumbuh yang diselaraskan dengan kegiatan prioritas utama RPJMN di wilayah Provinsi NTB.

Untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan langkah penguatan juga dilakukan pada tata kelola pembangunan terutama pada aspek pengendalian pembangunan secara terpadu. Pengendalian memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai rencana dan memformulasikan penyusunan kebijakan yang diperlukan dengan melibatkan tim ahli Gubernur untuk percepatan dan penguatan koordinasi sebagai representasi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam mengawal pengendalian pembangunan secara lebih efektif. Pengendalian pembangunan juga dipertajam dengan mengadopsi pendekatan manajemen resiko pembangunan nasional.

3.2.1.2 Strategi Prioritas Pembangunan Daerah

RPJMD Tahun 2025-2029 menekankan secara khusus pada penguatan fondasi transformasi dengan lima strategi prioritas pembangunan daerah yakni (1) peningkatan sumberdaya manusia; (2) peningkatan pendapatan per kapita melalui hilirisasi dan industrialisasi agromaritim dengan sektor pariwisata sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi; (3) pengentasan kemiskinan; (4) transformasi sektor publik sebagai pengungkit; dan (5) penguatan spirit bangkit bersama mengokohkan kolaborasi dan sinergi multipihak.

Gambar 3. 10 Strategi Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi NTB

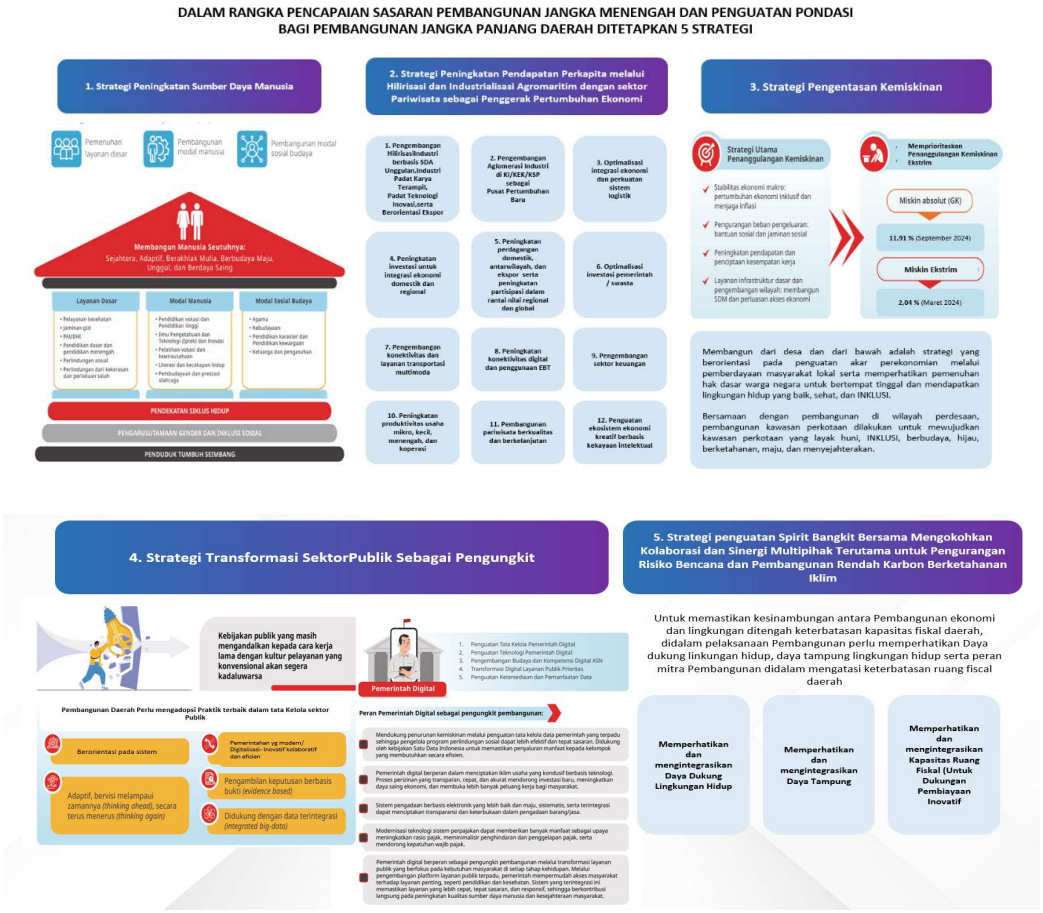

Sumber : Hasil Analisa Bappeda NTB, 2025

Strategi peningkatan sumberdaya manusia ini menempatkan pembangunan manusia sebagai program pembangunan yang super prioritas di provinsi NTB. Melalui strategi ini manusia dan masyarakat berperan sebagai subyek dan obyek pembangunan sekaligus. Diharapkan dengan pembangunan manusia ini, NTB dapat menyiapkan fondasi yang kokoh dan kuat untuk memacu kemajuan ekonomi dan sosial budaya yang masih cukup tertinggal dibanding daerah lain, terutama pulau jawa dan bali.

Pembangunan manusia seutuhnya bertumpu pada pemenuhan layanan dasar; pembangunan modal manusia dan pembangunan modal sosial budaya. Ketiga pilar tersebut ditopang oleh pendekatan siklus hidup, pengarusutamaan GEDSI serta pengendalian pertumbuhan penduduk. Selanjutnya strategi peningkatan pendapatan per kapita diupayakan dengan mencapai pertumbumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif. Pertumbuhan ekonomi NTB harus semakin inklusif, tidak tergantung pada sektor pertambangan sehingga komoditas unggulan agromaritim baik produksi, nilai tambah dan ekspornya harus dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif sangat terkait dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia; sehingga upaya memacu peningkatan modal manusia yang diikuti dengan peningkatan kualitas hidup seluruh masyarakat menjadi perhatian utama. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan dapat membawa dampak pada percepatan penurunan kemiskinan. Dalam kaitan ini maka strategi pengentasan kemiskinan diarahkan untuk memberantas kemiskinan yang mencakup multidimensi; tidak hanya terkait dengan dimensi ekonomi tetapi juga dimensi sosial budaya dan lingkungan hidup.

Dengan pendekatan penanggulangan kemiskinan berbasis desa yang menerapkan pendekatan mikro dengan sasaran intervensi kepada individu dan rumah tangga diharapkan setiap keluarga miskin dapat lebih cepat keluar dari kemiskinannya. Setiap individu dan kelurga miskin akan dapat terpantau proses graduasi keluarnya dari kemiskinan dengan lokus pada setiap desa/kelurahan.Untuk memastikan graduasi keluarga miskin dari kemiskinannya ada lima strategi yang akan diimplementasikan yakni menjaga dan meningkatkan stabilitas ekonomi makro; mengurangi beban pengeluaran masyarakat; meningkatkan pendapatan masyarakat; memperkuat layanan infrastruktur dasar; serta penghapusan kantong-kantong kemiskinan di setiap desa/kelurahan.

Implementasi strategi penurunan kemiskinan tersebut dilakukan dengan menetapkan lokasi prioritas intervensi pada kantong-kantong kemiskinan melalui program unggulan desa berdaya sebagai suatu program yang dilaksanakan secara kolaboratif lintas sektor agar ketiga strategi diatas berjalan efektif dan efiseien diperlukan dukungan transformasi sektor publik sebagai pengungkit. Strategi transformasi sektor publik dapat diterapkan diterapkan dengan mewujudkan pemerintahan digital sehingga pelayanan publik yang mengandalkan

cara kerja lama dengan budaya kerja tidak disiplin, lamban dan kurang profesional harus segera ditinggalkan. Demikian pula pola dan manajemen kerja yang selama ini bersifat sektoral harus diganti dengan manajemen kolaboratif dan sinergi yang dapat menumbuhkan spirit bangkit bersama sehingga berbagai persoalan pembangunan yang bersifat multidimensi dan multi sektor dapat diatasi dengan cepat.

3.2.1.3 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang menjabarkan misi yang diselaraskan dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD. Untuk memastikan lima sasaran pembangunan daerah jangka menengah tahun 2025-2029 dapat dicapai maka setiap misi sebagai sapta cipta dan prioritas daerah harus dapat dilaksanakan dengan sebaik baiknya. Oleh karena itu setiap misi sebagai sapta cita perlu dirumuskan tujuan dan sasaran beserta indikatornya sebagai berikut :

1. **Arah Kebijakan Misi 1 Membangun Manusia yang Berkarakter Unggul, Produktif dan Kompetitif**

Pembangunan manusia merupakan fondasi utama bagi kemajuan daerah. Misi ini menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan, kesehatan, serta pembentukan karakter yang tangguh dan berdaya saing. Upaya ini menjadi kunci dalam mendorong produktivitas masyarakat, mengurangi ketimpangan sosial, dan memperkuat daya saing daerah di era global serta memastikan bahwa setiap anak mendapatkan pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang baik, serta kesempatan untuk berkembang sesuai potensi mereka. Anak-anak muda NTB harus tumbuh menjadi generasi yang tidak hanya pintar, tapi juga berkarakter, kreatif, dan siap menghadapi tantangan zaman.

Dalam upaya mempercepat membangun Manusia yang berkarakter unggul, produktif dan kompetitif dilakukan pendekatan lintas sektoral dan spasial secara terpadu melalui strategi pemenuhan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan dan perlindungan sosial adaptif yang diarahkan untuk penuntasan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial pada seluruh kelompok masyarakat, dengan mengimplementasikan prinsip GEDSI (kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial), serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia NTB yang produktif dengan pelatihan keterampilan, pengembangan pendidikan vokasi, serta peningkatan peran pemuda dan perempuan dalam dunia kerja dan kewirausahaan. Sehingga sumber daya manusia NTB akan menjadi tenaga kerja yang terampil, pelaku usaha yang tangguh, dan pemimpin masa depan yang berintegritas. Strategi ini juga mencakup penguatan peran perempuan dalam program pemberdayaan serta pemberian prioritas kepada kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas dan lanjut usia, melalui pemberdayaan perempuan dan masyarakat. Arah kebijakan ini ditetapkan dengan mempertimbangkan arah kebijakan dan fokus pembangunan pada Transformasi Sosial di tahapan pertama dokumen RPJPD NTB 2025-2045.

2. Arah Kebijakan Misi 2 Memperkuat Ekonomi Daerah melalui Peningkatan Produktivitas, Daya Saing dan Pendapatan Perkapita Masyarakat sebagai fondasi Mewujudkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan

Memperkuat ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas, daya saing, dan pendapatan per kapita masyarakat merupakan langkah strategis yang menjadi pondasi utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan yang berkeadilan. Peningkatan produktivitas mendorong efisiensi dan nilai tambah dalam setiap sektor ekonomi, sehingga mampu menghasilkan output yang lebih besar dengan sumber daya yang ada.

Selanjutnya, penguatan daya saing daerah di pasar nasional maupun global akan memperluas akses pasar dan investasi, sekaligus mendorong inovasi dan pengembangan sektor unggulan daerah. Pendapatan per kapita yang meningkat menjadi indikator kesejahteraan masyarakat yang makin baik, yang pada akhirnya memperkuat fondasi sosial dan ekonomi daerah.

Dengan pendekatan ini, pertumbuhan ekonomi tidak hanya terfokus pada peningkatan angka produk domestik regional bruto, tetapi juga memastikan distribusi manfaat yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah secara menyeluruh.

Arah kebijakan ini diambil untuk mengoptimalkan potensi sumber daya lokal dengan memanfaatkan inovasi teknologi, pengembangan sumber daya manusia, serta penguatan kelembagaan ekonomi daerah. Fokus diarahkan pada peningkatan nilai tambah produk dan jasa lokal, memperluas akses pasar, serta meningkatkan efisiensi produksi untuk mendongkrak produktivitas dan daya saing sektor ekonomi strategis.

3. Arah Kebijakan Misi 3 Membangun Ekosistem Industri Komoditas Unggulan Sektor Pertanian, Peternakan dan Kelautan Perikanan Menuju terwujudnya Industri Agromaritim yang Berkelanjutan

Dalam rangka mewujudkan kemandirian dan keberlanjutan pembangunan ekonomi daerah, diperlukan upaya strategis untuk membangun ekosistem industri komoditas unggulan di sektor pertanian, peternakan, dan kelautan perikanan. Pengembangan sektor-sektor ini bukan hanya bertumpu pada peningkatan produksi, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat rantai nilai (value chain) dari hulu ke hilir yang berbasis keunggulan lokal dan prinsip keberlanjutan.

Sektor pertanian, peternakan, dan kelautan perikanan memiliki potensi besar sebagai pilar utama perekonomian daerah, sekaligus sebagai sumber penghidupan mayoritas penduduk di wilayah pedesaan dan pesisir. Oleh karena itu, pembangunan ekosistem industri agromaritim harus dilakukan secara terintegrasi, mencakup aspek produksi, pascapanen, pengolahan, distribusi, pemasaran, hingga penguatan akses terhadap pembiayaan dan teknologi.

Pembangunan ekosistem ini bertujuan untuk mendorong terbentuknya industri berbasis komoditas unggulan daerah, seperti industri pangan olahan, industri pakan ternak, industri pengolahan hasil perikanan, dan bioindustri lainnya yang bernilai tambah tinggi. Proses ini perlu didukung dengan peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha, adopsi teknologi tepat guna, penguatan kelembagaan petani/nelayan/peternak, serta kemitraan strategis dengan dunia usaha dan lembaga riset.

Selain itu, prinsip keberlanjutan menjadi pijakan utama dalam pengembangan industri agromaritim, dengan memperhatikan aspek konservasi lingkungan, efisiensi sumber daya alam, dan ketahanan iklim. Tujuan akhirnya adalah terbangunnya struktur ekonomi daerah yang tangguh, berdaya saing tinggi, serta mampu menciptakan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dengan membangun ekosistem industri agromaritim secara konsisten, daerah akan memiliki landasan kuat untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang produktif, inklusif, dan ramah lingkungan.

4. Arah Kebijakan Misi 4 Membangun Sektor Pariwisata Berkualitas, Industri Kreatif serta Mengembangkan Seni Budaya Daerah dan Prestasi Olahraga

Pembangunan sektor pariwisata yang berkualitas, penguatan industri kreatif, serta pengembangan seni, budaya daerah, dan prestasi olahraga merupakan bagian integral dari arah kebijakan pembangunan daerah berbasis potensi lokal dan kearifan budaya. Ketiga sektor ini saling terkait dan memiliki kontribusi nyata terhadap peningkatan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, serta pembentukan identitas dan karakter masyarakat

Pembangunan pariwisata tidak hanya diarahkan pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi lebih pada peningkatan kualitas pengalaman wisata, daya tarik destinasi, serta keberlanjutan lingkungan dan sosial-budaya. Pengembangan destinasi pariwisata diarahkan untuk berbasis komunitas, berwawasan lingkungan, serta mampu mengangkat potensi lokal seperti keunikan alam, sejarah, dan budaya daerah.

Kualitas pelayanan, SDM pariwisata, infrastruktur penunjang, dan promosi digital juga menjadi aspek penting dalam menciptakan ekosistem pariwisata yang tangguh dan berdaya saing. Dengan pendekatan ini, pariwisata menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi kreatif yang berkelanjutan

Industri kreatif merupakan salah satu sektor strategis yang mampu menyerap tenaga kerja muda, mendorong inovasi, dan menciptakan produk bernilai tambah tinggi. Sektor ini mencakup beragam subsektor seperti kuliner, kriya, fesyen, musik, film, animasi, desain, serta teknologi digital. Untuk itu, perlu didorong penciptaan ekosistem kreatif yang mendukung pertumbuhan wirausaha muda, akses pembiayaan, ruang ekspresi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital.

Penguatan identitas lokal sebagai sumber inspirasi kreatif menjadi daya ungkit dalam menjadikan industri kreatif sebagai motor ekonomi daerah yang dinamis dan inklusif

Seni dan budaya merupakan akar identitas daerah sekaligus aset sosial yang memperkaya kehidupan masyarakat. Pengembangan seni dan budaya daerah tidak hanya dilakukan sebagai pelestarian tradisi, tetapi juga sebagai bagian dari upaya peningkatan ekonomi budaya, pendidikan karakter, dan daya tarik wisata.

Sementara itu, bidang olahraga memiliki peran strategis dalam membangun kualitas generasi muda, semangat kompetisi positif, serta kebanggaan daerah. Pembinaan olahraga prestasi dan olahraga masyarakat perlu diperkuat secara berkelanjutan, dengan dukungan infrastruktur, pelatih, kompetisi rutin, serta penguatan peran sekolah dan komunitas.

5. Arah Kebijakan Misi 5 Memperkuat Sistim Mitigasi Bencana, Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Ramah Lingkungan dan Investasi Berkelanjutan

Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, kerentanan wilayah terhadap bencana alam, dan tekanan terhadap lingkungan akibat aktivitas ekonomi, diperlukan komitmen kuat untuk memperkuat sistem mitigasi bencana, menerapkan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang ramah lingkungan, serta mendorong investasi yang berkelanjutan. Ketiga aspek ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan pembangunan yang tangguh, inklusif, dan berorientasi jangka panjang.

Sebagai Provinsi kepulauan yang berada di kawasan rawan bencana, termasuk gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, dan kekeringan, menuntut kesiapsiagaan yang tinggi dari semua elemen pemerintahan dan masyarakat. Penguatan sistem mitigasi bencana dilakukan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana, penguatan sistem peringatan dini, edukasi kebencanaan berbasis masyarakat, serta penataan ruang berbasis risiko bencana.

Perencanaan pembangunan juga harus mengintegrasikan pendekatan pengurangan risiko bencana (PRB), baik dalam tata ruang, pembangunan infrastruktur, maupun kebijakan sosial-ekonomi.

Pemanfaatan sumber daya alam harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan tanpa merusak daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pengelolaan SDA yang berkelanjutan mencakup prinsip konservasi, efisiensi pemanfaatan, rehabilitasi ekosistem, dan pelibatan masyarakat lokal dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Penguatan pengawasan terhadap aktivitas ekstraktif, rehabilitasi kawasan kritis, pengendalian pencemaran, serta pengembangan ekonomi hijau (*green economy*) menjadi bagian penting dari upaya ini. Pemanfaatan energi terbarukan, pertanian organik, dan ekowisata juga menjadi bentuk nyata dari praktik pembangunan berwawasan lingkungan.

6. **Arah Kebijakan Misi 6 Memantapkan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah yang Berwawasan Lingkungan Serta Memastikan Penegakan Tata Ruang yang Berkelanjutan**

Pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah merupakan prasyarat utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Namun demikian, pembangunan infrastruktur harus dilakukan dengan pendekatan yang berwawasan lingkungan dan sejalan dengan prinsip tata ruang yang berkelanjutan, agar tidak menimbulkan tekanan terhadap ekosistem dan keberlangsungan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah, baik daratan maupun kawasan pesisir dan kepulauan, sangat menentukan kelancaran arus barang, jasa, manusia, dan informasi. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur transportasi jalan, pelabuhan, jembatan, serta infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, energi, dan telekomunikasi harus terus ditingkatkan, terutama di wilayah tertinggal, terpencil, dan terluar.

Kebijakan pembangunan infrastruktur harus mengedepankan pemerataan dan integrasi wilayah, agar setiap daerah memiliki kesempatan yang setara dalam mengakses peluang ekonomi, layanan publik, dan jejaring sosial. Pendekatan infrastruktur yang berbasis kawasan dan memperhatikan kondisi geografis lokal menjadi penting untuk mendorong inklusivitas dan efisiensi pembangunan.

Selanjutnya Tata ruang merupakan instrumen penting untuk mengarahkan pertumbuhan wilayah secara terencana, serasi, dan berkelanjutan. Penegakan tata ruang yang tegas dan konsisten sangat diperlukan untuk mencegah alih fungsi lahan yang tidak sesuai, penyalahgunaan kawasan lindung, serta konflik pemanfaatan ruang antar sektor.

Penguatan kelembagaan penataan ruang, sistem pengawasan berbasis digital, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang menjadi bagian penting dari arah kebijakan ini. Sinkronisasi RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dengan kebijakan sektoral dan perencanaan pembangunan lintas OPD juga harus terus ditingkatkan agar pembangunan berjalan sesuai arah kebijakan tata ruang.

7. **Arah Kebijakan Misi 7 Mempercepat Transformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Inovatif serta Kepemimpinan yang Kolaboratif dari Pusat, Provinsi dan Kab/Kota Sebagai Pondasi Percepatan Pembangunan Daerah**

Transformasi birokrasi merupakan agenda fundamental dalam mewujudkan pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan efektif dalam mendukung percepatan pembangunan daerah. Di era tantangan global dan kompleksitas tata kelola, birokrasi tidak lagi cukup hanya berorientasi pada administrasi semata, tetapi harus menjadi motor penggerak inovasi, kolaborasi lintas sektor, serta penjaga integritas dalam pelayanan publik.

Pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi adalah prasyarat mutlak untuk menciptakan kepercayaan publik dan menjamin keberlanjutan pembangunan. Reformasi sistem pengawasan, transparansi anggaran, penerapan sistem merit, serta penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menjadi fondasi untuk menciptakan birokrasi yang akuntabel dan berintegritas. Digitalisasi sistem pelayanan dan pengadaan barang/jasa juga menjadi instrumen penting untuk menutup celah korupsi dan meningkatkan efisiensi.

Dalam menghadapi dinamika perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi, birokrasi harus mampu berinovasi dalam tata kelola maupun pelayanan publik. Penerapan prinsip agile government dan pemanfaatan teknologi digital—seperti sistem informasi terintegrasi, pelayanan berbasis aplikasi, dan big data—menjadi elemen penting dalam menciptakan pelayanan yang cepat, tepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Birokrasi yang inovatif juga mendorong budaya kerja yang kreatif, pembelajaran berkelanjutan, serta kolaborasi dengan akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat sipil.

Transformasi birokrasi tidak dapat berjalan sendiri di satu level pemerintahan. Diperlukan kepemimpinan kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi, dan Kab/Kota dalam satu ekosistem tata kelola yang terkoordinasi dan sinergis. Integrasi perencanaan, harmonisasi kebijakan, serta keterpaduan pelaksanaan program harus menjadi semangat utama dalam hubungan antar level pemerintahan.

Kolaborasi juga dibutuhkan dalam menghadapi isu-isu lintas wilayah seperti pengentasan kemiskinan, pengendalian inflasi, mitigasi bencana, ketahanan pangan, serta pembangunan infrastruktur strategis. Dengan mempercepat transformasi birokrasi ke arah tata kelola yang bersih, inovatif, dan kolaboratif, maka pemerintah daerah akan memiliki kapasitas kelembagaan yang lebih kuat untuk mendukung percepatan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Transformasi birokrasi bukan hanya soal perubahan sistem dan struktur, tetapi lebih dalam dari itu: tentang perubahan pola pikir, budaya kerja, dan orientasi pelayanan menuju birokrasi kelas dunia yang bekerja untuk rakyat.

Berdasarkan arah kebijakan disetiap misi pembangunan maka dapat dirumuskan Arah Kebijakan dan Integrasi Program sesuai Nomenklatur SIPD dalam Mendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran daerah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3. 3 Rumusan Arah Kebijakan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029

No.	Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	
	Visi : NUSA TENGGARA BANGKIT BERSAMA MENUJU PROVINSI KEPULAUAN YANG MAKMUR MENDUNIA						
1	**Misi 1 : Membangun Manusia yang Berkarakter Unggul, Produktif dan Kompetitif**						
		Tujuan 1	**Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Unggul, Sehat, Produktif, dan Kompetitif**				
		Sasaran 1	Meningkatnya Akses dan Layanan Pendidikan Berkualitas yang Merata di NTB	1.1	Penyelenggaraan Pendidikan yang berkualitas, merata dan terjangkau	1	Pemerataan Akses Pendidikan di Seluruh Wilayah Nusa Tenggara Barat
						2	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)
						3	Pengembangan Sistem Pendidikan Inklusif dan Responsif Gender
						4	Pemenuhan dan Perkuatan Pengelolaan Pendidik dan tenaga kependidikan dengan kuantitas, kualitas dan distribusi yang optimal serta pemberian bantuan/insentif dan afirmasi tenaga pendidik
						5	Peningkatan dan Pengembangan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi dan kebutuhan daerah
						6	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi dalam Pembelajaran
						7	Percepatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi
		Sasaran 2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	2.1	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan	1	Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat
						2	Penguatan Kapasitas Ketahanan kesehatan
						3	Penguatan Upaya Promotif dan Preventif Berbasis Masyarakat
						4	Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola

No.	Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	
						5	Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat
						6	Penguatan Layanan Keluarga Berencana
		Sasaran 3	Meningkatnya Penguatan Ketahanan dan Keharmonisan Keluarga, serta Kesetaraan Gender	3.1	Pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas keluarga, dan pembangunan berwawasan kependudukan	1	Penguatan dan pengelolaan system informasi gender dan anak, serta pengembangan data terpilah untuk perencanaan pembangunan
						2	Penguatan kelembagaan dan kapasitas sumberdaya pengelola berbasis masyarakat untuk kesetaraan gender, perlindungan anak dan ketahanan keluarga
						3	Pemberdayaan Perempuan dalam bidang ekonomi, social, politik, dan hukum terutama bagi kelompok rentan
						4	Peningkatan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak
						5	Penguatan regulasi, kepastian hukum dan mekanisme pencegahan, penanganan dan rehabilitasi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
						6	Pengendalian penduduk (kuantitas, kualitas, mobilitas penduduk dan pengelolaan database kependudukan)
						7	Penguatan perencanaan dan pengendalian jumlah serta persebaran penduduk sesuai daya dukung dan daya tampung wilayah
2	**Misi 2 : Memperkuat Ekonomi Daerah melalui Peningkatan Produktivitas, Daya Saing dan Pendapatan Perkapita Masyarakat sebagai Pondasi Mewujudkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan**						
		Tujuan 2	**Terwujudnya Peningkatan Produktifitas dan Daya Saing Ekonomi Daerah**				
		Sasaran 4	Meningkatnya Produktivitas UMKM, Koperasi, dan Nilai Tambah Perdagangan	4.1	Penguatan UMKM dan Kewirausahaan Berbasis Inovasi dan Digitalisasi	1	Pengembangan sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM) melalui peningkatan kapasitas industri kecil dan menengah melalui akses

No.	Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	
							pembiayaan, pelatihan manajemen, dan perluasan pasar, serta mendukung inovasi produk untuk meningkatkan daya saing
						2	Peningkatan Kapasitas dan Literasi Digital bagi Pelaku UMKM dan Wirausaha Baru
						3	Penguatan Kemitraan antara UMKM dan Pelaku Usaha Besar/Swasta
						4	Pengembangan koperasi yang dikelola secara profesional untuk kemandirian ekonomi
				4.2	Tambang	1	Fasilitasi Legalitas dan Sertifikasi Usaha Tambang Rakyat
						2	Digitalisasi dan Inovasi Pemantapan Hilirisasi Produk Tambang dalam Kawasan Industri
						3	Pengawasan dan pengendalian pertambangan
				4.3	Perluasan Akses Pasar dan Penguatan Sistem Perdagangan Daerah	1	Penguatan Infrastruktur dan Sarana Perdagangan yang Terintegrasi
						2	Pengembangan Jejaring Distribusi dan Rantai Pasok Regional-Nasional
						3	Peningkatan Promosi dan Branding Produk Unggulan Daerah
						4	Penguatan Sistem Informasi dan Data Perdagangan Daerah
		Tujuan 3	**Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Per Kapita Masyarakat**				
		Sasaran 5	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja dan Menurunnya Tingkat Pengangguran	5.1	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	1	Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui revitalisasi pelatihan vokasi yang bersifat inklusif
						2	Memperluas kesempatan kerja terutama lapangan kerja formal bagi seluruh pencari kerja termasuk penyandang disabilitas

No.	Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	
						3	Meningkatkan perlindungan tenaga kerja yang ditempatkan di dalam dan luar negeri
						4	Menguatkan dan mengembangkan sistem informasi pasar kerja untuk perencanaan tenaga kerja lebih inklusif
						5	Melakukan revitaliasi BLK melalui rebranding lembaga pelatihan; reformasi lembaga pelatihan; redesain program pelatihan; revitalisasi fasilitas, sarana, prasarana; reorientasi sumberdaya manusia (instruktur, mentor, asesor) dan peningkatan kemitraan dan kolaborasi dengan stakeholders lain untuk memperkuat kinerja lembaga pelatihan
						6	Penguatan Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (TKDV)
		Sasaran 6	Meningkatnya Ketersediaan Akses Keuangan	6.1	Pemberdayaan UMKM dan Koperasi dalam Akses Pembiayaan Produktif	1	Mendorong peningkatan jumlah dan cakupan lembaga keuangan formal (bank, BPR, fintech, koperasi simpan pinjam) di seluruh wilayah
						2	Memfasilitasi pengembangan sistem layanan keuangan digital dan agen Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif)
						3	Meningkatkan efektivitas program Kredit/Pembiayaan Ultra Mikro, KUR, dan pembiayaan syariah berbasis kelompok
				6.2	Kolaborasi Lintas Sektor untuk Inovasi Pembiayaan Daerah	1	Meningkatkan kolaborasi antara pemda, OJK, BI, perbankan, dan fintech untuk memperluas akses pembiayaan
						2	Mendorong integrasi data dan layanan akses keuangan dengan sistem perencanaan pembangunan daerah

No.	Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	
						3	Menyediakan edukasi dan pelatihan keuangan dasar bagi masyarakat, pelaku UMKM, dan pelajar
						4	Menyusun regulasi atau insentif daerah untuk lembaga keuangan yang berperan aktif dalam pembiayaan inklusif
		Tujuan 4	**Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan melalui inflasi daerah yang terkendali**				
		Sasaran 7	Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat	7.1	Pengembangan Program Perlindungan Sosial yang Tepat Sasaran dan Responsif	1	Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
						2	Peningkatan kualitas layanan rehabilitasi sosial
						3	Penguatan koordinasi penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk penanggulangan kemiskinan
						4	Penanggulangan Kemiskinan melalui pendekatan graduasi dan penguatan pendampingan
						5	Penguatan Program Jaminan Sosial bagi Kelompok Rentan dan Tidak Mampu
						6	Pengembangan program Perlindungan Sosial Responsif terhadap Krisis dan Bencana
		Sasaran 8	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan yang berkelanjutan	8.1	Penguatan Cadangan dan Distribusi Pangan Daerah	1	Mendorong diversifikasi pangan lokal yang berbasis pada tanaman asli NTB yang memiliki nilai gizi tinggi dan adaptif terhadap perubahan iklim
						2	Mengembangkan pasar dan promosi untuk produk pangan lokal agar lebih dikenal dan diminati, baik di dalam maupun luar daerah,

No.	Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	
							sehingga dapat meningkatkan ketahanan pangan sekaligus perekonomian lokal
						3	Penguatan kelembagaan dan kebijakan untuk mendukung kearifan lokal dan ekologi dalam ketahanan pangan
						4	Pemberdayaan masyarakat dan edukasi lingkungan untuk mendukung ketahanan pangan
		Sasaran 9	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di wilayah Pedesaan	9.1	Peningkatan Kemandirian dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan desa
						2	Perwujudan tata kelola pemerintahan desa yang baik
						3	Penguatan perekonomian desa melalui pengembangan BUMDesa sebagai katalisator pengembangan ekonomi produktif dan pemanfaatan potensi desa
						4	Mengembangkan Daerah Kawasan Transmigran
				9.2	Pengembangan Potensi Unggulan Wilayah Secara Spasial	1	Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal di luar pusat kota
						2	Mendorong pembangunan infrastruktur dasar (jalan, air bersih, listrik, sanitasi) di wilayah dengan akses terbatas
						3	Menyusun dan melaksanakan kebijakan afirmatif bagi wilayah perdesaan, pesisir, lingkar kawasan hutan, lingkar TPAR dan atau daerah afirmasi 3T.
						4	Mendorong sinergi lintas sektor dan lintas wilayah dalam pengembangan kawasan strategis daerah
						5	Mengintegrasikan pendekatan spasial dalam perencanaan pembangunan (one data–one map)

No.	Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	
		Sasaran 10	Menurunnya disparitas harga antar wilayah dalam provinsi	10.1	Stabilisasi Harga dan Pasokan Komoditas Strategis	1	Mendorong pembentukan dan penguatan Lembaga Distribusi Pangan dan Barang Pokok (BUMDes, Koperasi, Distributor Mitra)
						2	Mengembangkan dan memperluas jaringan logistik lokal serta fasilitas penyimpanan (gudang, cold storage) di wilayah sentra dan konsumen
						3	Melaksanakan operasi pasar di wilayah dengan gejolak harga tinggi secara berkala
						4	Mendorong penguatan kerja sama antardaerah/kawasan dalam stabilisasi harga dan distribusi komoditas
						5	Mengembangkan pasar rakyat digital dan sistem informasi harga terpadu antarwilayah
3	**Misi 3 : Membangun Ekosistem Industri Komoditas Unggulan Sektor Pertanian, Peternakan dan Kelautan Perikanan Menuju terwujudnya Industri Agromaritim yang Berkelanjutan**						
		Tujuan 5	**Terwujudnya Pembangunan Ekosistem Industri Komoditi Unggulan Daerah yang Berkelanjutan**				
		Sasaran 11	Meningkatnya Kontribusi Industri Agromaritim	11.1	Pengembangan Hilirisasi Komoditas Unggulan Agromaritim	1	Penguatan Rantai Nilai dan Industri Pengolahan Komoditas Unggulan
						2	Peningkatan Akses Teknologi Produksi dan Inovasi Produk Olahan
						3	Fasilitasi Sertifikasi Mutu dan Standar Produk Olahan
						4	Penguatan Promosi dan Akses Pasar Produk Olahan Agromaritim
						5	Perbaikan Infrastruktur Pendukung Hilirisasi

No.	Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	
		Sasaran 12	Meningkatnya Produktivitas Sektor Agromaritim (Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan, dan Kehutanan)	12.1	Peningkatan kapasitas dan kualitas produksi Komoditas Unggulan	1	Pengembangan Kawasan Sentra (roadmap) Produksi Komoditas Unggulan Berbasis Wilayah dan potensi lahan kering
						2	Peningkatan Kualitas Produk dan Sertifikasi Standar Komoditas Unggulan
						3	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Produksi dan Distribusi Komoditas serta Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi dalam Budidaya dan Produksi
						4	Penguatan Kelembagaan Ekonomi dan Penguatan Sistem Penyuluhan, Pelatihan, dan Pendampingan Teknis
						5	Meningkatkan kapasitas petani lokal melalui pelatihan berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan produksi pangan yang berkelanjutan tanpa merusak ekosistem
4	**Misi 4 : Membangun Sektor Pariwisata Berkualitas, Industri Kreatif serta Mengembangkan Seni Budaya Daerah dan Prestasi Olahraga**						
		Tujuan 6	**Terwujudnya Pariwisata NTB yang Berkualitas dan Industri Ekonomi Kreatif**				
		Sasaran 13	Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	13.1	Pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan Berbasis Potensi Lokal dan Berkelanjutan	1	Penataan dan Pengembangan Pariwisata yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan serta Penguatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Prioritas
						2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Pariwisata serta Peningkatan Konektivitas Antar Destinasi Wisata
						3	Pengembangan Quality Tourism dengan Penguatan Kelembagaan Pariwisata Daerah dan

No.	Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	
							Pemberdayaan Masyarakat Lokal/SDM Pariwisata dalam Pengelolaan Destinasi
						4	Pengembangan Event dan Aktivitas Wisata Unggulan Daerah
						5	Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan Pelaku Ekonomi Pariwisata
						6	Promosi dan Branding (halal tourism, Lombok-Sumbawa Infinity Experience) menuju Pariwisata NTB Mendunia
				13.2	Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal dan Inovasi	1	Pengembangan Sentra Ekonomi Kreatif Daerah Berbasis Budaya dan Komoditas Lokal
						2	Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan Pelaku Ekonomi Kreatif
						3	Promosi dan Branding Produk Ekraf NTB di Pasar Nasional dan Internasional
						4	Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Produksi dan Pemasaran Produk Kreatif
		Tujuan 7	**Terwujudnya Pengembangan Kebudayaan Daerah dan Ketahanan Sosial Budaya**				
		Sasaran 14	Meningkatnya budaya literasi, ekspresi budaya, warisan budaya dan ekonomi budaya	14.1	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan	1	Perlindungan Warisan Budaya melalui Pendaftaran atas Hak Kekayaan Intelektual (HaKI)
						2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Adat dan Komunitas Budaya
						3	Integrasi Nilai Budaya Lokal dalam Sistem Pendidikan dan Kehidupan Sosial
						4	Penyelenggaraan Festival Budaya dan Kegiatan Seni Secara Berkala dan Terencana

No.	Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	
						5	Mengembangkan pemanfaatan budaya lokal dalam ekonomi kreatif
						6	Menyediakan pelatihan kewirausahaan budaya untuk pelaku seni, komunitas, dan UMKM berbasis budaya lokal
				14.2	Peningkatan budaya literasi dan Pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan bahan perpustakaan dan naskah nusantara		Pembinaan dan peningkatan serta pengembangan kepada semua jenis perpustakaan
							Gerakan sosial literasi dan promosi perpustakaan
		Tujuan 8	**Terwujudnya Peningkatan Prestasi Pemuda dan Olahraga**				
		Sasaran 15	Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan Prestasi Olahraga	15.1	Peningkatan dayasaing pemuda dan prestasi olahraga	1	Meningkatkan kompetensi dan kewirausahaan pemuda
						2	Penguatan dan pengelolaan database kepemudaan dan olahraga
						3	Menyelenggarakan program kepemudaan berbasis komunitas dan potensi wilayah
						4	Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor
						5	Mendorong kolaborasi dengan dunia usaha, perguruan tinggi, dan organisasi kepemudaan dalam program inovatif
						6	Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah provinsi

No.	Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	
						7	pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional)
						8	Menyelenggarakan kejuaraan olahraga tingkat daerah provinsi
						9	Merevitalisasi dan meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga
						10	pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat daerah provisi
						11	Memberikan penghargaan, insentif, dan beasiswa bagi pemuda dan atlet berprestasi berprestasi
5	**Misi 5 : Memperkuat Sistim Mitigasi Bencana, Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Ramah Lingkungan dan Investasi Berkelanjutan**						
		Tujuan 9	**Terwujudnya Peningkatan resiliensi Terhadap Bencana**				
		Sasaran 16	Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	16.1	Meningkatkan Mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, respon kedaruratan, dan pemulihan pasca-bencana	1	Penguatan kelembagaan dan kapasitas institusi penanggulangan bencana
						2	Meningkatkan sistem peringatan dini (early warning system) dan peningkatan kesiapsiagaan serta respon tanggap darurat bencana
						3	Pemberdayaan masyarakat dalam membangun ketahanan masyarakat mengahadapi bencana.
						4	pengelolaan data dan sitem informasi dalam penanggulangan bencana
						5	pengembangan literasi kebencanaan, pemberdayaan masyarakat, dan inklusi sosial dalam penanggulangan bencana
						6	perluasan jejaring kemitraan serta pendanaan alternatif dalm penanggulangan bencana

No.	Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	
						7	penguatan pembangunan berbasis pengurangan resiko bencana baik mitigasi struktural maupun non struktural
				16.2	Meningkatkan Pelayanan Penanganan Kebakaran dan non kebakaran	1	penguatan kelembagaan dan kapasitas institusi layanan penanganan kebakaran dan non kebakaran
						2	pengembangan literasi kebencanaan, pemberdayaan masyarakat, dan inklusi sosial dalam penanganan bahaya kebakaran dan non kebakaran
						3	perluasan jejaring kemitraan serta pendanaan alternatif dalam penanganan kebakaran dan non kebakaran
		Tujuan 10	**Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan**				
		Sasaran 17	Meningkatnya Pengelolaan lingkungan Hidup Berkualitas	17.1	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	1	Meningkatkan pengawasan terhadap sumber pencemar udara, air, dan tanah
						2	Meningkatkan kapasitas fasilitas pengolahan sampah (TPA, TPS3R, Bank Sampah)
						3	Mendorong prinsip ekonomi sirkular dan 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
						4	Peningkatan kualitas pemantauan dan informasi lingkungan hidup
						5	Mendorong gerakan lingkungan berbasis komunitas seperti kampung hijau, sekolah adiwiyata, dan desa lestari
						6	Penguatan kelembagaan dan pembiayaan pengelolaan lingkungan hidup

No.	Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	
		Sasaran 18	Meningkatnya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem	18.1	Penguatan Tata Kelola Konservasi dan Perlindungan Kawasan Ekosistem Strategis	1	Memperluas dan memperkuat pengelolaan kawasan konservasi darat dan laut berbasis zonasi dan rencana pengelolaan
						2	Melaksanakan pengelolaan DAS melalui rehabilitasi kawasan kritis, mangrove, dan habitat satwa terancam punah
						3	Meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan dan perburuan ilegal
						4	Mengembangkan program konservasi berbasis masyarakat, seperti hutan desa, ekowisata, dan kelompok pengawas lingkungan
						5	Melestarikan plasma nutfah lokal dan spesies endemik melalui kebun raya, taman keanekaragaman hayati, atau pusat konservasi
						6	Meningkatkan kolaborasi dengan dunia usaha, LSM, perguruan tinggi, dan lembaga internasional dalam konservasi
						7	Meningkatkan edukasi lingkungan dan kampanye pelestarian sumber daya alam bagi pelajar dan masyarakat umum
		Sasaran 19	Meningkatnya Ketahanan Energi Ramah Lingkungan dan konsumsi listrik yang merata serta berkelanjutan	19.1	Peningkatan pemanfaatan potensi energi baru dan terbarukan (EBT) di berbagai wilayah	1	Menyusun dan memperkuat kebijakan energi daerah yang mendorong bauran energi terbarukan
						2	Mendorong investasi swasta dan kemitraan publik-swasta (PPP) dalam proyek energi terbarukan
						3	Meningkatkan pemanfaatan sumber daya lokal (matahari, angin, biomassa, air, panas bumi) untuk pembangkit energi

No.	Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	
						4	Mendorong konversi penggunaan energi fosil ke energi bersih, khususnya di sektor transportasi dan industri
						5	Memperluas penyediaan energi listrik untuk wilayah yang belum terjangkau jaringan PLN (off-grid solutions)
						6	Mengembangkan pusat-pusat inovasi energi dan pendidikan energi terbarukan di daerah
						7	Meningkatkan kampanye kesadaran publik terhadap konservasi energi dan transisi energi hijau
		Tujuan 11	**Terwujudnya Investasi Berkelanjutan**				
		Sasaran 20	Meningkatnya Realisasi Investasi	20.1	Penguatan regulasi dan tata kelola investasi yang ramah lingkungan dan sosial	1	Menyusun dokumen perencanaan terintegrasi untuk masing-masing KSP (masterplan, RDTR, business plan)
						2	Menyediakan insentif fiskal dan non-fiskal bagi investor yang berinvestasi di sektor prioritas KSP
				20.2	Pengembangan kawasan investasi strategis yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan	1	Mengembangkan kawasan ekonomi khusus, kawasan industri hijau, dan kawasan potensial investasi berbasis tata ruang
						2	Menjalin kemitraan antara BUMD, BUMDes, UMKM, dan investor besar agar manfaat KSP merata
						3	Meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyediaan infrastruktur dasar dan konektivitas ekonomi
						4	Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi dampak investasi terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi daerah
6	**Misi 6 : Memantapkan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah yang Berwawaasan Lingkungan Serta Memastikan Penegakan Tata Ruang yang Berkelanjutan**						

No.	Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	
		Tujuan 12	**Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas antar Wilayah yang Berwawasan Lingkungan**				
		Sasaran 21	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas Antar Wilayah yang Terintegrasi	21.1	Peningkatan Infrastruktur Jaringan Perpipaan untuk Meningkatkan Akses Air Bersih	1	Peningkatan kapasitas dan jangkauan sistem perpipaan air bersih
						2	Rehabilitasi dan modernisasi jaringan perpipaan eksisting
						3	Mendorong kerjasama antar daerah dan dengan badan usaha/swasta untuk pendanaan dan penyelenggaraan SPAM
						4	Pemanfaatan teknologi dan sistem digitalisasi dalam pengelolaan air bersih
						5	Peningkatan kapasitas dan tata kelola BUMD air minum
						6	Integrasi pengelolaan air bersih dengan konservasi sumber air
				21.2	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Jalan untuk Meningkatkan Konektivitas	1	Peningkatan kemantapan jalan
						2	Pembangunan dan peningkatan jalan penghubung kawasan prioritas kewenangan Proviinsi
						3	Penguatan kolaborasi pendanaan dan partisipasi pihak non-pemerintah
						4	Integrasi pembangunan jalan dengan pengembangan wilayah dan tata ruang
				21.3	Pemantapan Sistem Jaringan dan Saluran Irigasi	1	Peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak atau tidak berfungsi optimal

No.	Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	
						2	Penguatan kelembagaan dan peran Petugas Pengelola Irigasi serta P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air)
						3	Integrasi pengelolaan irigasi dengan konservasi dan perlindungan sumber air
						4	Sinkronisasi rencana irigasi dengan program ketahanan pangan dan tata ruang wilayah
						5	Pemantapan sistem monitoring dan evaluasi jaringan irigasi secara digital
				21.4	Peningkatan ketersediaan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	1	Fasilitasi pembangunan rumah layak dan terjangkau bagi MBR dan kelompok rentan
						2	Fasilitasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana atau terkena relokasi program pemerintah provinsi
						3	Revitalisasi dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh perkotaan dan pedesaan
						4	Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum pada kawasan permukiman untuk mencegah kekumuhan
						5	Integrasi penyediaan hunian dengan pengembangan wilayah dan layanan dasar
						6	Penguatan kebijakan insentif dan kolaborasi dengan sektor swasta dan BUMN
				21.5	Pengembangan sistem transportasi publik yang efisien, aman, dan berkelanjutan	1	Peningkatan kualitas dan kapasitas jaringan jalan strategis antar kabupaten/kota
						2	Peningkatan interkonektivitas sistem transportasi darat-laut-udara secara terpadu
						3	Pengembangan sistem logistik daerah yang mendukung kelancaran arus barang dan jasa

No.	Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	
						4	Integrasi konektivitas dengan sistem perencanaan tata ruang dan kawasan
						5	Pemanfaatan teknologi transportasi dan pengelolaan infrastruktur berbasis data
		Tujuan 13	**Terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan**				
		Sasaran 22	Meningkatnya kepatuhan dalam penyelenggaraan penataan ruang	22.1	Peningkatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW	1	Peningkatan kepatuhan pemanfaatan ruang sesuai dengan perizinan dan zonasi
						2	Pengembangan sistem informasi geospasial daerah dan pemetaan tematik
						3	Pengendalian alih fungsi lahan yang tidak sesuai rencana tata ruang
						4	Peningkatan kolaborasi antar sektor dan wilayah dalam perencanaan ruang
						5	Penguatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan tata ruang
7	**Misi 7 : Mempercepat Transformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Inovatif serta Kepemimpinan yang Kolaboratif dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota Sebagai Fondasi Percepatan Pembangunan Daerah**						
		Tujuan 14	**Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Inovatif serta Kepemimpinan Daerah yang Kolaboratif**				
		Sasaran 23	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	23.1	Penguatan Kelembagaan dan Sistem Manajemen Pemerintahan Daerah yang Adaptif dan Berbasis Kinerja	1	Penyempurnaan struktur organisasi perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan daerah dan tantangan pembangunan
						2	Peningkatan integrasi sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan pembangunan daerah

No.	Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	
						3	Penguatan manajemen kinerja perangkat daerah berbasis hasil (result-based management)
						4	Penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi pembangunan yang sistematis dan digital
						5	Optimalisasi fungsi Sekretariat Daerah sebagai penggerak koordinasi lintas sektor
						6	Transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi dalam semua lini kelembagaan
				23.2	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur yang Profesional dan Berintegritas	1	Penguatan sistem merit dalam pengelolaan ASN
						2	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang adaptif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat
						3	Peningkatan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial-kultural ASN
						4	Penguatan budaya kerja profesional, adaptif, dan inovatif
						5	Penguatan sistem evaluasi dan penilaian kinerja ASN
						6	Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan SDM aparatur
						7	Peningkatan motivasi dan kesejahteraan ASN
				23.3	Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Tata Kelola Pemerintahan (e-Government)	1	Penguatan kebijakan dan regulasi e-Government yang terpadu dan adaptif
						2	Pengembangan dan integrasi layanan digital pemerintahan
						3	Peningkatan kapasitas infrastruktur dan keamanan sistem informasi

No.	Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	
						4	Pemanfaatan big data dan sistem analitik dalam pengambilan keputusan
						5	Peningkatan literasi digital dan kapasitas SDM aparatur
						6	Penguatan partisipasi publik melalui kanal digital
						7	Evaluasi dan penyempurnaan sistem e-Government secara berkelanjutan
		Sasaran 24	Meningkatnya Penegakan Hukum yang Adil dan Terpeliharanya Stabilitas Keamanan untuk Mendukung Demokrasi yang Berkualitas	24.1	Penguatan tata kelola pemerintahan umum yang stabil, inklusif, dan berketahanan	1	Menjaga stabilitas politik, keamanan, dan ketertiban umum
						2	Penguatan demokrasi dan partisipasi masyarakat
						3	Peningkatan wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila
						4	Pencegahan dan Penanganan potensi konflik sosial
						5	Penguatan sinergi pusat-daerah dan antarwilayah
				24.2	Memperkuat Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Pencegahan, Penegakan, dan Partisipasi Publik secara Terpadu	1	Penguatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
						2	Penguatan penegakan Peraturan Daerah
						3	Penguatan Penyelenggaraan perlindungan masyarakat
		Sasaran 25	Meningkatnya Keunggulan Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah	25.1	Penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah yang kolaboratif, aplikatif, dan berkelanjutan untuk mendorong	1	Peningkatan sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga riset, pelaku usaha, dan masyarakat (quadruple helix)

No.	Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	
					produktivitas dan daya saing pembangunan		
						2	Penguatan peran riset dan inovasi untuk penyelesaian masalah pembangunan daerah
						3	Peningkatan kapasitas dan literasi inovasi di kalangan ASN, pelajar, dan masyarakat
						4	Pengembangan infrastruktur riset dan inovasi daerah

Sumber : Bappeda NTB, 2025

3.2.1.4 Pentahapan Pembangunan

Pentahapan Pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan utama pembangunan daerah dan lima sasaran visi sebagai sasaran pembangunan daerah. Maka pelaksanaan RPJMD dibagi ke dalam tahapan-tahapan pembangunan tahunan yang disusun secara sistematis dan berjenjang, sesuai dengan dinamika capaian serta kemampuan fiskal daerah. Pentahapan ini akan menjadi panduan dalam menyusun kebijakan pertahunnya.

Memperhatikan arah kebijakan pada tiap misi dan arahan kebijakan pada RPJMN maka ditetapkan pentahapan pembangunan sebagai berikut :

Gambar 3. 11 Tahapan Pelaksanaan RPJMD NTB Tahun 2025-2029

Sumber : Bappeda Provinsi NTB

Arah dan Implementasi kebijakan pada masing-masing tahapan pelaksanaan RPJMD adalah sebagai berikut :

Tahun 2025	**:**	**Konsolidasi orgarnisasi perangkat daerah dan peningkatan sumberdaya untuk bangkit bersama melakukan akselerasi pembangunan**
Arah dan Implementasi Kebijakan	:	Kebijakan ini bertujuan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang semakin solid, adaptif, dan mampu merespon kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat. Konsolidasi organisasi diarahkan untuk menata kembali struktur dan fungsi kelembagaan pemerintah daerah secara efisien dan efektif, dengan menekankan pada integrasi

lintas sektor, penyederhanaan proses birokrasi, serta penguatan koordinasi antar perangkat daerah. Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia menjadi bagian yang tak terpisahkan. Pemerintah Provinsi NTB menempatkan pengembangan SDM sebagai prioritas, dengan mendorong pembentukan aparatur yang profesional, berintegritas, dan berbasis kompetensi. Peningkatan kemampuan digital, manajerial, dan kepemimpinan mnejadi fokus dalam menjawab tantangan publik di era transformasi digital dan perubahan sosial yang cepat.

Melalui konsolidasi organisasi dan penguatan sumber daya, Provinsi NTB berkomitmen menciptakan fondasi kelembagaan yang kokoh sebagai mesin penggerak pembangunan. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian sasaran strategis daerah, mengatasi ketimpangan wilayah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan seangat kolaborasi dan semakin bangkit bersama, NTB menguhkan arah kebijakan ini sebagai pijakan untuk melaju lebih cepat, lebih kuat, dan lebih inklusif dalam menyongsong masa depan yang makmur mendunia serta berkelanjutan.

Tahun 2026

Akselerasi pengentasan kemiskinan, ketahan pangan, dan penyiapan ekosistem industri agromaritim dan pembangunan destinasi pariwisata berkualitas berkelanjutan

Arah dan Implementasi Kebijakan : Untuk mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, Pemerintah Provinsi NTB menetapkan kebijakan yang saling terkait dan menguatkan melalui pendekatan sinergis antar sektor dan berbasis potensi unggulan daerah.

Dalam upaya akselerasi pengentasan kemiskinan kebijakan diarahkan untuk menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan melalui pendekatan integratif yang menggabungkan perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan perluasan akses dasar masyarakat. Fokus implementasi meliputi: (a) integrasi data kemiskinan melalui sistem satu data daerah; (b) pelaksanan program

padat karya dan wirausaha produktif; (c) penguatan ekonomi lokal berbasis potensi desa; dan (d) sinergi bantuan sosial dengan program pemberdayaan.

Dalam upaya penguatan ketahanan pangan daerah diperlukan penguatan sistem produksi, distribusi, dan cadangan pangan lokal yang adaptif dan berkelanjutan untuk menghadapi krisis pangan dan guncangan global dengan fokus implementasi meliputi: (a) peningkatan produktivitas pertanian, peternakan, dan perikanan; (b) penguatan kelembagaan petani dan koperasi pangan; (c) Diversifikasi pangan lokal dan peningkatan ketersediaan pangan murah; dan (d) digitalisasi distribusi dan penguatan cadangan pangan daerah.

Penyiapan ekosistem industri agromaritim melalui transformasi sektor kelautan, perikanan, dan perikanan menjadi industri agromaritim bernilai tambah menjadi prioritas dalam meningkatkan daya saing daerah. Dengan fokus implementasi meliputi: (a) pengembangan kawasan industri agromaritim; (b) fasilitasi investasi hilirisasi dan infrastruktur logistik hasil bumu dan hasil laut; (c) peningkatan kapasitas petani/nelayan melalui pelatihan dan digitalisasi; dan (d) sinergi riset dan inovasi teknologi tepat guna untuk sektor agro.

Pembangunan pariwisata diarahkan untuk menghasilkaj dampak ekonomi langsung ke masyarakat, melalui destinasi yang inklusif, berwawasan lingkungan , dan berdaya saing global dengan fokus implementasi meliputi: (a) penguatan destinasi prioritas; (b) peningkatan infrastruktur konektivitas dan layanan wisata; (c) serifikasi, penguatan SDM, dan pelestarian budaya lokal; dan (d) pengembangan ekowisata dan desa wisata berbasis masyarakat.

Tahun 2027	**:**	**Penguatan upaya transformasi dalam pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan ekosistem industri agromaritim dan destinasi pariwisata berkualitas berkelanjutan**
Arah dan Implementasi Kebijakan	:	Pemerintah Provinsi NTB menempatkan penguatan upaya transformasi sebagai landasan utama dalam menjawab

tantangan pembangunan jangka menengah ke depan. Fokus diarahkan pada sektor-sektor strategis yang memiliki daya ungkit besar terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan pengentasan kemiskinan tidak lagi hanya bersifat karitatif, tetapi diarahkan pada transformasi struktural berbasis pemberdayaan dan produktivitas. Pendekatan ini mengutamakan sinergi program antara perlindungan sosial, peningkatan kapasitas masyarakat, dan penguatan ekonomi lokal.

Ketahanan pangan menjadi isu strategis yang dihadapi melalui penguatan sistem produksi dan distribusi pangan daerah, serta transformasi menuju pertanian modern, tangguh, dan berbasis inovasi.

Sektor kelautan, perikanan, dan pertanian dikembangkan melalui ekosistem industri agromaritim terpadu yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap tenaga kerja secara berkelanjutan.

NTB mengarahkan pengembangan sektor pariwisata menuju model berbasis kualitas, keberlanjutan, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Fokus transformasi terletak pada penciptaan ekosistem pariwisata yang lebih tangguh dan inklusif.

Tahun 2028	**:**	**Pemantapan upaya transformasi dalam pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan ekosistem industri agromaritim dan destinasi pariwisata berkualitas berkelanjutan**
Arah dan Implementasi Kebijakan	:	Pemerintah Provinsi NTB terus mendorong terjadinya transformasi pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Pemantapan upaya transformasi menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan hasil pembangunan sebelumnya sekaligus menjawab tantangan baru. Fokus diarahkan pada sektor-sektor strategis yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pemantapan transformasi pengentasan kemiskinan difokuskan pada perbaikan struktural sistem penanggulangan kemiskinan, melalui peningkatan akurasi sasaran, penguatan pemberdayaan masyarakat, dan intervensi lintas sektor. Pendekatan diarahkan dari pola bantuan menjadi kemandirian ekonomi. Ketahanan pengan terus menjadi salah satu agenda utama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial daerah. Kebijakan diarahkan pada penguatan sistem pangan yang tangguh, efisien dan berbasis sumber daya lokal. Arah kebijakan dala penguatan potensi agromaritim menitikberatkan pada penguatan rantai nilai, hilirisasi produk dan integrasi kawasan berbasis komoditas unggulan darat dan laut. Pariwisata NTB diarahkan pada pengembangan destinasi berkualitas tinggi dengan menjaga keberlanjutan lingkungan dan kearifan lokal. Kebijakan ini menjadi jembatan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian budaya serta alam.

Transformasi pembangun Provinsi NTB diarahkan untuk menjawab kebutuhan mendesak masyarakat sekaligus menciptakan struktur ekonomi dan sosial yang lebih tangguh, mandiri, dan berdaya saing. Seluruh kebijakan disusun dengan pendekatan kolaboratif, berbasis data, dan terfokus pada pencapaian target pembangunan jangka menengah.

Tahun 2029	**:**	**Perwujudan fondasi transformasi dengan tingkat kemiskinan yang rendah, kemandirian pangan, terbangunnya ekosistem industri agromaritim dan sektor pariwisata sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif menjadi landasan yang kuat memasuki fase kedua pembangunan jangka panjang daerah**
Arah dan Implementasi Kebijakan	:	Tahun 2025-2029 merupakan periode strategis dalam menyiapkan fondasi transformasi pembangunan yang kokoh berkelanjutan dan menjadi fase penting untuk mengakselerasi capaian pembangunan sebagai landasan kuat memasuki fase kedua Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Fokus utama diarahkan pada pencapaian kondisi ideal pembangunan dasar, yaitu: (a) tingkat kemiskinan yang rendah terkendali; (b) kemandirian pangan daerah; (c) terbangunnya ekosistem

industri agromaritim yang terintegrasi dan bernilai tambah; serta (d) sektor pariwisata sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

RPJMD 2025-2029 memegang peranan krusial sebagai jembatan transformatif menuju fase pembangunan jangka panjang yang lebih maju, mandiri, dan berkelanjutan. Dengan tingkat kemiskinan yang rendah, kemandirian pangan yang kuat, serta sektor agromaritim dan pariwisata yang tangguh dan inklusif, Provinsi NTB memantapkan langkah untuk memasuki fase kedua pembangunan jangka panjang daerah dengan fondasi yang kokoh dan berdaya tahan tinggi terhadap tantangan masa depan.
Melalui pendekatan kolaboratif, berbasis data, dan berorientasi hasil, NTB meneguhkan komitmennya menuju daerah yang makmur mendunia.

3.2.1.5 Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan kewilayahan yang mencakup sepuluh Kab/Kota di Provinsi NTB diarahkan untuk dapat berjalan selaras menuju pada tercapainya sasaran pembangunan daerah Provinsi NTB yang merupakan hasil agregat dari capaian pembangunan sepuluh Kab/Kota. Oleh karena itu setiap Kab/Kota juga perlu menetapkan target pembangunan dengan indikator makro pada setiap Kab/Kota sebagai berikut :

Tabel 3. 4 Sasaran dan Indikator Pembangunan Kewilayahan Kab/Kota

NO	INDIKATOR MAKRO	Satuan	TAHUN	NTB dalam RPJMN	NTB dalam RPJMD	KOTA BIMA	BIMA	DOMPU	SUMBAWA	SUMBAWA BARAT	LOMBOK TIMUR	LOMBOK TENGAH	LOMBOK BARAT	LOMBOK UTARA	KOTA MATARAM	Keterangan
1	PDRB Per Kapita	Rp. Juta	2025	35,2	35,80	35,14 - 35,42	32.75	39.22	36,418	198.65	17.911,815	21,99	26.34	23,874	33.41	5 Sasaran Visi
			2029	53,9	53,90	35,14 - 35,42	72.32	55.36	55,525	215.94	20.851,000	30.01	32.26	27,874	39	
2	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)/Kontribusi PDRB Sub Sektor Perikanan	%	2025		54,53	1,50 - 1,64	12.74	10.07	1.29	4.96	7.31	2.91	3.49	9.72	0.94	5 Sasaran Visi
			2029		85,72	2,80 - 3,52	17.74	13.78	1.22	6.09	7.96	2.92	3.54	10.06	0.96	
3	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	%	2025	0,8	4,21	3,25	3.06-3.08	2.06	6.28	0.31	6.91	4.86	6.94	1.5	10.2	5 Sasaran Visi
			2029	0,9	7,00	4,33-4,60	4.73-4.75	1.88	17.17	0.43	6.91	5.56	7.01	1.92	11.3	
4	Tingkat Kemiskinan	%	2025	11,68-12,18	11,68 - 12,18	7,31 - 7,82	12,18 - 12,08	10.98	11,83	10,32	13,18–13,75	11,66	11,53 - 12,02	23.16	7,70	IUP 8
			2029	8,12-9,12	7,17-8,17	5,89 - 6,82	9,02 - 8,92	9.00	8,32	8,73	9,97–10,53	10,17	8,72 - 10,26	20.06	6,50	
5	Rasio Gini	Indeks	2025	0,369-0,373	0,369-0,373	0,405 - 0,401	0.344	0.290	0,337	0,347	0.29	0,341	0.34	0.28	0,381	5 Sasaran Visi
			2029	0,324-0,328	0,324-0,328	0,393 - 0,381	0.314	0.278	0,210	0,325	280	0,335	0.34	0.27	0,376	
6	Kontribusi PDRB Provinsi/Kontribusi PDRB Kab/kota Terhadap Provinsi	%	2025		0,80	3.02	9.47	5.8	9,44	18,01	14,61	16.27	10.87	3.21	14,29	5 Sasaran Visi
			2029		0,93	3.09	10.46	5.66	9,71	18,49	14.71	16.65	10.91	3.41	14,84	
7	Pertumbuhan Ekonomi	%	2025	8,4	6,00	5,26 - 5,34	5,63-6,05	4.2	4,08	5,5	4,60	6,05	5,00 - 7,22	5.2	4,67 – 5,30	5 Sasaran Visi
			2029	9,3	9,30	5,48 - 5,73	5,63-6,05	6.7	10,87	6,5	5.45	6.64	6,41 - 8,0	5.6	5,59 – 7,70	
8	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	2025		76,50	3.44	2.06	68.1	57	2.1	50	61.56	58.11	57	71.57	5 Sasaran Visi
			2029		81,20	3.73	2.55	72.28	61.6	2.43	57.1	67.76	83.26	61	71.9	
9	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	2025		3,55	3.13	3.24	3.58	3.76	3.37	3.26	3.72	3.95	2.53	3.42	5 Sasaran Visi
			2029		3,80	3.29	3.59	3.68	4.66	3.78	3.48	3.84	4.39	2.7	3.6	
10	Indeks Modal Manusia/Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	2025	0,56	0,56	78.15	71	73.5	73,09	76,17	71,48	71,49	73.5	69.23	81,96	5 Sasaran Visi
			2029	0,60	0,60	79.76	80.5	76	77,01	78.8	74,03	74.41	76.68	71.58	83,67	
11	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	2025	25,99	15.31	0.79	19.83	2.7	2,72	11,53	3,86	2.96	2.83	0.88	3,63	IUP 45
			2029	51,70	41.91	1.208	33.82	3.781	4,16	16,75	6,41	3.78	4.33	1.35	5,55	
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	2025	76,19	76,19	62.07	70.59	74.55	78,23	80,92	72,41	71,90	73.12	68.64	64,63	IUP 42
			2029	77,03	77,03	66.38	71.01	75.40	78,35	81,01	75.11	72,74	73.96	68.75	65,47	
13	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2025	2,19-2,79	2,19-2,79	2,79-3,56	2.04-1.99	2.67	2,41	3,05	1.92 – 2.45	2,48	2,44 - 3,11	1.4	4,68	5 Sasaran Visi / IUP 15a
			2029	1,81-2,59	1,81-2,59	2,61 - 3,49	1.95-1.90	55.36	1,59	2,85	1.50 – 1.85	2,22	2,25 - 3,03	1.32	3,73	

Sumber : Bappeda Provinsi NTB, 2025

Berdasarkan arahan RPJMN Tahun 2025-2029 sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 bahwa indikasi prioritas pembangunan nasional di Provinsi NTB mencakup rencana pembangunan kawasan pertumbuhan, rencana pembangunan kawasan komuditas unggulan, rencana pembangunan kawasan swasembada pangan air dan energi, rencana pembangunan kawasan afirmasi dan rencana pembangunan kawasan konservasi dan rawan bencana, seperti digambarkan dalam peta dibawah ini :

Gambar 3. 12 Lokasi Prioritas Pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029 di Provinsi NTB

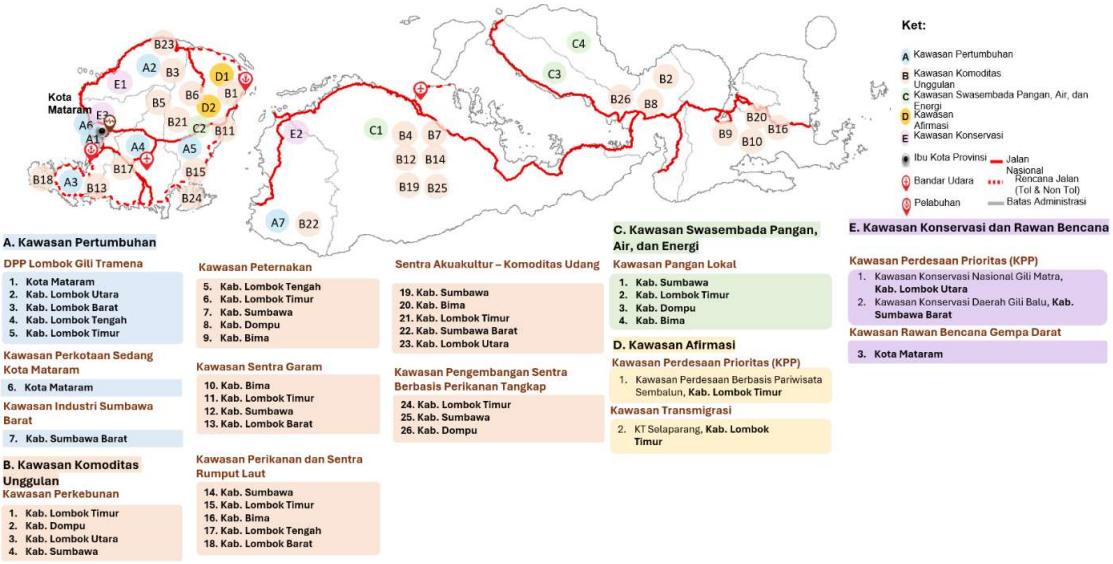

Sumber: Perpres 12/2025-RPJMN 2025-2029, Kementerian PPPN/Bappenas, 2025

Pembangunan kawasan pertumbuhan pada DPP lombok gili tramena yang mencakup Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dan kabupaten lombok timur diintegerasikan dengan pengembangan kawasan strategis provinsi (KSP) yaitu KSP Mataram Raya Gili Tramena DSK, yang meliputi Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Perairan Kawasan Kayangan, Perairan Kawasan Gili Indah, dan Perairan Kawasan Lembar serta KSP Kuta Mandalika DSK yang meliputi Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Perairan Kawasan Lembar, Perairan Kawasan Teluk Sepi, Perairan Kawasan Kute, Perairan Kawasan Teluk Ekas, dan Perairan Kawasan Samudra-Hindia Lombok. Selanjutnya KSP Kuta Mandalika DSK diintegerasikan dengan Kawasan Industri Sumbawa Barat DSK yang meliputi Kabupaten Sumbawa Barat, dan Perairan Kawasan Maluk.

Untuk pengembangan kawasan komunitas unggulan seperti kawasan perkebunan di Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Dompu, Kabupaten Lombok Utara, dan Kabupaten Sumbawa ; Kawasan Peternakan di Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima ; kawasan sentra garam di Kabupaten Bima, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Lombok Barat ; Kawasan Perikanan dan sentra rumput laut di Kabupaten Sumbawa, Kabupaten

Lombok Timur, Kabupaten Bima, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Barat ; Sentra akua kultur komuditas udang di Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Bima, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Lombok Utara ; Kawasan pengembangan sentra berbasis perikanan tangkap di Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu.

Kawasan perkebunan dan kawasan peternakan diintegerasikan dengan kawasan pertanian (772.669 ha) dan kawasan hutan produksi (442.773 ha) sesuai dengan pola ruang wilayah Provinsi NTB. Selanjutnya kawasan sentra garam diintegerasikan kedalam kawasan pergaraman (3.734 ha). Kawasan perikanan dan sentra rumput laut dengan kawasan akua kultur serta kawasan pengembangan senter berbasis perikanan tangkap diintegerasikan kedalam kawasan perikanan (2.388.501 ha).

Kawasan swasembada air dan energi terutama kawasan pangan lokal diintegerasikan dengan kawasan pertanian, kawasan hutan produksi dan kawasan perikanan. Adapun untuk kawasan afirmasi yang meliputi kawasan perdesaan prioritas (KPP) seperti kawasan perdesaan berbasis pariwisata sembalun di Kabupaten Lombok Timur dan kawasan transmigrasi selaparang di Kabupaten Lombok Timur diarahkan menjadi kawasan cepat tumbuh untuk mendukung pertumbuhan ekonomi pada kawasan perdesaan. Untuk mendukung pengembangan kawasan afirmasi ini dilakukan pengembangan Desa Berdaya Transformatif sebagai model desa mandiri yang bebas dari kemiskinan, memiliki ketahanan pangan dan dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya terutama sebagai desa wisata maju.

Adapun kawasan konservasi dan rawan bencana terutama kawasan konservasi gili matera Kabupaten Lombok Utara, kawasan konservasi gili balu Kabupaten Sumbawa Barat, dan kawasan rawan bencana gempa darat Kota Mataram diintegerasikan kedalam kawasan lindung yang fungsi utamanya untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Sesuai amanat Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi NTB Tahun 2024-2044, strategi dan arah kebijakan kewilayahan ditepatkan menjadi 2 yaitu Pulau Lombok sebagai pulau kota berkelanjutan & tangguh berbasis sistem satu pulau penataan *dan pemulihan satu pulau melalui pengaturan secara selektif bagi peruntukan terbangun dan memaksimalkan fungsi-fungsi konservasi kawasan lindung* dengan fokus pengembangan wilayah yaitu konektivitas wilayah untuk pemerataan konektivitas wilayah untuk pemerataan, pengurangan risiko bencana, pemulihan dan pelestarian kawasan lindung, pemanfaatan kegiatan budidaya di darat dan di laut secara efektif dan ramah lingkungan, koordinasi dan kerjasa antar wilayah dalam hal pembagian peran, pelibatan sektor-sektor informal yang sudah ada di dalam masyarakat dengan memperhatikan 4 hal utama yaitu revitalisasi sektor unggulan dan prioritas, akselerasi kawasan strategis, akselerasi pengembangan infrastruktur dan pemulihan, perlindungan kawasan lindung.

Selanjutnya, strategi dan arah kebijakan yang kedua yaitu Pulau Sumbawa sebagai Zona Ekonomi Berkelanjutan (Sustainable Economic Zone) yang berbasis kawasan atau zona. Kawasan SAMOTA dijadikan sebagai episentrum pembangunan Pulau Sumbawa yang didasarkan potensinya sebagai kawasan parisiwasata dan ekonomi maritim kelas dunia, lintasan jalur transnasional Banda Aceh-Kupang, posisi strategis antara Bali, Lombok, Pulau Komodo, dan industri Agrominapolitan. Pembangunan kewilayahan Pulau Sumbawa juga memperhatikan kawasan industri, akselerasi kontribusi Lapangan Usaha Non-Tambang untuk LPE yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan, serta pengembangan sektor-sektor ekonomi dan komoditas unggulan.

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Pulau Lombok

Pulau Lombok memiliki potensi sebagai pulau kota ekologi dan tangguh *(eco city & resilient island)* karena memiliki potensi alam yang kata dan kondisi geografis yang mendukung. Pembangunan mengarahkan Pulau Lombok sebagai pulau kota berkelanjutan & tangguh berbasis sistem satu pulau dengan penataan dan pemulihan satu pulau melalui pengaturan secara selektif bagi peruntukan terbangun dan memaksimalkan fungsi-fungsi konservasi kawasan lindung. Pelibatan sektor-sektor informal yang sudah ada di dalam masyarakat dengan memperhatikan 4 hal utama yaitu revitalisasi sektor unggulan dan prioritas, akselerasi kawasan strategis, akselerasi pengembangan infrastruktur dan pemulihan, perlindungan kawasan lindung.

Gambar 3. 13 Peta Pulau Lombok

Strategi kebijakan Pulau Lombok difokuskan pada pengelolaan sumber daya air yang lestari dalam sistem satu pulau, pemanfaatan sumber daya energi baru terbarukan, penanggulangan sampah dan limbah terpadu, manajemen pengelolaan transportasi berbasis aksebilitas/mobilitas satu pulau, kualitas sarana dan prasarana satu pulau yang tangguh bencana, serta manajemen penanggulan bencana. Adapun strategi dan arah kebijakan untuk setiap Kab/Kota di Pulau Lombok adalah sebagai berikut.

Kota Mataram

Pembangunan di Kota Mataram berfokus pada penanggulanan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem perkotaan, penguatan sektor ekonomi unggulan perdagangan-jasa, industri, pariwisata, dan perikanan, pengembangan infrastruktur layanan dasar, sanitasi, persampahan, perumahan, permukiman, ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH), penguatan kapasitas fiskal daerah untuk pendanaan pembangunan daerah, penguatan swasembada pangan (urban farming), ketersediaan air, dan energi berkelanjutan, serta sistem transportasi perkotaan berkelanjutan (kota ramah sepeda, angkutan umum, transit-oriented development). Dalam mendukung Kota Mataram sebagai sektor ekonomi unggulan perdagangan-jasa, industri, pariwisata, dan perikanan, pembangunan kewilayahan di Kota Mataram terdiri dari:

a. Pengembangan *linkage* sistem sektor perdagangan dan jasa, industri, pariwisata, serta perikanan yang terintegrasi
b. Perlindungan, pelestarian serta optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya alam serta sumber daya kelautan dan perikanan yang mendukung sektor perdagangan dan jasa, industri, pariwisata, serta perikanan
c. Penataan dan pengendalian kawasan yang berbasis pada aspek pengurangan risiko bencana
d. Penyelenggaraan kegiatan perdagangan dan jasa, industri, pariwisata berkelanjutan, serta perikanan lestari yang berwawasan lingkungan dan berbasis kerakyatan
e. Peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang mendukung kualitas dan keberlanjutan, sektor perdagangan dan jasa, industri, pariwisata, serta perikanan
f. Peningkatan produktifitas dan diversifikasi usaha yang berbasis potensi perdagangan dan jasa, industri, pariwisata, dan perikanan
g. Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha perdagangan dan jasa, industri, pariwisata, dan perikanan
h. Peningkatan peran masyarakat dan kelembagaan dalam mendukung dan menciptakan iklim berusaha di sektor perdagangan dan jasa, industri, pariwisata, serta perikanan

Untuk itu, kegiatan yang difokuskan di Kota Mataram di antaranya: pengelolaan sampah di Mataram berupa optimalisasi Landfill TPA Kebon Kongok, Kota Mataram sebagai kota berdaya saing tinggi, dan Kota Mataram sebagai “Kota yang SDGs Banget!”. Dalam pengelolaan sampah dengan optimalisasi landfill TPA Kebon Kongok, terdapat rencana perluasan landfill-2 zona 2B seluas 20 are dengan cut and fill dan pemasangan geomembran. Akan menambah kapasitas landfill sebanyak 24.840 ton, Tahun 2025 perluasan Landfill-2 Zona 2A seluas 20 are dengan cut and fill dan pemasangan geomembrane Tahun 2024, pembangunan Landfill Baru seluas 1,2 Ha Tahun 2022, dan perluasan Landfill-2 Zona 1 seluas 13 are dengan penambahan geomembrane. Sudah selesai dilaksanakan tanggal 3 Juli 2024. Sedangkan Kota Mataram sebagai kota berdaya saing tinggi, didasari pada Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota Mataram Tahun 2024

sangat tinggi (4,29), lebih tinggi dari Provinsi NTB (3,50) dan Nasional (3,43). Kota Mataram mendapat skor yang cukup tinggi pada Nilai Pilar 7, yaitu Pasar Produk yang mencapai 5,00. Pilar pasar produk mencerminkan keterbukaan pasar dalam memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh pelaku usaha untuk bersaing secara adil. Sebaliknya Kota Mataram perlu peningkatan untuk Pilar 5, yakni kesehatan yang hanya mencapai skor 3,97. Pilar kesehatan mencerminkan tingkat kualitas sumber daya manusia, yang diukur berdasarkan harapan lama hidup bayi dalam kondisi sehat. Untuk Kota Mataram "Kota Yang SDGs Banget!", diharapkan Kota Mataram menjadi solusi permasalahan urbanisasi dengan optimalisasi peran strategis kota dalam pembangunan berkelanjutan, kota untuk semua artinya kota harus direncanakan, dirancang, dibangun, dan dikelola oleh semua serta memanfaatkan sumber daya dari semua, serta kota yang mensejahterakan semua, termasuk masyarakat desa, perlindungan hutan, sungai, laut, air, dan lingkungan, untuk mendukung keberlanjutan kehidupan dan perwujudan komitmen Global SDGs 2030.

Dalam rangka mendukung arah pembangunan kewilayahan di Kota Mataram untuk Provinsi NTB, yang mana bentuk interverensi pemerintah daerah Provinsi NTB dalam RPJMN Tahun 2025-2029 sebagaimana yang dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3. 5 Indikasi Intervensi Pusat Terhadap arah kewilayanan Kota Mataram dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Agenda	*Highlight* Indikasi Intervensi Pusat	*Output*
I. Kawasan Pertumbuhan		
Kawasan DPP Lombok-Gili Tramena (A1)	Peningkatan jalan nasional	Pembangunan jalan akses simpul transportasi
	Pengembangan atrakasi (alam, budaya dan buatan) termasuk berbasis ekologi	Sistem pengelolaan air limbah domestik skala kota
	Pengembangan keterampilan SDM dan layanan pariwisata	Fasilitasi dan pembinaan dalam pengembangan kapasitas SDM pariwisata, SDM pariwisata yang memperoleh pelatihan untuk pembekalan kerja, sertifikasi SDM bidang pariwisata
	Pemasaran Pariwisata	Publikasi promosi terpadu, konten promosi wisata minta khusus, jejaring promosi wisata minat khusus, promosi terpadu dan kerjasama dengan maskapai
	Pengembangan industri, usaha Masyarakat, dan investasi pariwisata	Fasilitasi akses pembiayaan pasar modal, penerapan pariwisata berkelanjutan di Destinasi Pariwisata, korodinasi implementasi *Blue, Green, Circular Economy* pada usaha pariwisata, penerapan pariwisata berkelanjutan di Destinasi Pariwisata

Agenda	*Highlight* Indikasi Intervensi Pusat	*Output*
	Fasilitasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	Pengendalian pembangunan dan pengelolaan KEK, peningkatan investasi kerja sama komunikasi dan sistem informasi di KEK, pelayanan investasi administrator KEK tipe A
	Pengurangan Emisi GRK Sektor Pengelolaan Sampah oleh Pemerintah Pusat	Bank Sampah Induk yang terbangun, fasilitas pengelolaan sampah spesifik, sistem pengelolaan persampahan skala kota, instalasi pengolahan air limbah, sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota
	Pemanfaatan secara berkelanjutan dan pengelolaan sampah laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Prasarana penanggulangan sampah di laut dan pesisir, bantuan pengembangan desa pesisir bersih, pemanfaatan keanekaragaman hayati dan laut dan ekosistemnya dengan memperhatikan daya dukung, fasilitas penanganan sampah di wilayah pesisir, fasilitasi pembangunan ekosistem ekonomi sirkular pengelolaan sampah
II. Kawasan Pertumbuhan: Pembangunan Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan Kota Mataram		
Kawasan Perkotaan Sedang	Pembangunan Kawasan Perkotaan Sedang	Penyusunan *masterplan* pengembangan dan penataan kawasan yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu untuk Kota Sedang
		Penguatan instrumen peringatan dini bencana, rumah susun hunian MBR/pekerja, pemugaran dan peremajaan pemukiman kumuh, bantuan PSU bidang perumahan, pembangunan dan peningkatan SPAM, SPALD-T skala regional / kota / permukiman / kawasan, pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi, sistem pengelolaan persampahan skala regional/kota/kawasan
	Penyediaan rumah murah bersanitasi baik	Rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk generasi milenial dan generasi Z
III. Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana		

Agenda	*Highlight* Indikasi Intervensi Pusat	*Output*
Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi	Peningkatan upaya pencegahan, mitigasi, dan resiliensi masyarakat terhadap bencana	Peta Kawasan Rawan Becana Gempa Bumi, Peralatan monitoring dampak akibat gempa bumi dengan peralatan intersitymeter dan accelerograph melalui Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project (IDRIP), Peralatan monitoring gempa bumi dan tsunami melalui IDRIP, Layanan informasi gempa bumi dan tsunami melalui Sekolah Lapang Gempa Bumi Wilayah Timur
	Retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan seismik	Layanan infrastruktur publik berketahanan seismik

Harapannya, Provinsi NTB dalam 5 tahun ke depan dengan arah pengembangan wilayah perkotaan yang mencakup Kota Mataram dan Kota Bima sebagai Pusat Kegiatan Nasional dan wilayah yang dapat mengakselerasi dan mendukung perkembangan penyelenggaraan MICE serta pengembangan kota yang mengarah pada Kota SDGs, Kota Mataram Bertransformasi menjadi kota yang semakin harum, semakin bersih, semakin berprestasi, semakin terkenal, terutama terkenal sebagai "Kota SDGs Banget" yang "harum" di seluruh dunia.

Kabupaten Lombok Barat

Kabupaten Lombok Barat sendiri terlibat dalam pembangunan wilayah berdasarkan kawasan strategis Provinsi NTB sesuai RTRW 2024-2044 juga merupakan lokasi prioritas yang tertuang dalam RPJMN 2024-2029 pada kawasan pertumbuhan untuk mendukung percepatan pembangunan dna peningkatan kualitas destinasi pariwisata khususnya wisata petualangan pada kawasan prioritas (DPP Lombok-Gili Tramena) dan kawasan komoditas unggulan perikanan dan rumput laut. Adapun bentuk intervensi Pemerintah Provinsi NTB pada pembangunan kewilayahan Lombok Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 6 Indikasi Intervensi Pusat Terhadap arah kewilayanan Lombok Barat dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Agenda	*Highlight* Indikasi Interverensi Pusat	*Output*
I. Kawasan Pertumbuhan		
Kawasan DPP Lombok-Gili Tramena (A1)	Peningkatan jalan nasional	Pembangunan jalan akses simpul transportasi
	Pengembangan atrakasi (alam,	Sistem pengelolaan air limbah domestik skala kota

Agenda	*Highlight* Indikasi Interverensi Pusat	*Output*
	budaya dan buatan) termasuk berbasis ekologi	
	Pengembangan keterampilan SDM dan layanan pariwisata	Fasilitasi dan pembinaan dalam pengembangan kapasitas SDM pariwisata, SDM pariwisata yang memperoleh pelatihan untuk pembekalan kerja, sertifikasi SDM bidang pariwisata
	Pemasaran Pariwisata	Publikasi promosi terpadu, konten promosi wisata minta khusus, jejaring promosi wisata minat khusus, promosi terpadu dan kerjasama dengan maskapai
	Pengembangan industri, usaha Masyarakat, dan investasi pariwisata	Fasilitasi akses pembiayaan pasar modal, penerapan pariwisata berkelanjutan di Destinasi Pariwisata, korodinasi implementasi *Blue, Green, Circular Economy* pada usaha pariwisata, penerapan pariwisata berkelanjutan di Destinasi Pariwisata
	Fasilitasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	Pengendalian pembangunan dan pengelolaan KEK, peningkatan investasi kerja sama komunikasi dan sistem informasi di KEK, pelayanan investasi administrator KEK tipe A
	Pengurangan Emisi GRK Sektor Pengelolaan Sampah oleh Pemerintah Pusat	Bank Sampah Induk yang terbangun, fasilitas pengelolaan sampah spesifik, sistem pengelolaan persampahan skala kota, instalasi pengolahan air limbah, sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota
	Pemanfaatan secara berkelanjutan dan pengelolaan sampah laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Prasarana penanggulangan sampah di laut dan pesisir, bantuan pengembangan desa pesisir bersih, pemanfaatan keanekaragaman hayati dan laut dan ekosistemnya dengan memperhatikan daya dukung, fasilitas penanganan sampah di wilayah pesisir, fasilitasi pembangunan ekosistem ekonomi sirkular pengelolaan sampah
II. Kawasan Komoditas Unggulan		
Kawasan Perikanan dan Sentra Rumput Laut	Hilirisasi peningkatan rantai nilai, promosi dan penguatan sumber daya manusia	Fasilitasi hiliriasi industri , penguatan kapasitas pembudidaya rumput laut, pengembangan pangan dan biostimulan berbasis rumput laut, dukungan pembiayaan, rekomendasi tata Kelola,

Agenda	*Highlight* Indikasi Interverensi Pusat	*Output*
		kewirausahaan pemuda, memperkuat koperasi rumput laut, pengembangan jaringan infrastruktur pengolahan di dekat sentra rumput laut
	Jaminan ketersediaan bahan baku industri rumput laut	Peningkatan kualitas bahan baku, kluster rumput laut berbasis kawasan yang dibangun masyarakat, pengembangan teknologi dan pembibitan
	Peningkatan kualitas dan ketersediaan bahan baku melalui peningkatan produktifitas budidaya	Bibit rumput laut kultur jaringan, sarana budidaya yg disalurkan ke masyarakat, infrastruktur kawasan budidaya rumput laut, dll
	Pengembangan industri dan hilirirasi rumput laut	Pengembangan hilirisasi industri pengolahan hasi laut dan perikanan
	Fasilitasi pembiayaan dan investasi serta penelitian	
	Pengembangan budidaya rumput laut spesies baru dan inovasi teknologi untuk diverisikfasi produk rumput laut	

Kabupaten Lombok Tengah

Kabupaten Lombok Tengah termasuk dalam lokasi prioritas pembangunan wilayah berdasarkan kawasan strategis provinsi NTB sesuai RTRW 2024-2044 yakni pada Kuta Mandalika dan sekitarnya yang menjadikannya kawasan pariwisata, perikanan, dan industri berbasis potensi sumber daya alam yang mendukung KEK Mandalika. Pengembangan kawasan ini bertujuan untuk mengembangkan dan peningkatan kualitas sektor-sektor yang terlibat seperti: sektor ekonomi unggulan, perdagangan dan jasa, industri, pariwisata, perikanan dan mina industri. Sehingga arah kebijakan pengembangan kawasan strategis provinsi provinsi Kuta Mandalika dan sekitarnya:

a. Pengembangan *linkage* sistem sektor Pariwisata, perikanan dan industri yang terintegrasi
b. Perlindungan, pelestarian, serta optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya alam serta sumber daya kelautan dan perikanan yang mendukung sektor pariwisata, perikanan, dan industri

c. Penataan dan pengendalian kawasan yang berbasis pada aspek pengurangan risiko bencana
d. Penyelenggaraan kegiatan pariwisata yang berkelanjutan, perikanan lestari yang berwawasan lingkungan, dan berbasis kerakyatan
e. Peningkatan prasaran, sarana, dan utilitas umum yang mendukung kualitas dan keberlanjutan sektor pariwisata, perikanan, dan industri
f. Peningkatan produktifitas dan diversifikasi usaha yang berbasis potensi pariwisata, perikanan, dan industri
g. Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha pariwisata, perikanan, dan industri
h. Peningkatan peran Masyarakat dan kelembagaan dalam mendukung dan menciptakan iklim berusaha di sektor pariwisata, perikanan dan industri

Bentuk intervensi pemerintah daerah dalam rangka mendukung arah pengembangan kewilayahan untuk provinsi NTB di Kabupaten Lombok Tengah dalam RPJMN Tahun 2024-2029 sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 7 Indikasi Intervensi Pusat Terhadap arah kewilayanan Lombok Tengah dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Agenda	***Highlight* Indikasi Interverensi Pusat**	***Output***
I. Kawasan Pertumbuhan:		
Kawasan DPP Lombok-Gili Tramena	Peningkatan jalan nasional	Pembangunan jalan akses simpul transportasi
	Pengembangan atrakasi (alam, budaya dan buatan)	Event MICE, Event daerah, Event nasional, jejaring destinasi pariwisata, Dok Ren Pariwisata terintegrasi, koordinasi perencanaan dan pengembangan Geopark (*bisa juga termasuk Cagar Biosfer*)
	Pembangunan Sarpras umum, fasilitas umum dan amenitas	Sistem pengelolaan air limbah domestic skala kota
	Pengembangan keterampilan SDM dan layanan pariwisata	Fasilitasi dan pembinaan dlm pengembangan kapasitas SDM, Sertifikasi SDM Pariwisata
	Pemasaran Pariwisata	Publikasi promosi terpadu, konten promosi wisata minta khusus, jejaring promosi wisata minat khusus, promosi terpadu dan kerjasama dengan maskapai
	Pengembangan industri, usaha Masyarakat dan investasi pariwisata	Fasilitasi akses pembiayaan pasar modal, penerapan pariwisata berkelanjutan, Implementasi Blue Green, Circular Ekonomi, penerapan pariwisata berkelanjutan

Agenda	*Highlight* Indikasi Interverensi Pusat	*Output*
	Fasilitasi KEK	Pengendalian Pembangunan dan pengelolaan KEK, peningkatan investasi Kerjasama komunikasi dan informasi
	Pengurangan Emisi GRK Sektor Pengelolaan Sampah	Bank Sampah Induk yang terbangun, fasilitas pengelolaan sampah spesifik, sistem kelola sampah skala kota, instalasi pengolahan air limbah dan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota
	Pemanfaatan dan pengelolaan sampah laut wilayah pesisir dan pulau-pulai kecil	Prasarana penanggulangan sampah di laut dan pesisir, bantuan pengembangan desa pesisir bersih. Fasilitas penanganan sampah di wilayah pesisir, fasilitasi pembangunan ekosistem ekonomi sirkular
II. Kawasan Komoditas Unggulan		
Kawasan Peternakan	Pengembangan Kawasan peternakan dan peningkatan kualitas pangan hewani	Benih ternak unggu, sarana pembibitan ternak, prasarana pembibitan ternak, ternak ruminansia perah dan potong, pakan olahan dan bahan pakan, sarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dan layanan kesehatan hewan
	Peningkatan kualitas dan kuantitas hasil peternakan serta pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak	Bantuan pakan, bibit dan benih ternak unggul, sertifikasi benih/bibit ternak, ternak ruminansia potong dan perah, alat dan mesin sub sektor peternakan, pembinaan dan pengawasan mutu, sarpras kesehatan hewan dan layanan optimalisasi reproduksi
Kawasan Perikanan dan Sentra Rumput Laut (Pengembangan sentra budidaya dan hilirisasi rumput laut	Hilirisasi peningkatan rantai nilai, promosi dan penguatan sumber daya manusia	Fasilitasi hiliriasi industri, penguatan kapasitas pembudidaya rumput laut, pengembangan pangan dan biostimulan berbasis rumput laut, dukungan pembiayaan, rekomendasi tata kelola, kewirausahaan pemuda, memperkuat koperasi rumput laut, pengembangan jaringan infrastruktur pengolahan di dekat sentra rumput laut
	Jaminan ketersediaan bahan baku industri rumput laut	Peningkatan kualitas bahan baku, kluster rumput lau berbasis Kawasan yang dibangun masyarakat, pengembangan teknologi dan pembibitan
	Peningkatan kualitas dan ketersediaan bahan baku melalui peningkatan produktifitas budidaya	Bibit rumput laut kultur jaringan, sarana budidaya yang disalurkan ke masyarakat, infrastruktur Kawasan budidaya rumput laut, dll

Agenda	*Highlight* Indikasi Interverensi Pusat	*Output*
	Pengembangan industri dan hilirirasi rumput laut	Pengembangan hilirisasi industri pengolahan hasi laut dan perikanan
	Fasilitasi pembiayaan dan investasi serta penelitian	
	Pengembangan budidaya rumput laut spesies baru dan inovasi teknologi untuk diverisikfasi produk rumput laut	

Kabupaten Lombok Utara

Dalam RPJMN Tahun 2024-2029, Kabupaten Lombok Utara menjadi lokasi prioritas dalam arah pembangunan kewilayahan untuk beberapa kawasan di antaranya: kawasan pertumbuhan untuk kawasan DPP Lombok-Gili Tramena sebagai percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas destinasi pariwisata, kawasan komoditas unggulan yang terdiri dari kawasan perkebunan, kawasan sentra garam, dan kawasan sentra dan produksi berbasis komoditas udang, serta kawasan konservasi yakni Kawasan Konservasi Nasional Gili Matra. Untuk mendukung pembangunan kewilayahan di Lombok Utara, bentuk intervensi Pemerintah Provinsi NTB sesuai dengan RPJMN dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 8 Indikasi Intervensi Pusat Terhadap arah kewilayanan Lombok Utara dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Agenda	*Highlight* Indikasi Interverensi Pusat	*Output*
I. Kawasan Pertumbuhan		
Kawasan DPP Lombok-Gili Tramena (A1)	Peningkatan jalan nasional	Pembangunan jalan akses simpul transportasi
	Pengembangan atrakasi (alam, budaya dan buatan) termasuk berbasis ekologi	Sistem pengelolaan air limbah domestik skala kota
	Pengembangan keterampilan SDM dan layanan pariwisata	Fasilitasi dan pembinaan dalam pengembangan kapasitas SDM pariwisata, SDM pariwisata yang memperoleh pelatihan untuk pembekalan kerja, sertifikasi SDM bidang pariwisata
	Pemasaran Pariwisata	Publikasi promosi terpadu, konten promosi wisata minta khusus, jejaring promosi wisata

Agenda	*Highlight* Indikasi Interverensi Pusat	*Output*
		minat khusus, promosi terpadu dan kerjasama dengan maskapai
	Pengembangan industri, usaha Masyarakat, dan investasi pariwisata	Fasilitasi akses pembiayaan pasar modal, penerapan pariwisata berkelanjutan di Destinasi Pariwisata, korodinasi implementasi *Blue, Green, Circular Economy* pada usaha pariwisata, penerapan pariwisata berkelanjutan di destinasi pariwisata
	Fasilitasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	Pengendalian pembangunan dan pengelolaan KEK, peningkatan investasi kerja sama komunikasi dan sistem informasi di KEK, pelayanan investasi administrator KEK tipe A
	Pengurangan Emisi GRK Sektor Pengelolaan Sampah oleh Pemerintah Pusat	Bank Sampah Induk yang terbangun, fasilitas pengelolaan sampah spesifik, sistem pengelolaan persampahan skala kota, instalasi pengolahan air limbah, sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota
	Pemanfaatan secara berkelanjutan dan pengelolaan sampah laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Prasarana penanggulangan sampah di laut dan pesisir, bantuan pengembangan desa pesisir bersih, pemanfaatan keanekaragaman hayati dan laut dan ekosistemnya dengan memperhatikan daya dukung, fasilitas penanganan sampah di wilayah pesisir, fasilitasi pembangunan ekosistem ekonomi sirkular pengelolaan sampah
II. Kawasan Komoditas Unggulan		
Kawasan Perkebunan	Peningkatan produksi dan produktivitas perkebunan	Kawasan Kelapa di Kabupaten Lombok Utara, sarana dan prasarana pasca panen, sarana dan prasarana pengolahan, dan produksi benih tanaman perkebunan
	Peningkatan daya saing produk Perkebunan	Pengembangan industri pengolahan perkebunan produk hilir, neraca komoditas Perkebunan, pendampingan usaha mikro, peningkatan peluang investasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi
	Hilirisasi komoditas unggulan dan peningkatan ekspor	Kerjasama perdagangan dalam forum internasional, kebun sumber benih, penanganan organisme pengganggu tanaman, sarana dan prasarana pengolahan dan pascapanen, sertifikasi produk

Agenda	*Highlight* Indikasi Interverensi Pusat	*Output*
	Implementasi pertanian rendah karbon	Desa Pertanian Organik berbasis komoditas perkebunan
	Peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif	Fasilitasi hilirisasi investasi, sertifikasi produk mutu pestisida dan pupuk
Kawasan Sentra Garam	Pengembangan garam industri terintegrasi	Korporasi petambak garam, verifikasi penyaluran dan distribusi garam industri ke industri, fasilitasi pendampaingan pelaku usaha komoditas siap edar, peningkatan kualitas garam sesuai standar industri, bantuan sarana pengembangan isaha petambak garam (korporasi), dan pendampingan industri pengolahan garam dalam negeri dalam pemenuhan spesifikasi industri aneka pangan, farmasi, dan kosmetik
	Penguatan sarana dan prasarana industri garam	Lahan garam yang difasilitasi dan sarana niaga garam rakyat yang diserahkan ke masyarakat/pemda
	Peningkatan produktivitas garam rakyat	Pengadaan sarana dan prasarana produksi garam, pengembangan korporasi petambak garam
Kawasan Sentra Produksi Berbasis Komoditas Udang	Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat	Benih udang, klaster kawasan revitalisasi tambak udang, sarana pengolahan hasil komoditas udang, sarana penyimpanan produk kawasan prioritas, dan sarana distribusi produk kawasan prioritas
	Pengembangan akuakultur komoditas udang	Breeding program induk unggul, penataan jaringan irigasi dan revitalisasi lahan tambah udang dengan prioritas tambak tradisional plus, pengerukan muara Sungai yang mengalami sedimentasi, penyederhanaan perizinan lintas sektor, dan peningkatan mutu produk, serta perluasan pasar ekspor
III. Kawasan Konservasi		
Kawasan Konservasi Nasional Gili Matra, Kabupaten Lombok Utara	Pengembangan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (KKPWP3K) di KKN Gili Matra	Peningkatan sarana pengelolaan kawasan dan monitoring ekosistem, peningkatan kapasitas pemangku kepentingan pengelolaan kawasan, pemanfaatan data dalam pengelolaan kawasan, dan peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan

Kabupaten Lombok Timur

Strategi dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan di Kabupaten Lombok Timur didasari dari Kabupaten Lombok Timur sebagai lokasi prioritas dalam arah pembangunan kewilayahan sesuai dengan RPJMN Tahun 2024-2029. untuk beberapa kawasan di antaranya: kawasan pertumbuhan untuk kawasan DPP Lombok-Gili Tramena sebagai percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas destinasi pariwisata, kawasan komoditas unggulan yang terdiri dari kawasan perkebunan, kawasan peternakan, kawasan sentra garam, kawasan perikanan dan rumput laut, kawasan sentra dan produksi berbasis komoditas udang, dan kawasan sentra berbasis perikanan tangkap. Tidak hanya itu, Kabupaten Lombok Timur juga menjadi lokasi prioritas kawasan perdesaan berbasis pariwisata yakni di Desa Sembalun serta kawasan transmigrasi selaparang. Untuk mendukung pembangunan kewilayahan di Lombok Timur, bentuk intervensi Pemerintah Provinsi NTB sesuai dengan RPJMN dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 9 Indikasi Intervensi Pusat Terhadap arah kewilayanan Lombok Timur dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Agenda	***Highlight* Indikasi Interverensi Pusat**	***Output***
I. Kawasan Pertumbuhan		
Kawasan DPP Lombok-Gili Tramena (A1)	Peningkatan jalan nasional	Pembangunan jalan akses simpul transportasi
	Pengembangan atrakasi (alam, budaya dan buatan) termasuk berbasis ekologi	Sistem pengelolaan air limbah domestik skala kota
	Pengembangan keterampilan SDM dan layanan pariwisata	Fasilitasi dan pembinaan dalam pengembangan kapasitas SDM pariwisata, SDM pariwisata yang memperoleh pelatihan untuk pembekalan kerja, sertifikasi SDM bidang pariwisata
	Pemasaran Pariwisata	Publikasi promosi terpadu, konten promosi wisata minta khusus, jejaring promosi wisata minat khusus, promosi terpadu dan kerjasama dengan maskapai
	Pengembangan industri, usaha Masyarakat, dan investasi pariwisata	Fasilitasi akses pembiayaan pasar modal, penerapan pariwisata berkelanjutan di Destinasi Pariwisata, korodinasi implementasi *Blue, Green, Circular Economy* pada usaha pariwisata, penerapan pariwisata berkelanjutan di Destinasi Pariwisata
	Fasilitasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	Pengendalian pembangunan dan pengelolaan KEK, peningkatan investasi

Agenda	*Highlight* Indikasi Interverensi Pusat	*Output*
		kerja sama komunikasi dan sistem informasi di KEK, pelayanan investasi administrator KEK tipe A
	Pengurangan Emisi GRK Sektor Pengelolaan Sampah oleh Pemerintah Pusat	Bank Sampah Induk yang terbangun, fasilitas pengelolaan sampah spesifik, sistem pengelolaan persampahan skala kota, instalasi pengolahan air limbah, sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota
	Pemanfaatan secara berkelanjutan dan pengelolaan sampah laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Prasarana penanggulangan sampah di laut dan pesisir, bantuan pengembangan desa pesisir bersih, pemanfaatan keanekaragaman hayati dan laut dan ekosistemnya dengan memperhatikan daya dukung, fasilitas penanganan sampah di wilayah pesisir, fasilitasi pembangunan ekosistem ekonomi sirkular pengelolaan sampah
II. Kawasan Komoditas Unggulan		
Kawasan Perkebunan	Peningkatan produksi dan produktivitas perkebunan	Kawasan Tembakau di Kabupaten Lombok Timur, sarana dan prasarana pasca panen, sarana dan prasarana pengolahan, dan produksi benih tanaman perkebunan
	Peningkatan daya saing produk Perkebunan	Pengembangan industri pengolahan perkebunan produk hilir, neraca komoditas Perkebunan, pendampingan usaha mikro, peningkatan peluang investasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi
	Hilirisasi komoditas unggulan dan peningkatan ekspor	Kerjasama perdagangan dalam fourm internasional, kebun sumber benih, penanganan organisme pengganggu tanaman, sarana dan prasarana pengolahan dan pascapanen, sertifikasi produk
	Implementasi pertanian rendah karbon	Desa Pertanian Organik berbasis komoditas perkebunan
	Peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif	Fasilitasi hilirisasi investasi, sertifikasi produk mutu pestisida dan pupuk
Kawasan Peternakan	Pengembangan Kawasan peternakan dan peningkatan	Benih ternak unggu, sarana pembibitan ternak, prasarana pembibitan ternak, ternak ruminansia perah dan potong,

Agenda	*Highlight* Indikasi Interverensi Pusat	*Output*
	kualitas pangan hewani	pakan olahan dan bahan pakan, sarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dan layanan Kesehatan hewan
	Peningkatan kualitas dan kuantitas hasil peternakan serta pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak	Bantuan pakan, bibit dan benih ternak unggul, sertifikasi benih/bibit ternak, ternak ruminansia potong dan perah, alat dan mesin sub sektor peternakan, pembinaan dan pengawasan mutu, sarpras Kesehatan hewan dan layanan optimalisasi reproduksi
Kawasan Sentra Garam	Pengembangan garam industri terintegrasi	Korporasi petambak garam, verifikasi penyaluran dan distribusi garam industri ke industri, fasilitasi pendampaingan pelaku usaha komoditas siap edar, peningkatan kualitas garam sesuai standar industri, bantuan sarana pengembangan isaha petambak garam (korporasi), dan pendampingan industri pengolahan garam dalam negeri dalam pemenuhan spesifikasi industri aneka pangan, farmasi, dan kosmetik
	Penguatan sarana dan prasarana industri garam	Lahan garam yang difasilitasi dan sarana niaga garam rakyat yang diserahkan ke masyarakat/pemda
	Peningkatan produktivitas garam rakyat	Pengadaan sarana dan prasarana produksi garam, pengembangan korporasi petambak garam
Kawasan Perikanan dan Sentra Rumput Laut	Peningkatan kualitas dan ketersediaan bahan baku melalui peningkatan produktifitas budidaya	Bibit rumput laut kultur jaringan, sarana budidaya yg disalurkan ke Masyarakat, infrastruktur Kawasan budidaya rumput laut, dll
	Pengembangan industri dan hilirirasi rumput laut	Pengembangan hilirisasi industri pengolahan hasi laut dan perikanan
	Fasilitasi pembiayaan dan investasi serta penelitian	
	Pengembangan budidaya rumput laut spesies baru dan inovasi teknologi	

Agenda	*Highlight* Indikasi Interverensi Pusat	*Output*
	untuk diverisikfasi produk rumput laut	
Kawasan Sentra Produksi Berbasis Komoditas Udang	Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat	Benih udang, klaster kawasan revitalisasi tambak udang, sarana pengolahan hasil komoditas udang, sarana penyimpanan produk kawasan prioritas, dan sarana distribusi produk kawasan prioritas
	Pengembangan akuakultur komoditas udang	Breeding program induk unggul, penataan jaringan irigasi dan revitalisasi lahan tambah udang dengan prioritas tambak tradisional plus, pengerukan muara Sungai yang mengalami sedimentasi, penyederhanaan perizinan lintas sektor, dan peningkatan mutu produk, serta perluasan pasar ekspor
Kawasan Sentra Berbasis Perikanan Tangkap	Pengembangan kelembagaan dan sarana prasarana produksi perikanan tangkap/serta kampung/sentra nelayan	Identifikasi potensi sosial budaya dan kelembagaan setiap lokasi untuk pengembangan sesuai karakter lokal, mendorong ownership nelayan pada aset dan Lembaga yang telah dibentuk, fasilitasi penguatan kelembagaan kelompok nelayan, penguatan pendanaan, integrasi program Kementerian/Lembaga sebagai percontohan dan potensi replikasi, kampung nelayan yang ditingkatkan fasilitasnya, alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang tersalurkan
	Pengembangan industri pengolahan ikan	Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI), sarana pengolahan hasil Kawasan Prioritas, sarana penyimpanan produk Kawasan Prioritas, dan sarana distribusi logistik produk Kawasan Prioritas
III. Kawasan Swasembada Pangan, Air, Energi (Penguatan kemandirian daerah melalui pengembangan pangan lokal Lombok Timur berbasis pertanian, perikanan, Perkebunan, dan peternakan)		
Kawasan Pangan Lokal	Penguatan pascapanen lokal	Sarana pengolahan hasil tanaman pangan dan pascapanen tanaman pangan, sertifikat produk tanaman pangan
	Sertifikasi dan peredaran benih nabati	Sertifikasi benih padi dan jagung, area penyaluran benih padi dan jagung

Agenda	*Highlight* Indikasi Interverensi Pusat	*Output*
	Pengembangan pangan lokal dan nabati	Optimasi/pengembangan lahan pertanian produktif, pembangunan jalan pertanian, pengembangan/rehabilitasi jaringan irigasi pertanian, pengembangan kawasan padi dan jagung, peningkatan kemandirian usaha kelompok tani hutan (KTH)
	Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikana budidaya dan revitalisasi tambak rakyat	Benih udang, klaster kawasan revitalisasi tambak udang, sarana pengolahan hasi Kawasan Prioritas, sarana penyimpanan produk Kawasan Prioritas, dan sarana distribusi logistik produk Kawasan Prioritas
	Pengembangan pangan hewani	Benih dan bibit ternak unggul, ternak ruminansia potong, sarana dan prasarana perbibitan ternak, sarana pascapanen/pengolahan/pemasaran hasil peternakan, layanan kesehatan hewan
	Penguatan pengolahan dan pemasarana produk ternak	Sarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, prasarana pengolahan dan pamsaran hasil peternakan, unit usaha yang dibina sertifikasi NKV
	Pembangunan industri pakan ternak (bahan baku jagung dan sorgum)	Jumlah produsen (individu) pakan/bahan pakan yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan, penjaminan mutu dan keamanan pakan, jumlah sarana pakan/bahan pakan
	Pengembangan koperasi sektor produksi	Peningkatan peran dan kapasitas kelembagaan koperasi, dan pengembangan usaha koperasi
IV. Kawasan Perdesaan Berbasis Pariwisata Sembalun		
Kawasan Perdesaan Prioritas berbasis Pariwisata Sembalun	Peningkatan produktivitas perdesaan, dengan	Fasilitasi pengembangan kewirausahaan dan promosi produk unggulan, pengembangan obyek wisata desa dan perdesaan, fasilitasi penguatan tata kelola destinasi di desa wisata
	Pengembangan fasilitas pendukung perdesaan	Sarana prasarana perdagangan, pelayanan dasar, konektivitas transportasi desa dan perdesaan yang dibangun/dikembangkan
		Penyediaan layanan dasar skala desa dan perdesaan (kesehatan, pendidikan, air minum, dan sanitasi)

Agenda	*Highlight* Indikasi Interverensi Pusat	*Output*
		Peningkatan aksesibilitas desa (jalan, internet, dan telekomunikasi
		Pengembangan dan diversifikasi ekonomi lokal
		Pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi lokal (pariwisata, pertanian, dan lainnya)
		Peningkatan kapasitas tata kelola desa untuk mewujudkan transparansi dan digitalisasi desa
V. Kawasan Transmigrasi		
Kawasan Transmigrasi Lombok Timur	Pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik	Pembangunan dan pengembangan jalan non-status, jembatan, sistem drainase, dan sarana permukiman
	Pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi	Bantuan sarana produksi pertanian
	Redistribusi aset (tanah) transmigrasi	Fasilitasi pengurusan sertifikat hak milik atas tanah transmigrasi
	Penataan persebaran penduduk dan penyediaan tenaga terampil	Perpindahan dan penempatan transmigran
		Perluasan Jaringan Telekomunikasi Dan Akses Internet Cepat
		Pengembangan SDM TIK Dan Digitalisasi Masyarakat
		Perluasan Layanan Penyiaran Digital

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Pulau Sumbawa

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Pulau Sumbawa difokuskan untuk menjadikan wilayah Pulau Sumbawa sebagai zona ekonomi berkelanjutan (*sustainable economic zone*) yang berbasis kawasan/zona. Strategi pembangunan Pulau Sumbawa diarahkan untuk meningkatkan infrastruktur pendukung investasi hijau pada sektor pertanian, pertambangan dan energi, industri, dan transportasi, meningkatkan kuantitas dan kualitas sektor hijau strategis pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, pertambangan dan energi, serta industri, mengembangkan industrialisasi ramah lingkungan, mengembangkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang tangguh bencana, meningkatkan manajemen penanggulangan bencana.

Gambar 3. 14 Peta Pulau Sumbawa

Kawasan SAMOTA dijadikan sebagai episentrum pembangunan Pulau Sumbawa. Selama tahun 2015-2024, progres pengembangan infrastruktur Kawasan Strategi SAMOTA oleh Provinsi NTB di antaranya: pengembangan Learning Center Hiu Paus and Speed Boat oleh DKP NTB, Rancangan dan DED Lawang Samota oleh Dinas PUPR NTB, FS Pelabuhan Ai' Bari/Lua' Air Sumbawa oleh Dishub NTB, dan Masterplan Kawasan Samota oleh Bappeda NTB. Untuk pembangunan Kawasan Strategis SAMOTA, agenda pengembangan infrastruktur Kawasan Strategis SAMOTA tahun 2025-2029 oleh Provinsi NTB di antaranya: Pembangunan konstruksi Pelabuhan Ai' Bari, pembangunan fasilitas darat untuk Pelabuhan Ai' Bari, dan kelembagaan/tata kelola pelabuhan (penyeberangan lintas kabupaten).

Harapannya pengembangan Kawasan SAMOTA menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) SAMOTA dapat mendukung penguatan ekosistem pengembangan komoditas unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, sentra garam dan rumput laut, perikanan dan kelautan penguatan swasembada pangan, air, dan energi berkelanjutan pengembangan pariwisata alam, budaya dan minat khusus penguatan kapasitas fiskal daerah untuk pendanaan dan pembangunan daerah.

Kabupaten Bima

Pembangunan wilayah berdasarkan kawasan strategis Provinsi NTB Sesuai RTRW 2024-2044, Kabupaten Bima termasuk lokasi prioritas dalam beberapa Kawasan Strategis Provinsi NTB. Yang pertama pada Kawasan Teluk Saleh-Moyo-Tambora (SAMOTA) sebagai Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) SAMOTA yang berbasis sektor perikanan, pariwisata, pertanian, peternakan, dan industri (minaindustri, agroindustri, dan energi). Kemudian pada Ekosistem Gunung Tambora sebagai kawasan geoedukasi, *geo-heritage*, dan geowisata yang berbasis keragaman geologi (*geodiversity*), keragaman hayati (*biodiversity*), dan keragaman budaya (*cultural diversity*). Selanjutnya di Teluk Bima, dijadikan kawasan pariwisata, perikanan, industri, serta perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan dan berbasis kemasyarakatan. Di Wawaroda Sape, terdapat kawasan pertumbuhan baru di wilayah timur berbasis sektor perikanan, pariwisata, dan

industri. Lalu pada Ekosistem Hutan Parado, terdapat kawasan penyangga dan perlindungan tata air. Untuk mendukung pembangunan kewilayahan di Kabupaten Bima, bentuk intervensi Pemerintah Provinsi NTB sesuai dengan RPJMN dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 10 Indikasi Intervensi Pusat Terhadap arah kewilayanan Kabupaten Bima dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Agenda	*Highlight* Indikasi Interverensi Pusat	*Output*
I. Kawasan Komoditas Unggulan		
Kawasan Peternakan	Pengembangan Kawasan peternakan dan peningkatan kualitas pangan hewani	Benih ternak unggu, sarana pembibitan ternak, prasarana pembibitan ternak, ternak ruminansia perah dan potong, pakan olahan dan bahan pakan, sarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dan layanan Kesehatan hewan
	Peningkatan kualitas dan kuantitas hasil peternakan serta pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak	Bantuan pakan, bibit dan benih ternak unggul, sertifikasi benih/bibit ternak, ternak ruminansia potong dan perah, alat dan mesin sub sektor peternakan, pembinaan dan pengawasan mutu, sarpras Kesehatan hewan dan layanan optimalisasi reproduksi
Kawasan Sentra Garam	Pengembangan garam industri terintegrasi	Korporasi petambak garam, verifikasi penyaluran dan distribusi garam industri ke industri, fasilitasi pendampaingan pelaku usaha komoditas siap edar, peningkatan kualitas garam sesuai standar industri, bantuan sarana pengembangan isaha petambak garam (korporasi), dan pendampingan industri pengolahan garam dalam negeri dalam pemenuhan spesifikasi industri aneka pangan, farmasi, dan kosmetik
	Penguatan sarana dan prasarana industri garam	Lahan garam yang difasilitasi dan sarana niaga garam rakyat yang diserahkan ke masyarakat/pemda
	Peningkatan produktivitas garam rakyat	Pengadaan sarana dan prasarana produksi garam, pengembangan korporasi petambak garam
Kawasan Perikanan dan	Peningkatan kualitas dan ketersediaan bahan baku melalui	Bibit rumput laut kultur jaringan, sarana budidaya yg disalurkan ke Masyarakat,

Agenda	*Highlight* Indikasi Interverensi Pusat	*Output*
Sentra Rumput Laut	peningkatan produktifitas budidaya	infrastruktur Kawasan budidaya rumput laut, dll
	Pengembangan industri dan hilirirasi rumput laut	Pengembangan hilirisasi industri pengolahan hasi laut dan perikanan
	Fasilitasi pembiayaan dan investasi serta penelitian	
	Pengembangan budidaya rumput laut spesies baru dan inovasi teknologi untuk diverisikfasi produk rumput laut	
Kawasan Sentra Produksi Berbasis Komoditas Udang	Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat	Benih udang, klaster kawasan revitalisasi tambak udang, sarana pengolahan hasil komoditas udang, sarana penyimpanan produk kawasan prioritas, dan sarana distribusi produk kawasan prioritas
	Pengembangan akuakultur komoditas udang	Breeding program induk unggul, penataan jaringan irigasi dan revitalisasi lahan tambah udang dengan prioritas tambak tradisional plus, pengerukan muara Sungai yang mengalami sedimentasi, penyederhanaan perizinan lintas sektor, dan peningkatan mutu produk, serta perluasan pasar ekspor
II. Kawasan Swasembada Pangan, Air, Energi (Penguatan kemandirian daerah melalui pengembangan pangan lokal Kabupaten Bima berbasis pertanian, perikanan, Perkebunan, dan peternakan)		
Kawasan Pangan Lokal	Penguatan pascapanen lokal	Sarana pengolahan hasil tanaman pangan dan pascapanen tanaman pangan, sertifikat produk tanaman pangan
	Sertifikasi dan peredaran benih nabati	Sertifikasi benih padi dan jagung, area penyaluran benih padi dan jagung
	Pengembangan pangan lokal dan nabati	Optimasi/pengembangan lahan pertanian produktif, pembangunan jalan pertanian, pengembangan/rehabilitasi jaringan irigasi pertanian, pengembangan kawasan padi dan jagung, peningkatan kemandirian usaha kelompok tani hutan (KTH)

Agenda	*Highlight* Indikasi Interverensi Pusat	*Output*
	Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikana budidaya dan revitalisasi tambak rakyat	Benih udang, klaster kawasan revitalisasi tambak udang, sarana pengolahan hasi Kawasan Prioritas, sarana penyimpanan produk Kawasan Prioritas, dan sarana distribusi logistik produk Kawasan Prioritas
	Pengembangan pangan hewani	Benih dan bibit ternak unggul, ternak ruminansia potong, sarana dan prasarana perbibitan ternak, sarana pascapanen/pengolahan/pemasaran hasil peternakan, layanan kesehatan hewan
	Penguatan pengolahan dan pemasarana produk ternak	Sarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, prasarana pengolahan dan pamsaran hasil peternakan, unit usaha yang dibina sertifikasi NKV
	Pembangunan industri pakan ternak (bahan baku jagung dan sorgum)	Jumlah produsen (individu) pakan/bahan pakan yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan, penjaminan mutu dan keamanan pakan, jumlah sarana pakan/bahan pakan
	Pengembangan koperasi sektor produksi	Peningkatan peran dan kapasitas kelembagaan koperasi, dan pengembangan usaha koperasi

Kota Bima

Topografi Kota Bima didominasi oleh dataran rendah yang mencakup 43 persen wilayahnya dengan ketinggian antara 0 hingga 25 meter di atas permukaan laut. Selain itu, wilayahnya juga memiliki lanskap bervariasi mulai dari datar, landai, hingga lereng curam dengan kemiringan lebih dari 40%, menciptakan lingkungan yang dinamis untuk berbagai aktivitas kehidupan dan pertumbuhan ekonomi. Sungai-sungai yang mengalir dari utara dan timur, seperti Sungai Lampe, menjadi sumber irigasi vital dan suplai air bagi masyarakat. Sebagai kota yang berada di jalur cincin api, Kota Bima menghadapi potensi bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Tantangan ini mendorong pentingnya pengelolaan daerah yang matang dengan kesiapsiagaan mitigasi bencana yang efektif, termasuk pengembangan ruang evakuasi dan sistem tanggap darurat demi keselamatan warga dan aset kota.

Lingkungan hidup Kota Bima menjadi perhatian utama dengan keberadaan hutan seluas lebih dari 3.000 hektar yang berfungsi sebagai paru-paru kota dan bagian dari siklus ekologi penting. Lebih dari 1.900 hektar hutan tersebut dikelola melalui skema perhutanan sosial oleh 27 kelompok tani hutan di 12 desa yang berbatasan langsung dengan kawasan

hutan, menghadirkan peran masyarakat sebagai penjaga kelestarian sumber daya alam secara berkelanjutan. Namun, perubahan penggunaan lahan untuk lahan pertanian yang didominasi oleh tanaman jagung perlu dikelola secara hati-hati mengingat penanaman jagung sebagian masih menggunakan lahan yang tidak sesuai, yaitu pada kawasan dengan tingkat kelerangan curam. Perhatian perlu diberikan pada lahan jagung yang berada pada kawasan hutan dan kawasan tidak sesuai lainnya agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga dan risiko bencana diminimalisir dengan melakukan konservasi lahan serta sistem pertanian yang berwawasan lingkungan.

Kota Bima juga menonjol di bidang pendidikan dengan program pengembangan kota pendidikan yang bertujuan mencetak sumber daya manusia unggul dan kompetitif. Infrastruktur perkotaan terus berkembang guna mendukung aktivitas ekonomi, pariwisata, dan pelayanan publik, menjadikan Kota Bima sebagai pusat pertumbuhan dan inovasi di Pulau Sumbawa. Keunggulan utama Kota Bima ada pada sektor pariwisata bahari, khususnya kawasan Teluk Bima yang memikat dengan keindahan alam bawah laut dan pesisirnya. Penetapan kawasan ini sebagai kawasan strategis pariwisata daerah memperkuat pembangunan fasilitas dan layanan wisata yang ramah lingkungan serta melibatkan masyarakat lokal secara aktif, menciptakan sinergi antara pelestarian alam dan ekonomi pariwisata.

Selain itu, Kota Bima memiliki hubungan strategis dengan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Waworada Sape, KSPD Teluk Bima, dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Teluk Bima, yang bersama-sama mendorong pengembangan wilayah secara terpadu dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi erat antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha, harapannya, Provinsi NTB dalam 5 tahun ke depan dengan arah pengembangan wilayah perkotaan yang mencakup Kota Mataram dan Kota Bima sebagai Pusat Kegiatan Nasional dan wilayah yang dapat mengakselerasi dan mendukung perkembangan penyelenggaraan MICE serta menjaga keseimbangan antara kemajuan pembangunan dan pelestarian lingkungan di Kota Bima. Fokus pada program perhutanan sosial, mitigasi bencana, peningkatan kualitas pendidikan, serta penguatan infrastruktur menjadi fondasi utama pertumbuhan kota yang mandiri dan lestari.

Kabupaten Dompu

Kabupaten Dompu termasuk dalam lokasi prioritas pembangunan wilayah berdasarkan kawasan strategis provinsi NTB sesuai RTRW 2024-2044 yakni pada Teluk Saleh-Moyo-Tambora (SAMOTA) sebagai KSCT yang berbasis sektor perikanan, pariwisata, pertanian, peternakan, dan industri (minaindustri, agroindustri, dan energi), Ekosistem Gunung Tambora yang terdapat kawasan geoedukasi, geo-heritage, dan geowisata yang berbasis geodiversity, biodiversity, dan cultural diversity, Teluk Bima sebagai kawasan pariwisata, perikanan, industri, serta perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan dan berbasis kemasyarakatan, Ekosistem Hutan Paradoyang terdapat kawasan penyangga dan perlindungan tata air, dan Teluk Cempi Hu'u sebagai kawasan pertumbuhan baru

dengan sektor unggulan, pariwisata, perikanan, industri, pertambangan, dan energi. Adapun arah pengembangan Teluk Cempi Hu'u:

a. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam unggulan
b. Perlindungan, pelestarian, serta optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya alam
c. Industrialisasi hulu dan hilir sektor unggulan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna ramah lingkungan
d. Pengembangan dan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana
e. Penataan dan pengendalian Kawasan yang berbasis pada aspek pengurangan risiko bencana
f. Peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang mendukung kualitas dan keberlanjutan sektor pariwisata, perikanan, industri, pertambangan, dan energi
g. Peningkatan peran masyarakat dan kelembagaan dalam mendukung dan menciptakan iklim berusaha di sektor pariwisata, perikanan, dan industri

Kabupaten Dompu juga didukung untuk meningkatkan Indeks Daya Saing Daerah 2024 Kabupaten Dompu yang didasari pada Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Dompu Tahun 2024 mencapai 3,35, lebih rendah dari Provinsi NTB (3,50) dan Nasional (3,43). Dalam hal ini, Pilar yang perlu mendapat perhatian (Nilai <3) yaitu Pilar 2, Pilar 8, Pilar 9, pilar 12; di mana pilar 2 merupakan penilaian infrastruktur, mengukur keberadaan dan kualitas infrastruktur di daerah, dengan indikator infrastruktur transportasi, infrastruktur utilitas kelistrikan, dan infrastruktur air minum, pilar 8 yang menilai pasar tenaga kerja, menggambarkan fleksibilitas dan pemanfaatan tenaga kerja di daerah, pilar 9 yang merupakan sistem Keuangan, mengalokasikan sumber daya dan investasi yang dapat dimanfaatkan oleh suatu daerah, dan pilar 12 yakni kapabilitas inovasi untuk mengetahui kuantitas dan kualitas penelitian dan pengembangan formal yang mendorong kolaborasi, konektivitas, keragamana, dan konfrontasi lintas visi dan suatu pandangan yang berbeda, serta kapasitas untuk mengubah ide menjadi barang dan jasa baru. Adapun bentuk intervensi Pemerintah Provinsi NTB dalam terhadap arah kebijakan pembangunan kewilayah Kabupaten Dompu sesuai dengan RPJMN Tahun 2024-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 11 Indikasi Intervensi Pusat Terhadap arah kewilayanan Kabupaten Dompu dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Agenda	*Highlight* Indikasi Interverensi Pusat	*Output*
I. Kawasan Komoditas Unggulan		
Kawasan Perkebunan	Peningkatan produksi dan produktivitas perkebunan	Kawasan Tebu di Kabupaten Dompu, sarana dan prasarana pasca panen, sarana dan prasarana pengolahan, dan produksi benih tanaman perkebunan

Agenda	*Highlight* Indikasi Interverensi Pusat	*Output*
	Peningkatan daya saing produk Perkebunan	Pengembangan industri pengolahan perkebunan produk hilir, neraca komoditas Perkebunan, pendampingan usaha mikro, peningkatan peluang investasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi
	Hilirisasi komoditas unggulan dan peningkatan ekspor	Kawasan Perkebunan, kawasan kopi dan kerjasama perdagana dalam fourm organisasi kopi internasional, kebun sumber benih, penanganan organisme pengganggu tanaman, sarana dan prasarana pengolahan dan pascapanen, sertifikasi produk
	Implementasi pertanian rendah karbon	Desa Pertanian Organik berbasis komoditas perkebunan
	Peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif	Fasilitasi hilirisasi investasi, sertifikasi produk mutu pestisida dan pupuk
Kawasan Peternakan	Pengembangan kawasan peternakan daan peningkatan kualitas pangan hewani	Benih ternak unggul, sarana perbibitan ternak, prasarana perbibitan ternak, ternak ruminansia perah dan potong, pakan olahan dan bahan pakan, sarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, dan layanan kesehatan hewan
	Peningkatan kualitas dan kuantitas hasil peternakan serta pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak	Bantuan pakan, bibit dan benih ternak unggul, sertifikasi benih/bibit ternak, ternak ruminansia potong dan perah, alat dan mesin sub sektor peternakan, pembinaan dan pengawasan mutu, sarana dan prasarana kesehatan hewan, dan layanan optimalisasi reproduksi
f. Kawasan Sentra Berbasis Perikanan Tangkap	Pengembangan kelembagaan dan sarana prasarana produksi perikanan tangkap/serta kampung/sentra nelayan	Identifikasi potensi sosial budaya dan kelembagaan setiap lokasi untuk pengembangan sesuai karakter lokal, mendorong ownership nelayan pada aset dan Lembaga yang telah dibentuk, fasilitasi penguatan kelembagaan kelompok nelayan, penguatan pendanaan, integrasi program Kementerian/Lembaga sebagai percontohan dan potensi replikasi, kampung nelayan yang ditingkatkan fasilitasnya, alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang tersalurkan

Agenda	*Highlight* Indikasi Interverensi Pusat	*Output*
	Pengembangan industri pengolahan ikan	Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI), sarana pengolahan hasil Kawasan Prioritas, sarana penyimpanan produk Kawasan Prioritas, dan sarana distribusi logistik produk Kawasan Prioritas
II. Kawasan Swasembada Pangan, Air, Energi (Penguatan kemandirian daerah melalui pengembangan pangan lokal Sumbawa berbasis pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan)		
Kawasan Pangan Lokal	Penguatan pascapanen lokal	Sarana pengolahan hasil tanaman pangan dan pascapanen tanaman pangan, sertifikat produk tanaman pangan
	Sertifikasi dan peredaran benih nabati	Sertifikasi benih padi dan jagung, area penyaluran benih padi dan jagung
	Pengembangan pangan lokal dan nabati	Optimasi/pengembangan lahan pertanian produktif, pembangunan jalan pertanian, pengembangan/rehabilitasi jaringan irigasi pertanian, pengembangan kawasan padi dan jagung, peningkatan kemandirian usaha kelompok tani hutan (KTH)
	Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikana budidaya dan revitalisasi tambak rakyat	Benih udang, klaster kawasan revitalisasi tambak udang, sarana pengolahan hasi Kawasan Prioritas, sarana penyimpanan produk Kawasan Prioritas, dan sarana distribusi logistik produk Kawasan Prioritas
	Pengembangan pangan hewani	Benih dan bibit ternak unggul, ternak ruminansia potong, sarana dan prasarana perbibitan ternak, sarana pascapanen/pengolahan/pemasaran hasil peternakan, layanan kesehatan hewan
	Penguatan pengolahan dan pemasarana produk ternak	Sarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, prasarana pengolahan dan pamsaran hasil peternakan, unit usaha yang dibina sertifikasi NKV
	Pembangunan industri pakan ternak (bahan baku jagung dan sorgum)	Jumlah produsen (individu) pakan/bahan pakan yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan, penjaminan mutu dan keamanan pakan, jumlah sarana pakan/bahan pakan
	Pengembangan koperasi sektor produksi	Peningkatan peran dan kapasitas kelembagaan koperasi, dan pengembangan usaha koperasi

KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) SAMOTA, penguatan ekosistem pengembangan komoditas unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, penguatan swasembada pangan, air, dan energi berkelanjutan pengembangan, pariwisata alam, budaya, dan minat khusus penguatan kapasitas fiskal daerah untuk pendanaan, dan pembangunan daerah.

Kabupaten Sumbawa

Pembangunan kewilayahan di Kabupaten Sumbawa difokuskan pada KSCT SAMOTA menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) SAMOTA yang juga mendukung ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan, ekonomi hijau, ekonomi sirkular, dan ekonomi kreatif sehingga dapat mendorong pengembangan di sektor perikanan, minaindustri, pariwisata berkelanjutan, agroindustri, peternakan, dan pertanian.

Selain KEK SAMOTA, di Kabupaten Sumbawa juga terdapat beberapa lokasi prioritas lain yang termasuk dalam Kawasan Strategis Provinsi NTB yang di antaranya ada Agrobisnis-Pototano Gili Balu yang merupakan Kawasan agribisnis dengan sektor unggulan agroindustri, perikanan, peternakan, dan pariwisata, Puncak Ngengas Selalu Legini sebagai kawasan dengan nilai konservasi tinggi berbasis mitigasi bencana, dan Teluk Cempi Hu'u sebagai kawasan pertumbuhan baru dengan sektor unggulan pariwisata, perikanan, industri, pertambangan, dan energi.

Adapun bentuk intervensi Provinsi NTB dalam pembangunan kewilayahan Kabupaten Sumbawa di kawasan-kawasan komoditas unggulan perkebunan, peternakan, sentra garam, perikanan dan sentra rumput laut, sentra produksi komoditas berbasis udang, kawasan swasembada pangan, air, energi (penguatan kemandirian daerah melalui pengembangan pangan lokal sumbawa berbasis pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan) untuk meningkatkan kawasan pangan lokal di Kabupaten Sumbawa. Lebih lengkapnya terdapat pada tabel berikut:

Tabel 3. 12 Indikasi Intervensi Pusat Terhadap arah kewilayanan Kabupaten Sumbawa dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Agenda	***Highlight* Indikasi Interverensi Pusat**	***Output***
I. Kawasan Komoditas Unggulan		
Kawasan Perkebunan	Peningkatan produksi dan produktivitas perkebunan	Kawasan Kopi di Kab. Sumbawa, sarana dan prasarana pascapanen, sarana dan prasarana pengolahan, produksi benih tanaman perkebunan
	Peningkatan daya saing produk Perkebunan	Pengembangan industri pengolahan perkebunan produk hilir, neraca komoditas Perkebunan, pendampingan usaha mikro, peningkatan peluang investasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi

Agenda	*Highlight* Indikasi Interverensi Pusat	*Output*
	Hilirisasi komoditas unggulan dan peningkatan ekspor	Kawasan Perkebunan, kawasan kopi dan kerjasama perdagana dalam fourm organisasi kopi internasional, kebun sumber benih, penanganan organisme pengganggu tanaman, sarana dan prasarana pengolahan dan pascapanen, sertifikasi produk
	Implementasi pertanian rendah karbon	Desa Pertanian Organik berbasis komoditas perkebunan
	Peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif	Fasilitasi hilirisasi investasi, sertifikasi produk mutu pestisida dan pupuk
Kawasan Peternakan	Pengembangan kawasan peternakan daan peningkatan kualitas pangan hewani	Benih ternak unggul, sarana perbibitan ternak, prasarana perbibitan ternak, ternak ruminansia perah dan potong, pakan olahan dan bahan pakan, sarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, dan layanan kesehatan hewan
	Peningkatan kualitas dan kuantitas hasil peternakan serta pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak	Bantuan pakan, bibit dan benih ternak unggul, sertifikasi benih/bibit ternak, ternak ruminansia potong dan perah, alat dan mesin sub sektor peternakan, pembinaan dan pengawasan mutu, sarana dan prasarana kesehatan hewan, dan layanan optimalisasi reproduksi
Kawasan Sentra Garam	Pengembangan garam industri terintegrasi	Korporasi petambak garam, verifikasi penyaluran dan distribusi garam industri ke industri, fasilitasi pendampaingan pelaku usaha komoditas siap edar, peningkatan kualitas garam sesuai standar industri, bantuan sarana pengembangan isaha petambak garam (korporasi), dan pendampingan industri pengolahan garam dalam negeri dalam pemenuhan spesifikasi industri aneka pangan, farmasi, dan kosmetik
	Penguatan sarana dan prasarana industri garam	Lahan garam yang difasilitasi dan sarana niaga garam rakyat yang diserahkan ke masyarakat/pemda

Agenda	*Highlight* Indikasi Interverensi Pusat	*Output*
	Peningkatan produktivitas garam rakyat	Pengadaan sarana dan prasarana produksi garam, pengembangan korporasi petambak garam
Kawasan Perikanan dan Sentra Rumput Laut	Jaminan ketersediaan bahan baku industri rumput laut	Peningkatan kualitas bahan baku, kluster rumput laut berbasis kawasan yang didbangun Masyarakat, pengembangan teknologi dan pembibitan
	Hilirisasi, peningkatan rantai nilai, promosi, dan penguatan sumber daya manusia	Fasilitasi investasi hilirisasi industri, penguatan kapasitas pembudidaya rumput laut, pengembangan pangan dan biostimulan berbasis rumput laut, dukungan pembiayaan, rekomendasi tata kelola bidang budidaya rumput laut, dan kewirausahaan pemuda, memperkuat koperasi rumput laut, pengembangan jaringan infrastruktur pengolahan di dekat sentra produksi rumput laut
	Peningkatan kualitas dan ketersediaan bahan baku melalui peningkatan produktivitas budidaya rumput laut	Bibit rumput laut kultur jaringan yang disalurkan ke masyarakat, sarana budidaya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat, infrastruktur kawasan budidaya rumput laut – Ocean for Prosperity, Infrastructure for Coral Reef Areas, dan lainnya
	Pengembangan industri dan hilirisasi rumput laut	Pengembangan hilirisasi industri pengolahan hasil laut dan perikanan
	Fasilitasi pembiayaan dan investasi serta penelitian	Ketersediaan pembiayaan dan hasil penelitian yang bermanfaat untuk perumusan kebijakan dan pengembangan kawasan sentra rumput laut dan hilirisasi produk rumput laut
	Pengembangan budidaya rumput spesies baru dan inovasi teknologi untuk diversifikasi produk rumput laut (karagenan, agar-agar, bostimulan, nutraseutikal, pakan ternak)	Spesies baru dan kemantapan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan diversifikasi hilirisasi rumput laut
Kawasan Sentra Produksi Berbasis	Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan	Benih udang, klaster kawasan revitalisasi tambak udang, sarana pengolahan hasil komoditas udang, sarana penyimpanan

Agenda	*Highlight* Indikasi Interverensi Pusat	*Output*
Komoditas Udang	perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat	produk kawasan prioritas, dan sarana distribusi produk kawasan prioritas
	Pengembangan akuakultur komoditas udang	Breeding program induk unggul, penataan jaringan irigasi dan revitalisasi lahan tambah udang dengan prioritas tambak tradisional plus, pengerukan muara Sungai yang mengalami sedimentasi, penyederhanaan perizinan lintas sektor, dan peningkatan mutu produk, serta perluasan pasar ekspor
Kawasan Sentra Berbasis Perikanan Tangkap	Pengembangan kelembagaan dan sarana prasarana produksi perikanan tangkap/serta kampung/sentra nelayan	Identifikasi potensi sosial budaya dan kelembagaan setiap lokasi untuk pengembangan sesuai karakter lokal, mendorong ownership nelayan pada aset dan Lembaga yang telah dibentuk, fasilitasi penguatan kelembagaan kelompok nelayan, penguatan pendanaan, integrasi program Kementerian/Lembaga sebagai percontohan dan potensi replikasi, kampung nelayan yang ditingkatkan fasilitasnya, alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang tersalurkan
	Pengembangan industri pengolahan ikan	Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI), sarana pengolahan hasil Kawasan Prioritas, sarana penyimpanan produk Kawasan Prioritas, dan sarana distribusi logistik produk Kawasan Prioritas
II. Kawasan Swasembada Pangan, Air, Energi (Penguatan kemandirian daerah melalui pengembangan pangan lokal Sumbawa berbasis pertanian, perikanan, Perkebunan, dan peternakan)		
Kawasan Pangan Lokal	Penguatan pascapanen lokal	Sarana pengolahan hasil tanaman pangan dan pascapanen tanaman pangan, sertifikat produk tanaman pangan
	Sertifikasi dan peredaran benih nabati	Sertifikasi benih padi dan jagung, area penyaluran benih padi dan jagung
	Pengembangan pangan lokal dan nabati	Optimasi/pengembangan lahan pertanian produktif, pembangunan jalan pertanian, pengembangan/rehabilitasi jaringan irigasi pertanian, pengembangan kawasan padi dan jagung, peningkatan kemandirian usaha kelompok tani hutan (KTH)
	Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan	Benih udang, klaster kawasan revitalisasi tambak udang, sarana pengolahan hasi Kawasan Prioritas, sarana penyimpanan

Agenda	*Highlight* Indikasi Interverensi Pusat	*Output*
	perikana budidaya dan revitalisasi tambak rakyat	produk Kawasan Prioritas, dan sarana distribusi logistik produk Kawasan Prioritas
	Pengembangan pangan hewani	Benih dan bibit ternak unggul, ternak ruminansia potong, sarana dan prasarana perbibitan ternak, sarana pascapanen/pengolahan/pemasaran hasil peternakan, layanan kesehatan hewan
	Penguatan pengolahan dan pemasarana produk ternak	Sarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, prasarana pengolahan dan pamsaran hasil peternakan, unit usaha yang dibina sertifikasi NKV
	Pembangunan industri pakan ternak (bahan baku jagung dan sorgum)	Jumlah produsen (individu) pakan/bahan pakan yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan, penjaminan mutu dan keamanan pakan, jumlah sarana pakan/bahan pakan
	Pengembangan koperasi sektor produksi	Peningkatan peran dan kapasitas kelembagaan koperasi, dan pengembangan usaha koperasi

Harapan pengembangan wilayah di Kabupaten Sumbawa mendukung pengembangan KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) SAMOTA, penguatan ekosistem pengembangan komoditas unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, sentra garam dan rumput laut, perikanan dan kelautan, penguatan swasembada pangan, air, dan energi berkelanjutan, pengembangan pariwisata alam, budaya dan minat khusus, penguatan kapasitas fiskal daerah untuk pendanaan, dan pembangunan daerah.

Kabupaten Sumbawa Barat

Pembangunan kewilayahan di Kabupaten Sumbawa Barat difokuskan pada Kawasan Industri Sumbawa Barat yang merupakan kawasan pendukung dan penyangga Kawasan Industri Maluk berbasis sektor unggulan pertambangan dan insdustri turunannya, perikanan, serta pariwisata. Bersama Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat juga menjadi Kawasan Strategis Provinsi NTB pada Agrobisnis Pototano-Gili Baru sebagai kawasan agribisnis dengan sektor unggulan agroindustri, perikanan, peternakan, dan pariwisata serta Puncak Ngengas Selalu Legini sebagai kawasan dengan nilai konservasi tinggi berbasis mitigasi bencana.

Dalam RPJMN, Kabupaten Sumbawa Barat menjadi lokasi prioritas Kawasan Industri Sumbawa Barat, Kawasan Perkebunan dan Hilirisasi Hasil Perkebunan, Kawasan Komoditas Unggulan pada sentra produksi berbasis komoditas udang dan Kawasan Konservasi yakni Kawasan Konservasi Daerah Gili Balu. Untuk lebih lengakpnya, bentuk intervensi Provinsi

NTB dalam arah pembangunan kewilayahan Kabupaten Sumbawa Barat dalam RPJMN adalah sebai berikut:

Tabel 3. 13 Indikasi Intervensi Pusat Terhadap arah kewilayanan Kabupaten Sumbawa Barat dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Agenda	*Highlight* Indikasi Interverensi Pusat	*Output*
I. Kawasan Industri		
Aglomerasi Industri di Kawasan Industri Sumbawa Barat,	Pengembangan Aglomerasi Industri di Kawasan Industri Sumbawa Barat	Perencanaan dan perizinan KI Sumbawa Barat
		Penataan ruang dan pengembangan konektivitas simpul transportasi Kl Sumbawa Barat
		Pembangunan dan pengembangan infrastruktur jalan/jembatan, sarana prasarana perumahan/kesehatan/air persampahan dan limbah bersih/listrik/pengolahan
		Peningkatan investasi kawasan dan pengembangan usaha serta rantai pasok
		Penyediaan pendidikan dan pelatihan SDM
		Peningkatan investasi hilirisasi tembaga
II. Kawasan Komoditas Unggulan		
Kawasan Sentra Garam	Pengembangan garam industri terintegrasi	Korporasi petambak garam, verifikasi penyaluran dan distribusi garam industri ke industri, fasilitasi pendampaingan pelaku usaha komoditas siap edar, peningkatan kualitas garam sesuai standar industri, bantuan sarana pengembangan isaha petambak garam (korporasi), dan pendampingan industri pengolahan garam dalam negeri dalam pemenuhan spesifikasi industri aneka pangan, farmasi, dan kosmetik
	Penguatan sarana dan prasarana industri garam	Lahan garam yang difasilitasi dan sarana niaga garam rakyat yang diserahkan ke masyarakat/pemda
	Peningkatan produktivitas garam rakyat	Pengadaan sarana dan prasarana produksi garam, pengembangan korporasi petambak garam
Kawasan Perikanan dan Sentra Rumput Laut	Jaminan ketersediaan bahan baku industri rumput laut	Peningkatan kualitas bahan baku, kluster rumput laut berbasis kawasan yang didbangun Masyarakat, pengembangan teknologi dan pembibitan
	Hilirisasi, peningkatan rantai nilai, promosi, dan	Fasilitasi investasi hilirisasi industri, penguatan kapasitas pembudidaya rumput laut, pengembangan pangan dan biostimulan berbasis rumput laut, dukungan pembiayaan,

Agenda	*Highlight* Indikasi Interverensi Pusat	*Output*
	penguatan sumber daya manusia	rekomendasi tata kelola bidang budidaya rumput laut, dan kewirausahaan pemuda, memperkuat koperasi rumput laut, pengembangan jaringan infrastruktur pengolahan di dekat sentra produksi rumput laut
	Peningkatan kualitas dan ketersediaan bahan baku melalui peningkatan produktivitas budidaya rumput laut	Bibit rumput laut kultur jaringan yang disalurkan ke masyarakat, sarana budidaya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat, infrastruktur kawasan budidaya rumput laut – Ocean for Prosperity, Infrastructure for Coral Reef Areas, dan lainnya
	Pengembangan industri dan hilirisasi rumput laut	Pengembangan hilirisasi industri pengolahan hasil laut dan perikanan
	Fasilitasi pembiayaan dan investasi serta penelitian	Ketersediaan pembiayaan dan hasil penelitian yang bermanfaat untuk perumusan kebijakan dan pengembangan kawasan sentra rumput laut dan hilirisasi produk rumput laut
	Pengembangan budidaya rumput spesies baru dan inovasi teknologi untuk diversifikasi produk rumput laut (karagenan, agar-agar, bostimulan, nutraseutikal, pakan ternak)	Spesies baru dan kemantapan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan diversifikasi hilirisasi rumput laut
Kawasan Sentra Produksi Berbasis Komoditas Udang	Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat	Benih udang, klaster kawasan revitalisasi tambak udang, sarana pengolahan hasil komoditas udang, sarana penyimpanan produk kawasan prioritas, dan sarana distribusi produk kawasan prioritas
	Pengembangan akuakultur komoditas udang	Breeding program induk unggul, penataan jaringan irigasi dan revitalisasi lahan tambah udang dengan prioritas tambak tradisional plus, pengerukan muara Sungai yang mengalami sedimentasi, penyederhanaan perizinan lintas sektor, dan peningkatan mutu produk, serta perluasan pasar ekspor

Dalam RPJPN 2025-2045, strategi dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Beberapa agenda pembangunan yang terkait dengan pembangunan kewilayahan adalah

- Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
- Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
- Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Arah kebijakan dalam RPJMN untuk Provinsi NTB adalah Kawasan pertumbuhan DPP Gili-Tramen terdiri dari Kota mataram, Lombok utara, lombok Barata, Lombok Tengah dan Lombok Timur, kawasan perkotaan sedang kota mataram, kawasan industri sumbawa barat yaitu Kabupaten Sumbawa Barat, kawasan komoditas unggulan kawasan perkebunan terdiri dari Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Dompu, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa, untuk Kawasan Peternakan terdiri dari 5 kabupaten yaitu kabupaten Lombok Tengah, Lombok timur, kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima, untuk Kawasan Sentra Garam terdiri dari Kabupaten Bima, Kabupaten Lombok Timur, kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Lombok Barat, untuk kawasan perikanan dan sentra rumput laut adalah kabupaten sumbawa, kabupaten lombok timur, kabupaten bima, kabupaten lombok tengah dan lombok barat, sentra akuakultur-komoditas udang terdiri dari kabupaten sumbawa, kabupaten bima, kabupaten lombok timur, kabupaten sumbawa barat, kabupaten lombok utara, kawasan pengembangan sentra berbasis perikanan tangkap yaitu kabupaten lombok timur, kabupaten sumbawa, kabupaten dompu, kawasan swasembada pangan, air dan energi yaitu kabupaten sumbawa, lombok timur, kabupaten dompu, kabupaten bima, kawasan afirmasi KPP Pariwisata Sembalun kabupaten Lombok Timur dan Kawasan transmigrasi KT selaparang Kabupaten Lombok Timur dan Kawasan konservasi dan Rawan Bencana.

Berdasarkan Perda RTRW Nomor 5 tahun 2025 arah kewilayahan ditepatka menjadi 2 yaitu pulau lombok sebagai pulau kota berkelanjutan & tangguh berbasis sistem satu pulau penataan dan pemulihan satu pulau melalui pengaturan secara selektif bagi peruntukan terbangun dan memaksimalkan fungsi-fungsi konservasi kawasan lindung dengan fokus pengembangan wilayah yaitu konektivitas wilayah untuk pemerataan konektivitas wilayah untuk pemerataan, pengurangan risiko bencana, pemulihan dan pelestarian kawasan lindung, pemanfaatan kegiatan budidaya di darat dan dilaut secara efektif dan ramah lingkungan, koordinasi dan kerjasa antar wilayah dalam hal pembagian peran, pelibatan sektor-sektor informal yang sudah ada didalam masyarakat dengan memperhatikan 4 hal utama yaitu revitaslisasi sektor unggulan dan prioritas, akselerasi kawasan strategis, akselerasi pengembangan infrastruktur dan pemulihan, perlindungan kawasan lindung.

Dukungan pemerintah daerah terhadap arahan kewilayahan yang telah ditetapkan dalam RPJMN yang telah terintegrasi dapat dipastikan telah dilakukan dalam program dan kegiatan sebagai berikut Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi pada Kota/kabupaten di pulau lombok dan di pulau sumbawa, Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi di Kawasan Mataram Raya - Tiga Gili dan Sekitarnya,

Kawasan Kuta-Mandalika dan Sekitarnya beserta wilayah perairannya sejauh 12 mil, Penyediaan Infastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandiri Pangan pada Berbagai Sektor Sesuai Kewenangan Daerah Provinsi di Kab/Kota Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, Identifikasi dan Inventarisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Wilayah Pesisir Pengembangan Sentra Pergaraman di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan Penetapan WKOPP Pelabuhan Perikanan di Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, untuk kawasan afirmasi KPP sembalun,

Kegiatan dukungan pemerintah provinsi sebagai berikut Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kab/Kota di Kabupaten Lombok Barat (Gili Tangkong, Gili Kedis, Gili Sudak), Kabupaten Lombok Utara (Gili Trawangan), Kabupaten Lombok Timur ((Gili Belek), Kabupaten Bima (Bajo Pulo), Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Jaringan Serat Optik (SO) di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, yang terakhir adalah kawasan konservasi dan rawan bencana Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana di Kab/Kota di Pulau Lombok dan Kab/Kota di Pulau Sumbawa, Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi di Kab/Kota di Pulau Lombok dan Kab/Kota di Pulau Sumbawa sedangkan untuk kawasan konservasi pemerintah provinsi mendukung dengan kegiatan Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara di Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan di Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu.

Penyelarasan Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Kawasan Dalam RPJMN dan RPJMD Tahun 2025-2029 dilaksanakan sebagai berikut:

Kawasan Pertumbuhan DPP Lombok-Gili Tramena

Dalam RPJMN Tahun 2025-2029 untuk Provinsi NTB, Kawasan Pertumbuhan yang akan dikembangkan mencakup:

1. Percepatan Pembangunan dan Peningkatan Percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas destinasi pariwisata khususnya wisata petualangan pada kawasan prioritas (DPP Lombok - Gili Tramena), melalui:
    1. Peningkatan jalan nasional, dengan output pembangunan jalan akses simpul transportasi
    2. Pengembangan atraksi (alam, budaya, buatan) termasuk berbasis geologi lombok Gili Tramena, dengan output: event MICE dalam negeri, pendukungan event daerah, pelaksanaan kegiatan (events) nasional dan internasional, jejaring Destinasi Pariwisata di wilayah Destinasi II yang dikembangkan, dokumen perencanaan

daerah pariwisata di wilayah destinasi ll yang terpadu, desa wisata yang dikembangkan, koordinasi strategis perencanaan dan pengembangan

Pengembangan Wisata Petualangan di DPP Lombok–Gili–Tramena dalam RPJMN 2025–2029:

1. Konteks Nasional dan Daerah

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Provinsi NTB ditetapkan sebagai kawasan strategis pariwisata nasional dengan orientasi pada pengembangan wisata petualangan, geopark, dan desa wisata berbasis budaya dan alam. Penetapan Kawasan Prioritas (Destinasi Pariwisata Prioritas / DPP) Lombok–Gili–Tramena dilakukan mengingat posisinya sebagai bagian dari Destinasi Super Prioritas Mandalika dan Geopark Rinjani–Tambora.

RPJMN mengarahkan percepatan pembangunan kawasan ini sebagai model pariwisata petualangan kelas dunia yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi, sejalan dengan prinsip Blue, Green, Circular Economy (BCGE).

2. Strategi Percepatan Pembangunan dan Peningkatan Kualitas

A. Pengembangan Atraksi Wisata Petualangan Berbasis Alam, Budaya, dan Geologi

- Geowisata berbasis kawasan laut Gili Tramena melalui penyusunan paket edukas, dan atraksi laut konservatif.
- Kegiatan adventure tourism:
- Budaya dan buatan: pelestarian seni tradisional di 375 desa wisata misalnya (Sade, Ende, Malaka dan) dan pengembangan creative space untuk ekspresi komunitas pemuda lokal.

B. Event MICE dan Pendukungan Event Daerah/Nasional/Internasional

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, sektor pariwisata berbasis MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi regional di kawasan timur Indonesia. NTB diposisikan sebagai sentra baru MICE di wilayah Indonesia tengah dan timur, seiring dengan meningkatnya daya saing destinasi dan infrastruktur yang telah dikembangkan pasca perhelatan MotoGP Mandalika, MXGP, dan berbagai event internasional lainnya.

Pengembangan kawasan pertumbuhan berbasis MICE ini diarahkan untuk memperluas multiplier effect sektor pariwisata, mendorong investasi, serta meningkatkan partisipasi UMKM dan industri kreatif lokal.

C. Integrasi Jejaring Destinasi Pariwisata Wilayah Destinasi II

- Konektivitas antar destinasi: pengembangan jalur intermodal dari Mandalika–Gili–Rinjani–Senaru–Sembalun–Tetebatu, termasuk penyeberangan dan jalur sepeda adventure.

D. Pengembangan Desa Wisata

Provinsi NTB (NTB) memiliki potensi luar biasa dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas melalui desa wisata. Dalam RPJMN 2025–2029, pengembangan desa wisata di NTB diarahkan untuk memperkuat daya saing daerah, meningkatkan inklusi ekonomi masyarakat perdesaan, serta mendorong pembangunan berkelanjutan berbasis budaya lokal, lingkungan, dan kearifan tradisional.

Desa wisata di NTB merupakan bagian dari strategi pengembangan Kawasan Pertumbuhan Baru di wilayah timur Indonesia. Ini selaras dengan komitmen nasional untuk mengembangkan desa wisata maju dan mandiri.

3. Pengembangan kawasan geopark yang diwujudkan melalui penguatan tata kelola kelembagaan, optimalisasi pendanaan dan implementasi rencana induk pengembangan geopark

Provinsi NTB (NTB) merupakan salah satu provinsi dengan kekayaan geologis dan lanskap alam yang luar biasa. Hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya Geopark Rinjani sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark (UGG) sejak tahun 2018. Selain Rinjani, terdapat potensi pengembangan kawasan geopark baru seperti Geopark Tambora dan Geopark Sumbawa.

Dalam RPJMN 2025–2029, pengembangan geopark di NTB menjadi bagian dari strategi nasional untuk mendorong pertumbuhan kawasan berbasis sumber daya alam non-ekstraktif, sekaligus memperkuat konservasi, edukasi, dan kesejahteraan masyarakat lokal. Geopark dikembangkan sebagai motor pembangunan berkelanjutan dan pariwisata ilmiah, edukatif, dan petualangan (adventure-based tourism).

Strategi dalam Pengembangan Geopark NTB:

A. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Geopark

- Pembentukan dan penguatan Badan Pengelola Geopark di setiap kawasan.
- Penguatan sinergi lintas sektor (ESDM, LHK, Dispar, Dinas Pendidikan, Bappeda, desa).
- Pelibatan aktif komunitas, akademisi, Pokdarwis, dan lembaga adat.

B. Rencana Induk Pengembangan Geopark

- Penyusunan dan aktualisasi dokumen Rencana Induk Pengelolaan Geopark (RIPG) 2025–2029.
- Integrasi RIPG dalam RPJMD Provinsi dan Kab/Kota terkait.
- Penetapan zona inti, penyangga, dan pengembangan geopark sesuai kaidah UNESCO.

C. Optimalisasi Pendanaan dan Kemitraan

- Penguatan APBD Provinsi/Kabupaten untuk program geopark.

- Akses pembiayaan alternatif: DAK Tematik Geopark, CSR BUMN/Swasta, dana desa, dan kemitraan universitas.
- Kemitraan internasional: UNESCO, GGN (Global Geopark Network), JICA, GIZ.

D. Pengembangan Eduwisata dan Ekowisata Geopark

- Pengembangan paket wisata geowisata dan interpretasi ilmiah (trekking lava, sejarah letusan, situs geologi).
- Kolaborasi dengan sekolah dan perguruan tinggi untuk *field school*, riset geologi, edukasi mitigasi bencana.
- Pengembangan museum mini, pusat informasi geologi, dan jalur geotrail.

E. Pemberdayaan Masyarakat dan UMKM Geopark

- Pelatihan pemandu geowisata, interpreter lokal, pelaku UMKM tematik geopark (souvenir, tenun bermotif geologi, kuliner khas).
- Integrasi desa sekitar geosite dalam jejaring desa wisata geopark.
- Promosi *geoproducts* (kopi, madu, tenun, herbal, kerajinan batu alam) dalam paket wisata.

Lombok–Gili Tramena ditetapkan sebagai Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan Kawasan Pertumbuhan Strategis dalam RPJMN 2025–2029. Pembangunannya diarahkan untuk mengakselerasi pemulihan sektor pariwisata pascapandemi dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di NTB, melalui penguatan infrastruktur dasar, peningkatan daya saing SDM, promosi wisata minat khusus, serta percepatan investasi pariwisata berbasis ekonomi hijau.

Pembangunan Sarana Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Amenitas Pariwisata Lombok–Gili Tramena

Tujuan: Menyediakan infrastruktur pendukung pariwisata yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan meningkatkan kualitas layanan destinasi.

Kegiatan Strategis:

- Pembangunan dan revitalisasi jalan akses, trotoar wisata, dermaga wisata (khususnya Gili Trawangan dan Teluk Nara).
- Penyediaan toilet umum standar CHSE, tempat sampah terpilah, rest area, dan jaringan Wi-Fi publik.
- Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) skala kota di kawasan pariwisata utama (Senggigi, Gili Trawangan, Kuta Mandalika).

Pengembangan Keterampilan SDM dan Layanan Pariwisata Lombok–Gili Tramena

Tujuan: Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme pelaku pariwisata untuk mendukung standar pelayanan berkelas dunia.

Kegiatan Strategis:

- Fasilitasi pelatihan hospitality, bahasa asing, guiding, penyelamatan laut, pengelolaan desa wisata, dan digital tourism.
- Sertifikasi profesi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pariwisata NTB.
- Pelatihan pembekalan kerja untuk pekerja sektor informal (UMKM kuliner, homestay, transportasi wisata, dan MICE).

Pemasaran Pariwisata Lombok–Gili Tramena

Tujuan: Meningkatkan eksposur dan daya tarik Lombok–Gili Tramena sebagai destinasi unggulan wisata minat khusus (petualangan, bahari, MICE, budaya).

Kegiatan Strategis:

- Promosi digital terpadu (media sosial, YouTube, website, e-brochure).
- Penyelenggaraan famtrip, press trip, dan travel expo di pasar prioritas (ASEAN, Australia, Timur Tengah).
- Kerja sama promosi dengan maskapai penerbangan, wholesaler, OTA, dan komunitas.
- Produksi konten promosi wisata minat khusus: diving Gili, surfing Gerupuk, hiking Rinjani, cultural journey Sasak, dan MICE Mandalika.

Pengembangan Industri, Usaha Masyarakat, dan Investasi Pariwisata Lombok–Gili Tramena

Tujuan: Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui investasi pariwisata yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis komunitas.

Kegiatan Strategis:

- Fasilitasi UMKM pariwisata untuk akses pembiayaan mikro, KUR, dan pasar modal.
- Penerapan konsep pariwisata berkelanjutan (ekolodge, zero waste tourism, community-based tourism).
- Koordinasi implementasi Blue, Green, Circular Economy:
- Blue: konservasi laut dan ekonomi pesisir (Gili Tramena)
- Green: energi terbarukan dan pengurangan emisi di akomodasi
- Circular: pemanfaatan limbah menjadi produk ekowisata

4. Pembangunan sarana prasarana umum, fasilitas umum, dan amenitas pariwisata lombok-Gili Tramena, dengan output sistem pengelolaan air limbah domestik setempat skala kota
5. Pengembangan keterampilan SDM dan layanan pariwisata Lombok-Glli Tramena, dengan output: fasititasi dan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM pariwisata, SDM pariwisata yang memperoleh pelatihan untuk pembekalan kerja, sertifikasi SDM bidang pariwisata
6. Pemasaran pariwisata Lombok-Gili Tramena, dengan output: publikasi, promosi terpadu, konten promosi wisata minat khusus, jejaring promosi wisata minat khusus, promosi terpadu (pameran, perjalanan wisata pengenan, dan kerja sama dengan maskapai, dan wholesaler)

7. Pengembangan industri, usaha masyarakat, dan investasi pariwisata Lombok-Gili Tramena, dengan output: fasilitasi akses pembiayaan pasar modal, penerapan pariwisata berkelanjutan di Destinasi Pariwisata, koordinasi implementasi Blue, Green, Circular Economy pada usaha pariwisata, penerapan pariwisata berkelanjutan di Destinasi Pariwisata
8. Fasilitasi Kawasan Ekonomi Khusus dengan, dengan output pengendalian pembangunan dan pengelolaan KEK, peningkatan investasi kerjasama komunikasi dan sistem informasi di KEK, pelayanan investasi administrator KEK

    - Provinsi NTB memiliki salah satu dari 20 KEK di Indonesia, yaitu **KEK Mandalika** yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2014. KEK Mandalika memiliki peran penting dalam RPJMN 2025–2029 sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi wilayah timur Indonesia melalui sektor **pariwisata kelas dunia**, dengan integrasi antara destinasi, investasi, SDM, dan infrastruktur.

    - KEK Mandalika dikembangkan sebagai **kawasan berbasis pariwisata olahraga, MICE, dan bahari**, serta sebagai salah satu *strategic tourism hub* dalam peta ekonomi nasional. RPJMN menekankan perlunya penguatan kelembagaan, manajemen investasi, dan pengawasan pembangunan di kawasan ini guna menjamin keberlanjutan ekonomi dan lingkungan.

9. Pengurangan emisi GRK sektor pengelolaan sampah oleh pemerintah pusat, dengan output: bank sampah induk yang terbangun, fasilitas pengelolaan sampah spesifik, sistem pengelolaan persampahan skala kota, instalasi pengolahan air limbah, sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat
10. Pemanfaatan secara berkelanjutan dan pengelolaan sampah laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan output: prasarana penanggulangan sampah di laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; bantuan pengembangan desa pesisir bersih; pemanfaatan keanekaragaman hayati dan laut dan ekosistemnya dengan memperhatikan daya dukung; fasilitas Penanganan sampah di wilayah pesisir; kab/kota yang difasilitasi dalam membangun ekosistem ekonomi sirkular pengelolaan sampah.

Kawasan Pertumbuhan Metropolitan Kota Mataram

Pembangunan kawasan perkotaan sedang, dengan output: penyusunan masterplan pengembangan dan penataan kawasan yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu untuk kota sedang, penguatan instrumen peringatan dini bencana, rumah susun hunian masyarakat berpenghasilan rendah/pekerja, pemugaran dan peremajaan permukiman kumuh, bantuan PSU bidang perumahan, pembangunan dan peningkatan spam, SPALD-T skala regional/kota/permukiman/kawasan, pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi, sistem pengelolaan persampahan skala regional/kota/kawasan. Selanjutnya, penyediaan rumah murah bersanitasi baik bagi yang membutuhkan, terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) termasuk generasi milenial dan generasi Z.

Kawasan Pertumbuhan Aglomerasi Industri Kawasan Industri Sumbawa Barat

Pembangunan dan pengembangan infrastruktur jalan/jembatan, sarana prasarana perumahan/kesehatan/air bersih/listrik/pengolahan persampahan dan limbah. perencanaan dan perizinan KI Sumbawa Barat. penataan ruang dan pengembangan konektivitas simpul transportasi KI Sumbawa Barat. pembangunan dan pengembangan infrastruktur jalan/jembatan, sarana prasarana perumahan/kesehatan/air bersih/listrik/pengolahan persampahan dan limbah.Peningkatan Investasi Kawasan dan pengembangan usaha serta rantai pasok.penyediaan pendidikan dan pelatihan SDM. Peningkatan investasi hilirisasi tembaga.

Komoditas Unggulan Pengembangan Kawasan Perkebunan dan Hilirisasi

Komoditas unggulan pengembangan kawasan perkebunan dan hilirisasi di Provinsi NTB yaitu implementasi pertanian rendah karbon, dengan output: desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan. Peningkatan produksi dan produktivitas hasil perkebunan, dengan output: kawasan tebu, kawasan tembakau, kawasan kelapa, kawasan kopi, sarana dan prasarana pascapanen, sarana dan prasarana pengolahan, dan produksi benih tanaman perkebunan. Peningkatan daya saing produk perkebunan yang disertai peningkatan industri pengolahan hasil perkebunan, dengan output: engembangan industri pengolahan perkebunan produk hilir, fasilitas pusat penyediaan bahan baku industri tempurung dan sabut kelapa, neraca komoditas perkebunan, pengembangan industri pengolahan perkebunan, pendampingan pembiayan usaha mikro, peningkatan peluang investasi, dan optimalisasi pemanfataan teknologi. Hilirisasi komoditas unggulan dan peningkatan ekspor, dengan output: kawasan perkebunan, kawasan kopi dan kerja sama perdagangan dalam forum organisasi kopi internasional, kawasan kakao, hilirisasi industri pengolahan kakao dan coklat, kebun sumber benih, penanganan organisme pengganggu tumbuhan, sarana dan prasarana. Peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif, dengan output: fasilitasi hilirisasi investasi, sertifikasi produk mutu pestisida dan pupuk.

Komoditas Unggulan Pengembangan kawasan peternakan

Pengembangan Kawasan Peternakan fokus pada pengembangan kawasan peternakan dan peningkatan kualitas pangan hewani telah tertuang dalam Perturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029. Dalam Perpres Nomor 12 tahun 2025 tersebut telah ditetapkan 5 kabupaten sebagai kawasan komoditi unggulan Peternakan yaitu : Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima. Penetapan kawasan peternakan yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan sebagai upaya ; a). pengembangan kawasan peternakan dan peningkatkan pangan hewani dan b). Peningkatan kualitas dan kuantitas hasil peternakan serta pengendalian dan penanggulangan penyakit

ternak sehingga dapat mendukung pengembangan industri peternakan secara komprehensif dan peningkatan kaulitas pangan asal hewan.

Pengembangan kawasan peternakan dan peningkatan kualitas pangan hewani. Peternakan mempunyai peranan yang penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan hewani asal ternak melalui ketersediaan daging (sapi, kerbau, kambing, domba, kuda, ayam, itik dan babi), susu dan telur sebagai salah satu komoditas bahan pangan pokok. Ketersedian Produksi daging merupakan ketersediaan dari produksi daging sapi, kerbau, kambing, domba, kuda, ayam, itik dan babi dalam bentuk meatyield. Dalam lima tahun ke depan (2025–2029), pemerintah provinsi NTB berkomitmen untuk melakukan pengembangan kawasan peternakan dalam mendukung kualitas peternakan sebagai sumber pangan hewani melalui :

a. Penyediaan benih dan bibit ternak berkualitas melalui penerapan Good Breeding Practice.
b. Intensifikasi dan pemerataan inseminasi buatan serta layanan kebuntingan dengan penerapan teknologi reprodukdi lanjutan (inseminasi seksing dan embryo transfer.
c. Pengembangan padang pengembalaan dan kawasan peternakan berbasis unggulan lokal.
d. Pengembangan pakan berkualitas dengan good feeding practice (GFP) berbasis kawasan (silase, fermentasi dan pakan konsentrat lokal).
e. Penerapan teknologi dan manajemen pemeliharaan modern.
f. Penguatan kelembagaan peternak (koperasi, korporasi dan kelompok ternak)
g. Modernisasi kendang dan alat produksi ternak (otomatisasi pakan dan pengaturan suhu udara)

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan pemerintah provinsi NTB akan melakukan beberapa intervensi dengan ouput yang dihasilkan antara lain : benih ternak unggul, sarana perbibitan ternak, prasarana perbibitan ternak, ternak ruminansia perah dan potong, pakan olahan dan bahan pakan, sarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan serta layanan kesehatan hewan.

Peningkatan kualitas dan kuantitas hasil peternakan serta pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak. Provinsi NTB memiliki peran strategis dalam pembangunan peternakan nasional, Provinsi NTB merupakan salah satu lumbung penghasil daging nasional dengan jumlah populasi ternak Sapi Potong di NTB menempati urutan keempat nasional setelah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Kerbau urutan keempat setelah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Aceh, dan Sulawesi Selatan. Kuda urutan ketiga setelah Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur. Kambing urutan ketujuh nasional. Populasi ayam kampung menemati urutan ke 12 dari 34 provinsi. Pengembangan ayam kampung memiliki prospek yang sangat baik karena memiliki keunikan dengan adanya menu “Ayam Taliwang” yang menjadi kuliner khas NTB khususnya di Pulau Lombok dan

menjadi salah satu makanan unggulan dalam pengembangan pariwisata. Ternak itik menempati urutan ke-13 nasional. Permintaan daging itik cenderung semakin besar. Dilihat dari tingginya potensi dan permintaan daging itik tersebut maka itik dapat dijadikan komoditas unggulan selain sapi, kerbau, kambing, dan ayam kampung.

Tujuan Pembangunan Kesehatan Hewan di Provinsi NTB adalah untuk menjamin masyarakat terbebas dari penyakit zoonosis, menjaga dan mengamankan potensi NTB sebagai sentral ternak sapi bali nasional dengan melindungi ternak dari ancaman penyakit untuk terciptanya lingkungan budidaya yang aman, ternak yang sehat dan produktif sehingga tercapainya Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal. Pengendalian penyakit hewan merupakan salah satu tantangan strategis dalam pembangunan peternakan. Ketika tidak tertangani dengan baik, penyakit hewan dapat berdampak langsung pada penurunan produktivitas, kerugian ekonomi, gangguan kesehatan masyarakat (terutama penyakit zoonosis), hingga hambatan perdagangan dan ekspor. Terkendalinya kejadian kasus penyakit hewan menular strategis, terutama 5 (lima) penyakit (Anthrax, SE, AI, Rabies dan Helmintiasis) yang merupakan penyakit hewan menular srategis karena dapat menyebakan kerugian ekonomi yang cukup tinggi dan tingkat kematian pada ternak ini juga tinggi. Selain itu penyakit ini dapat berdampak pada kesehatan manusia atau menular ke manusia (zoonosis), melalui kegiatan vaksinasi dan pengetatan keluar masuk ternak.

Dalam lima tahun ke depan (2025–2029), pemerintah provinsi NTB berkomitmen untuk Peningkatan kualitas dan kuantitas hasil peternakan serta pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak melalui :

a. Penyediaan benih dan bibit ternak berkualitas melalui penerapan Good Breeding Practice.
b. Intensifikasi dan pemerataan inseminasi buatan serta layanan kebuntingan dengan penerapan teknologi reprodukdi lanjutan (inseminasi seksing dan embryo transfer.
c. Pengembangan pakan berkualitas dengan good feeding practice (GFP) berbasis kawasan (silase, fermentasi dan pakan konsentrat lokal).
d. Penerapan teknologi dan manajemen pemeliharaan modern.
e. Penguatan kelembagaan peternak (koperasi, korporasi dan kelompok ternak).
f. Modernisasi kendang dan alat produksi ternak (otomatisasi pakan dan pengaturan suhu udara).
g. Peningkatan akses dan distribusi vaksin hewan dengan menjamin ketersediaan vaksin berkualitas untuk menyakit prioritas dan menjalankan program vaksinasi massal.
h. Penerapan biosekuritu dan manajemen resiko dengan penguatan pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan.
i. Penguatan SDM Medik Veteriner dan Paramedik melalui pelatihan dan pemenuhan tenaga pengendali penyakit hewan dilapangan.

j. Peningkatan edukasi dan partisipasi peternak melalui penyuluhan kesehatan hewan dan pelaporan dini kasus.
k. Peningkatan kapasitas rumah sakit hewan dan laboratorium veteriner.
l. Penguatan sistem jaminan keamanan pangan asal hewan.
m. Peningkatan pengawasan rantai produksi dan distribusi.
n. Pengendalian zoonosis dan pendekatan one health melalui edukasi kepada masyarakat.
o. Pengembangan hilirisasi produk peternakan.
p. Penguatan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran produk hasil peternakan.
q. Branding dan pemasaran produk peternakan lokal.

Pemerintah provinsi NTB berkomitmen dalam 5 (lima) tahun ke depan (2025–2029), melakukan Peningkatan kualitas dan kuantitas hasil peternakan serta pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak dengan out put yang dihasilkan antara lain: bantuan pakan, bibit dan benih ternak unggul, sertifikasi benih/bibit ternak, termasuk ruminansia potong dan perah.

Komoditas Unggulan Pengembangan Kawasan Sentra Garam

Pengembangan garam industri terintegrasi, dengan output: korporasi petambak garam, verifikasi penyaluran dan distribusi garam industri ke industri, fasilitasi pendampingan pelaku usaha komoditas yang siap edar, peningkatan kualitas garam yang memenuhi standar garam industri, bantuan sarana pengembangan usaha petambak garam (korporasi), dan pendampingan industri pengolahan garam dalam negeri dalam pemenuhan spesifikasi industri aneka pangan, farmasi, dan kosmetik. Penguatan sarana dan prasarana industri garam, dengan output: lahan garam yang difasilitasi dan sarana niaga garam rakyat yang diserahkan ke petani tambak garam dan IKM garam untuk meningkatkan pemberdayaan Masyarakat kecil dan pulau-pulau kecil. Peningkatan produktivitas garam rakyat, dengan output: pengadaan sarana dan prasarana produksi garam, pengembangan korporasi petambak garam.

Komoditas Unggulan Pengembangan Sentra Budidaya dan Hilirisasi Rumput Laut

Jaminan ketersediaan bahan baku industri rumput laut, dengan output: peningkatan kualitas bahan baku, kluster rumput laut berbasis kawasan yang dibangun masyarakat, pengembangan teknologi dan pembibitan. Hilirisasi, peningkatan rantai nilai, promosi dan penguatan sumber daya manusia, dengan output: fasilitasi investasi hilirisasi industri, penguatan kapasitas pembudidaya rumput laut, pengembangan pangan dan biostimulan berbasis rumput laut, dukungan pembiayaan, rekomendasi tata kelola bidang budi daya rumput laut, dan kewirausahaan pemuda, memperkuat koperasi rumput laut, pengembangan jaringan infrastruktur pengolahan di dekat sentra produksi rumput laut. Peningkatan kualitas dan ketersediaan bahan baku melalui peningkatan produktivitas budidaya rumput laut, dengan output: bibit rumput laut kultur jaringan yang disalurkan ke

masyarakat, Sarana budi daya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat, Infrastruktur Kawasan Budi Daya Rumput Laut – 'Ocean for Prosperity – Infrastructure for Sustainable Development. Pengembangan industri dan hilirisasi rumput laut, dengan output: pengembangan hilirisasi industri pengolahan hasil laut dan perikanan, fasilitasi pembiayaan dan investasi serta penelitian, pengembangan budidaya rumput spesies baru dan inovasi teknologi untuk diversifikasi produk rumput laut (karagenan, agar-agar, biostimulan, nutraseutikal, pakan ternak).

Komoditas Unggulan Pengembangan Sentra Akuakultur Khususnya Udang

Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat di Kabupaten Sumbawa, dengan output: benih udang, klaster kawasan revitalisasi tambak udang, sarana pengolahan hasil KP, sarana penyimpanan produk KP, dan sarana distribusi logistik produk KP. Pengembangan akuakultur komoditas udang, dengan output: breeding program induk unggul, penataan jaringan irigasi dan revitalisasi lahan tambak udang dengan prioritas tambak tradisional plus, pengerukan muara sungai yang mengalami sedimentasi, penyederhanaan perizinan lintas sektor, dan peningkatan mutu produk serta perluasan pasar ekspor.

Komoditas Unggulan Penyiapan Kawasan Prioritas Pengembangan Kelautan Dan Perikanan Pada Sentra Berbasis Perikanan Tangkap

Komoditas Unggulan Penyiapan Kawasan Prioritas Pengembangan Kelautan Dan Perikanan Pada Sentra Berbasis Perikanan Tangkap dengan strategi dan arah kebijakan untuk pengembangan kelembagaan dan sarana prasarana produksi perikanan tangkap serta kampung/sentra nelayan, dengan output: identifikasi potensi sosial budaya dan kelembagaan setiap lokasi untuk pengembangan sesuai karakter lokal; mendorong ownership nelayan pada asset dan lembaga yang telah dibentuk; (fasilitasi penguatan kelembagaan kelompok nelayan; penguatan pendanaan; dan integrasi program K/L terkait (a.l: Kementerian PUPR, Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM, Kementerian ESDM) sebagai percontohan dan potensi replikasi; kampung nelayan yang ditingkatkan fasilitasnya; alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu. Pembangunan industri pengolahan ikan, dengan output: Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI), sarana pengolahan hasil KP, sarana penyimpanan produk KP, sarana distribusi logistik produk KP.

Kawasan Swasembada Pangan, Air, Energi Kawasan Penguatan kemandirian daerah melalui pengembangan pangan lokal Sumbawa

Penguatan kemandirian daerah melalui pengembangan pangan local Sumbawa berbasis pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan, melalui :

1. Penguatan pascapanen pangan lokal, dengan output: sarana pengolahan hasil tanaman pangan dan pascapanen tanaman pangan, sertifikat produk tanaman pangan

2. Sertifikasi dan peredaran benih nabati, dengan output: sertifikat benih padi dan jagung, area penyaluran benih padi dan jagung
3. Pengembangan pangan lokal dan nabati, dengan output: optimasi/pengembangan lahan pertanian produktif, pembangunan jalan pertanian, pengembangan/rehabilitasi jaringan irigasi pertanian, pengembangan kawasan padi dan jagung, peningkatan kemandirian
4. Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat, dengan output: benih udang, klaster kawasan revitalisasi tambak udang, sarana pengolahan hasil KP, sarana penyimpanan produk KP, sarana distribusi
5. Pengembangan pangan hewani, dengan output: benih dan bibit ternak unggul, ternak ruminansia potong, sarana dan prasarana perbibitan ternak, sarana pasca panen/pengolahan/ pemasaran hasil peternakan, layanan kesehatan hewan
6. Penguatan pengolahan dan pemasaran produk ternak, dengan output: sarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, unit usaha yang dibina sertifikasi NKV
7. Pembangunan industri pakan ternak (bahan baku jagung dan sorgum), dengan output: jumlah produsen (individu) pakan/bahan pakan yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan, penjaminan mutu dan keamanan pakan.
8. Pengembangan koperasi sektor produksi, dengan output: Peningkatan peran dan kapasitas kelembagaan koperasi, dan pengembangan usaha koperasi.

Kawasan Afirmasi Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Berbasis Pariwisata Sembalun

Peningkatan produktivitas perdesaan, dengan output: fasilitasi pengembangan kewirausahaan dan promosi produk unggulan, pengembangan obyek wisata desa dan perdesaan, fasilitasi penguatan tata kelola destinasi di desa wisata. Pengembangan fasilitas pendukung perdesaan, dengan output: sarana prasarana perdagangan, pelayanan dasar, konektivitas transportasi desa dan perdesaan yang dibangun/dikembangkan. Penyediaan layanan dasar skala desa dan perdesaan (kesehatan, pendidikan, air minum, dan sanitasi). Peningkatan aksesibilitas desa (jalan, internet, dan telekomunikasi). Pengembangan dan diversifikasi ekonomi lokal. Pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi lokal (pariwisata, pertanian, dan lainnya). Peningkatan kapasitas tata kelola desa untuk mewujudkan transparansi dan digitalisasi desa.

Kawasan Perdesaan Prioritas Berbasis Pariwisata Sembalun

Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Berbasis Pariwisata Sembalun dilaksanakan dengan peningkatan produktivitas perdesaan, dengan output: fasilitasi pengembangan kewirausahaan dan promosi produk unggulan, pengembangan obyek wisata desa dan perdesaan, fasilitasi penguatan tata kelola destinasi di desa wisata. Pengembangan fasilitas pendukung perdesaan, dengan output: sarana prasarana perdagangan, pelayanan dasar, konektivitas transportasi desa dan perdesaan yang dibangun/dikembangkan.

Penyediaan layanan dasar skala desa dan perdesaan (kesehatan, pendidikan, air minum, dan sanitasi). Peningkatan aksesibilitas desa (jalan, internet, dan telekomunikasi). Pengembangan dan diversifikasi ekonomi lokal. Pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi lokal (pariwisata, pertanian, dan lainnya). Peningkatan kapasitas tata kelola desa untuk mewujudkan transparansi dan digitalisasi desa.Perluasan Layanan Penyiaran Digital.

Pengembangan Kawasan Transmigrasi Selaparang di Kab. Lombok Timur

Pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik, dengan output: pembangunan dan pengembangan jalan non-status, jembatan, sistem drainase, dan sarana permukiman. Pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi, dengan output: bantuan sarana produksi pertanian. Redistribusi aset (tanah) transmigrasi, dengan output: fasilitasi pengurusan sertifikat hak milik atas tanah transmigrasi. Penataan persebaran penduduk dan penyediaan tenaga terampil, dengan output: perpindahan dan penempatan. Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat. Pengembangan SDM digital dan digitalisasi masyarakat.Perluasan layanan penyiaran digital.

Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana Pengembangan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau- Pulau Kecil (KKPWP3K) di KKN Gili Matra

Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana Pengembangan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau- Pulau Kecil (KKPWP3K) di KKN Gili Matra dilaksanakan dengan pengelolaan KKPWP3K, dengan output: peningkatan sarana pengelolaan kawasan dan monitoring ekosistem, peningkatan kapasitas pemangku kepentingan pengelolaan kawasan, pemanfaatan data dalam pengelolaan kawasan, dan peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan.

Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana Pengelolaan Risiko Bencana Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi di Kota Mataram

Peningkatan upaya pencegahan, mitigasi dan resiliensi masyarakat terhadap bencana, dengan output: Peta Kawasan Rawan Bencana Gempabumi, Peralatan monitoring dampak akibat gempa bumi dengan peralatan intensitymeter dan accelerograph melalui Indonesia Disaster Resillience Initiatives Project (IDRIP), Peralatan monitoring gempa bumi dan tsunami melalui IDRIP, Layanan Informasi gempa bumi dan tsunami melalui Sekolah Lapang Gempabumi (SLG) Wilayah Timur. Retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan seismik.

Kawasan Lainnya Pengembangan Kawasan Pariwisata

Pengembangan infrastruktur dan konektivitas serta layanan transportasi, dengan output: jalan koridor logistik, jembatan koridor logistik, pembangunan, jembatan koridor logistik (backbone) dan perlengkapan jalan, rambu sungai dan danau. Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi tenaga listrik dan listrik pedesaan, dengan

output: pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T. Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, dengan output: lokasi yang memperoleh sinyal telekomunikasi bergerak seluler (base transceiver station/lastmile 4g) di wilayah pelayanan universal. Pengembangan sdm tik dan digitalisasi masyarakat, dengan output: fasilitator/enabler digital pmse yang dibina, pelaksanaan pemantauan/monitoring, bimtek pelaku usaha ppmse dan psp di bidang pmse dan masyarakat yang mendapatkan. Perluasan layanan penyiaran digital, dengan output: transmisi yang terbangun, pengadaan infrastruktur teknologi informatika dan media baru dan downtime siaran (tidak lebih dari 7 jam per bulan) yang terjadi.

Kawasan Lainnya Peningkatan Pengelolaan Ekosistem, Kawasan Konservasi Perairan dan Pesisir

Peningkatan ketahanan pesisir dan laut, dengan output: pengamanan pesisir 3 (Tiga) Gili di Kab. Lombok Utara, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Timur, Kab. Sumbawa, Kota Mataram, Kab. Dompu, Kab. Bima. Pemanfaatan sumber daya pulau-pulau kecil/terluar, dengan output: bantuan ekonomi produktif dan prasarana/infrastruktur di pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Pengembangan kawasan pesisir tangguh dan pengendalian pemanfaatan ruang laut, dengan output: sarana pendukung penyelenggaraan penataan ruang laut, rekomendasi kebijakan pengelolaan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut), rekomendasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang laut, pembangunan sistem monitoring dan pengendalian. Peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan, dengan output: kawasan konservasi perairan yang operasional (kumulatif), Oceans for Prosperity Project - LAUTRA, kerjasama, jejaring dan kemitraan konservasi ekosistem, sarana pendukung penyelenggaraan konservasi ekosistem.

Kawasan Lainnya Pengelolaan Risiko Bencana Banjir Dan Bencana Alam Lainnya Di Daerah Berisiko Tinggi Serta Pengelolaan Tampungan Air Serbaguna

Peningkatan infrastruktur berketahanan bencana, dengan output: pembangunan pengendalian banjir, Urban Flood Control System Improvement in Selected Cities, National Urban Flood Resilience Project (nufrep), operasi modifikasi cuaca untuk aksi dini bencana banjir/longsor. Penuntasan tindak lanjut pemanfaatan irigasi dan air baku dari Bendungan Bintang Bano dan Beringin Sila.

Pengembangan Sarana Dan Prasarana, Perluasan Akses Dan Bidang Pendidikan Serta Penguatan Sumber Daya Manusia Sesuai Kebutuhan DUDI Bidang Pariwisata, Pertanian, Peternakan, Dan Perikanan

Pengembangan sarana prasarana, perluasan akses pendidikan menengah/tinggi/vokasi sektor strategis, pengembangan bidang STEAM, dengan output: Rehabilitasi/renovasi, pembangunan/revitalisasi sarana dan prasarana, serta pembangunan gedung sekolah menengah/tinggi/vokasi. Penguatan sumber daya manusia dan peningkatan peran dalam industri yang berbasis sektor unggulan daerah, dengan output: layanan kerjasama nasional

dan internasional, sertifikasi profesi dan SDM, pelatihan/ sertifikasi/kompetensi vokasi bidang pertanian/perikanan/pariwisata/industri, pelatihan vokasi industri Upskilling dan Reskilling, kemitraan antara satuan pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri, inovasi model pembelajaran vokasi mengacu pada dunia kerja, satuan pendidikan yang selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia. Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah pada seluruh.

Peningkatan Kesehatan Dan Gizi Masyarakat, serta Pengendalian Penyakit

Penguatan intervensi spesifik stunting, dengan output: ibu hamil dan balita yang mendapat makanan tambahan dari buffer stock, tenaga kesehatan/ non-kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya, pendampingan kesehatan ibu hamil dan balita bermasalah gizi, pelatihan pencegahan stunting, penyediaan PMT bagi ibu hamil dan balita bermasalah gizi (weight faltering, underweight, gizi kurang), infrastruktur air minum berbasis masyarakat, dan keluarga yang mendapat...

Peningkatan upaya pencegahan TBC, pengendalian penyakit HIV/AIDS, malaria, dan kusta, dengan output: obat dan perbekalan kesehatan, tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian penyakit, masyarakat yang mendapatkan sosialisasi pencegahan dan pengendalian. Penguatan pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang didukung dengan penjaminan. Peningkatan gizi, dengan output: pelaksanaan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting terjadi serta pemberian tata laksananya, implementasi Program Gizi Seimbang dan Gerakan EMAS (Emak Emak dan Anak-Anak Minum Susu, serta Penambahan Vitamin).

Penguatan kapasitas ketahanan, pelayanan, dan tata kelola pelayanan kesehatan

Penyediaan dan penguatan pelayanan kesehatan bergerak dan digital, dengan output: pembinaan dan pendampingan pelaksanaan layanan kesehatan bergerak, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pelayanan kesehatan bergerak, penetapan fasyankes pelaksana pelayanan telemedisin, peningkatan RSUD tipe D menjadi C, dan penduduk penerima bantuan iuran (PBI) jaminan. Pengembangan layanan unggulan berbasis kompetensi, termasuk untuk menekan angka kematian ibu dan anak, dengan output: pelatihan layanan KJSU- KIA (Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi, dan Kesehatan Ibu dan Anak), peningkatan kompetensi RS dan alat kesehatan pelayanan KIA, fasilitasi pengelolaan manajemen proyek penguatan pelayanan KIA, pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan (SPA) dan pengampuan untuk pelayanan KJSU-KIA, fasilitasi dan pembinaan

Peningkatan produksi sumber daya manusia (SDM) kesehatan, dengan output: rekomendasi produksi dokter dan dokter spesialis, bantuan pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), bantuan program pendidikan SDM kesehatan, beasiswa dokter spesialis, penyusunan kebijakan pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan, pembinaan RS penyelenggara pendidikan utama, sarana kesehatan

penunjang PPDS dan subspesialis, dan bantuan biaya pendidikan program studi/profesi/spesialis/subspesialis dengan.

Pengembangan dan peningkatan pelabuhan/bandara serta sarana dan prasarana transportasi laut/udara dan penyebrangan untuk penumpang dan logistik untuk mendukung kawasan strategis

Pembangunan dan penguatan pelabuhan serta infrastruktur konektivitas penunjang logistik, dengan output: pembangunan fasilitas pelabuhan laut Kilo (MYC 2025-2026), Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Bima, Pelabuhan Calabai dan Sape serta pelabuhan lainnya. Penyediaan PSO dan layanan nonkomersil serta muatan barang angkutan laut tetap dan teratur, dengan output: layanan angkutan laut perintis prioritas nasional, layanan angkutan tol laut prioritas nasional, layanan angkutan ternak prioritas nasional, layanan angkutan rede prioritas nasional, layanan angkutan lebaran, natal dan tahun baru.

Penyediaan Air Minum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Serta Peremajaan Kota (Urban Renewal) Secara Inklusif Dan Terpadu

Penanganan permukiman kumuh terpadu, dengan output: pemugaran permukiman kumuh, peremajaan permukiman kumuh, pemukiman kembali permukiman kumuh, bantuan PSU bidang. Pengembangan fasilitasi pembiayaan perumahan, dengan output: pembiayaan rumah swadaya dan pembiayaan mikro perumahan, fasilitasi penyaluran bantuan pembiayaan perumahan. Pengembangan dan pengelolaan SPAM, dengan output: pembangunan SPAM Kab/Kota, pembangunan SPAM regional, peningkatan SPAM Kab/Kota, peningkatan SPAM regional, perluasan SPAM. Pengawasan kualitas air minum, dengan output: infrastruktur air minum berbasis masyarakat, tenaga terlatih pengawasan kualitas air minum, daerah yang menerapkan kebijakan tata kelola air minum, sanitasi, perumahan dan kawasan. Percepatan pemenuhan akses sanitasi aman untuk berkelanjutan, dan berketahanan iklim masyarakat, dengan output: sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala regional, skala kota, skala permukiman, dan berbasis masyarakat, serta sistem pengelolaan air limbah domestik setempat skala kota. Penerapan ekonomi sirkular secara partisipatif, dengan output: fasilitas pengelolaan dan pengolahan sampah berbasis 3R, pemanfaatan teknologi recycling plastik daur ulang, pembangunan dan pembinaan bank sampah induk dan masyarakat pengelola

Peningkatan Infrastruktur Energi Listrik Serta Penguatan Implementasi Energi Listrik Dan Transisi Energi Listrik

Pengembangan ekosistem pendukung energi bersih, dengan output: percepatan pelaksanaan kegiatan penyimpanan karbon, monitoring tingkat komponen dalam negeri bidang aneka energi baru dan terbarukan. Pembangunan jaringan transmisi dan interkoneksi tenaga listrik, dengan output: pengendalian pembangunan jaringan transmisi dan gardu induk, pengawasan dan pengendalian efisiensi penyediaan tenaga listrik. Pembangunan infrastruktur pembangkit listrik, infrastruktur jaringan transmisi, dan infrastruktur distribusi tenaga listrik, dengan output: pengawasan dan evaluasi kegiatan

pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, pembangkit listrik tenaga mikro hidro (pltmh), pembangkit listrik tenaga surya (plts), pembangkit listrik tenaga mini hidro (pltm) dan pembangkit listrik tenaga. Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat. Pengembangan sdm tik dan digitalisasi masyarakat. Perluasan layanan penyiaran digital. Perluasan cakupan layanan

Pengentasan kemiskinan dengan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), penyaluran bantuan sosial adaptif, serta pemberdayaan masyarakat

Peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan output: bantuan kelompok usaha ekonomi masyarakat, TKM pemula tematik, dan pelaku usaha yang mendapat akses pembiayaan. Penguatan pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dengan output: pengelolaan layanan pusat kesejahteraan sosial, data terpadu kesejahteraan sosial, mustahiq yang diselaraskan datanya, dan aparatur yang mengikuti pengembangan perencanaan dan standar pelayanan minimal (SPM). Penguatan kewirausahaan afirmatif untuk kemandirian masyarakat, dengan output: peningkatan kapasitas pelaku usaha, pendampingan usaha keluarga penerima manfaat (KPM) kewirausahaan sosial, tenaga kerja mandiri (TKM) pemula, pelaku usaha yang mendapat akses pembiayaan, dan bantuan alat, dan sarana prasarana. Penyaluran bantuan sosial yang adaptif, dengan output: penerima bantuan iuran PBI JKN, keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat, mahasiswa yang mendapat Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah, KPM yang memperoleh bantuan sosial sembako, penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran, subsidi listrik, dan bantuan logistik korban bencana alam.

Bentuk intervensi pemerintah daerah dalam rangka mendukung arah pengembangan kewilayahan untuk Provinsi NTB dalam RPJMN Tahun 2025-2029 sebagaimana dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3. 14 Dukungan Provinsi NTB untuk Indikasi Lokasi Prioritas RPJMN Tahun 2025-2029

NO	KAWASAN	SUB KAWASAN	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	ARAH KEWILAYAHAN 2025-2029	LOKASI PRIORITAS
1	2	3	4	5	6	7
Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN 2025-2029						
1	Pertumbuhan	Pariwisata	Gili-Tramena	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Sub Kegiatan Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi dan/atau Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi	kawasan strategis pariwisata provinsi di pulau lombok dan pulau sumbawa
				Sub Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	KSP Samota dan KSP teluk Bima
				Sub Kegiatan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Sub Kegiatan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Sub Kegiatan Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Kawasan Mataram Raya - Gili Tramena dan Sekitarnya di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Perairan Kawasan Kayangan, Perairan Kawasan Gili Indah, dan Perairan Kawasan Lembar, Kawasan Industri Sumbawa Barat dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa Barat dan Perairan Kawasan Maluk, Kawasan Agribisnis Poto Tano - Alas - Utan dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Perairan Kawasan Maluk, dan Perairan Kawasan Alas, Kawasan Teluk Saleh - Moyo - Tambora (SAMOTA) dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Perairan Kawasan Pantura Sumbawa, Perairan Kawasan Laut Flores

NO	KAWASAN	SUB KAWASAN	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	ARAH KEWILAYAHAN 2025-2029	LOKASI PRIORITAS
						Dompu, dan Perairan Kawasan Teluk Saleh, Kawasan Teluk Cempi - Hu'u dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Perairan Kawasan Teluk Cempi, Perairan Kawasan Samudera Hindia Sumba Dompu, dan Perairan Kawasan Samudera
				Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi		
				Sub Kegiatan Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		
				Sub Kegiatan Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi dan/atau Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi		
				Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		
				Sub Kegiatan Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		
				Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		
				Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan		

NO	KAWASAN	SUB KAWASAN	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	ARAH KEWILAYAHAN 2025-2029	LOKASI PRIORITAS
				Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota		
				Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut		
				Sub Kegiatan Perencanaan, Pengembangan Prasarana, Kawasan, dan Komoditas Pertanian		
				Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan, dan Komoditas Pertanian		
		Perkotaan	Kawasan Perkotaan sedang Kota Mataram	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi Serta Pasar Lelang Komoditas	Kawasan Perkotaan Mataram Raya di Kota Mataram yang mencakup Kota Mataram dan Sebagian Kabupaten Lombok Barat
					Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Kawasan Perkotaan Mataram Raya di Kota Mataram yang mencakup Kota Mataram dan Sebagian Kabupaten Lombok Barat
					Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Kawasan Perkotaan Mataram Raya di Kota Mataram yang mencakup Kota Mataram dan Sebagian Kabupaten Lombok Barat
					Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus	Kawasan Perkotaan Mataram Raya di Kota Mataram yang mencakup Kota Mataram dan Sebagian Kabupaten Lombok Barat

NO	KAWASAN	SUB KAWASAN	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	ARAH KEWILAYAHAN 2025-2029	LOKASI PRIORITAS
					Kawasan Perkotaan Mataram Raya di Kabupaten Lombok Barat	Kawasan Perkotaan Mataram Raya di Kota Mataram yang mencakup Kota Mataram dan Sebagian Kabupaten Lombok Barat
					Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi Serta Pasar Lelang Komoditas	Kawasan Perkotaan Mataram Raya di Kota Mataram yang mencakup Kota Mataram dan Sebagian Kabupaten Lombok Barat
		Industri/Pertumbuhan	KI Sumbawa Barat	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Kawasan Industri Sumbawa Barat dan Sekitarnya di Perairan Kawasan Maluk
					Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kawasan Industri Sumbawa Barat dan Sekitarnya di Perairan Kawasan Maluk
				Sub Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Kawasan Industri Sumbawa Barat dan Sekitarnya di Perairan Kawasan Maluk
				Sub Kegiatan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Sub Kegiatan Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kawasan Industri Sumbawa Barat dan Sekitarnya di Perairan Kawasan Maluk
				Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan	Sub Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan Lintas	Kawasan Industri Sumbawa Barat dan Sekitarnya di Perairan Kawasan Maluk

NO	KAWASAN	SUB KAWASAN	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	ARAH KEWILAYAHAN 2025-2029	LOKASI PRIORITAS
				Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
				Sub Kegiatan Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Kawasan Industri Sumbawa Barat dan Sekitarnya di Perairan Kawasan Maluk
				Sub Kegiatan Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi dan/atau Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi	Sub Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kawasan Industri Sumbawa Barat dan Sekitarnya di Perairan Kawasan Maluk
				Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Kawasan Industri Sumbawa Barat dan Sekitarnya di Perairan Kawasan Maluk
				Sub Kegiatan Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Kawasan Industri Sumbawa Barat dan Sekitarnya di Perairan Kawasan Maluk
				Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran, dan Perwilayahan Industri	Kawasan Industri Sumbawa Barat dan Sekitarnya di Perairan Kawasan Maluk
				Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kawasan Industri Sumbawa Barat dan Sekitarnya di Perairan Kawasan Maluk

NO	KAWASAN	SUB KAWASAN	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	ARAH KEWILAYAHAN 2025-2029	LOKASI PRIORITAS
				Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kawasan Industri Sumbawa Barat dan Sekitarnya di Perairan Kawasan Maluk
				Sub Kegiatan Perencanaan, Pengembangan Prasarana, Kawasan, dan Komoditas Pertanian	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil	Kawasan Industri Sumbawa Barat dan Sekitarnya di Perairan Kawasan Maluk
				Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan, dan Komoditas Pertanian	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah	Kawasan Industri Sumbawa Barat dan Sekitarnya di Perairan Kawasan Maluk
					Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah	Kawasan Industri Sumbawa Barat dan Sekitarnya di Perairan Kawasan Maluk
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Kawasan Industri Sumbawa Barat dan Sekitarnya di Perairan Kawasan Maluk
					Sub Kegiatan Untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan	Kawasan Industri Sumbawa Barat dan Sekitarnya di Perairan Kawasan Maluk

NO	KAWASAN	SUB KAWASAN	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	ARAH KEWILAYAHAN 2025-2029	LOKASI PRIORITAS
					Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	
					Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang Sama	Kawasan Industri Sumbawa Barat dan Sekitarnya di Perairan Kawasan Maluk
					Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	Kawasan Industri Sumbawa Barat dan Sekitarnya di Perairan Kawasan Maluk
					Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	Kawasan Industri Sumbawa Barat dan Sekitarnya di Perairan Kawasan Maluk
		Kawasan Perairan dan Perikanan	NTB-Rumput Laut,Lombok Timur, Sumbawa, BimaLombok Timur, Sumbawa, Bima	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Kawasan Mataram Raya - Gili Tramena dan Sekitarnya di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Perairan Kawasan Kayangan, Perairan Kawasan Gili Indah, dan Perairan Kawasan Lembar, Kawasan Industri Sumbawa Barat dan Sekitarnya di Kabup, Kawasan Kuta Mandalika dan Sekitarnya di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Perairan Kawasan Lembar, Perairan Kawasan Teluk Sepi, Perairan Kawasan Kuta, Perairan Kawasan Teluk Ekas, dan Perairan Kawasan

NO	KAWASAN	SUB KAWASAN	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	ARAH KEWILAYAHAN 2025-2029	LOKASI PRIORITAS
						Samudera Hindia Lombok, Kawasan Industri Sumbawa Barat dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa Barat dan Perairan Kawasan Maluk
3	Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi	Kawasan Sentra Tanaman Pangan (KSPP)	NTB-Swasembada Pangan, Lombok Timur, Sumbawa, dompu, Bima	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Sub Kegiatan Perencanaan, Pengembangan Prasarana, Kawasan, dan Komoditas Pertanian	8 KSP pendekatan ekonomi
				Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan, dan Komoditas Pertanian	8 KSP pendekatan ekonomi
				Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi		
4	Kawasan afirmasi	Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP)	Kawasan Sembalun, lombok timur		Pelebaran Jalan Menuju Standar, Rehabilitasi Jalan, Rekonstruksi Jalan, Pemeliharaan Berkala Jalan, Pemeliharaan Rutin Jalan, dan/atau Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kolektor Primer 3 (JKP-3)	Lombok timur
		Kawasan Transmigrasi (KT)	Kawasan Transmigrasi Selaparang, Lombok Timur		Sub Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Lombok timur
					Terminal Pringgabaya di Kabupaten Lombok Timur	Lombok timur
					Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan, Pemeliharaan Rutin Jembatan, dan/atau Pemeliharaan Jembatan	Lombok timur

NO	KAWASAN	SUB KAWASAN	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	ARAH KEWILAYAHAN 2025-2029	LOKASI PRIORITAS
					Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antardaerah Kab/Kota dalam Daerah Provinsi	Lombok timur
					a. Pengembangan Angkutan Perairan Pelabuhan pada Pelabuhan Penyeberangan Kelas I	Lombok timur
					Sub Kegiatan Pembangunan Terminal Khusus	Lombok timur
					Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Lombok timur
5	Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana	Kawasan Konservasi	Kawasan Konservasi Nasional Gilli Matra-lombok Utara		diatur secara khusus	seluruh kota/kabupaten di NTB
		Kawasan rawan Bencana	Kota Mataram		diatur secara khusus	seluruh kota/kabupaten di NTB
6	Pendidikan	Pemerataan dan Peningkatan akses kualitas dan pelayanan pendidikan dasar dan menengah	10kab/kota	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Perkotaan Gerung di Kabupaten Lombok Barat, Perkotaan Lembar di Kabupaten Lombok Barat, Perkotaan Tanjung di Kabupaten Lombok Utara, Perkotaan Kayangan di Kabupaten Lombok Utara, Perkotaan Kopang di Kabupaten Lombok Tengah, Perkotaan Sengkol di Kabupaten Lombok Tengah, Perkotaan Keruak di Kabupaten Lombok Timur, Perkotaan Labuhan Lombok di Kabupaten Lombok Timur, Perkotaan

NO	KAWASAN	SUB KAWASAN	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	ARAH KEWILAYAHAN 2025-2029	LOKASI PRIORITAS
						Taliwang di Kabupaten Sumbawa Barat, Perkotaan Poto Tano di Kabupaten Sumbawa Bara, Perkotaan Maluk di Kabupaten Sumbawa Barat, Perkotaan Alas di Kabupaten Sumbawa, Perkotaan Lunyuk di Kabupaten Sumbawa, Perkotaan Plampang di Kabupaten Sumbawa, Perkotaan Kempo di Kabupaten Dompu, Perkotaan Hu'u di Kabupaten Dompu, Perkotaan Woha di Kabupaten Bima, Perkotaan Sape di Kabupaten Bima, Perkotaan Kore di Kabupaten Bima,
				Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah	Perkotaan Gerung di Kabupaten Lombok Barat, Perkotaan Lembar di Kabupaten Lombok Barat, Perkotaan Tanjung di Kabupaten Lombok Utara, Perkotaan Kayangan di Kabupaten Lombok Utara
				Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah	Sub Kegiatan Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) dan/atau Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah	Perkotaan Gerung di Kabupaten Lombok Barat, Perkotaan Lembar di Kabupaten Lombok Barat, Perkotaan Tanjung di Kabupaten Lombok Utara, Perkotaan Kayangan di Kabupaten Lombok Utara, Perkotaan Kopang di Kabupaten Lombok Tengah, Perkotaan Sengkol di Kabupaten Lombok Tengah, Perkotaan Keruak di Kabupaten Lombok Timur, Perkotaan Labuhan Lombok di Kabupaten Lombok Timur, Perkotaan

NO	KAWASAN	SUB KAWASAN	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	ARAH KEWILAYAHAN 2025-2029	LOKASI PRIORITAS
						Taliwang di Kabupaten Sumbawa Barat, Perkotaan Poto Tano di Kabupaten Sumbawa Bara, Perkotaan Maluk di Kabupaten Sumbawa Barat
				Sub Kegiatan Pembangunan Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/ Akademi Berupa Pembangunan Kampus IAIN	Sub Kegiatan Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) dan/atau Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah	Perkotaan Gerung di Kabupaten Lombok Barat, Perkotaan Tanjung di Kabupaten Lombok Utara, Perkotaan Selong di Kabupaten Lombok Timur, Perkotaan Taliwang di Kabupaten Sumbawa Barat, Perkotaan Dompu di Kabupaten Dompu, Perkotaan Woha di Kabupaten Bima
				Rehabilitasi Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/ Akademi	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah	Perkotaan Gerung di Kabupaten Lombok Barat, Perkotaan Tanjung di Kabupaten Lombok Utara, Perkotaan Selong di Kabupaten Lombok Timur, Perkotaan Taliwang di Kabupaten Sumbawa Barat, Perkotaan Selong di Kabupaten Lombok Timur, Perkotaan Taliwang di Kabupaten Sumbawa Barat, Perkotaan Dompu di Kabupaten Dompu, Perkotaan Woha di Kabupaten Bima
					Sub Kegiatan Rehabilitasi Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/ Akademi	Perkotaan Gerung di Kabupaten Lombok Barat, Perkotaan Tanjung di Kabupaten Lombok Utara, Perkotaan Selong di Kabupaten Lombok Timur, Perkotaan Taliwang di Kabupaten Sumbawa Barat, Perkotaan Dompu di Kabupaten

NO	KAWASAN	SUB KAWASAN	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	ARAH KEWILAYAHAN 2025-2029	LOKASI PRIORITAS
						Dompu, Perkotaan Woha di Kabupaten Bima
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Perkotaan Gerung di Kabupaten Lombok Barat
7	Kesehatan	Pemerataan dan Peningkatan akses kualitas dan pelayanan kesehatan	Lombok Barat	Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit dan/atau Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit dan/atau Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Perkotaan Sengkol di Kabupaten Lombok Tengah
				Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit dan/atau Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit dan/atau Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Perkotaan Sengkol di Kabupaten Lombok Tengah
				Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Provinsi	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Provinsi	Perkotaan Gerung di Kabupaten Lombok Barat, Perkotaan Tanjung di Kabupaten Lombok Utara, Perkotaan Tanjung di Kabupaten Lombok Utara, Perkotaan Selong di Kabupaten Lombok Timur, Perkotaan Taliwang di Kabupaten Sumbawa Barat, Perkotaan Dompu di Kabupaten Dompu, Perkotaan Woha di Kabupaten Bima

Sumber : Bappeda NTB, 2025 (Data diolah)

Tabel 3. 15 Proyek Strategis Nasional

No	Proyek Strategis Nasional (PSN)	Lokasi	Pelaksana	Skema Pendanaan	Cluster
1	Program Hilirisasi Sagu, Singkong, Ubi Jalar Proyek: (i) Penguatan Penyediaan Bahan Baku Hilirisasi Tepung Sagu dan Singkong; (ii) Pengembangan Industri Sagu	Papua, Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara Timur, NTB	Kementerian Pertanian, Swasta	APBN, APBD, Swasta, Lainnya, BUMN, KPBU	Hilirisasi, Industrialisasi dan Transformasi Digital
2	Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut	Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Timur, NTB, Kalimantan Utara, Kalimantan	Swasta	BUMN, Swasta	Hilirisasi, Industrialisasi dan Transformasi Digital
3	Program Hilirisasi Nikel, Timah Bauksit, Tembaga	Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, NTB	PT MIND ID, Swasta	BUMN, Swasta	Hilirisasi, Industrialisasi dan Transformasi Digita

Sumber : Perpres No. 12 Tahun 2025

Proyek Strategis Nasional yang diatur dalam Perpres No. 12 Tahun 2025 dalam dokumen RPJMN memuat 77 proyek strategis nasional. Dari 77 proyek tersebut, terdapat 3 PSN yang lokasinya berada di Provinsi NTB (NTB). Semua PSN diarahkan untuk mendukung perkembangan komoditas unggulan pada enam komoditas utama, ditambah sektor pertambangan dan kehutanan. Arah kewilayahan NTB fokus pada ketahanan pangan, perikanan kelautan, dan peternakan.

Sebaran Lokasi Prioritas akan dijelaskan pada peta dibawah ini

Gambar 3. 15 Peta Sebaran Kelapa di Provinsi NTB

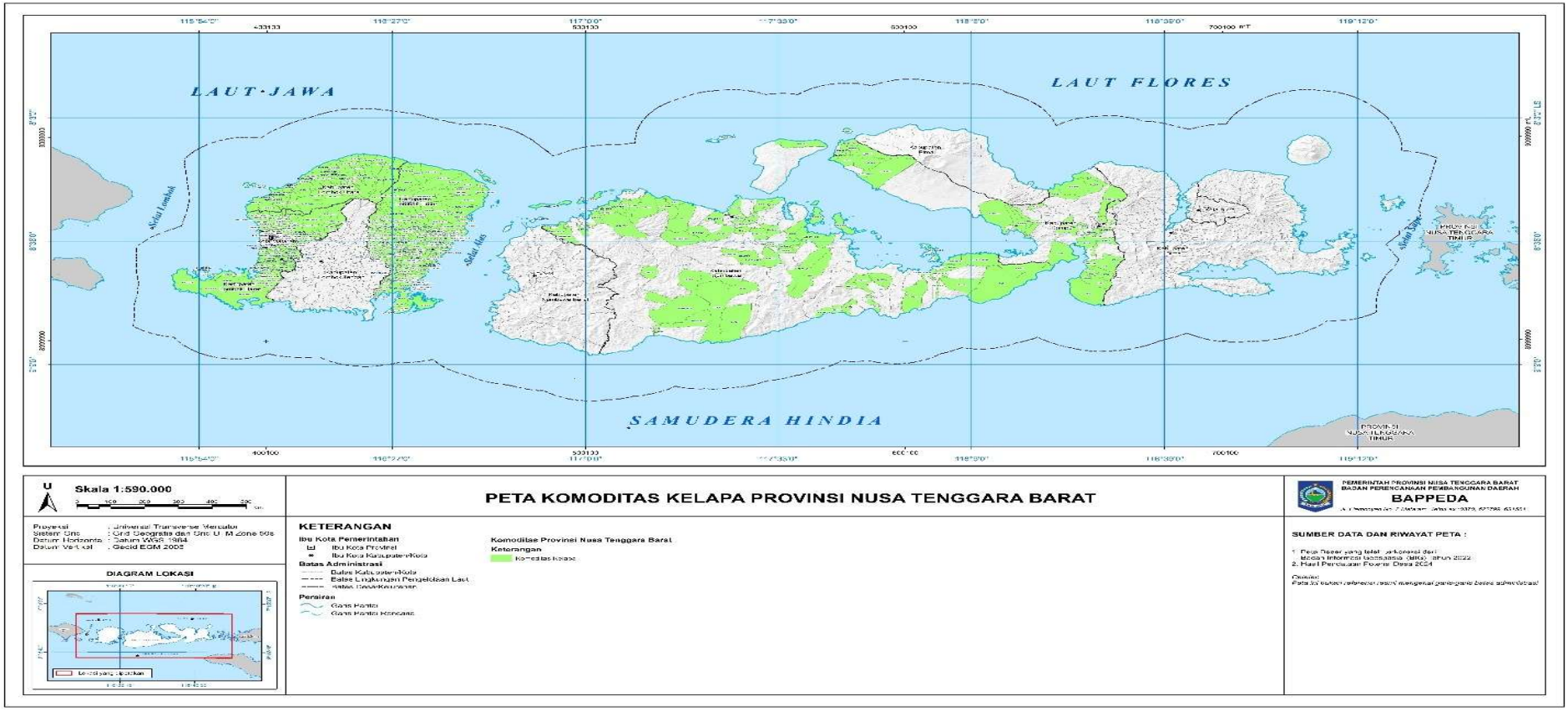

Sumber : Bappeda NTB, 2025 (Data diolah)

Gambar 3. 16 Peta Sebaran Rumput Laut di Provinsi NTB

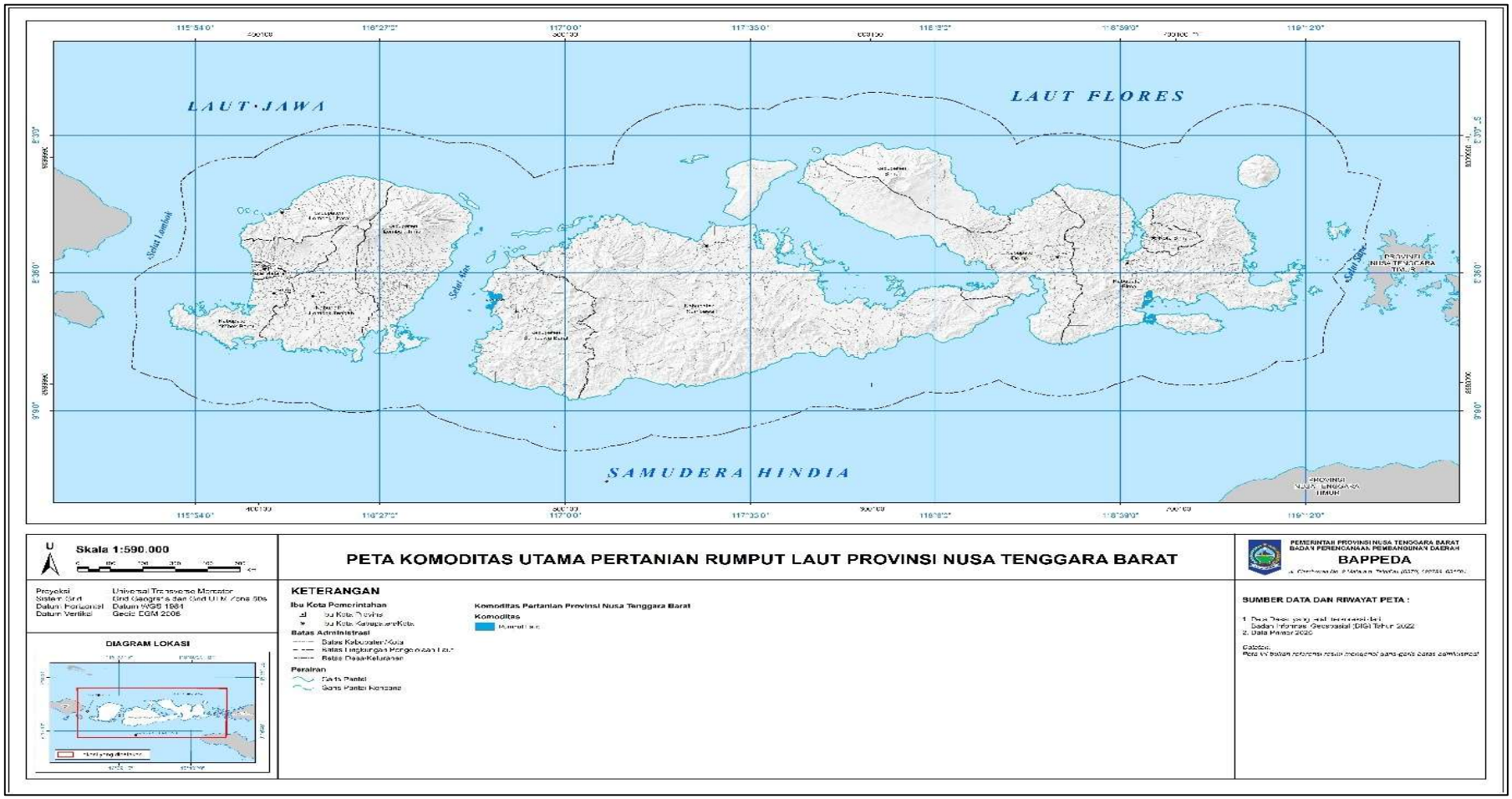

Sumber : Bappeda NTB, 2025 (Data diolah)

Gambar 3. 17 Peta Tembaga di Provinsi NTB

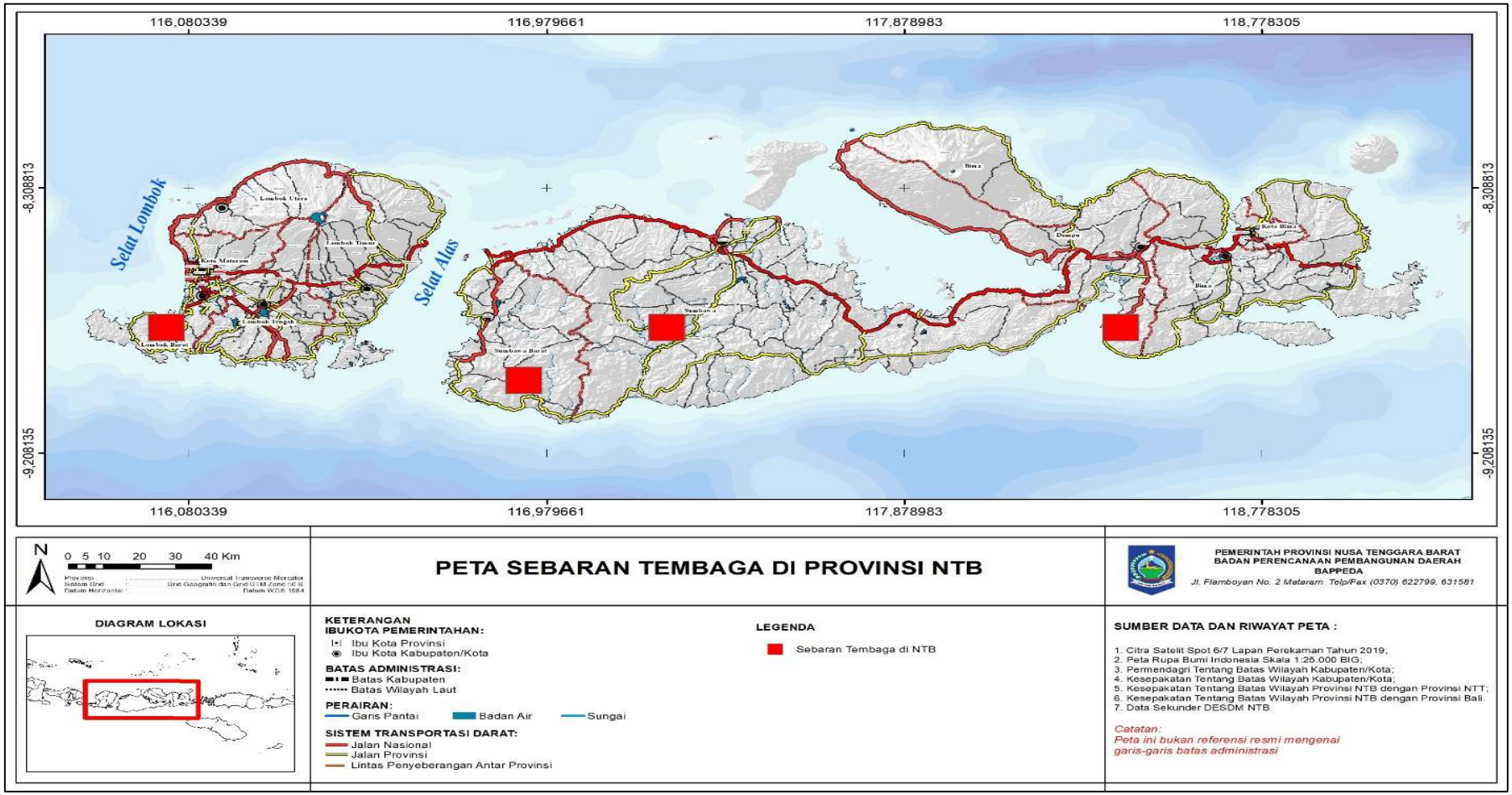

Sumber : Bappeda NTB, 2025 (Data diolah)

Arah pengembangan kewilayahan provinsi NTB tertuang dalam rencana tata ruang provinsi NTB yang diatur berdasarkan pendekatan pengembangan dengan fokus pada konektivitas wilayah untuk pemerataan, pengurangan resiko bencana, pemulihan dan pelestarian kawasan lindung, pemanfaatan kegiatan budidaya didarat dan dilaut secara selektif dan ramah lingkungan, koordinasi dan kerjasama antar wilayah

Gambar 3. 18 Peta Kawasan Strategis Provinsi (KSP)

Gambar 3. 19 Peta Pola Ruang Wilayah Provinsi NTB

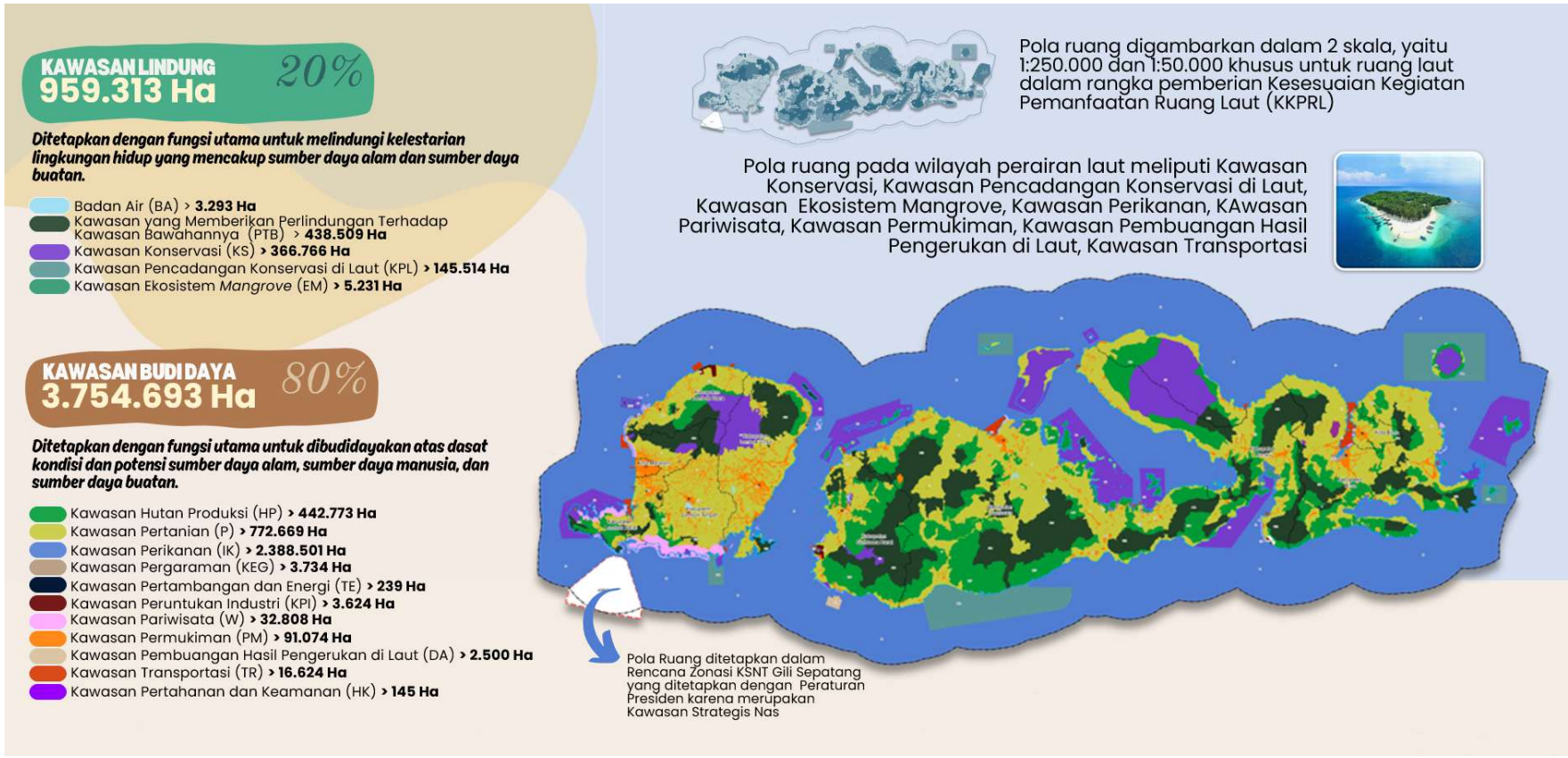

Gambar 3. 20 Peta Pola Ruang Wilayah Provinsi NTB Kawasan yang memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya

Gambar 3. 21 Peta Pola Ruang Wilayah Provinsi NTB Kawasan Hutan Produksi

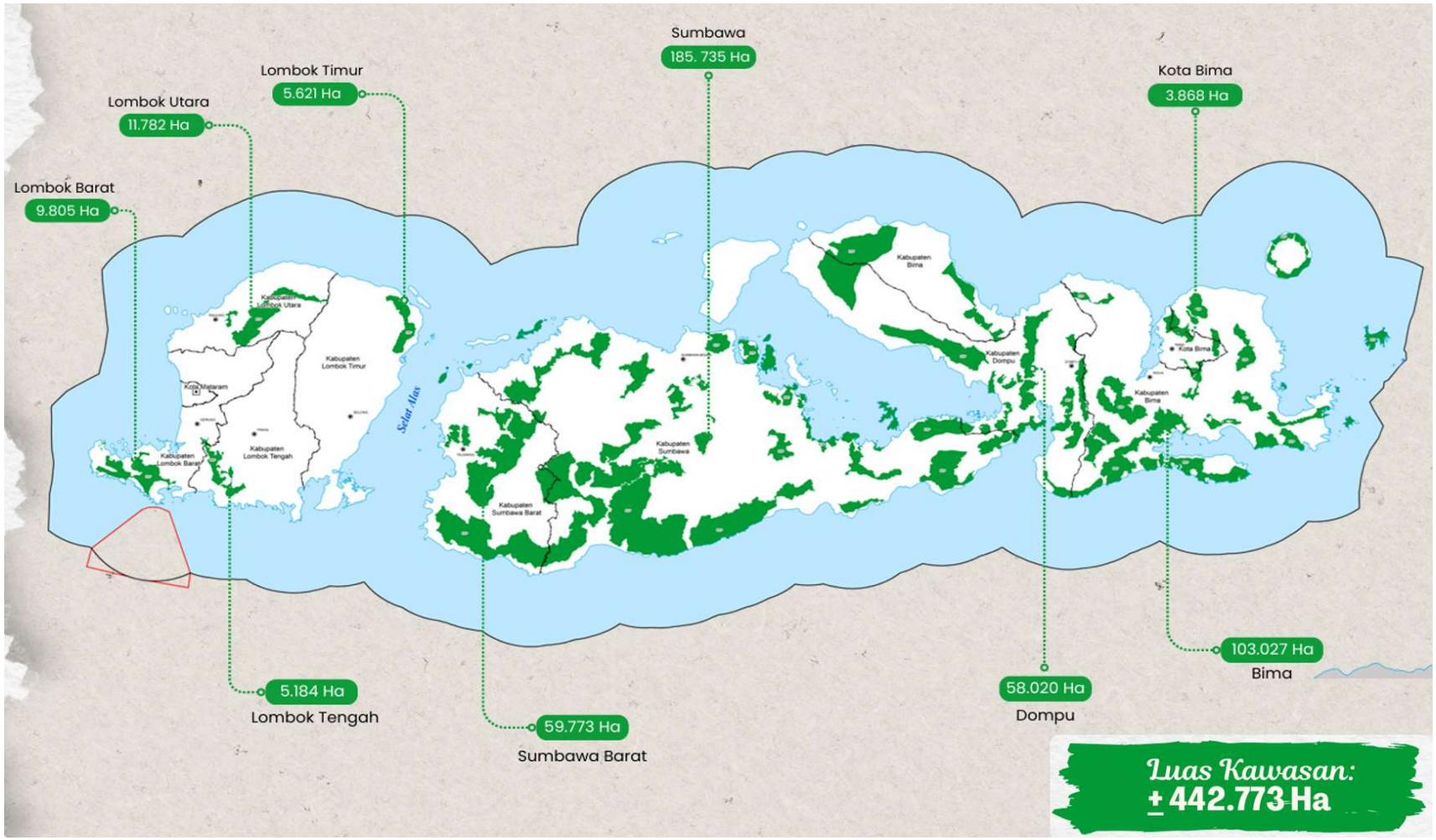

Gambar 3. 22 Peta Pola Ruang Wilayah Provinsi NTB Kawasan Konservasi

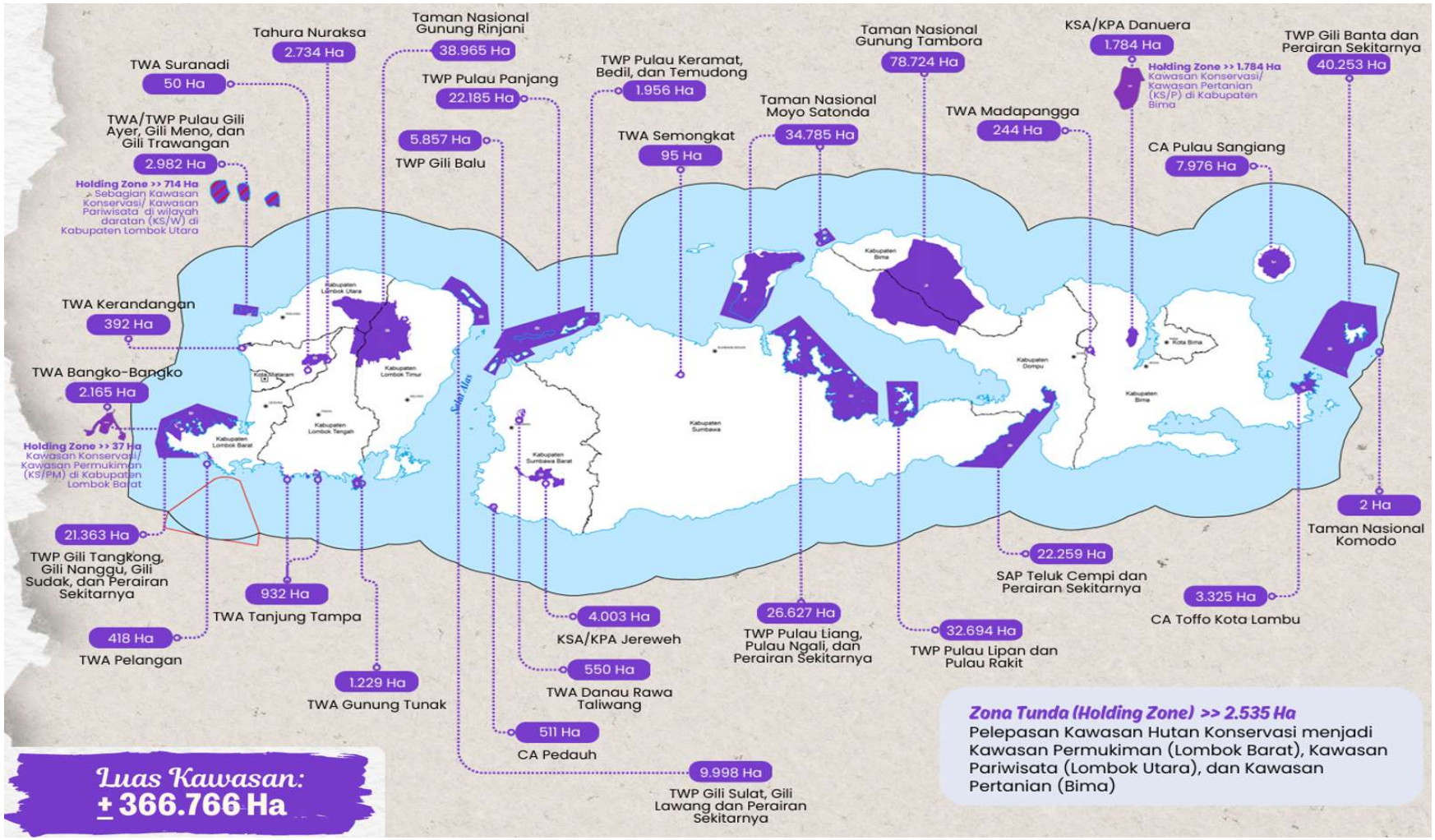

Gambar 3. 23 Peta Pola Ruang Wilayah Provinsi NTB Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut

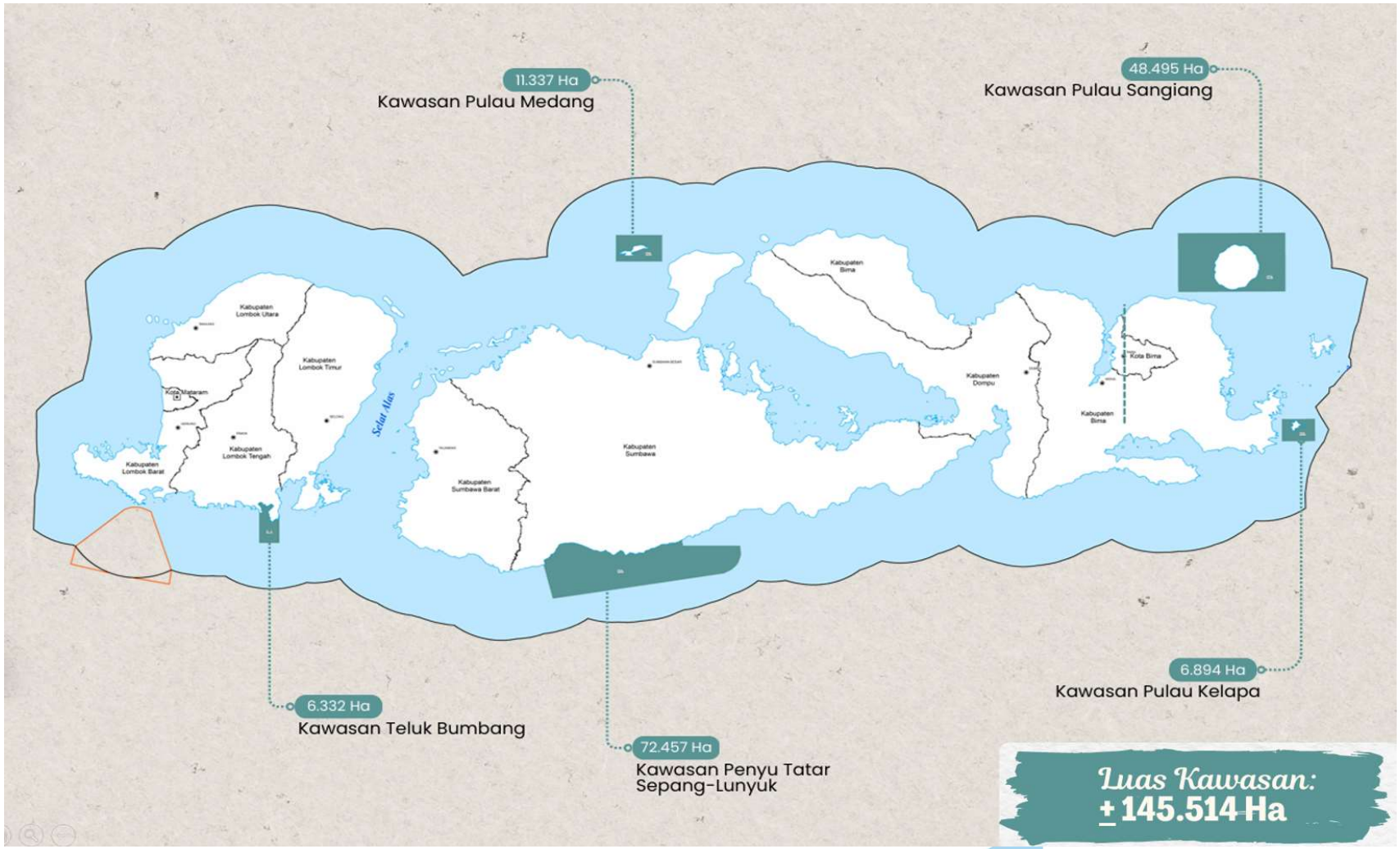

Gambar 3. 24 Peta Pola Ruang Wilayah Provinsi NTB Kawasan Ekosistem Mangrove

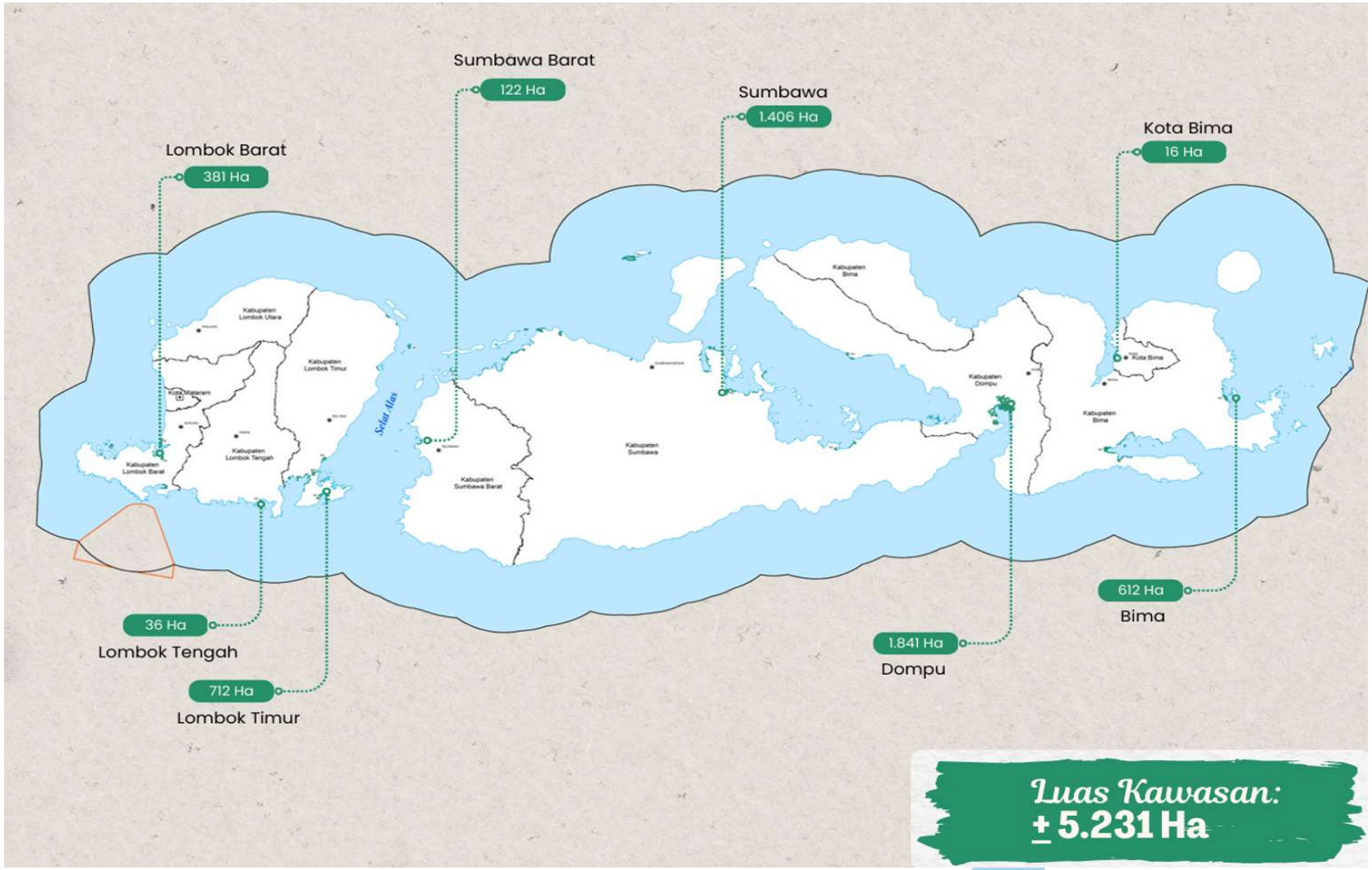

Gambar 3. 25 Peta Pola Ruang Wilayah Provinsi NTB Kawasan Pertanian

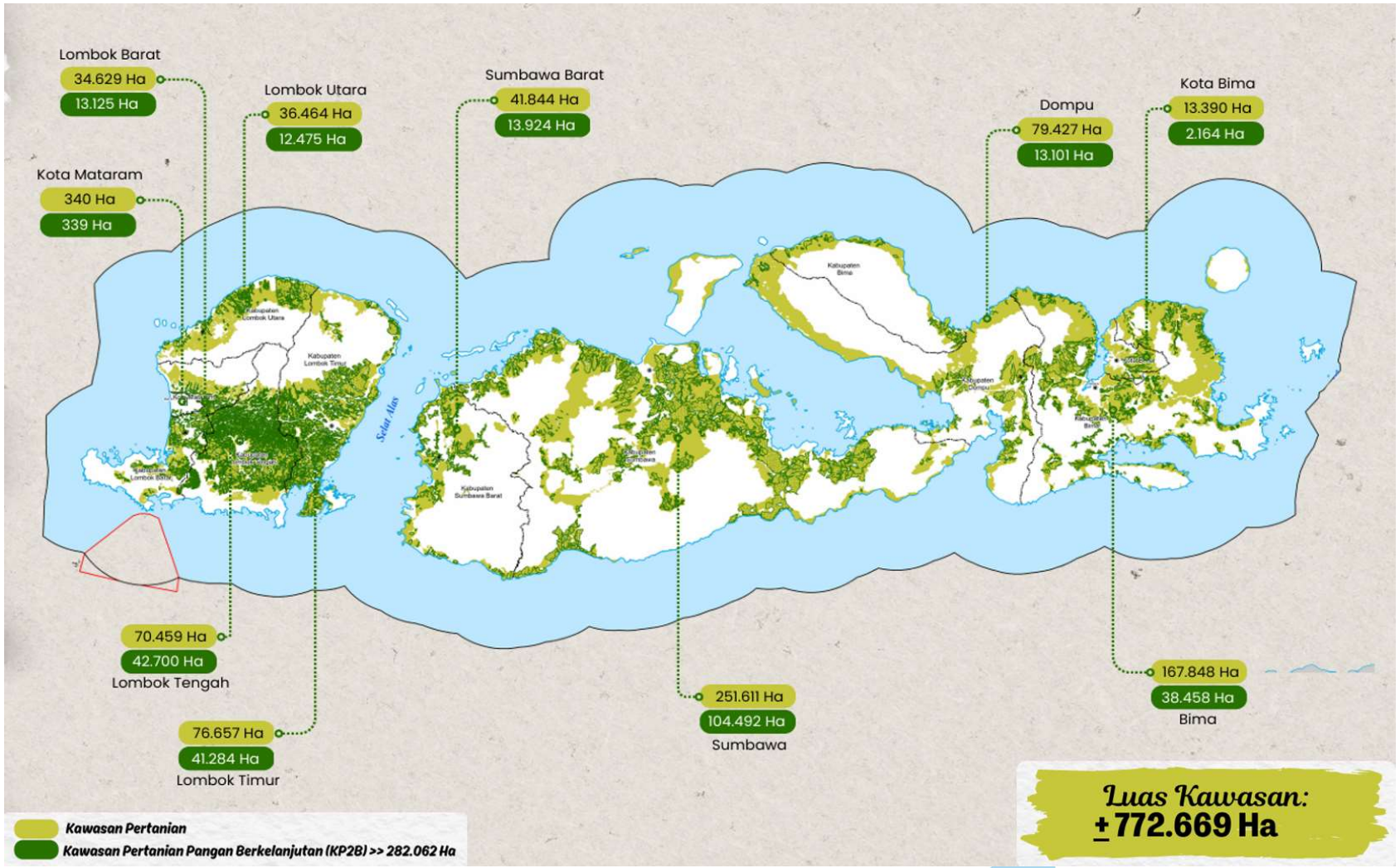

Gambar 3. 26 Peta Pola Ruang Wilayah Provinsi NTB Kawasan Perikanan

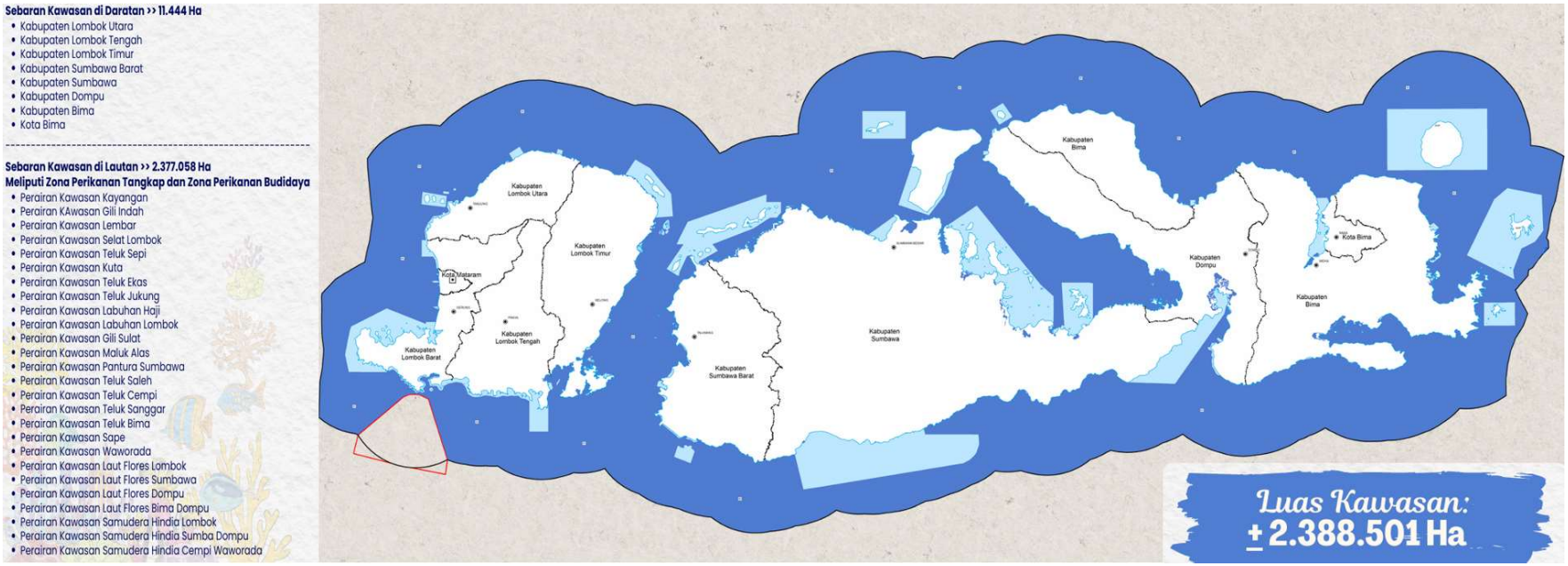

Gambar 3. 27 Peta Pola Ruang Wilayah Provinsi NTB Kawasan Pergaraman

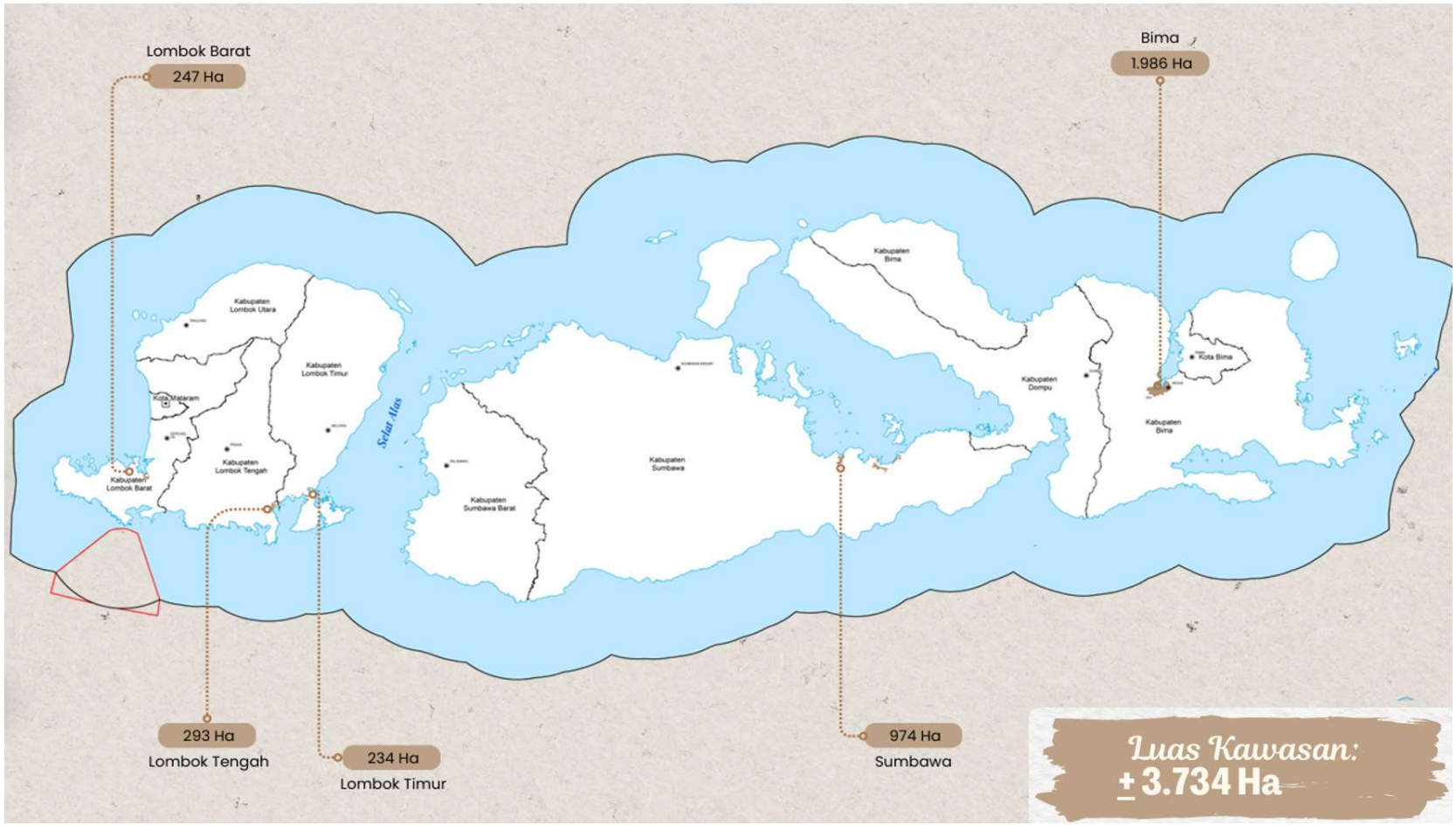

Gambar 3. 28 Peta Pola Ruang Wilayah Provinsi NTB Kawasan Pertambangan dan Energi

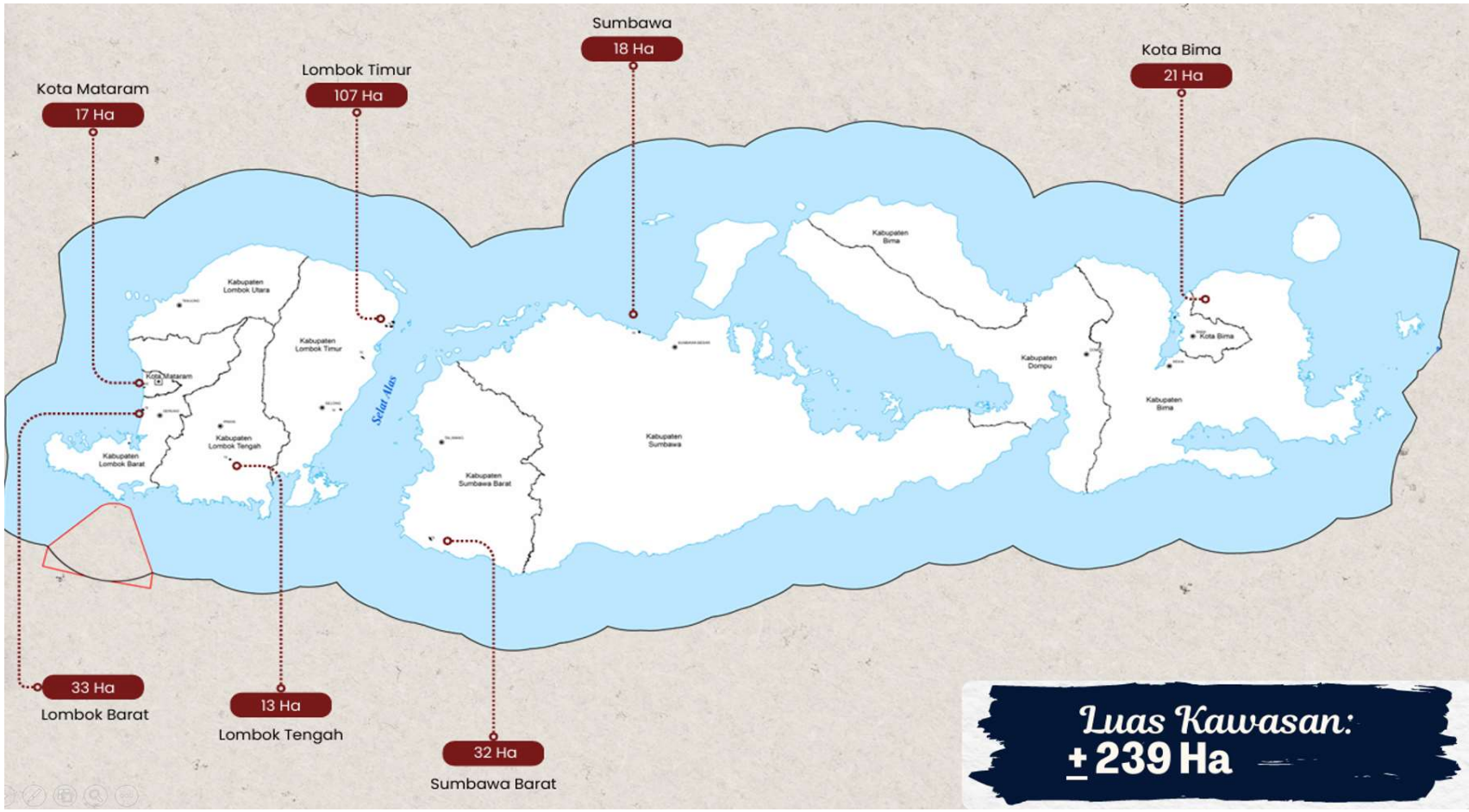

Gambar 3. 29 Peta Pola Ruang Wilayah Provinsi NTB Kawasan Peruntukan Industri

Gambar 3. 30 Peta Pola Ruang Wilayah Provinsi NTB Kawasan Pariwisata

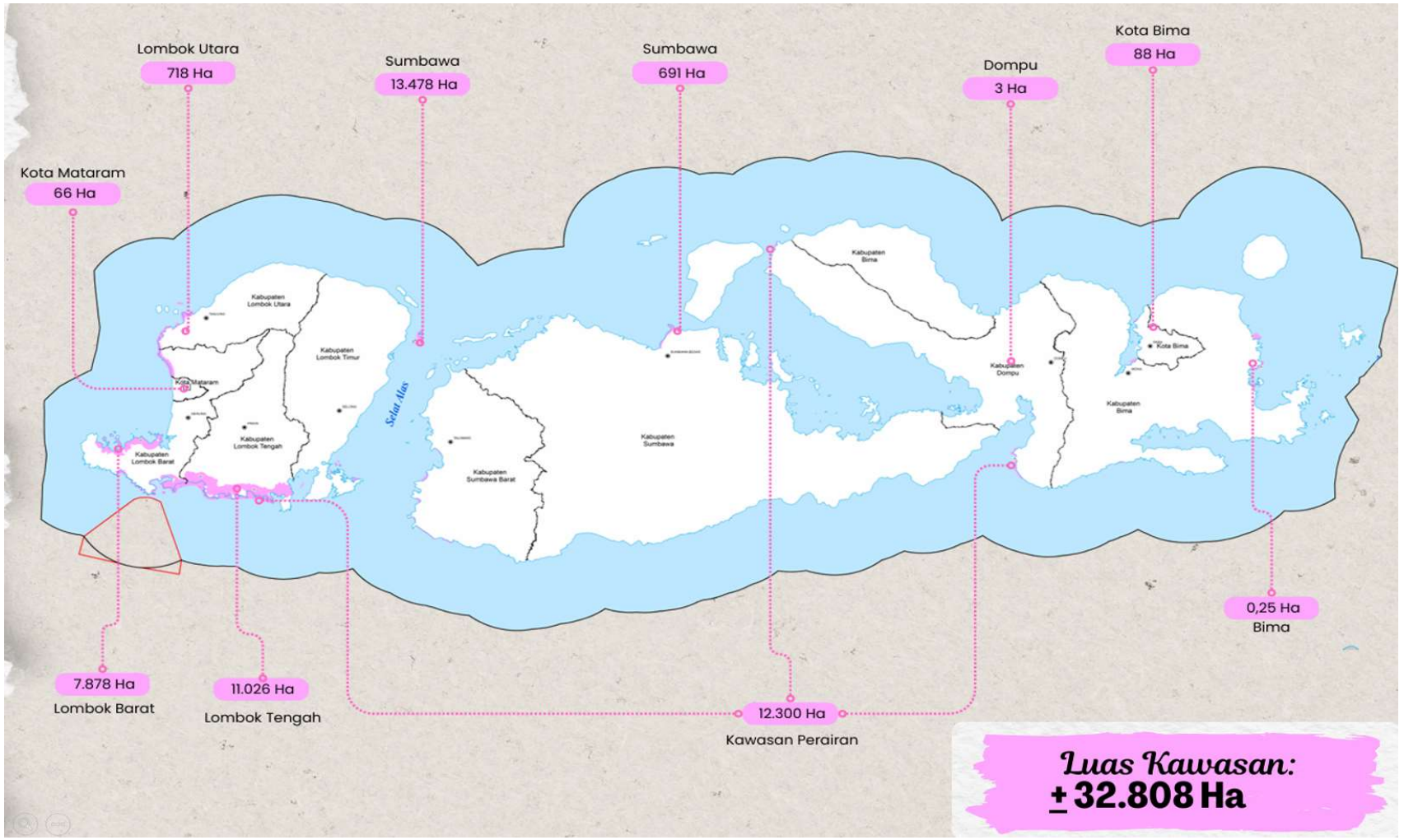

Gambar 3. 31 Peta Pola Ruang Wilayah Provinsi NTB Kawasan Permukiman

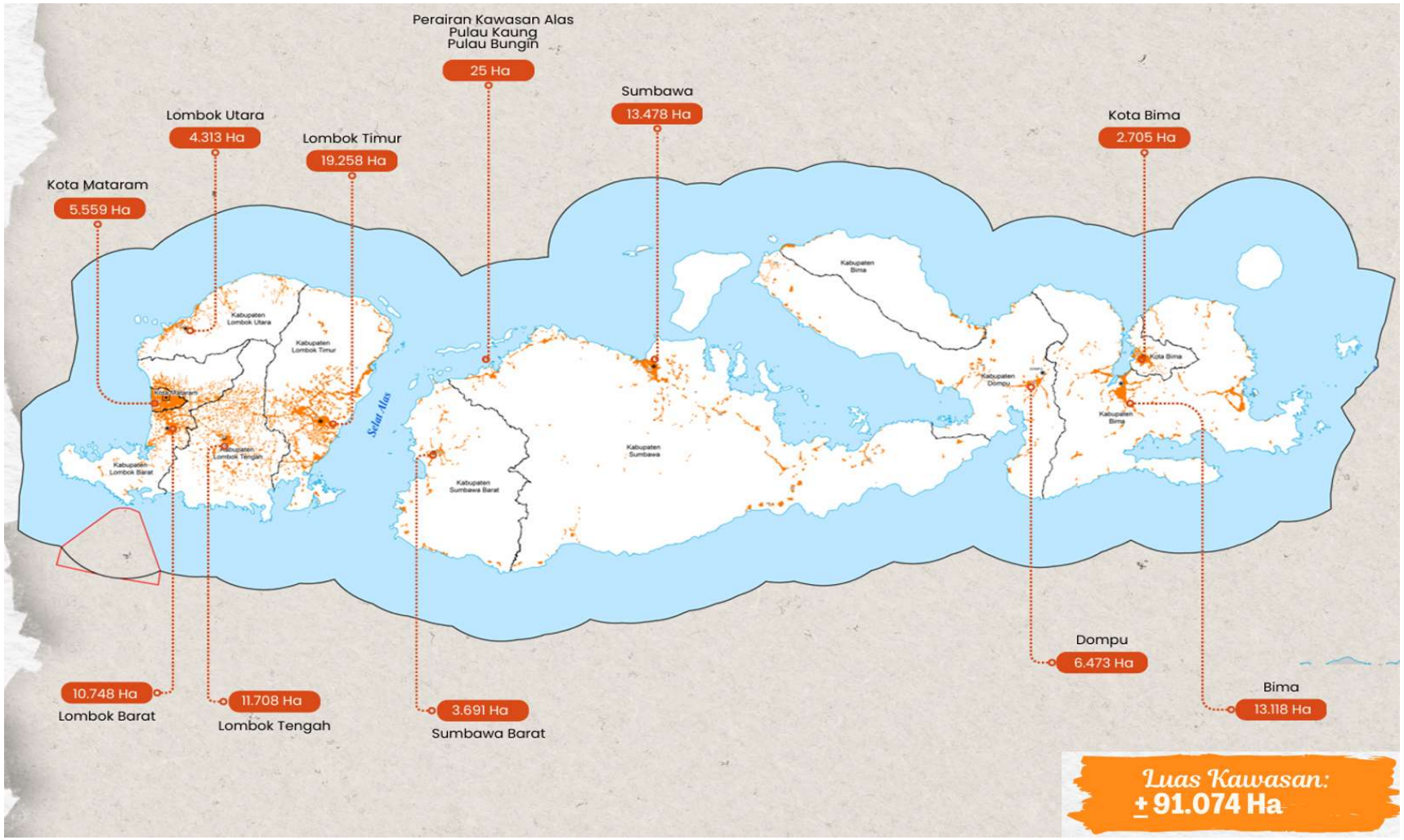

3.2.2. Sepuluh Program Unggulan (PU) sebagai Prioritas Daerah

Sebagai langkah kongkrit mencapai lima sasaran pembangunan daerah sebagai sasaran pembangunan jangka menengah; dalam RPJMD Tahun 2025-2029 ditetapkan sepuluh program unggulan (PU) sebagai prioritas daerah.

Program unggulan (PU) ini merupakan suatu program gamechanger yang inovatif dan dilaksanakan secara sinergi kolaboratif lintas sektor. Program unggulan ini terdiari atas berbagai bentuk kegiatan strategis (KS) yang menjadi solusi dan menjawab isu yang sedang berkembang ditengah masyarkat sehingga dapat mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran setiap misi sebagai sapta cita gubernur dan wakil gubernur yang mendukung pencapaian asta cita presiden. KS termuat lebih detail dalam rencana kerja perangkat daerah setiap tahunnya.

Gambar 3. 32 Sembilan Puluh Lima (95) Kegiatan Strategis Dengan 10 Program Unggulan

Sumber : Bappeda Provinsi NTB, 2025

Gambar 3. 33 Sepuluh Program Unggulan Provinsi NTB

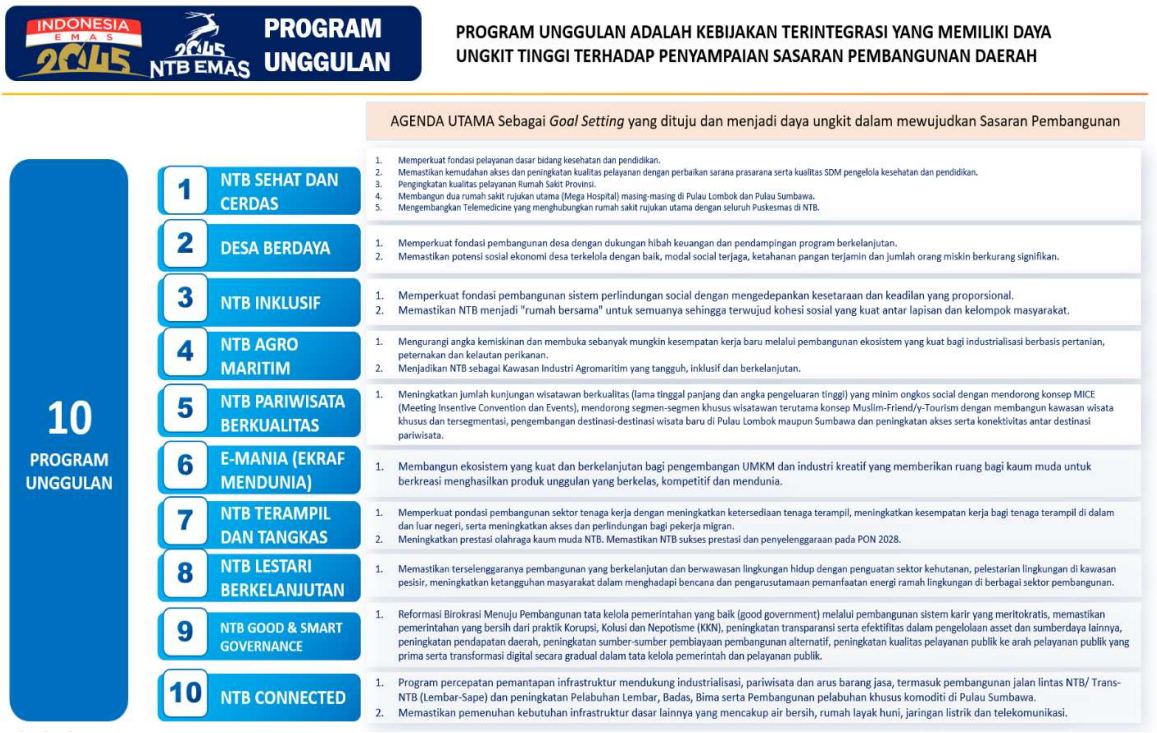

Sumber : Bappeda Provinsi NTB, 2025

Kegiatan Prioritas Utama pada 10 Program Unggulan yang termuat didalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 3. 16 Kegiatan Prioritas Utama Program Unggulan

Kegiatan Prioritas	Program Unggulan (PU)	Prioritas Daerah (PD)
Pencegahan dan Penurunan Stunting	PU – 1	PD – 1
Eliminasi Penyakit Menular dan Tidak Menular	PU – 1	PD – 1
Pemenuhan SPM Kesehatan	PU – 1	PD – 1
Pemenuhan Universal Health Coverage (UHC)	PU – 1	PD – 1
Peningkatan Kualitas Layanan Rumah Sakit Provinsi	PU – 1	PD – 1
Peningkatan Kualitas Pemenuhan SPM Pendidikan	PU – 1	PD – 1
Penanganan Anak Tidak Sekolah	PU – 1	PD – 1
Kolaborasi Antar Pusat dan Daerah dalam Rangka Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun	PU – 1	PD – 1
Pemberdayaan Masyarakat melalui PKBM	PU – 1	PD – 1
Penanganan Sumber Air Bersih	PU – 2	PD – 2

Kegiatan Prioritas	Program Unggulan (PU)	Prioritas Daerah (PD)
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih (Jaringan Perpipaan dan Bukan Perpipaan)	PU – 2	PD – 2
Penyediaan Akses Air Bersih ke Rumah Tangga	PU – 2	PD – 2
Penyediaan Sarana Prasarana Persampahan	PU – 2	PD – 2
Pembinaan dan Peningkatan Perilaku Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	PU – 2	PD – 2
Kegiatan Sosialisasi / Pendampingan / Pemberdayaan Masyarakat	PU – 2	PD – 2
Penegakan Perda Persampahan	PU – 2	PD – 2
Penanganan Sampah (3R)	PU – 2	PD – 2
Pembangunan Sarana Prasarana Layanan Dasar (IPAL Komunal, PSU, Rumah Layak Huni, Posyandu Keluarga)	PU – 2	PD – 2
Penyediaan Jamkesmas dan Jamkersal	PU – 2	PD – 2
Edukasi Kespro	PU – 2	PD – 2
Sosialisasi Peningkatan Usia Perkawinan	PU – 2	PD – 2
Pencegahan Perkawinan Anak	PU – 2	PD – 2
Pendampingan dalam Pendidikan Gizi	PU – 2	PD – 2
Perubahan Perilaku Masyarakat	PU – 2	PD – 2
Pengentasan Kemiskinan	PU – 2	PD – 2
Pembangunan Ekosistem Industri Agromaritim	PU – 2	PD – 2
Pengembangan Pariwisata	PU – 2	PD – 2
Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial	PU – 3	PD – 2
Mempertahankan Swasembada Beras (Padi), Jagung, Cabe, Cabe Rawit dan Bawang Merah	PU – 4	PD – 3
Meningkatkan Produktivitas Kedelai, Bawang Putih, Telur, Dagin Ayam, Dagin Sapi, Gula, dan Minyak Goreng	PU – 4	PD – 3
Diversifikasi Pangan	PU – 4	PD – 3
Peningkatan Ekspor Non-Tambang dengan Peningkatan Investasi dan Meningkatkan Perdagangan Luar Negeri (Ekspor)	PU – 4	PD – 3
Peningkatan Nilai Tambah Komuditas Unggulan Daerah melalui Pengembangan Hilirisasi (Industri Hulu dan Hilir)	PU – 4	PD – 3

Kegiatan Prioritas	Program Unggulan (PU)	Prioritas Daerah (PD)
Peningkatan SDM Kepariwisataan	PU – 5	PD – 4
Peningkatan Prasarana Dasar Destinasi Pariwisata Seperti Air Bersih, Sanitasi, Air Limbah, Pengelolaan Persampahan serta Penataan Kawasan Permukiman	PU – 5	PD – 4
Penciptaan Lingkungan yang Kondusif untuk Investasi Kepariwisataan	PU – 5	PD – 4
Pengembangan Daya Tarik Destinasi	PU – 5	PD – 4
Pengembangan Aksesibilitas mencapai Lokasi Destinasi	PU – 5	PD – 4
Meningkatkan Ketersidiaan Fasilitas Pendukung (Amenitas) Destinasi	PU – 5	PD – 4
Meningkatkan Ketersediaan Pelyanan Tambahan (Ansilari) pada setiap Destinasi	PU – 5	PD – 4
Pembangunan Sepuluh Destinasi Pariwisata Terintegerasi	PU – 5	PD – 4
Pengembangan Wisata MICE	PU – 5	PD – 4
Pembangunan Kreatif HUB (Kota Kreatif) pada Sepuluh Kab/Kota	PU – 6	PD – 4
Pembangunan Ekosistem Industri Kreatif pada Sepuluh Kab/Kota	PU – 6	PD – 4
Penguatan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi	PU – 7	PD – 4
Peningkatan Kualitas Atlet serta Kreatifitas dan Prestasi Pemuda	PU – 7	PD – 4
Upaya Mengatasi Deforestasi dan Degradasi Hutan	PU – 8	PD – 5
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	PU – 8	PD – 5
Perhutanan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Lingkar Hutan	PU – 8	PD – 5
Rehabilitasi Mangrove	PU – 8	PD – 5
Pengembangan Ekonomi Hijau	PU – 8	PD – 5
Pengelolaan Persampahan	PU – 8	PD – 5
Peningkatan Kualitas Air	PU – 8	PD – 5
Peningkatan Kualitas Udara	PU – 8	PD – 5
Peningkatan Kualitas Air Laut	PU – 8	PD – 5
Pengembangan Ekonomi Sirkuler	PU – 8	PD – 5

Kegiatan Prioritas	Program Unggulan (PU)	Prioritas Daerah (PD)
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	PU – 8	PD – 5
Implementasi Pembangunan Rendah Karbon Berketahanan Iklim	PU – 8	PD – 5
Peningkatan Penggunaan / Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	PU – 8	PD – 5
Penanggulangan Bencana	PU – 8	PD – 5
Pembangunan Perumahan dan Penataan Kawasan Permukiman Berkelanjutan	PU – 8	PD – 5
Pengembangan Geopark dan Cagar Biosfer	PU – 8	PD – 5
Pembangunan Sistem untuk Pengelolaan Tata Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	PU – 9	PD – 7
Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif untuk Meningkatkan Daya Tanggap Pemerintahan Terhadapa Perubahan dan Kebutuhan Masyarakat	PU – 9	PD – 7
Pemerintahan Modern (Digital, Inovatif, Kolaboratif dan Efisien)	PU – 9	PD – 7
Pengambilan Keputusan Berbasis Bukti (Evidence)	PU – 9	PD – 7
Penyiapan Dukungan Data Terintegrasi	PU – 9	PD – 7
Pembangunan Infrastruktur Permukiman pada Pusat Kegiatan Nasional, Wilayah dan Lokal	PU – 10	PD – 6
Pembangunan Infrastruktur Energi	PU – 10	PD – 6
Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air	PU – 10	PD – 6
Pembangunan Infrastruktur Transportasi	PU – 10	PD – 6
Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi	PU – 10	PD – 6
Pembangunan Infrastruktur Jaringan Prasarana Lainnya (SPAM, SPAL, Sistem Pengelolaan Limbah B3, Sistem Pengelolaan Persampahan)	PU – 10	PD – 6
Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar (Infrastruktur Pendidikan, Keshatan, Perekonomian, Perumahan dan Permukiman, serta Perkotaan)	PU – 10	PD – 6
Penataan Ruang Berkelanjutan	PU – 10	PD – 6

Sumber : Hasil Analisa Bappeda NTB, 2025

Perumusan program prioritas dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025–2030 dilakukan sebagai langkah strategis untuk memastikan keterpaduan antara visi, misi, dan arah

pembangunan daerah dengan kebutuhan nyata masyarakat serta kebijakan nasional. Dalam proses perumusannya, program prioritas diarahkan pada upaya menjawab isu-isu strategis pembangunan daerah. Selain itu, program prioritas juga dirancang untuk mendukung pencapaian target indikator makro pembangunan, selaras dengan RPJPD NTB 2025–2045 serta RPJMN 2025–2029.

Program prioritas yang ditetapkan bukan hanya menjadi kerangka kerja pembangunan jangka menengah, tetapi juga sebagai fondasi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemerataan pembangunan antarwilayah. Oleh karena itu, setiap program dirumuskan dengan mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, dampak yang dihasilkan, serta keterhubungan dengan lintas sektor pembangunan.

Lebih lanjut, program prioritas RPJMD NTB 2025–2030 juga memiliki keterhubungan langsung dengan Program Unggulan Daerah yang telah ditetapkan sebagai ciri khas pembangunan NTB. Dengan demikian, setiap program prioritas yang dirumuskan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target pembangunan secara makro, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat dan mempercepat implementasi program unggulan daerah sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Tabel 3. 17 Program Prioritas RPJMD Provinsi NTB 2025-2029

No.	Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		*Outcome*		Indikator /Alat Ukur RPJMD		Satuan	Program Unggulan/Program Prioritas	Program	Keterangan/Urusan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
	Visi : NTB BANGKIT BERSAMA MENUJU PROVINSI KEPULAUAN YANG MAKMUR MENDUNIA										
1	**Misi 1 : Membangun Manusia yang Berkarakter Unggul, Produktif dan Kompetitif**										
		Tujuan 1	**Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Unggul, Sehat, Produktif, dan Kompetitif**			**1**	**Indeks Modal Manusia (IMM)**	**Indeks**			
						2	**Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga**	**%**			
		Sasaran 1	Meningkatnya Akses dan Layanan Pendidikan Berkualitas yang Merata di NTB			1	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	Tahun			
						2	Harapan Lama Sekolah	Tahun			
						3	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%			
						4	Persentase Kab/Kota yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk:				

No.	Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		*Outcome*		Indikator /Alat Ukur RPJMD		Satuan	Program Unggulan/Program Prioritas	Program	Keterangan/Urusan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
							a) Literasi Membaca	%			
							b) Numerasi	%			
						5	Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk:				
							a) Literasi Membaca	%			
							b) Numerasi	%			
				1	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah	%	NTB SEHAT DAN CERDAS	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	PENDIDIKAN
						2	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	%			
						3	Persentase anak usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)	%			
						4	Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	%			

No.	Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		*Outcome*		Indikator /Alat Ukur RPJMD		Satuan	Program Unggulan/Program Prioritas	Program	Keterangan/Urusan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
				2	Meningkatnya Mutu Pendidikan	1	Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Menengah	%			
						2	Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus	%			
				1	Meningkatnya Kualitas Kurikulum	1	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	%		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	PENDIDIKAN
				1	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	1	Indeks pemerataan guru	Poin		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PENDIDIKAN
						2	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	%			
						3	Persentase kualifikasi pendidikan minimal S1	%			
				1	Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	1	Persentase usulan izin satuan pendidik yang diterbitkan/diperbarui	%		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	PENDIDIKAN
				1	Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	1	Persentase pengembangan bahasa dan sastra daerah	%		PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	PENDIDIKAN
		Sasaran 2	Meningkatnya Derajat			1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun			

No.	Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		*Outcome*		Indikator /Alat Ukur RPJMD		Satuan	Program Unggulan/Program Prioritas	Program	Keterangan/Urusan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
			Kesehatan Masyarakat								
						2	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%			
				1	Meningkatnya Kualitas kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat	1	Cakupan Penurunan kasus Kematian Ibu	%	NTB SEHAT DAN CERDAS	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	KESEHATAN
						2	Cakupan Penurunan kasus Kematian Balita	%			
				2	Meningkatnya upaya pengendalian penyakit menular dan tidak menular, Kesehatan Jiwa dan upaya kesehatan masyarakat yang proaktif dan responsif	1	Proporsi kabupaten/ kota dengan capain skrining prioritas >80%	%			
						2	Prevalensi Obesitas >18 Tahun	%			
						3	Cakupan Diabetes dalam pengendalian	%			
						4	Persentase Hipertensi Dalam Pengendalian	%			
						5	Cakupan Merokok Penduduk Usia 10-21th	%			
						6	Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	%			
						7	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis	%			

No.	Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		*Outcome*		Indikator /Alat Ukur RPJMD		Satuan	Program Unggulan/Program Prioritas	Program	Keterangan/Urusan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
							(Treatment Success Rate)				
						8	Cakupan ODHIV mengalami supresi Virus (Viral Land <50 kopi/ml	%			
						9	Cakupan Kab/Kota Eliminasi Kusta	%			
						10	Cakupan Kabupaten /Kota dengan Eliminasi Malaria	%			
						11	Angka Kematian Dengue	%			
						12	Persentase Pelayanan Kesehatan pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana	%			
						13	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	%			
						14	Persentase pelayanan kesehatan pengurangan risiko	%			

No.	Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		*Outcome*		Indikator /Alat Ukur RPJMD		Satuan	Program Unggulan/Program Prioritas	Program	Keterangan/Urusan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
							KLB bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi KLB				
						15	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	%			
				3	Terpenuhinya Jaminan Pembiayaan dan Layanan kesehatan yang berkualitas, adil dan terjangkau di fasilitas kesehatan bagi semua	1	Cakupan Faskes pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan > 60%	%			
						2	Cakupan Pemenuhan Sarana prasarana dan alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi				
						3	Cakupan Pemenuhan Sarana prasarana dan alat kesehatan Rumah sakit Manambai	%			
						4	Cakupan Pemenuhan Sarana prasarana dan alat kesehatan Rumah sakit Jiwa Mutiara Sukma	%			
						5	Cakupan Pemenuhan Sarana	%			

No.	Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		*Outcome*		Indikator /Alat Ukur RPJMD		Satuan	Program Unggulan/Program Prioritas	Program	Keterangan/Urusan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
							prasarana dan alat kesehatan Rumah sakit Mandalika				
						6	Cakupan Pemenuhan Sarana prasarana dan alat kesehatan Rumah sakit Mata				
						7	Cakupan Pemenuhan Sarana prasarana dan alat kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi (BLKPK)				
						8	Proporsi Fasyankes dengan Perbekalan Sesuai Standar	%			
						9	Cakupan Faskes yang melaksanakan pelayanan kesehatan melalui Telemedicine	%			
						10	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%			
						11	Cakupan Kabupaten /kota yang memilki Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat	%			

No.	Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		*Outcome*		Indikator /Alat Ukur RPJMD		Satuan	Program Unggulan/Program Prioritas	Program	Keterangan/Urusan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
							Desa/ Kelurahan sesuai standar				
						12	Proporsi Fasyankes Terakreditasi Paripurna	%			
				4	Meningkatnya kualitas Gizi Masyarakat	1	Persentase Kabupaten/ Kota dengan surveilans gizi (inputan Sigizikesga) >90%	%			
						2	Cakupan Kabupaten /kota Memenuhi Syarat Kualitas Kesehatan Lingkungan	%			
				1	Meningkatnya mutu, ketersediaan, dan pemerataan, Tenaga medis dan Tenaga Kesehatan	1	Cakupan faskes dengan named dan nakes terpenuhi sesuai standar	%		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA KESEHATAN	KESEHATAN
				1	Terpenuhinya Kualitas sarana prasarana kefarmasian, dan pengawasan Keamanan Makanan dan Minuman	1	Cakupan Sarana Kafarmasian yang memenuhi syarat	%		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	KESEHATAN
				1	Meningkatnya kualitas pemberdayaan	1	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	%		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	KESEHATAN

No.	Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		*Outcome*		Indikator /Alat Ukur RPJMD		Satuan	Program Unggulan/Program Prioritas	Program	Keterangan/Urusan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
					masyarakat bidang kesehatan					BIDANG KESEHATAN	
		Sasaran 3	Meningkatnya Penguatan Ketahanan dan Keharmonisan Keluarga, serta Kesetaraan Gender			1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks			
						2	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks			
				1	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	1	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	NTB INKLUSIF	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
						2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%			
				1	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	1	Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	Korban per 100.000 penduduk		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
						2	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	%			
				1	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan	1	Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	Lembaga		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No.	Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		*Outcome*		Indikator /Alat Ukur RPJMD		Satuan	Program Unggulan/Program Prioritas	Program	Keterangan/Urusan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
					gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak						
				1	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	1	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	%		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				1	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	1	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				1	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	1	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	%		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
						2	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks			
				1	Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata Anak Per wanita		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No.	Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		*Outcome*		Indikator /Alat Ukur RPJMD		Satuan	Program Unggulan/Program Prioritas	Program	Keterangan/Urusan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
						2	Angka kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	kelahiran per 1000 perempuan usia 15-19 tahun			
				1	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	%		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						2	Proporsi Kebutuhan KB Yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara Kb Modern (Demand Satisfied)	%			
				1	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	1	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	%		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						2	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	Indeks			
2	**Misi 2 : Memperkuat Ekonomi Daerah melalui Peningkatan Produktivitas, Daya Saing dan Pendapatan Perkapita Masyarakat sebagai Pondasi Mewujudkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan**										
		Tujuan 2	**Terwujudnya Peningkatan Produktifitas dan Daya Saing Ekonomi Daerah**			**1**	**Laju Pertumbuhan Ekonomi :**				
						1a	**- Dengan Tambang**	**%**			
						1b	**- NonTambang**	**%**			

No.	Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		*Outcome*		Indikator /Alat Ukur RPJMD		Satuan	Program Unggulan/Program Prioritas	Program	Keterangan/Urusan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
						2	**Kontribusi PDRB Provinsi**	**%**			
						3	**Indeks Daya Saing Daerah**	**Indeks**			
		Sasaran 4	Meningkatnya Produktivitas UMKM, Koperasi, dan Nilai Tambah Perdagangan			1	Rasio kewirausahaan Daerah	%			
						2	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	%			
						3	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%			
				1	Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	1	Pertumbuhan volume usaha koperasi	%	DESA BERDAYA	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
				1	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	1	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	%		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
				1	Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	1	Persentase Koperasi Aktif	%		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

No.	Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		*Outcome*		Indikator /Alat Ukur RPJMD		Satuan	Program Unggulan/Program Prioritas	Program	Keterangan/Urusan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
				1	Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	1	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	%		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
				1	Meningkatnya produktivitas koperasi	1	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	%		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
				1	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	1	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
						2	Pertumbuhan Wirausaha	%			
				1	Meningkatnya daya saing UMKM	1	Proporsi Usaha Kecil Menjalin Kemitraan dan Ekspor	%		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
				1	Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	1	Persentase Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	%	DESA BERDAYA	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	PERDAGANGAN
				1	Meningkatnya fasilitasi sarana dan prasarana Perdagangan	1	Persentase fasilitasi sarana dan prasarana Perdagangan	%		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PERDAGANGAN
				1	Meningkatnya Pertumbuhan negara destinasi ekspor	1	Pertumbuhan negara destinasi ekspor	Jumlah Negara		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	PERDAGANGAN

No.	Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		*Outcome*		Indikator /Alat Ukur RPJMD		Satuan	Program Unggulan/Program Prioritas	Program	Keterangan/Urusan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
				2	Meningkatnya pertumbuhan komoditi non tambang	1	Pertumbuhan komoditi sub sektor prioritas (pertanian, perkebunan, perikanan, ekonomi kreatif)	Komoditi			
				1	Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Konsumen	1	Persentase Penyelesaian Sengketa Konsumen	%		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PERDAGANGAN
				1	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	1	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemasaran Kelompok UKM	%		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	PERDAGANGAN
		Tujuan 3	**Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Per Kapita Masyarakat**			**1**	**PDRB Per Kapita**	**Juta Rupiah**			
		Sasaran 5	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja dan Menurunnya Tingkat Pengangguran			1	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah			
						2	Tingkat Pengangguran Terbuka	%			
				1	Terkelolanya informasi tenaga kerja	1	Persentase Kabupaten/ Kota yang Menyusun	%	NTB TERAMPIL DAN TANGKAS	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	TENAGA KERJA

No.	Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		*Outcome*		Indikator /Alat Ukur RPJMD		Satuan	Program Unggulan/Program Prioritas	Program	Keterangan/Urusan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
							Rencana Tenaga Kerja				
				1	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	1	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	%		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	TENAGA KERJA
				1	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	1	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	%		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	TENAGA KERJA
				1	Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	1	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Orang		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	TENAGA KERJA
				1	Terlindunginya hak-hak dasar pekerja	1	Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya	Orang		PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	TENAGA KERJA
		Sasaran 6	Meningkatnya Ketersediaan Akses Keuangan			1	Inklusi Keuangan	%			
				1	Meningkatnya kualitas kebijakan	1	Persentase rekomendasi bidang	%	NTB TERAMPIL DAN TANGKAS	PROGRAM PEREKONOMIAN	SEKRETARIAT DAERAH

No.	Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		*Outcome*		Indikator /Alat Ukur RPJMD		Satuan	Program Unggulan/Program Prioritas	Program	Keterangan/Urusan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
					bidang perekonomian		perekonomian yang ditindaklanjuti			DAN PEMBANGUNAN	
		Tujuan 4	**Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan melalui inflasi daerah yang terkendali**			**1a**	**Tingkat Kemiskinan**	**%**			
						1b	**Tingkat Kemiskinan Ekstrem NTB**	**%**			
						2	**Rasio Gini**	**Poin**			
						3	**Tingkat Inflasi**	**%**			
		Sasaran 7	Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat			1	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks			
				1	Meningkatnya Kualitas kelembagaan Pelayanan Kesejahteraan Sosial oleh Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	1	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial sesuai Standar	%	NTB INKLUSIF	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	SOSIAL
						2	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Aktif	%			
				1	Terlindunginya WNI migran korban tindak kekerasan	1	Persentase Warga Negara Korban Tindak Kekerasan yang terlindungi	%		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN	SOSIAL

No.	Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		*Outcome*		Indikator /Alat Ukur RPJMD		Satuan	Program Unggulan/Program Prioritas	Program	Keterangan/Urusan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
										TINDAK KEKERASAN	
				1	Meningkatnya Keberfungsian Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (non SPM) yang tertangani dan berfungsi sosial kembali	%		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	SOSIAL
				2	Terpenuhinya kebutuhan dasar Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia dan Gelandangan & Pengemis Terantar dalam Panti	1	Persentase Disabilitas terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%			
						2	Persentase anak terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%			
						3	Persentase Lanjut Usia terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%			
						4	Persentase Gelandangan dan Pengemis terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%			
				1	Terlindunginya anak dalam pengasuhan orang tua angkat	1	Persentase anak yang mendapat pengasuhan orang tua angkat	%		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	SOSIAL

No.	Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		*Outcome*		Indikator /Alat Ukur RPJMD		Satuan	Program Unggulan/Program Prioritas	Program	Keterangan/Urusan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
				2	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Penduduk sangat Miskin	1	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%			
				3	Meningkatnya Perekonomian penduduk miskin yang menerima bantuan sosial	1	Pesentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	%			
				1	Terpenuhinya kebutuhan dasar Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam	1	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	SOSIAL
				1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Taman Makam Pahlawan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	SOSIAL
		Sasaran 8	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan yang berkelanjutan			1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks			
				1	Meningkatnya Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan dan	1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Masyarakat	%	NTB AGRO MARITIM	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN	PANGAN

No.	Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		*Outcome*		Indikator /Alat Ukur RPJMD		Satuan	Program Unggulan/Program Prioritas	Program	Keterangan/Urusan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
					Kemandirian Pangan					KEMANDIRIAN PANGAN	
				1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Strategis	1	Angka Ketersediaan Enegi	Kkal/Kap/ Hari		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	PANGAN
						2	Angka Ketersediaan Protein	Gr/Kap/Hari			
				2	Tertanganinya Fluktuasi Harga Komoditas Pangan Pokok Strategis	1	Nilai *Coefisien Variasi* Komoditas Pangan Pokok Strategis				
							Beras	%			
							Telur Ayam Ras	%			
							Cabai Rawit Merah	%			
							Bawang Merah	%			
				3	Meningkatnya Nilai Asupan Kecukupan Gizi Masyarakat	1	Angka Konsumsi Energi	Kkal/Kap/ Hari			
						2	Angka Konsumsi Protein	Gr/Kap/Hari			
				4	Meningkatnya stok Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Provinsi	1	Rasio Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) terhadap jumlah CBPD	%			
				1	Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	1	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	PANGAN
				1	Meningkatnya Pengawasan Keamanan	1	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat	%		PROGRAM PENGAWASAN	PANGAN

No.	Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		*Outcome*		Indikator /Alat Ukur RPJMD		Satuan	Program Unggulan/Program Prioritas	Program	Keterangan/Urusan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
					Pangan Segar di Post Market dan Pre Market		keamanan pangan *Post Market*			KEAMANAN PANGAN	
						2	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan *Pre Market*	%			
		Sasaran 9	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di wilayah Pedesaan			1	Indeks Desa	%			
				1	Meningkatnya kualitas penataan desa	1	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	%	DESA BERDAYA	PROGRAM PENATAAN DESA	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
				1	Meningkatnya efektivitas kerjasama desa	1	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	%		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
				1	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang di tingkatkan Kapasitasnya	%		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						2	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	%			
				1	Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	%		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						2	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan	%			

No.	Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		*Outcome*		Indikator /Alat Ukur RPJMD		Satuan	Program Unggulan/Program Prioritas	Program	Keterangan/Urusan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
					dalam pembangunan		Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat				
						3	Jumlah BUMDes Maju	BUMDes			
						4	Persentase Posyantek Aktif	%			
				1	Meningkatnya perencanaan transmigrasi	1	Persentase program transmigrasi yang dilaksanakan	%		PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	TRANSMIGRASI
				1	Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	1	Persentase luas kawasan transmigrasi yang berkembang	%		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	TRANSMIGRASI
				1	Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	1	Persentase transmigran yang dibina dan diberdayakan	%		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	TRANSMIGRASI
		Sasaran 10	Menurunnya disparitas harga antar wilayah dalam provinsi			1	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	Koefisien			
				1	Meningkatnya stabilitas Perkembangan	1	Persentase Perkembangan Harga Barang Kebutuhan Pokok	%	DESA BERDAYA	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN	PERDAGANGAN

No.	Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		*Outcome*		Indikator /Alat Ukur RPJMD		Satuan	Program Unggulan/Program Prioritas	Program	Keterangan/Urusan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
					Harga Barang Kebutuhan Pokok					POKOK DAN BARANG PENTING	
3	**Misi 3 : Membangun Ekosistem Industri Komoditas Unggulan Sektor Pertanian, Peternakan dan Kelautan Perikanan Menuju terwujudnya Industri Agromaritim yang Berkelanjutan**										
		Tujuan 5	**Terwujudnya Pembangunan Ekosistem Industri Komoditi Unggulan Daerah yang Berkelanjutan**			**1**	**Kontribusi PDRB Industri Pengolahan**	**%**			
		Sasaran 11	Meningkatnya Kontribusi Industri Agromaritim			1	Persentase Peningkatan PDRB Sub Sektor Industri Pengolahan Berbasis Agromaritim	%			
				1	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	1	Realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	Rp. Miliar	NTB AGRO MARITIM	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PERINDUSTRIAN
				1	Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	1	Persentase izin usaha industri yang diterbitkan	%		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	PERINDUSTRIAN
				1	Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	1	Persentase ketersediaan informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini	%		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	PERINDUSTRIAN

No.	Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		*Outcome*		Indikator /Alat Ukur RPJMD		Satuan	Program Unggulan/Program Prioritas	Program	Keterangan/Urusan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
		Sasaran 12	Meningkatnya Produktivitas Sektor Agromaritim (Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan, dan Kehutanan)			1	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%			
				1	Meningkatnya distrbusi dan kualitas prasarana pertanian	1	Peningkatan produksi Tanaman Pangan	%	NTB AGRO MARITIM	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PERTANIAN
						2	Peningkatan produksi hortikultura	%			
						3	Peningkatan produksi perkebunan	%			
				2	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Asal Hewan	1	Jumlah Populasi Ternak Sapi, Kerbau, Kambing dan Unggas	Ekor			
				1	Meningkatnya distrbusi dan kualitas prasarana pertanian	1	Efisiensi biaya produksi			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PERTANIAN
						2	Persentase luas layanan irigasi multikomoditas	%			
				2	Meningkatnya Pemanfaatan Prasarana Pertanian	1	Tingkat Kemanfaatan Prasarana Pertanian	%			
				1	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan	1	Persentase Luas areal pengendalian dan penanggulangan	%		PROGRAM PENGENDALIAN DAN	PERTANIAN

No.	Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		*Outcome*		Indikator /Alat Ukur RPJMD		Satuan	Program Unggulan/Program Prioritas	Program	Keterangan/Urusan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
					bencana pertanian		bencana Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan			PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
						2	Persentase Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	%			
						3	Persentase Penurunan Emisi GRK	%			
				2	Terkendalinnya Wilayah dari Wabah Penyakit Hewan	1	Jumlah Wilayah yang dilakukan pengendalian terhadap wabah penyakit hewan	Wilayah			
				1	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluhan pertanian	1	Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	%		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	PERTANIAN
						2	Persentase kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi	%			
						3	Persentase SDM Petani yang	%			

No.	Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		*Outcome*		Indikator /Alat Ukur RPJMD		Satuan	Program Unggulan/Program Prioritas	Program	Keterangan/Urusan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
							meningkat kapasitasnya				
				2	Meningkatnya Pengolahan dan Pemasaran Produk Peternakan	1	Produk Peternakan yang berhasil di pasarkan	%			
				1	Meningkatnya Status Kesehatan Hewan	1	Persentase Ternak Yang Terinfeksi PHMS	%		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PERTANIAN
				1	Meningkatnya Perizinan Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan	1	Jumlah Izin Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diterbitkan	Dokumen		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	PERTANIAN
				1	Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan kesejahteraan nelayan secara berkelanjutan	1	Produksi Perikanan Tangkap	Ton		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	KELAUTAN DAN PERIKANAN
						2	Nilai Tukar Nelayan	%			
				1	Meningkatnya produksi budidaya dan kesejahteraan pembudidaya ikan	1	Produksi Perikanan Budidaya	Ton		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	KELAUTAN DAN PERIKANAN
						2	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	%			
				1	Meningkatnya konsumsi ikan	1	Angka Konsumsi Ikan	(kg/kapita/ tahun)		PROGRAM PENGOLAHAN	KELAUTAN DAN PERIKANAN

No.	Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		*Outcome*		Indikator /Alat Ukur RPJMD		Satuan	Program Unggulan/Program Prioritas	Program	Keterangan/Urusan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
					dan nilai tambah produk perikanan	2	Produksi olahan hasil perikanan	Ton		DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
				1	Meningkatnya produktivitas pemanfaatan hutan dan pengolahan hasil hutan	1	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	%		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	KEHUTANAN
				1	Meningkatnya perekonomian masyarakat di sekitar kawasan hutan	1	Peningkatan nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	%		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	KEHUTANAN
						2	Peningkatan nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial	%			
4	**Misi 4 : Membangun Sektor Pariwisata Berkualitas, Industri Kreatif serta Mengembangkan Seni Budaya Daerah dan Prestasi Olahraga**										
		Tujuan 6	**Terwujudnya Pariwisata NTB yang Berkualitas dan Industri Ekonomi Kreatif**			**1**	**Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku**	**%**			
						2	**Proporsi Nilai Tambah Ekonomi Kreatif Provinsi Terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional**	**%**			
		Sasaran 13	Meningkatnya Nilai Tambah			1	Jumlah tamu Wisatawan Mancanegara	Ribu Orang			

No.	Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		*Outcome*		Indikator /Alat Ukur RPJMD		Satuan	Program Unggulan/Program Prioritas	Program	Keterangan/Urusan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
			Pariwisata dan Ekonomi Kreatif								
						2	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%			
						3	Rasio PDRB Industri Ekonomi Kreatif	%			
				1	Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	%	NTB PARIWISATA BERKUALITAS	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	PARIWISATA
				1	Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata	1	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	%		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	PARIWISATA
				1	Meningkatnya Kualitas Ekosistem Kreatif	1	Persentase Pelaku Ekondomi Kreatif Yang Memiliki Kekayaan Intelektual	%	E-MANIA (EKRAF MENDUNIA)	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	PARIWISATA
				1	Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	%		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	PARIWISATA

No.	Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		*Outcome*		Indikator /Alat Ukur RPJMD		Satuan	Program Unggulan/Program Prioritas	Program	Keterangan/Urusan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
		Tujuan 7	**Terwujudnya Pengembangan Kebudayaan Daerah dan Ketahanan Sosial Budaya**			**1**	**Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)**	**Indeks**			
		Sasaran 14	Meningkatnya budaya literasi, ekspresi budaya, warisan budaya dan ekonomi budaya			1	Indeks budaya literasi	Indeks			
						2	Indeks ekspresi budaya	Indeks			
						3	Indeks warisan budaya	Indeks			
						4	Indeks ekonomi budaya	Indeks			
				1	Meningkatnya Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan	1	Persentase Objek Pemajuan Kedudayaan yang dikembangkan	%	NTB TERAMPIL DAN TANGKAS	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	KEBUDAYAAN
				1	Meningkatnya kesenian tradisional yang dikembangkan	1	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	%		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	KEBUDAYAAN
				1	Meningkatnya sejarah lokal yang dikembangkan	1	Persentase sejarah lokal yang dikembangkan	%		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	KEBUDAYAAN
				1	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	1	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	%		PROGRAM PELESTARIAN DAN	KEBUDAYAAN

No.	Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		*Outcome*		Indikator /Alat Ukur RPJMD		Satuan	Program Unggulan/Program Prioritas	Program	Keterangan/Urusan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
						2	Persentase cagar budaya yang ditetapkan	%		PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
						3	Persentase warisan budaya tak benda yang ditetapkan	%			
				1	Meningkatnya kunjungan museum	1	Persentase kunjungan wisatawan ke museum	%		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	KEBUDAYAAN
				1	Meningkatnya Layanan Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan	1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PERPUSTAKAAN
				1	Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	1	Persentase Pelestarian KCKR dan Naskah Kuno Milik Daerah	%		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	PERPUSTAKAAN
		Tujuan 8	**Terwujudnya Peningkatan Prestasi Pemuda dan Olahraga**			**1**	**Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)**	**Indeks**			
						2	**Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)**	**Indeks**			
		Sasaran 15	Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan			1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Pemuda	%			

No.	Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		*Outcome*		Indikator /Alat Ukur RPJMD		Satuan	Program Unggulan/Program Prioritas	Program	Keterangan/Urusan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
			Prestasi Olahraga								
						2	Persentase Peningkatan Perolehan Medali Tingkat Nasional dan Internasional	% (medali)			
				1	Meningkatnya daya saing kepemudaan	1	Rasio Wirausaha Pemuda	%	NTB TERAMPIL DAN TANGKAS	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
				1	Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	1	Persentase atlet yang masuk pelatnas	%		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
				1	Meningkatnya Kualitas Kepramukaan	1	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kepramukaan	%		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
5	**Misi 5 : Memperkuat Sistim Mitigasi Bencana, Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Ramah Lingkungan dan Investasi Berkelanjutan**										
		Tujuan 9	**Terwujudnya Peningkatan resiliensi Terhadap Bencana**			**1**	**Indeks Risiko Bencana (IRB)**	**Indeks**			
		Sasaran 16	Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana			1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks			

No.	Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		*Outcome*		Indikator /Alat Ukur RPJMD		Satuan	Program Unggulan/Program Prioritas	Program	Keterangan/Urusan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
				1	Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1	Persentase Ketangguhan Pra-Bencana	%	NTB LESTARI BERKELANJUTAN	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
						2	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	%			
						3	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	%			
				2	Meningkatnya Penanganan Bencana pada Saat Darurat Bencana	1	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	%			
				3	Meningkatnya Efektivitas Penanganan Pascabencana	1	Persentase Penanganan Pascabencana	%			
				1	Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran	1	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	%		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
				2	Meningkatnya Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	1	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%			

No.	Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		*Outcome*		Indikator /Alat Ukur RPJMD		Satuan	Program Unggulan/Program Prioritas	Program	Keterangan/Urusan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
		Tujuan 10	**Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Ramah Lingkungan**			**1**	**Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**	**Indeks**			
						2	**Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)**	**%**			
		Sasaran 17	Meningkatnya Pengelolaan lingkungan Hidup Berkualitas			1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks			
				1	Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	1	Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	NTB LESTARI BERKELANJUTAN	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	LINGKUNGAN HIDUP
				1	Menurunnya pencemaran air dan udara	1	Persentase pemenuhan baku mutu parameter kualitas air	%		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	LINGKUNGAN HIDUP
						2	Persentase pemenuhan baku mutu parameter kualitas air laut	%			
						3	Persentase pemenuhan baku mutu parameter kualitas udara	%			

No.	Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		*Outcome*		Indikator /Alat Ukur RPJMD		Satuan	Program Unggulan/Program Prioritas	Program	Keterangan/Urusan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
						4	Jumlah permohonan pengujian yang dilayani	Permohonan			
						5	Jumlah seluruh pengujian yang dilakukan terhadap paramater	Kali			
				1	Meningkatnya partisipasi Lembaga Pendidikan formal/lembaga Masyarakat/komunitas/kelompok Masyarakat yang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1	Jumlah Lembaga Pendidikan formal/lembaga Masyarakat/komunitas/kelompok Masyarakat yang berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	LINGKUNGAN HIDUP
				1	Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) limbah bahan berbahaya dan beracun (LIMBAH B3)	1	persentase limbah B3 yang terkelola	%		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	LINGKUNGAN HIDUP
				1	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/kegiatan terhadap	1	ketaatan penanggung jawab usaha dan/kegiatan terhadap izin	%		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN	LINGKUNGAN HIDUP

No.	Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		*Outcome*		Indikator /Alat Ukur RPJMD		Satuan	Program Unggulan/Program Prioritas	Program	Keterangan/Urusan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
					persetujuan lingkungan yang diterbitkan		lingkungan,izin PPLH dan PPULH			LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
				1	Meningkatnya Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia Pendidikan/filantrofi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1	persentase jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia Pendidikan/filantrofi yang meningkat kinerjanya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	LINGKUNGAN HIDUP
				1	Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	1	persentase penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	%		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	LINGKUNGAN HIDUP
				1	Meningkatnya penanganan sampah dan pengurangan sampah	1	Persentase penanganan sampah	%		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	LINGKUNGAN HIDUP
						2	Persentase pengurangan sampah	%			
				1	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah.	1	Persentase izin pemanfaatan air tanah yang dikendalikan.	%		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No.	Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		*Outcome*		Indikator /Alat Ukur RPJMD		Satuan	Program Unggulan/Program Prioritas	Program	Keterangan/Urusan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
				1	Meningkatnya pengelolaan mineral dan batubara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	1	Persentase izin usaha pertambangan yang dikendalikan.	%		PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		Sasaran 18	Meningkatnya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem			1	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Sektor Kehutanan dan Lahan	Indeks			
						2	Persentase Peningkatan Ekosistem Mangrove, terumbu karang dan padang lamun dalam kondisi baik	%			
				1	Meningkatnya kelestarian dan fungsi DAS	1	Persentase tutupan lahan pada sempadan DAS	%	NTB LESTARI BERKELANJUTAN	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	KEHUTANAN
				1	Meningkatnya kelestarian SDA hayati dan ekosistemnya	1	Indeks keanekaragaman hayati	Indeks	NTB LESTARI BERKELANJUTAN	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	KEHUTANAN
				1	Meningkatnya pengelolaan hutan melalui aspek	1	Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang	%		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	KEHUTANAN

No.	Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		*Outcome*		Indikator /Alat Ukur RPJMD		Satuan	Program Unggulan/Program Prioritas	Program	Keterangan/Urusan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
					perencanaan dan tata hutan hutan		tersusun dan disahkan				
				2	Meningkatnya penanganan lahan kritis	1	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi	%			
				3	Meningkatnya kinerja perlindungan hutan	1	Laju deforestasi	Ha/Tahun			
				1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	1	persentase RTH	%		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	LINGKUNGAN HIDUP
				1	Meningkatnya kualitas ekosistem laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang dikelola secara berkelanjutan	1	Persentase wilayah laut dan pesisir yang dikelola berkelanjutan	%		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	KELAUTAN DAN PERIKANAN
				1	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	1	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha perikanan dan kelautan	%		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Sasaran 19	MMeningkatnya Ketahanan			1	Intensitas energi primer	SBM/Rp milyar			

No.	Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		*Outcome*		Indikator /Alat Ukur RPJMD		Satuan	Program Unggulan/Program Prioritas	Program	Keterangan/Urusan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
			Energi Ramah Lingkungan dan konsumsi listrik yang merata serta berkelanjutan								
						2	Konsumsi Listrik per kapita	kWh			
				1	Meningkatnya kontribusi energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik	1	Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik	%	NTB LESTARI BERKELANJUTAN	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
				1	Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat tidak mampu.	1	Persentase rumah tangga tidak mampu yang terlayani listrik PLN.	%		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		Tujuan 11	**Terwujudnya Investasi Berkelanjutan**			**1**	**Pembentukan Modal Tetap Bruto**	**% PDRB**			
		Sasaran 20	Meningkatnya Realisasi Investasi			1	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Triliun			
				1	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	1	Realisasi total terhadap target investasi	%	NTB LESTARI BERKELANJUTAN	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	PENANAMAN MODAL

No.	Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		*Outcome*		Indikator /Alat Ukur RPJMD		Satuan	Program Unggulan/Program Prioritas	Program	Keterangan/Urusan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
				1	Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	1	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	%		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PENANAMAN MODAL
				1	Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	1	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	%		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PENANAMAN MODAL
				1	Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	1	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	%		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PENANAMAN MODAL
				1	Meningkatnya Pemanfaatan data dan informasi Penanaman Modal	1	Persentase Pemanfaatan data dan informsi Penanaman Modal	%		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	PENANAMAN MODAL
6	**Misi 6 : Memantapkan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah yang Berwawaasan Lingkungan Serta Memastikan Penegakan Tata Ruang yang Berkelanjutan**										
		Tujuan 12	**Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas antar Wilayah yang Berwawasan Lingkungan**			**1**	**Indeks Kemantapan Infrastruktur**	**Indeks**			

No.	Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		*Outcome*		Indikator /Alat Ukur RPJMD		Satuan	Program Unggulan/Program Prioritas	Program	Keterangan/Urusan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
		Sasaran 21	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas Antar Wilayah yang Terintegrasi			1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks			
						2	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	%			
						3	Rasio Konektivitas	Rasio			
				1	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Terhadap Banjir dan Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Irigasi	1	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi	%	NTB CONNECTED	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
						2	Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Provinsi	%			
				1	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Penyediaan Air Minum	1	Persentase Akses Layanan Air Minum	%		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				1	Meningkatnya Layanan Persampahan Regional	1	Persentase Peningkatan Infrastruktur TPA/TPST Regional	%		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No.	Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		*Outcome*		Indikator /Alat Ukur RPJMD		Satuan	Program Unggulan/Program Prioritas	Program	Keterangan/Urusan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
				1	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah	1	Persentase Peningkatan Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	%		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				1	Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan	1	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	%		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Permukiman	1	Persentase peningkatan infrastruktur permukiman	%		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				1	Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung	1	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	%		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				1	Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yang Tertata	1	Persentase penataan bangunan dan lingkungan	%		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				1	Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat yang Nyaman dan Aman	1	Tingkat kemantapan jalan	%		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				1	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Konstruksi	1	Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	%		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No.	Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		*Outcome*		Indikator /Alat Ukur RPJMD		Satuan	Program Unggulan/Program Prioritas	Program	Keterangan/Urusan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
				1	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
						2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	%			
				1	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	1	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	%		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
				1	Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	1	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi dengan PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
				1	Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum	1	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU	%		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No.	Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		*Outcome*		Indikator /Alat Ukur RPJMD		Satuan	Program Unggulan/Program Prioritas	Program	Keterangan/Urusan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
					PSU tingkat kemampuan menengah						
				1	Meningkatnya Prasarana Terminal	1	Cakupan fasilitas Terminal Dalam Kondisi baik	%			
				2	Meningkatnya Kelaikan Angkutan Jalan	1	Presentase Sarana Angkutan Umum dalam Kondisi Laik Jalan	%			
				3	Meningkatkan Kualitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui audit inspeksi, pemantauan dan penegakan standar keselamatan secara terencana	1	Rasio Fatalitas Lalu Lintas Jalan	Rasio		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PERHUBUNGAN
				1	Meningkatnya Perusahaan yang bergerak di Angkutan Perairan	1	Persentase Perusahaan angkutan perairan yang memiliki Izin Usaha	%			
				2	Meningkatnya Perusahaan Angkutan Perairan sesuai SSU (Sertifikat Standar Usaha)	1	Persentase Perusahaan angkutan perairan sesuai SSU (Sertifikat Standar Usaha)	%		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	PERHUBUNGAN

No.	Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		*Outcome*		Indikator /Alat Ukur RPJMD		Satuan	Program Unggulan/Program Prioritas	Program	Keterangan/Urusan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
				3	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Kajian Kelayakan Infrastruktur Transportasi Laut	1	Persentase dokumen yang digunakan sebagai dasar perencanaan anggaran atau pembangunan fisik	%			
				4	Meningkatnya Persentase Infrastruktur Pelabuhan Dalam Kondisi Baik	1	Persentase Infrastruktur Pelabuhan yang beroperasi dalam kondisi baik	%			
				5	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penyeberangan	1	Rasio Penurunan Kecelakaan Angkutan Penyeberangan	%			
		Tujuan 13	**Terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan**				**Persentase capaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang**	**%**			
		Sasaran 22	Meningkatnya kepatuhan dalam penyelenggaraan penataan ruang				Persentase capaian kesesuaian pemanfaatan ruang	%			
				1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	1	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	NTB LESTARI BERKELANJUTAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah	1	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap	%		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI	PERTANAHAN

No.	Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		*Outcome*		Indikator /Alat Ukur RPJMD		Satuan	Program Unggulan/Program Prioritas	Program	Keterangan/Urusan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
					Objek Reforma Agraria (TORA)		Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee			KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	
7	**Misi 7 : Mempercepat Transformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Inovatif serta Kepemimpinan yang Kolaboratif dari Pusat, Provinsi dan Kab/Kota Sebagai Fondasi Percepatan Pembangunan Daerah**										
		Tujuan 14	**Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Inovatif serta Kepemimpinan Daerah yang Kolaboratif**			**1**	**Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)**	**Indeks (Kategori)**			
						2	**Indeks Ketahanan Nasional**	**Indeks**			
						3	**Indeks Inovasi Daerah**	**Indeks**			
		Sasaran 23	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			1a	Reformasi Birokrasi General	Skor			
						1b	Reformasi Birokrasi Tematik	Skor			
						2	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Poin			
				1	Meningkatnya Kualitas Penataan Organisasi	1	Persentase kualitas Perangkat Daerah dengan kebutuhan	%	NTB GOOD & SMART GOVERNANCE	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	SEKRETARIAT DAERAH

No.	Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		*Outcome*		Indikator /Alat Ukur RPJMD		Satuan	Program Unggulan/Program Prioritas	Program	Keterangan/Urusan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
							ASN sesuai ANJAB dan ABK				
						2	Persentase Implementasi standar kompetensi jabatan	%			
						3	Persentase kualitas Penetapan Organisasi Kelembagaan Perangkat Daerah Prov dan Kab/Kota	%			
						4	Persentase Kualitas Pelayanan Publik	%			
						5	Persentase Kualitas Tingkat Implementasi Pelayanan Publik Kab/Kota	%			
						6	Persentase Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	%			
						7	Persentase Ketatalaksanaan Implementasi Kab/Kota	%			
				2	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	1	Persentase efektivitas Kerja Sama Daerah	%		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH
						2	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Status			

No.	Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		*Outcome*		Indikator /Alat Ukur RPJMD		Satuan	Program Unggulan/Program Prioritas	Program	Keterangan/Urusan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
				3	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	1	Persentase Kesejahteraan Rakyat Dari Segi Mental Spiritual, Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar	%		PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKRETARIAT DAERAH
				4	Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Penyelesaian Kasus-kasus Hukum	1	Persentase Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Penyelesaian Kasus-kasus Hukum	%		PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	SEKRETARIAT DAERAH
				5	Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	1	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks		PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	SEKRETARIAT DAERAH
				6	Meningkatnya kualitas administrasi kebijakan pembangunan	1	Jumlah rekomendasi hasil pengendalian pembangunan yang ditindak lanjuti	Dokumen		PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	SEKRETARIAT DAERAH
				1	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Komponen tingkat sinergi dan kualitas dokumen perencanaan pemerintah daerah	Nilai		PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN
						2	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) Kab/kota	Kategori			

No.	Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		*Outcome*		Indikator /Alat Ukur RPJMD		Satuan	Program Unggulan/Program Prioritas	Program	Keterangan/Urusan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
				2	Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi capaian pembangunan daerah	1	Presentase hasil pengendalian dan evaluasi capaian pembangunan daerah yang ditindaklanjuti	%			
				1	Meningkatnya keselarasan perencanaan perangkat daerah terhadap perencanaan pembangunan daerah	1	Persentase Dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang P2M yang selaras	%		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN
						2	Persentase Dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang PSDA yang selaras	%			
						3	Persentase Dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang IK yang selaras	%			
				2	Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah jangka Menengah dengan Dokumen	1	Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah jangka menengah dengan dokumen	%			

No.	Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		*Outcome*		Indikator /Alat Ukur RPJMD		Satuan	Program Unggulan/Program Prioritas	Program	Keterangan/Urusan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
					Perencanaan Perangkat Daerah jangka Pendek		perencanaan perangkat daerah jangka pendek bidang P2M				
						2	Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah jangka menengah dengan dokumen perencanaan perangkat daerah jangka pendek bidang PSDA	%			
						3	Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah jangka menengah dengan dokumen perencanaan perangkat daerah jangka pendek bidang IK	%			
				3	Meningkatnya Kinerja Pengendalian dan Evaluluasi Capaian Pembangunan	1	Persentase hasil pengendalian dan evaluasi capaian pembangunan tematik dan perangkat daerah	%			

No.	Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		*Outcome*		Indikator /Alat Ukur RPJMD		Satuan	Program Unggulan/Program Prioritas	Program	Keterangan/Urusan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
					Tematik dan Perangkat Daerah		Bidang P2M yang ditindaklanjuti				
						2	Persentase hasil pengendalian dan evaluasi capaian pembangunan tematik dan perangkat daerah Bidang PSDA yang ditindaklanjuti	%			
						3	Persentase hasil pengendalian dan evaluasi capaian pembangunan tematik dan perangkat daerah Bidang IK yang ditindaklanjuti	%			
				1	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan ketersediaan sumber Pendanaan Daerah	1	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah diluar DAK	%		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	KEUANGAN
				1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pendapatan Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Daerah Lainnya		Proporsi Dana Transfer terhadap Pendapatan Daerah	%		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	KEUANGAN

No.	Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		*Outcome*		Indikator /Alat Ukur RPJMD		Satuan	Program Unggulan/Program Prioritas	Program	Keterangan/Urusan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
				2	Terwujudnya Ketepatan Waktu Penyusunan Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan	1	Persentase ketepatan waktu penyampaian Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD sesuai tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan	%			
				3	Terpenuhinya kesesuaian alokasi belanja wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD	%			
						2	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%			
						3	Persentase belanja pendidikan	%			
						4	Persentase belanja kesehatan	%			
				4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah Kab/Kota	1	Persentase ketepatan waktu penyampaian hasil evaluasi Raperda APBD/Perubahan APBD dan Raperda Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota	%			

No.	Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		*Outcome*		Indikator /Alat Ukur RPJMD		Satuan	Program Unggulan/Program Prioritas	Program	Keterangan/Urusan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
				5	Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Manajemen Pengelolaan Kas Daerah	1	Persentase realisasi belanja terhadap APBD	%			
				6	Terwujudnya Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan BLUD	1	Persentase Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan BLUD	%			
				1	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	1	Nilai Indeks Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD terkait BMD	Indeks		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	KEUANGAN
						2	Nilai Indeks Ketepatan waktu penetapan RKBMD	Indeks			
						3	Nilai Indeks Ketepatan waktu penyampaian Laporan BMD	Indeks			
						4	Nilai Indeks Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Pengawasan Pengendalian	Indeks			
						5	Nilai Indeks Tindak lanjut rekomendasi temuan BPK RI terkait BMD	Indeks			

No.	Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		*Outcome*		Indikator /Alat Ukur RPJMD		Satuan	Program Unggulan/Program Prioritas	Program	Keterangan/Urusan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
						6	Nilai Indeks Tindak lanjut Pengelolaan BMD	Indeks			
				2	Meningkatnya realisasi PAD atas pemanfaatan barang milik daerah (BMD) yang produktif	1	Nilai Indeks Realisasi penerimaan atas pemanfaatan BMD	Indeks			
				3	Tertibnya administrasi pengamanan BMD	1	Nilai Indeks Sertifikasi dokumen kepemilikan BMD	Indeks			
				1	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	1	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah	%		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
				1	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	1	Tingkat Kematangan Teknologi Digital	Skor		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						2	Tingkat Kematangan Strategi dan Rencana TDP	Skor			
						3	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen TDP	Skor			
				2	Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	1	Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Persandian	Skor		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	PERSANDIAN

No.	Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		*Outcome*		Indikator /Alat Ukur RPJMD		Satuan	Program Unggulan/Program Prioritas	Program	Keterangan/Urusan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
				1	Tercapainya kolaborasi, integrasi,dan standardisasi dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional (SSN)	1	Persentase Perangkat Daerah yang Memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	%		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	STATISTIK
				1	Meningkatnya Kerjasama antara APIP dan APH dalam Rangka Penanganan Kasus Tipikor	1	Persentase Permintaan Audit Tujuan Tertentu atas Tipikor yang Ditindaklanjuti	%		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	INSPEKTORAT
				2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Pencegahan Korupsi	1	Persentase Nilai MCSP di Atas Rata-Rata Nasional	%			
				3	Meningkatnya Efektifitas Pembinaan/ Pengawasan di Wilayah Binaan Itban I	1	Persentase Penurunan Nilai Kerugian Negara/Daerah pada Perangkat Daerah Wilayah Binaan Itban I	%			
				4	Meningkatnya Efektifitas Pembinaan/ Pengawasan di Wilayah Binaan Itban II	1	Persentase Penurunan Nilai Kerugian Negara/Daerah pada Perangkat Daerah Wilayah Binaan Itban II	%			

No.	Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		*Outcome*		Indikator /Alat Ukur RPJMD		Satuan	Program Unggulan/Program Prioritas	Program	Keterangan/Urusan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
				5	Persentase Penurunan Nilai Kerugian Negara/Daerah pada Perangkat Daerah Wilayah Binaan Itban III	1	Persentase Penurunan Nilai Kerugian Negara/Daerah pada Perangkat Daerah Wilayah Binaan Itban III	%			
				6	Persentase Penurunan Nilai Kerugian Negara/Daerah pada Perangkat Daerah Wilayah Binaan Itban IV	1	Persentase Penurunan Nilai Kerugian Negara/Daerah pada Perangkat Daerah Wilayah Binaan Itban IV	%			
				7	Meningkatnya Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP	1	Persentase Rata-Rata Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan APIP	%			
				8	Meningkatnya Tuntutan Ganti Rugi yang Diselesaikan	1	Persentase Tuntutan Ganti Rugi yang Diselesaikan	%			
				9	Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah Dalam Proses PBJ	1	Persentase Kepatuhan Proses Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah	%			
				10	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas	1	Nilai AKIP Komponen Evaluasi Internal	Nilai			

No.	Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		*Outcome*		Indikator /Alat Ukur RPJMD		Satuan	Program Unggulan/Program Prioritas	Program	Keterangan/Urusan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
					Kinerja Unsur Pengawasan						
				11	Meningkatnya Kepatuhan Penerapan Kriteria Dalam Penyusunan LPPD	1	Persentase Kehandalan Capaian IKK LPPD Pemerintah Daerah	%			
				12	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1	Persentase Rekomendasi Hasil Reviu LKPD yang Ditindaklanjuti	%			
				1	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Pencegahan Korupsi	1	Persentase Nilai MCSP di Atas Rata-Rata Nasional	%		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	INSPEKTORAT
				2	Persentase Nilai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)	1	Persentase Nilai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)	%			
				3	Meningkatnya Mutu dan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan	1	Persentase Peningkatan Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal	%			
				4	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Unsur Pengawasan	1	Nilai AKIP Komponen Evaluasi Internal	Nilai			

No.	Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		*Outcome*		Indikator /Alat Ukur RPJMD		Satuan	Program Unggulan/Program Prioritas	Program	Keterangan/Urusan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
				5	Meningkatnya Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	1	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP Terintegrasi	%			
				6	Meningkatnya Perangkat Daerah yang Memenuhi Kriteria Menuju WBK/ WBBM	1	Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM	%			
				7	Meningkatnya Pendampingan Perangkat Daerah dalam Perumusan Dokumen LPPD	1	Persentase Perangkat Daerah yang Mendapat Pendampingan Perumusan Dokumen LPPD	%			
				8	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1	Persentase Rekomendasi Hasil Reviu LKPD yang Ditindaklanjuti	%			
				1	Meningkatnya kualitas penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN, pengadaan ASN, pengangkatan ASN, jaminan pensiun dan hari tua, pensiun, serta	1	Nilai NSPK Elemen penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN, pengadaan ASN, pengangkatan ASN, jaminan pensiun dan hari tua, pensiun, serta perlindungan ASN.	Point		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	KEPEGAWAIAN

No.	Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		*Outcome*		Indikator /Alat Ukur RPJMD		Satuan	Program Unggulan/Program Prioritas	Program	Keterangan/Urusan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
					perlindungan ASN.						
				2	Meningkatnya kualitas pengelolaan jabatan, pangkat, pola karier, dan mutasi ASN.	1	Nilai NSPK Elemen Jabatan, Pangkat, Pola Karier, dan Mutasi.	Point			
				3	Meningkatkan Kualitas Pengembangan Karier ASN	1	Nilai NSPK Elemen Pengembangan Karier	Point			
				4	Meningkatkan Kualitas Penilaian kinerja, penghargaan, disiplin, cuti, kode etik, pemberhentian, serta penggajian, tunjangan, dan fasilitas	1	Nilai NSPK Elemen Penilaian kinerja, penghargaan, disiplin, cuti, kode etik, pemberhentian, serta penggajian, tunjangan, dan fasilitas	Point			
				5	Meningkatnya ASN yang terpetakan kompetensinya untuk mendorong peningkatan kualitas	1	Nilai NSPK Elemen Pengembangan Karier	Point			

No.	Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		*Outcome*		Indikator /Alat Ukur RPJMD		Satuan	Program Unggulan/Program Prioritas	Program	Keterangan/Urusan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
					pengembangan karir yang disesuaikan dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karir.						
						2	Presentase ASN yang sudah dinilai Kompetensinya (croscutting dengan bidang pengembangan)	Persen			
				1	Meningkatnya ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial	1	Persentasi ASN bersertifikat Kompetensi Manajerial	%		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
				2	Meningkatnya ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi Fungsional	1	Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Fungsional	%			
				3	Meningkatnya ASN yang mengikuti pengembangan	1	Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Teknis	%			

No.	Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		*Outcome*		Indikator /Alat Ukur RPJMD		Satuan	Program Unggulan/Program Prioritas	Program	Keterangan/Urusan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
					kompetensi Teknis						
				4	Meningkatnya CPNS dan PPPK yang mendapatkan pelatihan dasar	1	Persentase CPNS dan PPPK yang lulus pelatihan dasar	%			
				5	Meningkatnya ASN yang tersertifikasi	1	Persentase ASN yang tersertifikasi	%			
				6	Meningkatnya hasil evaluasi ASN pasca pelaksanaan pengembangan kompetensi	1	Persentase hasil evaluasi pelaksanaan pengembangan kompetensi yang ditindaklannjuti	%			
				1	Terpenuhinya pelayanan publik yang adaptif dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB	1	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Badan Penghubung	%		PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	PENGELOLAAN PENGHUBUNG
						2	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Badan Penghubung (Retribusi)	%			
				1	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	1	Persentase Kepemilkan Indentitas Kependudukan Digital	%		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No.	Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		*Outcome*		Indikator /Alat Ukur RPJMD		Satuan	Program Unggulan/Program Prioritas	Program	Keterangan/Urusan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
						2	Persentase Kepemilkan Kartu Identitas Anak	%			
				1	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	1	Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
						2	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%			
						3	Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%			
						4	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%			
				1	Meningkatnya Pemanfaatan informasi kependudukan	1	Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan	%		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
				1	Meningkatnya kualitas Profil Kependudukan	1	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	%		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
				1	Meningkatnya tata kelola arsip statis dan dinamis	1	Tingkat Ketersediaan Arsip	%		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	KEARSIPAN

No.	Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		*Outcome*		Indikator /Alat Ukur RPJMD		Satuan	Program Unggulan/Program Prioritas	Program	Keterangan/Urusan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
				1	Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip sesuai NSPK	1	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	%		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	KEARSIPAN
				1	Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-Undangan	1	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	%		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	SEKRETARIAT DPRD
						2	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Kategori			
				2	Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan	1	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%			
		Sasaran 24	Meningkatnya Penegakan Hukum yang Adil dan Terpeliharanya Stabilitas Keamanan untuk Mendukung Demokrasi yang Berkualitas			1	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks			
						2	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM Daerah	%			
						3	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Indeks			

No.	Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		*Outcome*		Indikator /Alat Ukur RPJMD		Satuan	Program Unggulan/Program Prioritas	Program	Keterangan/Urusan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
				1	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1	Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	%	NTB GOOD & SMART GOVERNANCE	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				1	Meningkatnya Etika dan Budaya Politik	1	Cakupan Pendidikan Politik kepada Masyarakat, Ormas, Lembaga Pendidikan.	%		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				1	Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	1	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	%		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				1	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat.	1	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan, Ekonomi, Sosial, Dudaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi	%		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No.	Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		*Outcome*		Indikator /Alat Ukur RPJMD		Satuan	Program Unggulan/Program Prioritas	Program	Keterangan/Urusan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
							Kerukunan Ummat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan				
						2	Indeks Kerukunan Umat Beragama	%			
				1	Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial yang Diselesaikan.	1	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	%		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				1	Meningkatnya Penyelesaian Terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada	1	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
				2	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	%			
				3	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Masyarakat	1	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	%			

No.	Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		*Outcome*		Indikator /Alat Ukur RPJMD		Satuan	Program Unggulan/Program Prioritas	Program	Keterangan/Urusan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
				4	Meningkatnya Kapasitas SDM PPNS	1	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	%			
		Sasaran 25	Meningkatnya Keunggulan Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah			1	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	%			
						2	Persentase Inovasi yang di terapkan dalam pembangunan daerah	%			
				1	Meningkatnya pemanfaatan Hasil kelitbangan Dalam perencanaan pembangunan	1	Persentase rekomendasi kebijakan Pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan	%	NTB GOOD & SMART GOVERNANCE	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
				2	Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan	1	Persentase kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan yang termanfaatkan dalam kebijakan Pembangunan daerah	%			

No.	Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		*Outcome*		Indikator /Alat Ukur RPJMD		Satuan	Program Unggulan/Program Prioritas	Program	Keterangan/Urusan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
				3	Meningkatnya kajian yang bermanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	1	Persentase kajian bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah yang termanfaatkan dalam kebijakan Pembangunan daerah	%			
				4	Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	1	Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	%			
				1	Meningkatnya pemanfaatan dan inovasi daerah dalam pembangunan	1	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan	%			
				2	Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan	1	Persentase kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah	%		PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

No.	Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		*Outcome*		Indikator /Alat Ukur RPJMD		Satuan	Program Unggulan/Program Prioritas	Program	Keterangan/Urusan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
				3	Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	1	Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah	%			
				4	Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimtek, dan supervisi terkait riset dan inovasi daerah	1	Persentase fasilitasi, pembinaan, bimtek, dan supervisi terkait riset dan inovasi daerah	%			

Sumber : Bappeda NTB, 2025

3.2.3. Proyek Strategis Daerah

Proyek strategis daerah disusun dan ditetapkan sebagai suatu langkah kongkrit dan teknis guna memastikan pelaksanaaan berbagai indikasi program yang tertuang dalam perda nomor 5 tahun 2024 tentang Rencana Tataruang Wilayah Provinsi NTB Tahun 2024-2044. Provinsi NTB terus berkomitmen untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan, merata, dan berbasis potensi wilayah. Melalui Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2024–2044, Pemerintah Provinsi NTB menetapkan arah kebijakan pembangunan ruang wilayah yang berfokus pada peningkatan konektivitas, penguatan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, dan perlindungan lingkungan hidup.

Rencana ini mencakup pembangunan sistem jaringan transportasi darat, laut, dan udara; penyediaan infrastruktur pendidikan dan kesehatan; pengembangan kawasan industri strategis seperti Science, Technology, and Industrial Park (STIP); hingga penyediaan energi berbasis sumber daya terbarukan seperti PLTMH, PLTB, dan PLTS. Kawasan-kawasan strategis seperti Mataram Raya Gili Tramena, Kuta Mandalika, Kawasan Industri Sumbawa Barat, Agribisnis Poto Tano-Alas-Utan, SAMOTA, Teluk Cempi-Hu'u, Teluk Bima dan Waworada-Sape menjadi prioritas dalam perwujudan pusat kegiatan nasional, wilayah, dan lokal. Selain itu, aspek lingkungan juga menjadi prioritas dengan pengelolaan kawasan lindung, pengendalian banjir, serta rehabilitasi hutan dan irigasi. Program-program yang dirancang melibatkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta, dan masyarakat, serta didukung oleh pendanaan dari APBN, APBD, dan skema pembiayaan alternatif.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan ruang wilayah Provinsi NTB yang berkelanjutan dan inklusif, Pemerintah Provinsi NTB melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi NTB Tahun 2024–2044 menetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan pada periode Rencana Jangka Menengah (RPJMD) tahap pertama, yaitu tahun 2025–2029.

Fokus utama pada periode ini adalah peningkatan infrastruktur dasar, penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah, serta peningkatan kualitas layanan publik. Beberapa program strategis yang menjadi prioritas antara lain:

1. Pengembangan Kawasan Mataram Raya sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), melalui pembangunan infrastruktur pendidikan tinggi (Universitas Mataram dan UIN Mataram), fasilitas kesehatan seperti rumah sakit rujukan, serta pengembangan STIP (*Science, Technology, and Industrial Park*) di Lombok Barat.
2. Peningkatan jaringan transportasi regional dan nasional, seperti pembangunan Jalan Arteri Primer Sondosia–Lewamori, peningkatan konektivitas melalui Jalan Kolektor Primer Teluk Saleh–Moyo–Tambora, serta pembangunan jalan lingkar dan akses pelabuhan.
3. Penguatan sektor kelautan dan perikanan, termasuk pengawasan pemanfaatan ruang laut, pengembangan Sentra Industri Bioteknologi Kelautan di Lombok Tengah, serta revitalisasi pelabuhan dan terminal penumpang di Pringgabaya dan Bangsal.

4. Penyediaan dan pengembangan energi, melalui pembangunan pembangkit listrik seperti PLTMG Sumbawa, PLTU Hu'u, PLTS, serta PLTMH di berbagai kabupaten sebagai bentuk transisi energi terbarukan.
5. Pengelolaan sumber daya air dan lingkungan, termasuk pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi strategis seperti DI Pengga, Katon, dan Remening; serta pengendalian banjir dan perlindungan pantai seperti di sepanjang pantai di Gili Tramena dan Muara Sungai Dodokan.
6. Pengembangan kawasan permukiman dan layanan dasar, seperti pembangunan jaringan SPAM Regional Pulau Lombok, fasilitas persampahan (TPA/TPST Regional Kebon Kongok, Lingsar), serta fasilitas pengelolaan limbah B3.

Program-program ini didukung oleh sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta kolaborasi dengan sektor swasta. Pendanaan bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan Kab/Kota, serta investasi badan usaha, dengan jadwal pelaksanaan secara bertahap selama tahun 2025 hingga 2029.

Melalui perencanaan dan pelaksanaan program-program yang terstruktur dan terintegrasi ini, diharapkan tercapai landasan kuat bagi pemerataan pembangunan, peningkatan daya saing wilayah, dan pencapaian target-target tata ruang sesuai dengan prinsip berkelanjutan, keterpaduan, dan keadilan ruang, memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat serta mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan di Provinsi NTB.

Periode tahun 2025–2029 merupakan tahap awal implementasi RTRW Provinsi NTB 2024–2044. Pada fase ini, penekanan diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar, penguatan struktur ruang, pemanfaatan ruang yang berkelanjutan, serta perlindungan kawasan strategis. Tujuan utamanya adalah menyeimbangkan pengembangan ekonomi dengan kelestarian lingkungan, sembari mendorong daya saing wilayah melalui pengelolaan ruang yang terintegrasi.

I. Indikasi Program Perwujudan Struktur Ruang

A. Perwujudan Sistem Pusat Permukiman

a. Penguatan Kawasan Perkotaan Mataram Raya (PKN)

1. Pembangunan kampus baru Universitas Mataram dan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram di Lombok Barat.
2. Pengembangan *Science, Technology, and Industrial Park* (STIP) di Gerung sebagai sentra inovasi dan industri unggulan.
3. Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga dan ruang publik skala metropolitan.
4. Pengembangan kawasan perumahan terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum (SPAM) dan TPST regional.

b. Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

1. Di Praya, Sumbawa Besar, dan Bima: identifikasi dan inventarisasi penggunaan tanah pesisir dan sempadan pantai untuk penataan ruang pantai yang adaptif terhadap perubahan iklim.

2. Pembangunan sarana pendidikan tinggi (IAIN Bima) di Kota Bima dan fasilitas olahraga di Kabupaten Lombok Barat (Gerung).

B. Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi

a. Peningkatan Konektivitas Jalan

1. Pembangunan Jalan Arteri Primer Sondosia–Lewamori (Bima).
2. Penanganan Jalan Kolektor Primer akses kawasan Teluk Saleh–Moyo–Tambora.
3. Penanganan Jalan Kolektor Primer akses kawasan Teluk Saleh–Moyo–Tambora.
4. Pelebaran dan peningkatan standar jalan lintas antar-kabupaten seperti Kuta–Kruak, Labuhan Haji–Pringgabaya, serta Bayan–Labuhan Lombok.
5. Pengembangan akses menuju TPA Kebon Kongok.
6. Pengembangan Jalan Tol dan Jembatan
7. Penyusunan rencana dan pembangunan Jalan Tol Lembar–Kayangan (*port to port*).
8. Pembangunan Jembatan Padak Tiu 1–3 (Sumbawa) dan rehabilitasi jembatan strategis seperti Lewamori, Midang, dan Sindu.

b. Transportasi Laut dan Terminal

1. Pembangunan terminal penumpang tipe B di Pringgabaya dan Bangsal.
2. Revitalisasi dan pengembangan pelabuhan pengumpan lokal: Labuhan Poh Sekotong, Gili Gede, dan Kuta Mandalika.
3. Pembangunan terminal umum di Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno.

C. Perwujudan Sistem Jaringan Energi dan Ketenagalistrikan

a. Energi Fosil dan Transisi Energi

1. Pengembangan PLTMG Lombok 2 (Lombok Timur), PLTMG Sumbawa 2–4, dan PLTMG Bima 2.
2. Pembangunan PLTU Hu'u (Dompu), PLTU Bima, dan transformasi PLTD menjadi PLTS di Labuhan Aji, Sebotok, dan Lunyuk (Sumbawa).

b. Energi Terbarukan

1. Pembangunan PLTA Meninting, Gunung Jawa, dan Batu Lanteh.
2. Pembangunan PLTB Lombok Timur dan PLTArus Laut (PLTAL) Selat Alas
3. Pengembangan PLTS Sumbawa–Bima dan PLTMH Meninting, Bayan 3, Rarak Ronges, dan lainnya.

D. Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air

a. Irigasi dan Pengendalian Banjir

1. Rehabilitasi jaringan irigasi strategis seperti DI Remening, DI Pengga, DI Batu Bulan, dan DI Katon.
2. Pembangunan Kolam Retensi Sungai Unus (Mataram), Pogem (Lombok Tengah), dan Embung Banjir Ngolang.
3. Pembangunan pengaman pantai dan breakwater di Gili Trawangan, Meno, Air, serta Sungai Dodokan dan Sumbawa.

b. Pengelolaan Limbah dan Air Minum
   1. Pembangunan SPAM Regional Pulau Lombok mencakup Mataram, Lombok Barat, Utara, Tengah, dan Timur.
   2. Pengelolaan TPST/TPA seperti TPST Lingsar dan TPA Regional Kebon Kongok.
   3. Pengembangan sarana persampahan dan pengelolaan limbah B3 di PPST Regional Lemer.

E. Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi
   1. Pembangunan jaringan kabel bawah laut koridor Denpasar–Sumbawa dan Sumbawa–Goa Lawah Bali dalam rangka integrasi Palapa Ring.
   2. Peningkatan infrastruktur komunikasi untuk mendukung kawasan pariwisata dan industri.

II. Indikasi Program Perwujudan Pola Ruang

Pola ruang dalam RTRW NTB mengatur peruntukan kawasan menjadi kawasan lindung dan kawasan budidaya, dengan program prioritas sebagai berikut:

A. Kawasan Lindung

A.1. Kawasan Hutan Lindung

Usulan perubahan fungsi kawasan hutan lindung menjadi kawasan peruntukan industri dan pertanian di Lombok Tengah (berkoordinasi dengan Kementerian LHK), yang bertujuan memberikan ruang untuk pertumbuhan ekonomi lokal yang tetap terkendali dan ramah lingkungan.

A.2. Kawasan Konservasi

Penguatan pengelolaan kawasan konservasi seperti TN Gunung Rinjani dan kawasan mangrove, serta perubahan peruntukan dan fungsi kawasan konservasi menjadi area penggunaan lain di TWA Gili Tramena.

Penataan zonasi kawasan rawan bencana dan rawan longsor untuk mitigasi risiko iklim.

B. Kawasan Budidaya

B.1. Kawasan Permukiman

1. Pengembangan permukiman baru terintegrasi di Kawasan Mataram Raya, Lombok Tengah (Praya), dan Sumbawa.

2. Penyediaan PSU permukiman (SPAM, sanitasi, persampahan, akses jalan lingkungan).

B.2. Kawasan Pertanian dan Perikanan

1. Rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi di daerah irigasi Remening, Pengga, Pandanduri–Swangi, dan Rababaka (Dompu).

2. Pengembangan sentra perikanan tangkap dan budidaya laut, termasuk Sentra Bioteknologi Kelautan di Lombok Tengah.

B.3. Kawasan Pariwisata

1. Penataan kawasan wisata strategis seperti Mandalika, Gili Trawangan–Meno–Air, dan Pantai Ampenan.

2. Pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata seperti dermaga, jalur seaplane, dan terminal pelabuhan wisata.

B.4. Kawasan Industri dan Energi

1. Pengembangan kawasan industri di STIP Gerung.
2. Pembangunan energi terbarukan: PLTMH, PLTS, PLTB, dan PLTA di Lombok Barat, Lombok Timur, dan Sumbawa.

III. Indikasi Program Kawasan Strategis Provinsi NTB

Kawasan strategis di NTB ditetapkan berdasarkan kepentingan ekonomi dan lingkungan hidup. Berikut beberapa kawasan strategis dalam indikasi program tahun 2025–2029:

A. Kawasan Strategis Ekonomi

1. Mataram Raya (Kota Mataram & Lombok Barat)

a. Pusat layanan pendidikan tinggi, kesehatan regional, dan industri kreatif.

b. Pembangunan Rumah Sakit kelas A, kawasan kampus terpadu (Unram & UIN), dan sport center.

c. Peningkatan akses transportasi melalui Jalan Lingkar Utara, Jembatan Midang, dan Jalan Tol Lembar–Kayangan.

2. Kawasan Mandalika dan Sekitarnya

a. Dukungan infrastruktur pariwisata kelas dunia.

b. Pengembangan pelabuhan pengumpan lokal Kuta Mandalika.

c. Penyediaan SPAM, jaringan energi, dan transportasi terpadu menuju KEK Mandalika.

3. Teluk Saleh – Moyo – Tambora (Samota)

a. Penanganan Jalan Kolektor Primer Tahap I.

b. Pengembangan pelabuhan logistik dan perikanan di Pantai Utara Sumbawa.

B. Kawasan Strategis Lingkungan

Kawasan Strategis Lingkungan terdiri dari:

a. Kawasan Ekosistem Puncak Ngengas Selalu Legini (Sumbawa dan Sumbawa Barat)
b. Kawasan Ekosistem Gunung Tambora (Dompu dan Bima)
c. Kawasan Ekosistem Hutan Parado (Dompu dan Bima)

Program kegiatan yang dilakukan antara lain:

1. Rehabilitasi hutan lindung dan pengamanan kawasan tangkapan air.
2. Pembangunan embung retensi dan kolam pengendali banjir.
3. Pengamanan sempadan pantai di kawasan pesisir yang padat penduduk dan kawasan pariwisata.

Program indikatif RTRW Provinsi NTB untuk PJM I (tahun 2025–2029) menunjukkan arah kebijakan yang kuat untuk:

1. Mempercepat konektivitas antar wilayah dan pusat kegiatan.
2. Mendorong industrialisasi berbasis sumber daya lokal.
3. Meningkatkan ketahanan infrastruktur dasar dan pelayanan publik.
4. Menjaga keseimbangan pembangunan melalui perlindungan kawasan lindung dan kawasan rawan bencana.

Seluruh program ini dilaksanakan melalui sinergi lintas sektor dan level pemerintahan, dengan sumber pendanaan dari APBN, APBD provinsi dan Kab/Kota, serta investasi swasta.

Air Terjun Matajitu

Air terjun yang tersembunyi di balik hutan lebat Pulau Moyo ini, memiliki keindahan alam yang unik dan mempesona yang telah menarik perhatian dunia, termasuk Putri Diana yang pernah mengunjunginya. Cagar alam Indonesia ini memiliki pemandangan asri, dengan empat undak dan tujuh kolam alami, lengkap dengan pepohonan hijau alami, menjadikan Air Terjun Mata Jitu sebagai primadona di Pulau Moyo.

Kab. Sumbawa, Provinsi NTB
8°12'41.7"S 117°31'15.7"E

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Jembatan Samota

Jembatan Samota yang merupakan Singkatan dari tiga destinasi pariwisata yaitu Saleh (Teluk Saleh) - Moyo (Pulau Moyo) dan Tambora (Gunung Tambora), adalah Jembatan ikonik yang dibangun di atas Sungai Brang Biji di Kabupaten Sumbawa yang bertujuan untuk mendukung akses ke tiga destinasi pariwisata faforit tersebut, untuk membangikitkan ekonomi masyarakat sekitar.

Kab. Sumbawa, Provinsi NTB
8°28'06.6"S 117°24'36.9"E

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah

Perumusan program perangkat daerah merupakan proses strategis dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang didasarkan pada prinsip-prinsip perencanaan yang holistik, partisipatif, berbasis data, dan selaras dengan arah pembangunan nasional maupun daerah. Setiap program yang dirumuskan oleh perangkat daerah bertujuan untuk menjawab isu-isu strategis, menyelesaikan permasalahan pembangunan, serta mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah secara terukur dan berkelanjutan.

Program Prioritas Daerah dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran setiap Misi dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 yang mendukung Kegiatan Prirotas Utama (KPU) sebanyak 11 KPU di Provinsi NTB adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Dukungan 11 KPU untuk Provinsi NTB

NO	NASIONAL			PROVINSI NTB		
	KPU	Deskripsi Singkat	Lokasi Prioritas	NAMA PROGRAM UNGGULAN	DESKRIPSI SINGKAT	Lokasi Prioritas
1	**05 - Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok-Gili Tramena**	KP ini bertujuan untuk meningkatkan kesesuaian kualitas daya dukung dan daya tampung pariwisata, serta kualitas rantai pasok pariwisata prioritas Lombok-Gili Tramena	Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Utara *Key Tourism Area*: Sengigi-Gili, Pantai Selatan Mandalika, Mataram, dan Kawasan Rinjani	(PU 5) - NTB PARIWISATA BERKELANJUTAN	Pembangunan budaya dan identitas daerah; Implementasi MICE; *Muslim-Friendly Tourism;* Penataan destinasi pariwisata; Investasi Pariwisata; Akses dan konektivitas antar destinasi pariwisata	Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Utara *Key Tourism Area*: Sengigi-Gili, Pantai Selatan Mandalika, Mataram, dan Kawasan Rinjani
				(PU 6) - E-MANIA	Ekosistem industri ekonomi kreatif; Pengembangan UMKM dan industri kreatif; Ruang Kaum Muda Kreatif; Produk unggulan berkelas, kompetitif, dan mendunia.	

NO	NASIONAL			PROVINSI NTB		
	KPU	Deskripsi Singkat	Lokasi Prioritas	NAMA PROGRAM UNGGULAN	DESKRIPSI SINGKAT	Lokasi Prioritas
2	**05 Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir**	Kegiatan prioritas ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah dan kapasitas SPAM yang dikembangkan serta dikelola secara terintegrasi dari hulu ke hilir, serta meningkatkan jumlah lembaga pengelola SPAM yang melaksanakan pengamanan dan pengawasan kualitas air minum.	Seluruh Provinsi	(PU 10) - NTB CONNECTED	Layanan infrastruktur dasar: air bersih, rumah layak huni, jaringan listrik, dan telekomunikasi	Seluruh Kab/Kota
3	**01 - Peningkatan Ketahanan Iklim Pesisir dan Laut**	Intensitas kejadian bencana dan perubahan iklim semakin meningkat, khususnya di wilayah pesisir dengan laju rata-rata kenaikan muka air laut Indonesia sebesar 0,8-1,2 cm/tahun. Selain itu, peningkatan gelombang tinggi hingga 1,5-2,5 meter juga berpotensi terjadinya kecelakaan kapal nelayan dan mengakibatkan penurunan tangkapan perikanan. Melalui KP ini diharapkan dapat menurunkan potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim di sektor kelautan dan pesisir tersebut.	Provinsi NTB 1. Lokasi Prioritas Pembangunan Berketahanan Iklim Sektor Pesisir 2. Lokasi Prioritas Pembangunan Berketahanan Iklim Sektor Kelautan Pantai 3. Kawasan 3T 4. Kawasan Pesisir Perkotaan, Strategis Ekonomi, dan Beresiko Abrasi Tinggi	(PU 8) - NTB LESTARI BERKELANJUTAN	Hutan Lestari; Ekonomi Hijau; Ekonomi Sirkuler; Pembangunan Rendah Karbon Dan Berketahanan Iklim; Energi Bersih; Ketangguhan Bencana; Geopark Dan Cagar Biosfer Berkelanjutan; Daerah Aliran Sungai (DAS) Sehat & Berkelanjutan; Pelestarian lingkungan di kawasan pesisir dan meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana	Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana: Kawasan Rawan Bencana Gempa Darat Kawasan Konservasi Nasional Gili Matra, Kab. Lombok Utara Kawasan Konservasi Daerah Gili Balu, Kab. Sumbawa Barat
4	**01 - Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa**	Tujuan dari KP ini untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan terhadap layanan dasar serta infrastruktur desa yang masih sangat bervariasi baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Pemenuhan infrasruktur perdesaan akan berdampak signifikan terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa, serta	Desa-desa di 30 Kawasan Perdesaaan Prioritas (KPP) Provinsi NTB: Kawasan Perdesaan Prioritas berbasis Pariwisata Sembalun	(PU2) - DESA BERDAYA Desa Tanpa Kemiskinan Desa Mandiri Pangan Desa Tangguh Bencana Desa Inklusi (GEDSI) Desa Bebas Narkoba dan Judi Online Desa Sehat dan	Layanan Dasar infrastruktur dasar: air bersih, rumah layak huni, jaringan listrik, dan telekomunikasi	Kawasan Afirmasi : Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) Kawasan Perdesaan Berbasis Pariwisata Sembalun, Kab. Lombok Timur

NO	NASIONAL			PROVINSI NTB		
	KPU	Deskripsi Singkat	Lokasi Prioritas	NAMA PROGRAM UNGGULAN	DESKRIPSI SINGKAT	Lokasi Prioritas
		mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.		Bebas Stunting Desa Belajar Desa DIA-Cantik Desa BUMDes Maju Desa Koperasi Merah Putih Desa Tanpa Kawasan Kumuh Desa Tanpa Rumah Tidak Layak Huni Desa Tanpa Banjir Desa Literasi Desa Sadar Pajak Desa Wisata Maju Desa Hijau Desa Bebas Sampah Desa Tanpa Krisis Air Bersih Desa Ekspor (PU 4) - NTB AGRO MARITIM (PU 1) - NTB SEHAT DAN CERDAS (PU 10) - NTB CONNECTED		
5	Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	Peningkatan ketersediaan pangan secara berkelanjutan melalui produksi pangan lokal dan nabati	Seluruh Provinsi	(PU 4) - NTB AGRO MARITIM (PU 2) – DESA BERDAYA	Penguatan Ketahanan pangan di daerah	Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi : Kawasan Pangan Lokal Kab. Sumbawa Kab. Lombok Timur Kab. Dompu Kab. Bima
6	Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri pengolahan berbasis rumput laut untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri rumput laut	Provinsi NTB	(PU 4) - NTB AGRO MARITIM (PU 4) - NTB AGRO MARITIM Pengembangan Ekonomi Biru (PU 4) - NTB AGRO MARITIM Peningkatan nilai ekspor komoditas unggulandaerah sektor non-tambang,		Kawasan Pertumbuhan : Kawasan Industri Sumbawa Barat di Kabupaten Sumbawa Barat Kawasan Komunitas Unggulan : Kawasan Perkebunan Kab. Lombok Timur Kab. Dompu Kab. Lombok

NO	NASIONAL			PROVINSI NTB		
	KPU	Deskripsi Singkat	Lokasi Prioritas	NAMA PROGRAM UNGGULAN	DESKRIPSI SINGKAT	Lokasi Prioritas
				(PU 4) - NTB AGRO MARITIM Pendekatan kawasan strategis pusat pertumbuhan wilayah dan sentra produksi komoditas unggulan daerah		Utara Kab. Sumbawa Kawasan Peternakan Kab. Lombok Tengah Kab. Lombok Timur Kab. Sumbawa Kab. Dompu Kab. Bima Kawasan Sentra Garam Kab. Bima Kab. Lombok Timur Kab. Sumbawa Kab. Lombok Barat Kawasan Perikanan dan Sentra Rumput Laut Kab. Sumbawa Kab. Lombok Timur Kab. Bima Kab. Lombok Tengah Kab. Lombok Barat Sentra Akuakultur – Komoditas Udang Kab. Sumbawa Kab. Bima Kab. Lombok Timur Kab. Sumbawa Barat Kab. Lombok Utara Kawasan Pengembangan Sentra Berbasis Perikanan Tangkap Kab. Lombok Timur Kab. Sumbawa Kab. Dompu Kawasan Afirmasi :

NO	NASIONAL			PROVINSI NTB		
	KPU	Deskripsi Singkat	Lokasi Prioritas	NAMA PROGRAM UNGGULAN	DESKRIPSI SINGKAT	Lokasi Prioritas
						Kawasan Transmigrasi 2. KT Selaparang, Kab. Lombok Timur
7	Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)	Penyediaan kebutuhan ikan/udang untuk konsumsi/pangan masyarakat, dan peningkatan nilai tambah serta produktivitas pangan akuatik dalam swasembada pangan	Provinsi NTB	(PU 4) - NTB AGRO MARITIM Penguatan Ketahanan pangan di daerah		Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi : Kawasan Pangan Lokal Kab. Sumbawa Kab. Lombok Timur Kab. Dompu Kab. Bima
8	Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut	Pengembangan ekonomi baru sebagai sumber pertumbuhan baru melalui peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri garam dan produk olahan hasil laut	Provinsi NTB	(PU 4) - NTB NTB AGRO MARITIM	Pembangunan kawasan industri Agromaritim yang tangguh, inklusif dan berkelanjutan	Provinsi NTB
9	Pengembangan Pangan Hewani	Kebutuhan pangan hewani cenderung meningkat namun daging ruminansia dan susu yang masih mengandalkan impor sehingga diperlukan pengembangan pangan hewani sebagai bentuk swasembada pangan yang berkualitas	Provinsi NTB	(PU 4) - NTB AGRO MARITIM Penguatan Ketahanan pangan di daerah		Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi : Kawasan Pangan Lokal Kab. Sumbawa Kab. Lombok Timur Kab. Dompu Kab. Bima
10	Penyediaan dan Pengawasan Infrastruktur Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS	Cakupan dan pemanfaatan infrastruktur sanitasi di Indonesia cukup rendah, hanya sekitar 10,21% rumah tangga yang memiliki akses ke sanitasi aman. Selain itu, sekitar 80% konsumsi air rumah tangga berubah menjadi air limbah domestik yang berkontribusi pada 73% kasus diare di Indoensia. Buruknya kondisi terhadap sumber air baku ini meningkatkan beban finansial pengolahan air minum oleh operator, pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Melalui KP	Seluruh Wilayah Indonesia Prioritas lokal akan mempertimbangkan kriteria: a. Wilayah Metropolitan dan Ibukota Provinsi b. Wilayah DAS dan kawasan Pesisir Prioritas c. *Challenging Area* (Rawan Air, Pesisir, dan lain sebagainya)	(PU 1) - NTB SEHAT DAN CERDAS (PU 8) - NTB LESTARI BERKELANJUTAN	Edukasi langsung ke masyarakat Memastikan terselenggaranya pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup dengan penguatan sektor kehutanan, pelestarian lingkungan di kawasan pesisir, meningkatkan	Seluruh Wilayah Indonesia Prioritas lokal akan mempertimbangkan kriteria: a. Wilayah Metropolitan dan Ibukota Provinsi b. Wilayah DAS dan kawasan Pesisir Prioritas c. *Challenging Area* (Rawan Air, Pesisir, dan lain sebagainya)

NO	NASIONAL			PROVINSI NTB		
	KPU	Deskripsi Singkat	Lokasi Prioritas	NAMA PROGRAM UNGGULAN	DESKRIPSI SINGKAT	Lokasi Prioritas
		ini diharapkan dapat meningkatkan cakupan layanan, keberfungsian, dan kualitas infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.			ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana dan pengarusutamaan pemanfaatan energi ramah lingkungan di berbagai sektor pembangunan	
11	Pembangunan Infrastruktur Jaringan Ketenagalistrikan dan Digitalisasinya	KP ini bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur ketenagalistrikan, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas dan mengurangi ketimpangan wilayah.	Seluruh Wilayah Indonesia	(PU 10) - NTB CONNECTED	Jaringan listrik dan telekomunikasi	Seluruh Wilayah Indonesia

Program Prioritas Daerah dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran setiap Misi merupakan Agenda Kerja Prioritas dari Program Unggulan Daerah sebagai berikut:

1. Agenda Kerja Prioritas Program Unggulan NTB Sehat dan Cerdas

Program unggulan ini merupakan perkuatan pondasi pelayanan dasar bidang Kesehatan dan Pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat NTB yang mendukung capaian nilai Indeks Modal Manusia (IMM). NTB Sehat dan Cerdas secara konsep difokuskan pada dua aspek yaitu Kesehatan dan Pendidikan. Pada aspek Kesehatan dilakukan dengan memperkuat upaya pelayanan kesehatan dasar, memastikan kemudahan akses pelayanan kesehatan, dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan Rumah Sakit. Untuk aspek Pendidikan dengan Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 Tahun Pra Sekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Menengah) melalui peningkatan kualitas pemenuhan SPM Pendidikan, penanganan anak tidak sekolah, kolaborasi antar pusat dan daerah, dan pemberdayaan masyarakat melalui PKBM.

Tujuan strategis program ini adalah Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 Tahun Pra Sekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Menengah). Sedangkan sasarannya meliputi; (a) Pencegahan dan penanganan stunting menuju NTB Bebas Stunting; (b). Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 Tahun Pra Sekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Menengah); dan (c). Semua Anak Bersekolah sesuai dengan jenjang umurnya.

Agenda prioritas kerja yang akan direalisasikan dalam lima tahun pelaksanaan RPJMD tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. **NTB Bebas Stunting**

NTB Bebas Stunting merupakan upaya untuk mencegah dan menangani prevalensi stunting di tingkat desa/kelurahan dengan pendekatan spesifik dan pendekatan *sensitive*, fokus pada 1000 HPK, mengoptimalkan implementasi New Posyandu, mencegah perkawinan anak yang berdampak pada prevalensi stunting, dan menjamin ketersediaan gizi dan pemberian makanan tambahan untuk anak, ketersediaan pangan, kesehatan ibu, remaja putri, edukasi untuk ayah, menuju NTB BEBAS STUNTING.

BIDANG URUSAN UTAMA: Kesehatan

BIDANG URUSAN PENDUKUNG: Perencanaan, Pendidikan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Komunikasi dan Informatika, Pertanian, Pangan, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

2. NTB Bebas Penyakit Menular Dan Penyakit Tidak Menular

NTB Bebas Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan melakukan skrining penyakit menular dan tidak menular, mengoptimalkan gerakan masyarakat hidup sehat dan bersih, mengurangi penyebaran penyakit menular, menurunkan kasus penyakit menular dan tidak menular, optimalisasi peran puskesmas dan pembantu puskesmas di tingkat masyarakat.

BIDANG URUSAN UTAMA: Kesehatan

BIDANG URUSAN PENDUKUNG: Perencanaan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepegawaian, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

3. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional *(Universal Health Coverage)* 100%

UHC 100% bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kepesertaan dan keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan.

BIDANG URUSAN UTAMA: Kesehatan

BIDANG URUSAN PENDUKUNG: Perencanaan, Pendidikan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Komunikasi dan Informatika, Pertanian, Pangan, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Sekretariat Daerah.

4. SPM Pendidikan Dan Kesehatan Berkualitas

SPM Pendidikan dan Kesehatan Berkualitas bertujuan untuk pemenuhan layanan dasar dan pencapaian mutu minimal layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Untuk bidang kesehatan, target yang akan dicapai adalah pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi (90%) dan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi (90%). Untuk bidang pendidikan, mendukung implementasi SPM dalam bidang pendidikan.

BIDANG URUSAN UTAMA: Kesehatan

BIDANG URUSAN PENDUKUNG: Perencanaan, Sekretariat Daerah, Pendidikan dan Pelatihan, Komunikasi dan Informatika, Kepegawaian, Inspektorat Daerah.

5. Layanan Rumah Sakit Dan *Telemedicine* Untuk Semua

Layanan Rumah Sakit Untuk Semua bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kelas rumah sakit menjadi B dan A serta terakreditasi paripurna menjadi rujukan untuk Provinsi NTB dan Kawasan Timur Indonesia, pengembangan *health tourism* yang mendukung MICE.

BIDANG URUSAN UTAMA: Kesehatan

BIDANG URUSAN PENDUKUNG: Perencanaan, Sekretariat Daerah, Pendidikan dan Pelatihan, Komunikasi dan Informatika, Kepegawaian, Inspektorat Daerah.

6. Wajib Belajar (WAJAR) 13 Tahun

Wajib Belajar (WAJAR) 13 Tahun bertujuan untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah usia anak sebagai fondasi pengetahuan yang kuat, yaitu dengan 1 Tahun Pra Sekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Menengah, dengan perbaikan kurikulum sekolah untuk pelajaran dasar, kreatifitas anak, seni dan budaya tradisional daerah, dan pendidikan akhlak spiritual, penyediaan infrastruktur, sarana-prasarana pendidikan dari ruang belajar, perpustakaan, toilet, fasilitas olahraga dan seni kreatif, peningkatan kualitas, kapasitas, kompetensi, kesejahteraan, insentif dan disinnsentif untuk guru dan tenaga kependidikan yang professional untuk semua anak, termasuk anak yang berkebutuhan khusus, dan anak penyandang disabilitas, mengoptimalkan bantuan keuangan dan beasiswa dari berbagai sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat, ketersediaan makanan bergizi untuk anak usia sekolah yang mendukung kecerdasan otak, fisik, dan spiritual.

BIDANG URUSAN UTAMA: Pendidikan

BIDANG URUSAN PENDUKUNG: Perencanaan. Sekretariat Daerah, Pendidikan dan Pelatihan, Komunikasi dan Informatika, Kepegawaian, Inspektorat Daerah.

7. Anak Tidak Sekolah (ATS) Nol

Anak Tidak Sekolah (ATS) Nol bertujuan untuk memberikan akses dan layanan pendidikan bagi anak usia sekolah yang masih tidak/belum bersekolah, melalui pendataan dan pemutakhiran data angka ATS berbasis desa, pemberian layanan yang sesuai dengan usia dan pengetahuan anak, pemberian beasiswa, insentif guru dan tenaga kependidikan, dan menjamin ketersediaan angkutan umum menuju lokasi belajar mengajar.

BIDANG URUSAN UTAMA: Pendidikan

BIDANG URUSAN PENDUKUNG: Perencanaan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Sekretariat Daerah, Pendidikan dan Pelatihan, Komunikasi dan Informatika, Kepegawaian, Inspektorat Daerah.

8. NTB Literasi Tinggi

NTB Literasi tinggi bertujuan untuk mewujudkan anak NTB usia dini yang memiliki motivasi dan minat yang tinggi untuk membaca buku dan belajar ilmu pengetahuan, gemar membaca, dengan menyiapkan perpustakaan desa yang terintegrasi dengan New Posyandu, perpustakaan keliling dengan buku dan sumber pengetahuan bermutu, secara digital dan non-digital, mudah diakses, dan menyiapkan kelompok relawan yang membantu kampanye NTB literasi tinggi untuk meningkatkan kualitas SDM NTB sejak dini.

BIDANG URUSAN UTAMA: Pendidikan

BIDANG URUSAN PENDUKUNG: Perencanaan, Perpustakaan, Kearsipan, Sekretariat Daerah, Pendidikan dan Pelatihan, Komunikasi dan Informatika, Kepegawaian, Inspektorat Daerah.

9. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Maju

PKBM Maju menjadi upaya untuk menyediakan jalur pendidikan alternatif bagi anak yang tidak sekolah maupun putus sekolah, melalui pemberdayaan masyarakat dengan memberikan pelatihan dan pengetahuan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan pemberian insentif kepada PKBM yang mendukung penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)

BIDANG URUSAN UTAMA: Pendidikan

BIDANG URUSAN PENDUKUNG: Perencanaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepemudaan dan Olahraga, Sekretariat Daerah, Pendidikan dan Pelatihan, Komunikasi dan Informatika, Kepegawaian, Inspektorat Daerah.

2. Agenda Kerja Prioritas Program Unggulan Desa Berdaya

Program unggulan ini merupakan skema penguatan fondasi pembangunan desa melalui dukungan bantuan keuangan dan pendampingan program berkelanjutan dari Pemerintah Provinsi NTB. Program Unggulan Desa Berdaya difokuskan pada pembangunan wilayah berbasis desa dengan prioritas utama pada pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan melalui pembangunan ekosistem industri pertanian dan subsektornya serta menjadikan NTB destinasi wisata berkelas dunia. Pendekatan program ini didasarkan pada pendekatan masalah dan pendekatan keunggulan yang terdapat di desa.

Tujuan strategis program ini diantaranya memperkuat fondasi pembangunan desa dengan dukungan hibah keuangan dan pendampingan program berkelanjutan dan memastikan potensi sosial ekonomi desa terkelola dengan baik, modal sosial terjaga, ketahanan pangan terjamin dan jumlah orang miskin berkurang signifikan. Sedangkan sasarannya; (1) Potensi sosial ekonomi desa terkelola dengan baik; (2) Modal sosial terjaga; (3) Ketahanan pangan terjamin; dan (4) Jumlah orang miskin berkurang signifikan.

Agenda prioritas kerja yang akan direalisasikan dalam lima tahun pelaksanaan RPJMD tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Desa Tanpa Kemiskinan

Desa Tanpa Kemiskinan berupaya untuk menghapus kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, memberikan perlindungan sosial adaptif kepada kelompok rentan, meningkatkan akses layanan kebutuhan dasar, meningkatan kualitas Pendidikan, kesehatan, dan keterampilan kelompok masyarakat miskin di desa.

BIDANG URUSAN UTAMA: Perencanaan

BIDANG URUSAN PENDUKUNG: Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pendidikan, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perpustakaan, Kearsipan, Kesehatan, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Sosial, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pertanian, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Kepemudaan dan Olahraga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kesatuan Bangsa dan Politik, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian, Pangan.

2. Desa Mandiri Pangan

Desa Mandiri Pangan bertujuan untuk mendorong kemandirian pangan dari potensi lokal sektor pertanian dalam arti luas, mengembangkan Lumbung Pangan Desa untuk desa yang rawan pangan dan Rumah Pangan Desa pada desa-desa kantong kemiskinan.

BIDANG URUSAN UTAMA: Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan

BIDANG URUSAN PENDUKUNG: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Perindustrian, Penelitian dan Pengembangan, Komunikasi dan Informatika, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perencanaan.

3. Desa Wisata Maju

Desa Wisata Maju bertujuan untuk mengembangkan potensi pariwisata lokal, destinasi wisata berkelanjutan, melestarikan budaya lokal, tradisi, dan keunikan alam perdesaan.

BIDANG URUSAN UTAMA: Kebudayaan, Pariwisata

BIDANG URUSAN PENDUKUNG: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Energi dan Sumber Daya Mineral, Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat, Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olahraga, Perindustrian, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kesatuan Bangsa dan Politik, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Sosial, Perencanaan.

4. Desa Tangguh Bencana

Desa Tangguh Bencana bertujuan untuk meningkatkan kapasitas daerah, ketangguhan, dan pengurangan risiko bencana di tingkat desa, sekolah yang aman bencana, sistem informasi SIAGA bencana.

BIDANG URUSAN UTAMA: Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat

BIDANG URUSAN PENDUKUNG: Sosial, Dinsos, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Perhubungan, Kesatuan Bangsa dan Politik, Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat, Komunikasi dan Informatika, Perencanaan.

5. Desa Hijau

Desa Hijau mewujudkan lingkungan desa yang bersih, sehat, lestari, melalui pengelolaan sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan, mengembangkan ekonomi hijau berbasis potensi lokal, pemanfaatan energi terbarukan dan ramah lingkungan untuk ketahanan energi desa.

BIDANG URUSAN UTAMA: Lingkungan Hidup, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral

BIDANG URUSAN PENDUKUNG: Perindustrian, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan.

6. Desa Bebas Sampah

Desa Bebas Sampah bertujuan untuk mengembangkan sistem pengelolaan sampah partisipatif, mendorong perubahan perilaku masyarakat desa dalam pengelolaan sampah, mengurangi volume sampah rumah tangga dan sampah organik, mengembangkan ekonomi sirkular dengan unit usaha pengelolaan sampah, mendorong gerakan bebas sampah dan tidak membuang sampah sembarangan.

BIDANG URUSAN UTAMA: Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN PENDUKUNG: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kesehatan, Pertanian, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Penelitian dan Pengembangan, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Sosial, Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat, Perencanaan.

7. Desa Inklusi/GEDSI

Desa Inklusi/GEDSI mewujudkan layanan publik desa yang responsif gender dan inklusif untuk akses pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial adaptif, tersedianya fasilitas infrastruktur desa yang mudah diakses kelompok rentan, menghapus praktik diskriminatif, kekerasan berbasis gender, dan stigma sosial, meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam menerapkan prinsip GEDSi pada kegiatan di desa.

BIDANG URUSAN UTAMA: Perencanaan

BIDANG URUSAN PENDUKUNG: Sosial, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan, Komunikasi dan Informatika.

8. Desa Bebas Narkoba Dan Judi Online

Desa Bebas Narkoba dan Judi Online mewujudkan desa yang aman, dengan lingkungan sosial yang bebas dari penyalahgunaan narkoba dan praktik judi online, melindungi generasi muda dengan Pendidikan, pembinaan karakter, kegiatan komunitas yang produktif, pencegahan dan deteksi dini dengan penguatan peran keluarga, membangun budaya kerja keras dan menciptakan peluang kerja di desa, pengembangan ekonomi lokal produktif di desa.

BIDANG URUSAN UTAMA: Kesatuan Bangsa dan Politik

BIDANG URUSAN PENDUKUNG: Sosial, Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pendidikan, Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat, Komunikasi dan Informatika, Perencanaan.

9. Desa Sehat Dan Bebas Stunting

Desa Sehat dan Bebas Stunting bermanfaat untuk menurunkan prevalensi stunting melalui intervensi gizi spesifik dan sensitif, peningkatan kapasitas kader Posyandu, akses keluarga terhadap pangan bergizi dan aman, menjaga pola asuh anak, generasi desa yang sehat, cerdas, dan produktif, sanitasi aman dan layak,

BIDANG URUSAN UTAMA: Kesehatan

BIDANG URUSAN PENDUKUNG: Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pendidikan, Pangan, Kelautan dan Perikanan, Sosial, Perencanaan.

10. Desa Belajar

Desa Belajar bertujuan untuk membangun PAUD untuk generasi desa yang sehat, cerdas, dan produktif dengan menurunkan angka Anak Tidak Sekolah (ATS), mengembangkan perpustakaan desa, mengembangkan literasi digital, tempat pembelajaran berbagai ilmu pengetahuan

BIDANG URUSAN UTAMA: Pendidikan

BIDANG URUSAN PENDUKUNG: Perpustakaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Komunikasi dan Informatika, Perencanaan.

11. Desa DIA Cantik

Desa DIA Cantik bertujuan untuk mengembangkan Desa Data Integrasi Akurat (DIA) dan Cinta Statistik (Cantik), sebagai pengembangan dari Desa Cinta Statistik yang telah

dilaksanakan oleh BPS. Bersinergi dengan Sistem Informasi Desa (SID), untuk menghasilkan data mikro level desa (skala rumah tangga/individu) untuk memperkuat data pokok pembangunan dari desa sampai dengan provinsi.

BIDANG URUSAN UTAMA: Perencanaan

BIDANG URUSAN PENDUKUNG: Statistik, Semua Bidang Urusan

12. Desa BUMDES Maju

Desa Bumdes Maju bertujuan untuk mengelola usaha ekonomi produktif di desa melalui optimalisasi potensi lokal desa, mengembangkan ekosistem ekonomi lokal, menyediakan lapangan kerja, membangun tata kelola usaha desa yang transparan, akuntabel, dan berbasis partisipasi masyarakat desa

BIDANG URUSAN UTAMA: Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

BIDANG URUSAN PENDUKUNG: Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Komunikasi dan Informatika, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Perencanaan.

13. Desa Koperasi Merah Putih

Desa Koperasi Merah Putih (KMP) merupakan bagian dari strategi nasional yang akan diimplementasikan di daerah. KMP telah menjadi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, suatu langkah strategis untuk penguatan fondasi ekonomi desa dan pemerataan pembangunan daerah. Target nasional 80.000 KMP di tingkat desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. KMP dengan berbagai unit usaha ekonomi produktif, memberikan akses layanan pengembangan potensi ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran, membangun semangat kewirausahaan, meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

BIDANG URUSAN UTAMA: Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

BIDANG URUSAN PENDUKUNG: Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Pangan, Perindustrian, Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perencanaan.

14. Desa Tanpa Kawasan Kumuh

Desa Tanpa Kawasan Kumuh merupakan upaya untuk mengatasi kawasan permukiman kumuh dengan penataan bangunan, penataan infrastruktur dasar, mengurangi kepadatan penduduk, penanganan sampah, sarana prasarana yang memadai, fasilitas-fasilitas yang mendukung produktivitas masyarakat.

BIDANG URUSAN UTAMA: Perumahan dan Kawasan Permukiman

BIDANG URUSAN PENDUKUNG: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kesehatan, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral, Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat, Komunikasi dan Informatika, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perencanaan.

15. Desa Tanpa Rumah Tidak Layak Huni

Desa Tanpa Rumah Tidak Layak Huni bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa yang tinggal di rumah yang tidak layak huni. Penanganan rumah tidak layak huni ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk tinggal di hunian yang lebih aman, nyaman, dan sehat, untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga. Kondisi rumah tidak layak huni ini dilihat dari kondisi rumah yang sudah rusak parah, atap bocor, dinding retak, lantai berlubang, dan fasilitas sanitasi yang tidak memadai, terutama pada keluarga miskin.

BIDANG URUSAN UTAMA: Perumahan dan Kawasan Permukiman

BIDANG URUSAN PENDUKUNG: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kesehatan, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perencanaan.

16. Desa Tanpa Krisis Air Bersih

Desa Tanpa Krisis Air Bersih bertujuan untuk membantu desa mengatasi masalah krisis air bersih dengan membangun dan mengelola sumber air secara mandiri di desa, mengembangkan sistem distribusi air bersih yang efisien, efektif, dan berkelanjutan.

BIDANG URUSAN UTAMA: Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

BIDANG URUSAN PENDUKUNG: Energi dan Sumber Daya Mineral, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kesehatan, Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat, Penelitian dan Pengembangan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perencanaan.

17. Desa Tanpa Banjir

Desa Tanpa Banjir bertujuan untuk mencegah ancaman bencana banjir dan dampak banjir untuk meningkatkan keselamatan jiwa, mengurangi korban jiwa, mengurangi kerusakan infrastruktur layanan dasar, saluran irigasi, dan harta benda masyarakat. Desa Tanpa Banjir dilaksanakan dengan upaya mengurangi risiko bencana banjir, membangun kesiapsiagaan masyarakat, dan meningkatkan kapasitas ketangguhan masyarakat melalui Desa Tangguh Bencana (Destana), menanam pohon di lahan miring melalui Desa Hijau, membangun embung untuk tampungan air di desa sebagai penyediaan air bersih, dan upaya intervensi strategis lainnya.

BIDANG URUSAN UTAMA: Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat, Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

BIDANG URUSAN PENDUKUNG: Sosial, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perencanaan.

18. Desa Ekspor

Desa Ekspor adalah desa yang memiliki produk unggulan berskala ekspor yang memenuhi kriteria 3K (Kualitas, Kuantitas, dan Kontinuitas) untuk meningkatkan

pendapatan masyarakat. Produk unggulan desa ini berupa produk hasil pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, pengolahan makanan, tenun, kerajinan tangan, dan ekonomi kratif lainnya. Desa dengan potensi unggulan ini akan memiliki kapasitas untuk melakukan diversifikasi produk, hilirisasi, pengemasan, perizinan, dan akses pasar internasional untuk meningkatkan nilai ekspor dari desa, berkontribusi untuk nilai ekspor daerah.

BIDANG URUSAN UTAMA: Perdagangan
BIDANG URUSAN PENDUKUNG: Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Pangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perencanaan.
19. Desa Literasi
Desa Literasi menjadi strategi untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan masyarakat desa untuk mengembangkan minat dan budaya baca, meningkatkan wawasan dan pengetahuan masyarakat, meningkatkan kreatifitas dan inovasi masyarakat secara klektif untuk sumber daya manusia di desa. Pengembangan Desa Literasi dilaksanakan dengan mengembangkan perpustakaan desa atau taman bacaan masyarakat, di sekolah-sekolah, di lokasi Posyandu, di tempat-tempat ibadah, dan lokasi pusat kegiatan masyarakat desa.
BIDANG URUSAN UTAMA: Perpustakaan, Kearsipan
BIDANG URUSAN PENDUKUNG: Pendidikan, Komunikasi dan Informatika, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perencanaan.
20. Desa Sadar Pajak
Desa Sadar Pajak merupakan upaya membangun kesadaran bersama di tingkat desa untuk ketaatan dan kepatuhan membayar pajak sebagai suatu budaya yang menjadi norma dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Desa Sadar Pajak dilaksanakan dengan kampanye, edukasi kepada masyarakat, dan kemudahan akses layanan perpajakan dengan mengoptimalkan teknologi, informasi, dan komunikasi, memberikan sanksi dan penghargaan untuk masyarakat desa yang patuh membayar .
BIDANG URUSAN UTAMA: Keuangan
BIDANG URUSAN PENDUKUNG: Perhubungan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Komunikasi dan Informatika, Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat, Perencanaan.

3. Agenda Kerja Prioritas Program Unggulan NTB Inklusif

Program unggulan ini merupakan bentuk komitmen dan kepedulian untuk membumikan/ mengimplementasikan pendekatan *Gender, Equality, Disability, dan Social Inclusion* (GEDSI) dalam pembangunan daerah yaitu meningkatnya sensitif, responsif, dan transformasi GEDSI. Prinsip utama yang mendasari program ini adalah ”No One Left

Behind". Hal ini bermakna tidak ada seorang pun yang tertinggal dalam proses pembangunan dengan menjamin kesetaraan hak, peran, dan partisipasi bermakna dari semua kelompok masyarakat, tanpa diskriminasi.

Tujuan strategis program ini di antaranya memperkuat fondasi pembangunan sistem perlindungan sosial dengan mengedepankan kesetaraan dan keadilan yang proporsional dan memastikan NTB menjadi "rumah bersama" untuk semuanya sehingga terwujud kohesi sosial yang kuat antar lapisan dan kelompok masyarakat.

Sasaran program unggulan ini adalah (1) Peningkatan kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas; (2) Meningkatkan akses seluruh kelompok rentan terhadap sumber daya dan mendorong mereka berpartisipasi aktif dan bermakna, dan (3) Semua kelompok terlibat dalam proses pengambilan keputusan untuk memperoleh manfaat dari hasil pembangunan. Agenda prioritas kerja utama yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan program unggulan NTB Inklusif menitikberatkan pada kolaborasi sektor publik, organisasi masyarakat Sipil dan swasta untuk mengoptimalkan implementasi GEDSI. Berikut agenda kerja prioritas yang akan dilaksanakan dengan kolaborasi multipihak tersebut:

1. Integrasi Prinsip Strategi Pengarusutamaan GEDSI Dalam Perencanaan Daerah
Pengumpulan dan harmonisasi data kelompok rentan lintas sektor. Pelibatan kelompok rentan dalam proses Perencanaan dan penganggaran inklusif
BIDANG URUSAN UTAMA: Perencanaan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
BIDANG URUSAN PENDUKUNG: Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Semua Bidang Urusan.
2. NTB Rumah Bersama Sebagai Ruang Bersama Indonesia (RBI)
Penyediaan Lingkungan tanpa hambatan dengan menerapkan desain universal, Pendidikan Inklusif dan keterampilan, Akses dan pemerataan layanan Kesehatan.
BIDANG URUSAN UTAMA: Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Kesehatan
BIDANG URUSAN PENDUKUNG: Sekretariat Daerah, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Perhubungan, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan.
3. Perlindungan Sosial Adaptif (PSA)
Layanan habilitasi dan rehabilitas oleh lembaga dan Masyarakat, Meningkatkan dukungan dan kapasitas pendamping Masyarakat, Meningkatkan cakupan program kesejahteraan sosial, dan Penanggulangan bencana yang inklusif.
BIDANG URUSAN UTAMA: Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
BIDANG URUSAN PENDUKUNG: Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat

4. Pembangunan Kohesi Sosial Dengan Menjamin Hak Dan Akses Politik Dan Hukum
Menjamin hak politik secara penuh bagi kelompok rentan untuk berpartisipasi dalam pemilu tanpa diskriminasiPelindungan kelompok rentan dari kekerasan, Eksploitasi, dan Penelantaran dalam Proses Peradilan dan Tahapan Pelaksanaan Putusan
BIDANG URUSAN UTAMA: Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
BIDANG URUSAN PENDUKUNG: Kesatuan Bangsa dan Politik, Sekretariat Daerah.

5. Pengarusutamaan Gedsi Pada Perusahaan Swasta Dan Pemerintah Sebagai Pemberi Kerja
Penguatan Pemahaman tentang Ketenagakerjaan Inklusif pada pemerintah dan Swasta di seluruh Sektor. Perluasan akses lapangan kerja bagi kelompok rentan. Peningkatan literasi keuangan yang inklusif dan keterampilan berwirausaha
BIDANG URUSAN UTAMA: Tenaga Kerja, Transmigrasi
BIDANG URUSAN PENDUKUNG: Kepegawaian, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

4. Agenda Kerja Prioritas Program Unggulan NTB Agro Maritim

Program unggulan ini merupakan komitmen Pemerintah Provinsi NTB untuk mengoptimalkan sumber daya alam dan komoditas unggulan lokal NTB dari sektor pertanian dalam arti luas, perikanan dan kelautan, kehutanan dan sumber daya alam lainnya. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan sisi produksi yang memenuhi 3K (Kualitas, Kuantitas, dan Kontinuitas), dan sisi pemasaran produk unggulan yang mampu bersaing di tingkat global. Tujuan strategis program ini adalah meningkatkan produktivitas ekonomi daerah yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru yang mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim. Dengan program ini, NTB diarahkan menjadi (1) Lumbang Pangan Nasional melalui swasembada, peningkatan produktivitas, dan diversifikasi pangan; dan (2) Pengembangan Komoditas Unggulan Daerah melalui peningkatan ekspor non-tambang komoditas unggulan daerah dan peningkatan nilai tambah komoditas unggulan daerah.

Pendekatan strategis dalam program unggulan NTB Agro Maritim diarahkan dengan membangun ekosistem industri agro maritim untuk meningkatkan ketahanan pangan di daerah dan peningkatan nilai ekspor komoditas unggulan daerah sektor non-tambang, pemberdayaan masyarakat lokal, pendekatan kawasan strategis pusat pertumbuhan wilayah dan sentra produksi komoditas unggulan daerah. Pendekatan ini dibangun secara terintegrasi mulai dari hulu (produsen) hingga hilir (pengolah dan industri pengolahan) dengan pemerintah sebagai regulator dan pengambil kebijakan.

Program unggulan NTB Agro Maritim ini memiliki sasaran yang meliputi (1) Ekonomi Hijau terutama pada sektor pertanian dalam arti luas, dan sektor kehutanan dan sumber daya alam lainnya; (2) Ekonomi Biru terutama pada sektor perikanan dan kelautan; (3) Ekosistem industri agro maritim; (4) Ketahanan pangan di daerah; (5) Peningkatan nilai

ekspor komoditas unggulan daerah sektor non-tambang; (6) Pemberdayaan masyarakat lokal; dan (7) Pendekatan kawasan strategis pusat pertumbuhan wilayah dan sentra produksi komoditas unggulan daerah.

Agenda prioritas kerja yang akan direalisasikan dalam lima tahun pelaksanaan RPJMD tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Ekonomi Hijau
Ekonomi Hijau di NTB diawali dengan melakukan identifikasi terhadap potensi eksisting sektor ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dan identifikasi pengembangan sektor ekonomi baru yang mampu menyesuaikan dengan kondisi sumber daya alam, kebutuhan pasar, pengaruh perubahan iklim, dan yang memiliki kemampuan untuk merespon perkembangan tren ekonomi global, dan kondisi yang tidak menentu saat ini. Ekonomi hijau fokus pada sektor pertanian dalam arti luas, sektor kehutanan dan sumber daya alam lainnya., didukung infrastruktu pendukung, SDM yang memiliki keahlian, dan optimalisasi pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi di sektor ekonomi hijau.
BIDANG URUSAN UTAMA: Lingkungan Hidup, Kehutanan
BIDANG URUSAN PENDUKUNG: Perencanaan, Pertanian, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kelautan dan Perikanan, Perhubungan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Komunikasi dan Informatika, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tenaga Kerja, Perindustrian, Perdagangan.
2. Ekonomi Biru
Ekonomi biru dikembangkan dengan pendekatan berbasis teknologi dan pemberdayaan masyarakat untuk mengelola potensi eksiting dan potensi baru dari sektor perikanan dan kelautan yang teridentifikasi untuk pembangunan berkelanjutan yang inklusif, pengembangan pariwisata bahari dan minat khusus, pengembangan Akademi Hijau dan Biru di Provinsi NTB untuk mendukung pendidikan dan pelatihan SDM sektor ekonomi hijau dan biru, konservasi sumber daya alam di sektor perikanan dan kelautan, serta rantai pasok yang aman untuk mendukung ekspor produk perikanan dan kelautan yang memiliki nilai tambah tinggi dan dapat dikonservais dengan baik di daerah.
BIDANG URUSAN UTAMA: Kelautan dan Perikanan
BIDANG URUSAN PENDUKUNG: Perencanaan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Perhubungan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian, Perdagangan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
3. NTB Lumbung Pangan Nasional
NTB Lumbung Pangan Nasional bertujuan untuk menjamin peran strategis provinsi NTB dalam membangun ketahanan pangan daan kemandirian pangan daerah, yang menjamin ketersediaan bibit yang mampu beradaptasi pada perubahan iklim, berproduksi dengan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas, sarana prasarana infrastruktur

sistem irigasi dan kelembagaan pengelolaan irigasi, manajemen/tata kelola air yang lebih baik, didukung pengembangan kelembagaan petani yang memperhatikan aspek GEDSI dan kaum muda di NTB.

BIDANG URUSAN UTAMA: Pangan

BIDANG URUSAN PENDUKUNG: Perencanaan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Perhubungan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tenaga Kerja, Perindustrian, Perdagangan.

4. Digitalisasi UMKM

Digitalisasi UMKM bertujuan untuk meningkatkan pengembangan ekonomi masyarakat untuk stabilitas ekonomi nasional melalui optimalisasi teknologi pada proses produksi, pemasaran, laporan keuangan, dan pembayaran digital, transformasi model bisnis UKM, keahlian SDM, melalui penguatan akses permodalan, basis produksi, membuka kesempatan dan kepastian berusaha bagi UMKM, serta penguatan UMKM yang berbasis syariah dan memiliki daya saing untuk produktifitas dan mutu produksi yang mampu menjangkau pasar ekspor global.

BIDANG URUSAN UTAMA: Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

BIDANG URUSAN PENDUKUNG: Perencanaan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Perhubungan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian, Perdagangan.

5. Koperasi Merah Putih

Koperasi Merah Putih (KMP) bertujuan untuk membangun pusat produksi dan distribusi yang bermanfaat untuk memperpendek rantai pasok dari produsen ke konsumen, mengurangi biaya antara dalam proses produksi barang dan jasa, meningkatkan Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan, mengurangi harga jual pada sisi konsumen, layanan cepat permintaan konsumen, menekan inflasi, menciptakan lapangan kerja, distribusi pendapatan, meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan kohesi sosial yang tinggi, merespon dinamika global, inklusi keuangan dan menjadi pendukung pengembangan UMKM Berdaya Saing.

BIDANG URUSAN UTAMA: Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

BIDANG URUSAN PENDUKUNG: Perencanaan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Perhubungan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Perindustrian, Perdagangan.

6. BUMD Mandiri

BUMD Mandiri bertujuan untuk mewujudkan badan usaha milik daerah yang mampu mengelola bisnis pemerintah daerah dan menghasilkan profit yang menguntungkan daerah untuk peningkatan sumber PAD dan membangun kekuatan fiskal daerah, melalui pengembangan usaha ekonomi produktif secara professional, dalam mendukung pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru untuk NTB Agro Maritim, menciptakan lapangan kerja baru untuk peningkatan produktivitas ekonomi dan pendapatan masyarakat.

BIDANG URUSAN UTAMA: Sekretariat Daerah

BIDANG URUSAN PENDUKUNG: Perencanaan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Perhubungan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

7. Kewirausahaan Berkembang

Kewirausahaan berkembang fokus pada pertumbuhan ekosistem kewirausahaan dengan menyediakan dukungan bagi para wirausaha baru, terutama kaum muda NTB untuk pengembangkan perilaku kewirausahaan yang lebih kreatif dan inovatig, menumbuhkan wirausaha baru pada pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru, pendampingan untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas manajemen usaha, dukungan insentif dan sarana prasarana digital dalam pengembangan kewirausahaan.

BIDANG URUSAN UTAMA: Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

BIDANG URUSAN PENDUKUNG: Perencanaan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Perhubungan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

8. IPTEK Maju

Iptek maju menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas ekonomi daerah, melalui berbagai riset tematik lintas sektor bekerja sama dengan perguruan tinggi dan Lembaga riset ilmiah yang kredibel, guna mendukung inovasi, kreatifitas, dan adaptasi pada proses produksi dan pengembangan komoditas unggulan daerah yang memiliki nilai tambah lebih tinggi dari produk daerah lain, mendorong kolaborasi dalam mengembangkan riset dan inovasi aplikatif di sektor-sektor pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru, serta ekonomi sirkular, dalam kerangka pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.

BIDANG URUSAN UTAMA: Penelitian dan Pengembangan

BIDANG URUSAN PENDUKUNG: Perencanaan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Perhubungan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

9. Pasar Ekspor Meningkat
Pasar ekspor komoditas unggulan daerah meningkat saeiring dengan pengembangan sistem logistik daerah berkualitas, melalui penguasaan teknologi, jaringan informasi pemasaran dan digitalisasi koperasi dan UMKM, memanfaatkan kesempatan pasar dan potensi sumber daya lokal, dan penguatan akses pasar, dan menciptakan iklim usaha yang kondusif. NTB juga membangun kerjasama kemitraan dengan dunia usaha dan membangun branding lokal NTB untuk pasar yang lebih luas.
BIDANG URUSAN UTAMA: Perdagangan
BIDANG URUSAN PENDUKUNG: Perencanaan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Perhubungan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

5. Agenda Kerja Prioritas Program Unggulan NTB Pariwisata Berkualitas

Program unggulan ini merupakan pengembangan potensi sumber daya alam dan sumber daya buatan yang menjadi daya tarik wisata di Provinsi NTB, mampu meningkatkan daya saing daerah dalam sektor pariwisata global. Pariwisata Berkualitas *(Quality Tourism)* adalah hasil dari suatu proses yang menyiratkan kepuasan semua produk pariwisata ,kebutuhan layanan, dan harapan wisatawan seperti keselamatan dan keamanan, kebersihan, aksebilitas, infrastruktur dan fasilitas layanan publik dan lingkungan budaya.

Tujuan strategis program ini adalah meningkatkan produktivitas ekonomi daerah dan pendapatan masyarakat dari sektor pariwisata. Pengembangan pariwisata berkualitas akan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan berkualitas (lama tinggal panjang dan angka pengeluaran tinggi) yang minim ongkos sosial dengan mendorong konsep MICE *(Meeting Insentive Convention dan Events)*, mendorong segmen-segmen khusus wisatawan terutama konsep Muslim-Friendly-Tourism dengan membangun kawasan wisata khusus dan tersegmentasi, pengembangan destinasi-destinasi wisata baru di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, dan peningkatan akses serta konektivitas antar destinasi pariwisata, melalui sasaran ; Pembangunan budaya dan identitas daerah, Implementasi MICE, Muslim-Friendly Tourism, Penataan destinasi pariwisata, Investasi Pariwisata, dan Akses dan konektivitas antar destinasi pariwisata.

Program NTB Pariwisata Berkualitas diarahkan pada kepuasan semua produk pariwisata, kebutuhan layanan dan harapan wisatawan seperti keselamatan dan keamanan, kebersihan, aksebilitas, infrastruktur dan fasilitas layanan publik dan lingkungan budaya. Pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan program ini diantaranya (1) Pendekatan Masalah, dengan mengatasi isu-isu yang menghambat percepatan terwujudnya pariwisata terintegrasi berkelanjutan seperti kualitas SDM, kebersihan, keamanan dan kenyamanan serta pengembangan destinasi (atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan ansilari); dan (2) Pendekatan Keunggulan, dengan mendayakan potensi kepulauan Provinsi NTB untuk mengembangkan pariwisata sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi melalui integrasi

Pariwisata Lombok dan Sumbawa dengan pariwisata Bali dan NTT. Pendekatan ini dilakukan dengan pembangunan 10 destinasi pariwisata terintegrasi dan terkoneksi (udara, laut dan darat) dan pengembangan wisata MICE yang akan membentuk ekosistem pariwisata.

Agenda prioritas kerja yang akan direalisasikan dalam lima tahun pelaksanaan RPJMD tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Pembangunan Budaya Dan Identitas Daerah

Penataan destinasi pariwisata berkelas bertujuan meningkatkan tata kelola pada destinasi pariwisata sesuai dengan kondisi alam dan potensi wisata yang dimiliki secara berkelanjutan dari sisi ekonomi, sisi sosial, sisi lingkungan. Penguatan destinasi pariwisata terintegrasi dengan mendorong pelestarian budaya lokal dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yang memiliki nilai kearifan lokal, kekayaan keanekaragaman hayati, dan sejarah budaya masa lalu, sebagai bagian dari pelestarian nilai budaya dan pengembangan industri ekonomi kreatif di Provinsi NTB.

BIDANG URUSAN UTAMA: Pariwisata, Kebudayaan

BIDANG URUSAN PENDUKUNG: Perencanaan, Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Pertanian, Sosial, Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat, Lingkungan Hidup, Kehutanan.

2. MICE

Implementasi konsep MICE *(Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions)* bertujuan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan Nusantara dan mancanegara secara masif dengan menyiapkan berbagai events berskala lokal, nasional, dan internasional, yang didukung oleh jumlah akomodasi hotel Bintang dan hotel non-Bintang, MICE yang mendukung pengembangan wisata olahraga *(sport-tourism)*, wisata petualangan, wisata minat khusus, wisata kesehatan *(health tourism)* serta berbagai event keagamaan dan pertemuan ilmiah tahunan yang berkontribusi pada peningkatan angka kunjungan wisatawan, lama tinggal, dan jumlah uang yang dibelanjakan untuk mendukung laju pertumbuhan ekonomi daerah dari sektor pariwisata di NTB.

BIDANG URUSAN UTAMA: Pariwisata

BIDANG URUSAN PENDUKUNG: Perencanaan, Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Pertanian, Sosial, Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Sosial.

3. Muslim-Friendly Tourism

Muslim-Friendly Tourism bertujuan untuk mengembangkan wisata halal yang sudah menjadi komitmen Pemerintah Provinsi NTB dengan target sasaran/segmentasi pasar khusus Muslim di tingkat nasional dan pada banyak negara Islam yang memiliki potensi untuk kerjasama penerbangan internasional, pelatihan dan pembinaan SDM pariwisata, pengembangan infrastruktur pendukung *Muslim-Friendly Tourism*, makanan dan minuman halal dari pengembangan manajemen usaha UMKM, dan wisata religi yang

diharapkan mampu meningkatkan angka kunjungan, lama tinggal, dan kontribusi untuk pelestarian sumber daya alam untuk keberlanjutan pariwisata berkualitas di NTB.

BIDANG URUSAN UTAMA: Pariwisata

BIDANG URUSAN PENDUKUNG: Perencanaan, Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Pertanian, Sosial, Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Sosial.

4. Penataan Destinasi Pariwisata Berkelas Dunia

Penataan destinasi pariwisata berkelas bertujuan meningkatkan tata kelola pada destinasi pariwisata sesuai dengan kondisi alam dan potensi wisata yang dimiliki secara berkelanjutan dari sisi ekonomi, sisi sosial, sisi lingkungan.Penguatan destinasi pariwisata terintegrasi dengan mendorong pelestarian budaya lokal dan partisipasi masyarakat untuk keberlanjutan budaya dan identitas daerah yang menjadi aset daya tarik wisatawan Nusantara dan mancanegara. Penataan destinasi pariwisata berkelas didukung oleh sistem kebersihan, ketersediaan fasilitas layanan dasar, keamanan, dan kenyamanan yang menyeimbangkan potensi ekonomi dan keberlanjutan lingkungan hidup, memperhatikan aspek pengurangan risiko bencana pada seluruh destinasi pariwisata berkelas dunia di NTB

BIDANG URUSAN UTAMA: Pariwisata

BIDANG URUSAN PENDUKUNG: Perencanaan, Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Pertanian, Sosial, Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Sosial.

5. Investasi Pariwisata

Investasi pariwisata bertujuan untuk mengoptimalkan peran strategis Lembaga/institusi pendidikan/sekolah pariwisata yang mampu menghasilkan SDM pariwisata berkualitas, siap bekerja secara professional di sektor pariwisata, investasi pada upaya membangun ekosistem pariwisata yang mengintegrasikan 10 destinasi wisata baru, menetapkan target sasaran wisatawan Nusantara dan Mancanegara yang memiliki data akurat terkait lama tinggal tertinggi dan pengeluaran yang besar di sektor pariwisata di NTB. Investasi pariwisata pada konservasi sumber daya alam untuk mendukung keberlanjutan penguatan destinasi wisata di Provinsi NTB.

BIDANG URUSAN UTAMA: Pariwisata

BIDANG URUSAN PENDUKUNG: Perencanaan, Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Pertanian, Sosial, Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Sosial.

6. Akses Dan Konektivitas Antar Destinasi Pariwisata

Pengembangan pariwisata NTB berkelas dunia didukung oleh pengembangan infrastruktur transportasi darat, laut dan udara yang terintegrasi dengan baik, untuk

memudahkan akses dan pergerakan orang dan barang, dan membangun konektivitas antar destinasi yang terintegrasi dengan optimalisasi teknologi informasi dan komunikiasa, serta didukung atraksi wisata dan penataan destinasi pariwisata berkelas dunia.

BIDANG URUSAN UTAMA: Perhubungan

BIDANG URUSAN PENDUKUNG: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pariwisata, Kebudayaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

6. Agenda Kerja Prioritas Program Unggulan NTB E-Mania (E-Kraf Mendunia)

Program unggulan NTB E-Mania (Ekraft Mendunia) merupakan upaya mengembangkan kemampuan kreatif kaum muda dalam ekosistem industri ekonomi kreatif yang memberikan nilai tambah dari kondisi eksisting. Tujuan strategis program ini adalah membangun ekosistem yang kuat dan berkelanjutan bagi pengembangan UMKM dan industri kreatif yang memberikan ruang bagi kaum muda untuk berkreasi menghasilkan produk unggulan yang berkelas, kompetitif, dan mendunia. Sedangkan sasarannya adalah (1) Ekosistem industri ekonomi kreatif; (2) Pengembangan UMKM dan industri kreatif; (3) Ruang Kaum Muda Kreatif; dan (4) Produk unggulan berkelas, kompetitif dan mendunia.

NTB E-Mania (Ekraf Mendunia) pada prinsipnya diarahkan sebagai perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan atau teknologi. Perwujudan ini dilakukan dengan dua pendekatan utama yaitu pertama, Penumbuhkembangan Kreatifitas melalui pembangunan *creative capital* (seperti SDM, komunitas dan ekosistem kreatif, dukungan finasial dan infrastruktur dan sebagainya), pembangunan *creative space* (seperti pengembangan fasilitas fisik atau virtual pendukung kreatifitas dan virtual platform online), dan pembangunan *creative hub*. Kedua, Pengembangan Industri Kreatif yang Berdaya Saing melalui penyiapan SDM terampil, penyediaan dan optimalisasi sumber daya alam yang berkualitas untuk industri kreatif, meningkatkan daya saing industri, insetfi dan pembiayaan industri kreatif, pemasaran, penyediaan dan pengembangan infrastruktur dan ekosistem pendukung industri kreatif, serta regulasi dan kelembagaan yang mendukung terbangunnya ekosistem industrif kreatif.

Agenda prioritas kerja yang akan direalisasikan dalam lima tahun pelaksanaan RPJMD tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Ekosistem Industri Ekonomi Kreatif Berdaya Saing

Ekosistem industri ekonomi kreatif berdaya saing bertujuan untuk membangun keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai ekonomi kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi pada produk ekonomi kreatif yang memiliki nilai tambah.

BIDANG URUSAN UTAMA: Perencanaan

BIDANG URUSAN PENDUKUNG: Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan.
2. Perlindungan Hak Cipta, Merek, Paten, Dan Kekayaan Intelektual
Perlindungan hak cipta, merek, paten, dan kekayaan intelektual memberikan perlindungan pada produk hasil kreasi gagasan kekayaan intelektual yang asli dari kreativitas intelektual pelaku ekonomi kreatif.
BIDANG URUSAN UTAMA: Perindustrian
BIDANG URUSAN PENDUKUNG: Perencanaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan.
3. Ruang Muda Kreatif
Pengembangan UMKM dan industri kreatif yang memberikan ruang bagi kaum muda untuk berkreasi menghasilkan produk unggulan yang berkelas, kompetitif, dan mendunia
BIDANG URUSAN UTAMA: Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kepemudaan dan Olahraga
BIDANG URUSAN PENDUKUNG: Pariwisata, Perdagangan, Perindustrian, Komunikasi dan Informatika, Statistik

7. Agenda Kerja Prioritas Program Unggulan NTB Terampil dan Tangkas

Program unggulan NTB Terampil dan Tangkas merupakan strategi memperkuat fondasi pembangunan sektor tenaga kerja dengan meningkatkan ketersediaan, kompetensi, dan kapasitas kaum muda dan Angkatan kerja, mengembangkan olahraga berprestasi dan kaum muda perprestasi di Provinsi NTB. Tujuan strategis program ini adalah strategi memperkuat fondasi pembangunan sektor tenaga kerja dengan meningkatkan ketersediaan tenaga kerja terampil, meningkatkan kesempatan kerja bagi tenaga kerja terampil di dalam dan luar negeri, serta meningkatkan akses dan perlindungan bagi pekerja migran. Selain itu juga meningkatkan prestasi olahraga kaum muda NTB, memastikan NTB sukses prestasi dan penyelenggaraan pada PON 2028. Sedangkan sasaran program ini diantaranya (1) Meningkatkan penduduk bekerja lulusan SMA keatas meningkat; (2) Penempatan PMI sektor formal meningkat dan sektor informal menurun; (3) Peningkatan remitance PMI; (4) Penguatan kelembagaan tim koordinasi pendidikan dan pelatihan vokasi daerah; (5) Pembentukan wirausaha pemuda yang KUAT (memiliki Kompetensi, Usaha, Aset, dan Teknologi); dan (6) Peningkatan Prestasi Olahraga dan Kesiapan Penyelenggaraan PON 2028.

Pendekatan Program NTB Terampil dan Tangkas dilakukan dengan dua aspek yaitu, Pertama, Penguatan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi melalui pendidikan vokasi (revitalisasi SMK), pelatihan vokasi (revitalisasi BLK), penguatan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), dan penguatan TKDV Provinsi dan Kab/Kota. Kedua, Peningkatan Kualitas Atlet serta Kreatifitas dan Prestasi Pemuda melalui pembinaan atlet

dan prestasi olahraga, wirausaha pemuda, dan Generasi Makmur Mendunia (pelatihan kader muda GMM dan lain-lain).s

Agenda prioritas kerja yang akan direalisasikan dalam lima tahun pelaksanaan RPJMD tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. SMK Berdaya Saing – Skill Center
Revitalisasi SMK untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, kapasitas, dan kompetensi tersertifikasi dari UPT BLK, yang mampu bersaing dengan tenaga kerja nasional dan global. Pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, dengan keahlian instruktur, sarana prasarana pelatihan kerja yang memadai untuk mendukung dunia industri dan bekerja produktif pada pasar kerja lokal, nasional, dan global
BIDANG URUSAN UTAMA: Pendidikan, Tenaga Kerja
BIDANG URUSAN PENDUKUNG: Perencanaan, Perindustrian, Pertanian, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Energi dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kehutanan.
2. Youth Creative Hub
Youth Creative Hub menjadi wadah pengembangan bakat dan keterampilan kaum muda di bidang seni, teknologi, desain, kuliner, film, tenun, aksesoris, musik, dan usaha kreatif lainnya, mengembangkan kewirausahaan pemuda dengan menciptakan ekosistem ekonomi industri kreatif, memberikan akses kaum mudah untuk fasilitas, pelatihan dan jejaring usaha untuk meningkatkan daya saing lokal, nasional, dan global
BIDANG URUSAN UTAMA: Kepemudaan dan Olahraga
BIDANG URUSAN PENDUKUNG: Perencanaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pendidikan, Kebudayaan.
3. PMI Produktif Dan Sejahtera
Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang produktif dan Sejahtera dapat diwujudkan dengan akses pelatihan untuk pekerjaan dengan keahlian tinggi, membangun kapasitas dan kemandirian melalui pendidkan, pelatihan, dan akses informasi, literasi keuangan,hukum, dan perbedaan budaya dengan negar tujuan dan layanan perlindungan darurat dan bantuan hukum untuk pmi, dalam siklus migrasi, sejak pra-keberangkatan, masa kerja di luar negeri, dan purna migrasi. Mengembangkan reintegrasi sosial dan ekonomi PMI dengan dukungan usaha produktif dan pembangunan ekonomi lokal berbasis remitansi.
BIDANG URUSAN UTAMA: Tenaga Kerja
BIDANG URUSAN PENDUKUNG: Perencanaan, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Sekretariat Daerah, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pertanian, Kelautan dan Perikanan.
4. Prestasi Olahraga Mendunia

Prestasi olahraga mendunia menjadi platform untuk mengembangan olahraga prestasi di NTB dengan dukungan sarana prasarana, pelatih yang professional, sumber gizi atlit muda, dan pembinaan atlit sejak usia dini untuk prestasi olahraga mendunia, menerapkan gerakan hidup sehat dengan berolahraga, meningkatkan kesehatan mental, dan membangun generasi muda yang kuat dan tanggun
BIDANG URUSAN UTAMA: Kepemudaan dan Olahraga
BIDANG URUSAN PENDUKUNG: Perencanaan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kesehatan, Tenaga Kerja, Pendidikan, Kebudayaan.

8. Agenda Kerja Prioritas Program Unggulan NTB Lestari Berkelanjutan

Program unggulan NTB Lestari Berkelanjutan merupakan suatu program untuk mewujudkan kondisi dimana NTB memiliki pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup, dengan penguatan sektor kehutanan, pelestarian lingkungan di kawasan pesisir, meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana, dan pengarusutamaan pemanfaatan energi ramah lingkungan. Tujuan strategis program ini untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat dengan mengembangan sistem tata kelola lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, menjaga keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati melalui pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang ramah lingkungan, membangun ketahanan masyarakat terhadap bencana dan perubahan iklim dengan pengurangan risiko bencana, dan ketangguhan masyarakat pada fase pra bencana, saat bencana, dan paska bencana. Adapun sasarannya adalah (1) Hutan lestari; (2) Lingkungan hidup berkualitas; (3) Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; (4) Energi baru terbarukan; (5) Mitigasi bencana; (6) Perumahan dan kawasan permukiman berkelanjutan; dan (7) Pengembangan Geopark dan Cagar Biosfer.

Imlementasi dari Hutan Lestari dilakukan dengan upaya mengatasi deforestasi dan degradasai hutan, pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Perhutanan Sosial dan penanggulangan kemsikanan lingkar hutan, rehabilitasi mangrove dan pengembangan ekonomi hijau. Lingkungan Hidup Berkualitas dilakukan dengan pengelolaan sampah, pe ingkatan kualitas air, udara, laut, pengembangan ekonomi sirkuler dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Mitigasi dan dan Adaptasi Perubahan Iklim dilakukan dengan implementasi pembangunan rendah karbon. Energi Baru Terbarukan dilakukan dengan meningkatkan kontribusi energi baru terbarukan terhadap produksi listrik. Mitigasi Bencana dilakukan dengan upaya mengurangi risiko bencana dan mitigasi pra, saat, dan pasca bencana. Perumahan dan Kawasan Permukiman Berkelanjutan dilakukan melalui pembinaan penyelenggaraan perumahan, pemeliharaan, perbaikan, pencegahan, peningkatan kualitas, perumahan kumuh dan permukiman kumuh dan lain-lain. Pengembangan Geopark dan Cagar Biosfer dilakukan dengan pengelolaan pada geopark Rinjani – Lombok UNESCO Global Geopark dan Geopark Tambora.

Agenda prioritas kerja yang akan direalisasikan dalam lima tahun pelaksanaan RPJMD tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Hutan Lestari
Hutan lestari menjadi penyangga untuk keberlanjutan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi hutan dengan mencegah deforestasi dan degradasi hutan, penegakan hukum yang kuat, rehabilitasi lahan dan hutan kritis, mengembangkan nilai tambah hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu, untuk perlindungan mata air, mengurangi emisi GRK, dan pemanenan air hujan, yang mencegah banjir dan tanah longsor.
BIDANG URUSAN UTAMA: Lingkungan Hidup, Kehutanan
BIDANG URUSAN PENDUKUNG: Perencanaan, Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata.

2. Ekonomi Hijau
Implementasi konsep ekonomi hijau merupakan upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui keseimbangan daya dukung lingkungan dan kesejahteraan sosial, fokus investasi pada sektor hijau dan energi terbarukan, transisi sektor industri dan pertanian menuju praktik bisnis dan teknologi yang ramah lingkungan, lapangan kerja hijau berbasis sda berkelanjutan, dan kebijakan fiskal insentif dan disinsentif untuk aktifitas perekonomian yang rendah karbon.
BIDANG URUSAN UTAMA: Sekretariat Daerah, Lingkungan Hidup, Kehutanan
BIDANG URUSAN PENDUKUNG: Perencanaan, Perindustrian, Pertanian, Energi dan Sumber Daya Mineral, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Keuangan.

3. Ekonomi Sirkuler
Implementasi konsep ekonomi sirkuler berupaya mewujudkan sistem ekonomi yang mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan dari aktifitas perekonomian dengan menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan desain produk yang berkelanjutan, mengubah mindset pengelolaan sampah menjadi berkah, mengurangi timbulan sampah, inovasi pada desain produk yang tahan lama dan dapat diperbaikin, penguatan regulasi dan insentif untuk pelaku usaha ekonomi sirkuler
BIDANG URUSAN UTAMA: Sekretariat Daerah, Lingkungan Hidup, Kehutanan
BIDANG URUSAN PENDUKUNG: Perencanaan, Perindustrian, Pertanian, Energi dan Sumber Daya Mineral, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Keuangan.

4. Pembangunan Rendah Karbon Dan Berketahanan Iklim
Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim mewujudkan pengurangan emisi GRK pada sektor ekonomi produktif dan mengurangi dampak kerugian ekonomi melalui adaptasi perubahan iklim untuk mendukung terwujudnya NTB Net Zero Emissions 2050
BIDANG URUSAN UTAMA: Perencanaan
BIDANG URUSAN PENDUKUNG: Semua Bidang Urusan

5. Energi Bersih
Energi bersih berupaya untuk meningkatkaan akses energi yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan untuk seluruh lapisan masyarakat, akselerasi transisi menuki sistem energi rendah karbon, optimalisasi pemanfaatan EBT, meningkatan rasio elektrifikasi dan efisiensi energi, menciptakan lapangan kerja di sektor energi, meningkatkan investasi dan inovasi energi bersih untuk layanan publik yang lebih baik
BIDANG URUSAN UTAMA: Energi dan Sumber Daya Mineral
BIDANG URUSAN PENDUKUNG: Perencanaan, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pendidikan, Tenaga Kerja.
6. Ketangguhan Bencana
Ketangguhan bencana fokus pada peningkatan ketangguhan masyarakat dan daerah dengan pengurangan risiko bencana, peningkatan kapasitas adaptif masyarakat, integrasi pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan, penanggulangan bencana, dan penguatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola kebencanaan, pengembangan sistem informasi peringatan dini, dan ketahanan infrastruktur dan tata ruang aman bencana
BIDANG URUSAN UTAMA: Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat
BIDANG URUSAN PENDUKUNG: Semua Bidang Urusan
7. Geopark Dan Cagar Biosfer Berkelanjutan
Geopark dan cagar biosfer menjadi platform untuk pengelolaan kawasan berbasis konservasi keanekaragaman hayati, geologi, sosial budaya, mendukung pembangunan berkelanjutan, melalui pendidikan, penelitian, pelestarian, dan pemberdayaan masyarakat lokal, mengelola potensi ekowisata berbasis konservasi, dan menjada keberlanjutan fungsi ekologis kawasa.
BIDANG URUSAN UTAMA: Perencanaan
BIDANG URUSAN PENDUKUNG: Semua Bidang Urusan
8. Daerah Aliran Sungai (DAS) Sehat Dan Berkelanjutan
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang teritegrasi, terpadu, partisipatif, dan berkelanjutan untuk menjamin keseimbangan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi, mendukung ketahanan air, pangan, dan energi, menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan di hulu, tengah, dan hilir DAS, perlindungan mata air, mengurangi laju erosi dan sedimentasi, pengembangan sistem informasi dan pemantauan DAS, untuk pemutakhiran kondisi DAS yang sehat dan berkelanjutan
BIDANG URUSAN UTAMA: Lingkungan Hidup, Kehutanan
BIDANG URUSAN PENDUKUNG: Perencanaan, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

9. Agenda Kerja Prioritas Program Unggulan NTB *Good and Smart Governance*

Program unggulan NTB *Good and Smart Governance* merupakan komitmen pemerintah daerah untuk perbaikan tata kelola pemerintahan dalam meningkatkan pelayanan publik, kepada masyarakat. Tujuan strategisnya adalah Reformasi Birokrasi menuju pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik *(Good Government)* melalui pembangunan sistem karir yang meritokratis, memastikan pemerintahan yang bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), peningkatan transparansi serta efektifitas dalam pengelolaan asset dan sumberdaya lainnya, peningkatan pendapatan daerah, peningkatan sumber-sumber pembiayaan pembangunan alternatif, peningkatan kualitas pelayanan publik ke arah pelayanan publik yang prima serta transformasi digital secara gradual dalam tata kelola pemerintah dan pelayanan publik. Adapun sasarannya meliputi: (1) Tata kelola pemerintahan Provinsi NTB berkualitas; (2) Sistem karir meritokratis; (3) Provinsi NTB Bebas KKN; (4) Tata kelola asset daerah; (5) Peningkatan pendapatan daerah; (6) Peningkatan sumber-sumber pembiayaan pembangunan alternatif; (7) Peningkatan kualitas pelayanan publik PRIMA; dan (8) Implementasi transformasi digital.

Implementasi dari Program NTB *Good and Smart Governance* dilakukan dengan pendekatan (1) Pembangunan sistem melalui penyediaan kerangka sistematis untuk pengelolaan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel terutama SPBE; (2) Tata kelola pemerintahan yang adaptif melalui peningkatan daya tanggap pemerintahan terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat terutama kapasitas ASN, meritokrasi, dan restrukturisasi organisasi perangkat daerah; (3) Pemerintahan Modern (Digital, Inovatif, Kolaboratif, Efisien) melalui integrasi layanan publik, penguatan fiskal, penerapan SPM untuk penanggulangan kemiskinan dan stunting, dan reformasi perizinan; (4) Pengambilan Keputusan Berbasis Bukti *(Evidence)* melalui pembentukan NTB policy untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis data dan pemanfaatan big data; (5) Dukungan Data Terintegrasi melalui pembangunan NTB Data Hub dan NTB Satu Data, data pokok prioritas pembangunan, integrasi sistem informasi lintas sektor dan perangkat daerah, jaminan kualitas dan validasi data, standarisasi dan keamanan data, dan pengembangan portal publikasi data dan open data NTB.

Agenda prioritas kerja yang akan direalisasikan dalam lima tahun pelaksanaan RPJMD tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. ASN Profesional
ASN Profesional bertujuan untuk meningkatkan nilai Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Provinsi NTB ke kategori sangat tinggi, bebas KKN, memiliki kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin tinggi, memiliki kredibilitas dan reliabilitas, sesuai peta jalan rencana pengembangan SDM yang jelas. ASN Profesional bermanfaat untuk memberikan pelayanan publik prima kepada masyarakat
BIDANG URUSAN UTAMA: Kepegawaian

BIDANG URUSAN PENDUKUNG: Sekretariat Daerah, Pendidikan dan Pelatihan, Perencanaan.

2. Fiskal Kuat

Fiskal kuat bertujuan ntuk meningkatkan PAD sesuai potensi daerah untuk mewujudkan kemandirian fiskal daerah, mengoptimalkan belanja daerah yang dapat memberikan nilai tambah untuk meningkatkan PAD, meningkatkan kepatuhan membayar pajak dan retribusi daerah

BIDANG URUSAN UTAMA: Perencanaan, Keuangan

BIDANG URUSAN PENDUKUNG: Bidang Urusan yang memiliki pendapatan berupa pajak dan retribusi, dan BUMD

3. Transformasi Digital

Transformasi digital bertujuan untuk mendukung pengembangan kebijakan pembangunan daerah berbasis data/bukti, mengembangkan infrastruktur digital yang handal, meningkatkan kapasitas SDM dan literasi digital, layanan publik prima yang efektif dan efisien, akses informasi dan layanan, inovasi dan kolaborasi lintas sektor

BIDANG URUSAN UTAMA: Sekretariat Daerah, Komunikasi dan Informatika, Statistik

BIDANG URUSAN PENDUKUNG: Perencanaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Pendidikan, Sekretariat Daerah.

4. Tata Kelola Berkelanjutan

Tata kelola berkelanjutan bertujuan untuk mengembangkan regulasi daerah dan kebijakan berbasis data dan bukti untuk optimalisasi sumber daya pembangunan daerah dalam implementasi program unggulan daerah dalam bidang tata kelola keuangan, tata kelola perencanaan dan pembangunan, tata kelola SDM daerah

BIDANG URUSAN UTAMA: Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian

BIDANG URUSAN PENDUKUNG: Sekretariat Daerah, Pendidikan dan Pelatihan.

5. SPM Berkualitas

SPM Berkualitas bertujuan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan 6 bidang Standar Pelayanan Publik (SPM) yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan permukiman, sosial, ketenteraman dan ketertiban umum, kebencanaan, yang terintegrasi antara level Perangkat Daerah dan level desa dengan pengembangan New Posyandu yang juga memberikan layanan SPM di tingkat desa

BIDANG URUSAN UTAMA: Sekretariat Daerah, Perencanaan

BIDANG URUSAN PENDUKUNG: Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat.

6. Pelayanan Publik Prima

Pelayanan publik prima bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik perangkat daerah yang memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap layanan publik peerangkat daerah, dan dapat meningkatkan kepercayaan publik pada pemerintah daerah
BIDANG URUSAN UTAMA: Sekretariat Daerah
BIDANG URUSAN PENDUKUNG: Semua Bidang Urusan
7. NTB Satu Data
NTB Satu Data menjadi platform utama untuk kebijakan tata kelola data Provinsi NTB untuk menghasilkan data perencanaan pembangunan yang berkualitas, akurat, valid, dapat dipertanggungjawabkan, mutakhir, mudah diakses, dan dapat dibagipakai sesuai prinsip Satu Data Indonesia (Perencanaan Data, Pengumpulan Data, Pemeriksanaan Data, Publikasi Data) dan meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah dan sistem pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah
BIDANG URUSAN UTAMA: Komunikasi dan Informatika, Statistik, Perencanaan
BIDANG URUSAN PENDUKUNG: Semua Bidang Urusan.

10. Agenda Kerja Prioritas Program Unggulan NTB *Connected*

Program unggulan NTB *Connected* merupakan upaya membangun integrasi konektivitas wilayah darat, laut, dan udara. Konektivitas ini mendukung pergerakan orang, barang, dan jasa, untuk meningkatkan aktivitas perekonomian wilayah, akses pendidikan, akses layanan kesehatan, kesempatan kerja dan lapangan kerja untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Tujuan strategis program ini adalah untuk percepatan pemantapan infrastruktur mendukung industrialisasi, pariwisata dan arus barang jasa, termasuk pembangunan jalan lintas NTB/Trans-NTB (Lembar-Sape) dan peningkatan Pelabuhan Lembar, Badas, Bima serta Pembangunan pelabuhan khusus komoditi di Pulau Sumbawa. Kemudian memastikan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar lainnya yang mencakup air bersih, rumah layak huni, jaringan listrik dan telekomunikasi. Adapun sasaran program ini meliputi: (1) Infrastruktur yang mendukung industrialisasi, pariwisata dan arus barang jasa, jalan dan pelabuhan; (2) Layanan infrastruktur dasar seperti air bersih, rumah layak huni, jaringan listrik, dan telekomunikasi; (3) Penataan ruang wilayah dan pengendalian pemanfaatan ruang; (4) Transportasi publik perkotaan dan interkoneksi transportasi perdesaan; dan (5) Pengembangan Kota Ramah Sepeda untuk kota yang maju, inklusif dan berkelanjutan.

Implementasi Program NTB *Connected* untuk percepatan pemantapan infrastruktur diarahkan pada (1) Infrastruktur Wilayah yang berfokus pada penyediaan SPAM, kemantapan jalan, layanan transportasi publik perkotaan, kemantapan jalan, terminal dan dermaga kapal cepat, pelabuhan khusus komoditi, pelabuhan pengumpan logistik/komoditi/barang; (2) Infrastruktur Layanan Dasar yang berfokus pada penyediaan air

minum, rumah layak huni, sanitasi permukiman, energi listrik dan telekomunikasi; (3) Penataan Ruang Berkelanjutan yang berfokus pada perencanaan pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang.

Agenda prioritas kerja yang akan direalisasikan dalam lima tahun pelaksanaan RPJMD tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Kondisi Jalan Mantap Di Pulau Lombok Dan Pulau Sumbawa
Kondisi jalan dan jembatan yang mantap di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa untuk ruas jalan provinsi yang terhubung juga dengan ruas jalan nasional dan ruas jalan Kab/Kota untuk mendukung pengembangan pariwisata, industrialisasi daerah, arus barang dan jasa, pergerakan orang dan barang
BIDANG URUSAN UTAMA: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
BIDANG URUSAN PENDUKUNG: Perencanaan, Perhubungan.
2. Sistem Logistik Daerah
Sistem logistik daerah yang andal didukung oleh pengembangan pelabuhan untuk ekspor barang yang dihasilkan daerah dan transformasi digital untuk pengembangan data dan informasi pasar yang terkoneksi, didukung oleh SDM IT yang andal, untuk menghubungkan pusat produksi dan pasar secara real-time, efektif, dan efisien.
BIDANG URUSAN UTAMA: Perhubungan
BIDANG URUSAN PENDUKUNG: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Perdagangan.
3. Layanan Infrastruktur Dasar
Layanan infrastruktur dasar untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat mencakup air bersih, rumah layak huni, jaringan listrik, dan telekomunikasi
BIDANG URUSAN UTAMA: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
BIDANG URUSAN PENDUKUNG: Perencanaan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Pengembangan Transportasi Publik Perkotaan, Interkoneksi Transportasi Perdesaan, Dan Kota Ramah Sepeda
Pengembangan transportasi publik perkotaan yang terjangkau, aman, ramah lingkungan (dekarbonisasi dan elektrifikasi), untuk mendukung mobilitas dan produktivitas masyarakat, mengurangi kemacetan, menurunkan emisi GRK, membangun kohesi sosial, mengurangi kesenjangan penduduk kaya dan miskin. Interkoneksi transportasi perdesaan membangun integrasi pusat pertumbuhan, layanan dasar desa-kota untuk akses pendidikan, kesehatan, pasar, mengurangi biaya logistik hasil pertanian dan produk desa. Pengembangan kota ramah sepeda mendukung pengembangan kota yang maju, inklusif, sehat, dan berkelanjutan (Kota SDG's)

BIDANG URUSAN UTAMA: Perhubungan

BIDANG URUSAN PENDUKUNG: Perencanaan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Energi dan Sumber Daya Mineral, Tenaga Kerja.

Selanjutnya, Program dan Indikator Kinerja per Urusan merupakan bagian penting dalam mewujudkan arah kebijakan dan sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025–2029. Setiap urusan pemerintahan daerah memiliki program pembangunan yang disusun secara terukur dan terintegrasi guna mendukung pencapaian Program Unggulan Daerah serta tujuan pembangunan jangka menengah daerah.

Penyusunan program dan indikator kinerja per urusan dilakukan dengan memperhatikan prinsip tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS), yang mengedepankan sinergi antara kebijakan nasional dan provinsi. Pendekatan ini memastikan agar setiap program tidak berjalan secara sektoral, melainkan saling mendukung untuk mempercepat pencapaian visi pembangunan Provinsi NTB, yaitu “Provinsi Kepulauan yang Makmur dan Mendunia.”

Melalui keterpaduan program dan indikator kinerja antarurusan, Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen menciptakan kesinambungan pembangunan lintas sektor untuk mendorong pencapaian Tripel Agenda Pembangunan Daerah, yaitu penurunan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata berkualitas.

Keterpaduan ini diwujudkan melalui sinergi antarurusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, sehingga setiap program dan kegiatan memiliki kontribusi nyata terhadap ketiga agenda prioritas tersebut. Sehingga pelaksanaan program dan indikator kinerja per urusan diarahkan tidak hanya untuk mencapai target sektoral masing-masing perangkat daerah, tetapi juga untuk memperkuat keterkaitan lintas sektor dalam mewujudkan NTB yang makmur, berdaya saing, dan mendunia melalui keberhasilan Tripel Agenda Pembangunan Daerah.

Tabel 4. 2 Program dan Indikator Kinerja Per Urusan Tahun 2025-2030

Bidang Urusan	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Tahun Proyeksi											
					Kondisi Eksisting (Tahun 2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						**1.815.188.049.251,00**		**1.812.698.101.125,10**		**1.823.529.476.926,42**		**1.845.246.677.298,80**		**1.857.047.473.230,49**		**1.873.287.217.577,55**	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Skor	75,97	1.348.221.042.583	76,73	1.344.230.661.125	77,50	1.345.893.800.926	BB	1.348.184.477.299	BB	1.350.269.323.230	BB	1.355.630.701.578	BB
				Kategori	BB		BB		BB		BB		BB		BB		BB
	PROGRAM URUSAN					466.967.006.668		468.467.440.000		477.635.676.000		497.062.200.000		506.778.150.000		517.656.516.000	
	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	1. Indeks pemerataan guru	Poin	0,70	54.155.000.000	0,71	54.912.810.000	0,71	58.148.210.000	0,72	63.710.300.000	0,73	65.675.940.000	0,74	67.702.880.000	0,74
			2. Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	%	41,64		42,06		42,48		43,48		44,48		45,48		46,48
			3. Persentase kualifikasi pendidikan minimal S1	%	96,75		96,80		96,85		96,95		97,05		97,15		97,25
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya mutu pendidikan	1. Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Menengah	%	66,55	412.530.006.668	66,58	412.702.130.000	66,60	418.010.486.000	66,80	430.752.510.000	66,85	437.471.750.000	67,00	444.868.336.000	99,84
			2. Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus	%	55,81		56,25		57,00		57,25		58,00		58,25		98,17
		Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah	%	116,33		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
			2. Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	%	98,65		98,70		98,75		98,80		98,85		98,90		98,95
			3. Persentase anak usia 16-18	%	98,65		98,70		98,75		98,80		98,85		98,90		99,00

Bidang Urusan	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Tahun Proyeksi											
					Kondisi Eksisting (Tahun 2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)														
			4. Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	%	92,48		92,50		92,52		92,54		92,56		92,60		92,65
	1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase pengembangan bahasa dan sastra daerah	%	100	133.000.000	100	250.000.000	100	382.830.000	100	586.240.000	100	899.910.000	100	1.381.420.000	100
	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	%	100	-	-	250.000.000	100	515.830.000	100	1.064.330.000	100	1.455.000.000	100	1.989.070.000	100
	1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase usulan izin satuan pendidik yang diterbitkan/diperbarui	%	100	149.000.000	100	352.500.000	100	578.320.000	100	948.820.000	100	1.275.550.000	100	1.714.810.000	100
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						**1.386.664.985.010,00**		**1.397.294.490.031,00**		**1.422.941.028.799,25**		**1.471.982.747.289,54**		**1.597.551.978.492,10**		**1.654.892.876.018,20**	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Skor	79,77	1.060.259.954.368	80,57	1.067.074.452.328	81,37	1.085.662.096.763	82,19	1.110.511.915.529	83,01	1.126.400.816.143	83,84	1.137.144.118.140	84,68
				Kategori	BB		A		A		A		A		A		A
	PROGRAM URUSAN					326.405.030.642		330.220.037.703		337.278.932.036		361.470.831.761		471.151.162.349		517.748.757.878	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya gaya hidup sehat, partisipasi dan pemberdayaan	Persentase Kabupaten Kota yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan	%	100	462.284.900	100	762.284.900	100	762.284.900	100	762.284.900	100	762.284.900	100	762.284.900	100

Bidang Urusan	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Tahun Proyeksi													
					Kondisi Eksisting (Tahun 2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
		masyarakat bidang kesehatan																
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kualitas kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Penurunan kasus Kematian Ibu	%	10	324.185.606.692	7	326.941.617.222	7	329.885.907.946	7	351.769.589.105	7	457.669.705.881	7	501.014.847.304	7	
			Cakupan Penurunan kasus Kematian Balita	%	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00	
		Meningkatnya upaya pengendalian penyakit menular dan tidak menular, Kesehatan Jiwa dan upaya kesehatan masyarakat yang proaktif dan responsif	Proporsi kabupaten/ kota dengan capain skrining prioritas >80%	%	N/A		50,00		50,00		50,00		60,00		60,00		70,00	
			Prevalensi Obesitas >18 Tahun	%	0		23,40		23,40		23,40		23,40		23,40		23,40	
			Cakupan Diabetes dalam pengendalian	%	15		18,00		20,00		23,00		25,00		25,00		28,00	
			Persentase hipertensi dalam pengendalian	%	NA		20,00		25,00		30,00		35,00		40,00		45,00	
			Cakupan Merokok Penduduk Usia 10-21th	%	30		27,00		25,00		23,00		20,00		20,00		17,00	
			Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	%	58,96		85,00		85,00		85,00		85,00		85,00		85,00	
			Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis	%	88,53		95,00		95,00		95,00		95,00		95,00		95,00	

Bidang Urusan	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Tahun Proyeksi													
					Kondisi Eksisting (Tahun 2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
			(Treatment Success Rate)															
			Cakupan ODHIV mengalami supresi Virus (Viral Land <50 kopi/ml	%	64		70,00		75,00		80,00		85,00		90,00		95,00	
			Cakupan Kab/Kota Eliminasi Kusta	%	70		80,00		80,00		80,00		90,00		90,00		100,00	
			Cakupan Kab/Kota dengan Eliminasi Malaria	%	60		80,00		80,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
			Angka Kematian Dengue	%	NA		0,50		0,40		0,30		0,20		0,10		0,10	
			Persentase Pelayanan Kesehatan pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana	%	100		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
			Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	%	100		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
			Persentase pelayanan kesehatan pengurangan risiko KLB bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi KLB	%	100		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
			Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	%	100		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		Terpenuhinya Jaminan Pembiayaan dan Layanan	Cakupan Faskes pemenuhan sarana, prasarana dan	%	47,83		47,83		50,00		50,00		52,17		54,35		56,52	

Bidang Urusan	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Tahun Proyeksi													
					Kondisi Eksisting (Tahun 2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
		kesehatan yang berkualitas, adil dan terjangkau di fasilitas kesehatan bagi semua	alat kesehatan >60%															
			Cakupan Pemenuhan Sarana prasarana dan alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi	%	81,84		81,88		81,94		82,00		82,08		82,14		82,20	
			Cakupan Pemenuhan Sarana prasarana dan alat kesehatan Rumah sakit Manambai	%	72,00		73,00		73,5		74,00		74,50		75,00		75,50	
			Cakupan Pemenuhan Sarana prasarana dan alat kesehatan Rumah sakit Jiwa Mutiara Sukma	%	76,35		76,55		76,75		76,95		77,15		77,35		77,55	
			Cakupan Pemenuhan Sarana prasarana dan alat kesehatan Rumah sakit Mandalika	%	74,42		75,00		77,00		79,00		81,00		83,00		85,00	
			Cakupan Pemenuhan Sarana prasarana dan alat kesehatan Rumah sakit Mata	%	57,05		60,00		62,00		65,00		70,00		75,00		80,00	
			Cakupan Pemenuhan Sarana prasarana dan alat kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi (BLKPK)	%	64,93		65,50		67,43		69,93		72,43		74,93		77,43	
			Proporsi Fasyankes dengan	%	83		83,00		86,00		89,00		92,00		96,00		96,00	

Bidang Urusan	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Tahun Proyeksi											
					Kondisi Eksisting (Tahun 2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Perbekalan Sesuai Standar														
			Cakupan Faskes yang melaksanakan pelayanan kesehatan melalui Telemedicine	%	15,42		15,42		16,91		16,91		19,40		21,89		24,37
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	99,6		99,31		99,35		99,39		99,42		99,50		99,54
			Cakupan Kabupaten /kota yang memilki Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/ Kelurahan sesuai standar	%	30		30,00		40,00		50,00		60,00		70,00		80,00
			Proporsi Fasyankes Terakreditasi Paripurna	%	85,65		85,65		85,65		85,65		88,00		88,00		88,00
		Meningkatnya kualitas Gizi Masyarakat	Persentase Kabupaten/ Kota dengan surveilans gizi (inputan Sigizikesga) >90%	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
			Cakupan Kabupaten /kota Memenuhi Syarat Kualitas Kesehatan Lingkungan	%	N/A		20,00		20,00		30,00		40,00		50,00		60,00
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya mutu, ketersediaan, dan pemerataan, Tenaga medis dan Tenaga Kesehatan	Cakupan faskes dengan named dan nakes terpenuhi sesuai standar	%	75,66	1.693.359.050	79,50	2.158.686.199	80,84	5.995.263.188	84,20	7.784.985.541	88,00	10.594.085.292	88,50	12.031.857.077	88,50
	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN	Terpenuhinya Kualitas sarana prasarana kefarmasian, dan pengawasan	Cakupan Sarana Kafarmasian yang memenuhi syarat	%	50,00	63.780.000	55,00	357.449.382	60,00	635.476.002	65,00	1.153.972.215	70,00	2.125.086.276	75,00	3.939.768.597	80,00

Bidang Urusan	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Tahun Proyeksi											
					Kondisi Eksisting (Tahun 2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	MAKANAN MINUMAN	Keamanan Makanan dan Minuman															
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						**386.350.194.027,00**		**394.704.159.151,35**		**411.440.019.217,37**		**442.286.456.996,42**		**476.131.476.323,47**		**509.888.837.211,91**	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Skor	76,4	64.038.377.997	77,16	68.676.486.171	77,94	65.566.367.944	78,71	66.549.282.379	79,50	67.144.862.897	80,30	68.153.340.300	81,10
				Kategori	BB		BB		BB		BB		BB		A		A
	PROGRAM URUSAN					322.311.816.030		326.027.672.980		345.873.651.273		375.737.174.617		408.986.613.426		441.735.496.911,91	
	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yang Tertata	Persentase penataan bangunan dan lingkungan	%	NA	2.093.396.400	25,25	2.832.161.000	25,50	3.750.285.000	25,76	4.966.044.000	26,02	6.594.415.000	26,28	7.756.797.000,00	26,28
	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	%	NA	28.433.164.140	40,00	22.569.156.980	50,00	28.966.168.000	60,00	32.241.331.000	70,00	32.758.213.000	80,00	38.036.059.000,00	90,00
	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	%	5,56	-	-	1.000.000.000	12,00	2.063.329.530	18,00	4.257.328.752	24,00	8.800.122.623	30,00	10.270.294.312,00	33,00
	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	%	3	14.912.416.450	3,00	7.981.754.580	12,00	16.063.209.000	35,50	20.415.752.000	47,00	22.050.699.147	59,00	26.252.257.000,00	73,00
	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN	Meningkatnya Akses Msyarakat Terhadap	Persentase Akses Layanan Air Minum	%	84,41	-	-	2.000.000.000	86,41	5.126.659.061	87,41	8.514.657.505	88,41	17.600.245.246	89,41	17.540.588.624,00	90,41

Bidang Urusan	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Tahun Proyeksi													
					Kondisi Eksisting (Tahun 2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Sistem Penyediaan Air Minum															
	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Terhadap Banjir dan Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Irigasi	1. Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi	%	40,00	138.944.666.140	40,29	139.769.730.000	40,92	141.446.350.000	42,18	145.792.910.000	44,08	152.095.558.000	46,29	159.461.060.000,00	48,50
			2. Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Provinsi	%	62,93		65,53		68,42		71,44		74,76		78,10		81,49
	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Konstruksi	Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	%	4,11	232.098.100	4,28	781.250.000	4,64	1.379.878.095	5,11	2.437.201.357	5,75	4.313.766.140	6,73	5.635.267.148,00	7,18
	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Permukiman	Persentase peningkatan infrastruktur permukiman	%	35,80	14.309.950.000	37,00	22.861.006.000	40,00	16.353.202.000	45,00	17.995.230.000	50,00	18.869.133.000	55,00	20.938.370.000,00	60,00
	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Meningkatnya Layanan Persampahan Regional	Persentase Peningkatan Infrastruktur TPA/TPST Regional	%	100,00	4.142.000.000	100,00	4.742.000.000	100,00	5.642.309.000	100,00	6.713.548.446	100,00	8.013.167.409	100,00	9.564.448.728,00	100,00
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat yang Nyaman dan Aman	Tingkat kemantapan jalan	%	75,54	119.062.794.800	76,04	119.767.614.420	76,71	123.057.261.587	77,42	129.920.671.557	78,18	135.861.293.861	78,96	143.275.355.099,91	79,76
	1.03.12 PROGRAM PENYELEN	Meningkatnya Kualitas Penyelengg	Persentase Kesesuaian	%	83,13	181.330.000	83,38	1.723.000.000	83,63	2.025.000.000	83,88	2.482.500.000	84,13	2.030.000.000	84,38	3.005.000.000,00	84,64

Bidang Urusan	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Tahun Proyeksi											
					Kondisi Eksisting (Tahun 2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	GGARAAN PENATAAN RUANG	araan Penataan Ruang	Pemanfaatan Ruang														
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						**248.397.945.337,00**		**268.090.762.845,39**		**284.024.409.781,08**		**290.139.154.425,47**		**293.274.273.000,99**		**297.451.920.039,22**	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Skor	74,88	11.996.771.987	75,63	12.987.378.582	76,39	13.980.582.652	77,15	15.050.440.596	77,92	16.202.921.472	78,70	17.444.463.210	79,49
				Kategori	BB		BB		BB		BB		BB		BB		BB
	PROGRAM URUSAN					236.401.173.350		255.103.384.264		270.043.827.129		275.088.713.829		277.071.351.529		280.007.456.829	
	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	%	5,19	7.082.954.900	6,00	23.225.165.814	10,00	38.033.347.729	15,00	38.533.347.729	20,00	39.033.347.729	25,00	39.533.347.729	30,00
	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	1. Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	2.277.977.450	100	2.877.977.450	100	3.360.238.400	100	4.355.125.100	100	4.937.762.800	100	5.573.868.100	100
			2. Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	%	100		100		100		100		100		100		100
	1.04.06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN	Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan	%	100	-	-	150.000.000	100,00	200.000.000	100,00	350.000.000	100,00	450.000.000	100,00	650.000.000	100,00

Bidang Urusan	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Tahun Proyeksi											
					Kondisi Eksisting (Tahun 2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	atau badan hukum yang melaksanakan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan menengah	Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU														
	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi dengan PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%	99,61	227.040.241.000	99,63	228.850.241.000	99,65	228.450.241.000	99,67	231.850.241.000	99,69	232.650.241.000	99,71	234.250.241.000	99,72
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						**34.690.314.292,00**		**40.296.358.020,48**		**45.478.916.401,69**		**50.740.601.763,87**		**53.565.531.861,22**		**58.649.952.622,00**	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Skor	78,16	28.199.061.543	78,94	29.907.558.650	79,73	31.622.037.270	80,52	33.639.048.927	81,33	35.364.973.535	82,14	37.606.602.622	82,96
				Kategori	BB		BB		BB		BB		A		A		A
	PROGRAM URUSAN					6.491.252.749		10.388.799.370		13.856.879.132		17.101.552.837		18.200.558.326		21.043.350.000	
	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Penyelesaian Terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	4.425.317.600	100	5.188.520.000	100	6.280.300.000	100	7.601.820.000	100	8.229.720.000	100	9.283.350.000	100

Bidang Urusan	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Tahun Proyeksi											
					Kondisi Eksisting (Tahun 2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	%	100		100		100		100		100		100		100
		Meningkatnya Perlindungan Terhadap Masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	%	NA		72,00		72,60		73,20		73,80		75,00		75,60
		Meningkatnya Kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	-		-		38,46		51,28		64,10		96,77		100
	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1. Persentase Ketangguhan Pra-Bencana	%	100	1.854.935.149	60,75	2.907.906.500	63,79	4.225.189.650	66,98	5.863.626.115	70,33	6.024.063.727	73,84	7.325.000.000	77,53
			2. Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	%	100		100		100		100		100		100		100
			3. Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	%	16,67		33,33		41,67		50		75		83,33		100
		Meningkatnya Penanganan Bencana pada Saat Darurat Bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	%	100		100		100		100		100		100		100
		Meningkatnya Efektivitas Penanganan Pascabencana	Persentase Penanganan Pascabencana	%	100		100		100		100		100		100		100
	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGU	Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	%	-	211.000.000	17,64	2.292.372.870	35,28	3.351.389.482	52,92	3.636.106.722	70,56	3.946.774.599	88,20	4.435.000.000	100

Bidang Urusan	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Tahun Proyeksi											
					Kondisi Eksisting (Tahun 2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	LANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN																
		Meningkatnya Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	99		99		100		100		100		100		100
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						**62.424.568.826,00**		**72.282.398.773,22**		**85.074.359.107,41**		**97.376.600.356,04**		**111.531.619.104,91**		**129.302.137.234,27**	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Skor	79,49	33.314.926.202	80,28	35.899.774.462	81,09	38.491.802.677	81,90	41.272.904.577	82,72	44.257.009.730	83,54	47.459.083.898	84,38
				Kategori	BB		A		A		A		A		A		A
	PROGRAM URUSAN					29.109.642.624		36.382.624.311		46.582.556.430		56.103.695.779		67.274.609.375		81.843.053.336	
	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya Kualitas kelembagaan Pelayanan Kesejahteraan Sosial oleh Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	1. Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial sesuai Standar	%	70	9.448.215.780	75	9.939.850.000	75,5	10.575.565.201	76	11.116.576.721	76,5	11.684.391.893	77	12.798.611.488	78,5
			2. Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Aktif	%	2		3		5		7		9		11		13
	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Terpenuhinya kebuthan dasar Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	100	1.299.805.000	100	2.979.699.111	100	3.353.501.976	100	3.929.818.366	100	4.360.571.068	100	5.487.216.279	100
	1.06.03 PROGRAM	Terlindungnya WNI	Persentase Warga Negara	%	100	414.525.500	100	540.000.000	100	567.000.000	100	595.350.000	100	625.117.500	100	656.373.375	100

Bidang Urusan	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Tahun Proyeksi											
					Kondisi Eksisting (Tahun 2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	migran korban tindak kekerasan	Korban Tindak Kekerasan yang terlindungi														
	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Taman Makam Pahlawan	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	80	164.130.150	85	494.942.397	86	519.689.517	87	545.673.993	88	572.957.693	89	601.605.577	90
	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Terlindungnya anak dalam pengasuhan orang tua angkat	Persentase anak yang mendapat pengasuhan orang tua angkat	%	100	4.601.160.500	100	6.274.766.250	100	7.916.402.938	100	9.049.711.299	100	9.744.708.899	100	12.284.868.470	100
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Penduduk sangat Miskin	Persentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	25		30		35		40		45		50		55
		Meningkatnya Perekonomian penduduk miskin yang menerima bantuan sosial	Pesentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	%	2		3		5		7		9		11		13
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya Keberfungsian Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (non SPM) yang tertangani dan berfungsi sosial kembali	%	85	13.181.805.694	85	16.153.366.554	87	23.650.396.798	89	30.866.565.400	91	40.286.862.321	93	50.014.378.147	95
		Terpenuhinya kebutuhan dasar Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia dan Gelandanga	1. Persentase Disabilitas terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100		100		100		100		100		100		100

Bidang Urusan	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Tahun Proyeksi											
					Kondisi Eksisting (Tahun 2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		n & Pengemis Terantar dalam Panti															
			2. Persentase anak terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100		100		100		100		100		100		100
			3. Persentase Lanjut Usia terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100		100		100		100		100		100		100
			4. Persentase Gelandangan dan Pengemis terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100		100		100		100		100		100		100
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						**27.157.288.222,00**		**30.053.916.357,62**		**33.342.497.158,51**		**37.961.102.667,25**		**44.781.923.184,74**		**53.249.105.498,91**	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Skor	80,60	23.139.813.632	80,60	23.940.276.358	80,92	24.675.527.159	81,25	25.434.592.667	81,57	26.218.280.185	81,90	27.027.425.499	82,22
				Kategori	A		A		A		A		A		A		A
	PROGRAM URUSAN					4.017.474.590		6.113.640.000		8.666.970.000		12.526.510.000		18.563.643.000		26.221.680.000	
	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Meningkatnya pekerja indonesia yang terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak dan dialog sosial	Orang	52607	2.489.899.764	53133	3.155.970.000	53664	4.021.910.000	54201	5.125.450.000	54743	6.550.850.000	55290	8.372.730.000	55843
	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas Yang Meningkat Produktivitasnya	%	3,53	681.874.850	3,74	1.073.540.000	3,74	1.533.190.000	3,74	2.189.640.000	3,74	3.135.320.000	3,74	4.489.450.000	3,74

Bidang Urusan	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Tahun Proyeksi											
					Kondisi Eksisting (Tahun 2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	%	67,47	222.700.000	70,84	669.630.000	74,39	1.158.960.000	78,10	2.005.870.000	82,01	3.479.140.000	86,11	4.034.530.000	90,42
	2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGA KERJAAN	Terlindungi hak-hak dasar pekerja	Jumlah Tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasaranya	Orang	52607	552.999.996	53133	964.500.000	53664	1.437.080.000	54201	2.141.220.000	54743	3.198.330.000	55290	4.777.370.000	55843
	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kab/ kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	30	69.999.980	40	250.000.000	50	515.830.000	70	1.064.330.000	80	2.200.003.000	90	4.547.600.000	100
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						**12.721.729.100,00**		**13.881.459.197,70**		**15.436.679.412,24**		**16.343.143.343,22**		**17.303.988.309,94**		**18.322.547.823,21**	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Skor	79,76	8.937.653.000	80,56	9.538.834.198	81,36	10.141.923.162	82,18	10.783.649.281	83,00	11.466.519.544	83,83	12.193.205.619	84,67
				Kategori	BB		A		A		A		A		A		A
	PROGRAM URUSAN					3.784.076.100		4.342.625.000		5.294.756.250		5.559.494.063		5.837.468.766		6.129.342.204	
	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Terjaminnya Pemenuhan Hak Semua Anak Secara Komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	58,68	171.883.200	59,27	834.000.000	59,86	1.190.700.000	60,46	1.250.235.000	61,06	1.312.746.750	61,68	1.378.384.088	62,29
	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER	Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelengg	1. Persentase Anggaran Responsif Gender	%	2,43	90.265.000	5,00	319.250.000	7,00	755.212.500	9,00	792.973.125	11,00	832.621.781	13,00	874.252.870	15,00

Bidang Urusan	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Tahun Proyeksi											
					Kondisi Eksisting (Tahun 2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	araan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan															
			2. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan	%	68,04		68,72		69,41		70,10		70,80		71,51		72,23
	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Meningkatnya Pemanfaatan Data Gender dan Anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	%	97	13.835.000	97,97	115.500.000	98,95	121.275.000	99,94	127.338.750	100,00	133.705.688	100,00	140.390.972	100,00
	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak, serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	Lembaga	2	337.220.000	2	304.500.000	2	319.725.000	2	335.711.250	2	352.496.813	2	370.121.653	2
	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak	1. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	62,87	847.140.900	63,50	1.617.000.000	64,13	1.697.850.000	64,78	1.782.742.500	65,42	1.871.879.625	66,08	1.965.473.606	66,74
			2. Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100		100		100		100		100		100		100

Bidang Urusan	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Tahun Proyeksi											
					Kondisi Eksisting (Tahun 2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	1. Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	Korban per 100.000 penduduk	11,91	2.323.732.000	11,42	1.152.375.000	10,71	1.209.993.750	10,04	1.270.493.438	9,42	1.334.018.109	8,83	1.400.719.015	8,29
			2. Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100		100		100		100		100		100		100
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						**11.530.477.977,00**		**11.852.836.386,00**		**13.937.471.014,00**		**14.268.098.587,00**		**16.118.339.290,00**		**18.980.847.938,00**	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Skor	82,06	8.369.880.977	82,06	8.578.093.886	83,04	8.749.655.764	83,04	8.924.648.879	84,02	9.103.141.857	84,02	9.194.173.276	85,00
				Kategori	A		A		A		A		A		A		A
	PROGRAM URUSAN					3.160.597.000		3.274.742.500		5.187.815.250		5.343.449.708		7.015.197.433		9.786.674.662	
	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	meningkatnya penanganan kerawanan pangan	persentase daerah rentan rawan pangan	%	0	351.200.000	4,27	1.126.250.000	3,42	2.139.375.000	2,56	2.203.556.250	1,71	2.969.662.938	0,85	3.860.561.819	0,00
	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan Segar di Post Market dan Pre Market	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan Post Market	%	100	104.400.000	100	342.000.000	100	670.000.000	100	690.100.000	100	860.803.000	100	1.119.043.900	100
			Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan Pre Market	%	36		50		55		60		65		70		75
	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIK	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Strategis	Angka Ketersediaan Energi	Kkal/Kap/ Hari	5344,97	2.704.997.000	6395,55	1.206.492.500	6492,12	1.568.440.250	6590,15	1.615.493.458	6689,66	2.100.141.495	6790,68	3.180.183.943	6891,70

Bidang Urusan	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Tahun Proyeksi													
					Kondisi Eksisting (Tahun 2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
	ASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT																	
			Angka Ketersediaan Protein	Gr/Kap/ Hari	146,38		158,05		162,38		166,83		171,40		176,09		181,18	
		Tertanganinya Fluktuasi Harga Komoditas Pangan Pokok Strategis	Nilai Coefisien Variasi Komoditas Pangan Pokok Strategis															
			Beras	%	3,09		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00	
			Telur Ayam Ras	%	3,37		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00	
			Cabai Rawit Merah	%	22,98		25,00		25,00		25,00		25,00		25,00		25,00	
			Bawang Merah	%	25,11		30,00		30,00		30,00		30,00		30,00		30,00	
		Meningkatnya Nilai Asupan Kecukupan Gizi Masyarakat	Angka Konsumsi Energi	Kkal/Kap/ Hari	2418		2356,60		2292,50		2228,30		2164,20		2100,00		2100,00	
			Angka Konsumsi Protein	Gr/Kap/ Hari	74,4		69,70		66,60		63,40		60,20		57,00		57,00	
		Meningkatnya Stok Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Provinsi	Rasio Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) terhadap jumlah CBPD	%	40,38		52,42		65,58		76,77		88,05		97,45		100,00	
	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Masyarakat	%	0	-	0,00	600.000.000	20,00	810.000.000	25,00	834.300.000	30,00	1.084.590.000	35,00	1.626.885.000	40,00	
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						**-**		**150.000.000**		**190.000.000**		**200.000.000**		**220.000.000**		**250.000.000**		
	PROGRAM URUSAN					-		150.000.000		190.000.000		200.000.000		220.000.000		250.000.000		

Bidang Urusan	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Tahun Proyeksi											
					Kondisi Eksisting (Tahun 2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Persentase Tersedianya Tanah Objek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	%	-	-	-	150.000.000	10,00	190.000.000	15,00	200.000.000	25,00	220.000.000	25,00	250.000.000	25,00
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						**105.183.936.012,00**		**108.951.455.343,07**		**116.646.921.659,21**		**126.182.983.105,50**		**139.144.791.156,48**		**151.538.571.099,50**	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Skor	79,93	83.909.921.634	80,73	84.713.035.343	81,54	85.533.091.659	82,35	86.365.363.106	83,18	87.210.051.156	84,01	88.067.361.100	84,85
				Kategori	BB		A		A		A		A		A		A
	PROGRAM URUSAN					21.274.014.378		24.238.420.000		31.113.830.000		39.817.620.000		51.934.740.000		63.471.210.000	
	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	ketaatan penanggung jawab usaha dan/kegiatan terhadap izin lingkungan,izin PPLH dan PPULH	%	98,53	47.187.000	100,00	235.100.000	100	750.570.000	100,00	1.662.760.000	100,00	2.256.680.000	100,00	3.378.570.000	100,00
	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	persentase penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	%	100	30.000.000	100	407.000.000	100	809.780.000	100	1.611.140.000	100	3.211.560.000	100	4.201.780.000	100

Bidang Urusan	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Tahun Proyeksi													
					Kondisi Eksisting (Tahun 2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	persentase RTH	%	10	61.392.300	10,10	420.000.000	10,20	805.210.000	10,30	1.543.710.000	10,41	2.565.280.000	10,51	3.695.970.000	10,62
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya penanganan sampah dan pengurangan sampah	1. Persentase penanganan sampah	%	53,20	15.967.890.300	58,70	16.283.300.000	64,20	19.693.250.000	69,70	22.439.250.000	70,00	25.651.680.000	70,00	28.324.270.000	70,00
			2. Persentase pengurangan sampah	%	20,95		25,03		29,11		30,00		30,00		30,00		30,00
	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) limbah bahan berbahaya dan beracun (LIMBAH B3)	Persentase limbah B3 yang terkelola	%	100	27.813.200	100	354.000.000	100	702.610.000	100	1.394.500.000	100	2.772.950.000	100	3.513.990.000	100
	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Menurunnya pencemaran air dan udara	1. Persentase pemenuhan baku mutu parameter kualitas air	%	12,72	5.063.049.578	13,99	5.664.020.000	15,39	6.623.680.000	16,93	7.745.950.000	18,62	9.087.200.000	20,49	10.660.790.000	22,53
			2. Persentase pemenuhan baku mutu parameter kualitas air laut	%	100		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
			3. Persentase pemenuhan baku mutu parameter kualitas udara	%	100		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
			4. Jumlah permohonan pengujian yang dilayani	Permohonan	392		435,00		478,00		521,00		564,00		607,00		650,00

Bidang Urusan	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Tahun Proyeksi													
					Kondisi Eksisting (Tahun 2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
			5. Jumlah seluruh pengujian yang dilakukan terhadap paramater	Kali	127		145,00		163,00		181,00		199,00		217,00		235,00	
	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang meningkat kinerjanya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	18,7	-	-	300.000.000	22,63	619.000.000	24,89	1.277.200.000	27,38	2.640.040.000	30,12	3.457.120.000	33,13	
	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya partisipasi lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Unit	230	29.482.000	253	325.000.000	278	641.100.000	306	1.264.640.000	337	2.099.370.000	370	3.139.620.000	407	
	2.11.02 PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	47.200.000	100	250.000.000	100	468.630.000	100	878.470.000	100	1.649.980.000	100	3.099.100.000	100	
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						**123.154.750,00**		**1.195.770.300,00**		**2.034.891.400,00**		**2.073.874.500,00**		**2.113.009.300,00**		**2.153.522.000,00**		

Bidang Urusan	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Tahun Proyeksi													
					Kondisi Eksisting (Tahun 2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Skor	80,82	-	81,63	-	82,44	-	83,27	-	84,10	-	84,94	-	85,79	
				Kategori	A		A		A		A		A		A		A	
	PROGRAM URUSAN					123.154.750		1.195.770.300		2.034.891.400		2.073.874.500		2.113.009.300		2.153.522.000		
	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	1. Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	17.412.000	99,72	228.099.000	99,77	436.496.400	99,82	444.889.600	99,87	453.283.600	99,92	461.677.600	99,97	
			2. Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	99,67		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
			3. Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
			4. Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	1. persentase kepemilikan identitas kependudukan digital	%	100	56.115.000	2,17	408.971.300	2,19	722.872.600	2,22	736.617.600	2,24	750.519.200	2,26	764.420.800	2,28	
			2. persentase kepemilikan kartu identitas anak	%	100		51,11		51,62		52,13		52,65		53,18		53,71	
	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	persentasi informasi kependudukan yang dimanfaatkan	%	8,33	24.344.000	11,11	416.818.000	13,89	730.878.400	19,44	744.941.300	22,22	758.998.500	25,00	774.423.600	27,78	
	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	meningkatnya kualitas profil kependudukan	cakupan pengelolaan profil kependudukan	%	100	25.283.750	100	141.882.000	100	144.644.000	100	147.426.000	100	150.208.000	100	153.000.000	100	

Bidang Urusan	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Tahun Proyeksi											
					Kondisi Eksisting (Tahun 2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						**15.819.948.680,00**		**23.085.881.715,00**		**28.706.990.139,00**		**30.320.125.763,00**		**31.642.318.687,00**		**33.512.382.706,00**	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Skor	80,82	11.976.757.380	80,83	12.371.716.415	80,84	14.736.685.839	80,85	16.091.671.463	80,86	17.156.713.387	80,87	18.824.988.706	80,88
				Kategori	A		A		A		A		A		A		A
	PROGRAM URUSAN					3.843.191.300		10.714.165.300		13.970.304.300		14.228.454.300		14.485.605.300		14.687.394.000	
	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1. persentase aparatur desa dan anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	%	78,05	489.118.000	78,83	1.355.959.500	79,62	1.380.546.700	80,41	1.407.133.900	81,22	1.432.723.000	82,03	1.389.094.000	82,85
			2. persentase fasilitas tata kelola desa	%	100		100		100		100		100		100		100
	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	1. Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	%	100	3.272.296.800	100	8.896.290.300	100	12.115.418.400	100	12.334.547.400	100	12.553.675.500	100	12.786.500.000	100
			2. Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	%	100		100		100		100		100		100		100
			3. Jumlah BUMDes Maju	BUMDes	31		36		40		45		50		55		60
			4. Persentase Posyantek Aktif	%	65,81		66,67		67,52		68,38		69,23		70,09		70,94

Bidang Urusan	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Tahun Proyeksi											
					Kondisi Eksisting (Tahun 2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase fasilitas kerjasama desa	%	11,66	81.776.500	11,76	231.215.500	11,89	238.939.200	12,01	246.673.000	12,13	254.406.800	12,25	262.300.000	12,38
	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase fasilitas penataan desa	%	100	-	100	230.700.000	100	235.400.000	100	240.100.000	100	244.800.000	100	249.500.000	100
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						**619.715.450,00**		**1.412.000.000,00**		**1.587.600.000,00**		**1.666.980.000,00**		**1.750.329.000,00**		**1.837.845.450,00**	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Skor	79,76	-	80,56	-	81,36	-	82,18	-	83,00	-	83,83	-	84,67
				Kategori	BB		BB		BB		BB		BB		BB		BB
	PROGRAM URUSAN					619.715.450		1.412.000.000		1.587.600.000		1.666.980.000		1.750.329.000		1.837.845.450	
	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	1. Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	%	20	514.414.000	20,44	666.750.000	25,44	700.087.500	30,44	735.091.875	35,44	771.846.469	40,44	810.438.792	45,44
			2. Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	Indeks	81,76		83,16		84,45		85,65		86,75		87,77		88,79
	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1. Proporsi Kebutuhan Kb Yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara Kb Modern (Demand Satisfied)	%	90,94	17.599.000	91,38	157.250.000	91,77	270.112.500	92,16	283.618.125	92,55	297.799.031	92,94	312.688.983	93,33

Bidang Urusan	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Tahun Proyeksi													
					Kondisi Eksisting (Tahun 2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			2. Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	%	60,20		60,80	-	61,50	-	62,20	-	62,90	-	63,60	-	64,30
	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk	1. Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata Anak per Wanita	2,37	87.702.450	2,34	588.000.000	2,33	617.400.000	2,32	648.270.000	2,31	680.683.500	2,30	714.717.675	2,29
			2. Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	kelahiran per 1000 perempuan usia 15-19 tahun	37,8		32,68		32,55		32,41		32,27		32,14		32,00
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						**22.239.770.967,00**		**24.226.440.411,02**		**26.961.773.857,13**		**30.147.208.425,87**		**33.947.479.036,75**		**37.459.474.756,98**	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Skor	81,41	11.608.705.817	82,22	12.444.260.411	83,05	13.282.303.857	83,88	14.177.448.426	84,72	15.133.629.037	85,56	16.155.054.757	86,42
				Kategori	A		A		A		A		A		A		A
	PROGRAM URUSAN					10.631.065.150		11.782.180.000		13.679.470.000		15.969.760.000		18.813.850.000		21.304.420.000	
	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Meningkatnya Perusahaan yang bergerak di Angkutan Perairan	1. Persentase Perusahaan angkutan perairan yang memiliki Izin Usaha	%	100	1.977.824.550	100	2.662.570.000	100	3.515.940.000	100	4.642.820.000	100	6.148.150.000	100	7.141.610.000	100
		Meningkatnya Perusahaan Angkutan Perairan sesuai SSU (Sertifikat Standar Usaha)	2. Persentase Perusahaan angkutan perairan sesuai SSU (Sertifikat Standar Usaha)	%	100		100		100		100		100		100		100
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Kajian	3. Persentase dokumen yang digunakan sebagai dasar	%	0		41,67		58,33		75,00		83,33		91,67		100,00

Bidang Urusan	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Tahun Proyeksi											
					Kondisi Eksisting (Tahun 2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Kelayakan Infrastruktur Transportasi Laut	perencanaan anggaran atau pembangunan fisik														
		Meningkatnya Persentase Infrastruktur Pelabuhan Dalam Kondisi Baik	4. Persentase Infrastruktur Pelabuhan yang beroperasi dalam kondisi baik	%	NA		40		40		40		40		40		40
		Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penyeberangan	5. Rasio Penurunan Kecelakaan Angkutan Penyeberangan	%	0.24		2,80		2,70		2,70		2,60		2,50		2.40
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya Prasarana Terminal	1. Cakupan fasilitas Terminal Dalam Kondisi baik	%	50.61	8.653.240.600	48,50	9.119.610.000	42,50	10.163.530.000	44,00	11.326.940.000	45,50	12.665.700.000	47,00	14.162.810.000	48,50
		Meningkatnya Kelaikan Angkutan Jalan	2. Persentase Sarana Angkutan Umum dalam Kondisi Laik Jalan	%	53,68		42.35		42,50		44,31		46,27		48,23		50,90
		Meningkatkan Kualitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui audit inspeksi, pemantauan dan penegakan standar keselamatan secara terencana	3. Rasio Fatalitas Lalu Lintas Jalan	Rasio	2,02		1,80		1,70		1,60		1,50		1,40		1,30
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						**18.351.812.868,00**		**20.590.779.316,29**		**22.952.338.466,44**		**26.719.619.518,74**		**29.802.457.870,99**		**34.789.536.232,22**	

Bidang Urusan	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Tahun Proyeksi											
					Kondisi Eksisting (Tahun 2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Skor	82,76	11.696.419.452	83,59	12.346.429.316	84,42	12.998.908.466	85,27	13.686.519.519	86,12	14.411.187.871	86,98	15.174.946.232	87,85
				Kategori	A		A		A		A		A		A		A
	PROGRAM URUSAN					6.655.393.416		8.244.350.000		9.953.430.000		13.033.100.000		15.391.270.000		19.614.590.000	
	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Tingkat Kematangan Teknologi Digital	Skor	4,13	1.799.195.616	2,75	2.502.610.000	3,00	2.962.520.000	3,00	4.521.260.000	3,50	5.995.920.000	3,75	7.918.830.000	4,00
			Tingkat Kematangan Strategi dan Rencana TDP	Skor	2,75		2,80		3,00		3,20		3,40		3,60		3,80
			Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen TDP	Skor	2,88		2,80		3,00		3,00		3,20		3,20		3,40
	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah	%	78,57	4.856.197.800	87,00	5.741.740.000	89,00	6.990.910.000	91,00	8.511.840.000	92,00	9.395.350.000	93,00	11.695.760.000	95,00
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						**15.891.773.402,00**		**18.793.543.346,00**		**24.956.188.788,00**		**30.995.366.522,00**		**42.696.370.828,00**		**61.963.595.582,00**	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Skor	75,16	13.964.755.802	75,91	13.321.942.346	76,67	13.918.885.438	77,44	13.774.745.872	78,21	14.472.721.328	78,99	16.102.128.582	79,78
				Kategori	BB		BB		BB		BB		BB		BB		BB
	PROGRAM URUSAN					1.927.017.600		5.471.601.000		11.037.303.350		17.220.620.650		28.223.649.500		45.861.467.000	

Bidang Urusan	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Tahun Proyeksi											
					Kondisi Eksisting (Tahun 2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Meningkatnya Kualitas Layanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Pertumbuhan volume usaha Koperasi	%	5	11.690.000	5,05	588.880.000	5,10	1.203.350.000	5,15	2.459.030.000	5,20	3.134.120.000	5,26	4.305.910.000	5,31
	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	5	222.435.300	5	949.021.000	10	2.951.714.000	15	3.096.012.000	20	3.764.656.000	25	5.404.959.000	30
	2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya Kapasitas UMKM Yang Tangguh dan Mandiri	1. Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	%	36,83	1.482.332.300	37,75	2.009.250.000	38,68	3.122.029.350	39,60	4.290.228.650	40,13	6.777.573.500	41,45	7.355.288.000	42,37
			2. Pertumbuhan wirausaha	%	4,45		4,49		4,54		4,58		4,63		4,68		4,72
	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian	Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan	%	100	-	0	500.000.000	100	1.031.660.000	100	2.128.660.000	100	4.400.060.000	100	9.095.200.000	100
	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Persentase pengawasan dan pemeriksaan Koperasi	%	100	42.500.000	100	300.000.000	100	576.500.000	100	1.107.840.000	100	2.133.010.000	100	4.106.890.000	100
	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya Daya Saing UMKM	Proporsi Usaha Kecil Menjalin Kemitraan dan Ekspor	%	63,03	-	0,00	500.000.000	68,03	1.031.660.000	73,03	2.128.660.000	78,03	4.400.060.000	83,03	9.095.200.000	88,03
	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi	Persentase Koperasi aktif	%	53,61	168.060.000	54,15	624.450.000	54,69	1.120.390.000	55,23	2.010.190.000	55,79	3.614.170.000	56,34	6.498.020.000	56,91
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						**9.037.782.372,00**		**13.178.547.603,00**		**17.436.402.363,30**		**19.480.042.599,63**		**22.728.046.859,59**		**26.033.092.593,87**	

Bidang Urusan	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Tahun Proyeksi											
					Kondisi Eksisting (Tahun 2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Skor	76,48	7.792.578.160	86-87	9.268.246.657	87-88	12.695.071.323	88-89	14.264.578.455	89-90	16.991.036.300	90-91	19.940.588.115	91-92
				Kategori	B		A		A		A		A		A		A
	PROGRAM URUSAN					1.245.204.212		3.910.300.946		4.741.331.041		5.215.464.145		5.737.010.559		6.092.504.478	
	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	%	100	38.813.000	100	905.980.000	100	996.578.000	100	1.096.235.800	100	1.205.859.380	100	1.266.152.349	100
	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Pemanfaatan data dan informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan data dan informsi Penanaman Modal	%	100	57.151.200	62	106.900.000	68	117.590.000	72	129.349.000	77	142.283.900	81	218.041.486	85
	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi total terhadap target investasi	%	100	844.194.012	100	1.615.430.000	100	1.776.973.000	100	1.954.670.300	100	2.150.137.330	100	2.257.644.197	100
	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	%	30	305.046.000	60	879.000.000	70	966.900.000	80	1.063.590.000	90	1.169.949.000	100	1.228.446.450	100
	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	%	-	-	-	402.990.946	11,00	883.290.041	12,00	971.619.045	13,00	1.068.780.949	14,00	1.122.219.997	15,00
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						**84.222.155.351,00**		**72.142.629.223,90**		**76.232.639.233,58**		**80.060.570.165,20**		**83.379.708.057,50**		**86.713.011.123,45**	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJAN	Meningkatnya Kualitas Akuntabilita	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Skor	78,16	9.245.158.870	78,94	9.750.968.875	79,73	10.258.729.074	80,53	10.793.442.701	81,33	11.356.566.770	82,15	11.949.638.422	82,97

Bidang Urusan	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Tahun Proyeksi											
					Kondisi Eksisting (Tahun 2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	G URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	s Kinerja Pada Perangkat Daerah															
				Kategori	BB		BB		BB		A		A		A		A
	PROGRAM URUSAN					74.976.996.481		62.391.660.349		65.973.910.160		69.267.127.464		72.023.141.288		74.763.372.701	
	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase atlet yang masuk pelatnas	%	0,06	72.004.933.531	0,07	58.917.795.385	0,08	61.731.681.517	0,09	64.599.547.504	0,10	66.522.998.769	0,11	67.023.225.622	0,12
	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	%	25,58	2.972.062.950	26,08	3.323.864.964	26,58	4.042.228.643	27,08	4.417.579.960	27,58	5.250.142.519	28,08	7.490.147.079	28,58
	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Meningkatnya Kualitas Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kepramukaan	%	-	-	-	150.000.000	100	200.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						**139.344.600,00**		**500.000.000,00**		**892.320.000,00**		**1.592.470.000,00**		**2.347.920.000,00**		**3.393.140.000,00**	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Skor	82,76	-	83,59	-	84,42	-	85,27	-	86,12	-	86,98	-	87,85
				Kategori	A		A		A		A		A		A		A
	PROGRAM URUSAN					139.344.600		500.000.000		892.320.000		1.592.470.000		2.347.920.000		3.393.140.000	
	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tercapainya kolaborasi, integrasi,dan standardisasi dalam penyelenggaraan	Persentase Perangkat Daerah yang Memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	%	20	139.344.600	23,00	500.000.000	35,00	892.320.000	47,00	1.592.470.000	58,00	2.347.920.000	70,00	3.393.140.000	81,00

Bidang Urusan	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Tahun Proyeksi											
					Kondisi Eksisting (Tahun 2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		sistem statistik nasional (SSN)															
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						**126.605.000,00**		**500.000.000,00**		**905.060.000,00**		**1.638.270.000,00**		**2.371.560.000,00**		**3.189.970.000,00**	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Skor	82,76	-	83,59	-	84,42	-	85,27	-	86,12	-	86,98	-	87,85
				Kategori	A		A		A		A		A		A		A
	PROGRAM URUSAN					126.605.000		500.000.000		905.060.000		1.638.270.000		2.371.560.000		3.189.970.000	
	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Persandian	Skor	3,0	126.605.000	2,0	500.000.000	2,3	905.060.000	2,51	1.638.270.000	2,7	2.371.560.000	3,0	3.189.970.000	3,5
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						**10.154.600.730,00**		**18.141.458.874,90**		**21.277.079.073,58**		**25.477.522.701,20**		**31.321.216.769,50**		**39.629.508.422,45**	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Skor	79,77	3.860.591.880	80,57	9.750.968.875	81,37	10.258.729.074	82,19	10.793.442.701	83,01	11.356.566.770	83,84	11.949.638.422	84,68
				Kategori	BB		BB	-	BB	-	BB	-	BB	-	BB	-	BB
	PROGRAM URUSAN					6.294.008.850	0,00	8.390.490.000	0,00	11.018.350.000	0,00	14.684.080.000	0,00	19.964.650.000	0,00	27.679.870.000	0,00
	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	1. Persentase warisan budaya yang dilestarikan	%	100	126.500.000	100	318.750.000	100	531.190.000	100	885.200.000	100	1.478.460.000	100	2.469.320.000	100
			2. Persentase cagar budaya yang ditetapkan	%	4,44		4,44		4,53		4,62		4,71		4,8		4,88

Bidang Urusan	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Tahun Proyeksi													
					Kondisi Eksisting (Tahun 2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
			3. Persentase warisan budaya tak benda yang ditetapkan	%	6,05		6,05		7,49		8,93		10,37		11,81		13,25	
	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Meningkatnya sejarah lokal yang dikembangkan	Persentase sejarah lokal yang dikembangkan	%	25	124.727.450	25	376.250.000	50	651.600.000	50	1.128.460.000	75	1.958.500.000	100	3.399.100.000	100	
	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Meningkatnya kunjungan museum	Persentase kunjungan wisatawan ke museum	%	96,65	1.448.885.000	100	2.031.490.000	100	2.742.750.000	100	3.703.040.000	100	5.013.320.000	100	6.787.280.000	100	
	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya Objek Pemajuan Kedudayaan yang dikembangkan	Persentase Objek Pemajuan Kedudayaan yang dikembangkan	%	83,33	4.473.896.400	83,33	5.308.000.000	83,33	6.478.260.000	83,33	7.906.520.000	91,66	9.679.110.000	100	11.849.200.000	100	
	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Meningkatnya kesenian tradisional yang dikembangkan	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	%	25	120.000.000	25	356.000.000	50	614.550.000	50	1.060.860.000	75	1.835.260.000	100	3.174.970.000	100	
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						**14.495.633.997,00**		**16.462.307.969,04**		**18.590.769.339,54**		**21.765.726.210,94**		**26.834.176.750,57**		**35.369.705.890,16**		
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Skor	80,59	13.292.919.197	81,40	13.951.677.279	82,21	14.613.225.697	83,03	15.306.873.499	83,86	16.034.212.112	84,70	16.796.913.474	85,55	
				Kategori	A		A		A		A		A		A		A	
	PROGRAM URUSAN					1.202.714.800		2.510.630.690		3.977.543.643		6.458.852.712		10.799.964.639		18.572.792.416		
	2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Pelestarian KCKR dan Naskah Kuno Milik Daerah	%	100	30.730.100	100	634.140.500	100	1.277.710.720	100	2.574.421.101	100	5.196.708.895	100	10.490.093.135	100	
	2.23.02 PROGRAM PEMBINAA	Meningkatnya Layanan Perpustaka	Nilai Tingkat Kegemaran	nilai	65,67	1.171.984.700	65,92	1.876.490.190	66,17	2.699.832.923	66,42	3.884.431.611	66,67	5.603.255.744	66,92	8.082.699.281	67,17	

Bidang Urusan	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Tahun Proyeksi											
					Kondisi Eksisting (Tahun 2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	N PERPUSTAKAAN	an sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Membaca Masyarakat														
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						**177.620.400,00**		**705.000.000,00**		**1.689.692.825,00**		**3.172.050.805,00**		**6.000.491.185,00**		**11.146.803.934,00**	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Skor	80,59	-	81,40	-	82,21	-	83,03		83,86	-	84,70	-	85,55
				Kategori	A		A		A		A		A		A		A
	PROGRAM URUSAN					177.620.400		705.000.000		1.689.692.825		3.172.050.805		6.000.491.185		11.146.803.934	
	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Meningkatnya tata kelola arsip statis dan dinamis	Tingkat Ketersediaan Arsip	%	100	177.620.400	100	405.000.000	100	1.070.693.966	100	1.894.852.180	100	3.360.454.398	100	5.689.682.532	100
	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	%	100	-	-	300.000.000	100	618.998.859	100	1.277.198.625	100	2.640.036.787	100	5.457.121.402	100
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						**36.450.561.920,00**		**38.839.220.000,00**		**42.713.040.000,00**		**47.007.770.000,00**		**53.433.160.000,00**		**62.824.070.000,00**	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Skor	83,13	31.013.165.575	83,96	31.678.290.000	84,80	32.349.760.000	85,65	33.037.070.000	86,51	33.740.640.000	87,37	34.460.880.000	88,24
				Kategori	A		A		A		A		A		A		A
	PROGRAM URUSAN					5.437.396.345		7.160.930.000		10.363.280.000		13.970.700.000		19.692.520.000		28.363.190.000	
	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha perikanan dan kelautan	%	100,00	260.115.000	100,00	754.700.000	100,00	924.720.000	100,00	1.586.290.000	100,00	2.981.250.000	100,00	3.587.230.000	100,00

Bidang Urusan	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Tahun Proyeksi											
					Kondisi Eksisting (Tahun 2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan															
	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Meningkatnya kualitas ekosistem laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang dikelola secara berkelanjutan	Persentase wilayah laut dan pesisir yang dikelola berkelanjutan	%	6,56	661.102.000	8,95	950.910.000	14,16	2.283.230.000	16,00	3.046.450.000	17,00	4.608.800.000	18,00	6.793.790.000	18,00
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya produksi budidaya dan kesejahteraan pembudidaya ikan	1. Produksi Perikanan Budidaya	Ton	968.165,67	737.003.980	980.889,00	1.030.310.000	987.164,00	1.395.190.000	1.004.561,00	1.951.280.000	1.022.623,00	2.885.590.000	1.041.418,00	5.507.690.000	1.060.933,00
			2. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	%	104,69		101-105		101-105		101-105		101-105		101-105		101-105
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan kesejahteraan nelayan secara berkelanjutan	1. Produksi Perikanan Tangkap	Ton	248.580,72	2.310.610.600	251.066,00	2.895.860.000	253.577,00	4.157.740.000	256.113,00	5.260.330.000	258.674,00	6.931.780.000	261.261,00	9.971.440.000	263.873,00
			2. Nilai Tukar Nelayan	%	105,84		101-105		101-105		101-105		101-105		101-105		101-105
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya konsumsi ikan dan nilai tambah produk perikanan	1. Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Tahun	58,39	1.468.564.765	24,00	1.529.150.000	24,50	1.602.400.000	25,00	2.126.350.000	25,50	2.285.100.000	26,00	2.503.040.000	26,00
			2. Produksi olahan hasil perikanan	Ton	189.793,68		181.366,00		186.897,00		186.807,00		189.710,86		190.659,42		191.612,72
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						**19.593.718.181**		**21.655.310.000**		**24.697.800.000**		**28.595.500.061**		**34.411.250.000**		**43.356.330.000**	

Bidang Urusan	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Tahun Proyeksi											
					Kondisi Eksisting (Tahun 2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Skor	80,37	15.438.996.581	81,17	15.991.220.000	81,99	16.546.650.000	82,81	17.122.200.000	83,63	17.718.620.000	84,47	18.336.700.000	85,31
				Kategori	A		A		A		A		A		A		A
	PROGRAM URUSAN					4.154.721.600		5.664.090.000		8.151.150.000		11.473.300.060		16.692.630.000		25.019.630.000	
	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	%	100	1.431.500.000	100	1.820.500.000	100	2.324.790.000	100	2.968.780.000	100	3.802.200.000	100	4.869.630.000	100
	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Meningkatnya Kualitas Ekosistem Kreatif	Persentase Pelaku Ekondomi Kreatif Yang Memiliki Kekayaan Intelektual	%	-	244.000.000	50,00	750.000.000	52,50	1.303.500.000	55,13	2.265.470.000	57,88	3.945.820.000	60,78	6.872.550.000	63,81
	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	%	85.15	375.825.000	86.00	750.000.000	86.86	1.790.670.000	87.73	3.053.810.000	88.61	5.219.340.000	89.49	8.920.560.000	90.39
	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	%	4,51	2.103.396.600	4,74	2.343.590.000	4,97	2.732.190.000	5,22	3.185.240.060	5,48	3.725.270.000	5,76	4.356.890.000	6,05
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						**168.280.797.332,00**		**168.126.384.086,00**		**212.609.664.924,00**		**224.892.133.476,75**		**236.095.652.870,59**		**331.784.233.363,43**	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJAN	Meningkatnya Kualitas Akuntabilita	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Skor	80,43	78.921.897.468	80,63	85.493.947.695	80,83	90.927.655.890	81,03	99.806.733.595	81,23	103.085.551.357	81,43	128.519.478.973,52	81,63

Bidang Urusan	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Tahun Proyeksi													
					Kondisi Eksisting (Tahun 2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
	G URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	s Kinerja Pada Perangkat Daerah																
				Kategori	A		A		A		A		A		A		A	
	PROGRAM URUSAN					89.358.899.864		82.632.436.391		121.682.009.034		125.085.399.882		133.010.101.514		203.264.754.389,91		
	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	1.Persentase Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	%	80,99	-	81,79	4.194.973.500	82,61	6.594.379.932	83,44	6.731.017.930	84,27	6.866.588.967	85,12	62.847.382.526,41	85,97	
			2. Persentase Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	%	69,4		70,09		70,79		71,50		72,22		72,93		73,67	
			3. Persentase Penurunan Emisi GRK	%			13,52		15,31		17,10		18,89		20,68		20,68	
		Terkendalinya Wilayah dari Wabah Penyakit Hewan	Jumlah Wilayah yang dilakukan pengendalian terhadap wabah penyakit hewan	Wilayah	-		-		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00	
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	1. Persentase Fasilitasi Prasarana Pertanian	%	18,25	70.032.364.000	7,92	38.463.076.000	8,21	43.446.378.912	7,59	42.946.231.874	7,05	46.158.593.644	6,59	46.055.875.260,21	6,18	
			2. Persentase luas layanan irigasi multikomoditas	%	62,93		63,56		64,19		64,84		65,49		66,14		66,80	
		Meningkatnya Pemanfaata	Tingkat Kemanfaatan Prasarana Pertanian	%	75,00		-		75,00		75,00		75,00		75,00		75,00	

Bidang Urusan	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Tahun Proyeksi													
					Kondisi Eksisting (Tahun 2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
		n Prasarana Pertanian																
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	1. Peningkatan produksi tanaman pangan	%	-5,86	16.713.559.462	0,56	30.923.399.586	0,57	57.431.262.921	0,58	60.421.885.609	0,59	63.852.922.262	0,60	74.438.077.540,86	0,61	
			2. Peningkatan produksi hortikultura	%	-13,92		1,00		1,02		1,04		1,06		1,07		1,08	
			3. Peningkatan produksi perkebunan	%	1,06		0,22		0,24		0,25		0,26		0,27		0,28	
		Meningkatnya Ketersediaan Pangan Asal Hewan	Jumlah Populasi Ternak Sapi, Kerbau, Kambing dan Unggas	Ekor	Sapi: 1.305.294 Kerbau: 94.456 Kambing: 481.204 Unggas: 22.861.392		Sapi 1.314.745, Kerbau 96.851, Kambing 517.655 dan Unggas 49.263.003		Sapi 1.321.286 , Kerbau 97.333 , Kambing 520.055 dan Unggas 49.508.092		Sapi 1.327.827, Kerbau 97.815, Kambing 520.536, dan Unggas 49.753.182		Sapi 1.334.368, Kerbau 98.296, Kambing 521.018, Unggas 49.998.271		Sapi 1.340.909, Kerbau 98.778, Kambing 521.500, Unggas 50.243.361		Sapi 1.347.450, kerbau 99.260, kambing 521.982, unggas 50.488.450	
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluhan pertanian	1. Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	%	-	1.502.072.800	0,00	4.441.000.000	15,00	7.919.363.076	15,00	8.092.387.673	15,00	8.289.997.490	15,00	9.036.945.035,52	15,00	
			2. Persentase kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi	%	-		0,00		14,00		12,00		11,00		10,00		9,00	
			3. Persentase SDM Petani yang meningkat kapasitasnya	%	-		0,08		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
		Meningkatnya Pengolahan dan Pemasaran Produk Peternakan	Produk Peternakan yang berhasil dipasarkan	%	71,28		75		80		85		90		95		95	
	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATA	Meningkatnya Status Kesehatan Hewan	Persentase Ternak Yang Terinfeksi PHMS	%	0,04	1.110.903.602	2	4.459.987.305	2	6.085.939.545	2	6.742.694.868	2	7.596.382.451	4	10.545.502.320,91	4	

Bidang Urusan	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Tahun Proyeksi											
					Kondisi Eksisting (Tahun 2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	N MASYARAKAT VETERINER																
	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Meningkatnya Perizinan Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Izin Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diterbitkan	dokumen	-	-	-	150.000.000	10,00	204.684.648	10,00	151.181.930	10,00	245.616.701	10,00	340.971.706,00	10,00
3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						**5.786.388.459,00**		**8.177.814.155,68**		**12.523.901.615,19**		**16.511.835.834,97**		**21.435.917.198,00**		**99.012.374.779,37**	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Skor	79,93	2.837.184.459	80,73	3.588.814.156	81,54	4.341.161.615	82,35	5.251.445.835	83,18	6.352.867.198	84,01	7.685.614.779	84,85
				Kategori	BB		A		A		A		A		A		A
	PROGRAM URUSAN					2.949.204.000		4.589.000.000		8.182.740.000		11.260.390.000		15.083.050.000		91.326.760.000	
	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Meningkatnya kelestarian SDA hayati dan ekosistemnya	Indeks keanekaragaman hayati	Indeks	0,30	307.266.000	0,30	669.150.000	0,31	1.073.410.000	0,31	1.721.900.000	0,31	2.768.590.000	0,32	3.251.540.000	0,32
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Meningkatnya perekonomian masyarakat di sekitar kawasan hutan	1. Peningkatan nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	%	-79,39	832.078.000	10	1.387.160.000	10	2.030.090.000	10	2.671.010.000	10	3.359.100.000	10	4.595.760.000	10
			2. Peningkatan nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial	%	25,46		10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10

Bidang Urusan	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Tahun Proyeksi											
					Kondisi Eksisting (Tahun 2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	3.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Meningkatnya kelestarian dan fungsi DAS	Persentase tutupan lahan pada sempadan DAS	%	0,60	73.000.000	0,61	470.000.000	0,61	896.760.000	0,61	1.711.040.000	0,61	2.271.050.000	0,61	4.053.400.000	0,61
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Meningkatnya pengelolaan hutan melalui aspek perencanaan dan tata hutan hutan	Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	%	18,42	1.736.860.000	100,00	2.062.690.000	100,00	4.182.480.000	100,00	5.156.440.000	100,00	6.684.310.000	100,00	79.426.060.000	100,00
		2. Meningkatnya produktivitas pemanfaatan hutan dan pengolahan hasil hutan	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	%	1,11		1,11		1,11		1,11		1,11		1,11		1,11
		3. Meningkatnya penanganan lahan kritis	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi	%	9,72		11,37		13,52		16,40		20,56		27,06		38,71
		4. Meningkatnya kinerja perlindungan hutan	Laju deforestasi	Ha/Tahun	2347,07		2112,36		1901,13		1711,01		1539,91		1385,92		1247,33
3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						**11.773.597.068,00**		**13.783.475.787,96**		**17.078.061.826,08**		**20.978.792.463,74**		**23.609.611.593,85**		**27.793.731.855,50**	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Skor	81,33	9.940.183.323	82,14	10.717.865.788	82,96	11.497.691.826	83,79	12.334.832.464	84,63	13.233.541.594	85,48	14.198.391.855	86,33
				Kategori	A		A		A		A		A		A		A
	PROGRAM URUSAN					1.833.413.745		3.065.610.000		5.580.370.000		8.643.960.000		10.376.070.000		13.595.340.000	

Bidang Urusan	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Tahun Proyeksi											
					Kondisi Eksisting (Tahun 2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah	Persentase izin pemanfaatan air tanah yang dikendalikan	%	8,99	82.668.110	13,16	536.040.000	15,79	1.023.360.000	18,42	1.953.700.000	21,05	2.237.100.000	23,68	2.748.480.000	25,21
	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Meningkatnya kontribusi energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik	Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik	%	13,02	893.996.435	13,50	1.309.500.000	14,00	1.807.930.000	14,50	2.496.070.000	15,00	3.455.430.000	15,50	4.783.570.000	15,50
	3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat tidak mampu	Persentase rumah tangga tidak mampu yang terlayani listrik PLN	%	86,39	562.985.000	86,43	710.570.000	86,48	1.541.150.000	86,59	2.098.120.000	86,73	2.428.110.000	86,90	3.379.720.000	87,14
	3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Meningkatnya pengelolaan mineral dan batubara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase izin usaha pertambangan yang dikendalikan.	%	17,33	293.764.200	6,03	509.500.000	5,04	1.207.930.000	20,14	2.096.070.000	37,48	2.255.430.000	34,05	2.683.570.000	36,72
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						**15.173.763.937,00**		**16.612.581.319,90**		**18.430.001.511,73**		**19.386.311.182,42**		**20.396.489.152,87**		**21.463.743.291,73**	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Skor	82,5	11.645.198.507	83,33	12.394.274.632	84,16	13.145.829.612	85,00	13.943.614.125	85,85	14.790.511.184	86,71	15.689.585.984	87,58
				Kategori	A		A		A		A		A		A		A
	PROGRAM URUSAN					3.528.565.430		4.218.306.688		5.284.171.900		5.442.697.057		5.605.977.969		5.774.157.308	
	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya Pertumbuhan negara destinasi ekspor	Pertumbuhan negara destinasi ekspor	Jumlah Negara	-	157.630.000	2	733.960.000	2	1.120.752.000	2	1.154.374.560	2	1.189.005.797	2	1.224.675.971	2
		Meningkatnya	Pertumbuhan komoditi sub	Komoditi	4,34		2		2		2		2		2		2

Bidang Urusan	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Tahun Proyeksi											
					Kondisi Eksisting (Tahun 2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		pertumbuhan komoditi non tambang	sektor prioritas (pertanian, perkebunan, perikanan, ekonomi kreatif)														
	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemasaran Kelompok UKM	%	100	242.143.430	100	488.615.888	100	610.769.860	100	629.092.956	100	647.965.744	100	667.404.717	100
	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya fasilitasi sarana dan prasarana Perdagangan	Persentase fasilitasi sarana dan prasarana Perdagangan	%	100	335.000.000	100	695.500.000	100	834.600.000	100	859.638.000	100	885.427.140	100	911.989.954	100
	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase usaha perdagangan yang difasilitasi	%	100	25.500.000	100	150.000.000	100	195.000.000	100	200.850.000	100	206.875.500	100	213.081.765	100
	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Meningkatnya stabilitas Perkembangan Harga Barang Kebutuhan Pokok	Persentase Perkembangan Harga Barang Kebutuhan Pokok	%	0-10	268.680.000	0-10	335.230.800	0-10	435.800.040	0-10	448.874.041	0-10	462.340.262	0-10	476.210.470	0-10
	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Konsumen	Persentase Penyelesaian Sengketa Konsumen	%	100	2.499.612.000	100	1.815.000.000	100	2.087.250.000	100	2.149.867.500	100	2.214.363.525	100	2.280.794.431	100
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						**14.376.678.809,00**		**15.654.203.379,36**		**17.187.750.767,40**		**19.113.507.515,42**		**21.646.693.376,04**		**25.084.886.176,85**	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Skor	80,06	11.075.825.638	80,86	11.648.233.379	81,67	12.222.970.767	82,49	12.826.677.515	83,31	13.460.843.376	84,14	14.127.036.177	84,99

Bidang Urusan	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Tahun Proyeksi											
					Kondisi Eksisting (Tahun 2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	HAN DAERAH PROVINSI	Perangkat Daerah															
				Kategori	A		A		A		A		A		A		A
	PROGRAM URUSAN					3.300.853.171		4.005.970.000		4.964.780.000		6.286.830.000		8.185.850.000		10.957.850.000	
	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Persentase ketersediaan informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini	%	100	362.260.000	100	640.390.000	100	959.070.000	100	1.436.340.000	100	2.156.480.000	100	3.237.680.000	100
	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase izin usaha industri yang diterbitkan	%	100	87.820.000	100	262.940.000	100	454.710.000	100	786.350.000	100	1.362.790.000	100	2.361.810.000	100
	3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	Rp. Miliar	-	2.850.773.171	11.040,44	3.102.640.000	12.144,48	3.551.000.000	13.358,93	4.064.140.000	14.694,82	4.666.580.000	16.164,30	5.358.360.000	17.780,73
3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						**30.964.835,00**		**725.000.000,00**		**1.671.280.000,00**		**3.085.987.000,00**		**6.374.440.000,00**		**10.329.980.000,00**	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Skor	80,60	-	80,60	-	80,92	-	81,25	-	81,57	-	81,90	-	82,22
				Kategori	A		A		A		A		A		A		A
	PROGRAM URUSAN					30.964.835		725.000.000		1.671.280.000		3.085.987.000		6.374.440.000		10.329.980.000	
	3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi Yang Berkembang	%	57,70	14.666.000	57,70	250.000.000	77,38	501.170.000	77,38	1.004.467.000	77,38	2.017.770.000	77,38	3.052.490.000	77,38
	3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN	Meningkatnya pemberdayaan dan	Persentase Transmigran Yang Dibina dan Diberdayakan	%	50,71	-	-	250.000.000	51,55	515.830.000	52,11	1.064.330.000	52,67	2.200.030.000	53,23	3.347.600.000	53,79

Bidang Urusan	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Tahun Proyeksi											
					Kondisi Eksisting (Tahun 2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	KAWASAN TRANSMIGRASI	kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi															
	3.32.02 PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI	Meningkatnya perencanaan transmigrasi	Persentase Program Transmigrasi Yang Dilaksanakan	%	87,50	16.298.835	87,50	225.000.000	87,50	654.280.000	91,67	1.017.190.000	91,67	2.156.640.000	95,83	3.929.890.000	95,83
4.01 SEKRETARIAT DAERAH						**166.999.202.019,00**		**178.019.059.203,50**		**187.530.962.224,55**		**194.526.838.646,51**		**200.886.580.560,06**		**211.046.367.530,26**	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Skor	76,06	138.257.943.764	76,82	146.241.820.303	77,59	151.461.963.444	78,36	155.003.991.709	79,15	158.399.346.177	79,94	162.226.634.786	80,74
				Kategori	BB		BB		BB		BB		BB		BB		A
	PROGRAM URUSAN					28.741.258.255		31.777.238.901		36.068.998.781		39.522.846.938		42.487.234.383		48.819.732.745	
	4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Penyelesaian Kasus-kasus Hukum	Persentase Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Penyelesaian Kasus-kasus Hukum	%	100	5.139.973.800	100	5.812.637.080	100	6.064.848.950	100	6.072.773.550	100	6.073.317.156	100	9.692.091.095	100
	4.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	meningkatnya kualitas administrasi kebijakan pembangunan	Jumlah rekomendasi hasil pengendalian pembangunan yang ditindaklanjuti	dokumen	6	343.017.500	6	620.549.600	6	764.561.000	6	808.572.400	6	952.583.800	6	1.026.250.000	6
	4.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks	82,36	969.097.100	82,5	1.392.490.000	85,0	1.904.080.000	87,5	2.603.610.000	90,0	3.569.830.000	92,5	3.994.670.000	95,0
	4.01.04 PROGRAM KESEJAHTE	Meningkatnya Kualitas Kebijakan	Persentase Kesejahteraan Rakyat Dari Segi	%	100	18.556.775.655	100	19.599.453.221	100	22.659.398.543	100	24.925.338.397	100	26.417.872.236	100	28.159.659.460	100

Bidang Urusan	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Tahun Proyeksi													
					Kondisi Eksisting (Tahun 2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
	RAAN RAKYAT	Kesejahteraan Rakyat	Mental Spiritual, Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar															
	4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1. Persentase efektifitas kerja sama daerah	%	70	898.372.600	75	685.000.000	78	810.000.000	80	920.000.000	83	1.025.000.000	85	1.140.000.000	90	
			2. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan	%	2,826		2,927		3,052		3,165		3,245		3,356		3,415	
	4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Meningkatnya Kualitas Penataan Organisasi	1. Persentase kualitas Perangkat Daerah dengan kebutuhan ASN sesuai ANJAB dan ABK	%	100	1.235.308.700	100	1.454.344.000	100	1.570.691.520	100	1.696.346.842	100	1.832.054.589	100	1.978.618.956	100	
			2. Persentase Implementasi standar kompetensi jabatan	%	100		100		100		100		100		100		100	
			3. Persentase kualitas Penetapan Organisasi Kelembagaan Perangkat Daerah Prov dan Kab/Kota	%	100		100		100		100		100		100		100	
			4. Persentase Kualitas Pelayanan Publik	%	100		100		100		100		100		100		100	
			5. Persentase Kualitas Tingkat Implementasi Pelayanan Publik Kab/Kota	%	100		100		100		100		100		100		100	
			6. Persentase Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	%	100		100		100		100		100		100		100	
			7. Persentase Ketatalaksanaan Implementasi Kab/Kota	%	100		100		100		100		100		100		100	
	4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Meningkatnya kualitas kebijakan bidang perekonomian	Persentase rekomendasi bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	%	100	1.598.712.900	100	2.212.765.000	100	2.295.418.768	100	2.496.205.749	100	2.616.576.601	100	2.828.443.234	100	

Bidang Urusan	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Tahun Proyeksi											
					Kondisi Eksisting (Tahun 2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
4.02 SEKRETARIAT DPRD						**140.066.379.011,00**		**141.665.558.154,80**		**146.907.341.260,23**		**151.126.085.681,91**		**155.653.869.605,91**		**159.269.733.444,91**	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Skor	72,05	83.276.838.451	72,77	84.417.008.155	73,50	87.574.261.260	74,23	89.790.375.682	74,98	92.067.059.606	75,73	94.406.073.445	76,48
				Kategori	BB		BB		BB		BB		BB		BB		BB
	PROGRAM URUSAN					56.789.540.560		57.248.550.000		59.333.080.000		61.335.710.000		63.586.810.000		64.863.660.000	
	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	1. Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	%	100	56.789.540.560	100	57.248.550.000	100	59.333.080.000	100	61.335.710.000	100	63.586.810.000	100	64.863.660.000	100
			2. Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	%	100		100		100		100		100		100		100
		Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100		100		100		100		100		100		100
5.01 PERENCANAAN						**39.114.742.867,00**		**41.732.620.000,00**		**50.090.976.204,00**		**52.726.324.638,45**		**54.971.199.663,73**		**56.572.115.954,50**	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Skor	83,93	29.927.719.047	84,25	31.170.252.620	84,60	36.487.487.244	84,94	37.095.380.507	85,20	37.849.699.531	85,50	38.392.132.011	86,00
				Kategori	A		A		A		A		A		A		A
	PROGRAM URUSAN					9.187.023.820		10.562.367.380		13.603.488.960		15.630.944.131		17.121.500.133		18.179.983.944	
	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCAN	Meningkatnya keselarasan perencanaan perangkat daerah terhadap	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah Bidang P2M yang selaras	%	100	6.540.367.500	100	7.291.260.080	100	9.217.326.875	100	10.228.193.219	100	11.264.602.879	100	11.827.832.152	100

Bidang Urusan	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Tahun Proyeksi											
					Kondisi Eksisting (Tahun 2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	AAN PEMBANGUNAN DAERAH	perencanaan pembangunan daerah															
			Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah Bidang PSDA yang selaras	%	100		100		100		100		100		100		100
			Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah Bidang IK yang selaras	%	100		100		100		100		100		100		100
		Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah jangka Menengah dengan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah jangka Pendek	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah jangka Menengah dengan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah jangka Pendek Bidang P2M	%	100		100		100		100		100		100		100
			Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah jangka Menengah dengan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah jangka Pendek Bidang PSDA	%	100		100		100		100		100		100		100
			Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah jangka Menengah dengan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah jangka Pendek Bidang IK	%	100		100		100		100		100		100		100
		Meningkatnya Kinerja	Persentase Hasil pengendalian dan	%	NA		80		82,25		84		84,5		85		85,7

Bidang Urusan	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Tahun Proyeksi											
					Kondisi Eksisting (Tahun 2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Pengendalian dan Evaluasi Capaian Pembangunan Tematik dan Perangkat Daerah	Evaluasi Capaian Pembangunan Tematik dan Perangkat Daerah Bidang P2M yang ditindak Lanjuti														
			Persentase Hasil pengendalian dan Evaluasi Capaian Pembangunan Tematik dan Perangkat Daerah Bidang PSDA yang ditindak Lanjuti	%	NA		80		82,25		84		84,5		85		85,7
			Persentase Hasil pengendalian dan Evaluasi Capaian Pembangunan Tematik dan Perangkat Daerah Bidang IK yang ditindak Lanjuti	%	NA		80		82,25		84		84,5		85		85,7
	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Komponen tingkat sinergi dan kualitas dokumen perencanaan pemerintah daerah	Nilai	81,76	2.646.656.320	82	3.271.107.300	83,6	4.386.162.085	84	5.402.750.912	84,30	5.856.897.254	85	6.352.151.792	85,75
		Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi capaian pembangunan daerah	Persentase hasil pengendalian dan evaluasi capaian pembangunan daerah yang ditindaklanjuti	%	80		82		83,5		84		85		85,5		86
5.02 KEUANGAN						**1.172.280.370.961**		**1.259.663.977.032**		**1.317.999.712.864**		**1.351.924.255.117**		**1.382.398.898.289**		**1.412.965.601.811**	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Skor	81,26	158.768.552.808	85,00	161.141.530.203	85,00	169.489.461.992	85,00	171.621.058.716	85,00	172.941.179.397	85,00	175.279.610.198	85,00
				Kategori	A		A		A		A		A		A		A

Bidang Urusan	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Tahun Proyeksi											
					Kondisi Eksisting (Tahun 2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	PROGRAM URUSAN					1.013.511.818.153		1.098.522.446.828		1.148.510.250.872		1.180.303.196.401		1.209.457.718.892		1.237.685.991.613	
	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	1. Nilai Indeks Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD terkait BMD	Indeks	0,37	4.255.102.469	0,38	3.127.619.294	0,39	3.190.171.679	0,40	3.253.975.113	0,41	3.319.054.615	0,42	3.385.435.708	0,43
			2. Nilai Indeks Ketepatan waktu penetapan RKBMD	Indeks	0,05		0,06		0,07		0,08		0,09		0,10		0,11
			3. Nilai Indeks Ketepatan waktu penyampaian Laporan BMD	Indeks	0,12		0,13		0,14		0,15		0,16		0,17		0,18
			4. Nilai Indeks Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Pengawasan Pengendalian	Indeks	0,4		0,41		0,42		0,43		0,44		0,45		0,46
			5. Nilai Indeks Tindak lanjut rekomendasi temuan BPK RI terkait BMD	Indeks	0,3		0,31		0,32		0,33		0,34		0,35		0,36
			6. Nilai Indeks Tindak lanjut Pengelolaan BMD	Indeks	0,32		0,33		0,34		0,35		0,36		0,37		0,38
		Meningkatnya realisasi PAD atas pemanfaatan barang milik daerah (BMD) yang produktif	Nilai Indeks Realisasi penerimaan atas pemanfaatan BMD	Indeks	0,2		0,21		0,22		0,23		0,24		0,25		0,26
		Tertibnya administrasi pengamanan BMD	Nilai Indeks Sertifikasi dokumen kepemilikan BMD	Indeks	0,23		0,24		0,25		0,26		0,27		0,28		0,29
	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Terwujudnya Ketepatan Waktu Penyusunan Raperda APBD dan Raperda	Persentase ketepatan waktu penyampaian Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD sesuai tahapan	%	50	998.298.261.484	100	1.083.865.079.535	100	1.133.235.731.193	100	1.164.964.873.288	100	1.194.054.316.276	100	1.222.216.207.905	100

Bidang Urusan	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Tahun Proyeksi													
					Kondisi Eksisting (Tahun 2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
		Perubahan APBD sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan	yang diatur dalam peraturan perundang-undangan															
		Terpenuhinya kesesuaian alokasi belanja wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1. Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD	%	29,73		33,29		32,89		30,00		30,00		30,00		30,00	
			2. Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	21,70		35,11		37,55		40,00		40,00		40,00		40,00	
			3. Persentase belanja pendidikan	%	10,58		11		11,5		12		12,5		13		13,5	
			4. Persentase belanja kesehatan	%	18,94		23,00		23,5		24		24,5		25		25,5	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah Kab/Kota	Persentase ketepatan waktu penyampaian hasil evaluasi Raperda APBD/Perubahan APBD dan Raperda Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota	%	100		100		100		100		100		100		100	
		Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Manajemen Pengelolaan Kas Daerah	Persentase realisasi belanja terhadap APBD	%	95,65		95		95		95		95		95		95	
		Terwujudnya Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan	Persentase Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan	%	100		100		100		100		100		100		100	

Bidang Urusan	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Tahun Proyeksi											
					Kondisi Eksisting (Tahun 2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Perangkat Daerah	Perangkat Daerah dan BLUD														
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pendapatan Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Daerah Lainnya	Proporsi Dana Transfer terhadap Pendapatan Daerah	%	50,33		57,02		54,27		53,96		53,64		53,31		52,98
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan ketersediaan sumber Pendanaan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah diluar DAK	%	58,82	10.958.454.200	47,01	11.529.748.000	49,29	12.084.348.000	49,45	12.084.348.000	49,63	12.084.348.000	49,84	12.084.348.000	49,93
5.03 KEPEGAWAIAN						**17.899.486.235,00**		**19.228.352.402,08**		**21.342.068.347,58**		**23.373.689.983,36**		**25.673.125.116,33**		**27.872.068.793,84**	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Skor	79,87	15.462.553.635	79,92	15.813.321.102	79,97	16.856.774.544	80,35	17.628.019.390	81,16	18.749.969.254	81,97	20.105.600.727	82,79
				Kategori	BB		BB		BB		A		A		A		A
	PROGRAM URUSAN					2.436.932.600		3.415.031.300		4.485.293.804		5.745.670.593		6.923.155.862		7.766.468.067	
	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Meningkatnya kualitas penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN, pengadaan ASN, pengangkatan ASN, jaminan pensiun dan hari tua, pensiun, serta perlindungan ASN.	Nilai NSPK Elemen penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN, pengadaan ASN, pengangkatan ASN, jaminan pensiun dan hari tua, pensiun, serta perlindungan ASN.	Point	35,75 (2023)	2.436.932.600	37,60	3.415.031.300	38,00	4.485.293.804	38,35	5.745.670.593	38,70	6.923.155.862	39,35	7.766.468.067	39,87
		Meningkatnya kualitas pengelolaan	Nilai NSPK Elemen Jabatan, Pangkat, Pola	Point	14,05 (2023)		16,10		16,30		16,70		17,10		17,30		17,90

Bidang Urusan	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Tahun Proyeksi											
					Kondisi Eksisting (Tahun 2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		jabatan, pangkat, pola karier, dan mutasi ASN.	Karier, dan Mutasi.														
		Meningkatkan Kualitas Pengembangan Karier ASN	Nilai NSPK Elemen Pengembangan Karier	Point	3,79 (2023)		3,79		3,80		3,90		4,00		4,20		4,30
		Meningkatkan Kualitas Penilaian kinerja, penghargaan, disiplin, cuti, kode etik, pemberhentian, serta penggajian, tunjangan, dan fasilitas	Nilai NSPK Elemen Penilaian kinerja, penghargaan, disiplin, cuti, kode etik, pemberhentian, serta penggajian, tunjangan, dan fasilitas	Point	24,82 (2023)		25,43		26,09		26,94		27,64		28,14		28,75
		Meningkatnya ASN yang terpetakan kompetensinya untuk mendorong peningkatan kualitas pengembangan karir yang disesuaikan dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karir.	Nilai NSPK Elemen Pengembangan Karier	Point	3,79 (2023)		3,79		3,80		3,90		4,00		4,20		4,30
			Presentase ASN yang sudah dinilai Kompetensinya (croscutting dengan bidang pengembangan)	Persen	6,22		9,84		13,46		17,09		20,71		24,33		27,96
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						**31.560.141.575,00**		**32.479.445.156,00**		**34.546.507.324,00**		**37.416.171.035,00**		**39.072.443.249,00**		**42.992.944.993,00**	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Skor	77,23	18.952.383.959	78,00	19.554.855.156	78.78	20.161.237.324	79.57	20.787.431.035	80.37	21.434.113.249	81.17	22.101.984.993	81.98

Bidang Urusan	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Tahun Proyeksi											
					Kondisi Eksisting (Tahun 2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pada Perangkat Daerah															
				Kategori	BB		BB		BB		BB		A		A		A
	PROGRAM URUSAN					12.607.757.616		12.924.590.000		14.385.270.000		16.628.740.000		17.638.330.000		20.890.960.000	
	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Meningkatnya ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial	Persentasi ASN bersertifikat Kompetensi Manajerial	%	5	12.607.757.616	11,06	12.924.590.000	13,25	14.385.270.000	15,06	16.628.740.000	16,09	17.638.330.000	17,12	20.890.960.000	17,12
		Meningkatnya ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi Fungsional	Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Fungsional	%	2,5		6,63		6,96		7,29		7,62		7,84		8,17
		Meningkatnya ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi Teknis	Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Teknis	%	19,4		12,40		10,04		8,15		7,04		6,07		5,96
		Meningkatnya CPNS dan PPPK yang mendapatkan pelatihan dasar	Persentase CPNS dan PPPK yang lulus pelatihan dasar	%	NA		50,00		50,50		50,85		60,00		65,00		65,50
		Meningkatnya ASN yang tersertifikasi	Persentase ASN yang tersertifikasi	%	NA		40,00		45,00		50,00		55,00		60,00		65,00
		Meningkatnya hasil evaluasi ASN pasca pelaksanaan pengembangan kompetensi	Persentase hasil evaluasi pelaksanaan pengembangan kompetensi yang ditindaklannjuti	%	NA		60,00		65,00		70,00		75,00		80,00		85,00
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						**12.812.949.279,00**		**14.954.727.489,98**		**19.014.068.376,46**		**22.268.251.165,38**		**24.735.850.718,40**		**29.437.224.403,01**	
	X.XX.01 PROGRAM	Meningkatnya Kualitas	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Skor	76,63	8.377.217.549	77,40	9.154.727.490	78,17	9.934.068.376	78,95	10.780.251.165	79,74	11.699.050.718	80,54	12.696.744.403	81,34

Bidang Urusan	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Tahun Proyeksi											
					Kondisi Eksisting (Tahun 2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah															
				Kategori	BB		BB		BB		BB		BB		A		A
	PROGRAM URUSAN					4.435.731.730		5.800.000.000		9.080.000.000		11.488.000.000		13.036.800.000		16.740.480.000	
	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Meningkatnya pemanfaatan Hasil kelitbangan Dalam perencanaan pembangunan	Persentase rekomendasi kebijakan Pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan	%	-	4.435.731.730	50	4.150.000.000	60	4.565.000.000	70	5.021.500.000	80	5.523.650.000	90	6.076.015.000	100
		Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan	Persentase kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan yang termanfaatkan dalam kebijakan Pembangunan daerah	%	-		10		10		15		20		25		30
		Meningkatnya kajian yang bermanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase kajian bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah yang termanfaatkan dalam kebijakan Pembangunan daerah	%	-		50		60		70		80		90		100
		Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelian, pengembangan, pengkajian dan	Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	%	-		10		10		10		10		10		10

Bidang Urusan	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Tahun Proyeksi											
					Kondisi Eksisting (Tahun 2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		penerapan di daerah															
	5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Meningkatnya pemanfaatan dan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan	%	-	-	100	1.650.000.000	100	4.515.000.000	100	6.466.500.000	100	7.513.150.000	100	10.664.465.000	100
		Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan	Persentase kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah	%	-		10		10		15		20		25		30
		Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah	%	-		50		60		70		80		90		100
		Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimtek, dan supervisi terkait riset dan inovasi daerah	Persentase fasilitasi, pembinaan, bimtek, dan supervisi terkait riset dan inovasi daerah	%	-		10		10		10		10		10		10
5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG						**18.047.106.603**		**19.802.266.400**		**22.227.280.250**		**24.817.112.000**		**25.659.736.300**		**29.332.269.300**	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Skor	75,61	17.034.007.003	75,75	17.188.746.300	76,00	18.783.760.450	76,25	19.183.592.200	76,50	19.183.592.200	76,75	21.513.417.200	77,00

Bidang Urusan	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Tahun Proyeksi													
					Kondisi Eksisting (Tahun 2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
	DAERAH PROVINSI																	
				Kategori	BB		BB		BB		BB		BB		BB		BB	
	PROGRAM URUSAN					1.013.099.600		2.613.520.100		3.443.519.800		5.633.519.800		6.476.144.100		7.818.852.100		
	5.07.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Terpenuhinya pelayanan publik yang adaptif dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB	1. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Badan Penghubung	%	95,24	1.013.099.600	95,50-95,75	2.613.520.100	95,75-96,00	3.443.519.800	96,00-96,25	5.633.519.800	96,25-96,50	6.476.144.100	96,50-97	7.818.852.100	>97	
			2. Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Badan Penghubung (Retribusi)	%	6,56		3-4		4-5		5-6		6-7		7-8		>8	
6.01 INSPEKTORAT DAERAH						**31.528.629.372,00**		**45.443.150.160,00**		**58.734.604.664,80**		**70.074.642.804,74**		**73.057.082.088,89**		**74.851.243.670,51**		
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Skor	84,05	28.961.024.872	84,09	30.773.795.660	84,13	37.057.009.530	84,17	45.378.719.816	84,21	46.440.081.410	84,25	47.342.283.852	84,29	
				Kategori	A		A		A		A		A		A		A	
	PROGRAM URUSAN					2.567.604.500		14.669.354.500		21.677.595.135		24.695.922.989		26.617.000.679		27.508.959.818		
	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Meningkatnya Kerjasama antara APIP dan APH dalam Rangka Penanganan Kasus Tipikor	Persentase Permintaan Audit Tujuan Tertentu atas Tipikor yang Ditindaklanjuti	%	100	1.160.845.500	100	12.394.215.500	100	17.565.201.965	100	20.182.158.024	100	21.817.622.765	100	22.359.600.567	100	
		Meningkatnya Efektivitas Pengawasan	Persentase Nilai MCSP di Atas Rata-Rata Nasional	%	76		77		78		78		79		79		79	

Bidang Urusan	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Tahun Proyeksi													
					Kondisi Eksisting (Tahun 2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
		Pencegahan Korupsi																
		Meningkatnya Efektifitas Pembinaan/ Pengawasan di Wilayah Binaan Itban I	Persentase Penurunan Nilai Kerugian Negara/Daerah pada Perangkat Daerah Wilayah Binaan Itban I	%	5		5		5		6		6		6		6	
		Meningkatnya Efektifitas Pembinaan/ Pengawasan di Wilayah Binaan Itban II	Persentase Penurunan Nilai Kerugian Negara/Daerah pada Perangkat Daerah Wilayah Binaan Itban II	%	6,50		7,00		7,50		8,00		8,50		9,00		9,50	
		Persentase Penurunan Nilai Kerugian Negara/Daerah pada Perangkat Daerah Wilayah Binaan Itban III	Persentase Penurunan Nilai Kerugian Negara/Daerah pada Perangkat Daerah Wilayah Binaan Itban III	%	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00	
		Persentase Penurunan Nilai Kerugian Negara/Daerah pada Perangkat Daerah Wilayah Binaan Itban IV	Persentase Penurunan Nilai Kerugian Negara/Daerah pada Perangkat Daerah Wilayah Binaan Itban IV	%	1		1,10		1,15		1,20		1,25		1,30		1,35	
		Meningkatnya Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP	Persentase Rata-Rata Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan APIP	%	84,00		85,00		86,00		87,00		88,00		89,00		90,00	
		Meningkatnya Tuntutan Ganti Rugi yang Diselesaikan	Persentase Tuntutan Ganti Rugi yang Diselesaikan	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	

Bidang Urusan	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Tahun Proyeksi											
					Kondisi Eksisting (Tahun 2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah Dalam Proses PBJ	Persentase Kepatuhan Proses Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah	%	20		25		30		35		40		45		50
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Unsur Pengawasan	Nilai AKIP Komponen Evaluasi Internal	Nilai	14,95		15,16		15,37		15,58		15,79		16,00		16,21
		Meningkatnya Kepatuhan Penerapan Kriteria Dalam Penyusunan LPPD	Persentase Kehandalan Capaian IKK LPPD Pemerintah Daerah	%	100		100		100		100		100		100		100
		Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Rekomendasi Hasil Reviu LKPD yang Ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		100
	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Pencegahan Korupsi	Persentase Nilai MCSP di Atas Rata-Rata Nasional	%	76	1.406.759.000	77	2.275.139.000	78	4.112.393.170	78	4.513.764.965	79	4.799.377.914	79	5.149.359.251	79
		Persentase Nilai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)	Persentase Nilai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)	%	-		50		55		60		65		70		75
		Meningkatnya Mutu dan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan	Persentase Peningkatan Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal	%	-		1,43		2,11		2,76		3,09		3,26		3,40
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Unsur	Nilai AKIP Komponen Evaluasi Internal	Nilai	14,95		15,16		15,37		15,58		15,79		16		16,21

Bidang Urusan	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Tahun Proyeksi											
					Kondisi Eksisting (Tahun 2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Pengawasan															
		Meningkatnya Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP Terintegrasi	%	100		100		100		100		100		100		100
		Meningkatnya Perangkat Daerah yang Memenuhi Kriteria Menuju WBK/ WBBM	Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM	%	67		67		67		67		67		67		67
		Meningkatnya Pendampingan Perangkat Daerah dalam Perumusan Dokumen LPPD	Persentase Perangkat Daerah yang Mendapat Pendampingan Perumusan Dokumen LPPD	%	100		100		100		100		100		100		100
		Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Rekomendasi Hasil Reviu LKPD yang Ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		100
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						**34.814.044.202**		**36.914.800.941**		**37.614.800.941**		**90.854.458.757**		**103.174.636.549**		**36.914.800.941**	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Skor	71,99	7.327.179.735	72,71	8.445.126.027	73,44	8.545.126.027	74,17	8.811.507.660	74,91	8.906.999.941	75,66	9.154.477.456	76,42
				Kategori	BB		BB		BB		BB		BB		BB		BB
	PROGRAM URUSAN					27.486.864.467		28.469.674.914		29.069.674.914		82.042.951.096		94.267.636.609		27.760.323.485	
	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	%	58,3	153.342.000	58,88	2.009.577.500	59,47	1.498.250.750	60,07	1.981.493.000	60,67	2.170.997.348	61,27	2.229.577.500	61,89

Bidang Urusan	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Tahun Proyeksi													
					Kondisi Eksisting (Tahun 2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
	ORGANISASI KEMASYARAKATAN																	
	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	1. Persentase kebijakan di bidang ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan	%	100	299.746.000	100	1.590.031.695	100	1.672.531.695	100	1.838.038.034	100	1.838.038.034	100	1.990.031.695	100	
			2. Indeks Kerukunan Umat Beragama	%	71,14		71.68-71.7		71.96-72.02		72.24-72.35		72.51-72.67		73.07-73.2		73.35-73.64	
	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	%	76,00	695.858.300	80,00	1.360.625.269	83,00	1.503.812.850	85,00	1.828.062.957	87,00	1.986.481.844	90,00	2.060.625.269	92,00	
	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	%	100,00	3.705.500.000	100,00	4.561.000.000	100,00	4.630.463.169	100,00	4.800.800.000	100,00	4.884.155.803	100,00	4.961.000.000	100,00	
	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN	Meningkatnya etika dan budaya politik	Cakupan Pendidikan Politik kepada Masyarakat, Ormas, Lembaga Pendidikan.	%	70,00	22.632.418.167	71,60	18.948.440.450	74,50	19.764.616.450	76,30	71.594.557.105	78,00	83.387.963.579	80,00	16.519.089.021	82,00	

Bidang Urusan	Program	Outcome	Indikator Program	Satuan	Tahun Proyeksi											
					Kondisi Eksisting (Tahun 2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK																
	BELANJA DAERAH					**6.218.298.929.286,00**		**6.434.668.241.657,64**		**6.739.185.348.063,56**		**7.066.517.060.407,28**		**7.426.293.114.631,91**		**7.845.909.322.063,54**	

Sumber : Bappeda NTB, 2025 (di oalah)

4.2 Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah Provinsi NTB Tahun 2025-2030 bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Daerah (IKD).

4.2.1 Indikator Sasaran Pembangunan Kewilayahan Provinsi NTB

Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Sasaran pembangunan daerah adalah target atau tujuan yang ingin dicapai oleh suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, biasanya dalam periode lima tahunan, yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sasaran ini merupakan penjabaran dari visi dan misi daerah, serta menjadi dasar penyusunan berbagai program dan kegiatan pembangunan. Berdasarkan arahan dalam dokumen RPJMN 2025-2029 dan kebutuhan di tingkat daerah, telah ditentukan 13 indikator bersifat makro yang menjadi Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi NTB Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 4. 3 Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi NTB Tahun 2025-2029

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,30	6,00	6,90	7,70	8,50	9,30	10,10	
2	PDRB Per Kapita	(Rp. Juta)	32,28	35,80	40,93	45,25	49,58	53,90	58,22	
3	Kontribusi PDRB Provinsi	%	0,83	0,84	0,86	0,87	0,89	0,90	0,91	
4	Tingkat Kemiskinan	%	11,91	11,68-12,18	10,79-11,41	9,9-10,65	9,01-9,88	8,12-9,12	7,23-8,35	
5	Rasio Gini	Poin	0,364	0,369-0,373	0,358-0,362	0,347-0,351	0,335-0,339	0,324-0,328	0,313-0,317	
6	Indeks Modal Manusia (IMM)	Indeks	0,54 (2023)	0,56	0,57	0,58	0,59	0,60	0,61	
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	NA	15,31	21,96	28,61	35,26	41,91	48,56	
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	75,78	76,19	76,40	76,61	76,82	77,03	77,24	
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,73	2,19-2,79	2,10-2,74	2,00-2,69	1,91-2,64	1,81 - 2,59	1,72-2,54	
10	Kontribusi PDB Industri Pengolahan	%	3,87	4,21	4,91	5,61	6,30	7,00	7,30	
11	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	63,40	76,50	77,68	78,85	80,03	81,20	82,38	
12	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,50	3,55	3,65	3,70	3,75	3,80	3,85	
13	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	Indeks	NA	54,53	62,33	70,13	77,93	85,72	93,52	

Sumber : Bappeda NTB, 2025 (diolah)

4.2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah. IKU diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi. Adapun IKU pada RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 ini adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama Provinsi NTB

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Modal Manusia (IMM)	Indeks	0,54 (2023)	0,56	0,57	0,58	0,59	0,60	0,61	Sasaran Visi
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,53	0,517	0,508	0,499	0,49	0,472	0,463	IUP 40
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi :									Sasaran Visi
	- Dengan Tambang	%	5,30	6,00	6,90	7,70	8,50	9,30	10,10	
	- Non Tambang	%	3,87	6,00 - 6,50	6,02- 6,56	6,03- 6,63	6,05- 6,69	6,07- 6,75	6,09 - 7,00	
4	Kontribusi PDRB Provinsi	%	0,83	0,84	0,86	0,87	0,89	0,90	0,91	Sasaran Visi
5	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,5	3,55	3,65	3,70	3,75	3,80	3,85	Sasaran Visi
6	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	32,28	35,80	40,93	45,25	49,58	53,90	58,22	Sasaran Visi
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,73	2,19- 2,79	2,10- 2,74	2,00- 2,69	1,91- 2,64	1,81 - 2,59	1,72- 2,54	Sasaran Visi
8	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah/ Tenaga Kerja	35.182,0 0	35.408,2 4	35.585,2 8	35.763,2 0	35.942,0 2	36.121,7 3	36.302,3 4	
9	Inklusi Keuangan	%	NA	88,70	89,25	89,80	90,36	91,46	92,01	IUP 34
10	Tingkat Kemiskinan	%	11,91	11,68- 12,18	10,79- 11,41	9,9- 10,65	9,01- 9,88	8,12- 9,12	7,23- 8,35	Sasaran Visi
11	Rasio Gini	Poin	0,364	0,369- 0,373	0,358- 0,362	0,347- 0,351	0,335- 0,339	0,324- 0,328	0,313- 0,317	Sasaran Visi
12	Tingkat Inflasi	%	1,28	3-3,7	2,60- 3,61	2,20- 3,52	1,80- 3,42	1,4-3,3	1,00- 3,24	IUP 32
13	Indeks Desa	(%)	77,08	77,88	78,57	79,2	79,95	80,64	81,33	
14	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	78,44	78,83	79,23	79,62	80,02	80,42	80,82	
15	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	%	3,87	4,21	4,91	5,61	6,30	7,00	7,30	Sasaran Visi dan IUP 11

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
16	Proporsi Nilai Tambah Ekonomi Kreatif Provinsi Terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional	%	NA	0,39	0,41	0,42	0,44	0,47	0,50	IUP 13
17	Jumlah tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	349.447	382.813	418.797	458.164	501.231	548.347	600.000	IUP 12b
18	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	57,37 (2023)	58,64-58,78	59,22-59,43	59,80-60,08	60,37-60,72	60,95-61,37	61,53-62,02	IUP 37
19	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	113,64	135,41	134,34-133,30	133,27-131,18	132,20-129,07	131,13 - 126,95	130,06-124,84	IUP 44
20	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	75,78	76,19	76,4	76,61	76,82	77,03	77,24	Sasaran Visi dan IUP 42a
21	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%	NA	15,31	21,96	28,61	35,26	41,91	48,56	Sasaran Visi dan IUP 45
22	Nilai Realisasi Investasi	Rp Triliun	54,55	61,09	68,43	76,65	85,88	96,22	107,81	
23	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Indeks (Kategori)	77,99 (BB)	78,77 (BB)	79,56 (BB)	80,35 (A)	81,16 (A)	81,97 (A)	82,79 (A)	
24	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	63,4	76,50	77,68	78,85	80,03	81,20	82,38	Sasaran Visi

Sumber : Bappeda NTB, 2025

4.2.3 Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan ukuran keberhasilan dalam pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang berfungsi untuk menilai kinerja pembangunan secara komprehensif. IKD mencakup dua komponen utama, yaitu indikator makro pembangunan daerah dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menjadi ukuran langsung terhadap keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan. Melalui IKD, Pemerintah Provinsi NTB dapat memantau dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan pembangunan daerah serta mengukur efektivitas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan selama periode perencanaan.

Adapun Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Provinsi NTB Tahun 2025–2029 disusun sebagai dasar pengukuran capaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini, yang mencerminkan arah, prioritas, dan fokus pembangunan daerah secara terukur. IKD dan IKK Provinsi NTB adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Kunci

No.	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal (2024)	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)									
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**									
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	78,44	78,83	79,23	79,62	80,02	80,42	80,82	
2	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment*)	%	2,74	1,978	1,884	1,79	1,695	1,601	1,507	IUP 43b
3	Konsumsi Listrik per kapita	kWh	709	751	779	808	840	872	876	IUP 43a
4	Intensitas energi primer	SBM/Rp milyar	NA	192,23	184,56	176,89	169,22	161,55	153,88	IUP 43a
5	Kapasitas air baku	m3/detik	3,53	3,73	3,8	3,86	3,93	3,99	4,06	IUP 43c
6	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	21,09	35,83	38,46	41,1	43,73	49	51,63	IUP 43c
7	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	6,84	8	12,4	16,8	21,2	30	34,4	IUP 42b
8	Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	NA	20	25	30	35	45	50	IUP 42c
9	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	45	64	71,2	78,4	85,6	100	100	IUP 42c
10	Persentase Penurunan Emisi GRK									
	a. Kumulatif	%	NA	11,53	12,24	12,95	13,67	15,09	15,8	IUP 45a
	b. Tahunan	%	NA	19,83	21,16	22,49	23,82	26,48	27,81	IUP 45b

No.	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal (2024)	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
11	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	113,64	135,41	134,34-133,30	133,27-131,18	132,20-129,07	131,13 - 126,95	130,06-124,84	IUP 44
12	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,56	0,59	0,61	0,63	0,65	0,67	0,69	
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	75,78	76,19	76,4	76,61	76,82	77,03	77,24	IUP 42 a
14	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	%	1,6	1,59	1,59	1,58	1,57	1,56	1,56	
15	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Indeks	NA	0,536	0,539	0,543	0,546	0,553	0,556	IUP 41
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**									
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi									Sasaran Visi
	- Dengan Tambang	%	5,3	6	6,9	7,7	8,5	9,3	10,1	
	- Non Tambang	%	3,87	6,00 - 6,50	6,02-6,56	6,03-6,63	6,05-6,69	6,07-6,75	6,09 - 7,00	
2	Kontribusi PDRB Provinsi	%	0,83	0,84	0,86	0,87	0,89	0,9	0,91	Sasaran Visi
3	Tingkat Kemiskinan	%	11,91	11,68-12,18	10,79-11,41	9,9-10,65	9,01-9,88	8,12-9,12	7,23-8,35	IUP 8
4	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	32,28	35,8	40,93	45,25	49,58	53,9	58,22	Sasaran Visi
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,73 (Per Agustus)	2,19-2,79	2,10-2,74	2,00-2,69	1,91-2,64	1,81 - 2,59	1,72-2,54	IUP 15a
6	Rasio Gini	Poin	0,364	0,369-0,373	0,358-0,362	0,347-0,351	0,335-0,339	0,324-0,328	0,313-0,317	Sasaran Visi
7	Indeks Modal Manusia	Indeks	0,54 (2023)	0,56	0,568	0,576	0,59	0,6	0,608	Sasaran Visi
8	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	72,25	72,92	73,21	73,5	73,79	73,98	74,45	IUP 1/RIBK

No.	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal (2024)	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
9	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 Kelahiran Hidup	257 (SP 2020)	184	167,75	151,5	135,25	119	102,75	IUP 2a/RIBK
10	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	29,8	21,7	20,74	19,78	18,82	16,9	15,94	IUP 2b/RIBK
11	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	99,6	99,31	99,35	99,39	99,42	99,5	99,54	IUP 4
12	Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional	%	78,48	80	80	80	80	80	80	RIBK
13	Angka Kematian Balita	Per 1.000 Kelahiran Hidup	29,37	22,84	21,54	20,23	18,93	17,62	17,62	RIBK
14	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	%	NA	36	46	55	61	70	80	RIBK
15	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	%	60	80	82	84	86	88	90	RIBK
16	Persentase hipertensi dalam pengendalian	%	NA	20	25	30	35	40	45	RIBK
17	Proporsi penduduk dengan aktifitas fisik cukup	%	58,3	60,7	62,2	63,7	64,7	65,7	75,7	RIBK
18	Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total)	Jiwa	2,37	2,34	2,33	2,32	2,31	2,3	2,29	RIBK
19	Insidensi Tuberkulosis									
	a. Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*)	%	58,96	85	85	85	85	85	85	IUP 3a

No.	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal (2024)	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	b. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkolusis (*treatment success rate*)	%	88,53	95	95	95	95	95	95	IUP 3b/RIBK
20	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	7,87	8,6-8,63	8,69-8,71	8,77-8,79	8,86-8,88	9,03-9,04	9,11-9,12	IUP 5c
21	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,98	14,1-14,13	14,15-14,18	14,20-14,23	14,25-14,27	14,35-14,37	14,40-14,42	IUP 5d
22	Persentase Kab/Kota yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk:									
	a) Literasi Membaca	%	NA	10	10	20	20	30	40	IUP 5a; a)
	b) Numerasi	%	NA	0,00- 10,00	10	10	20	20	30	IUP 5a; b)
23	Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk:									
	a) Literasi Membaca	%	NA	26,24-28,74	27,28-29,78	28,32-30,82	29,36-31,86	31,44-33,94	32,48-34,98	IUP 5b; a)
	b) Numerasi	%	NA	22,68-25,18	23,48-25,98	24,28-26,78	25,08-27,58	26,68-29,18	27,48-29,98	IUP 5b; b)
24	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	9,44	10,02	10,11	10,2	10,29	10,47	10,56	IUP 6

No.	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal (2024)	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
25	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	%	84,07	84,68	85,29	85,9	86,5	87,11	87,72	
26	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	68,04	70,34	72,64	74,94	77,24	79,54	81,84	IUP 16
27	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi	%	37,16	28,65	31,96	35,27	38,57	45,19	48,5	IUP 9
28	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	71,4	71,68 - 71,7	71,96 - 72,02	72,24 - 72,35	72,51 - 72,67	73,07 - 73,2	73,35 - 73,64	IUP 38
29	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	57,37 (Tahun 2023)	58,64-58,78	59,22-59,43	59,80-60,08	60,37-60,72	60,95-61,37	61,53-62,02	IUP 37
30	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	59,99 (Tahun 2023)	61,14	61,22	61,3	61,38	61,46	61,54	
31	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	65,51	66,71	67,58	68,23	68,73	69,14	69,49	IUP 39
32	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,53	0,517	0,508	0,499	0,49	0,472	0,463	IUP 40
33	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	91,54	91,77	92	92,22	92,45	92,68	92,91	
34	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	53,67 (Tahun 2023)	53,94	54,21	54,48	54,75	55,03	55,3	
35	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan	orang	NA	0	1500	3175	5000	6700	6900	IUP 10

No.	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal (2024)	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
36	Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat kab/kota/provinsi	Unit	2	3	5	7	9	11	13	IUP 10
37	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	%	NA	74,63	75,46	76,29	77,12	78,78	79,61	IUP 7
38	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	%	50,78	53,32	55,99	58,79	61,73	64,81	67.89	
39	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	%	29,49	29	30,24	31,48	32,72	35,2	36,44	IUP 15b
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**									
1	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	%	3,87	4,21	4,91	5,61	6,3	7	7,3	IUP 11a
2	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	1,54	3,2	3,49	3,79	4,08	4,7	4,99	IUP 11b
3	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	1,75	2,03	2,12	2,22	2,31	2,50	2,59	IUP 12 a
4	Proporsi Nilai Tambah Ekonomi Kreatif Provinsi Terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional	%	12,79 (Share PDRB Ekraf terhadap Provinsi (%))	0,39	0,41	0,42	0,44	0,47	0,5	IUP 13

No.	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal (2024)	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5	Jumlah tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	349.447	382.813	418.797	458.164	501.231	548.347	600.000	IUP 12b
6	Rasio kewirausahaan Daerah	%	0,12	2,37	2,4	2,42	2,45	2,5	2,53	IUP 14b
7	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	63,4	76,5	77,68	78,85	80,03	81,2	82,38	Sasaran Visi
8	Indeks Kapabilitas Inovasi	Skor	3,27	3,5	3,58	3,65	3,73	3,8	3,88	IUP 17
9	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Indeks	NA	51,15	52,3075	53,465	54,6225	55,78	56,9375	IUP 18a
10	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	Indeks	NA	54,53	62,3285	70,127	77,9255	85,724	93,5225	Sasaran Visi
11	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	17,43	14,3	15,71	17,12	18,54	21,36	22,77	IUP 18b
12	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	5,74 (Tahun 2023)	5,7	6,24	6,38	6,52	6,7	6,94	IUP 19
13	Koefisien Variasi Harga Antar wilayah Tingkat Provinsi	Koefisien	NA	7,3	7,22	7,14	7,06	6,9	6,82	IUP 20
14	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	31,8	36,9	36,96-37,11	37,03-37,32	37,09-37,53	37,15-37,74	37,21-37,95	IUP 21
15	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	35,21	24,53-24,55	24,93-25,15	25,33-25,75	25,72-26,35	26,12-26,95	26,52-27,55	IUP 22
16	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	75,83 (Tahun 2024)	76,21	76,59	76,97	77,36	77,74	78,13	
17	Persentase Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	%	67,74	71,68-71,7	71,96-72,08	72,24-72,45	72,51-72,83	73,07-73,2	73,35-73,58	IUP 23b
18	Persentase Desa Mandiri	%	39,57	41,14	42,71	44,27	45,84	48,97	50,54	IUP 23c

No.	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal (2024)	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
19	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	1,87	1,44	1,49	1,54	1,59	1,67	1,72	IUP 31
20	Tingkat Inflasi	%	1,28	3-3,7	2,60-3,61	2,20-3,52	1,80-3,42	1,4-3,3	1,00-3,24	IUP 32
21	Indeks Kota Berkelanjutan	%	NA	60	60,53	61,06	61,58	62,11	62,64	IUP 23a
22	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	%	NA	24,62	24,93	25,23	25,54	26,15	26,46	IUP 33a
23	Aset Dana Pensiun/PDRB	%	NA	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16	IUP 33b
24	Nilai Transaksi Saham per Provinsi Berupa Nilai Rata-Rata Tahunan	Rupiah	NA	1.099.427,73	1.140.806,99	1.182.186,25	1.223.565,50	1.264.944,76	1.306.324,02	IUP 33c
25	Total Kredit/PDRB	%	NA	38	38,69	39,38	40,07	41,45	42,14	IUP 33d
26	Inklusi Keuangan	%	NA	88,7	89,25	89,8	90,36	91,46	92,01	IUP 34
27	Jumlah Kerjasama Provinsi	%		10	10,7	11,4	12,1	13,5	14,2	IUP 35
28	Indeks Ketahanan Nasional	Indeks	3,01	3,03	3,07	3,13	3,2	3,26	3,33	IUP 36
29	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level provinsi	%	NA	0,19	0,2	0,21	0,22	0,23	0,24	IUP 14ai
30	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level provinsi	%	NA	8,95	8,96	8,97	8,98	9	9,01	IUP 14aii
31	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	%	NA	2,15	2,2	2,25	2,29	2,39	2,44	IUP 14aiii
32	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	%	0,95	0,97	0,98	0,99	1,01	1,03	1,04	IUP 14c

No.	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal (2024)	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
33	Return on Asset (ROA) BUMD	%	NA	1,91	1,96	2,01	2,07	2,17	2,22	IUP 14d
34	Jumlah Produk Tersertifikasi Halal	Produk	20.258	21.185	21.650	22.086	22.496	22.855	23.215	
35	Aset Perbankan Syariah/PDRB	%	14,97	15,26	15,91	16,57	17,37	18,03	18,9	
36	Indeks Zakat Nasional	Poin	0,56	0,59	0,62	0,65	0,68	0,71	0,72	
37	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Provinsi	Indeks	91,47	91,50	91,75	92,00	92,25	92,50	92,75	
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**									
1	Nilai SAKIP	Nilai	72,88 (BB)	74,01 (BB)	75,18 (BB)	76,35 (BB)	77,59 (BB)	78,89 (BB)	80,24 (A)	
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks (Kategori)	77,99	78,77 (BB)	79,56 (BB)	80,35 (A)	81,16 (A)	81,97 (A)	82,79 (A)	
3	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	77,74	70	70,3	70,6	70,9	71,5	71,8	IUP 24
4	Indeks Pemerintah Digital	Skor	NA	1,78	1,85	1,9	1,95	2,1	2,15	
5	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3,56	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	IUP 25
6	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,42	4,03	4,06	4,09	4,11	4,17	4,2	IUP 26
7	Indeks Integritas Nasional	Indeks	NA	71,99	72,58	73,17	73,76	74,94	75,53	IUP 27
8	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM Daerah	%	NA	65	68,75	72,5	76,25	80	83,75	IUP 28a
9	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	%	27,03	70	71,43	72,85	74,28	75,7	77,13	IUP 28b

No.	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal (2024)	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
10	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	%	70,22	72	72,6	73,2	73,8	75	75,6	IUP 29
11	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	76,37	75,37-78,63	76,06-79,32	76,75-80,00	77,43-80,69	78,12-81,37	78,81-82,06	IUP 30
12	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,5	3,55	3,65	3,7	3,75	3,8	3,85	Sasaran Visi
13	Indeks Transformasi Digital Nasional	Skor	45,85 (Tahun 2022)	46,55	47,25	48,05	48,85	49,65	50,85	
14	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Indeks		77,5	80	82,5	85	87,5	90	
15	Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	NA	65	70	79	80	89	90	
16	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	%	2,826	2,927	3,052	3,165	3,245	3,356	3,415	
17	Opini BPK atas LKD	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
18	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	77,8	78,49	80,19	81,89	81,04	81,89	86,03	
19	Nilai Sistem Merit	Nilai	284,5	292	304,5	308	321,5	329	333,5	
20	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	86,03	84,3	85,5	86,7	88,31	88,5	90,01	
	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)									
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR									
1	**PENDIDIKAN**									
1	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam	%	98,65	98,70	98,75	98,80	98,85	98,90	99,00	

No.	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal (2024)	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Pendidikan Menengah (APS)									
2	Persentase Anak Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus (APS)	%	92,48	92,50	92,52	92,54	92,56	92,60	92,65	
3	Kemampuan Literasi SMA	%	64,78	65,38	65,98	66,58	67,18	67,78	68,38	
4	Kemampuan Literasi SMK	%	58,58	59,88	61,18	62,48	63,78	65,08	66,38	
5	Kemampuan Literasi SDLB	%	54,18	55,78	57,38	58,98	60,58	62,18	63,78	
6	Kemampuan Literasi SMPLB	%	61,53	62,03	62,53	63,03	63,53	64,03	64,53	
7	Kemampuan Literasi SMALB	%	61,92	62,42	62,92	63,42	63,92	64,42	64,92	
8	Kemampuan Numerasi SMA	%	55,43	57,03	58,63	60,23	61,83	63,43	65,03	
9	Kemampuan Numerasi SMK	%	51,58	53,78	55,98	58,18	60,38	62,58	64,78	
10	Kemampuan Numerasi SDLB	%	50,79	51,39	51,99	52,59	53,19	53,79	54,39	
11	Kemampuan Numerasi SMPLB	%	59,4	59,65	59,9	60,15	60,4	60,65	60,9	
12	Kemampuan Numerasi SMALB	%	59,22	59,72	60,22	60,72	61,22	61,72	62,22	
13	Persentase Ruang Kelas dalam Kondisi Baik	%	41,14	44,1	47,06	50,2	52,99	55,95	58,91	
2	**KESEHATAN**									

No.	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal (2024)	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase Pelayanan Kesehatan pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase pelayanan kesehatan pengurangan risiko KLB bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi KLB	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**									
1	Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan Provinsi	%	40	40,29	40,92	42,18	44,08	46,29	48,5	

No.	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal (2024)	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	Persentase Kondisi irigasi kewenangan Provinsi	%	62,93	65,53	68,42	71,44	74,76	78,1	81,49	
3	Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas Kab/Kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas Kab/Kota	%	15	18	23	25,5	27,5	29,5	30	
4	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air limbah domestik aman	%	5,56	6	12	18	24	30	33	
5	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	%	75,54	76,04	76,71	77,42	78,18	78,96	79,76	
4	**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN**									
1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program provinsi yang memperoleh fasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100	

No.	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal (2024)	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	penyediaan rumah yang layak huni									
3	Persentase Luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani	%	5,19	6	10	15	20	25	30	
4	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%	99,61	99,63	99,65	99,67	99,69	99,71	99,72	
5	**KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**									
1	persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	%	16,67	33,33	41,67	50	75	83,33	100	
4	persentase penanganan pra bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	

No.	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal (2024)	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6	Persentase penanganan pasca bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	**SOSIAL**									
1	Pesentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	25	30	35	40	45	50	55	
7	**TENAGA KERJA**									
1	Tersedianya RTKD Provinsi yang masih berlaku	%	40	0	50	70	80	90	100	
2	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	70	75	80	85	90	95	100	
3	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	%	50,78	53,32	55,99	58,79	61,73	64,81	67,81	
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	22,57	23,7	24,88	26,13	27,43	28,8	30,25	
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kab/Kota	%	67,47	70,84	74,39	78,1	82,01	86,11	90,42	

No.	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal (2024)	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	dalam 1 (satu) daerah Provinsi.									
6	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	%	27,73	29,12	30,57	32,1	33,71	35,39	37,16	
8	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**									
1	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	100	
9	**PANGAN**									
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	%	40,38	52,42	65,58	76,77	88,05	97,45	100	
2	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	4,27	4,27	3,42	2,56	1,71	0,85	0	
10	**PERTANAHAN**									
1	Terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100	100	100	100	100	100	

No.	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal (2024)	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
11	**LINGKUNGAN HIDUP**									
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	Indeks	75,78	76,19	76,4	76,61	76,82	77,03	77,24	
2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Provinsi	%	74,15	74,89	75,64	76,4	77,16	77,93	78,71	
12	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**									
1	Jumlah Data Profile Kependudukan yang disusun	%	100	100	100	100	100	100	100	
13	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**									
1	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	50,79	30	3,85	3,9	4,32	3,24	2,79	
2	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	%	11,66	11,76	11,89	12,01	12,13	12,25	12,38	

No.	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal (2024)	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	%	100	100	100	100	100	100	100	
14	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**									
1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata Anak per Wanita	2,37	2,34	2,33	2,32	2,31	2,3	2,29	
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	%	60,2	60,8	61,5	62,2	62,9	63,6	64,3	
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	5,9	5,57	5,24	4,91	4,58	4,25	3,92	
4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	kelahiran per 1000 perempuan	37,8	32,68	32,55	32,41	32,27	32,14	32	
15	**PERHUBUNGAN**									
1	Rasio Konektivitas	Rasio	0,82	0,83	0,84	0,85	0,86	0,87	0,88	
2	Kinerja lalu lintas provinsi	Km/Jam	NA	30	30	30	30	30	30	
3	Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem	%	NA	2,22	2,22	4,44	6,67	8,89	11,11	

No.	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal (2024)	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	manajemen keselamatan									
16	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**									
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	0	0	100	100	100	100	100	
2	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	0	7,89	100	100	100	100	100	Kondisi Awal mengikuti Perda No 5 Tahun tentang OPD, (3 dari 38 OPD)
3	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Skor	81,71	81,75	81,81	81,91	82,13	82,47	82,73	
17	**KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**									
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	NA	5,05	5,1	5,15	5,2	5,26	5,31	
2	Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	36,83	37,75	38,68	39,6	40,13	41,45	42,37	

No.	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal (2024)	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	Proporsi Usaha Kecil Menjalin Kemitraan dan Ekspor	%	63,03	63,03	68,03	73,03	78,03	83,03	88,03	
4	Pertumbuhan Wirausaha	%	4,49	4,49	4,54	4,58	4,63	4,68	4,72	
18	**PENANAMAN MODAL**									
1	Persentase peningkatan investasi di provinsi	%	36,75	12	12,01	12,02	12,03	12,04	12,05	
2	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
19	**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**									
1	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di Provinsi	Indeks	53,67 (Tahun 2023)	53,94	54,21	54,48	54,75	55,03	55,3	
2	Persentase atlet yang masuk Pelatnas	%	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1	0,11	0,12	
20	**STATISTIK**									
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Skor	2,77	2,77	2,8	2,85	2,9	3	3,1	
21	**PERSANDIAN**									
1	Indeks Keamanan Informasi	Skor	437	456	480	520	545	584	647	
22	**KEBUDAYAAN**									
1	Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
23	**PERPUSTAKAAN**									
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	60,42	61	62	62,5	63,5	64,5	65	

No.	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal (2024)	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	65,67	65,92	66,17	66,42	66,67	66,92	67,17	
24	**KEARSIPAN**									
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	70,08	70,5	71	71,5	72	72,5	73	
	URUSAN PILIHAN									
25	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**									
1	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	248.580,72	251.066,00	253.577,00	256.113,00	258.674,00	261.261,00	263.873,00	
2	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	968.165,67	980.889,00	987.164,00	1.004.561,00	1.022.623,00	1.041.418,00	1.060.933,00	
3	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	%	100	100	100	100	100	100	100	
26	**PARIWISATA**									
1	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	%	1,75	2,03	2,12	2,22	2,31	2,50	2,59	
2	Persentase pertumbuhan Kunjungan wisatawan	%	4,51	4,74	4,97	5,22	5,48	5,76	6,05	
3	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	%	NA	50	52,5	55,13	57,88	60,78	63,81	
27	**PERTANIAN**									
1	Peningkatan produksi tanaman pangan	%	-5,86	0,56	0,57	0,58	0,59	0,6	0,61	

No.	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal (2024)	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	Peningkatan Produksi Hortikultura	%	-13,92	1	1,02	1,04	1,06	1,07	1,08	
3	Peningkatan Produksi Perkebunan	%	1,06	0,22	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	
4	Peningkatan Produksi komoditas Peternakan	%	1	2	3	3,06	3,12	3,18	3,25	
5	Persentase Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	%	80,99	81,79	82,61	83,44	84,27	85,12	85,97	
6	Persentase Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	%	69,4	70,09	70,79	71,5	72,22	72,94	73,67	
7	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 PHMS)	%	100	100	100	100	100	100	100	
28	**KEHUTANAN**									
1	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi	%	9,72	11,37	13,52	16,4	20,56	27,06	38,71	luas RHL dibagi dgn luas

No.	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal (2024)	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										lahan kritis
2	Persentase Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema hutan desa, hutan kemasyarkatan, hutan tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan	%	6,73	7,03	7,33	7,63	7,93	8,23	8,53	Persentaee pada kondisi awal (2024) sebesar 6,73 % atau 72.045,92 Ha dari luas total Kawasan Hutan NTB seluas 1.071.000 Ha (sumber data DLHK)
3	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi)	%	0,27	0,24	0,22	0,19	0,17	0,16	0,14	
29	**ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**									

No.	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal (2024)	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Peraturan Perundang-Undangan	%	100	100	100	100	100	100	100	
30	**PERDAGANGAN**									
1	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	**%**	77,75	88	89	90	91	92	93	
2	Persentase penanganan pengaduan konsumen per Provinsi	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Nilai Ekspor Barang Per Provinsi	%	24,94	29,2	29,28	29,36	29,44	29,52	29,6	
31	**PERINDUSTRIAN**									
1	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi	%	4,19	4,21	4,23	4,25	4,27	4,3	4,32	
2	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Provinsi	%	3,87	3,89	3,91	3,93	3,95	3,97	3,99	
3	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi	Orang	419926	341.328	344.742	348.189	351.671	355.188	358.740	
4	Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi	US$ Miliar	0,024	2,17	2,28	2,4	2,52	2,64	2,77	

No.	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal (2024)	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi	Rp. Triliun	24,8	8,68	8,76	8,85	8,94	9,03	9,12	
6	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	%	18,51	18,75	19,01	19,15	19,35	19,63	19,8	
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
32	**TRANSMIGRASI**									
1	Persentase Desa Maju dan Mandiri di 4 Kawasan Transrmigrasi	%	76,27	81,36	86,44	91,53	96,61	100,00	100,00	
2	Persentase Peningkatan Pendapatan perkapita masyarakat di 4 Kawasan transmigrasi	%	NA	1,10	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	
	FUNGSI PENUNJANG DAN PENGAWASAN									
33	**SEKRETARIAT DPRD**									
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Penetapan RanPerda Tahun N	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	%	NA	100	100	100	100	100	100	
34	**PERENCANAAN**									

No.	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal (2024)	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Kesesuaian antara RKPD dengan APBD	%	100	100	100	100	100	100	100	
35	**KEUANGAN**									
1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD	%	29,73	33,29	32,89	30	30	30	30	
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	49,75	58,88	58,94	59	59,06	59,11	60	
3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	88,96	90	92	94	96	98	100	
4	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	-1,62	3	3	3	3	3	3	
5	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik		21,7	35,11	37,55	40	40	40	40	
6	Persentase Penurunan SILPA	%	38,15	31	32	33	34	35	36	
36	**KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**									
1	Persentase Pegawai Pendidikan Perguruan Tinggi (ASN tidak	%	66,28	66,35	66,41	66,48	66,55	66,61	66,68	

No.	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal (2024)	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	termasuk guru dan tenaga kesehatan)									
2	Nilai Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN	Indeks	78,4 (2023)	79,65	81,45	83,25	85,05	86,75	88,99	
3	Persentase Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Implementasi *Corporate University (CORPU)*	%	NA	50	55	60	65	70	75	
37	**KESBANGPOLDAGRI**									
1	Persentase masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Politik dan Etika Budaya Politik	%	70	71,6	74,5	76,3	78	80	82	
2	Persentase Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara Daerah yang mengikuti peningkatan kapasitas bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	%	71	76	80	83	85	87	90	
38	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**									
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai	%	NA	50	60	70	80	90	100	

No.	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal (2024)	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	landasan dalam implementasi pembangunan daerah									
2	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	Rasio	0,95	0,96	0,97	0,97	0,98	0,99	1	
39	**PENGAWASAN**									
1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Level III -3,116	Integrated Level III -3,118	Integrated Level III -3,12	Integrated Level III -3,122	Integrated Level III -3,124	Integrated Level III -3,126	Integrated Level III -3,128	
2	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Level III -3,06	Terdefinisi (Level III) 3,07	Terdefinisi (Level III) 3,08	Terdefinisi (Level III) 3,09	Terdefinisi (Level III) 3,1	Terdefinisi (Level III) 3,11	Terdefinisi (Level III) 3,12	
3	Manajemen Risiko Indeks	indeks	3,213	3,219	3,226	3,232	3,239	3,245	3,252	
4	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	84	89,89	90,79	91,7	92,61	93,54	94,48	
40	**PENGADAAN**									
1	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	%	19,71	19,91	20,11	20,31	20,51	20,72	20,92	
2	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ		22,65	22,88	23,11	23,34	23,57	23,81	24,04	
3	Tingkat Kematangan UKPBJ	Level	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	
41	**PELAYANAN PUBLIK**									
1	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan	Skor	85,03	85,12	85,2	85,29	85,37	85,46	85,54	

No.	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal (2024)	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Pelayanan Publik Tahun N									
2	Survei Kepuasan Masyarakat	Indeks	86,03	84,3	85,5	86,7	88,31	88,5	90,01	

Sumber : Bappeda NTB, 2025

Istana Dalam Loka

stana Raja Sumbawa atau juga dikenal dengan nama Istana Dalam Loka terletak di kota Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa merupakan saksi sejarah yang memperlihatkan kejayaan Kesultanan Sumbawa pada zamannya. Dibangun pada 1885 oleh sultan ke-16 dari Dinasi Dewa Dalam Bawa, Sultan Muhammad Jalaluddin Syah III, rumah adat ini berbentuk panggung dengan 99 tiang penyangga kayu jati yang masi asli, merupakan kompleks pemukiman kerabat kerajaan dengan segala perangkatnya, termasuk salah satunya adalah bangunan Bala Rea.

Kab. Sumbawa, Provinsi NTB
8°30'15.6"S 117°25'39.9"E

BAB V
PENUTUP

Teluk Jelenga

Teluk pantai indah yang berada di kabupaten Sumbawa barat di Desa Beru, Kecamatan Jereweh. Berkat panorama laut yang eksotis dan ombaknya yang besar, pantai ini menjadi tempat pariwisata populer untuk olahraga air seperti berselancar. suasana pantai yang tenang dan pemandangan alam yang masih alami menawarkan tempat yang ideal untuk relaksasi dan menikmati keindahan pesisir.

Kab. Sumbawa Barat, Provinsi NTB
8°51'20.3"S 116°46'16.0"E

BAB V PENUTUP

5.1 Kaidah Pelaksanaan

5.1.1 Sinergitas Perencanaan Nasional, Provinsi, dan Kab/Kota

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2025-2029 merupakan dokumen strategis dan politis dalam melaksanakan tujuan pembangunan nasional dan daerah. RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam melaksanakan janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur NTB saat kampanye kepada seluruh masyarakat. RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 menjadi pedoman pembangunan selama 5 tahun dan rencana tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) tahunan perangkat daerah

Gambar 5. 1 Kaidah Pelaksanaan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029

Kaidah pelaksanaan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 mencakup Konsistensi, Sinergitas, Integrasi, dan Sinkronisasi, Prioritas Pembangunan, Partisipasi, Kolaborasi, dan Inklusivitas Efisiensi, Efektivitas, Transparansi, dan Akuntabilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan. Secara spesifik, dalam kerangka pembangunan jangka menengah NTB Tahun 2025-2029, melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029, visi Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”, dengan 8 Misi Presiden yang dituangkan dalam Asta Cita sebagai 8 Prioritas Nasional. Sasaran pembangunan yang terukur untuk mendukung penguatan transformasi menuju Indonesia EMAS 2045. Sasaran 1 yaitu meningkatkan pendapatan per kapita menuju setara negara maju, Sasaran 2 yaitu kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang, Sasaran 3 yaitu kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, Sasaran 4 yaitu daya saing SDM meningkat, dan Sasaran 5 yaitu intensitas emisi GRK menurun menuju Net Zero Emission.

Strategi prioritas pembangunan nasional dalam pencapaian sasaran pembangunan dikenal dengan Trisula RPJMN Tahun 2025-2029, fokus pada penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, dan pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. 45 Indikator Utama Pembangunan (IUP) menjadi platform bersama untuk menyelaraskan pembangunan nasional dan daerah. Pemerintah daerah juga berkontribusi pada capaian target indikator kinerja 45 IUP dalam perencanaan pembangunan daerah. Provinsi NTB juga mengoptimalkan implementasi 11 Kegiatan Prioritas Utama (KPU) sebagai kebijakan terintegrasi dengan daya ungkit tinggi untuk mendukung sasaran pembangunan nasional. Untuk itu, diperlukan dukungan program-program prioritas daerah yang dapat meningkatkan daya ungkit dari 11 KPU di Provinsi NTB.

Desain RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 ini Provinsi NTB dengan visi "BANGKIT BERSAMA MENUJU NTB PROVINSI KEPULAUAN YANG MAKMUR MENDUNIA", menggunakan pendekatan pengarusutamaan pembangunan yang mencakup: 1). Gender, Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) atau kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial, 2). ekonomi hijau, ekonomi biru, ekonomi sirkular, 3). transformasi digital, 4). tujuan pembangunan berkelanjutan, serta 5). kebencanaan. Kaidah pelaksanaan memperhatikan lima komponen pengarusutamaan ini, mendorong transformasi dari *government centric* menuju *citizen centric* sesuai amanat RPJMN Tahun 2025-2029.

Dalam implementasi RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029, Pemerintah Provinsi NTB fokus pada Triple Agenda NTB Makmur Mendunia. Triple Agenda ini terdiri dari Pengentasan Kemiskinan, Penguatan Ketahanan Pangan melalui pembangunan ekosistem industri pertanian dan subsektornya, dan menjadikan NTB destinasi pariwisata berkelas dunia. Implementasi RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 memerlukan regulasi dan kebijakan daerah pendukung untuk meningkatkan tata kelola perencanaan dan penganggaran daerah, optimalisasi petunjuk teknis implementasi program unggulan pemerintah provinsi NTB tahun 2025-2029, peningkatan kinerja di tingkat perangkat daerah kelompok kerja data, perencanaan, penganggaran, dan pengendalian pembangunan daerah pada masing-masing perangkat daerah. RPJMD ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi NTB, untuk mewujudkan capaian indikator kinerja program spesifik yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Penyelarasan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah menjamin konsistensi tujuan dan sasaran pembangunan daerah jangka menengah. Hal ini akan bermanfaat untuk mengawal implementasi rencana pembangunan daerah dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah, yang berkontribusi pada target capaian indikator pembangunan nasional yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029.

Selanjutnya, implementasi RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 dijabarkan secara sinergis dalam RPJMD Kab/Kota di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Untuk wilayah Pulau Lombok, RPJMD Kab/Kota mengacu pada arah pengembangan kewilayahan yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dan

dijabarkan dalam RPJMD Provinsi NTB. Strategi ini juga mengacu pada arah kebijakan RTRW Provinsi NTB Tahun 2024-2044 untuk Pulau Lombok yaitu: 1). Pengelolaan Sumber Daya Air yang Lestari dalam Sistem Satu Pulau; 2). Pemanfaatan Sumber Energi Baru Terbarukan; 3). Penanggulangan Sampah dan Limbah Terpadu; 4). Manajemen Pengelolaan Transportasi Berbasis Aksesibilitas/Mobilitas Satu Pulau; 5). Kualitas Sarana dan Prasarana Satu Pulau yang Tangguh Bencana; 6). Manajemen Penanggulangan Bencana.

Untuk wilayah Pulau Sumbawa, RPJMD Kab/Kota mengacu pada arah pengembangan kewilayahan yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dan dijabarkan dalam RPJMD Provinsi NTB. Strategi ini juga mengacu pada arah kebijakan RTRW Provinsi NTB Tahun 2024-2044 untuk Pulau Sumbawa yaitu 1). Meningkatkan infrastruktur pendukung investasi hijau pada sektor pertanian, pertambangan dan energi, industri, dan transportasi; 2). Meningkatkan kuantitas dan kualitas sektor hijau strategis pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, pertambangan dan energi, serta industri; 3). Mengembangkan industrialisasi ramah lingkungan; 4). Mengembangkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang tangguh bencana; 5). Meningkatkan manajemen penanggulangan bencana.

Dukungan daerah pada strategi pembangunan kewilayahan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) adalah pada dukungan penyediaan lahan pada lokasi yang akan diintervensi, penyiapan dukungan masyarakat untuk mengurangi dampak sosial ekonomi, penyiapan RTRW dan RDTR serta kelengkapan dokumen lainnya, percepatan perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Hal penting lainnya adalah optimalisasi penganggaran termasuk dana desa, penyiapan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah, dan penataan dan pengelolaan berkelanjutan pada kawasan permukiman/perkotaan di kawasan pertumbuhan.

5.1.2 Sinergitas Pendanaan Pembangunan Daerah

Sejalan dengan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, sinergitas pendanaan pembangunan menjadi kaidah penting dalam implementasi perencanaan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi NTB. Sinergitas pendanaan ini juga menjadi bagian dari sinergitas pembangunan secara keseluruhan. Peran pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah Pusat, bukan hanya menyediakan alokasi anggaran untuk pembangunan di NTB, tetapi juga menjalankan peran sebagai Orkestrator dan Fasilitator. Sinergitas sumber pendanaan untuk mendorong pembangunan wilayah diantaranya meliputi :

a. APBD Murni Provinsi dan Kab/Kota
b. Belanja Kementerian/Lembaga
c. Transfer ke Daerah dan Dana Desa termasuk Dana Alokasi Khusus
d. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
e. Pinjaman/hibah dari luar negeri (PHLN)

f. Investasi Swasta, serta sumber pendanaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Secara umum, sinergitas pendanaan pembangunan daerah di Provinsi NTB dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 5. 2 Sinergi Sumber Pendanaan Pembangunan Daerah

Dalam implementasinya, pemanfaatan sumber-sumber pendanaan ini dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku pada kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kab/Kota, dan pemerintah desa. Selanjutnya, akan dioptimalkan kerja sama kemitraan dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini dilaksanakan oleh pemerintah dengan pihak non-pemerintah, sektor swasta, LSM/NGO, perrguruan tinggi, dan mitra pembangunan lainnya.

5.2 Kerangka Pengendalian

5.2.1 Pengendalian Pelaksanaan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029, kerangka pengendalian dan evaluasi dilaksanakan pada tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan. Desain transformasi pengendalian dan evaluasi pembangunan nasional ini didukung oleh sistem informasi terpadu, manajemen risiko pembangunan nasional, dan tata kelola pembangunan. Sistem informasi terpadu bertujuan untuk mewujudkan pengendalian dan evaluasi lebih efisien dan efektif. Manajemen risiko pembangunan nasional bertujuan kebijakan pembangunan yang responsof dan antisipatif terhadap dinamika peluang dan tantangan. Tata kelola data pembangunan bertujuan untuk pengendalian berbasis bukti yang terukur.

Mengacu pada sistem informasi terpadu, perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah mengoptimalkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. SIPD ini bertujuan untuk sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah, penganggaran, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah. Pemerintah nasional dapat memantau aliran data capaian intervensi pusat di daerah dan intervensi daerah. Ekosistem perencanaan, penganggaran, dan monitoring evaluasi daerah yang mendukung transparansi, akuntabilitas, kemitraan, dan kolaborasi lintas pemerintahan, lintas sektor, dan non-pemerintahan. Proses pengendalian perencanaan dan pengendalian pelaksanaan didukung dengan pengumpulan data untuk pemantauan dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah.

Kerangka pengendalian RPJMD Tahun 2025-2029 bertujuan untuk menjamin agar implementasi program pembangunan daerah dapat mewujudkan tujuan pembangunan daerah. Kerangka pengendalian jangka menengah 5 tahunan ini berupaya menjembatani capaian kinerja tahunan yang berkontribusi untuk pembangunan jangka panjang 20 tahun. Pengendalian perencanaan dan pengendalian pelaksanaan jangka menengah dijabarkan dalam pengendalian perencanaan dan pengendalian pelaksanaan tahunan.

Gambar 5. 3 Keterkaitan pengendalian perencanaan dan pengendalian pelaksanaan dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD

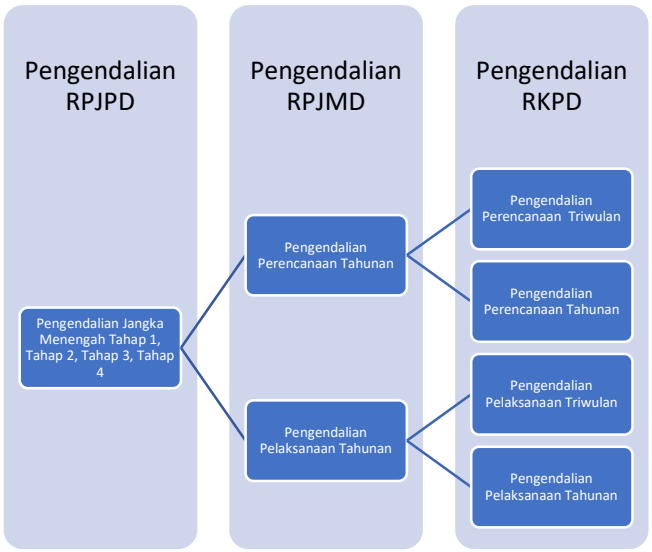

Pengendalian pembangunan jangka menengah Provinsi NTB dilaksanakan dengan melakukan:

1. Monitoring dan evaluasi tahunan implementasi RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029
2. Mid-term review RPJMD pada tahun kedua pelaksanaan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029
3. Evaluasi Akhir Pelaksanaan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029

Secara inklusif, dilakukan juga proses pengendalian, monitoring, dan evaluasi secara berkala untuk Program Unggulan Unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2025-2029. Hal ini penting untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam capaian kinerja program unggulan yang berkontribusi langsung pada capaian target indikator kinerja visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB.

Dokumen hasil pengendalian, monitoring, dan evaluasi ini menjadi dasar untuk mereview strategi, arah kebijakan, desain program dan kegiatan, target sasaran dan capaian indikator kinerja pembangunan daerah di Provinsi NTB. Hal ini mendukung implementasi konsep transformasi sebagai fondasi pembangunan daerah pada tahap pertama darri kerangka pembangunan jangka panjang Provinsi NTB, menuju NTB Emas 2045.

5.2.2 Manajemen Risiko Pembangunan Nasional dan Daerah

Kebijakan dan implementasi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) Lintas Sektor menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan di tingkat daerah. MRPN menjadi basis penguatan perencanaan pembangunan nasional, yang perlu mendapat dukungan di tingkat pemerintah daerah. Secara regulasi, MRPN mengacu pada amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional. Peraturan ini menjabarkan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) sebagai suatu kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan entitas MRPN untuk mengelola risiko pembangunan nasional. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), bertujuan untuk mengimplementasikan sistem pengendalian intern pemerintah. Sistem ini diawali dengan penilaian risiko yang kemungkinan mengancam tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Risiko ini menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Penilaian risiko dilaksanakan oleh pimpinan instansi pemerintah, mencakup identifikasi risiko dan analisis risiko. Pimpinan Instansi Pemerintah menggunakan tujuan pada tingkat instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan, menetapkan strategi operasional yang konsisten dan strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko. Sejalan dengan amanat Peraturan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Penerapan Kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor. Manajemen risiko lintas sektor ini bertujuan mengelola risiko untuk mendukung peningkatan capaian sasaran pembangunan nasional dan kebijakan manajemen risiko pembangunan nasional lintas sektor.

MRPN bertujuan untuk meningkatkan pencapaian sasaran pembangunan nasional, kualitas tata kelola penyelenggaraan negara, dan efektivitas sistem pengendalian intern dan berkembangnya inovasi pelayanan publik. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, MRPN dilaksanakan dengan 9 prinsip MRPN sebagai berikut:

Gambar 5. 4 Sembilan Prinsip Manajemen Risiko Pembangunan Nasional

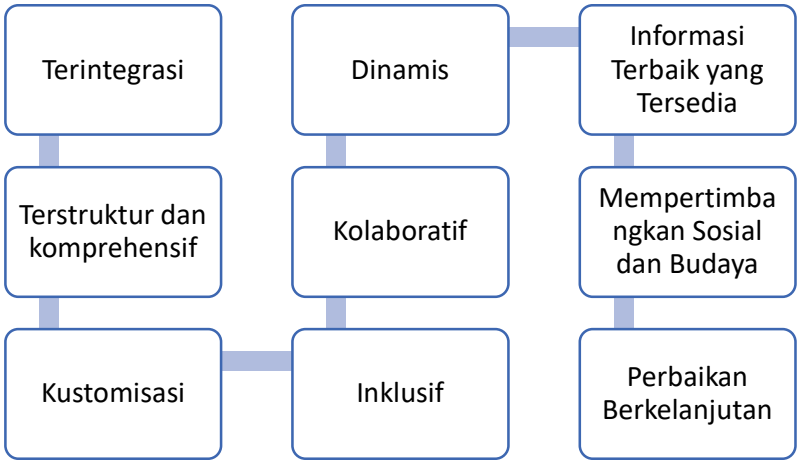

Sumber: Pasal 5 - Perpres 39/2023: Manajemen Risiko Pembangunan Nasional

Manajemen risiko adalah bagian integral dari semua aktivitas organisasi. Pendekatan terstruktur dan komprehensif terhadap manajemen risiko berkontribusi terhadap hasil yang konsisten dan terstruktur. Kerangka kerja dan proses manajemen risiko disesuaikan dan proporsional dengan konteks eksternal dan internal organisasi yang berkaitan dengan sasarannya. Pelibatan yang sesuai dan tepat waktu dari pemangku kepentingan memungkinkan pengetahuan, pandangan, dan persepsi mereka untuk dipertimbangkan. Ini menghasilkan peningkatan kesejahteraan dan manajemen risiko terinformasi. Risiko dapat muncul, berubah, atau hilang seiring perubahan konteks eksternal dan internal organisasi. Manajemen risiko mengantisipasi, mendeteksi, mengakui, dan menanggapi perubahan dan peristiwa tersebut secara sesuai dan tepat waktu. Masukan manajemen risiko didasarkan atas informasi historis dan saat ini, dan juga harapan masa depan. Manajemen risiko secara eksplisit memperhitungkan segala batasan dan ketidakpastian yang berkaitan dengan informasi dan harapan tersebut. Perilaku dan budaya manusia secara signifikan mempengaruhi semua aspek manajemen risiko pada semua tingkatan dan tahapan.

Dalam membangun keselarasan MRPN di tingkat nasional dan di tingkat daerah, objek MRPN Organisasi Pemerintah Daerah adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) dan/atau intervensi Pemerintah Daerah yang mendukung sasaran Objek MRPN Lintas Sektor yang ditetapkan oleh Komite MRPN. IKU dan/atau intervensi pemerintah daerah yang mendukung sasaran Non-Objek MRPN Lintas Sektor, yang bersifat strategis namun belum ditetapkan oleh Komite MRPN, dan prioritas Kepala Daerah. Mengacu pada amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang MRPN, Kementerian PPN/Bappenas mengembangkan Sistem Informasi MRPN, diharapkan terdapat mekanisme pertukaran data dengan aplikasi SIPD yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Melalui aaplikasi SIPD, MRPN ti tingkat nasional dapat diselaraskan dengan MRPN di tingkat daerah.

5.2.3 Tata Kelola Pembangunan Daerah

Tata kelola pembangunan daerah bertujuan untuk mendukung proses pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah jangka menengah. Dukungan sistem data yang berkualitas dan sistem manajemen pengetahuan menjadi kunci terwujudnya optimalisasi pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Data berkualitas menjadi elemen penting dalam kebijakan berbasis bukti untuk implementasi RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) menjadi dasar kebijakan Satu Data Indonesia, yang diimplementasikan di Provinsi NTB. Kebijakan SDI ini fokus pada implementasi prinsip SDI, yaitu penggunaan standar data, menerapkan format baku metadata, menggunakan kode referensi/data induk yang telah disepakati, dan kemampuan interoperabilitas data pembangunan daerah. Agenda transformasi digital di Provinsi NTB mengoptimalkan tata kelola data pembangunan daerah untuk meningkatkan ekosistem layanan publik yang berkualitas. Harapannya, tata kelola data dapat meningkatkan akses data lintas perangkat daerah di Provinsi NTB secara cepat, aman, dan berkualitas. Proses perencanaan dan pengendalian pembangunan sesuai kebutuhan dan standar kualitas. Hal ini dapat mengurangi duplikasi program dan kegiatan yang tidak tepat sasaran. Sumber daya pembangunan Provinsi NTB dapat dioptimalkan untuk mencapai target indikator pembangunan daerah dan tujuan pembangunan daerah. Optimalisasi peran strategis NTB Satu Data dan Forum NTB Satu Data merupakan strategi membangun ekosistem tata kelola data yang berkualitas. Harapannya, seluruh desain program dan kegiatan pembangunan NTB dalam kerangka jangka menengah dapat dilaksanakan secara optimal untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan NTB.

5.3 Kesimpulan

Dokumen RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah tahap pertama dalam kerangka rencana pembangunan jangka panjang 20 tahun di Provinsi NTB, yaitu tahun 2025-2045. Kerangka pembangunan jangka menengah ini dilaksanakan dengan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029, visi Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”, dengan 8 Misi Presiden yang dituangkan dalam Asta Cita sebagai 8 Prioritas Nasional. Sasaran pembangunan yang terukur untuk mendukung penguatan transformasi menuju Indonesia EMAS 2045. Sasaran pembangunan yang terukur untuk mendukung penguatan transformasi menuju Indonesia EMAS 2045. Sasaran 1 yaitu meningkatkan pendapatan per kapita menuju setara negara maju, Sasaran 2 yaitu kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang, Sasaran 3 yaitu kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, Sasaran 4 yaitu daya saing SDM meningkat, dan Sasaran 5 yaitu intensitas emisi GRK menurun menuju Net Zero Emission.

Strategi prioritas pembangunan nasional dalam pencapaian sasaran pembangunan dikenal dengan Trisula RPJMN Tahun 2025-2029, fokus pada penurunan kemiskinan,

peningkatan kualitas SDM, dan pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. 45 Indikator Utama Pembangunan (IUP) menjadi platform bersama untuk menyelaraskan pembangunan nasional dan daerah. Pemerintah daerah juga berkontribusi pada capaian target indikator kinerja 45 IUP dalam perencanaan pembangunan daerah. Provinsi NTB juga mengoptimalkan implementasi 11 Kegiatan Prioritas Utama (KPU) sebagai kebijakan terintegrasi dengan daya ungkit tinggi untuk mendukung sasaran pembangunan nasional. Untuk itu, diperlukan dukungan program-program prioritas daerah yang dapat meningkatkan daya ungkit dari 11 KPU di Provinsi NTB.

Dokumen RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi NTB. Di tingkat Kab/Kota, RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD Kab/Kota dan RKPD Kab/Kota. Provinsi NTB mewujudkan visi “Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia”, fokus pada Triple Agenda NTB Makmur Mendunia. Triple Agenda ini terdiri dari Pengentasan Kemiskinan, Penguatan Ketahanan Pangan melalui pembangunan ekosistem industri pertanian dan subsektornya, dan menjadikan NTB destinasi pariwisata berkelas dunia. 45 Indikator Utama Pembangunan (IUP) menjadi bagian penting dari komitmen pemerintah daerah untuk mendukung capaian kinerja pembangunan naisonal Selanjutnya, pada 10 Program Unggulan yang mendukung 11 KPU sebagai bentuk dukungan pada capaian target indikator kinerja pembangunan nasional. Penjabaran RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan melibatkan pemerintah di tingkat Kab/Kota dan di tingkat desa, kolaborasi lintas sektor dan lintas pemerintahan sangat penting untuk mendukung capaian pembangunan nasional dan daerah.